

LAPORAN TAHUNAN

2020

ANNUAL REPORT



STRENGTHENING PERFORMANCE CONNECTIVITY to Support Sustainable Infrastructure Development

Memperkuat Konektivitas Kinerja untuk Mendukung
Perkembangan Infrastruktur Berkelanjutan



Tentang Tema Laporan Tahunan 2020

About the Theme of 2020 Annual Report

Tahun 2020 menjadi tahun yang dipenuhi dengan berbagai tantangan dan kendala akibat pandemi Covid-19 yang secara masif menyebar dan meluas hingga seluruh belahan dunia. Adanya pandemi tersebut berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dunia, dan turut mempengaruhi pergerakan bisnis global, termasuk bisnis operasional pembangunan infrastruktur.

Menyadari situasi tidak terhindarkan tersebut, PT Nusantara Infrastructure Tbk menyusun langkah untuk menghadapi kondisi tersebut agar tidak memberi dampak yang sangat signifikan pada aktivitas operasional bisnis yang dilakukan Perusahaan.

Langkah tersebut kemudian didukung dengan adanya bisnis infrastruktur Perusahaan yang terdiversifikasi dan telah terbukti mampu mendukung Perusahaan menghadapi tantangan dan menangani gangguan yang muncul akibat pandemi. Untuk itulah, penguatan hubungan kinerja dari seluruh anak Perusahaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mendukung Perusahaan mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terus berkelanjutan, terutama di tengah kondisi tidak kondusif akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020.

Selain itu, Perusahaan memastikan aktivitas operasi tetap berjalan dengan baik kendati harus dijalankan di tengah kondisi tidak kondusif dengan menjalankan penerapan cara kerja baru melalui konsep kerja dari rumah (*Work from Home/WFH*) secara efektif. Dengan memanfaatkan perkembangan jaringan media internal, Perusahaan dapat dengan sigap, tepat, dan lancar mengatur protokol kerja *Work from Home* (WFH) dan *Work from Office* (WFO) untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan setiap harinya.

Berkat adanya upaya yang disertai komitmen tinggi dari seluruh insan Perusahaan untuk tetap menjaga kinerja, meningkatkan kualitas performa, serta memperkuat keunggulan operasional dari Unit Bisnis, Perusahaan mampu menghadapi tantangan yang hadir di sepanjang tahun 2020 dan mempertahankan kestabilan bisnisnya di bidang infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat terus terwujud.

Berangkat dari upaya dan komitmen yang dilakukan Perusahaan untuk memperkuat konektivitas kinerja sekaligus keunggulan bisnis dalam menghadapi kondisi saat ini, Perusahaan mengambil tema dengan tajuk **"Strengthening Performance Connectivity to Support Sustainable Infrastructure Development"** untuk Laporan Tahunan 2020 PT Nusantara Infrastructure Tbk.

The year 2020 was a year of various challenges and obstacles due to the Covid-19 pandemic, which has massively spread and expanded to all parts of the world. The existence of this pandemic had an impact on the social and economic life of the world's communities and affected the movement of global businesses, including the operations of infrastructure development.

Realizing this inevitable situation, PT Nusantara Infrastructure Tbk drawn up several steps to deal with this condition to prevent its significant impact on the Company's business operations.

This move was supported by the Company's diversified infrastructure business, which has been proven to be able to support the Company in facing challenges and dealing with disruptions arising from the pandemic. For this reason, strengthening the performance relationship of all its subsidiaries was one of the efforts made by the Company to support its realization of sustainable infrastructure development, especially in the midst of unfavorable conditions due to the Covid-19 Pandemic in 2020.

In addition, the Company ensured that operating activities continued to run well even though they must be carried out in the midst of unfavorable conditions by implementing new ways of working through the concept of effective Work from Home (WFH). By utilizing the development of the internal media network, the Company could swiftly, precisely, and smoothly manage Work from Home (WFH) and Work from Office (WFO) protocols, which were then adjusted according to the Company's daily needs.

Due to the efforts and accompanied by high commitment from all employees to maintain performance, improve the quality of performance, and strengthen operational excellence of its Business Units, the Company was able to face the challenges throughout 2020 and maintain business stability in the infrastructure sector, thus ensuring the realization of sustainable infrastructure development.

Based on the efforts and commitments made by the Company to strengthen its performance connectivity as well as business excellence in dealing with current conditions, the Company took a theme entitled **"Strengthening Performance Connectivity to Support Sustainable Infrastructure Development"** for the 2020 Annual Report of PT Nusantara Infrastructure Tbk.

01

Ikhtisar Kinerja Performance Highlights

- 8 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
- 13 Ikhtisar Saham
Share Highlights
- 15 Aksi Korporasi
Corporate Action
- 15 Informasi Penghentian Sementara
Perdagangan Saham (*Suspension*)
dan/atau Penghapusan Pencatatan
Saham (*Delisting*)
Information on Suspension or
Delisting
- 15 Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau
Obligasi Konversi
Summary of Bond, Sukuk or
Conversion Bond
- 15 Informasi Sumber Pendanaan
Lainnya
Information on Other Financing
Sources
- 16 Peristiwa Penting di Tahun 2020
2020 Key Events

02

Laporan Manajemen Management Reports

- 50 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report
- 58 Laporan Direksi
Board of Directors Report

03

Profil Perusahaan Company Profile

- 74 Informasi Umum dan Identitas
Perusahaan
General Information and Company
Identity
- 76 Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of the Company

- 78 Filosofi Logo Perusahaan
Logo Philosophy
- 80 Rekam Jejak Pencapaian
Milestones
- 88 Visi dan Misi
Vision and Mission
- 89 Nilai Perusahaan
Corporate Values
- 90 Kegiatan Usaha
Business Activities
- 94 Struktur Organisasi
Organization Structure
- 96 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile
- 100 Profil Direksi
Board of Directors Profile
- 108 Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profile
- 113 Struktur Grup
Group Structure
- 114 Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition
- 116 Struktur Pemegang Saham
Shareholder Structure
- 116 Kronologi Pencatatan Saham
Share Listing Chronology
- 118 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology
- 118 Daftar Entitas Anak dan Entitas
Asosiasi
List of Subsidiaries and Associated
Entities
- 128 Alamat Entitas Anak, Anak Tidak
Langsung, dan Asosiasi
Addresses of Subsidiaries, Indirect
Subsidiaries, and Associate Entities
- 130 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications
- 133 Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal
Capital Market Supporting
Institutions and Professions

04

Tinjauan Unit Pendukung Bisnis Overview on Business Supports

- 136 Sumber Daya Manusia
Human Resources
- 148 Teknologi Informasi
Information Technology

05

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management and Discussion Analysis

- 170 Tinjauan Ekonomi Tahun 2020
2020 Economic Overview
- 172 Tinjauan Industri Infrastruktur
Overview of the Infrastructure
Industry
- 173 Tinjauan Operasional Per Segmen
Usaha
Operational Overview Per Business
Segment
- 185 Tinjauan Keuangan
Financial Overview
- 190 Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian
Statements of Consolidated
Financial Position
- 191 Laporan Arus Kas Konsolidasian
Statements of Consolidated Cash
Flow
- 192 Kemampuan Membayar Utang
Ability to Pay Debts
- 193 Kolektabilitas Piutang
Receivable Collectability
- 193 Struktur Modal
Capital Structure
- 194 Ikatan Material untuk Investasi
Barang Modal
Material Commitments for Capital
Investment
- 195 Investasi Barang Modal
Goods and Capital Investment
- 196 Peristiwa Penting Setelah Tanggal
Pelaporan Akuntan
Significant Events After the
Accountant's Reporting Date
- 198 Dampak Perubahan Nilai Tukar
Mata Uang Asing
Impact of Changes in Foreign
Exchange Rates
- 198 Perbandingan Target dengan
Realisasi dan Proyeksi Ke Depan
Comparison of Targets with
Realization and Future Projection
- 198 Aspek Pemasaran
Marketing Aspects
- 196 Kebijakan dan Pembayaran Dividen
Dividend Payment and Policy
- 200 Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum
Use of Funds from Public Offering

Daftar Isi

Table of Contents

- 200 Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi
Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties
- 201 Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Bearing Extraordinary and Rare Events
- 202 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan
Amendments to the Law and Regulations which Have Significant Impact on the Company
- 202 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company

06

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance

- 208 Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance Commitment
- 209 Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Principles of Good Corporate Governance
- 211 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
The Purpose of Implementing Good Corporate Governance
- 211 Landasan Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Legal Basis for the Implementation of Corporate Governance
- 212 Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan OJK
Implementation of Aspects and Principles of Corporate Governance in Accordance With OJK Regulations
- 217 Struktur dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance Structure and Policy

- 218 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
- 233 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 241 Komisaris Independen
Independent Commissioner
- 243 Direksi
Board of Directors
- 262 Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Instruments of the Board of Commissioners
- 263 Komite Audit
Audit Committee
- 270 Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
- 275 Komite Investasi dan Strategi
Investment and Strategy Committee
- 277 Organ Pendukung Direksi
Board of Director's Supporting Instruments
- 278 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
- 283 Audit Internal
Internal Audit
- 285 Audit Eksternal
External Audit
- 286 Manajemen Risiko
Risk Management
- 289 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
- 291 Perkara Hukum dan Sanksi Administratif
Legal Cases and Administrative Sanctions
- 291 Etika dan Norma Perilaku
Ethics and Conduct
- 291 Keterbukaan Informasi
Information Disclosure
- 291 Keterbukaan Informasi
Information Disclosure
- 295 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

07

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

- 314 Komitmen dan Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Commitment and Policy of Corporate Social Responsibility Implementation

- 318 Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Implementation of Corporate Social Responsibility Activities
- 322 Dasar Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Legal Basis of the Implementation of Corporate Social Responsibility
- 323 Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Manager of Corporate Social Responsibility
- 324 Fokus Kegiatan dan Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Focus of Activities and Fees of Corporate Social Responsibility All Activities in the Company's Corporate
- 324 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Wajar
Corporate Social Responsibilities Related to Fair Operations
- 326 Tanggung Jawab Sosial Terkait Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Social Responsibilities Related to Fulfilling Human Rights
- 334 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan
Corporate Social Responsibility for the Environment
- 341 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan Serta Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Corporate Social Responsibilities for Labor and Occupational Safety and Health (K3)
- 344 Pelaksanaan HSE di Berbagai Sektor Usaha NI
Implementation of HSE in Various NI Business Sectors
- 350 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibilities on Social and Community Development Aspect
- 364 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Produk dan Pelanggan
Corporate Social Responsibility of the Products and Customers

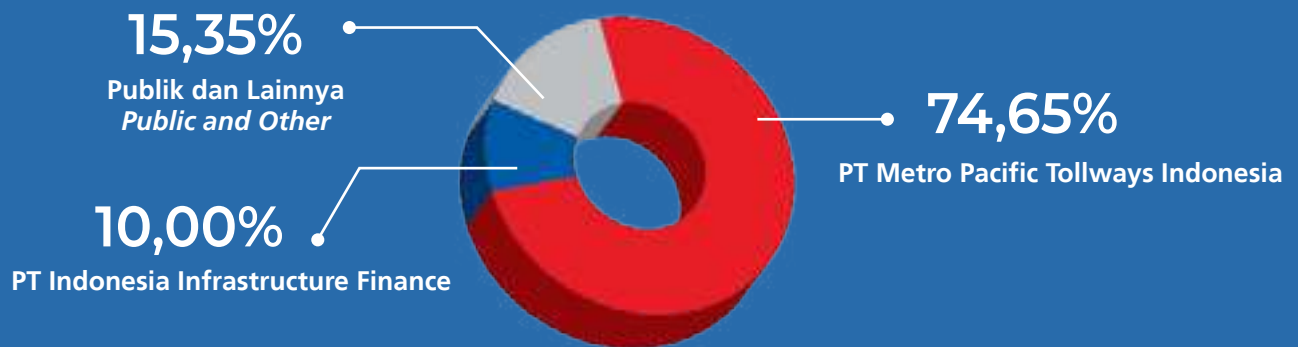
Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statement

Sekilas Tentang Kami

About Us

PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS



SEKTOR USAHA

BUSINESS SECTOR



Jalan Tol
Toll Road



Air Bersih
Clean Water



Energi Terbarukan
Renewable Energy



Pelabuhan
Port

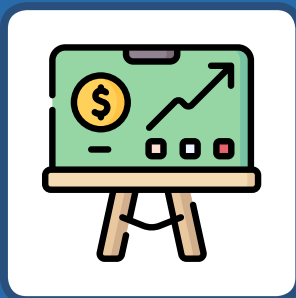
Pencapaian 2020

Achievements in 2020



Di tengah kondisi perkembangan bisnis industri yang tidak kondusif di tahun 2020, PT Nusantara Infrastructure Tbk mampu terus menjaga stabilitas bisnisnya dan mencapai kinerja yang baik sesuai dengan yang ditargetkan berkat adanya kontribusi yang diberikan oleh seluruh individu Perusahaan.

In the midst of unfavorable industrial business development conditions in 2020, PT Nusantara Infrastructure Tbk was able to continue to maintain business stability and achieve good performance as targeted thanks to the contributions made by all the Company's staff.



PENDAPATAN USAHA LAINNYA
Other Operating Income

▲ 12,14%

Di tahun 2020, Pendapatan Usaha Lainnya tercatat meningkat sebesar 12,14% dengan nominal sebesar Rp21,20 miliar jika dibandingkan nominal di tahun 2019 sebesar Rp18,90 miliar.

In 2020, Other Operating Income was recorded to increase by 12.14% with a nominal value of Rp21.20 billion from Rp18.90 billion in 2019.



ASET
Assets

▲ 15,15%

Aset Perusahaan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 15,15%, dari Rp5,07 triliun di tahun 2019 menjadi Rp5,85 triliun di tahun 2020.

The Company's assets in 2020 increased by 15.15%, from Rp5.07 trillion in 2019 to Rp5.85 trillion in 2020.

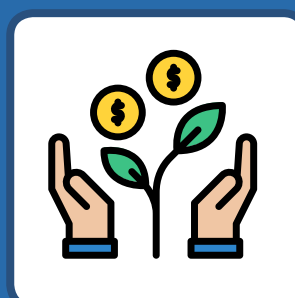


LIABILITAS
Liabilities

▲ 32,28%

Liabilitas di tahun 2020 sebesar Rp2.491,58 miliar atau meningkat sebesar 32,28% dari tahun 2019 sebesar Rp1.883,61 miliar.

Liabilities in 2020 amounted to Rp2.491,58 billion or increased by 32,28% from 2019 which was Rp1.883,61 billion.



EKUITAS
Equity

▲ 5,05%

Ekuitas mengalami kenaikan sebesar 5,05% dari Rp3.193,79 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp3.355,11 miliar pada tahun 2020.

The Equity increased by 5.05% from Rp3,193.79 billion in 2019 to Rp3,355.11 billion in 2020.



Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights



Di tengah kondisi bisnis yang tidak kondusif di tahun 2020, PT Nusantara Infrastructure Tbk berhasil menjaga stabilitas usaha dan meraih kinerja seperti yang ditargetkan. Pencapaian ini adalah kontribusi dari seluruh pegawai Perusahaan.

In the midst of unfavorable business condition in 2020, PT Nusantara Infrastructure Tbk was able to maintain business stability and achieved its performance as targeted. This achievement is contributed by all employees in the Company.



Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)	2020	2019	2018	2017	2016*	YOY 2019-2020 (%)
Pendapatan dan Penjualan* Revenues and Sales*	1.570.119	1.592.595	781.768	792.013	986.831	-1,41
Laba Bruto Gross Income	337.418	434.487	451.106	517.235	458.318	-22,34
Laba Usaha Operating Income	132.764	261.149	226.298	320.654	353.958	-49,16
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	112.622	205.367	217.086	93.115	220.021	-45,16
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit (Loss) for the Year	95.518	205.991	215.702	91.782	233.733	-53,63
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan Direct Expenses and Sales Expenses	(200.986)	(214.591)	(224.407)	(227.862)	(187.216)	6,34
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan kepada: / Profit (Loss) Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk / Owner of Parent Entity	69.392	143.814	179.651	38.700	148.269	-51,75
Kepentingan Non Pengendali / Non-Controlling Interest	43.230	61.553	37.434	54.415	71.752	-29,77



Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)	2020	2019	2018	2017	2016*	YOY 2019-2020 (%)
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Profit (Loss) Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	57.939	144.019	178.042	37.655	162.009	-59,77
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	37.579	61.972	37.660	54.127	71.724	-39,36
EBITDA	241.231	351.958	334.409	450.972	456.360	-31,46
Jumlah Saham (dalam jutaan lembar) Outstanding Shares (in millions of shares)	17.710	17.710	17.710	15.236	15.236	0,00
Laba (Rugi) per Saham (dalam Rupiah penuh) Earning (Loss) per Share (in full Rupiah)	3,92	8,12	12,08	2,60	6,29	-51.72

* Disajikan kembali sesuai perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif pada tahun 2017.

*Restated in accordance with changes to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) which became effective in 2017.



Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION

<i>dalam jutaan Rupiah</i> <i>(in million Rupiah)</i>	2020	2019	2018	2017	2016*	YOY 2019-2020 (%)
ASET / ASSETS						
Aset Lancar Current Assets	643.801	813.662	1.056.764	1.241.035	1.411.386	-26,49
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	5.202.882	4.263.737	3.248.927	4.079.261	3.797.928	31,83
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associated Entity	851.442	831.314	790.743	406.116	358.744	2,56
Jumlah Aset Total Assets	5.846.683	5.077.400	4.305.691	5.320.297	5.209.314	17,87
LIABILITAS / LIABILITIES						
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	499.998	481.639	396.159	461.886	453.351	4,63
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	1.991.578	1.401.974	930.276	2.323.188	2.297.820	63,38
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.491.576	1.883.613	1.326.435	2.785.074	2.751.170	45,83
EKUITAS / EQUITIES						
Jumlah Ekuitas Total Equities	3.355.108	3.193.787	2.979.256	2.535.222	2.458.143	5,41

RASIO-RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIOS

	Satuan Unit	2020	2019	2018	2017	2016*	YOY 2019-2020 (%)
Modal Kerja Bersih (dalam jutaan Rupiah) Net Working Capital (in million Rupiah)	Rp	143.803	332.024	660.605	800.502	958.035	-66,36
Rasio Lancar Current Ratio	%	128,76	168,94	266,75	273,31	311,32	-31,78
Margin Usaha Business Margin	%	8,46	16,59	28,95	40,49	32,82	-48,43
Margin Bersih Net Margin	%	7,17	13,05	22,98	4,89	9,72	-44,38

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

	Satuan Unit	2020	2019	2018	2017	2016*	YOY 2019-2020 (%)
Margin EBITDA EBITDA Margin	%	15,36	22,37	42,77	56,94	46,24	-21,32
Tingkat Pengembalian Aset Return-on-Asset	%	1,19	2,83	4,17	0,73	1,84	-58,10
Tingkat Pengembalian Ekuitas Return-on-Equity	%	2,07	4,50	6,03	0,73	1,84	-54,07
Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) Debt-to-Equity Ratio (DER)	%	59,96	42,58	35,47	73,25	72,04	40,81
Rasio Utang terhadap Aset (DAR) Debt-to-Assets Ratio (DAR)	%	34,41	26,78	24,54	34,90	33,99	28,46
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas Income (Loss) to Equity Ratio	%	3,36	6,43	7,29	3,67	6,27	-47,80
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan dan Penjualan Income (Loss) to Revenue and Sales Ratio	%	7,17	13,05	27,77	11,76	15,95	-44,38
Rasio Total Liabilitas terhadap Ekuitas Total Liabilities to Equity Ratio	%	74,26	58,98	44,52	109,86	111,92	25,92
Rasio Total Liabilitas terhadap Aset Total Liabilities to Assets Ratio	%	42,62	37,10	30,81	52,35	52,35	14,87

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL HIGHLIGHTS

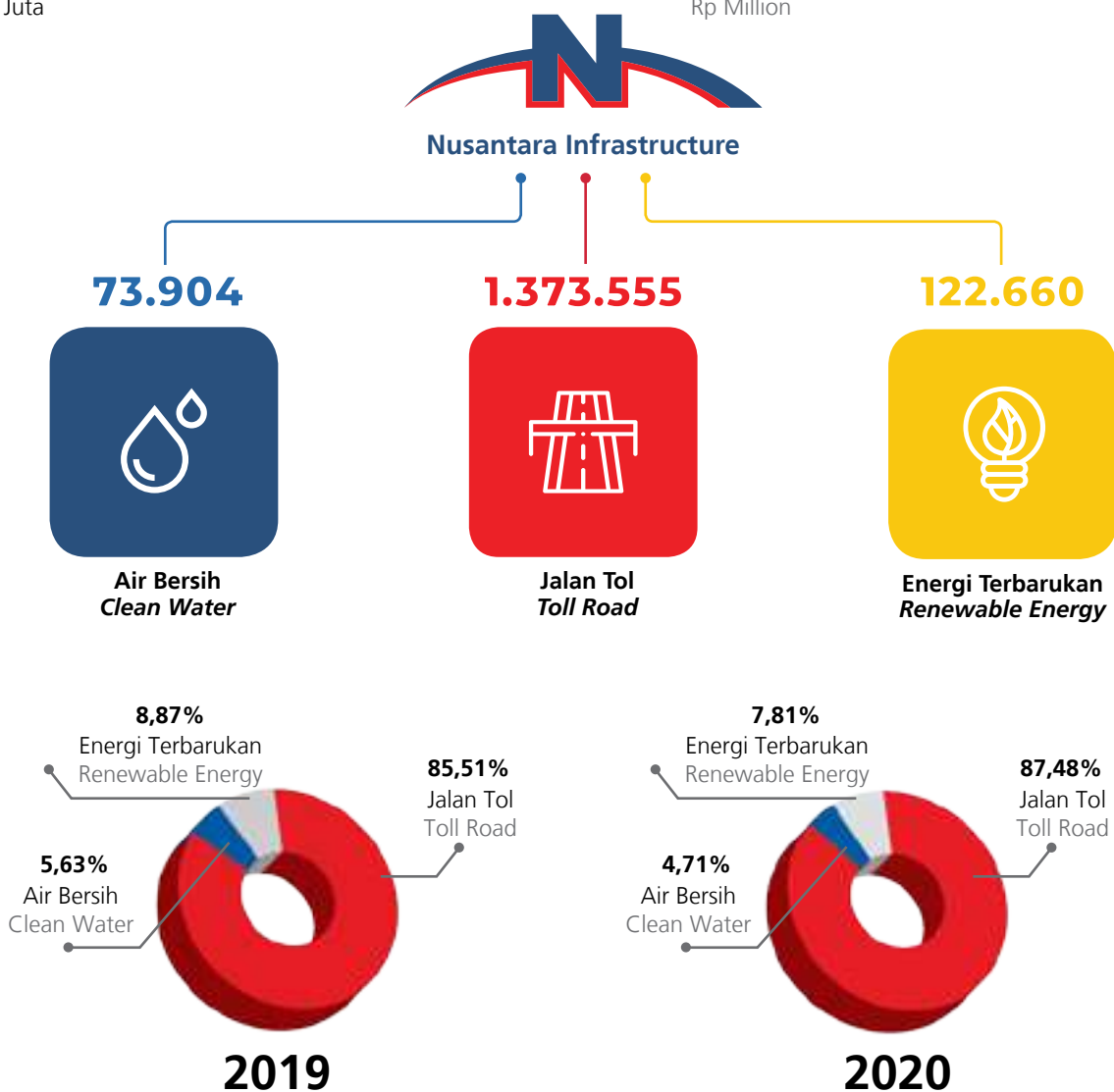
Uraian <i>Description</i>	2020		2019		2018	
	Jumlah (jutaan Rupiah) <i>Total (million Rupiah)</i>	Persentase (%) <i>Percentage (%)</i>	Jumlah (jutaan Rupiah) <i>Total (million Rupiah)</i>	Persentase (%) <i>Percentage (%)</i>	Jumlah (jutaan Rupiah) <i>Total (million Rupiah)</i>	Persentase (%) <i>Percentage (%)</i>
Jalan Tol Toll Roads	1.373.555	87,48%	1.361.752	85,51%	505.133	64,61%
Air Bersih Clean Water	73.904	4,71%	89.634	5,63%	86.965	11,12%
Energi Terbarukan Renewable Energy	122.660	7,81%	141.209	8,87%	55.332	7,08%

Kontribusi Pendapatan per Sektor Usaha

Rp Juta

Income Contribution of Business Sectors

Rp Million



Ikhtisar Saham

Share Highlights

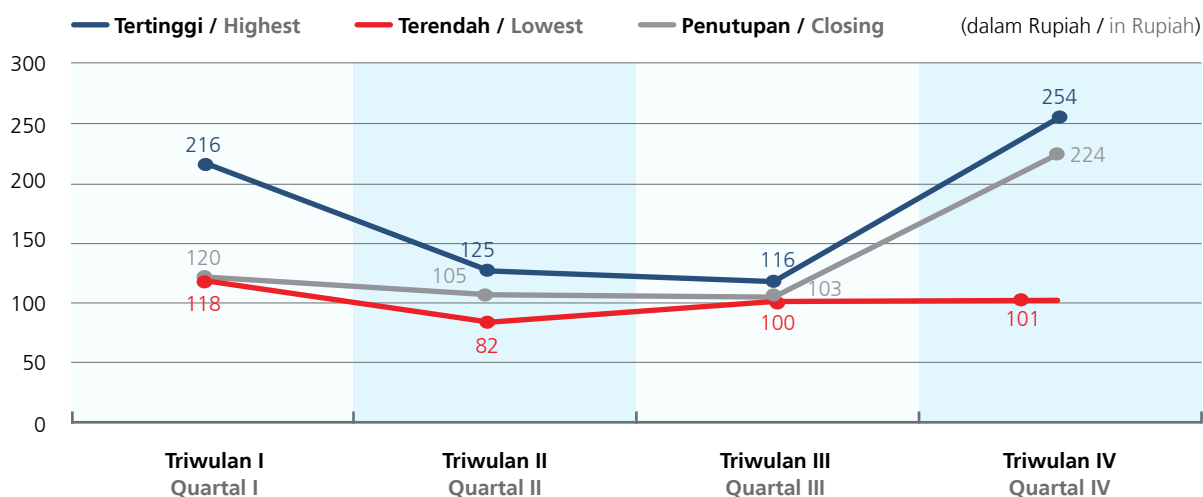
TABEL, HARGA, VOLUME DAN KAPITALISASI SAHAM 2018-2020

TABLE, PRICE, VOLUME AND SHARE CAPITALIZATION 2018-2020

Triwulan Quarter	Harga Per Saham (Rp) / Price Per Share (Rp)			Jumlah Saham yang Beredar (Dalam Satuan Lembar Saham) Number of Outstanding Share (in Units of Share)	Volume Transaksi (Dalam Satuan Lembar Saham) Transaction Volume (in Units of Share)	Kapitalisasi Pasar (Dalam Juta Rupiah) Market Capitalization (in Million Rupiah)
	Tertinggi (Dalam Rupiah) Highest (in Rupiah)	Terendah (Dalam Rupiah) Lowest (in Rupiah)	Penutupan (Dalam Rupiah) Closing (in Rupiah)			
2020						
Triwulan I Quarter I	216	118	120	17,710,708,000	56,290,700	2,125,285
Triwulan II Quarter II	125	82	105	17,710,708,000	90,256,800	1,859,624
Triwulan III Quarter III	116	100	103	17,710,708,000	21,753,200	1,824,203
Triwulan IV Quarter IV	254	101	224	17,710,708,000	1,473,500,600	3,967,199
2019						
Triwulan I Quarter I	234	198	204	17,710,708,000	51,667,400	3,612,984
Triwulan II Quarter II	204	170	195	17,710,708,000	24,827,200	3,453,588
Triwulan III Quarter III	204	176	195	17,710,708,000	10,466,000	3,453,588
Triwulan IV Quarter IV	224	200	220	17,710,708,000	91,460,100	3,896,356
2018						
Triwulan I Quarter I	227	198	202	15,417,537,000	619,267,783	3,108,077
Triwulan II Quarter II	209	176	197	15,417,537,000	138,551,352	3,031,899
Triwulan III Quarter III	247	198	243	15,417,537,000	317,233,992	3,747,975
Triwulan IV Quarter IV	253	199	206	17,522,825,000	112,901,667	3,612,026

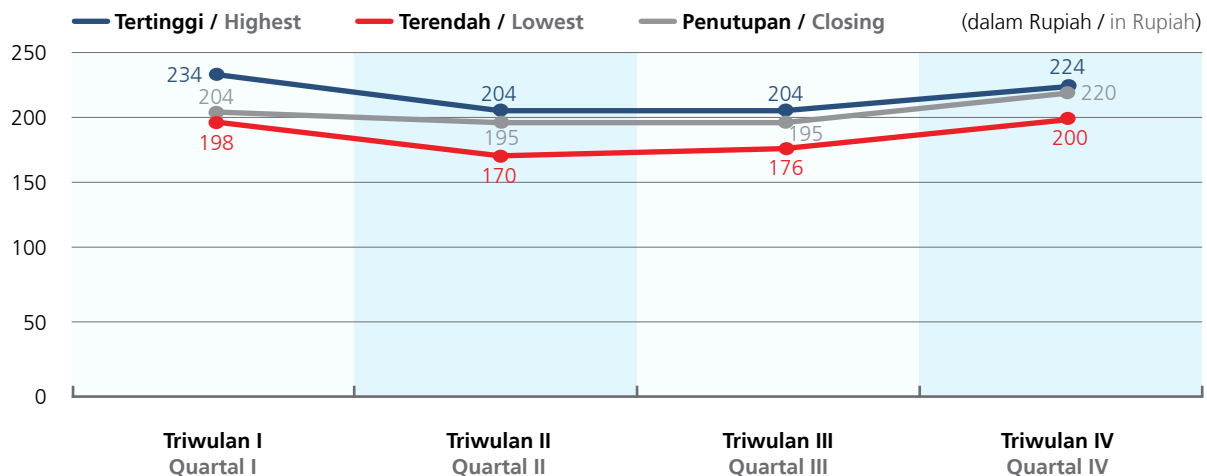
GRAFIK PERGERAKAN SAHAM TAHUN 2020

CHART OF STOCK MOVEMENTS IN 2020



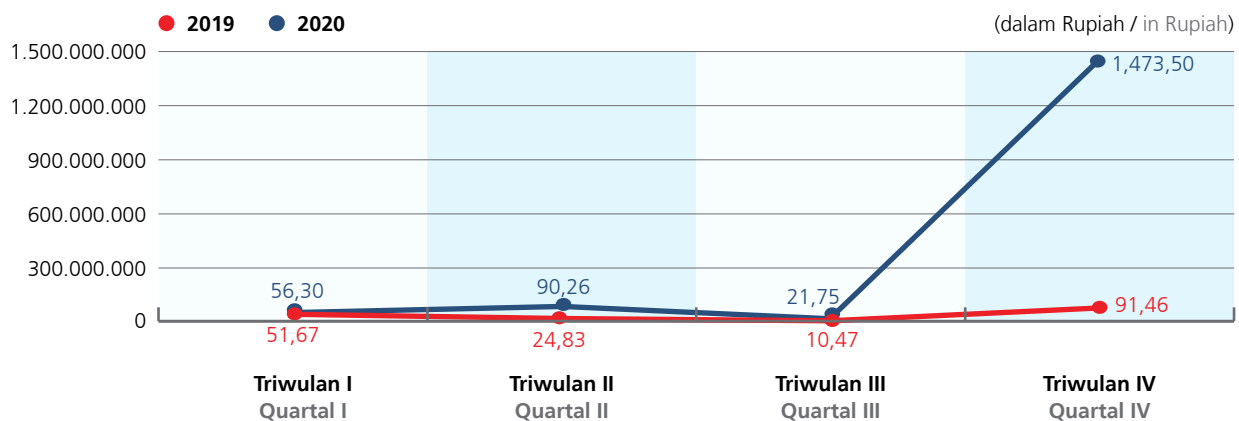
GRAFIK PERGERAKAN SAHAM 2019

CHART OF STOCK MOVEMENTS IN 2019



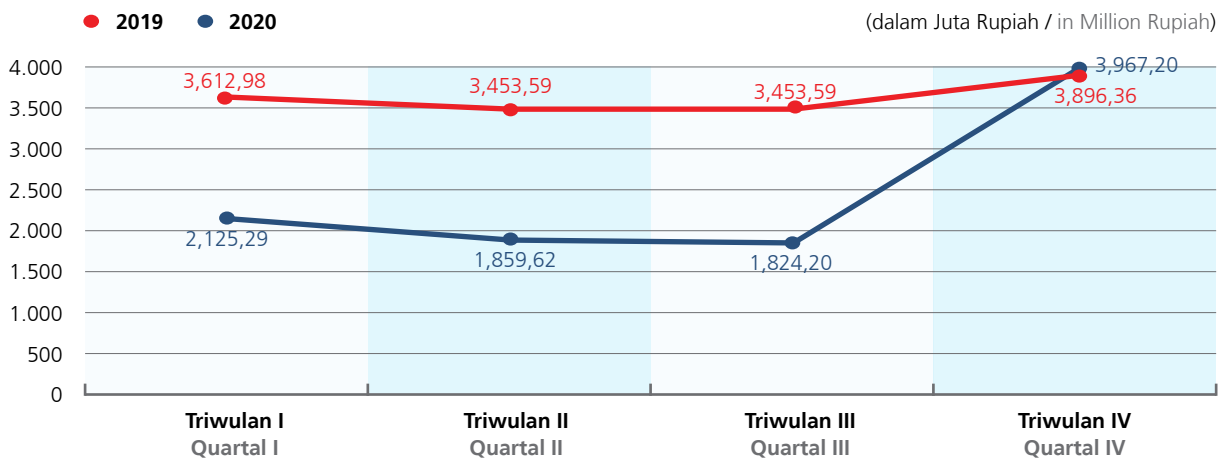
GRAFIK VOLUME TRANSAKSI/ PERDAGANGAN TAHUN 2019 DAN 2020

CHART OF TRANSACTION/TRADING VOLUME IN 2019 AND 2020



GRAFIK KAPITALISASI PASAR TAHUN 2019-2020

CHART OF MARKET CAPITALIZATION IN 2019-2020



Aksi Korporasi

Corporate Action

Hingga akhir tahun 2020, tidak terdapat adanya aksi korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan, baik itu pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham.

Until the end of 2020, there had been no corporate action taken by the Company, whether it was a stock split, reverse stock, share dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares.

Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Information on Suspension or Delisting

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak melakukan penghentian sementara saham (*suspension*) ataupun penghapusan pencatatan saham (*delisting*) terhadap saham Perusahaan, sehingga tidak terdapat adanya informasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Until the end of 2020, the Company has not carried out a temporary suspension of shares or delisting of the Company's shares, so there is no information related to this matter.

Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi

Summary of Bond, Sukuk or Conversion Bond

Hingga akhir tahun 2020, tidak terdapat adanya pencatatan obligasi, sukuk, atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya, sehingga tidak terdapat adanya informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

By the end of 2020, the Company did not record bonds, sukuk or convertible bonds, or other securities. Therefore, there is no information related to the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/return rates, due dates and bond/sukuk ratings.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Information on Other Financing Sources

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki sumber pendanaan yang berasal dari efek lainnya, sehingga tidak terdapat adanya informasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Until the end of 2020, the Company did not have any funding sources from other securities, so there was no information related to this matter.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



01 Januari
January

MINO BEST PROJECT AWARD – ROAD ENGINEERING ASSOCIATION OF ASIA AND AUSTRALASIA (REAAA)

1 Januari 2020, Asosiasi Insinyur Jalan Asia dan Australasia membuka pendaftaran untuk penghargaan proyek jalan yang ada di Kawasan Asia, acara ini dilaksanakan setiap 4 tahun. Proyek Jalan Tol Layang A.P. Pettarani dipercayakan untuk mewakili Indonesia untuk mengikuti ajang penghargaan ini oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI). Nantinya pemenang akan diumumkan pada tahun 2021

MINO BEST PROJECT AWARD – ROAD ENGINEERING ASSOCIATION OF ASIA AND AUSTRALASIA (REAAA)

On January 1, 2020, the Association of Asian and Australasia Road Engineers opened registration for awards for existing road projects in the Asian Region, this event is held every 4 years. A.P. Pettarani Elevated Toll Road Project was entrusted to represent Indonesia to participate in this award event by the Indonesian Road Development Association (HPJI). The winner will be announced in 2021.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



AUDIENSI DENGAN MENTERI BAPPENAS

Pada 8 Januari 2020, Direksi Nusantara yang terdiri dari Ramdani Basri, Direktur Utama; Danni Hasan, Managing Director dan Ridwan Irawan, Direktur Business Development yang juga didampingi oleh Deden Rochmawaty, GM Corporate Affairs mengadakan pertemuan perkenalan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Bapak Dr. HC. Ir. H. Suharso Monoarfa yang didampingi oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Kennedy Simanjuntak dan Direktur Kerja sama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun, Bapak Sri Bagus Guritno.

Agenda yang dibahas dalam kunjungan tersebut mengenai kontribusi pihak swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui pertemuan ini, Perusahaan berharap agar selalu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat khususnya dalam hal meyakinkan para investor asing untuk bersama-sama berkontribusi dalam mendukung percepatan pembangunan Indonesia.

AN AUDIENCE WITH THE MINISTER OF NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING (BAPPENAS)

On January 8, 2020, Nusantara Board of Directors consisting of Ramdani Basri, President Director; Danni Hasan, Managing Director and Ridwan Irawan, Director of Business Development, accompanied by Deden Rochmawaty, GM of Corporate Affairs, held an introductory meeting with the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency (BAPPENAS), Mr. Dr. HC. Ir. H. Suharso Monoarfa, who was accompanied by the Deputy for Facilities and Infrastructure, Mr. Kennedy Simanjuntak and the Director for Public-Private Partnership for Design and Construction, Mr. Sri Bagus Guritno.

The agenda discussed during the visit was about the contribution of the private sector to support national infrastructure development through the Government and Business Entity (PPP) cooperation scheme. Through this meeting, the Company hoped to always receive full support from the central government, especially in terms of convincing foreign investors to jointly contribute in supporting the acceleration of Indonesia's development.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



27 & 29 Januari
January

KONFERENSI PERS PENYESUAIAN TARIF TOL BSD DAN MMN

Sesuai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penyesuaian tarif di Tol BSD dan Makassar, Manajemen Perusahaan menggelar kegiatan konferensi pers dengan mengundang berbagai media lokal dan nasional. Kegiatan konferensi pers oleh Manajemen Tol BSD dilakukan pada 29 Januari 2020 di Ballroom Swiss-Belhotel Serpong. Acara dipimpin langsung oleh Direktur Utama Perusahaan Purwoto dan didampingi oleh Direktur Teknik dan Operasional Kristianto serta beberapa manajer terkait. Sementara konferensi pers oleh Manajemen Tol Makassar dilakukan di Menara Bosowa Lantai 4, pada 27 Januari yang juga dipimpin oleh Direktur Utama MMN-JTSE, Anwar Toha yang didampingi oleh Ismail Malliungan serta manajer terkait.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing manajemen menyampaikan bahwa mulai 31 Januari 2020, penyesuaian tarif di Tol BSD, Ruas Pondok Aren - Serpong dan Tol MMN Ruas Jalan Tol Ujung Pandang Seksi I dan II resmi diberlakukan. Keputusan tersebut didasari oleh terpenuhinya seluruh Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dievaluasi oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas, fasilitas, dan layanan di tiap ruas tol.

PRESS CONFERENCE ON THE TOLL RATES ADJUSTMENT FOR BSD AND MMN

In accordance with the issuance of the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing regarding tariff adjustments on the BSD and Makassar Toll Roads, the Company's Management held a press conference by inviting various local and national media. The press conference activity by the BSD Toll Management was held on January 29, 2020 at the Swiss-Belhotel Serpong Ballroom. The event was directly led by the President Director of the Company Purwoto, accompanied by the Technical and Operational Director Kristianto and several related managers. Meanwhile, a press conference by the Makassar Toll Management was held at the 4th Floor of the Bosowa Tower, on January 27, which was also led by the Managing Director of MMN-JTSE, Anwar Toha who was accompanied by Ismail Malliungan and related managers.

In this activity, each management said that starting from January 31, 2020, tariff adjustments on the BSD Toll, Pondok Aren - Serpong and MMN Toll Roads Section I and II of the Ujung Pandang Toll Road were officially enforced. This decision was based on the fulfillment of all Minimum Service Standards (SPM) which have been evaluated by the Toll Road Regulatory Agency (BPJT), as an effort to improve the quality, facilities and services of each toll road segment.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



30 Januari
January

RUPSLB PT MAKASSAR METRO NETWORK

Manajemen PT Makassar Metro Network (MMN) menggelar acara RUPSLB yang diselenggarakan di Gedung Menara Bosowa Lantai 4, Makassar pada 30 Januari 2020. Acara dipimpin langsung oleh Direktur Utama MMN, Anwar Toha dan dihadiri oleh seluruh Direksi, Komisaris dan pemegang saham. Agenda dalam rapat tersebut yakni membahas persetujuan atas peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan dalam rangka konversi hutang menjadi saham dengan penerbitan saham baru.

EGMS OF PT MAKASSAR METRO NETWORK

The management of PT Makassar Metro Network (MMN) held an EGMS which was held at the 4th Floor of the Bosowa Tower Building, Makassar on January 30, 2020. The event was led directly by the President Director of MMN, Anwar Toha and attended by all Directors, Commissioners and shareholders. The agenda at the meeting was to discuss approval for an increase in paid-in capital and issued capital in the context of converting debt into shares with the issuance of new shares.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



31 Januari
January

PENANDATANGANAN MOU PT POTUM MUNDI INFRANUSANTARA DENGAN PT GERBANG NTB EMAS

Pada 31 Januari 2020, Potum yang diwakili oleh Bapak Firman, Direktur Business Development menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk proyek Kerja sama Pengembangan SPAM Regional Pulau Lombok. Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur NTB, Bapak Zulkieflimansyah sebagai saksi dalam penandatanganan tersebut.

Kerja sama tersebut meliputi penyediaan sistem untuk pelayanan air di Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram serta Kawasan Strategis 3 Gili & Senggigi. Selain itu, Potum juga akan mendukung penyediaan sistem air untuk pelayanan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

MOU SIGNING OF PT POTUM MUNDI INFRANUSANTARA WITH PT GERBANG NTB EMAS

On January 31, 2020, Potum represented by Mr. Firman, the Director of Business Development, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with PT Gerbang NTB Emas (GNE) which is one of the Regional Owned Enterprises (BUMD) of West Nusa Tenggara Province (NTB) for the Cooperation Project of Lombok Island Regional SPAM Development. The Governor of NTB, Mr. Zulkieflimansyah, also attended the event as a witness to the signing.

The cooperation includes the provision of systems for water services in North Lombok Regency and Mataram City as well as Strategic Area 3 Gili & Senggigi. In addition, Potum will also support the provision of a water system for services in the Mandalika Special Economic Zone (KEK).

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN JALAN TOL PROYEK BANDUNG INTRA URBAN TOLL ROAD (BIUTR)

PT Margautama Nusantara (MUN) berkomitmen untuk dapat berkontribusi dalam menciptakan konektivitas nasional, melalui partisipasi Perusahaan dalam pembangunan jalan tol proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Bersama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Mahkota Permata Perdana (MPP), MUN membentuk konsorsium untuk dapat memberikan solusi dalam mengurai kemacetan di wilayah tersebut.

Dalam rapat koordinasi yang diadakan pada 4 Februari 2020, di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Manajemen melakukan pemaparan singkat mengenai latar belakang anggota konsorsium dan pemaparan teknis terkait rencana pembangunan sekaligus meminta dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dapat melaksanakan pembangunan proyek tersebut.

COORDINATION MEETING ON BANDUNG INTRA URBAN TOLL ROAD (BIUTR) TOLL ROAD PROJECT CONSTRUCTION

PT Margautama Nusantara (MUN) is committed to be able to contribute to creating national connectivity, through the Company's participation in the construction of the Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) toll road project. Together with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Mahkota Permata Perdana (MPP), MUN formed a consortium to be able to provide solutions to solve congestion in the region.

In a coordination meeting held on February 4, 2020, at Gedung Sate Building, Bandung, West Java, the Management conducted a brief presentation on the background of the consortium members and a technical presentation regarding the development plan, as well as asking for support from the Regional Government of West Java Province to be able to conduct the project construction.



Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



24 Februari
February

OPERASI PENERTIBAN JALAN TOL OLEH PT MAKASSAR METRO NETWORK DAN PT JALAN TOL SEKSI EMPAT

Sebagai bentuk dukungan Perusahaan dalam menjalankan program pemerintah untuk menerapkan sistem "Jalan Tol Bebas *Over Dimension Overload* (ODOL) 2020", Manajemen PT Makassar Metro Network (MMN) dan PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) melaksanakan operasi penertiban pada 24 Februari 2020 untuk kendaraan yang membawa kapasitas melebihi batas normal. Kegiatan ini merupakan operasi kedua yang dilakukan manajemen Perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan berkendara di area Tol Makassar.

TOLL ROAD CONTROL OPERATION BY PT MAKASSAR METRO NETWORK AND PT JALAN TOLL SEKSI EMPAT

As part of the Company's support in performing the government's program to implement "Over-Dimension-Overload-Free Toll Road" in 2020, the management of PT Makassar Metro Network (MMN) and PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) carried out control operations on February 24, 2020 for vehicles with above-normal carrying capacity. This activity was the second operation carried out by the Company's management which aimed to create order and driving safety in Makassar Toll Road area.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



05 Maret
March

PAPARAN PRA-FEASIBILITY STUDY (FS) PT POTUM MUNDI INFRANUSANTARA KEPADA PT GERBANG NTB EMAS

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama Potum dengan PT Gerbang NTB Emas (GNE) untuk proyek kerja sama Pengembangan SPAM Regional Pulau Lombok, Potum telah menyelesaikan dan melakukan paparan Pra-*Feasibility Study* (FS) di hadapan GNE dan jajaran pemerintah Provinsi NTB terkait pada 5 Maret 2020. Saat ini, GNE selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) sedang melakukan *review* dan koordinasi ke beberapa PDAM yang menjadi target pelayanan. Setelah proses *review* selesai, tahap selanjutnya yakni penyusunan FS guna ditetapkan sebagai pemrakarsa proyek (*unsolicited project*).

FEASIBILITY STUDY (FS) PRESENTATION OF PT POTUM MUNDI INFRANUSANTARA TO PT GERBANG NTB EMAS

As a follow-up to Potum's collaboration with PT Gerbang NTB Emas (GNE) for Lombok Island Regional SPAM Development cooperation project, Potum has completed and conducted a Pre-*Feasibility Study* (FS) presentation in front of GNE and the relevant ranks of the NTB Provincial government on March 5, 2020. Currently, GNE as the Person in Charge for Cooperation Projects (PJPK) is reviewing and coordinating several PDAMs that are targeted for services. After the review process is complete, the next stage is the preparation of the FS to be designated as an *unsolicited project*.



Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



WAWANCARA DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DENGAN CNBC TV DAN BERITASATU TV

Direktur Utama Nusantara Infrastructure Ramdani Basri kembali diundang untuk menjadi narasumber dalam Program “Squawk Box” di CNBC TV pada 6 Maret 2020 sebagai bentuk kegiatan *media relations* Perusahaan dengan media. Dalam kesempatan tersebut, beliau memberikan pandangannya mewakili manajemen Perusahaan terkait peluang investasi infrastruktur di kondisi ekonomi saat ini.

Dalam kesempatan yang berbeda, Bapak Ramdani juga diundang untuk menjadi narasumber dalam Program *Corporate Action* yang ditayangkan oleh Beritasatu TV pada 11 Maret 2020. Berbeda dari wawancara sebelumnya, kali ini Bapak Ramdani membahas mengenai prospek dan strategi bisnis Perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan nasional dengan berbagai proyek yang saat ini sedang dikerjakan.

INTERVIEW OF THE COMPANY’S PRESIDENT DIRECTOR WITH CNBC TV AND BERITASATU TV

President Director of Nusantara Infrastructure, Ramdani Basri, was once again invited to become a keynote speaker in the “Squawk Box” Program on CNBC TV on March 6, 2020 as part of the Company’s media relations activity with the media. On the occasion, he gave his views on behalf of the Company’s management regarding infrastructure investment opportunities in today’s economic conditions.

On different occasion, Mr. Ramdani was also invited to be an interviewee in the Corporate Action Program broadcast by Beritasatu TV on March 11, 2020. As opposed to the previous interview, this time Mr. Ramdani discussed the prospects and business strategy of the Company in supporting the acceleration of national development with various ongoing projects.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



02 Mei
May

KUNJUNGAN KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT) KE TOL BSD

Unit bisnis Nusantara Infrastructure di sektor tol, PT Bintara Serpong Damai (BSD) menerima kunjungan lapangan dari Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Bapak Danang Parikesit pada 2 Mei 2020. Agenda dalam kunjungan tersebut yakni untuk meninjau kondisi beberapa ruas tol di sekitar Jakarta selama masa Covid-19 dan Bulan Ramadhan.

Dalam kunjungannya, Kepala BPJT didampingi oleh Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure, Bapak Ramdani Basri; Direktur Operasional PT Margautama Nusantara, Bapak Joko Santoso; Direktur Utama Tol BSD Bapak Purwoto dan Direktur Operasional Tol BSD Bapak Kristianto. Khusus untuk Tol BSD, agenda yang dibahas lebih mengenai pengembangan bisnis seperti solusi pengendalian banjir dan pembahasan proyek kemacetan di Tegal Rotan, Tangerang Selatan, Banten.

VISITATION OF THE HEAD OF TOLL ROAD REGULATION AGENCY (BPJT) TO BSD TOLL

Nusantara Infrastructure's business unit in the toll sector, PT Bintara Serpong Damai (BSD), received a field visit from the Head of the Toll Road Regulatory Agency (BPJT), Mr. Danang Parikesit, on May 2, 2020. The agenda for the visit was to review the condition of several toll roads near Jakarta during the Covid-19 period and Ramadan month.

During his visit, the Head of BPJT was accompanied by the President Director of PT Nusantara Infrastructure, Mr. Ramdani Basri; Operational Director of PT Margautama Nusantara, Mr. Joko Santoso; President Director of BSD Toll Road, Mr. Purwoto and Director of BSD Toll Operation, Mr. Kristianto. Especially for the BSD Toll Road, the agenda discussed was more about business development such as flood control solutions and discussion of congestion projects in Tegal Rotan, South Tangerang, Banten.



Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



04 Januari | 12 Juni | 06 Juli
January | June | July

RUPST DAN RUPSLB PT MARGAUTAMA NUSANTARA

PT Margautama Nusantara (MUN) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara virtual. Selama periode Mei-Agustus 2020, MUN telah menyelenggarakan tiga kali RUPS yang terdiri dari satu kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 12 Juni 2020 dan dua kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 4 Mei dan 6 Juli 2020.

Dalam acara RUPSLB yang diselenggarakan pada 4 Mei 2020, salah satu agenda yang dibahas yakni terkait adanya perubahan struktur pemegang MUN dengan masuknya Japan Expressway International Co. Ltd. (JEXWAY), Japan Overseas Infrastructure Co. Ltd. (JOIN) dan West Nippon Expressway Co. Ltd. (NEXCO). Dengan demikian, kepemilikan saham MUN saat ini dimiliki oleh Nusantara Infrastructure, CIIF Infrastructure Sdn. Bhd., CAIF III Infrastructure Holdings Sdn. Bhd., JEXWAY, JOIN, NEXCO dan Sadikin Aksa. Sementara itu, agenda dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada 6 Juli 2020 yakni terkait perubahan susunan Direksi MUN dengan adanya penambahan 2 (dua) Direksi baru.

AGMS AND EGMS OF PT MARGAUTAMA NUSANTARA

PT Margautama Nusantara (MUN) held a virtual General Meeting of Shareholders (GMS). During the May-August 2020 period, MUN has held three GMS, consisting of one Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on June 12, 2020 and two Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on May 4 and July 6, 2020.

In the EGMS held on May 4, 2020, one of the agendas discussed was related to the change in the structure of MUN holders with the entry of Japan Expressway International Co. Ltd. (JEXWAY), Japan Overseas Infrastructure Co. Ltd. (JOIN) and West Nippon Expressway Co. Ltd. (NEXCO). Thus, MUN's share ownership was currently owned by Nusantara Infrastructure, CIIF Infrastructure Sdn. Bhd., CAIF III Infrastructure Holdings Sdn. Bhd., JEXWAY, JOIN, NEXCO and Sadikin Aksa. Meanwhile, the agenda at the EGMS which was held on July 6, 2020, was related to changes in the composition of the MUN Directors with the addition of 2 (two) new Directors.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



RUPST PT BINTARO SERPONG DAMAI, PT MAKASSAR METRO NETWORK, DAN PT JALAN TOL SEKSI EMPAT

PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Makassar Metro Network (MMN) dan PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Kegiatan RUPST tersebut diadakan bersamaan pada 12 Mei 2020.

RUPST diselenggarakan secara virtual melalui media elektronik *video conference* sebagai bentuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangerang Selatan dan Kota Makassar dalam masa Pandemi Covid-19. Agenda dalam RUPST yakni membahas mengenai persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2019; persetujuan penggunaan laba bersih Perusahaan serta persetujuan pemberian wewenang kepada direksi untuk penunjukan auditor untuk tahun 2020.

AGMS OF PT BINTARO SERPONG DAMAI, PT MAKASSAR METRO NETWORK, AND PT JALAN TOL SEKSI EMPAT

PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Makassar Metro Network (MMN) and PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). The AGMS activities were held simultaneously on May 12, 2020.

The AGMS was held virtually through electronic media video conferencing as a form of the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in South Tangerang City and Makassar City during the Covid-19 Pandemic. The agenda in the AGMS was to discuss the approval of the annual report and financial statements for the 2019 fiscal year; approval of the use of the Company's net income as well as approval of granting authority to the Board of Directors for the appointment of auditors for 2020.



Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



17 Mei
May

SEREMONIAL Pengerjaan Tahap Akhir Pemasangan Balok Jembatan (Box Girder) Jalan Tol A.P. Pettarani

Pembangunan Proyek Jalan Tol A.P. Pettarani, Makassar memasuki tahap akhir pemasangan balok jembatan (*box girder*). Seremonial pengerjaan tahapan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Gubernur Sulawesi Selatan, Walikota Makassar, berbagai institusi dan seluruh tamu undangan serta media massa melalui media video conference pada 17 Mei 2020.

Acara yang digelar secara virtual ini dibuka oleh sambutan dari Bapak Danni Hasan sebagai Direksi PT Margautama Nusantara (MUN). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Gubernur Sulawesi Selatan turut menyampaikan sambutan dengan memberikan dukungan penuh atas terlaksananya proyek jalan tol layang pertama di luar Pulau Jawa tersebut dan berharap pembangunannya dapat segera selesai sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Meski di tengah Pandemi Covid-19, pengerjaan proyek Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, Makassar terus dilaksanakan dengan tetap mematuhi standar Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja (SMK3) serta menerapkan protokol Covid-19 secara disiplin dan ketat.

CEREMONY ON THE FINAL STAGE WORK OF TOLL ROAD BOX GIRDER BEAMS INSTALLATION BY A.P. PETTARANI

The Toll Road Project Development of A.P. Pettarani, Makassar, entered the final stage of installing boxgirder beams. The ceremonial work on these stages was witnessed directly by the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR), the Head of the Toll Road Regulatory Agency (BPJT), the Governor of South Sulawesi, the Mayor of Makassar, various institutions and all invited guests and mass media via video conference on May 17, 2020.

The event, which was held virtually, was opened by remarks from Mr. Danni Hasan as the Director of PT Margautama Nusantara (MUN). The Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) and the Governor of South Sulawesi also delivered their remarks by giving full support for the implementation of the first elevated toll road project outside Java Island and hoped that the construction could be completed soon so that the results could be felt by the wider community.

Even in the midst of the Covid-19 Pandemic, the A.P. Pettarani Elevated Toll Road project continued to be conducted while adhering to the standards of the Occupational Health & Safety Management System (SMK3) and implementing the Covid-19 protocol in a disciplined and strict manner.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



05 Juni
June

PAPARAN PROGRESS BANDUNG INTRA URBAN TOLL ROAD (BIUTR)

PT Margautama Nusantara (MUN) melakukan paparan progres Proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) bersama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Mahkota Permata Perdana (MPP) pada 5 Juni 2020, di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Rapat tersebut membahas mengenai terkait rencana pembangunan jalan tol dalam kota Bandung (BIUTR). Peserta Rapat Komisi C DPRD Kota Bandung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG), Dinas Penataan Ruang (DISTARU), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (DISHUB), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR).

PROGRESS PRESENTATION OF BANDUNG INTRA URBAN TOLL ROAD (BIUTR)

PT Margautama Nusantara (MUN) presented the progress of the Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) Project together with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Mahkota Permata Perdana (MPP) on June 5, 2020, at Gedung Sate Bandung, West Java. The meeting discussed the plans for the construction of the Bandung inner city toll road (BIUTR). The Meeting Participants were C Commission of the Regional People's Representative Assembly (DPRD) Bandung, Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Regional Government of West Java Province, Department of Highways and Spatial Planning of Regional Government of West Java Province, Construction, Research and Development Planning Agency (BAPPELITBANG), Spatial Planning Department (DISTARU), Department of Public Works (PU), Department of Transportation (DISHUB), Department of Housing and Settlement Areas, Land and Parks (DPKP3) and Department of Culture and Tourism (DISBUDPAR).



Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



WAWANCARA DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DENGAN CNBC TV

Pada 17 Juni 2020, Bapak Ramdani Basri, Presiden Direktur Nusantara Infrastructure, kembali diundang CNBC TV untuk menjadi narasumber dalam program "Closing Bell". Kali ini, topik yang diangkat dalam diskusi yang berdurasi selama setengah jam tersebut membahas mengenai investasi dan strategi dalam pengembangan proyek infrastruktur serta dampak Covid-19 terhadap Perusahaan.

INTERVIEW OF THE COMPANY'S PRESIDENT DIRECTOR WITH CNBC TV

On June 17, 2020, Mr. Ramdani Basri, President Director of Nusantara Infrastructure, was again invited by CNBC TV to become an interviewee in the "Closing Bell" program. This time, the topic raised in the discussion which lasted for half an hour discussed investment and strategies in developing infrastructure projects and the impact of Covid-19 on the Company.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



03 Agustus
August

SEREMONIAL 5.000.000 JAM KERJA AMAN TANPA LTI

Tim Proyek melaksanakan Seremonial 5.000.000 Jam Kerja Aman tanpa *Loss Time Injury* (LTI) pada Proyek Jalan Tol Layang A.P. Pettarani di Direksi Keet PT Wijaya Karya Beton sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan konsistensi para pekerja dalam menerapkan pelaksanaan konstruksi yang berkeselamatan (K3).

CEREMONIAL OF 5,000,000 SAFE WORKING HOURS WITHOUT LTI

The Project Team carried out a Ceremonial 5,000,000 Safe Working Hours without Loss Time Injury (LTI) on A.P. Pettarani Elevated Toll Road Project at the Keet Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton as a form of appreciation for the performance and consistency of the workers in implementing safe construction (K3).



Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



13 Agustus
August

KUNJUNGAN TIM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA KE PT REZEKI PERKASA SEJAHTERA LESTARI

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) menerima kunjungan kerja dari tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia pada 13 Agustus 2020. Agenda dalam kunjungan tersebut terkait mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebagai pelaku usaha, RPSL diharapkan dapat bekerja sama dan berkomitmen terhadap pencegahan bencana karhutla, salah satunya adalah dengan pemakaian bahan bakar kayu yang sesuai aturan.

Selain itu, kunjungan ini juga sebagai bentuk peninjauan lokasi PLTBm untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai proses pengolahan biomassa menjadi energi listrik, proses penyimpanan bahan baku sampai dengan proses pengiriman produk.

THE TEAM OF THE COORDINATING MINISTRY FOR POLITICAL, LEGAL AND SECURITY AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA VISITED PT REZEKI PERKASA SEJAHTERA LESTARI

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) received a working visit from the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs team of the Republic of Indonesia on August 13, 2020. The agenda for the visit was related to mitigation of forest and land fire prevention (karhutla). As a business actor, RPSL is expected to work together and be committed to preventing forest and land fires disasters, one of which is the use of wood fuel in accordance with the regulations.

In addition, this visit was also a form of observing the PLTBm location to provide information and education about processing biomass into electrical energy, storing of the raw materials and the process of product delivery.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



15-18 Agustus
August

UJI BEBAN STATIS DAN DINAMIS (LOADING TEST)

Pengujian beban dilaksanakan pada 15-18 Agustus 2020 pada area tertinggi yakni P7-P8-P9 sisi timur dan barat. Uji beban terbagi atas 2 yakni dinamis dan statis, pengujian ini disaksikan langsung oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) dan seluruh tim proyek. Setelah pengujian ini, selanjutnya Sertifikat Persetujuan Laik Fungsi Struktur jembatan diterbitkan oleh Menteri PUPR.

LOADING TEST

Pengujian beban dilaksanakan pada 15-18 Agustus 2020 pada area tertinggi yakni P7-P8-P9 sisi timur dan barat. Uji beban terbagi atas 2 yakni dinamis dan statis, pengujian ini disaksikan langsung oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) dan seluruh tim proyek. Setelah pengujian ini, selanjutnya Sertifikat Persetujuan Laik Fungsi Struktur jembatan diterbitkan oleh Menteri PUPR.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



RUPST PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

Manajemen PT Nusantara Infrastructure Tbk menyelenggarakan acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 19 Agustus 2020 di Financial Club, Lantai 27-28, Graha CIMB Niaga, Jakarta. Acara yang dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris, perwakilan Biro Administrasi Efek (BAE), Notaris, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan para pemegang saham ini diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan protokol pencegahan COVID-19. Salah satu agenda dalam RUPST kali ini yakni perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

AGMS OF PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

The management of PT Nusantara Infrastructure Tbk held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on August 19, 2020 at the Financial Club, 27-28 Floors, Graha CIMB Niaga, Jakarta. The event which was attended by the Board of Directors, the Board of Commissioners, representatives of the Securities Administration Bureau (BAE), Notary Public, Public Accountant Office (KAP) and shareholders was held in accordance with the procedures and protocols for preventing COVID-19. One of the agendas at the AGMS this time was the change in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



27 Agustus 2020 & **29 Desember 2020**
August 2020 & December 2020

KUNJUNGAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN KOMISI D

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi D beserta tim terkait mengadakan kunjungan proyek (*site visit*) untuk melihat *progress* pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, Makassar pada 27 Agustus dan 29 Desember 2020.

VISITATION BY DPRD MEMBERS OF D COMMISSION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE

DPRD members of the D Commission of South Sulawesi Province and their teams held a site visit to see the progress of A.P Pettarani Elevated Toll Road construction on August 27 and December 29, 2020.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



KUNJUNGAN PROYEK (*SITE VISIT*) GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN TIM KE JALAN TOL LAYANG A.P. PETTARANI

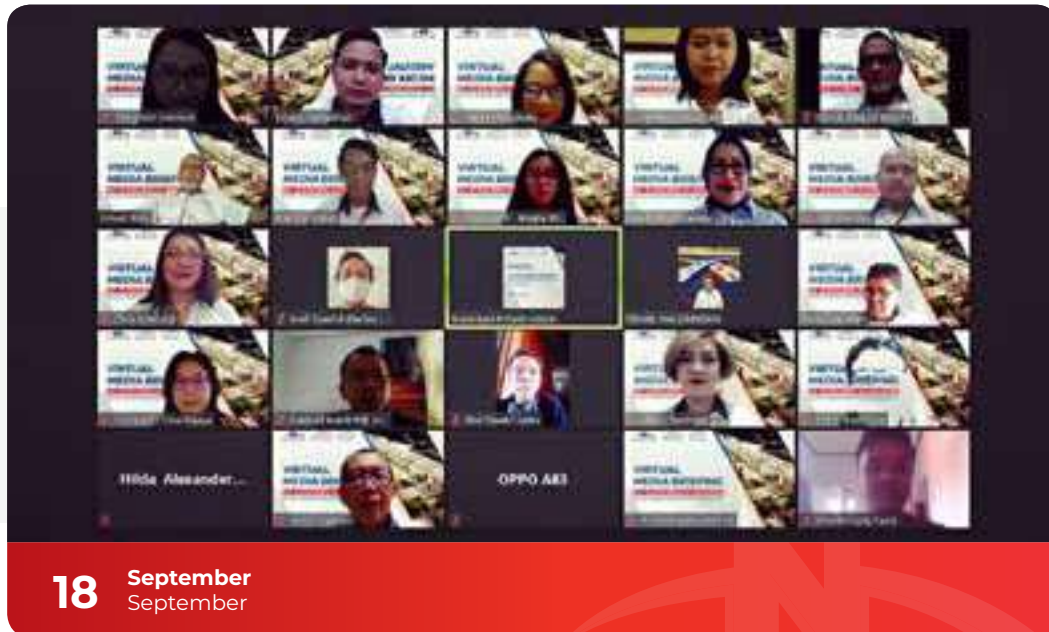
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah didampingi oleh Pj. Walikota Makassar Rudy Djamaluddin beserta tim terkait mengadakan kunjungan proyek (*site visit*) untuk melihat progres pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, Makassar pada 9 September 2020. Sebelum mengunjungi lokasi proyek, Manajemen MMN bersama dengan pihak Wika Beton sebagai kontraktor melakukan pemaparan progres perkembangan proyek di Kantor Direksi. Tidak hanya jajaran pemerintah daerah, beberapa media juga turut hadir dalam kunjungan tersebut, sehingga menjadikan momen tersebut sebagai publikasi bersama untuk semakin meningkatkan antusiasme masyarakat dalam menyambut hadirnya ikon baru Kota Makassar.

THE SITE VISIT OF THE GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI AND THE TEAM TO THE ELEVATED TOLL ROAD A.P. PETTARANI

The Governor of South Sulawesi, Nurdin Abdullah accompanied by Acting Mayor of Makassar Rudy Djamaluddin and the related team, conducted a site visit to see the progress of the A.P. Pettarani Elevated Toll Road construction, Makassar on September 9, 2020. Before visiting the project site, MMN Management, together with Wika Beton as the contractor, presented the progress of the project development at the Board of Directors' Office. Not only local government ranks, but several media also attended the visit, thus making the moment a joint publication to further increase the enthusiasm of the community in welcoming the presence of the new Makassar City icon.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



MEDIA BRIEFING PROYEK JALAN TOL LAYANG A.P. PETTARANI

Kegiatan ini dilakukan pada 18 September 2020 yang melibatkan berbagai media nasional dan lokal Makassar. Dalam kegiatan ini, Manajemen MUN dan MMN memberikan informasi terkait progres pembangunan dan update terkini mengenai proyek pembangunan jalan tol A.P. Pettarani. Kegiatan *media briefing* ini dilakukan sebagai forum diskusi penyampaian informasi resmi dari Perusahaan kepada masyarakat melalui pemberitaan di berbagai media massa.

MEDIA BRIEFING OF A.P. PETTARANI ELEVATED TOLL ROAD PROJECT

This activity was carried out on September 18, 2020, involving various national and local media in Makassar. In this activity, the Management of MUN and MMN provided information related to development progress and the latest updates regarding the A.P. Pettarani toll road construction project. This media briefing activity was carried out as a discussion forum for the delivery of official information from the Company to the public through news coverage in various mass media.



Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



30 September
September

PENYELESAIAN JALAN TOL LAYANG A.P. PETTARANI

Pada September 2020, Perusahaan berhasil menyelesaikan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani Makassar yang direncanakan akan disahkan pada bulan Maret 2021.

COMPLETION OF A.P. PETTARANI ELEVATED TOLL ROAD

In September 2020, the Company successfully completed the A.P. Pettarani Elevated Toll Road Makassar which was planned to be legalized in March 2021.



Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



SEREMONIAL *GROUNDBREAKING* TIGA PROYEK STRATEGIS PT BINTARO SERPONG DAMAI

Pada 30 September 2020, Manajemen Perusahaan menyelenggarakan seremonial *groundbreaking* tiga proyek strategis yang diadakan secara virtual melalui Aplikasi Zoom. Acara ini dihadiri oleh Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Walikota Tangerang Selatan.

Ketiga proyek tersebut yakni konstruksi tidak sebidang *Ramp Junction* Serpong dengan *Exit Ramp* Pamulang, konstruksi penanganan banjir di KM 8 serta konstruksi tidak sebidang akses *On Ramp* Rawabuntu pada Jalan Tol Ruas Pondok Aren – Serpong.

Melalui ketiga proyek tersebut, Perusahaan mendukung secara penuh pengembangan infrastruktur kota yang saat ini sedang digencarkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sekaligus sebagai bentuk peningkatan pelayanan Perusahaan kepada para pengguna jalan.

GROUNDBREAKING CEREMONY ON THREE STRATEGIC PROJECTS PT BINTARO SERPONG DAMAI

On September 30, 2020, the Company's Management held a groundbreaking ceremony for three strategic projects, which were held virtually through the Zoom Application. The event was attended by the Director General of Highways of the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), the Head of the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) and the Mayor of South Tangerang.

The three projects are the construction of the Ramp Junction Serpong with Exit Ramp Pamulang, the construction for flood management at KM 8 and the construction on an off-plot Ramp Rawabuntu access on the Pondok Aren - Serpong Toll Road.

Through these three projects, the Company fully supports the development of city infrastructure, which is currently being intensified by the South Tangerang City Government as well as a form of improving the Company's services to road users.



Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



07 - 09 Oktober
October

UJI LAIK FUNGSI (ULF) JALAN TOL LAYANG A.P. PETTARANI

Sebelum dioperasikan secara fungsional, jalan tol layang pertama di Kota Makassar, AP. Pettarani telah melalui tahapan Uji Laik Fungsi (ULF) yang dilakukan pada 7-9 Oktober 2020. Uji Laik Fungsi (ULF) jalan merupakan kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan untuk memberikan keselamatan bagi pengguna jalan. ULF juga merupakan persyaratan administratif yang wajib dilaksanakan, sebelum jalan tersebut dioperasikan untuk umum.

Uji ULF ini melibatkan tim Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Unit Pelayanan Perizinan Jalan Bebas Hambatan (UPP JBH), Dinar Perhubungan Darat (HUBDAT) dan KORLANTAS. Seluruh bagian yang diperiksa yakni keseluruhan sarana dan prasarana, struktur bangunan dan seluruh elemen penting standar pengoperasian jalan tol.

FUNCTIONALITY TEST (ULF) OF A.P. PETTARANI ELEVATED TOLL ROAD

Before being operated functionally, the first elevated toll road in Makassar City, AP. Pettarani has gone through the Functionality Test (ULF) stage, which was carried out on October 7-9, 2020. The Road Functionality Test (ULF) is a condition of a road segment that meets the technical requirements for roadworthiness to provide safety for road users. ULF is also an administrative requirement that must be implemented, before the road is operated for the public.

The ULF test involved the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) team, the Freeway Permit Service Unit (UPP JBH), the Land Transportation Dinar (HUBDAT) and KORLANTAS. All parts are examined, namely all facilities and infrastructure, building structures and all important elements of toll road operating standards.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



10, 15 & 23 Oktober
October

AUDIENSI DAN SOSIALISASI KE BERBAGAI INSTANSI TERKAIT PEMBAHASAN RENCANA DAN PERSIAPAN PENGOPERASIAN JALAN TOL LAYANG A.P. PETTARANI

Perusahaan melalui Manajemen PT Makassar Metro Network menyelenggarakan kegiatan audiensi dan sosialisasi ke berbagai instansi terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kota Makassar, Kasat PJR, Dirlantas Polda Sulsel, Kainduk Pos PJR Tol, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Ketua Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), Makassar.

Pertemuan dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar diadakan secara formal pada 10 Oktober dan 15 Oktober 2020 di kantor masing-masing instansi. Sementara diskusi dan sosialisasi yang melibatkan Kasat PJR, Dirlantas Polda Sulsel, Kainduk Pos PJR Tol, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Ketua Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), Makassar diadakan dalam satu momen yang sama secara informal pada 23 Oktober 2020.

Keseluruhan kegiatan dilakukan untuk membahas rencana dan persiapan pengoperasian Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, Makassar, sekaligus membahas isu strategis lainnya yang berkaitan dengan jalan tol.

AUDIENCE AND SOCIALITATION TO RELATED INSTITUTIONS ON THE DISCUSSION OF PLANS AND OPERATIONAL PREPARATION OF A.P. PETTARANI ELEVATED TOLL ROAD

The Company through the management of PT Makassar Metro Network held hearings and outreach activities to various related agencies such as the South Sulawesi Provincial People's Representative Council (DPRD), Makassar City DPRD, Head of PJR Unit, Traffic Directorate of South Sulawesi Regional Police (Dirlantas Polda Sulsel), Chief of PJR Toll Post, Chairman of the Logistics and Forwarders Association Indonesia (ALFI) and Chairman of the Land Transportation Organization (ORGANDA), Makassar.

Meetings with the DPRD of South Sulawesi Province and Makassar City were held formally on October 10 and October 15, 2020 at the offices of each agency. While discussions and outreach involving the Head of the PJR, Directorate of South Sulawesi Regional Police, Chief of PJR Toll Post, Chairman of the Indonesian Logistics and Forwarders Association (ALFI) and Chairman of the Land Transportation Organization (ORGANDA), Makassar were held at the same moment informally on October 23, 2020.

All activities were carried out to discuss plans and preparations for the operation of the A.P. Pettarani Elevated Toll Road, Makassar, as well as discussing other strategic issues related to toll roads.



Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



06 November
November

SERTIFIKAT LAIK OPERASI JALAN TOL LAYANG A.P. PETTARANI

Pada 6 November 2020, Direktur Jenderal Bina Marga menerbitkan Sertifikat Laik Operasi Untuk Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 (Jalan Tol Layang A.P. Pettarani) Makassar.

CERTIFICATE OF OPERATION ELIGIBILITY OF THE A.P. PETTARANI ELEVATED TOLL ROAD

On November 6, 2020, the Director General of Highways issued a Certificate of Operation Eligibility for the Section 3 Ujung Pandang Toll Road (A.P. Pettarani Elevated Toll Road) Makassar.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



11 November
November

AUDIENSI PT MAKASSAR METRO NETWORK DENGAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Manajemen PT Makassar Metro Network menyelenggarakan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Selatan pada 11 November 2020. Agenda pertemuan ini selain untuk membahas persiapan peresmian tol layang, juga terkait perubahan nama MMN. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Pj. Walikota Makassar Rudy Djamaluddin yang juga mendampingi Bapak Gubernur.

AUDIENCE OF PT MAKASSAR METRO NETWORK WITH SOUTH SULAWESI GOVERNOR

The management of PT Makassar Metro Network held an audience with the Governor of South Sulawesi on November 11, 2020. The agenda of this meeting was to discuss the preparations for the inauguration of the elevated toll road as well as the change of name MMN. In the meeting, the Acting Mayor of Makassar Rudy Djamaluddin, who accompanied the Governor, also attended the event.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



26 November
November

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI JALAN TOL LAYANG A.P. PETTARANI

Pada 26 November 2020, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Struktur Jembatan Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 (Jalan Tol Layang A.P. Pettarani) Makassar.

CERTIFICATE OF OPERATION ELIGIBILITY OF THE A.P. PETTARANI ELEVATED TOLL ROAD

On November 26, 2020, the Minister of Public Works and Public Housing issued a Certificate of Functional Eligibility for the Ujung Pandang Toll Road Bridge Section 3 (A.P. Pettarani Elevated Toll Road) Makassar.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) LAU GUNUNG, SUMATERA UTARA RESMI BEROPERASI

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) milik PT Inpol Meka Energi (IME) yang berlokasi di Desa Lau Gunung, Kecamatan Tanah Pinem, Sumatera Utara resmi dioperasikan sejak 17 Desember 2020 dan siap melayani Warga Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo, Sumatera Utara. PLTA tersebut memiliki kapasitas 2x7.5 MW dan diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan masyarakat serta mendukung program pemerintah pusat untuk meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus mendukung kehandalan pasokan listrik daerah.

LAU GUNUNG HYDRO POWER PLANT (PLTA), NORTH SUMATRA OFFICIALLY OPERATED

PT Inpol Meka Energi's (IME) Hydroelectric Power Plant, located in Lau Gunung Village, Tanah Pinem District, North Sumatra, has been officially operated since December 17, 2020 and ready to serve residents of Dairi Regency and Karo Regency, North Sumatra. The hydropower plant has a capacity of 2x7.5 MW and is expected to support various community activities and support central government programs to increase the electrification ratio, while at the same time supporting the reliability of the regional electricity supply.



Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



17-21 Desember
December

KUNJUNGAN ANGGOTA DPR RI KOMISI 6

Anggota DPR RI Komisi 6 beserta tim terkait mengadakan kunjungan proyek (site visit) untuk melihat dan mencoba langsung Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, Makassar pada 17-21 Desember 2020.

THE VISIT OF MEMBERS OF THE COMMISSION 6 OF DPR RI

Members of the Commission 6 of DPR RI and related teams held a project visit (site visit) to see and try the A.P. Pettarani Elevated Toll Road, Makassar on December 17-21, 2020.

Peristiwa Penting di Tahun 2020

2020 Key Events



PAPARAN PUBLIK (*PUBLIC EXPOSE*)

Perusahaan menyelenggarakan kegiatan Paparan Publik (*Public Expose*) secara virtual melalui Aplikasi Zoom pada 23 Desember 2020. Meski diselenggarakan di tengah Pandemi Covid-19, seluruh rangkaian kegiatan tetap dilaksanakan sesuai prosedur dengan dihadiri oleh berbagai *stakeholder* seperti para pemegang saham, analis, sekuritas, media dan tamu undangan dari unit bisnis Perusahaan.

Paparan publik merupakan penjelasan umum kepada publik yang diwajibkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menjelaskan kinerja Perusahaan ditahun tersebut, agar informasi kinerja dan keuangan perusahaan dapat tersebar secara merata.

PUBLIC EXPOSE

The Company held a virtual Public Expose through the Zoom Application on December 23, 2020. Even though it was held in the middle of the Covid-19 Pandemic, the entire series of activities were still carried out according to procedures attended by various stakeholders such as shareholders, analysts, securities, media and invited guests from the Company's business units.

Public exposure is a general explanation to the public, which is required by the Indonesia Stock Exchange to explain the Company's performance in that year, so that information on the company's performance and finances can be distributed evenly.



Laporan Manajemen

Management Reports



Perusahaan terus berkomitmen dan berupaya untuk menjalankan berbagai inisiatif strategis guna meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.

The Company is always committed to carrying out various strategic initiatives in order to improve the overall quality of its performance and participating in infrastructures development in various areas in Indonesia.



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

“

Untuk menilai kinerja Direksi, Dewan Komisaris menggunakan metode pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan oleh Perseroan pada tahun sebelumnya, termasuk rencana kerja dan anggaran Perseroan.

In evaluating the Board of Directors' performance, the Board of Commissioners uses performance related achievements against the targets set by the Company in the preceding year, including the Company Work plan and budget.

KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hikmat-Nya yang telah menjaga arah PT Nusantara Infrastructure Tbk dalam mengatasi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perdagangan dunia dan risiko yang ditimbulkan bagi kehidupan manusia oleh karena penyebaran pandemi virus Covid-19.

Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyampaikan Laporan Dewan Komisaris tahun 2020 yang menjelaskan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas kegiatan dan kinerja manajemen Perseroan sepanjang tahun buku. Dewan Komisaris memastikan bahwa Perseroan dikelola secara profesional, sesuai dengan arahan Perjanjian Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEAR VALUED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

All praise to Almighty God for His grace and favour which have maintained the direction of PT Nusantara Infrastructure Tbk. to weather the unprecedented disruptions to world trade and the risks posed to human life by the universal spread of the Covid-19 virus pandemic.

It is an honour for us to present the 2020 Board of Commissioners Report, which describes the Board of Commissioners' supervisory duties of the Company's management activities and performance throughout the fiscal year. The Board of Commissioners ensures that the Company is managed in a professional manner, in accordance with the directives of the Shareholders Agreement and the applicable laws and regulations.



JOSE MA. KAMANTIGUE LIM

Komisaris Utama

President Commissioner



Dalam laporan ini, Dewan Komisaris akan melaporkan pandangan kami mengenai perekonomian global dan nasional, penilaian terhadap kinerja Direksi serta bagaimana kami menyampaikan nasihat dan masukan bagi Direksi, pengawasan kami terhadap implementasi strategi Perusahaan, prospek usaha tahun 2021, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), serta setiap perubahan komposisi Dewan Komisaris yang terjadi pada tahun 2020.

ANALISIS EKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 secara drastis mengganggu aktivitas bisnis dan perdagangan di seluruh dunia yang menyebabkan penurunan PDB di sebagian besar negara, yang bahkan belum diketahui sejauh mana pengaruhnya dan arah pemulihannya hingga tahun 2021. Di Indonesia, aktivitas bisnis di semua sektor menurun, dengan sektor pariwisata dan perjalanan hampir berhenti total. Namun, karena fundamental ekonomi yang kuat, Indonesia masih mencatatkan perlambatan ekonomi

In this report, the Board of Commissioners reports on the global and national economy, the assessment of the performance of the Board of Directors and how we submit our advices and inputs for the Board of Directors, on business prospects for 2021, the implementation of Good Corporate Governance (GCG), and on any changes in the composition of the Board of Commissioners that has occurred in 2020.

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC ANALYSIS

The Covid-19 pandemic of 2020 drastically disrupted business activities and trade throughout the world causing a downturn in most countries GDP, the true extent of its impact and recovery direction will not be known until 2021. In the case of Indonesia, business activities in all sectors declined, with tourism and travel almost coming to a complete halt. However, because of its underlying strong economic fundamentals, Indonesia has fared better in terms of economic slowdown than its ASEAN neighbours,

lebih baik daripada negara tetangga di ASEAN, termasuk Malaysia (-5,6%), Filipina (-7,3%) dan Thailand (-6,5%). Akibatnya, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pengeluaran pemerintah dan permintaan impor yang turun drastis.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Untuk menilai kinerja Direksi, Dewan Komisaris melakukan *review* kinerja dengan membandingkan pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan oleh Perseroan pada tahun sebelumnya, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP). Penilaian tersebut juga memperhitungkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan seperti kondisi makro ekonomi dunia dan Indonesia.

Tetapi, tahun 2020 tidaklah normal dengan adanya pandemi Covid-19 yang memperlambat pertumbuhan kegiatan bisnis. Faktor eksternal makro ini, yang tidak dapat diramalkan dan tidak dapat diduga seperti kecepatan penyebaran virus ke seluruh dunia, merusak rencana kerja banyak perusahaan untuk tahun 2020, termasuk Nusantara Infrastructure. Rencana Kerja yang optimis untuk tahun 2020, yang didasarkan pada sedikit perbaikan kondisi perdagangan yang bergejolak dalam perekonomian global tahun 2019 serta fundamental ekonomi dan keuangan Indonesia yang sehat, tidak dapat terwujud karena pandemi.

Fokus Direksi yang sejalan dengan Dewan Komisaris di tahun 2020 ini bukan pada kinerja operasional, pencapaian dan perolehan pendapatan melainkan pada kesehatan dan keselamatan karyawan Perseroan sebagai aset utama kami selama tahun yang luar biasa ini. Pada awal Maret 2020, ketika pandemi benar-benar mulai melanda Indonesia, Direksi, dengan saran dan dukungan Dewan Komisaris, membentuk Satgas Covid-19 untuk memberikan saran harian dan mingguan melalui aplikasi komunikasi WhatsApp Group (WAG) Perseroan kepada semua staf terkait pandemi dan arahan pemerintah.

Tidak ada staf yang diberhentikan selama tahun ini dan pelaksanaan honorarium juga dapat berlangsung dengan normal. Direksi menempatkan kesehatan dan kesejahteraan staf di atas segalanya dalam memetakan strategi bisnis untuk tahun bisnis yang belum pernah terjadi sebelumnya

including Malaysia (-5.6%), The Philippines (-7.3%) and Thailand (-6.5%). As a result, economic growth was dependent largely on government spending and a deep drop in import demand.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

In evaluating the Board of Directors' performance, the Board of Commissioners reviews performance by comparing against the targets set by the Company in the preceding year, including the Company Work Plan and Budget (RKAP). The assessment also takes into account external factors that can affect the Company's performance such as macro-economic conditions in the world and in Indonesia.

The year 2020 was anything but normal with the Covid-19 pandemic slowing down the growth of business activities. This macro external factor, which was neither foreseen nor could have been, such as the speed with which the virus spread throughout the world, played havoc with companies work plans for 2020 and P.T. Nusantara Infrastructure was no exception. The optimistic Work Plan for 2020, based on a slight improvement in the volatile trading conditions in the global economy in 2019 and Indonesia's sound economic and financial fundamentals, could not be realized because of the pandemic.

Rather than operational performance, achievements and revenue generation, the focus for the Board of Directors in 2020, in lock-step with the Board of Commissioners, was the health and safety of the Company's staff, our primary asset during this extraordinary year. In early March 2020 when the pandemic really began to take hold in Indonesia, the BOD with the advice and support of the BOC set up a company Covid-19 Task Force to provide daily and weekly advice to all staff on the pandemic and government directives via a communication application called WhatsApp Group (WAG).

No staff were laid-off during the year and honorarium implementation was conducted normally. The Board of Directors put the health and welfare of staff above everything else in charting the business strategy for this unprecedented business year. The Company has also

ini. Perseroan juga telah memberikan dukungan tambahan kepada staf, dan dalam kasus-kasus tertentu kepada keluarga staf, mulai dari penyediaan vitamin, makan siang, *rapid test* dan PCR (*Polymerase Chain Reaction*) *swab test*.

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Direksi yang telah menerapkan strategi perusahaan yang bijaksana dan penuh kepedulian dengan cepat dan efektif untuk melindungi karyawan Perseroan dan keluarga mereka. Tindakan tersebut tentu dapat meningkatkan kepercayaan dan niat baik yang sudah ada di antara staf Perseroan dan akan menjadi batu loncatan bagi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan di tahun 2021 setelah pandemi diatasi dan program vaksinasi selesai.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi yang telah memandu Perseroan mencapai hasil yang membanggakan bagi pemegang saham, pemangku kepentingan dan karyawan selama tahun gejolak ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pandemi Covid-19.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Direksi telah menyusun kebijakan strategis Perseroan untuk tahun 2020 yang sebagian besar didasarkan pada situasi ekonomi dunia dan nasional pada akhir tahun 2019, dan kemungkinan jalur/arah unit bisnis kami memasuki tahun 2020. Keempat Unit Bisnis kami didorong untuk memperkuat keunggulan operasional, meningkatkan efisiensi, melakukan inovasi dan terus menjajaki pengembangan bisnis strategis.

Dampak mendadak dan sangat buruk dari pandemi ini tidak dapat diramalkan sebelumnya. Untungnya, struktur manajemen Perusahaan yang kuat, dikombinasikan dengan sifat bisnis inti kami, di mana selalu ada permintaan akan layanan infrastruktur bahkan selama pandemi, memungkinkan Perseroan untuk mengatasi tantangan dan melewati tahun 2020 dengan fundamental yang utuh dan prospek bisnis untuk tahun 2021 yang cenderung meningkat di semua sektor. Bisnis infrastruktur Perseroan yang terdiversifikasi terbukti berdampak positif dalam melakukan mitigasi risiko saat pandemi.

provided additional support to the staff and in certain cases to the family, from supply of vitamins, lunch meals, to rapid tests and PCR (*Polymerase Chain Reaction*) *swab test*.

The Board of Commissioners would like to commend the Board of Directors for implementing such a sensible and caring corporate strategy so quickly and effectively in order to protect Company staff and their families. Such actions can only increase the trust and goodwill that already exists among Company staff and will provide a springboard for the Company's sustainable growth in 2021 once the pandemic is contained and the vaccination program completed.

Furthermore, the Board of Commissioners would like to extend their appreciation to the Board of Directors for guiding the Company to achieve such a commendable outcome for shareholders, stakeholders and employees during a year of unprecedented economic turbulence brought on by the Covid-19 pandemic.

MONITORING ON COMPANY'S STRATEGY IMPLEMENTATION

The Board of Directors prepared the Company's strategic policy for 2020 based largely on the world and Indonesian economic situation at the end of 2019 and the likely trajectories of our business units into 2020. The four Business Units were encouraged to strengthen operational excellence, improve efficiency, innovate and continue to explore strategic business development.

The sudden and devastating impact of the pandemic was not and could not have been foreseen. Fortunately, the strong Company management structure combined with the nature of our core business, where there is always demand even during a pandemic for infrastructure services, enabled the Company to weather the storm and emerge at year-end with the fundamentals intact and upward trending business prospects in all sectors for 2021. The Company's diversified infrastructure businesses has proven to have a positive impact in mitigating the risks during the pandemic.

PEMENUHAN FUNGSI PENGAWASAN MELALUI PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Jajaran Dewan Komisaris memenuhi fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan dengan memberikan masukan dan nasihat kepada Direksi untuk menunjang pelaksanaan kinerja optimal dari Direksi dalam menjalankan bisnis usaha Perusahaan. Pemberian nasihat dilakukan melalui rapat gabungan yang diselenggarakan dengan melibatkan Direksi untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dan langkah apa yang dibutuhkan dalam menghadapi kendala dan hambatan yang terjadi.

Sepanjang tahun 2020, rapat gabungan telah diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali dengan berbagai pembahasan terkait proses operasional Perseroan di tahun 2020. Melalui rapat tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi hingga arahan yang dipandang dapat menunjang Direksi menyempurnakan kinerjanya di Perusahaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas performa Perusahaan secara keseluruhan dan mampu bergerak lebih tangguh dalam melewati tahun 2020 yang menantang.

PANDANGAN TERKAIT PROSPEK USAHA TAHUN 2021

Tahun 2021 dipandang masih berada di kondisi yang belum cukup membaik secara sempurna dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang dinilai memiliki potensi besar untuk terjadi dalam jangka panjang. Melihat pencapaian baik di tahun 2020 di mana Perusahaan masih dapat mempertahankan stabilitas performanya, baik keuangan dan operasional dengan menjaga agar penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan, Dewan Komisaris menilai prospek usaha di tahun 2021 masih dipandang memiliki arah *recovery plan* yang terstruktur dengan baik; dengan bergantung kepada salah satu faktor eksternal utama, yaitu kesuksesan program vaksinasi masal.

Direksi sendiri telah menyusun proyeksi bisnis untuk tahun 2021 dengan mengacu pada pertimbangan serta asumsi yang dibuat dengan cermat namun tetap realistis. Dari jajaran Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya pada prospek usaha yang telah dibuat oleh Direksi untuk menjadi salah satu landasan Perusahaan dalam meraih pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun 2021.

FULFILLMENT OF THE SUPERVISION FUNCTION THROUGH ADVISING TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners fulfills its supervisory function on Company management by providing inputs and advices to the Board of Directors to support the Board of Directors' optimum performance in running the Company's business. Supervision is given through joint meetings which are held with the Board of Directors' involvement to find out about the management process and the necessary steps for handling any constraint and obstacle.

In 2020, 6 (six) joint meetings were held with discussion on the Company's operational process in 2020. Through the meetings, the Board of Commissioners conveyed recommendations and suggestions that could support the Board of Directors' performance improvement in the Company, thus raising the expectation in improving the Company's overall performance and capability to move forward through the challenging 2020.

VIEWS ON 2021 BUSINESS PROSPECTS

The year 2021 is considered to be year of slow improvement toward complete recovery due to the Covid-19 pandemic, which has great potential to occur in the long term. Seeing the good achievements in 2020 in which the Company was able to maintain the stability both financial and operational performance by preventing significant decline, the Board of Commissioners assesses that the 2021 business prospects will have a well-structured recovery plan; by depending on one of the main external factors, namely the success of the mass vaccination program.

The Board of Directors has prepared a 2021 business projection with reference to careful yet realistic considerations and assumptions. The Board of Commissioners fully supports the business prospects made by the Board of Directors to become one of the foundations for the Company to achieve better performance in 2021.



1. **LETJEND TNI (PURN) JOHNY J. LUMINTANG**
Komisaris Independen
Independent Commissioner
2. **JOSE MA. KAMANTIGUE LIM**
Komisaris Utama
President Commissioner

3. **RODRIGO EMMANUEL FRANCO**
Komisaris
Commissioner
4. **FARID HARIANTO**
Komisaris
Commissioner

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG) DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR)

Penerapan prinsip-prinsip GCG dan CSR merupakan kewajiban bagi Perseroan dan menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh manajemen. Bagi Perseroan, subjek tersebut lebih dari sekadar kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Esensinya terletak pada keinginan seluruh karyawan dan manajemen untuk membangun perusahaan yang sehat, akuntabel dan berkelanjutan yang dapat dibanggakan oleh semua pemangku kepentingan.

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Perusahaan yang sangat efisien dan efektif pada kuartal pertama tahun ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Direksi terhadap penerapan GCG dan CSR.

THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

The implementation of GCG and CSR principles is an obligation for the Company and one that is taken very seriously by the management. It amounts to more than compliance with applicable laws and regulations. Its essence lies in the willingness of all employees and management to build a healthy, accountable and sustainable company that all stakeholders can be proud of.

The rapid establishment of the highly efficient and effective Company Covid-19 Task Force in the first quarter of the year demonstrated powerfully the Board of Directors' commitment to both GCG and CSR.

Meskipun kegiatan Satgas mendominasi agenda GCG, namun kepatuhan terhadap ketentuan umum yang berlaku bagi pelaku usaha, perusahaan publik dan pasar modal di Indonesia tetap dipertahankan, termasuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang untuk alasan kesehatan dan keselamatan, diadakan secara jarak jauh untuk tahun 2020.

Direksi, dengan dukungan Dewan Komisaris, memastikan Perseroan menjalankan tugasnya sebagai perusahaan publik sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk dalam mengadakan rapat rutin, penyampaian laporan yang akurat dan tepat waktu kepada regulator dan transparansi kinerja keuangan, baik melalui situs Perseroan maupun keterbukaan informasi kepada publik.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dijalankan melalui Program Nusantara Care yang telah dijalankan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang berada dalam lingkup area Perusahaan dan anak usahanya guna menunjang penerapan Protokol Covid-19. Tidak hanya itu, Perusahaan juga melanjutkan komitmen CSR jangka panjang lainnya secara berkelanjutan mendukung peningkatan pendidikan siswa dan guru di beberapa sekolah, kegiatan tanggap bencana serta kegiatan penghijauan yang bertujuan untuk mendukung penghijauan dan kelestarian lingkungan.

Perseroan berupaya untuk meminimalkan dampak negatif proyek terhadap lingkungan fisik, ekonomi dan sosial. Untuk tujuan ini, Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE) Grup, yang didirikan pada tahun 2018, memastikan bahwa semua urusan HSE di Perseroan dilakukan sesuai dengan standar HSE nasional dan global.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DI TAHUN 2020

Terdapat adanya perubahan komposisi Dewan Komisaris di tahun 2020 dengan diangkatnya Bapak Farid Harianto sebagai Komisaris, sehingga komposisi Dewan Komisaris sampai akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Jose Ma. Kamantigue Lim
Komisaris	: Rodrigo Emmanuel Franco
Komisaris Independen	: Letjend TNI (Purn)
	Johny J. Lumintang
Komisaris	: Farid Harianto

While the activities of the Task Force dominated the GCG agenda, compliance with general provisions applicable to business operators, public companies and capital markets in Indonesia was maintained including the holding of the General Meeting of Shareholders (GMS) which for health and safety reasons, was held remotely for 2020.

The Board of Directors with the support of the Board of Commissioners ensures the Company fulfils its duties as a public company as laid down by the Office of the Financial Regulator (OJK) including regular meetings, submission of accurate and timely reports to the Regulator and transparency of financial performance, both through the Company website and disclosure of information to the public.

Corporate Social Responsibility is implemented through the Nusantara Care Program that has been conducted to assist the needs of the communities in the vicinity of the Company and its subsidiaries' projects in an effort to support the implementation of Covid-19 Protocols. In addition, the Company also continues other long-term CSR commitments in a continuous manner to support the education improvement for students and teachers in several schools, disaster awareness activities, and tree-planting activity with a purpose to support reforestation and environmental conservation.

The Company strives to minimize the negative impacts of its projects on the physical, economic and social environment. To this end, the Group level Health, Safety and Environment Department, established in 2018, ensures that all HSE matters in the Company are carried out in accordance with national and global HSE standards.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2020

There was a change in the composition of the Board of Commissioners in 2020 with the appointment of Mr. Farid Harianto as Commissioner. As such, the composition of the Board of Commissioners until the end of 2020 is as follows:

President Commissioner	: Jose Ma. Kamantigue Lim
Commissioner	: Rodrigo Emmanuel Franco
Independent Commissioner	: Letjend TNI (Purn)
	Johny J. Lumintang
Commissioner	: Farid Harianto

APRESIASI

Akhir kata, kami selaku jajaran Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh pihak kepada PT Nusantara Infrastructure Tbk sehingga Perusahaan dapat melewati tahun 2020 yang sangat menantang. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham yang senantiasa memberikan dukungan serta kepercayaan secara penuh kepada Perusahaan. Ungkapan terima kasih kami turut sampaikan sebesar-besarnya kepada Direksi yang telah bekerja keras memberikan kinerja terbaiknya dalam menjaga kestabilan Perusahaan di tengah guncangan yang hadir sepanjang tahun 2020. Tidak lupa kami juga ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada segenap karyawan yang telah mengerahkan partisipasi hingga dedikasi yang tinggi dalam mendukung jalannya bisnis Perusahaan meski harus dilakukan di tengah situasi tidak kondusif. Berkat adanya strategi yang tepat hingga kontribusi penuh tanggung jawab dari Direksi serta seluruh karyawan, Perusahaan mampu bertahan melewati kendala serta hambatan yang mempengaruhi performa kerja Perusahaan secara keseluruhan.

Dewan Komisaris berharap, tahun 2021 dapat membawa nilai yang lebih baik lagi, membawa banyak perubahan ke arah yang lebih positif, dan memiliki masa depan yang lebih cerah, tidak hanya bagi keberlanjutan Perusahaan secara umum, namun juga bagi kehidupan masyarakat secara khusus. Perusahaan terus berupaya untuk memberikan kinerja terbaiknya guna terus melanjutkan visi dan misi Perusahaan untuk menjadi perusahaan terkemuka di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan standar tertinggi demi tercapainya peningkatan kualitas hidup seluruh pemangku kepentingan.

APPRECIATION

Finally, we, as the Board of Commissioners, would like to express our deepest gratitude for the supports from all parties to PT Nusantara Infrastructure Tbk, thus enabling the Company to go through a very challenging 2020. We would like to thank the Shareholders for their continuous support and trust to the Company. We would also like to express our deep gratitude to the Board of Directors who have worked hard to provide their best performance in maintaining the stability of the Company amidst the ever-present shock throughout 2020. In addition, we would also like to thank and appreciate our employees for their participation and high dedication in supporting the Company's business, despite its operation amidst the global pandemic. Due to the strategy adopted by the Board of Directors and all employees, the Company was able to withstand shocks of 2020 and achieve a commendable work performance.

The Board of Commissioners hopes that 2021 can generate even better values, bring many changes in a more positive direction, and have a brighter future, not only for the sustainability of the Company in general, but also for the people's lives in particular. The Company continues to strive to provide its best performance in order to continue its vision and mission to become a leading company in the field of investment and infrastructure development, capable of meeting infrastructure needs with the highest standards in order to achieve improved quality of life for all stakeholders and citizens.



JOSE MA. KAMANTIGUE LIM

Komisaris Utama

President Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report

“

Sepanjang tahun, Direksi didukung oleh Dewan Komisaris, menetapkan strategi dan mekanisme perusahaan yang memungkinkan Perusahaan untuk terus menjalankan bisnis dengan aman sejalan dengan pedoman dan arahan dari Pemerintah.

Throughout the year the Board of Directors supported by the Board of Commissioners put in place corporate strategies and mechanisms to enable the Company to continue conducting business safely and in-line with the government's guidelines and directives.

KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Pertama-tama, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan-Nya terhadap Perusahaan di sepanjang pandemi global tahun 2020 yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berdampak kepada kesehatan dan ekonomi dunia.

Merupakan suatu kehormatan bagi kami, Direksi Perusahaan, untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan di tahun 2020. Laporan ini akan membahas tentang cara manajemen mengatasi tantangan yang dihadirkan oleh pandemi dengan memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan karyawan, menjalankan bisnis dari jarak jauh dengan sepenuhnya mematuhi peraturan dan pedoman pemerintah terkait penanganan khusus di masa pandemi ini.

DEAR VALUED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

First, let us give thanks to God Almighty for guiding the Company through the unprecedented global pandemic of 2020, which affected the world's health and economy.

It is an honour for us as Directors of the Company to submit the Annual Report on the management of the Company for 2020. The report shows how the management coped with the challenges presented by the pandemic putting the safety and welfare of the employees above all else, conducting business remotely in full compliance with government regulations and guidelines on special handlings in this pandemic.



M. RAMDANI BASRI
Direktur Utama & CEO
President Director & CEO

Selama 2020, dua proyek konstruksi besar telah diselesaikan dengan memperhatikan faktor keselamatan kerja dan penerapan protokol kesehatan yang benar. Penerapan protokol kesehatan merupakan salah satu kontribusi yang dirumuskan oleh Satuan Tugas Covid-19 Perusahaan sejak Maret 2020, ketika pandemi mulai meluas di Indonesia.

During this year two major construction projects were completed by taking into account the occupational safety and proper implementation of health protocol. The implementation of health protocol was one of the contributions put in place by the Company Covid-19 Task Force from March 2020, when the pandemic began in earnest in Indonesia.

TINJAUAN EKONOMI

Pada 2019, Perusahaan menghadapi ketidakpastian perekonomian global akibat penurunan volume perdagangan dunia yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Perlambatan ini dihentikan total dan dalam beberapa kasus, bahkan berbalik pada tahun 2020. Tahun 2020 akan selamanya dikenang sebagai tahun pandemi Novel Corona Virus (COVID-19) yang melanda seluruh dunia di kuartal pertama 2020, dan belum sepenuhnya terkendali hingga akhir tahun. Dampaknya terhadap ekonomi dunia luar biasa buruk. Menurut IMF (International Monetary Fund), tidak dapat dipastikan dengan kemungkinan yang sangat nyata di mana ekonomi global bisa berkontraksi sebesar 8%.

ECONOMIC OVERVIEW

In 2019, the Company faced global economic uncertainty due to the decreasing volume of world trade which resulted in a slowdown of world economic growth. This slowdown was brought to a complete halt and, in some cases, even reversed in 2020. The year 2020 will forever be remembered as the year of the Novel Corona Virus (COVID-19) pandemic which swept throughout the inhabited world within the first quarter of the year and by year-end, had yet to be fully contained. The impact on the world economy has been devastating. According to IMF (International Monetary Fund), the impact was unprecedented with the very real possibility that the global economy could contract by 8%.

Perekonomian maju di negara-negara barat dan Pasifik (Jepang, Australia, Selandia Baru) diproyeksikan mengalami penyusutan paling besar. Pelemahan tersebut akan meluas hingga mempengaruhi prospek pasar negara dan ekonomi berkembang, yang diperkirakan akan menyusut antara 2,5% hingga 4% seiring upaya mengatasi wabah virus di negara mereka. Hal ini juga mewakili performa terlemah oleh kelompok ekonomi ini setidaknya dalam enam puluh tahun. Tiongkok yang telah mengalami pertumbuhan dua digit selama dekade terakhir bahkan hanya mencatat pertumbuhan 2,5% pada kuartal pertama tahun 2020 tetapi meningkat menjadi 6,5% pada kuartal terakhir, sehingga bertentangan dengan tren global.

Negara dan ekonomi berkembang seperti Indonesia telah dan akan terus dilanda hambatan ekonomi dari berbagai arah: tekanan pada sistem perawatan kesehatan yang lemah, kerugian di sektor perdagangan dan pariwisata, berkurangnya pengiriman uang, arus modal yang lemah, dan kondisi keuangan yang ketat di tengah hutang yang meningkat. Eksportir energi dan komoditas industri sangat terpukul. Dalam jangka panjang, resesi mendalam yang dipicu oleh pandemi diperkirakan akan meninggalkan bekas luka yang bertahan lama melalui investasi yang lebih rendah, erosi sumber daya manusia melalui hilangnya pekerjaan dan edukasi, dan fragmentasi perdagangan global dan hubungan pasokan.

Di tengah tantangan dan tekanan makroekonomi global ini, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan di Kuartal 1, 2, dan 3 sehingga pertumbuhan kumulatif menjadi -2,0% dengan jatuhnya konsumsi swasta, investasi, dan ekspor akibat dampak pandemi terhadap aktivitas bisnis pada pertengahan 2020. Menurut Bank Dunia, kontraksi ekonomi Indonesia tumbuh moderat menjadi 3,5% (yoy) pada Kuartal III dari 5,3% yoy pada Kuartal II tahun 2020. Sektor terkait ekspor ditunjang oleh pemulihan beberapa harga komoditas pasca pertengahan 2020. Karena fundamental ekonomi yang kuat, Indonesia bernasib lebih baik daripada negara tetangga ASEAN termasuk Malaysia (-5,6%), Filipina (-7,3%) dan Thailand (-6,5%). Akibatnya, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pengeluaran pemerintah dan permintaan impor yang turun drastis.

The advanced economies of the western world and the Pacific (Japan, Australia, New Zealand) are projected to shrink the most. That weakness will spill over to the outlook for emerging markets and developing economies, who are forecast to contract by between 2.5 and 4 percent as they cope with their own domestic outbreaks of the virus. This would represent the weakest showing by this group of economies in at least sixty years. Even China, which has experienced double digit growth for the past decade, recorded only 2.5% growth in the first quarter of 2020 but picked up to 6.5% in the last quarter, thus bucking the global trend.

Emerging market and developing economies such as Indonesia's have been and will continue to be buffeted by economic headwinds from multiple quarters: pressure on weak health care systems, loss of trade and tourism, dwindling remittances, subdued capital flows, and tight financial conditions amid mounting debt. Exporters of energy and industrial commodities have been particularly hard hit. Over the longer horizon, the deep recessions triggered by the pandemic are expected to leave lasting scars through lower investment, an erosion of human capital through lost work and schooling, and fragmentation of global trade and supply linkages.

In the midst of these global macroeconomic challenges and pressures, Indonesia experienced growth contractions in Q1, Q2 and Q3 bringing cumulative growth to -2.0% with private consumption, investment and exports collapsing due to the pandemic's impact on business activity by mid 2020. According to the World Bank, Indonesia economic contraction has moderated to 3.5% yoy in Q3 from 5.3% yoy in Q2 2020. Export related sectors were supported by the recovery of some commodity prices post mid 2020. Because of its underlying strong economic fundamentals, Indonesia has fared better than its ASEAN neighbours including Malaysia (-5.6%), The Philippines (-7.3%) and Thailand (-6.5%). As a result, economic growth was dependent largely on government spending and a deep drop in import demand.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tersedianya dana yang cukup untuk mendanai program stimulus pemerintah dan secara bersamaan mengeluarkan berbagai insentif pajak. Mengambil pendekatan “situasi luar biasa”, Kemenkeu untuk sementara mencabut batas defisit anggaran negara sebesar 3,0% (dari PDB). Hal ini berpotensi membuka pintu untuk lebih banyak penerbitan obligasi jika defisit melebar; tetapi jika ini terjadi, ada pertanyaan apakah pasar akan menerimanya. Setelah melalui serangkaian pertemuan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencapai kesepakatan di mana Kemenkeu akan menerbitkan obligasi senilai Rp838 triliun lagi untuk menambah rencana awal obligasi senilai Rp691 triliun untuk mendanai program stimulus. Penerimaan akan digunakan untuk perlindungan sosial dan untuk mengarahkan permintaan melalui enam saluran untuk menghidupkan kembali perekonomian.

Upaya pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19 masih dalam proses. Menjelang akhir tahun 2020, situasi Covid-19 di Indonesia semakin memburuk akibat kurangnya disiplin di sebagian kalangan masyarakat. Namun, kedatangan vaksin Sinovac dan pengumuman program vaksinasi gratis secara nasional oleh pemerintah pada akhir tahun 2020, ditambah dengan perombakan kabinet Presiden Jokowi, telah memulihkan kepercayaan dunia usaha.

Sementara itu, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran yang agresif untuk membantu memulai perekonomian di tahun 2021. Perekonomian mulai pulih tetapi kecepatannya tetap lemah. Dana asing yang tersisa di awal mulai mengalir kembali. Obligasi dan pasar saham juga pulih, begitu juga dengan Rupiah yang menguat ke level Rp14.120 per Dolar AS pada akhir tahun dari Rp16.700 pada awal April 2020. Tantangan ke depan bagi Pemerintah adalah menurunkan penularan Covid-19 ke tingkat yang lebih terkendali sehingga pemulihan ekonomi serta aktivitas bisnis dan pasar keuangan dapat terus berlanjut. Tantangan bagi Perusahaan adalah untuk terus melindungi staf, mempertahankan tren aktivitas bisnis yang meningkat, terus meningkatkan efisiensi kerja, serta menjalankan proyek-proyek baru dan menghasilkan pendapatan dalam kerangka peraturan Covid-19 pemerintah yang dapat berubah-ubah.

Meanwhile, the Ministry of Finance (MoF) made sure that sufficient funds were available to fund the government's stimulus programme and concurrently introduced various tax incentives. Taking an “extraordinary situation” approach, they temporarily lifted the state budget's 3.0% (of GDP) deficit cap. This potentially opened the gate for more bond issuances should the deficit widen; but if this occurred, there were questions whether the market would take it up. After a series of meetings, the Financial System Stability Committee (KSSK) reached an agreement, where the MoF would issue another IDR838tn worth of bonds to add to the initial IDR691tn of bonds planned, to finance the stimulus programme. The receipts will be spent on social protection and for stimulating demand through six channels, to revive the economy.

Government efforts to control the Covid-19 pandemic remains a work in progress. Towards the end of year 2020, Indonesia's Covid-19 situation has worsened due to a lack of discipline among some sections of society. However, the arrival of the Sinovac vaccine and the announcement of a nationwide free vaccination programme by the government at the end of 2020, combined with President Jokowi's cabinet reshuffle has restored a measure of confidence in the business world.

Meanwhile, the government has also set up an aggressive budget to help kickstart the economy in 2021. The economy is recovering but its pace remains weak. Foreign funds that left earlier are starting to trickle back. The bonds and stock market are also recovering and so is the Rupiah, strengthening to Rp14,120 per USD at year-end from Rp16,700 level in early April 2020. The challenge ahead for the Government will be to bring down Covid-19 infections to a more manageable level so that the economic recovery as well as activity in business and financial market can be sustained. The challenges for the Company are to continue protecting our staff, maintaining the upward trend in business activities, continue improving work efficiency, and get the new projects operational and revenue-earning within the framework of the government's changeable Covid-19 regulations.

KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

Dalam menyusun kebijakan strategis Perusahaan tahun 2020, Direksi telah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi kinerja dan prospek Perusahaan di masa depan. Hal tersebut sebagian besar didasarkan pada situasi ekonomi dunia dan Indonesia pada akhir tahun 2019, dan kemungkinan jalur/arrah unit bisnis kami memasuki tahun 2020. Keempat Unit Bisnis Perusahaan didorong untuk memperkuat keunggulan operasional, meningkatkan efisiensi, melakukan inovasi, dan terus menajaki pengembangan bisnis strategis.

Dampak mendadak dan luar biasa yang berasal dari pandemi tentu tidak dapat diramalkan. Untungnya, struktur manajemen Perusahaan yang kuat, dikombinasikan dengan sifat bisnis inti kami, di mana selalu ada permintaan terhadap layanan infrastruktur bahkan selama pandemi, memungkinkan Perusahaan untuk mengatasi tantangan dan melalui tahun ini dengan fundamental yang utuh dan prospek bisnis yang cenderung meningkat di semua sektor untuk tahun 2021. Bisnis infrastruktur Perusahaan yang terdiversifikasi terbukti berdampak positif dalam memitigasi gangguan saat pandemi.

Sepanjang tahun, Direksi, didukung oleh Dewan Komisaris, menetapkan strategi dan mekanisme perusahaan yang memungkinkan Perusahaan untuk terus menjalankan bisnis dengan aman sejalan dengan pedoman dan arahan dari pemerintah. Salah satu tindakan pertama dan terpenting adalah pembentukan Satuan Tugas Covid-19 Perusahaan pada awal tahun 2020 yang memberikan *update* harian dan panduan bagi semua staf Perusahaan tentang status pandemi dan arahan pemerintah. Tidak ada staf yang diberhentikan selama tahun 2020 dan penerapan honorarium berjalan secara normal. Direksi menempatkan kesehatan dan kesejahteraan staf di atas segalanya dalam menetapkan strategi bisnis untuk tahun bisnis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Perusahaan juga telah memberikan dukungan tambahan kepada staf dan dalam kasus-kasus tertentu kepada keluarga staf, mulai dari penyediaan vitamin, makan siang, *rapid test*, dan *swab PCR* (*Polymerase Chain Reaction*) *test*.

COMPANY STRATEGIC POLICY

In preparing the Company's strategic policy for 2020, the Board of Directors had anticipated various possibilities that could affect the Company's performance and future prospects. These were based largely on the world and Indonesian economic situation at the end of 2019 and the likely trajectories of our business units into 2020. The four Business Units were encouraged to strengthen operational excellence, improve efficiency, innovate and continue to explore strategic business development.

The sudden and devastating impact of the pandemic was not and could not have been foreseen. Fortunately, the strong Company management structure combined with the nature of our core business, where there is always demand even during a pandemic for infrastructure services, enabled the Company to weather the storm and emerge at year-end with the fundamentals intact and upward trending business prospects in all sectors for 2021. The Company's diversified infrastructure businesses has proven to have a positive impact in mitigating the disruption during the pandemic.

Throughout the year the Board of Directors supported by the Board of Commissioners put in place corporate strategies and mechanisms to enable the Company to continue conducting business safely and in-line with the government's guidelines and directives. One of the first and most important actions was the establishment of the Company's Covid-19 Task Force early in 2020 which provided daily updates and guidance to all Company staff on the status of the pandemic and government directives. No staff were laid-off during the year and honorarium implementation was performed accordingly. The Board of Directors put the health and welfare of staff above everything else in charting the business strategy for this unprecedented business year. The Company has also provided additional support to the staff and in certain cases to the family, from supply of vitamins, lunch meals, rapid tests and PCR (*Poymerase Chain reaction*) swab tests.

Pandemi ini memulai suatu cara kerja baru yang umumnya disebut dalam media global sebagai 'kenormalan baru', di mana konsep kerja dari rumah (*work from home*), dengan porsi waktu antara 25% hingga 100%, menjadi hal biasa dan pertemuan bisnis dilakukan dari jarak jauh menggunakan berbagai *platform* media digital seperti Zoom dan Microsoft Teams. Dengan memanfaatkan perkembangan jaringan media internal dengan baik, Perusahaan dapat dengan cepat dan lancar mengatur protokol *Work from Home* (WFH) dan *Work from Office* (WFO) dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan setiap hari.

Efisiensi menjadi subjek utama untuk operasi Perusahaan sepanjang tahun ini karena sangat penting untuk menjaga arus kas selama periode penurunan pendapatan ini, serta membuat pemberi pinjaman, bank, dan pelanggan kami tetap merasa senang. Untuk ini, kami hendak menyampaikan apresiasi kepada manajemen dan semua staf yang telah mencapai tujuan tersebut dalam keadaan sulit seperti sekarang.

KINERJA PERUSAHAAN DI TAHUN 2020

Kinerja keuangan pada tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan, namun tercatat tidak sangat signifikan meski kondisi usaha di tahun 2020 tidak berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya kondisi akibat pandemi Covid-19. Dari sisi pendapatan usaha, di tahun 2020 tercatat sebesar Rp517 miliar, hanya turun sebesar 17,9% jika dibandingkan dengan nilai yang diperoleh di tahun 2019 yakni sebesar Rp630 miliar.

Kemudian pada sisi EBITDA tahun 2020, terdapat adanya penurunan sebesar 36,3% dari Rp347 miliar dengan margin 55% yang dibukukan pada tahun 2019 menjadi Rp221 miliar dengan margin 43% di tahun 2020. Laba Usaha tahun 2020 turut mengalami penurunan sebesar 45,2% menjadi Rp113 miliar dengan margin 22% di tahun 2020 jika dibandingkan dengan perolehan Laba Usaha di tahun 2019 sebesar Rp205 miliar dengan margin sebesar 33%. Adanya penurunan pada EBITDA dan Laba Bersih tersebut terutama disebabkan oleh dominannya struktur biaya tetap (*fixed costs*) yang mencakup Jalan Tol dengan *fixed costs* sebesar 94,9%, Air Bersih dengan *fixed costs* sebesar 75,8%, Energi Terbarukan dengan *fixed costs* sebesar 81,1% yang tidak termasuk *feedstock* sebagai komponen COGS.

The pandemic initiated a new way of working, generally referred to in the world's media as 'the new normal' whereby working from home for between 25 percent to 100 percent of the time became commonplace and business meetings were carried out remotely using a variety of digital media platforms such as Zoom and Microsoft Teams. Utilising its well-developed in-house media network, the Company was able to rapidly and seamlessly setup the Work from Home (WFH) and Work from Office (WFO) protocols and adjust them, as required, on a daily basis.

Efficiency became the byword for the Company's operations throughout the year since it was essential to maintain our cash flow during this period of reduced revenues, as well as keep our lenders, the banks, and our customers happy. The Board would like to express their appreciation to the management units and all staff for achieving this goal under such difficult circumstances.

COMPANY PERFORMANCE IN 2020

In general, the financial performance in 2020 experienced a decline compared to the previous years due to conditions caused by the Covid-19 pandemic. In 2020, operating revenues were recorded at Rp517 billion, a decrease of 17.9% compared to the value obtained in 2019 at Rp630 billion.

In terms of 2020 EBITDA, there was a decrease of 36.3% from Rp347 billion with a margin of 55%, which was recorded in 2019, to Rp221 billion with a margin of 43% in 2020. Operating Profit in 2020 also decreased by 45.2% to Rp113 billion with a margin of 22% in 2020 compared to Operating Profit acquisition in 2019 of Rp205 billion with a margin of 33%. The decline in EBITDA and Net Profit was mainly due to the dominant structure of fixed costs, which included Toll Roads with fixed costs of 94.9%, Clean Water with fixed costs of 75.8%, Renewable Energy with fixed costs of 81.1%, excluding feedstock which was a component of COGS.



1. RIDWAN IRAWAN
Direktur
Director

2. BENNY S. SANTOSO
Direktur
Director

3. M. RAMDANI BASRI
Direktur Utama & CEO
President Director & CEO

4. DANNI HASAN
Direktur
Director

Sementara dari kinerja operasional Unit Usaha di empat sektor kegiatan yaitu jalan tol, air bersih, energi terbarukan dan pelabuhan sepanjang tahun yang penuh gejolak ini sangat patut diapresiasi. Meskipun mengalami beberapa penundaan, Perusahaan berhasil menyelesaikan dua proyek konstruksi besar selama tahun 2020, yaitu jalan tol layang Pettarani Makassar dan proyek pembangkit listrik tenaga air Lau Gunung 15MW di Sumatera Utara. Unit bisnis dan manajemen proyek mereka diminta untuk menyesuaikan diri dengan dampak pandemi yang selalu berubah sambil terus berusaha melindungi kesejahteraan karyawan, menjaga operasi dengan aman, dan menghasilkan pendapatan di tengah permintaan yang menurun.

Bisnis inti kami dalam penyediaan layanan infrastruktur memberikan suatu perlindungan terhadap penurunan umum pada aktivitas non-infrastruktur selama pandemi. Pendapatan Konsolidasi Perusahaan dari sektor jalan tol, pengelolaan air bersih dan energi terbarukan turun masing-masing sebesar 21,1%, 9,28% dan 13,1% *year-on-year*.

Meanwhile, the operational performance of the Business Units in the four sectors of activity namely, toll roads, water supply, renewable electricity and ports throughout this turbulent year was highly commendable. Despite some delays, the Company managed to complete two major construction projects during the year 2020, namely the Pettarani elevated toll-road Makassar and the 15MW Lau Gunung hydro power project in North Sumatra. Business units and their project management were required to adjust to the ever-changing impacts of the pandemic while striving to protect employee welfare, maintain operations safely and generate revenue amid declining demand.

Our core business in the provision of infrastructure services provided something of a cushion against the general decline in non-infrastructure related activities during the pandemic. Revenues from our toll roads, clean water management, and renewable energy sectors declined by 21.1%, 9.28%, and 13.1% respectively by year-on-year. In terms of operating



5. DENN CHARLY G. ESPANOLA
Direktur
Director

6. CHRISTOPHER DANIEL C. LIZO
Direktur
Director

7. AMADEO N. BEJEC
Direktur
Director

8. FRANCIS EMMANUEL D. ROJAS
Direktur
Director

Pada pendapatan usaha, sektor jalan tol berkontribusi paling besar dengan persentase mencapai 63,5% dengan nilai mencapai Rp328 miliar, sehingga dampak dari penurunan lalu lintas yang terjadi di tahun 2020 cukup memberikan pengaruh pada penurunan pendapatan konsolidasian hingga sebesar 17,9%. Kemudian sektor energi terbarukan menyusul dengan berkontribusi sebesar 23,7% yang nilainya mencapai Rp123 miliar dan terakhir adalah sektor pengelolaan air bersih dengan kontribusi sebesar 12,8% dengan nilai sebesar Rp66 miliar.

Penurunan Lalu Lintas Harian (LHR) Kendaraan di sektor jalan tol mulai mengalami penurunan sejak kuartal 1 tahun 2020 menjadi 170,6 LHR jika dibandingkan dengan pencapaian di kuartal 4 tahun 2019 sebesar 191,9 LHR karena adanya fase 1 PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan dari awal bulan April hingga pertengahan bulan Juni. Kemudian, performa LHR jalan tol mencapai titik terendah di kuartal 2 tahun 2020 dengan mencatatkan nilai hanya sebesar 86,3 LHR, di mana hal ini terjadi di fase transisi yang diberlakukan mulai dari bulan Juni hingga bulan Agustus.

income, the toll roads sector contributed the most with a percentage of 63.5% and value of Rp328 billion, thus the impact of declining traffic in 2020 was sufficient to affect the decline in consolidated income by 17.9%. The renewable energy sector followed with a contribution of 23.7% and a value of Rp123 billion, and finally clean water management sector with a contribution of 12.8% and a value of Rp66 billion.

The decline in Daily Traffic (LHR) for vehicles in the toll road sector started in the 1st quarter of 2020 with 170.6 LHR compared to the 4th quarter of 2019 at 191.9 LHR due to PSBB (Large-Scale Social Restrictions) phase 1 conducted from early April to mid-June. The LHR performance of toll roads reached its lowest point in the second quarter of 2020 with a recorded value of 86.3 LHR, which occurred in the transitional PSBB phase effective from June to August.

Namun kemudian, setelah LHR terendah tersebut, selanjutnya terdapat perbaikan pada kuartal 3 dan 4 tahun 2020 dengan perlahan dan bertahap mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik. Pada kuartal 3 dan 4 tahun 2020 di mana menjadi masa diberlakukannya fase lanjutan PSBB yang dilaksanakan pada pertengahan bulan September sampai akhir bulan Desember, tercatat adanya peningkatan menjadi 129,8 LHR di kuartal 3 dan 148,6 di kuartal 4 tahun 2020.

Performa LHR sektor jalan tol di tahun 2020 jika dibandingkan dengan seluruh kuartal di tahun 2019, kuartal 1 lebih rendah 21,3 dari kuartal 1 tahun 2019 dan kuartal 2 lebih rendah 84,2 dari kuartal 2 tahun 2019. Namun, di kuartal 3 lebih tinggi 43,5 dari kuartal 3 tahun 2019 dan kuartal 4 lebih tinggi 18,8 dari kuartal 4 tahun 2019. Secara keseluruhan, performa sektor jalan tol mengalami penurunan sejak awal tahun 2020 yang terjadi karena mulai diberlakukannya PSBB sehingga membatasi mobilitas masyarakat dan mendorong penurunan penggunaan jalan tol oleh masyarakat, namun mulai menunjukkan pemulihan sejak bulan Mei 2020 dan terus meningkat secara bertahap hingga akhir tahun 2020.

Pasokan air bersih melimpah, meskipun di masa pandemi. Bahkan, permintaan domestik akan air bersih diharapkan dapat meningkat karena protokol kebersihan Covid-19 yang direkomendasikan, terutama kebutuhan untuk mencuci tangan secara teratur dan meningkatkan kebersihan secara menyeluruh. Di sisi lain, permintaan air dari sektor industri dan perdagangan/komersial menurun seiring dengan berkurangnya aktivitas bisnis. Untuk POTUM, permintaan domestik tetap kuat sementara permintaan industri mengalami sedikit kontraksi yang mengakibatkan penurunan penjualan keseluruhan mencapai 5,82% di akhir tahun.

Berdasarkan volume, pada kuartal 1 tahun 2020, penjualan air bersih mencapai 18,7 juta liter/hari, lebih rendah 2,5 juta liter/hari dari kuartal 1 tahun 2019. Pada kuartal 2 tahun 2020, penjualan air bersih tercatat sebesar 19,7 juta liter/hari, lebih tinggi 0,4 juta liter/hari dari kuartal 2 tahun 2019, selanjutnya pada kuartal 3 tahun 2020 tercatat mencapai 22,4 juta liter/hari dan lebih tinggi 0,03 juta liter/hari dari

However, after the lowest LHR value, there was an improvement in the 3rd and 4th quarters of 2020, which slowly and gradually recorded better growth. In the 3rd and 4th quarter of 2020, namely the period for PSBB follow-up phase implementation from mid-September to the end of December, an increase was recorded to 129.8 LHR in the 3rd quarter and 148.6 in the 4th quarter of the year.

If we compared the LHR performance of the toll road sector in 2020 to all quarters in 2019, Q1 was 21.3 lower than Q1 in 2019 and Q2 was 84.2 lower than Q2 in 2019. However, Q3 was higher by 43.5 from Q3 of 2019, and Q4 was 18.8 higher than Q4 of 2019. Overall, the performance of the toll road sector has decreased since the beginning of 2020 due to PSBB limiting people's mobility and encouraging a decrease in toll road use by the public, but started to show recovery since May 2020 and increased gradually until the end of 2020.

Abundant supplies of clean water are required whether there's a pandemic or not. In fact, domestic demand could be expected to increase because of the recommended Covid-19 hygiene protocols especially the need for regular hand-washing and enhanced all-round cleanliness. Against this, the demand for water from industry and commerce declined as business activities were reduced. For POTUM, domestic demand remained strong while industrial demand slightly contracted resulting in an overall 5.82% decline in sales at year-end.

Based on volume, in Q1 of 2020, the sales of clean water reached 18.7 million liters/day, 2.5 million liters/day lower than Q1 of 2019. In Q2 of 2020, sales of clean water were recorded at 19.7 million liters/day, 0.4 million liters/day higher than the Q2 of 2019, then in Q3 of 2020 it was recorded at 22.4 million liters/day, 0.03 million liters/day higher than the Q3 of 2019. Finally, in Q4 of 2020, it was

kuartal 3 tahun 2019. Terakhir, pada kuartal 4 tahun 2020, tercatat sebesar 22,6 juta liter/hari dan menjadi lebih tinggi 1 juta liter/hari dari kuartal 4 tahun 2019. Secara keseluruhan, penjualan air bersih pada tahun 2020 tercatat tetap stabil hingga akhir tahun.

Seperti di sektor penjualan air bersih, di sektor penjualan listrik juga mengalami penurunan pada kuartal 1 tahun 2020 dan di kuartal-kuartal selanjutnya mulai memperlihatkan peningkatan dengan adanya pemulihan. Di kuartal 1 tahun 2020, tercatat penjualan listrik adalah sebesar 7,2 rata-rata MW (Mega-Watt) per jam, lebih rendah 4,8 rata-rata MW per jam dibandingkan kuartal 1 tahun 2019. Selanjutnya, mulai terdapat adanya pemulihan di kuartal 2 dengan pencapaian 11,4 rata-rata MW per jam, lebih tinggi 0,3 rata-rata MW per jam dibandingkan kuartal 1 tahun 2019. Pemulihan masih terlihat di kuartal 3 tahun 2020 dengan perolehan mencapai 12,4 rata-rata MW per jam, lebih tinggi 1,0 rata-rata MW per jam dari kuartal 3 tahun 2019. Kemudian ditutup dengan perolehan di kuartal 4 tahun 2020 sebesar 12,5 rata-rata MW per jam, lebih tinggi 1,1 rata-rata MW per jam dari kuartal 4 tahun 2019. Penjualan listrik secara keseluruhan di tahun 2020 tetap berada pada kondisi stabil hingga akhir tahun.

Sektor pelabuhan terkena dampak paling buruk karena pandemi mengirimkan gelombang kejutan di sepanjang rantai pasokan, jaringan pengiriman, dan pelabuhan, yang menyebabkan jatuhnya volume kargo di seluruh dunia. Bisnis layanan pelabuhan kami di Lampung (Portco dan ISAB) juga tidak dikecualikan dan mengalami penurunan volume kargo yang diangkut sebesar 51,7% selama tahun 2020.

Perbandingan Hasil yang Dicapai di Tahun 2020 dengan Target dan Kendala yang Dihadapi di Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan target yang telah disusun di awal tahun, pendapatan yang terealisasi pada tahun 2020 dari sektor jalan tol, bisnis air, dan energi terbarukan tercatat tidak terpenuhi dengan persentase hanya masing-masing sebesar 34%, 1% dan 18% dari target. Tidak tercapainya hasil yang diperoleh dengan target RKAP secara umum disebabkan oleh kendala terbesar yang dihadapi oleh Perusahaan di tahun 2020, yakni adanya pandemi Covid-19

recorded at 22.6 million liters/day and became higher/lower by 1 million liters/day from Q4 of 2019. Overall, the sales of clean water in 2020 remained stable until the end of the year.

As in the clean water sales sector, the electricity sales sector also experienced a decline in the Q1 of 2020, while in the subsequent quarters it began to show an increase due to the recovery. In Q1 of 2020, electricity sales were recorded at 7.2 MW (Mega-Watt) per hour on average, lower by 4.8 MW per hour on average compared to the Q1 of 2019. Furthermore, a recovery happened in Q2 with the achievement of 11.4 MW per hour on average, 0.3 MW per hour on average compared to the Q1 of 2019. The recovery still occurred in the Q3 of 2020 with the acquisition of 12.4 MW per hours on average, 1.0 MW per hour higher than the 3rd quarter of 2019. Then it closes with the acquisition in the 4th quarter of 2020 of 12.5 MW per hour on average, higher by 1.1 MW per hour on average from Q4 of 2019. Overall, electricity sales in 2020 remained stable until the end of the year.

The port sector was the most severely affected as the pandemic sent shockwaves through supply chains, shipping networks and ports, leading to plummeting cargo volumes worldwide. Our port services business in Lampung (Portco and ISAB) proved no exception to this trend, suffering a 51.7% reduction in the volume of cargo carried during 2020.

Comparison of Results Achieved in 2020 with the Targets and Challenges During the Year

Compared with the planned targets at the beginning of the year, the revenues from toll road, water business, and renewable energy in 2020 were not fulfilled, with each reaching only 34%, 1%, and 18% from the initial targets. The failure to achieve the targets laid down in RKAP was due mainly to the Covid-19 pandemic which had a major impact on the course of the Company's business operations and on the decreasing income and effectiveness of carrying out

yang berpengaruh besar pada jalannya operasional bisnis Perusahaan dan berdampak pada menurunnya pendapatan dan efektivitas dari pelaksanaan aktivitas operasional sehari-hari. Adanya kebijakan dari Pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar rumah turut mempengaruhi terjadinya penurunan pada kinerja dan produktivitas Perusahaan dan juga berdampak pada menurunnya tingkat kebutuhan dari masyarakat dan pelanggan.

PROSPEK USAHA TAHUN 2021

Di dunia kita yang sangat terkoneksi, prospek bisnis untuk tahun 2021 akan terkait erat dengan kemajuan yang dibuat secara global dalam menanggulangi pandemi dan meluncurkan program vaksin. Pembagian vaksin sangatlah penting untuk memulihkan kepercayaan dan membangkitkan sektor perdagangan dan industri agar dapat membangun kembali dan bahkan menaikkan tingkat produksi.

Di Indonesia, program vaksin dijadwalkan akan dimulai pada awal 2021 dan hingga saat ini, tanggapan pemerintah terhadap pandemi cukup terbilang sukses jika dibandingkan dengan tanggapan dari banyak negara barat yang memiliki populasi jauh lebih rendah dan sistem perawatan medis yang jauh lebih maju. Dengan asumsi bahwa program vaksinasi akan dimulai di Indonesia pada Januari 2021 dan di seluruh dunia, Direksi percaya bahwa peningkatan bisnis yang ditunjukkan pada kuartal terakhir tahun 2020, akan terus berlanjut di sektor inti kami hingga tahun 2021 meskipun sektor pelabuhan akan mengalami pemulihan lebih lambat dibandingkan sektor lainnya.

Sama seperti efisiensi adalah salah satu kata kunci Perusahaan untuk mengatasi pandemi di tahun 2020, inovasi adalah salah satu kata kunci lainnya untuk mempertahankan dan memperluas bisnis kami di tahun 2021 dan seterusnya. Interkoneksi dan digitalisasi pada masa kini telah menjadi suatu norma di dunia bisnis. Perusahaan pun perlu merangkul digitalisasi di setiap sektor intinya dan mengembangkan layanan konsultasi yang menyediakan berbagai *platform* digital yang menawarkan diagnosis dan solusi untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan pendapatan operasional.

daily operational activities. The existence of a policy from the Government to limit activities outside the household affected the decline in the Company's performance and productivity, as well as causing the decreased level of needs from the public and customers.

BUSINESS PROSPECTS IN 2021

In our super-connected world, the business prospects for 2021 will be tied firmly to the progress made globally on containing the pandemic and rolling out the vaccine programme. The latter is particularly important for restoring confidence and enabling commerce and industry to re-establish production levels and even expand.

In Indonesia, the vaccine programme is scheduled to begin in early 2021 and to date, the government's response to the pandemic may be counted as a success when compared with the response of many western nations with much lower populations and far more advanced medical care systems. On the assumption that the vaccine programme will begin in Indonesia in January 2021 and in the rest of the world, the Board of Directors believes that the upturn in business shown in the last quarter of 2020, will continue in our core sectors through 2021 although the ports sector will make a slower recovery than the other sectors.

Just as efficiency was one of the Company's bywords for weathering the pandemic in 2020, innovation is one of the bywords for maintaining and expanding our business in 2021 and beyond. Inter-connectivity and digitalization are now the norm in the business world. The Company needs to embrace digitalization in each of its core sectors and develop consultancy services that provide a variety of digital platforms offering diagnostics and solutions to improve operational efficiency, safety and revenue.

Sebagai contoh, Perusahaan telah memiliki perangkat digital yang cukup maju di MUN untuk manajemen lalu lintas dan sedang mengembangkan *platform digital O&M services* serupa di sektor air. Tetapi POTUM tengah berinovasi untuk melampaui penggunaan internal dan mengembangkan konsultasi digital terpisah yang menawarkan layanan peningkatan bisnisnya kepada klien sektor publik dan swasta. Bisnis non-inti tersebut direncanakan akan menyumbang hingga 30% dari total pendapatan POTUM dalam lima tahun mendatang.

Direksi mengimbau manajemen Unit Bisnis untuk terus mempraktikkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, terutama efisiensi, yang mampu memandu kami melewati tahun 2020 dan merangkul inovasi dan digitalisasi yang akan memastikan keberlanjutan operasi kami hingga tahun 2021 dan seterusnya.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG) DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) TAHUN 2020

Perusahaan terus berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang memastikan bahwa manajemen menghasilkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan dalam jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan secara transparan. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris memberikan pedoman mengenai kegiatan GCG dan CSR yang didukung oleh organ-organ seperti Unit Audit Internal, Corporate Affairs, Sekretaris Perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia (HRD), Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE) dan Unit Manajemen Risiko.

Pada awal tahun 2020, Perusahaan membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Covid-19 untuk merumuskan dan mengawasi seluruh protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 berdasarkan pedoman pemerintah di level *holding* dan anak usaha. SATGAS yang dipimpin oleh General Manager Departemen Sumber Daya Manusia (HRD) ini beranggotakan 16 orang yang mewakili setiap proyek yang dikelola oleh unit bisnis Perusahaan di seluruh Indonesia, termasuk staf dari Kantor Pusat Jakarta.

The Company already has quite advanced digital tools in MUN for traffic management for example, and is developing similar digital O&M services platforms in the water sector. However, POTUM is going beyond internal use and developing a separate digital consultancy offering its business enhancement services to public and private sector clients. It is planned that such non-core business will account for up to 30% of POTUM's total revenues within the next five years.

The Board of Directors urges the Business Units' management to continue practicing the sound management principles, especially efficiency, that guided us through 2020 and to embrace the creed of innovation and digitalization that will ensure the sustainability of our operations through 2021 and beyond.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) AND SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IN 2020

The Company continues to be committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR) that ensure that the management produce long-term sustainable economic, social and environmental value for shareholders and stakeholders in a transparent manner. The Board of Directors, together with the Board of Commissioners, provide guidelines on GCG and CSR activities supported by organs such as the Internal Audit Unit, Corporate Affairs, the Corporate Secretary, the Human Resources Department (HRD), the Health, Safety and Environment Department (HSE) and the Risk Management Unit.

In early 2020 the Company established a Covid-19 Task Force (SATGAS) to formulate and oversee all Covid-19 prevention and handling protocols based on the government's guidance at the holding and subsidiary levels. The Task Force, led by the General Manager of the Human Resources Department (HRD), has 16 members representing every project managed by the Company's business units throughout Indonesia, including the staff from the Jakarta Head Office.

SATGAS tersebut membuat laporan harian tentang status pandemi yang diedarkan ke seluruh staf melalui Grup WhatsApp (WAG) Perusahaan, bersama dengan laporan mingguan dan bulanan yang dikirimkan ke Direksi dan manajer Unit Bisnis. Protokol seperti pembagian jadwal masuk kantor yang telah disesuaikan sejalan dengan peraturan pemerintah yang terus berubah sesuai dengan status pandemi.

Informasi mengenai kinerja Perusahaan didistribusikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, Laporan Keuangan yang telah diaudit, dan Laporan Tahunan, yang semuanya tersedia untuk umum. RUPS diadakan secara jarak jauh melalui Zoom pada 19 Agustus 2020 dikarenakan pandemi; namun demikian, RUPS dihadiri dengan baik oleh pemegang saham yang dapat mengajukan pertanyaan.

Selama tahun 2020, kegiatan Nusantara Care, program CSR Perusahaan, sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi. Fokus utama program tersebut adalah untuk mendukung masyarakat, terutama masyarakat yang berada dalam lingkup area Perusahaan dan menyediakan kebutuhan yang menunjang penerapan Protokol Covid-19 serta meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Komitmen CSR jangka panjang lainnya juga dijalankan secara berkelanjutan oleh kami dengan mendukung peningkatan pendidikan siswa dan guru di beberapa sekolah, kegiatan tanggap bencana serta kegiatan penghijauan guna mendukung kelestarian lingkungan juga terus dilakukan oleh Perusahaan dan anak usahanya. Hal ini merupakan penghargaan tersendiri atas dedikasi, kerja keras, dan sikap kemanusiaan Perusahaan melalui Nusantara Care untuk senantiasa memberikan kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan.

The Task Force produces daily reports on the status of the pandemic that are circulated to all staff through the Company's WhatsApp Group (WAG), together with weekly and monthly reports that are sent to the Board of Directors and the Business Unit managers. Protocols such as the distribution of office attendance schedules have been adjusted in-line with the government's regulations which change according to the status of the pandemic.

Information on the Company's performance is provided through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS), the audited Financial Statements and the Annual Report, all of which are available in the public domain. The GMS was held remotely via Zoom on August 19th 2020 because of the pandemic but was well attended by shareholders who were able to table questions.

The activities of the Company's CSR programme, Nusantara Care, during 2020 were dominated by the pandemic. The main focus was on supporting and providing communities, especially the communities within the Company's business area, and provided needs that supported the Covid-19 Protocol implementation and improved the community's health. We also conducted other long-term CSR commitments in a sustainable manner by supporting education improvement for students and teachers in several schools, disaster response activities and tree-planting activities to support environmental conservation, which were continuously performed by the Company and its subsidiaries. These actions were tributes to the dedication, hard work and humanity of the Company through Nusantara Care in providing relentless contribution for the community and environment.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DI TAHUN 2020

Pada tahun 2020, terdapat adanya perubahan pada komposisi Direksi, yakni diangkatnya Bapak Benny S. Santoso sebagai Direktur, sehingga komposisi Direksi sampai akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: M. Ramdani Basri
Direktur	: Danni Hasan
Direktur	: Ridwan Irawan
Direktur	: Denn Charly G. Espanola
Direktur	: Amadeo Navalta Bejec
Direktur	: Christopher Daniel Cabrera Lizo
Direktur	: Francis Emmanuel Dalupan Rojas
Direktur	: Benny S. Santoso

PENUTUP

Atas pencapaian Perusahaan selama tahun 2020 yang luar biasa ini, Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pemegang saham, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan Perusahaan. Pandemi telah mengubah cara kita berbisnis, membuat kita semua mempertanyakan pilihan gaya hidup dan merenungkan cara kita, baik secara kolektif maupun individual, dalam memperlakukan sumber daya bumi kita. Dalam banyak hal, ini telah membawa kami lebih dekat sebagai suatu perusahaan dan sebagai individu meskipun ada jarak sosial. Direksi berharap perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat luar biasa di tahun 2020 ini telah memberikan sebuah platform yang berkelanjutan bagi semua staf untuk mengoptimalkan kemampuan mereka dan membawa Perusahaan dan negara Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION IN 2020

In 2020, there was a change in the composition of the Board of Directors, namely the appointment of Mr. Benny S. Santoso as Director, thus until the end of 2020 the composition was as follows:

President Director	: M. Ramdani Basri
Director	: Danni Hasan
Director	: Ridwan Irawan
Director	: Denn Charly G. Espanola
Director	: Amadeo Navalta Bejec
Director	: Christopher Daniel Cabrera Lizo
Director	: Francis Emmanuel Dalupan Rojas
Director	: Benny S. Santoso

CLOSING

For the achievements of the Company during the extraordinary year of 2020, the Board of Directors would like to express their respect and gratitude to shareholders, the Board of Commissioners and all employees. The pandemic has certainly changed the way we do business, made us all question our lifestyle choices and reflect on the way we collectively and individually treat the resources of our planet. In many ways it has brought us closer as a company and as individuals despite social distancing. The Board of Directors hopes that this unprecedented and quite remarkable journey through 2020 has provided all staff with a sustainable platform to optimize their abilities and lead the Company and the Nation to a better future.



M. RAMDANI BASRI

Direktur Utama & CEO

President Director & CEO



Profil Perusahaan

Company Profile



Hingga tahun 2020, kegiatan usaha Perusahaan masih berorientasi pada bidang infrastruktur terintegrasi di bidang transportasi dan infrastruktur utilitas yang terdiri dari 4 (empat) sektor utama, yaitu pengelolaan jalan tol, pelabuhan laut, pengelolaan air minum, dan energi terbarukan.

The Company's business activities as of 2020 were oriented towards integrated infrastructure in transportation and utility infrastructure that consisted of 4 (four) main sectors, namely toll road management, ports, drinking water management, and renewable energy.



Informasi Umum dan Identitas Perusahaan

General Information and Company Identity

Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	PT Nusantara Infrastructure Tbk
Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak Large Trading Based on Fee or Contract
Produk dan Jasa <i>Products and Services</i>	Investasi Investment
Tanggal Pendirian dan Beroperasi Komersial <i>Date of Establishment and Commercial Operation</i>	1 September 1995 September 1, 1995
Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Akta Pendirian Akta No. 3 tanggal 1 September 1995 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, S.H., Notaris di Jakarta Deed of Establishment Deed No. 3 dated September 1, 1995, drawn up before Abdullah Ashal, S.H., Notary in Jakarta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Most Recent Amendment to the Articles of Association Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of No. 23 dated May 12, 2015, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta
Perubahan Nama <i>Name Change</i>	Tahun 1998, Perusahaan mengubah nama menjadi PT Wahana Tradindo Jaya, berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 10 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun yang sama, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mengubah statusnya menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk) dengan kode saham META. In 1998, the Company changed its name to PT Wahana Tradindo Jaya, based on the Notarial Deed No. 23 dated June 10, 1998, which was drawn up before Linda Herawati, S.H., Notary in Jakarta. In the same year, the Company executed an Initial Public Offering and changed its status to a Public Company (Tbk) with ticker code: META.
Kepemilikan Saham <i>Share Ownership</i>	Saham Seri A / Series A Share - PT Bosowa Utama: 100% Saham Seri B / Series B Share - PT Metro Pacific Tollways Indonesia: 74,65% - PT Indonesia Infrastructure Finance: 10,00% Masyarakat / Public : 13,17% Saham Tresuri / Treasury Stock : 2,18%



Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	Rp5.670.000.000.000 Modal Dasar terdiri dari 2 saham Seri A dengan nilai nominal Rp35 per saham dan 80.999.999.999 saham Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham. Rp5,670.000,000,000 The Company's Authorized Capital consists of 2 Series A shares with a nominal value of Rp35 per share and 80,999,999,999 Series B shares with a nominal value of Rp70 per share.	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Issued and Fully Paid Capital</i>	Rp1.239.749.573.545 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh terdiri dari 1 saham Seri A dengan nominal Rp35 per saham dan 17.710.708.193 saham Seri B dengan nominal Rp70 per saham. Rp1,239,749.573,545 The Company's Issued and Fully Paid Capital consists of 1 Series A share with a nominal value of Rp35 per share and 17,710,708,193 Series B shares with a nominal value of Rp70 per share.	
Pencatatan Saham di Bursa Saham <i>Listing on Stock Exchange</i>	Bursa Efek Indonesia, 18 Juli 2011 Indonesia Stock Exchange, July 18, 2011	
Kode Saham <i>Ticker Code</i>	META	
Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>	313 orang 313 employees	
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Equity Tower 38th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru District, South Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province	
Telepon dan Faksimili <i>Telephone and Facsimile</i>	T: +62 21 515 0100 F: +62 21 515 1221	
Surel / Email	information@nusantarainfrastructure.com	
Situs Web / Website	www.nusantarainfrastructure.com	
Media Sosial <i>Social Media</i>	Instagram: nusantara.infrastructure Facebook: Nusantara Infrastructure Twitter: @nusantarainfra	
Kontak Perusahaan <i>Company Contact</i>	Dahlia Evawani Sekretaris Perusahaan Telp: +6221 515 0100 Fax: +6221 515 1221 corsec@nusantarainfrastructure.com	Corporate Secretary Phone: +6221 515 0100 Fax: +6221 515 1221 corsec@nusantarainfrastructure.com

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company

PT Nusantara Infrastructure Tbk merupakan sebuah perseroan terbatas yang didirikan pada 1 September 1995 melalui Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 September 1995 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7.375.HT.01.01.TH.95 tertanggal 28 Desember 1995 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 41/2000 tanggal 19 Oktober 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2001, Tambahan No. 1140. Perusahaan didirikan dengan fokus tujuan sebagai perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, jasa dan pertanian.

Semenjak didirikan hingga saat ini, Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Di tahun 1998, Perusahaan mengubah nama menjadi PT Wahana Tradindo Jaya, dan selanjutnya pada tahun 2001, nama Perusahaan diubah menjadi PT Metamedia Technologies, dan kemudian pada tahun 2006, Perusahaan kembali melakukan perubahan nama menjadi PT Nusantara Infrastructure Tbk dan menjadi nama yang hingga saat ini digunakan oleh Perusahaan.

Perusahaan terus berkomitmen dan berupaya untuk menjalankan berbagai inisiatif strategis guna meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan. Pada tahun 2001, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan kode saham META dan status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk).

Komitmen dan upaya tersebut terus dipegang teguh hingga tahun-tahun berikutnya dan kemudian kembali dihadirkan secara nyata melalui merger yang dilakukan dengan PT Nusantara Konstruksi Indonesia pada tahun 2006 berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan terakhir pada tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 12 Mei 2015, dibuat di hadapan Fathiah

PT Nusantara Infrastructure Tbk is a limited liability company established on September 1, 1995, based on the Deed of Establishment No. 3 dated September 1, 1995, drawn up before Abdullah Ashal, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of establishment was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on Decree No. C2-7.375.HT.01.01.TH.95 dated December 28, 1995, registered with the Registrar of the Central Jakarta District Court under No. 41/2000 dated October 19, 2000, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 15 dated February 20, 2001, Supplement No. 1140. The Company was established with the aim of being a company that is engaged in the fields of trade, construction, industry, transportation, services, and agriculture.

Since its establishment, the Company has undergone several changes to its name. In 1998, the Company changed its name to PT Wahana Tradindo Jaya, and to PT Metamedia Technologies in 2001. In 2006, the Company changed its name to PT Nusantara Infrastructure Tbk which has been used to date.

The Company is always committed to carrying out various strategic initiatives in order to improve the overall quality of its performance. In 2001, the Company executed an Initial Public Offering with META as the ticker code, and the Company's status was changed to Public Company (Tbk).

This commitment and effort have been continuously upheld throughout the Company's journey and manifested through a merger with PT Nusantara Konstruksi Indonesia in 2006 based on the Notary Deed No. 17 dated October 20, 2006, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.

The Company's Articles of Association has also been continuously updated with the most recent amendment conducted in 2015 and stipulated in the Deed of Resolutions of the Company's EGMS No. 23 dated May

Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan persetujuan pemegang saham dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dengan Peraturan OJK (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Akta tersebut disetujui oleh Kemenkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0937940.

Pembangunan di sektor jalan tol menjadi proyek pembangunan pertama Perusahaan dan langkah pertama tersebut membawa Perusahaan memiliki konsesi infrastruktur di bagian barat dan timur Indonesia. Hingga kini, konsesi jalan tol yang dikelola Perusahaan melalui entitas anak usaha, yaitu Jalan Tol Serpong-Pondok Aren, Jalan Tol Pelabuhan Soekarno Hatta-A.P. Pettarani, Makassar, Jalan Tol Jembatan Tallo-Simpang Mandai Makassar, dan Jalan Tol Kebon Jeruk-Penjarangan. Selain jalan tol, Perusahaan terus memperluas portofolio ke berbagai sektor infrastruktur di Indonesia, yaitu pelabuhan laut, pengelolaan air minum, dan energi terbarukan.

Sampai akhir tahun 2020, Perusahaan telah memiliki 4 (empat) entitas anak, 8 (delapan) entitas anak tidak langsung, dan 3 (tiga) entitas asosiasi sebagai kelompok usaha yang bergerak di 4 (empat) sektor infrastruktur, yaitu jalan tol, pengelolaan air bersih, energi terbarukan, dan pelabuhan.

Hingga kini Perusahaan terus aktif memberikan kontribusi nyata dalam mendukung Pemerintah mewujudkan program percepatan pembangunan infrastruktur terutama di ranah infrastruktur ekonomi, yakni berbagai infrastruktur yang hadir untuk mendorong pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat dan keberadaannya dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, seperti prasarana umum, energi listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih, sanitasi dan pembuangan limbah.

12, 2015, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, with the approval of the shareholders in regard to the adjustment of the Company's Articles of Association to the Regulation of Financial Services Authority (POJK) No. 32/POJK.04/2014 regarding Plan and Convention of General Meeting of Shareholders for Public Companies, and POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-0937940.

Construction in toll road sector was the Company's first construction project which led the Company to own infrastructure concessions in the western and eastern parts of Indonesia. Up to date, the Company has managed a number of toll road concessions through its subsidiary entities, such as Serpong-Pondok Aren Toll Road, Soekarno Hatta Harbor-A.P. Pettarani Makassar Toll Road, Tallo Bridge-Simpang Mandai Makassar Toll Road, and Kebon Jeruk-Penjarangan Toll Road. The Company continues to expand its portfolio to various infrastructure sectors in Indonesia, namely seaports, drinking water management, and renewable energy.

As of the end of 2020, the Company has 4 (four) subsidiaries, 8 (eight) indirect subsidiaries, and 3 (three) associated entities as a business group that operates in 4 (four) infrastructure sectors, namely toll roads, water supply management, renewable energy, and seaports.

The Company continues to actively make real contributions in supporting the government to realize the acceleration program for infrastructure development, especially in the economic infrastructure, namely various infrastructure that exist to encourage the implementation of community economic activities. Their existence shall be utilized by the community at large, such as for public infrastructure, electricity, telecommunication, transportation, irrigation, clean water, sanitation, and waste disposal.

Filosofi Logo Perusahaan

Logo Philosophy

Logo Nusantara Infrastructure digambarkan dengan dua elemen utama, yaitu huruf “N” berwarna biru yang ditempatkan proporsional di tengah dan dilintasi oleh dua elemen bentuk melengkung berwarna biru dan merah yang menyatu. Dua elemen tersebut melintang dari kiri ke kanan, dari sebuah titik kemudian membesar.

“N” adalah huruf depan kata “Nusantara”, sebuah kata yang berasal dari dua kata Bahasa Sansekerta, yaitu nusa yang berarti “pulau” dan antara yang berarti “luar”. Sementara lengkung dua elemen yang melintasi huruf “N” dari kiri ke kanan diartikan sebagai cakrawala, dunia, khatulistiwa. Menyatunya kedua elemen tersebut dapat diartikan sebagai kekuatan.

Logo Nusantara Infrastructure memiliki dua warna dasar, yaitu biru dan merah. Warna biru sering dihubungkan dengan laut (kedalaman) dan langit (luas sampai tak terhingga). Warna biru melambangkan konsentrasi, kooperatif, cerdas, perasa, integratif, tenang, bijaksana, banyak kawan. Warna biru sering dihubungkan dengan kesetiaan, ketenangan, sensitif dan bisa diandalkan. Sementara warna merah sering dihubungkan dengan hati, api, darah. Warna merah melambangkan cinta, energi, kuasa, kekuatan, dan panas.

Penggunaan tipografi logo Nusantara Infrastructure, baik pada huruf “N” maupun pada kata “Nusantara Infrastructure” menggunakan jenis huruf yang sederhana namun tegas dan kuat. Secara keseluruhan, Logo NI mempunyai makna yang dalam dan luas, mempunyai cita-cita menjadi besar dan bertaraf dunia dengan sumber daya yang kuat namun bersahaja.

The Company’s logo is drawn with two main elements, which are the letter “N” placed proportionally in the center and one curve with blue and red colors crossing the letter “N”. The two elements curve cross from left to right, from a focus point before expanding into a spreading shape.

The letter “N” is the first letter from the word “Nusantara”, a word that is a combination of two words in Sanskrit, namely “nusa” – meaning “island”, and “antara” – meaning “out”. The two curved lines which crosses over the letter “N” from left to right represents the horizon, the world, and the equator. The combination of these two elements can be interpreted as strength.

Nusantara Infrastructure's logo consists of two basic colours, blue and red. The colour blue is often associated with the sea (depth) and sky (infinite space). Blue also symbolizes concentration, cooperation, intelligence, empathy, sense of integration, calmness, wisdom, and surrounded by friends. Blue is also related to loyalty, peace, sensitiveness, and reliability. Meanwhile, the colour red is associated with heart, fire, and blood. In addition, red also represents love, energy, authority, strength, and heat.

The typography for Nusantara Infrastructure's logo, both for the letter “N” and the words “Nusantara Infrastructure”, uses firm, yet straightforward and strong letters. Overall, the NI logo has a deep and broad meaning, as well as upholding the aspiration to develop into a major world-class company with strong yet wise resources.



Rekam Jejak Pencapaian

Milestones



Perusahaan didirikan pada tanggal 1 September 1995 dengan nama PT Sawitia Bersama Darma berdasarkan Akta Notaris No. 3 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, SH, Notaris di Jakarta.

The Company was established on September 1, 1995, under the name PT Sawitia Bersama Darma, based on the Notarial Deed No. 3, drawn up before Abdullah Ashal, SH, Notary in Jakarta.



Perusahaan mengubah nama menjadi PT Wahana Tradindo Jaya berdasarkan Akta No. 23 tanggal 10 Juni 1998, dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta.

The Company changed its name to PT Wahana Tradindo Jaya based on the Deed No. 23 dated June 10, 1998, drawn up before Linda Herawati, SH, Notary in Jakarta.



1. Perusahaan mengubah nama menjadi PT Metamedia Technologies berdasarkan Akta No. 4 tanggal 6 Februari 2001, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
2. Perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dan mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Metamedia Technologies Tbk dan kode saham META.

1. The Company changed its name to PT Metamedia Technologies based on the Deed No. 4 dated February 6, 2001, drawn up before Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta.
2. The Company executed an Initial Public Offering at the Indonesia Stock Exchange (previously Jakarta Stock Exchange) and changed its status to 'listed company' under the name PT Metamedia Technologies Tbk, with ticker code META.



1. Perusahaan mengubah nama menjadi PT Nusantara Infrastructure Tbk berdasarkan Akta No. 59 tanggal 21 Juni 2006, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
2. Perusahaan melakukan penggabungan usaha dengan PT Nusantara Konstruksi Indonesia berdasarkan Akta No. 17 tanggal 20 Oktober 2006, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

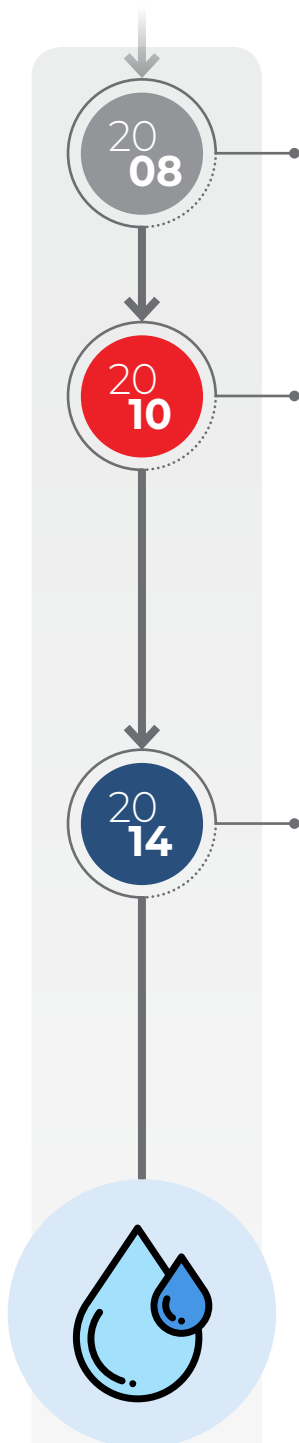
1. The Company changed its name to PT Nusantara Infrastructure Tbk based on the Deed No. 59 dated June 21, 2006, drawn up before Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta.
2. The Company merged with PT Nusantara Konstruksi Indonesia based on the Deed No. 17 dated October 20, 2006, drawn up before Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta.



Perusahaan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Jalan Tol Seksi IV (JTSE) yang dimiliki oleh PT Jalan Tol Seksi Empat di Makassar.

The Company conducted groundbreaking of the Section IV Toll Road construction operated by PT Jalan Tol Seksi Empat in Makassar.

Rekam Jejak Pencapaian Milestones



Jalan tol JTSE di Makassar mulai beroperasi, sebagai satu-satunya proyek dari konsesi *Infrastructure Summit* 2005 yang berhasil diwujudkan.

The JTSE toll road in Makassar commenced its operation as the only completed project of the infrastructure Summit 2005 concessions.

1. Perusahaan mengakuisisi 99,97% saham PT Margautama Nusantara, yang memiliki 25% saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu yang mengoperasikan Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR) ruas W1 (Kebon Jeruk, Penjaringan).
2. Perusahaan memperoleh dana masyarakat dari hasil penerbitan saham Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) senilai Rp745,9 miliar.

1. The Company acquired 99.97% shares of PT Margautama Nusantara, which owns 25% shares of PT Jakarta Lingkar Baratsatu that operates Jakarta Outer Ring Road (JORR) W1 sector (Kebon Jeruk, Penjaringan).
2. The Company obtained public funding from the issuance of shares with Pre-emptive Rights (Rights Issue) in the Limited Public Offering I (LPO I) with a value of Rp745.9 billion.

1. Perusahaan berhasil masuk ke dalam indeks Kompas 100.
2. Perusahaan, melalui entitas anak usahanya PT Telekom Infranasantara, resmi mengakuisisi mayoritas saham sebesar 70,17% milik PT Tara Cell Intrabuana, operator independen menara telekomunikasi di Indonesia. Dengan akuisisi tersebut, PT Tara Cell Intrabuana mengganti nama menjadi PT Komet Infra Nusantara (KIN).
3. Peresmian sarana penyediaan air bersih tahap pertama, sebanyak 100 liter/detik oleh entitas anak, PT Dain Celicani Cemerlang kepada PT Kawasan Industri Medan di Kawasan Industri Medan.

1. The Company was listed in the Kompas 100 Indeks.
2. Through its subsidiary, PT Telekom Infranasantara, the Company acquired the majority shares (70.17%) of PT Tara Cell Intrabuana, an independent operator of telecommunication towers in Indonesia. With this acquisition, PT Tara Cell Intrabuana changed its name to PT Komet Infra Nusantara (KIN)
3. The inauguration of the first phase clean water facility provision with a capacity of 100 liters/ second by the Company's subsidiary, PT Dain Celicani Cemerlang, to PT Kawasan Industri Medan in the Medan Industrial Area.

4. Peletakan batu pertama peresmian sistem pengolahan dan distribusi air bersih oleh PT Sarana Catur Tirta Kelola di Serang Timur, Banten.
5. JEXWAY dan NEXCO masuk sebagai pemegang saham PT Bintaro Serpong Damai (BSD), entitas anak Perusahaan, dengan kepemilikan masing-masing sebesar 2,93% dan 1,25%.

4. Groundbreaking of clean water treatment plant and distribution by the Company's subsidiary, PT Sarana Catur Tirta Kelola, in Serang Timur, Banten.
5. JEXWAY and NEXCO became the shareholders of PT Bintaro Serpong Damai (BSD), a subsidiary of the Company, each holding 2.93% and 1.25% of shares of BSD, respectively.

Rekam Jejak Pencapaian

Milestones

2015



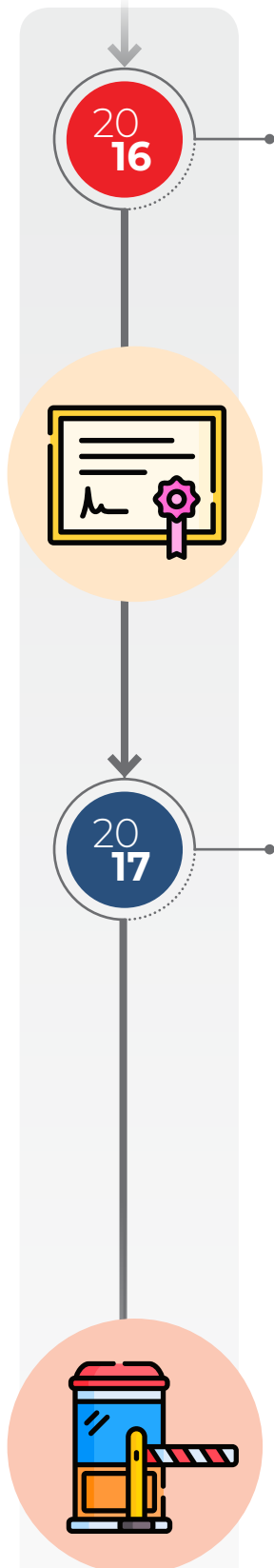
1. El meningkatkan kepemilikannya menjadi 54,64% dalam IME, entitas anak yang mengembangkan proyek PLTA Lau Gunung.
2. IME telah menyelesaikan finalisasi desain teknis dengan optimasi desain dari 10 MW menjadi 15 MW sehingga potensi pembangkit menjadi efisien sejalan dengan nilai investasi.
3. Peningkatan portofolio menara telekomunikasi KIN, dari 591 menara di akhir tahun 2014 menjadi 901 menara di akhir tahun 2015.
4. Operasionalisasi *Water Treatment Plan* (WTP) 2 SCTK mengalami peningkatan kapasitas produksi (*uprating*) dari 25 liter/detik menjadi 50 liter/detik.
1. PT El increased its ownership in IME, a subsidiary developing the PLTA Lau Gunung Project, to 54.64%.
2. IME finalized the technical design with design optimization from 10 MW to 15 MW, improving the potential efficiency of the plant in proportion to the investment value.
3. KIN expanded its portfolio of telecommunication towers from 591 towers by the end of 2014 to 901 towers by the end of 2015.
4. SCTK's 2 Water Treatment Plan (WTP) operation saw an increase in its production capacity (*uprating*) from 25 liters/second to 50 liters/ second.

2016



1. Perusahaan berhasil meraih sertifikat Eksternal Audit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 untuk area tol BSD, MMN dan JTSE.
2. JTSE mengoperasikan Jembatan Tallo II mulai 1 Juli 2016 untuk menampung kepadatan kendaraan pada arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1437H.
3. JTSE mengembangkan solusi sistem informasi lalu lintas (*Traffic Information System/TIS*). TIS adalah platform informasi terkini dan *real time* yang memberikan informasi kepada pengguna jalan mengenai kelancaran lalu lintas di jalan tol dan luar tol.
4. Perusahaan melalui MMN dan JTSE memulai kerja sama dengan Pertamina sejak Oktober 2016 untuk jangka waktu 20 tahun, dengan nilai kerja sama Rp77 miliar, meliputi pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA) tol yang dikelola oleh MMN & JTSE untuk pipanisasi menyalurkan avtur dari terminal BBM Makassar ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Hasanuddin.
5. Penambahan tower pada KIN sebanyak 327 menara di tahun 2016.
6. Peresmian TapCash BNI di jalan tol Makassar.
1. The Company successfully obtained the External Audit certificates of ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18000 for BSD, MMN, and JTSE.
2. JTSE commenced the operations of Tallo II Bridge on July 1, 2016, to accommodate traffic density during the homebound traffic and returning traffic in Eid al-Fitr 1437H.
3. JTSE developed a traffic solution known as Traffic Information System (TIS). TIS is the latest and real-time information platform that provides information to toll road users with regard to traffic both on and outside toll roads.
4. The Company, through MMN and JTSE, established a collaboration with Pertamina in October 2016 for the period of 20 years, with a value of Rp77 billion, covering the utilization of the right of way managed by MMN and JTSE for the pipelines used to distribute jet fuel from the Makassar Fuel Terminal to the Hasanuddin Aircraft Fuel Depot (DPPU).
5. Added 327 telecommunication towers under the management of KIN in 2016.
6. The launching of TapCash BNI on the Makassar toll road.

Rekam Jejak Pencapaian Milestones



7. Penyelesaian rekonstruksi frontage. KIN telah membuat dan menandatangani *Facilities Agreement* pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan Cathay United Bank Co. Ltd., ING Bank N.V., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited masing-masing sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan *Original Lender*.

8. Perusahaan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan atas hak cipta Nusantara Infrastructure dan Nusantara Care dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

9. Perusahaan mendapatkan sertifikat merek atas hak merek "Nusantara Infrastructure dan Nusantara Care" dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek dan dapat diperpanjang.

7. Completion of frontage reconstruction. KIN prepared and signed a Facility Agreement on October 19, 2016, with Cathay United Bank Co. Ltd., ING Bank N.V. and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, as Mandated Lead Arranger and Original Lender, respectively.

8. The Company received a registration confirmation for the copyright of Nusantara Infrastructure and Nusantara Care from the Ministry of Law and Human Rights, which is valid for 50 years as of the announcement.

9. The Company received a certificate of title for the "Nusantara Infrastructure and Nusantara Care" trademark from the Ministry of Law and Human Rights, which is valid for 10 years as of the receipt of mark registration, which is renewable.

1. Perusahaan memperoleh penghargaan dalam acara Warta Ekonomi *Award* sebagai salah satu dari 5 (lima) perusahaan terbaik di bidang infrastruktur yang menerapkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Perusahaan memperoleh Infobank *Award* sebagai salah satu dari 100 perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia.

3. Pada bulan Juni, PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM), entitas asosiasi anak POTUM, menandatangani Perjanjian Perpanjangan Konsesi dengan PDAM Tirta Kerta Rahardja (TKR) Kabupaten Tangerang untuk jangka waktu 20 tahun.

4. Entitas anak Perusahaan di jalan tol, yaitu MMN, JTSE dan BSD menerapkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk Tol Makassar dan BSD sebagai bentuk pemenuhan Peraturan Menteri terkait Transaksi Non Tunai di Jalan Tol.

5. MMN melakukan peletakan batu pertama (*groundbreaking*) untuk pembangunan Jalan Tol Layang AP. Pettarani sepanjang 4,3 km.

1. The Company obtained an award as one of the best 5 (five) infrastructure companies with Good Corporate Governance (GCG) concept from Warta Ekonomi Award.

2. The Company obtained the Infobank Award as one of 100 companies with the fastest growth in Indonesia.

3. In June, PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM), an associate entity of POTUM, signed a Concession Extension Agreement with PDAM Tirta Kerta Rahardja (TKR) Tangerang for a period of 20 years.

4. The Company's subsidiaries in toll road sector, namely MMN, JTSE, and BSD, implemented the National Cashless Movement (GNNT) in the Makassar and BSD toll roads pursuant to the Ministry Regulation on Cashless Transaction on Toll Roads.

5. MMN carried out groundbreaking for the construction of the 4.3-km A.P. Pettarani Elevated Toll Road.

Rekam Jejak Pencapaian

Milestones

2017

6. MMN menandatangani nota kesepakatan dengan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan untuk mencari solusi pemecahan masalah kemacetan.
7. DCC dan Kawasan Industri Medan (KIM) menandatangani Berita Acara Kesepakatan mengenai kenaikan tarif pada tanggal 21 April 2017.
8. Pada bulan Juni 2017, SCTK telah menyelesaikan konstruksi peningkatan kapasitas menjadi 350 lps dari sebelumnya 150 lps.
9. Pada bulan Desember 2017, perusahaan asosiasi TKCM melakukan pembangunan untuk meningkatkan kapasitas sebesar 300 lps menjadi 1.575 lps dari sebelumnya 1.275 lps.

6. MMN signed a Memorandum of Understanding with the Makassar Government to find the solution to traffic congestion issues.

7. DCC and Medan Industrial Area (KIM) signed the Minutes of Agreement on tariff increase on April 21, 2017.

8. In June 2017, SCTK completed the construction to increase capacity from 150 lps to 350 lps.

9. In December 2017, TKCM, an associated company, improved its capacity by 300 lps, from 1,275 lps to 1,575 lps.

2018

1. Perusahaan terpilih menjadi salah satu perusahaan infrastruktur Indonesia yang mendapat kehormatan untuk hadir di acara *ASEAN Business Summit 2018*.
2. Perusahaan menandatangani kontrak kerja sama desain dan konstruksi pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, Makassar dengan Wika Beton.
3. Perusahaan masuk dalam daftar peraih penghargaan *100 Fastest Growing Companies 2018* dari Infobank.
4. Perusahaan melalui entitas anaknya yaitu EI, mengakuisisi 80% Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Siantan, Kalimantan Barat.
5. MUN meraih penghargaan *ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award 2018* dari *Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO)*.
6. BSD meraih penghargaan *Zero Accident* dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
7. Pencatatan Obligasi I JLB senilai Rp1,3 triliun.
8. Perusahaan meraih penghargaan Tata Kelola Perusahaan Terbaik pada *Corporate Secretary Award 2018* yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi.
9. Perusahaan membagikan Dividen Interim dan Dividen Final, masing-masing pada tanggal 15 Mei 2018 dan 27 Juni 2018.

1. The Company was listed as one of the Indonesian infrastructure companies to attend the ASEAN Business Summit 2018.

2. The Company signed a design and construction collaboration contract with WIKA Beton for the A.P. Pettarani Elevated Toll Road, Makassar.

3. The Company was listed as one of the 100 Fastest Growing Companies 2018 from Infobank.

4. The Company through its subsidiary, EI, acquired 80% shares of a Biomass Power Plant (PLTBm) in Siantan, West Kalimantan.

5. MUN obtained the ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award 2018 from the Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO).

6. BSD received the Zero Accident Award from the South Tangerang Municipal Government.

7. Listing of JLB's Bonds I worth Rp1.3 trillion.

8. The Company received the Best Corporate Governance award in the Corporate Secretary Award 2018, organized by Warta Ekonomi Magazine.

9. The Company distributed Interim Dividend and Final Dividend on May 15, 2018, and June 27, 2018, respectively.



Rekam Jejak Pencapaian Milestones

2018



2019

10. Pada bulan Juli - September 2018, PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) melaksanakan *Mandatory Tender Offer* (MTO) dengan harga penawaran Rp211/sham untuk 3.760.231.769 saham.

11. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Perusahaan menawarkan sebanyak 4.950.072.626 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

12. Pada 30 Mei 2018, Perusahaan melakukan divestasi KIN dengan nilai Rp1.044 miliar dan rasio valuasi EV/ EBITDA 12,2 kali.

13. Perusahaan menerima kredit sindikasi untuk pembiayaan konstruksi Jalan Tol Layang A.P. Pettarani di Makassar.

14. Akuisisi tambahan 10% saham JLB pada 29 Agustus 2018. MUN menjadi pemilik atas 35% saham JLB.

15. Penerapan UNIK di tol MMN-JTSE Makassar pada tanggal 10 November 2018.

1. Perusahaan kembali meraih penghargaan *100 Fastest Growing Companies 2019* dari Majalah Infobank.

2. PT Energi Infranasantara meningkatkan jumlah kepemilikan di PT Inpolka Meka Energi menjadi 56,23%.

3. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Potum dan Pemerintah Kabupaten Batubara Medan, Sumatera Utara terkait dengan studi kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kuala Tanjung.

4. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Potum dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak terkait dengan studi kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rumbai.

5. MUN menandatangani Perjanjian Konsorsium Pengusahaan *Bandung Intra Urban Toll Road* (BIUTR) dengan PT Mahkota Permata Perdana, PT Summarecon Agung Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

10. Between July and September 2018, PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) carried out a *Mandatory Tender Offer* (MTO) with an offering price of Rp211/ share for 3,760,231,769 shares.

11. In accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), the Company offered as many as 4,950,072,626 Regular Registered Series B Shares with a nominal value of Rp70 per share through Pre-emptive Rights (HMETD).

12. On May 30, 2018, the Company divested KIN with a divestment value of Rp1,044 billion and EV/EBITDA valuation ratio of 12.2 times.

13. The Company received a syndicated loan for the funding of the A.P. Pettarani Elevated Toll Road construction in Makassar.

14. Acquisition of additional 10% shares of JLB on August 29, 2018. MUN becomes the owner of 35% of JLB's shares.

15. The implementation of UNIK in MMN-JTSE Makassar toll road on November 10, 2018.

1. The Company won another award as one of the 100 Fastest Growing Companies 2019 from Infobank Magazine.

2. PT Energi Infranasantara increased its share ownership in PT Inpolka Meka Energi to 56.23%.

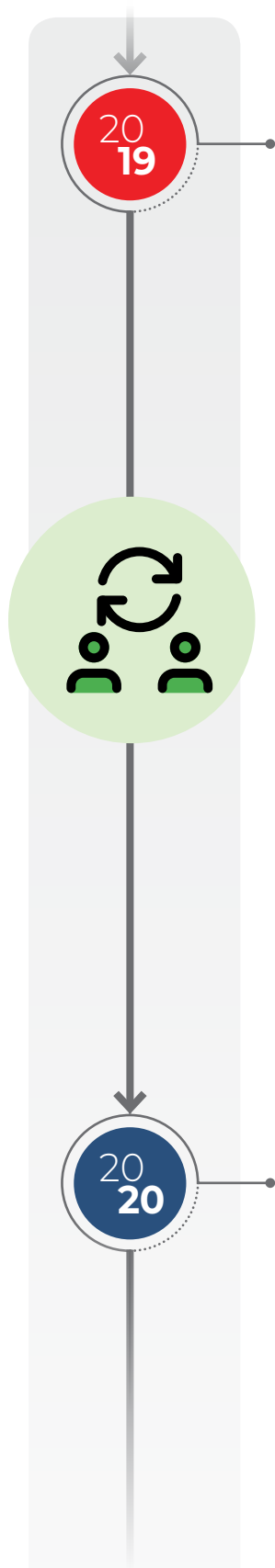
3. The signing of a Memorandum of Understanding between Potum and the Government of the Batubara District of Medan, North Sumatra, related to the feasibility study of the Kuala Tanjung Drinking Water Supply System (SPAM).

4. The signing of a Memorandum of Understanding between Potum and the Tirta Siak Regional Water Supply Company (PDAM) related to the feasibility study of the Rumbai Drinking Water Supply System (SPAM).

5. MUN signed the Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) Consortium Agreement with PT Mahkota Permata Perdana, PT Summarecon Agung Tbk, and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Rekam Jejak Pencapaian

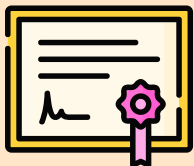
Milestones



6. JTSE meraih penghargaan dalam ajang "Tax Award 2019: Wajib Pajak Berprestasi" pada 26 November 2019 di Makassar. Acara diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Makassar.
7. JTSE meraih penghargaan "Gold Achievement" pada acara *The 8th Annual Indonesia Operational Excellence Conference Award 2019* yang diselenggarakan oleh SHIFT Indonesia, pada 7 November 2019.
8. Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) mengakuisisi saham milik CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, dan CAIF III Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, (*funds* yang dikelola oleh Cap Asia) pada 23 September 2019 sehingga terjadi perubahan komposisi pemegang saham pada PT Margautama Nusantara, menjadi NI dengan kepemilikan saham sebesar 74,98%, MPTC melalui CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, dan CAIF III Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, (*funds* yang dahulu dikelola oleh Cap Asia) dengan kepemilikan saham sebesar 25,00% dan Sadikin Aksa sebesar 0,02%.
7. JTSE won an award in the "Tax Award 2019: Outstanding Taxpayer" on November 26, 2019, in Makassar. The event was organized by the Makassar City Government Regional Revenue Agency.
8. JTSE won the "Gold Achievement" award at the 8th Annual Indonesia Operational Excellence Conference Award 2019 event held by SHIFT Indonesia, on November 7 2019.
9. Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) acquired the shares of CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, and CAIF III Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, (*funds* managed by Cap Asia) on September 23, 2019, resulting in a change in the composition of shareholders of PT Margautama Nusantara, to be as follows: NI with 74.98% share ownership, MPTC through CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, and CAIF III Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, (*funds* that were formerly managed by Cap Asia) with 25.00% share ownership, and Sadikin Aksa with 0.02% share ownership.
1. Penyesuaian Tarif Tol BSD Ruas Pondok Aren-Serpong dan Tol MMN Ruas Jalan Tol Ujung Pandang Seksi I dan II.
2. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara POTUM dengan PT Gerbang NTB Emas (GNE) dalam Penyediaan Air Minum (SPAM) pada 31 Januari 2020.
3. Perusahaan melalui PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) meraih empat penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada 12 Februari 2020.
4. Pembangunan Proyek Jalan Tol A.P. Pettarani, Makassar memasuki tahap akhir pemasangan balok jembatan (*box girder*) yang disiarkan melalui media *video conference* pada 17 Mei 2020.
5. Pemberlakuan sistem pengisian ulang (*top up*) uang elektronik (UNIK) via Aplikasi Whatsapp pada Tol Makassar mulai 24 Juli 2020.
1. BSD Toll Tariff Adjustment for Pondok Aren-Serpong Section and MMN Toll Road Section for Ujung Pandang Toll Road Section I and II.
2. The signing of Memorandum of Understanding between POTUM and PT Gerbang NTB Emas (GNE) for Drinking Water Supply System (SPAM) on January 31, 2020.
3. Through PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), the Company received an award from the Governor of South Sulawesi related to the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) program on February 12, 2020.
4. The construction of A.P. Pettarani Elevated Toll Road project in Makassar entered its final stage of box girder installation which was broadcasted through video conference on May 17, 2020.
5. The implementation of electronic money top up system (UNIK) through Whatsapp application on Makassar Toll Road starting from July 24, 2020.

Rekam Jejak Pencapaian Milestones

20
20



6. Perusahaan untuk pertama kalinya memperoleh penghargaan Top CSR 2020 dalam kategori #Star3 dari Majalah Top Business yang diberikan pada 29 Juli 2020.
7. Pada September 2020, Perusahaan berhasil menyelesaikan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani Makassar yang direncanakan akan disahkan pada bulan Maret 2021.
8. Uji Laik Fungsi (ULF) pada Tol A.P. Pettarani dengan melibatkan tim Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Unit Pelayanan Perizinan Jalan Bebas Hambatan (UPP JBH), Dinas Perhubungan Darat (HUBDAT), dan KORLANTAS yang diselenggarakan pada 7-9 Oktober 2020.
9. Perubahan nama PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) menjadi PT Makassar Metro Network (MMN) pada 5 November 2020.
10. Pada 6 November 2020, Direktur Jenderal Bina Marga menerbitkan Sertifikat Laik Operasi Untuk Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 (Jalan Tol Layang A.P. Pettarani) Makassar.
11. Perusahaan melalui PT Bintaro Serpong Damai (BSD) dan PT Makassar Metro Network (MMN) meraih penghargaan *Silver Achievement* untuk kategori *Services* dalam ajang "*The 9th Indonesia Operational Excellence Conference Award 2020*" yang diselenggarakan oleh SHIFT Indonesia pada 25 November 2020.
12. Pada 26 November 2020, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Struktur Jembatan Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 (Jalan Tol Layang A.P. Pettarani) Makassar.
13. PT Makassar Metro Network (MMN) dan PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) sebagai unit bisnis Perusahaan memperoleh penilaian dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai jalan tol berkelanjutan terbaik ke-3 dari seluruh tol di Indonesia pada 3 Desember 2020.
14. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung milik PT Inpol Meka Energi (IME) dioperasikan atau memasuki *Commercial Operation Date* (COD) sejak 17 Desember 2020 dan sebelumnya telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada 12 Desember 2020.
6. For the first time, the Company received the Top CSR 2020 award in the #Star3 category from Top Business Magazine, which was conferred on July 29, 2020.
7. In September 2020, the Company successfully completed the A.P. Pettarani Makassar Elevated Toll Road which is planned to be inaugurated in March 2021.
8. The implementation of Functional Feasibility Test at A.P. Pettarani Toll Road, involving a team from the Toll Road Regulatory Agency (BPJT), the Freeway Permit Service Unit (UPP JBH), the Land Transportation Office (HUBDAT), and KORLANTAS, on October 7-9, 2020.
9. Change of name of PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) to PT Makassar Metro Network on November 5, 2020.
10. On November 6, 2020, the Director General of Highways issued a Certificate of Operation Eligibility for the Section 3 Ujung Pandang Toll Road (A.P. Petarani Elevated Toll Road) Makassar.
11. Through PT Bintaro Serpong Damai (BSD) and PT Makassar Metro Network (MMN), the Company received the Silver Achievement award for the Services category in the 9th Indonesia Operational Excellence Conference Award 2020 organized by SHIFT Indonesia on November 25, 2020.
12. On November 26, 2020, the Minister of Public Works and Public Housing issued a Certificate of Functional Eligibility for the Ujung Pandang Toll Road Bridge Section 3 (A.P. Petarani Elevated Toll Road) Makassar.
13. PT Makassar Metro Network (MMN) and PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), as the Company's business units, was assessed by the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) as the 3rd best sustainable toll road in Indonesia on December 3, 2020.
14. The Lau Gunung Hydro Power Plant (PLTA) of PT Inpol Meka Energi (IME) entered its Commercial Operation Date (COD) or commenced its operations on December 17, 2020. Previously, the power plant obtained the Operation Worthy Certificate on December 12, 2020.

Visi dan Misi

Vision and Mission

VISI

Vision

Menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur.
To be the leading Indonesian private infrastructure investor and developer.

MISI

Mission

Memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan standar tertinggi untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan nilai terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.
Providing services of the highest standard to meet infrastructure needs in order to improve quality of life and create best value for all stakeholders.



GROWING

Tumbuh lebih besar dan lebih cepat seiring berjalannya waktu.
Become bigger and faster over a period of time.

RELIABLE

Memenuhi komitmen dengan standar yang tinggi.
Delivering commitments with high standards.

OPTIMISTIC

Memiliki impian dan percaya diri dalam menyongsong masa depan.
Hopeful and confident about the future.

WILLING

Siap memberikan yang terbaik dan melebihi dari tuntutan tugas.
Ready and eager to perform beyond duties.

TEAM UP

Satu tim, satu rencana, satu tujuan.
One team, one plan, one goal.

HARMONIOUS

Hidup bersama dalam harmoni.
Existing together in harmony.

Nilai Perusahaan

Corporate Values



Nilai-nilai Perusahaan menjadi bagian penting dalam upaya NI menghadirkan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif. Nilai-nilai ini menjadi bentuk pedoman yang dipegang teguh oleh seluruh insan Perusahaan dalam menjalankan peran dan fungsinya guna menunjang terwujudnya kinerja yang optimal. Nilai-nilai tersebut dirumuskan oleh Perusahaan dalam nilai “GROWTH”.

Nilai “GROWTH” merupakan nilai yang ditanamkan dan TUMBUH dalam benak dan karakter para pemimpin, karyawan, dan semua insan dalam lingkungan Nusantara Infrastructure. Sebuah sikap, pola pikir, dan SEMANGAT yang akan diraih bersama sebagai SATU TIM, SATU RENCANA, dan SATU TUJUAN.

Pengamalan nilai “GROWTH” dilakukan dengan komitmen penuh dari seluruh insan NI secara berkelanjutan tidak hanya di dalam Perusahaan, namun juga diterapkan dengan para pemangku kepentingan, mitra usaha, hingga masyarakat luas untuk mendukung langkah Perusahaan menjalankan misi secara tepat dan mencapai visi sesuai harapan.

For NI, Corporate Values serve as the key to realize a healthy and conducive work environment. The Corporate Values are interpreted as the guidelines that must be upheld by all individuals of the Company in carrying out their roles and functions to support the realization of optimum performance. These Corporate Values are summarized as “GROWTH”.

The value of “GROWTH” is embedded and developed in the minds and characters of the leaders, workers, and every individual at Nusantara Infrastructure. An attitude, mindset, and SPIRIT to be achieved together as ONE TEAM, ONE PLAN, ONE GOAL.

The implementation of “GROWTH” value is conducted with a full commitment from all individuals of NI in a sustainable manner, not only within the Company but also in their interaction with all stakeholders, business partners, and the communities in order to support the Company’s efforts in carrying out its mission properly and in achieving its vision according to the expectation.

Kegiatan Usaha

Business Activities



Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, jasa dan pertanian. Hingga tahun 2020, kegiatan usaha Perusahaan masih berorientasi pada bidang infrastruktur transportasi dan infrastruktur utilitas yang terdiri dari 4 (empat) sektor utama, yaitu pengelolaan jalan tol, pelabuhan laut, pengelolaan air minum, dan energi terbarukan.

As stipulated in Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's purposes and objectives are to carry out business in the fields of trade, construction, industry, transportation, services, and agriculture. Until 2020, the Company's business activities are still oriented towards transportation infrastructure and utility infrastructure, consisting of 4 (four) main sectors, namely toll road management, seaports, drinking water management, and renewable energy.



Jalan Tol
Toll Road



Air Bersih
Clean Water



Energi Terbarukan
Renewable Energy



Pelabuhan
Port

PENGELOLAAN JALAN TOL

Kegiatan usaha di bidang pengelolaan jalan tol dilaksanakan oleh Perusahaan melalui PT Margautama Nusantara (MUN) sebagai entitas anak. Kegiatan usaha tersebut mencakup pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol serta mengusaha lahan di ruang milik jalan tol (RUMIJA tol) dan lahan yang berbatasan dengan RUMIJA tol untuk tempat istirahat dan pelayanan, serta berbagai fasilitas dan usaha lainnya.

Perusahaan memastikan bahwa pengelolaan jalan tol dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menaruh perhatian besar pada aspek-aspek unggulan seperti kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan kepuasan dari para pengguna jalan tol. Informasi terkait ruas tol yang dikelola pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

TOLL ROAD MANAGEMENT

Business activities in the field of toll road management are carried out by the Company through its subsidiary, PT Margautama Nusantara (MUN). These business activities include the operation and/or maintenance of toll roads as well as operating the land in the space owned by the toll road (RUMIJA toll road) and the land bordering the RUMIJA toll road for a place of rest and service, along with other facilities and businesses.

The Company ensures that the toll road management is carried out effectively and efficiently by always focusing on the superior aspects, such as convenience, comfort, safety, and satisfaction of toll road users. Information related to toll roads managed in 2020 is described in the following table:

Nama Perusahaan Company Name	Keterangan Description
PT Bintaro Serpong Damai (BSD)	Mulai Beroperasi / Commenced operation in: 1999 Panjang / Length: 7,2 Km Jalur / Path: Serpong—Pondok Aren Masa Konsesi / Concession Period: Sampai dengan 1 Oktober 2028 / Up to October 1, 2028
PT Makassar Metro Network (MMN)	Mulai Beroperasi / Commenced operation in: 1998 Panjang / Length: 1. Seksi II: 5,9 Km 2. Seksi III Pettarani: 4,3 Km Jalur / Path: Pelabuhan Soekarno Hatta—A.P. Pettarani / Soekarno Hatta Harbor-A.P. Pettarani Jalur / Path: akhir jalan tol seksi II, Persimpangan Jl. Urip Sumoharjo-Persimpangan Jl. Boulevard Panakkukang-Jl. Hertasning-Persimpangan Jl. Sultan Alauddin / End of section II toll road, Intersection Jl. Urip Sumoharjo-Intersection Jl. Boulevard Panakkukang-Jl. Hertasning-Intersection Jl. Sultan Alauddin Masa Konsesi / Concession Period: Sampai dengan 12 April 2043 / Up to April 12, 2043
PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)	Mulai Beroperasi / Commenced operation in: 2006 Panjang / Length: 11,6 Km Jalur / Path: Jembatan Tallo—Simpang Mandai, Makassar / Tallo Bridge-Simpang Mandai Makassar Masa Konsesi / Concession Period: Sampai dengan 29 Mei 2041 / Up to May 29, 2041
PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)	Mulai Beroperasi / Commenced operation in: 1995 Panjang / Length 9,7 Km Jalur / Path: Kebon Jeruk—Penjaringan Masa Konsesi / Concession Period: Sampai dengan 2 Februari 2042 / Up to February 2, 2042

PENGOLAHAN AIR MINUM

Perusahaan menjalankan usahanya di sektor Pengelolaan Air Minum dengan mencakup pengelolaan air bersih dan distribusi air bersih baik kepada pihak-pihak mulai dari industri hingga perumahan melalui PDAM setempat. Perusahaan melaksanakan bisnis usaha di bidang pengelolaan air bersih melalui PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) sebagai entitas anak. Selama tahun 2020, Potum telah mengoperasikan tiga instalasi pengolahan air bersih atau *water treatment plant* (WTP), yaitu:

1. SCTK WTP, Serang, Banten
2. DCC WTP, Medan, Sumatera Utara
3. TKCM WTP, Cikokol, Tangerang, Banten

Selain itu, Perusahaan juga melalui Potum telah mengoperasikan tiga lokasi SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum) sesuai dengan ketentuan HSE (*Health, Safety and Environment* atau Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan) yang ketat. Melalui sektor ini, Perusahaan mewujudkan kontribusinya dalam turut mendukung penyediaan air bersih guna mengatasi krisis air bersih sekaligus mendukung terwujudnya program pelestarian lingkungan secara nyata di Indonesia.

ENERGI TERBARUKAN

Komitmen Perusahaan untuk meningkatkan penyediaan energi terbarukan untuk kehidupan yang berkelanjutan sekaligus memperluas portofolio perusahaan di bidang energi terbarukan diwujudkan dalam pelaksanaan bisnis usaha di sektor energi terbarukan. Dalam bidang ini, Perusahaan berfokus pada pengembangan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan yang dilakukan melalui entitas anak, yaitu PT Energi Infranasantara (EI), dan entitas anak tidak langsung, yaitu PT Inpolo Meka Energi (IME).

Perusahaan melalui PT EI dan PT IME melakukan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung yang berlokasi di Kecamatan Tanah Pinem, Sumatera Utara. Perusahaan melalui EI dan IME memiliki proyek konstruksi pembangunan PLTA 2x7,5 Megawatt (MW) yang telah selesai pada tahun 2020 dan sudah mulai beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak 17 Desember 2020.

DRINKING WATER MANAGEMENT

The Company's business in the drinking water management sector encompasses clean water management and clean water distribution, both to industries to households with the local Drinking Water Companies (PDAMs). The Company carries out this business through PT Potum Mundi Infranasantara (Potum), a subsidiary. Throughout 2020, Potum has operated three clean water treatment plants (WTPs), namely:

1. SCTK WTP, Serang, Banten
2. DCC WTP, Medan, North Sumatra
3. TKCM WTP, Cikokol, Tangerang, Banten

Through Potum, the Company also operates Drinking Water Supply System (SPAM) at three locations in accordance with the strict Health, Safety, and Environment (HSE) protocols. Through this sector, the Company realizes its contribution by supporting the provision of clean water to overcome the clean water crisis, as well as supporting the realization of environmental conservation program in Indonesia.

RENEWABLE ENERGY

The Company's commitment to increasing the supply of renewable energy for sustainable living while expanding the Company's portfolio in the renewable energy industry is manifested in its business involvement in the renewable energy sector. In this field, the Company focuses on developing new and renewable energy power plants through its subsidiary, namely PT Energi Infranasantara (EI), and its indirect subsidiary, namely PT Inpolo Meka Energi (IME).

Through PT EI and PT IME, the Company developed Lau Gunung Hydroelectric Power Plant (PLTA) that is located in Tanah Pinem District, North Sumatra. Construction of the 2x7.5 Megawatt (MW) hydropower plant was completed in 2020 and commenced operations (*Commercial Operating Date/COD*) on December 17, 2020.

Tidak hanya PLTA Lau Gunung, Perusahaan juga mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Siantan, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dengan kapasitas 1x15 Megawatt (MW) yang telah mulai beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak 23 April 2018 melalui EI dan entitas anak tidak langsung, yaitu PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL).

PLTBm Siantan menjadi pembangkit energi terbarukan pertama di Kalimantan Barat dan dioperasikan dengan memanfaatkan teknologi gasifikasi yaitu *boiler* dengan tipe *water tube* menggunakan bahan bakar yang berasal dari sumber daya alami, seperti cangkang kelapa sawit dan kayu, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu dan limbah pertanian serta perkebunan lainnya.

JASA PELABUHAN

Di sektor jasa kepelabuhanan, Perusahaan melalui PT Portco Infranasantara (Portco) sebagai entitas anak dan PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) sebagai entitas asosiasi menjalankan bisnis usaha di bidang jasa pelabuhan dengan cakupan bisnis meliputi layanan manajemen kepelabuhanan, pergudangan, jasa bongkar muat, dan jasa penyewaan tanki penyimpanan. ISAB memiliki lahan seluas 9,1 hektare serta gudang seluas 11.200 meter persegi yang berlokasi di area Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Saat ini, terdapat adanya ikatan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara ISAB dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terkait pembangunan dan pengoperasionalan terminal kargo kering dan cair di Pelabuhan Panjang dan Lampung.

Aside from PLTA Lau Gunung, the Company operates a 1x15-Megawatt (MW) Biomass Power Plant (PLTBm) in Siantan, Wajok Hulu Village, Siantan District, Mempawah Regency, West Kalimantan, through EI and PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL), the Company's indirect subsidiary. This PLTBm commenced its operations (*Commercial Operating Date/COD*) on April 23, 2018.

PLTBm Siantan is the first renewable energy power plant in West Kalimantan that is operated using the gasification technology through a boiler with water tube and fuel derived from oil palm shells and wood, rice husks, corncobs, sugarcane bagasse, sawdust, and other agricultural waste.

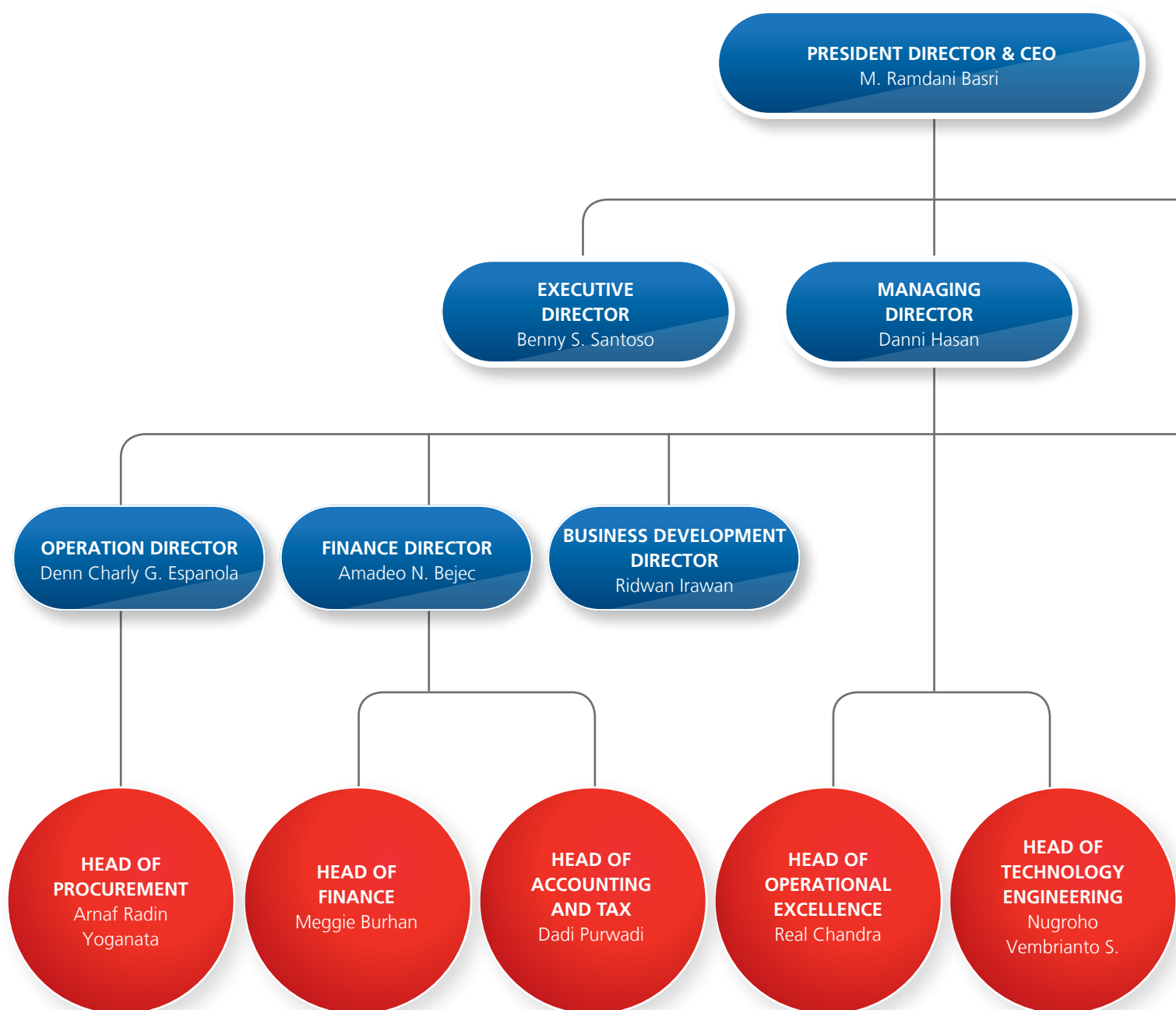
PORT SERVICE

Through PT Portco Infranasantara (Portco), a subsidiary, and PT Intisentosa Alambahtera (ISAB), an associate entity, the Company is engaged in the port service sector and carries out port management services including warehousing, loading and unloading, and storage tank rental. ISAB owns a 9.1 ha of land and a warehouse with a total area of 11,200 sqm located in Panjang Port area in Bandar Lampung. At present, ISAB is in a commitment with PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through a Joint Operation Agreement (JO) for the construction and operation of dry and liquid cargo terminals in Panjang Port and Lampung.



Struktur Organisasi

Organization Structure



Struktur Organisasi Organization Structure

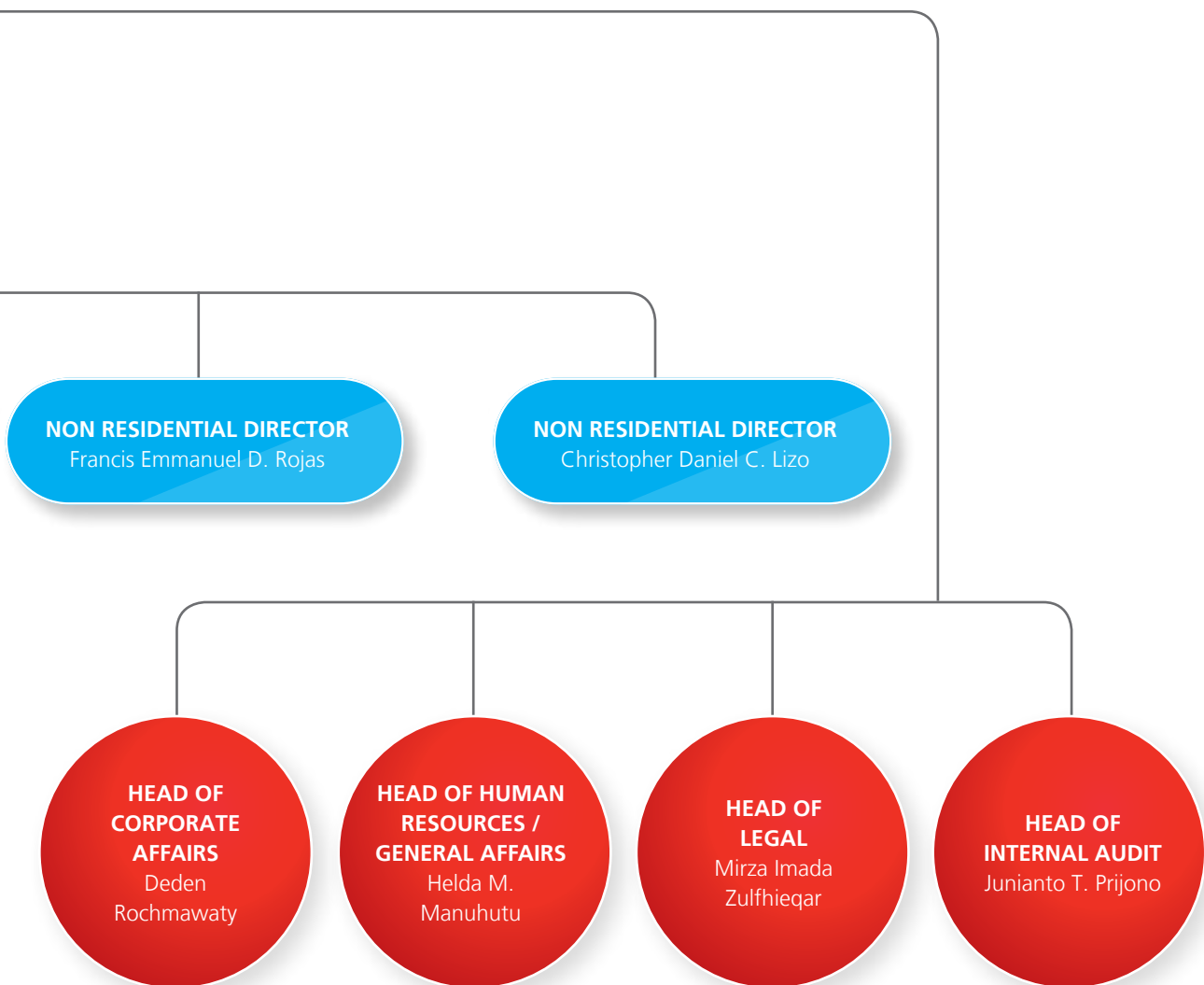
Struktur Organisasi Perusahaan dibentuk sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Berikut Struktur Organisasi PT Nusantara Infrastructure Tbk:

The Company's Organizational Structure is formed in accordance with the development of the Company's business. Following is the Organizational Structure of PT Nusantara Infrastructure Tbk:

EXECUTIVE DIRECTOR

NON EXECUTIVE DIRECTOR

NON DIRECTOR



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



JOSE MA. KAMANTIGUE LIM
Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Filipina, 68 tahun, dan berdomisili di 21 CD, Strata Suites 300, P. Guevarra St., Bgy. Sta. Lucia, San Juan City, Filipina. Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Arts Degree in Philosophy* dari Universitas Ateneo de Manila, Filipina pada tahun 1972 dan gelar *Master of Business Administration* dari Universitas Asian Institute of Management, Filipina pada tahun 1978.

Beliau memiliki pengalaman kerja dengan berbagai posisi, antara lain Direktur Keuangan Equitable Banking Corporation, Fort Bonaficio Development Corporation (2001); Wakil Presiden Equitable Banking Corporation, Fort Bonaficio Development Corporation (FBDC) (1995); dan Direktur Investment Banking, First National Bank of Boston (1994–1995).

Saat ini Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Presiden dan CEO PT Metro Pacific Investment Corporation (2006–sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham serta tidak memiliki saham Perusahaan.

Filipino citizen, 68 years old, currently domiciles at 21 CD, Strata Suites 300, P. Guevarra St., Bgy. Sta. Lucia, San Juan City, the Philippines. He was appointed as the President Commissioner based on the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018, drawn up before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with term of office starting from August 31, 2018, until the GMS in 2023.

He earned his Bachelor of Arts degree, majoring in Philosophy, from Ateneo de Manila University, the Philippines (1972), and Master of Business Administration degree from the Asian Institute of Management, the Philippines (1978).

Before serving as the Company's President Commissioner, he held several strategic positions, including as the Chief Finance Officer of Equitable Banking Corporation, Fort Bonaficio Development Corporation (2001); Vice President Equitable Banking Corporation of Fort Bonaficio Development Corporation (FBDC) (1995); and Director of Investment Banking of First National Bank of Boston (1994–1995).

He concurrently serves as the President and CEO of Metro Pacific Investments Corporation (2006 up to present).

He has no affiliations with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders, and has no share ownership at the Company.

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile



RODRIGO EMMANUEL FRANCO
Komisaris
Commissioner

Warga Negara Filipina, 61 tahun, dan berdomisili di 100 Symphony Tower, 6 Sgt. Esguerra St., South Triangle, Quezon City, Filipina. Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science in Management Engineering* dari Universitas Ateneo de Manila, Filipina pada tahun 1981 dan gelar *Master in Business Administration* dari Universitas Ateneo de Manila, Filipina pada tahun 1988.

Beliau memiliki pengalaman kerja dengan berbagai posisi, antara lain Presiden dan CEO Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) (2016-sekarang); CEO Badan pengembangan dan pengoperasian jalan tol dari Metro Pacific Investments Corporation (MPIC); Pemimpin di perusahaan-perusahaan tol Grup termasuk NLEX Corporation (sebelumnya Manila North Tollways Corporation atau MNTC), Tollways Management Corporation (TMC), Cavite Infrastructure Corporation (CIC), dan MPCala Holdings, Inc.; dan Presiden untuk Perbankan Investasi di JPMorgan Chase Bank.

Saat ini Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Presiden & CEO Metro Pacific Tollways Corporation (2016 - sekarang); Presiden & CEO NLEX Corporation (2010 — sekarang); dan Komisaris PT Margautama Nusantara (2019-sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham serta tidak memiliki saham Perusahaan.

Filipino citizen, 61 years old, currently domiciles at 100 Symphony Tower, 6 Sgt. Esguerra St., South Triangle, Quezon City, the Philippines. He was appointed as a Commissioner based on the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018, drawn up before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with term of office starting from August 31, 2018, until the GMS in 2023.

He earned his Bachelor of Science degree, majoring in Management Engineering, from Ateneo de Manila University, the Philippines (1981), and Master of Business Administration degree from Ateneo de Manila University, the Philippines in 1988.

Before serving as the Company's Commissioner, he held several strategic positions, including as the President and Executive Director of Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) (2016 – now); CEO of Toll Road Development and Operation of Metro Pacific Investments Corporation (MPIC); Leaders in the Group's toll road companies, including NLEX Corporation (formerly Manila North Tollways Corporation or MNTC), Tollways Management Corporation (TMC), Cavite Infrastructure Corporation (CIC), and MPCala Holdings, Inc.; and President for Investment Banking at JPMorgan Chase Bank.

He concurrently serves as the President and CEO of Metro Pacific Tollways Corporation (2016 up to present); President and CEO of NLEX Corporation (2010 up to present); and Commissioner at PT Margautama Nusantara (2019 up to present).

He has no affiliations with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders, and has no share ownership at the Company.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



LETJEND TNI (PURN)
JOHNY J. LUMINTANG
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 73 tahun, dan berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia. Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.

Beliau menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer Indonesia tahun 1970.

Beliau memiliki pengalaman kerja dengan berbagai posisi, antara lain Duta Besar Indonesia untuk Republik Filipina, Palau, dan Kepulauan Marshall (2014–2017); Direktur Utama PT Adimitra Baratama Nusantara (2012–2014); Komisaris Utama PT Borneo Indobara (2011–2014); Direktur Utama PT Borneo Indobara (2007–2011); Komisaris Utama PT Bank Sinarmas Tbk (2005–2009); Komisaris PT Topindo Atlas Indonesia (2003–2014); Penasihat PT Arara Abadi (2003–2005); Komisaris Utama PT Dahana (Persero) (2001–2002); Komisaris Utama PT Asabri (Persero) (2001–2002); Komisaris Utama PT Bank Yudha Bhakti Tbk (2001–2002); Komisaris Utama PT ITCI Hutani Manunggal (1999–2000); Komisaris Utama PT Bank Artha Graha Internasional (1999–2000); Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1993–1998); dan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia sejak tahun 2002.

Saat ini Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT Borneo Indobara (2018–sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham serta tidak memiliki saham Perusahaan.

Indonesian citizen, 73 years old, currently domiciles in DKI Jakarta, Indonesia. He was appointed as an Independent Commissioner based on the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018, drawn up before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with term of office starting from August 31, 2018, until the GMS in 2023.

He completed his formal education at the Indonesian Military Academy (1970).

Before serving as the Company's Independent Commissioner, he held several strategic positions, including as the Indonesian Ambassador to the Republic of the Philippines, Palau, and Marshall Islands (2014–2017); President Director of PT Adimitra Baratama Nusantara (2012–2014); President Commissioner of PT Borneo Indobara (2011–2014); President Director of PT Borneo Indobara (2007–2011); President Commissioner of PT Bank Sinarmas Tbk (2005–2009); Commissioner at PT Topindo Atlas Indonesia (2003–2014) Advisor to PT Arara Abadi (2003–2005); President Commissioner of PT Dahana (Persero) (2001–2002); President Commissioner of PT Asabri (Persero) (2001–2002); President Commissioner of PT Bank Yudha Bhakti Tbk (2001–2002); President Commissioner of PT ITCI Hutani Manunggal (1999–2000); President Commissioner of PT Bank Artha Graha Internasional (1999–2000); Indonesian House of Representatives (1993–1998); and Lieutenant General of the Indonesian National Army (2002).

He concurrently serves as the President Commissioner of PT Borneo Indobara (2018 up to present).

He has no affiliations with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders, and has no share ownership at the Company.

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile



FARID HARIANTO
Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, 68 tahun, dan berdomisili di DKI Jakarta. Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 94 tanggal 18 November 2020 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 19 Agustus 2020 hingga RUPST Tahun 2025.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung pada tahun 1975, gelar *Master of Applied Economics and Managerial Science* dari The Wharton School of University of Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1988, dan gelar Ph.D. in *Applied Economics and Managerial Science* dari The Wharton School of University of Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1989.

Beliau memiliki pengalaman kerja di berbagai posisi, antara lain Komisaris Independen PT Sepatu Bata Indonesia Tbk (2011-2020), Komisaris Independen PT Toba Bara Sejahtera (2012-2020), Komisaris Independen PT Siloam Hospitals Tbk (2008-2019), Wakil Ketua Dewan Rumah Sakit Pang Hlay Siloam di Myanmar (2014-2019), Penasihat Khusus untuk Wakil Presiden RI (2009-2014), Penasihat Senior untuk Gubernur Bank Indonesia (2008-2014), Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN/IBRA, 1998-2000), CEO Credit Rating Indonesia (PT Pefindo, 1995-1998), Professor Dan Ketua Studi ASEAN di Pusat Studi Internasional (CIS, University of Toronto, Canada, 1993-1995).

Saat ini beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Independen PT Unggul Indah Cahaya Tbk (2005-Sekarang), Komisaris Independen PT Indika Energy Tbk (2020-sekarang), Komisaris Utama PT Pertamina Bina Medika (PBM-IHC, 2020-sekarang), Komisaris PT Tripatra Engineering (2019-sekarang), anggota Dewan PT Bata Internatona Tbk (2011-sekarang), dan anggota Dewan PT Toba Bara Sejahtera Tbk (2012-sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham serta tidak memiliki saham Perusahaan.

Indonesian citizen, 68 years old, domiciled in DKI Jakarta. Appointed as Commissioner based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 94 dated November 18, 2020 made before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta with a terms of office from August 19, 2020 until the 2025 AGMS.

He earned a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the Bandung Institute of Technology (ITB), Bandung in 1975, Master of Applied Economics and Managerial Science degree from The Wharton School of University of Pennsylvania, United States in 1988, and Ph.D. in Applied Economics and Managerial Science from The Wharton School of University of Pennsylvania, United States in 1989.

He has work experience in various positions, including as Independent Commissioner of PT Sepatu Bata Indonesia Tbk (2011-2020), Independent Commissioner of PT Toba Bara Sejahtera (2012-2020), Independent Commissioner of PT Siloam Hospitals Tbk (2008-2019), Deputy Chairman of the PangHlay Siloam Hospital Board in Myanmar (2014-2019), Special Advisor to the Vice President of the Republic of Indonesia (2009-2014), Senior Advisor to the Governor of Bank Indonesia (2008-2014), Deputy Chairman of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA / IBRA, 1998-2000), CEO of Credit Rating Indonesia (PT Pefindo, 1995-1998), Professor and Chairman of ASEAN Studies at the Center for International Studies (CIS, University of Toronto, Canada, 1993-1995).

Currently he has concurrent positions as Independent Commissioner of PT Unggul Indah Cahaya Tbk (2005-Present), Independent Commissioner of PT Indika Energy Tbk (2020-present), President Commissioner of PT Pertamina Bina Medika (PBM-IHC, 2020-present), Commissioner of PT Tripatra Engineering (2019-present), member of the Board of PT Bata Internatona Tbk (2011-present), and member of the Board of PT Toba Bara Sejahtera Tbk (2012-present).

He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Shareholders and does not own the Company's shares.

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Warga Negara Indonesia, 59 tahun, dan berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia. Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.

Beliau meraih gelar Sarjana Manajemen dan Bisnis dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta pada tahun 1981, menyelesaikan Program Pendidikan Manajemen dan Bisnis di Monash University, Australia pada tahun 1986, meraih gelar *Master of Science* dalam bidang *Public Policy* dari Universitas Indonesia pada tahun 2002, dan *Executive Education in Economic Infrastructure* dari Harvard Kennedy School, Amerika Serikat pada tahun 2012.

Beliau memiliki pengalaman kerja dengan berbagai posisi, antara lain Pendiri dan Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure Tbk (2006—sekarang); Komisaris PT Margautama Nusantara (2016-sekarang); Komisaris PT Bormindo Nusantara (2008-2010); Pendiri dan Direktur Utama PT Asia Investco (1998-2002); dan Komisaris PT Asia Komunika (1994-1998).

Saat ini Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT Potum (2017-sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan Pemegang Saham. Beliau memiliki saham Perusahaan sebanyak 33,670,866 atau 0,19%.

Indonesian citizen, 59 years old, currently domiciles in DKI Jakarta, Indonesia. He was appointed as the President Director based on the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018, drawn up before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with term of office starting from August 31, 2018, until the GMS in 2023.

He earned his Bachelor of Management and Business degree from Atma Jaya Catholic University, Jakarta (1981), and completed the Management and Business Education Program at Monash University, Australia (1986). In addition, he has a Master's degree in Science, majoring in Public Policy from the University of Indonesia (2002), and completed the Executive Education in Economic Infrastructure at Harvard Kennedy School, US (2012).

He has work experience in various positions, including Founder and President Director of PT Nusantara Infrastructure Tbk (2006-present); Commissioner of PT Margautama Nusantara (2016-present); Commissioner of PT Bormindo Nusantara (2008-2010); Founder and President Director of PT Asia Investco (1998-2002); and Commissioner of PT Asia Komunika (1994-1998).

Currently he has a concurrent position as the President Director of PT Potum (2017-present).

He has no affiliations with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders. He owns 33,670,866 or 0.19% shares of the Company.

Profil Direksi

Board of Directors Profile



DANNI HASAN
Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, dan berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia. Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.

Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang Teknik Kimia dari Universitas Adamson, Filipina pada tahun 1986, gelar *Master of Science* dalam bidang Manajemen Industri dari Universitas Adamson, Filipina pada tahun 1998, dan menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Program strategi kepemimpinan internasional, dan program penggabungan & akuisisi, The Wharton School of the University of Pennsylvania pada tahun 2015.

Beliau memiliki pengalaman kerja dengan berbagai posisi, antara lain Direktur Utama PT Centris Multi Pratama (2001-2007), Kepala Bagian Keuangan PT Centris Multi Pratama (1995-2001), Technical Superintendent, Asamera Oil Ltd. (1990-1992); dan Technical Superintendent, Akzo Coating Indonesia (1988).

Saat ini Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT Margautama Nusantara (2007—sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan Pemegang Saham serta tidak memiliki saham Perusahaan.

Indonesian citizen, 57 years old, currently domiciles in DKI Jakarta, Indonesia. He was appointed as a Director based on the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018, drawn up before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with term of office starting from August 31, 2018, until the GMS in 2023.

He earned his Bachelor of Chemical Engineering degree from Adamson University, the Philippines (1986) and Master of Science degree, majoring in Industrial Management, from Adamson University, the Philippines (1998). He completed the Education and Training on international leadership strategy program and merger and acquisition program at The Wharton School of the University of Pennsylvania (2015).

He has experience in various positions, including as the President Director of PT Centris Multi Pratama (2001-2007); Chief Financial Officer at PT Centris Multi Pratama (1995-2001); Technical Superintendent at Asamera Oil Ltd. (1990-1992); and Technical Superintendent at Akzo Coating Indonesia (1988).

He concurrently serves as the President Director of PT Margautama Nusantara (2007 up to present).

He has no affiliations with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders, and has no share ownership at the Company.

Profil Direksi

Board of Directors Profile



RIDWAN IRAWAN
Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, dan berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia. Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan gelar *Master in International Banking & Financial Services* dari University of Reading, England pada tahun 1993 melalui program beasiswa FCOSAS, British Council (1994).

Beliau memiliki pengalaman kerja dengan berbagai posisi, antara lain Chief Financial Officer, Trada Trading dan Trada Holding (2008—2013); Chief Financial Officer, Trada Group (2006—2008); Direktur Delta Advisory Pte. Ltd; Deputy Director Corporate Finance di PT Holdika Perkasa (1999—2004); dan Senior Manager Corporate Finance Division PT HSBC Securities Indonesia (HSBC Investment Banking) (1997—1999).

Saat ini Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan Pemegang Saham serta tidak memiliki saham Perusahaan.

Indonesian citizen, 54 years old, currently domiciles in DKI Jakarta, Indonesia. He was appointed as a Director based on the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018, drawn up before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with term of office starting from August 31, 2018, until the GMS in 2023.

He earned his Bachelor of Economics degree from the University of Indonesia (1991) and Master's degree in International Banking and Financial Services from the University of Reading, England (1993) through the FCOSAS (British Council) scholarship program (1994).

Before serving as the Company's Director, he held several strategic positions, including as the Chief Financial Officer at Trada Trading dan Trada Holding (2008-2013); Chief Financial Officer at Trada Group (2006-2008); Director at Delta Advisory Pte. Ltd; Deputy Director of Corporate Finance at PT Holdika Perkasa (1999-2004); and Senior Manager of Corporate Finance Division at PT HSBC Securities Indonesia (HSBC Investment Banking) (1997-1999).

At present, he has no concurrent position at other companies.

He has no affiliations with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders, and has no share ownership at the Company.

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Warga Negara Indonesia, 62 tahun, dan berdomisili di DKI Jakarta. Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 94 tanggal 18 November 2020 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 19 Agustus 2020 hingga RUPST Tahun 2025.

Beliau menyelesaikan pendidikan di Ngee Ann College, Singapura pada tahun 1981.

Beliau memiliki pengalaman kerja dengan berbagai posisi, antara lain Komisaris Presiden dari ICBP (2009-2015); Komisaris Presiden PT Indoritel Makmur Internasional Tbk; dan Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk.

Saat ini Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2004-sekarang); Komisaris Utama PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (2010-sekarang); Komisaris PT Fask Food Indonesia Tbk (1992-sekarang); Direktur PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (1994-sekarang); Dewan Penasihat PLDT Inc; dan Anggota Dewan First Pacific (2003-sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan Pemegang Saham serta tidak memiliki saham Perusahaan.

Indonesian citizen, 62 years old, and domiciled in DKI Jakarta. Appointed as Director based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 94 dated November 18, 2020 made before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta with a term of office from August 19, 2020 until the 2025 AGMS.

He completed his education at Ngee Ann College, Singapore in 1981.

He has work experience in various positions, including President Commissioner of ICBP (2009-2015); President Commissioner of PT Indoritel Makmur Internasional Tbk; and Commissioner of PT Bumi Serpong Damai Tbk.

Currently he has concurrent positions as Commissioner of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2004-present); President Commissioner of PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (2010-present); Commissioner of PT Fast Food Indonesia Tbk (1992-present); Director of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (1994-present); PLDT Inc Advisory Board; and Board Member of First Pacific (2003-present).

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and Shareholders and does not own the Company's shares.

Profil Direksi

Board of Directors Profile



DENN CHARLY G. ESPANOLA
Direktur
Director

Warga Negara Filipina, 50 tahun, dan berdomisili di 40-B Mercurio Street, Mabayan, Olongapo City, Filipina. Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Oceanography* dari US Naval Academy, Annapolis, Maryland, USA pada tahun 1994.

Beliau memiliki pengalaman kerja dengan berbagai posisi, antara lain Deputy CEO di CII Bridges and Roads (2015–2018); Direktur CII Bridges and Roads (2015–2018); Vice Chairman Board of Directors di MCSC Operations and Maintenance Company (2015–2018); Vice President Division Head, Subic Freeport Expressway and Subic Clark Tarlac Expressway di Tollways Management - Corporation (2008–2015); Manager–Subic Freeport Expressway di Tollways Management Corporation (2005–2008); dan Manager–Traffic Management, Safety and Security Dept di Tollways Management Corporation (2004–2005).

Saat ini Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Country Head di Metro Pacific Tollways Corporation (2018–sekarang) dan Komisaris Utama PT Metro Pacific Tollways Indonesia (2018–sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan Pemegang Saham serta tidak memiliki saham Perusahaan.

Filipino citizen, 50 years old, currently domiciles at 40-B Mercurio Street, Mabayan, Olongapo City, the Philippines. He was appointed as a Director based on the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018, drawn up before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with term of office starting from August 31, 2018, until the GMS in 2023.

He earned his Bachelor of Oceanography degree from the US Naval Academy, Annapolis, Maryland, USA (1994).

Before serving as the Company's Director, he held several strategic positions, including as the Deputy CEO at CII Bridges and Roads (2015-2018); Director at CII Bridges and Roads (2015-2018); Vice Chairman of the Board of Directors at MCSC Operations and Maintenance Company (2015-2018); Vice President Division Head of Subic Freeport Expressway and Subic Clark Tarlac Expressway at Tollways Management Corporation (2008-2015); Manager of Subic Freeport Expressway at Tollways Management Corporation (2005-2008); and Manager of Traffic Management, Safety and Security Department at Tollways Management Corporation (2004-2005).

He concurrently serves as the Country Head for Metro Pacific Tollways Corporation (2018 up to present) and President Commissioner of PT Metro Pacific Tollways Indonesia (2018 up to present).

He has no affiliations with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders, and has no share ownership at the Company.

Profil Direksi

Board of Directors Profile



CHRISTOPHER DANIEL C. LIZO
Direktur
Director

Warga Negara Filipina, 48 tahun, dan berdomisili di 113 Carmelite St. Merville Park Subdivision, Paranaque City, Filipina. Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Akuntansi, De La Salle University pada tahun 1993 dan Pendidikan Manajemen Eksekutif, University of Wharton, Philadelphia, USA.

Beliau memiliki pengalaman kerja dengan berbagai posisi, antara lain CFO Treasurer di NLEX Corporation (2008–2016); Director di Metro Pacific Investments Corporation (2007–2008); dan Vice President of Treasury di Metro Pacific Investments Corporation (2006–2007).

Saat ini Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Kepala Bidang Operasional dan Keuangan di MP Cala Holdings, Inc. (2015—sekarang); Treasurer & Director di Cavitex Infrastructure Corporation (2013—sekarang); Senior Vice President CFO di Metro Pacific Tollways Corporation (2009—sekarang); Treasurer & Director di NLEX Corporation (2009—sekarang); dan Treasurer & Director di Tollways Management Corporation (2009—sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan Pemegang Saham serta tidak memiliki saham Perusahaan.

Filipino citizen, 48 years old, currently domiciles at 113 Carmelite St. Merville Park Subdivision, Paranaque City, the Philippines. He was appointed as a Director based on the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018, drawn up before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with term of office starting from August 31, 2018, until the GMS in 2023.

He earned his Bachelor of Accounting degree from De La Salle University (1993) and completed the Executive Management Education at the University of Wharton, Philadelphia, USA.

Before serving as the Company's Director, he held several strategic positions, including as the CFO Treasurer at NLEX Corporation (2008-2016); Director at Metro Pacific Investments Corporation (2007-2008); and Vice President of Treasury at Metro Pacific Investments Corporation (2006-2007).

He concurrently serves as the COO and CFO at MP CALA Holdings, Inc. (2015 up to present); Treasurer and Director at Cavitex Infrastructure Corporation (2013 up to present); Senior Vice President CFO at Metro Pacific Tollways Corporation (2009 up to present); Treasurer and Director at NLEX Corporation (2009 up to present); and Treasurer and Director at Tollways Management Corporation (2009 up to present).

He has no affiliations with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders, and has no share ownership at the Company.

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Warga Negara Filipina, 48 tahun, dan berdomisili di 21 Cucumber St. Valle Verde V, Pasig City, Filipina. Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.

Beliau meraih gelar Sarjana Manajemen Bisnis, Ateneo de Manila University pada tahun 1994 dan gelar Magister Manajemen Bisnis, Asian Institute of Management, Manila pada tahun 1999.

Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Direktur Senior Ernst and Young Philippines (2001—2007).

Saat ini Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Vice President Pengembangan Bisnis di PT Metro Pacific Tollways Corporation (2013—sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan Pemegang Saham serta tidak memiliki saham Perusahaan.

Filipino citizen, 48 years old, currently domiciles at 21 Cucumber St. Valle Verde V, Pasig City, the Philippines. He was appointed as a Director based on the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018, drawn up before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with term of office starting from August 31, 2018, until the GMS in 2023.

He earned his Bachelor of Business Management degree from Ateneo de Manila University (1994) and Master of Business Management degree from Asian Institute of Management, Manila (1999).

He has a work experience as the Senior Director at Ernst and Young Philippines (2001-2007).

He concurrently serves as the Vice President of Business Development at PT Metro Pacific Tollways Corporation (2013 up to present).

He has no affiliations with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders, and has no share ownership at the Company.

Profil Direksi Board of Directors Profile



AMADEO N. BEJEC
Direktur
Director

Warga Negara Filipina, 46 tahun, dan berdomisili di 4 Rosemary St. Dreamhomes Snbd. Brgy. Dela Paz, Pasig City, Filipina 1600. Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Accounting* di Universitas De La Salle, Filipina pada tahun 1994 dan gelar *Master of Business Administration* di Universitas De La Salle, Filipina pada tahun 2004.

Beliau memiliki pengalaman kerja dengan berbagai posisi, antara lain Manager Corporate Finance di C&P Homes (2000–2003); Auditor di SGV (1996–1999); dan Management Trainee, Divisi Treasury di Equitable Bank (1995–1996).

Saat ini Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Vice President of Corporate Finance di NLEX Corporation (2003–sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan Pemegang Saham serta tidak memiliki saham Perusahaan.

Filipino citizen, 46 years old, currently domiciles at 4 Rosemary St. Dreamhomes Snbd. Brgy. Dela Paz, Pasig City, the Philippines. He was appointed as a Director based on the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018, drawn up before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with term of office starting from August 31, 2018, until the GMS in 2023.

He earned his Bachelor of Accounting degree from De La Salle University, the Philippines (1994) and Master of Business Administration degree from De La Salle University, the Philippines (2004).

Before serving as the Company's Director, he held several strategic positions, including as the Manager of Corporate Finance at C&P Homes (2000–2003); Auditor at SGV (1996–1999); and Management Trainee at the Treasury Division of Equitable Bank (1995–1996).

He concurrently serves as the Vice President of Corporate Finance at NLEX Corporation (2003 up to present).

He has no affiliations with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders, and has no share ownership at the Company.

Profil Pejabat Eksekutif

Executive Officers Profile



ARNAF RADIN YOGANATA
Procurement Senior Manager

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Procurement Senior Manager pada 1 November 2018 berdasarkan 066/SK-HRD/XI/2018. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti pada tahun 2005 dan telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Head of Procurement di PT Nusantara Infrastructure (2018-sekarang); Head of Procurement & Logistic di PT Komet Infra Nusantara (2014—2018); Procurement Manager di SAP Group (2012—2014); Procurement di PT Siemens Indonesia dan PT Nokia Siemens (2006—2012); dan Site Supervisor di CV Hikmah Mandiri (2005—2006).

Indonesian citizen, 40 years old, currently domiciles in Jakarta. He was appointed as the Procurement Senior Manager on November 1, 2018, based on the Decree No. 066/SK-HRD/XI/2018. He earned his Bachelor of Civil Engineering degree from Trisakti University in 2005 and has had various work experiences as Head of Procurement at PT Nusantara Infrastructure (2018-present); Head of Procurement & Logistics at PT Komet Infra Nusantara (2014-2018); Procurement Manager at SAP Group (2012-2014); Procurement at PT Siemens Indonesia and PT Nokia Siemens (2006-2012); and Site Supervisor at CV Hikmah Mandiri (2005-2006).



NUGROHO VEMBRIANTO S.
Technical Expert Senior Manager

Warga Negara Indonesia, 37 tahun, dan berdomisili di Bandung. Diangkat sebagai Technical Expert Senior Manager pada 25 Mei 2012 berdasarkan 145/SK-DIR/NI/V/2012. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (ITB) dan telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Anggota tim perumus kebijakan Standar Pelayanan Minimal di bawah supervisi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) (2015—sekarang); Head of Engineering/Planning/Research/Operation di PT Nusantara Infrastructure Tbk (2012—sekarang); dan Asisten ahli geoteknik pantai dan lepas pantai pada Manajemen Induk Proyek Jembatan Surabaya—Madura (Suramadu) pada tahun 2006.

Indonesian citizen, 37 years old, currently domiciles in Bandung. He was appointed as the Technical Expert Senior Manager on May 25, 2012, based on the Decree No. 145/SK-DIR/NI/V/2012. He graduated from the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bandung Institute of Technology (ITB). Previously, he served as a Member of the Minimum Service Standards policy formulation team under the supervision of the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia (PUPR RI) (2016-now); Head of Engineering/Planning/Research/Operation at PT Nusantara Infrastructure Tbk (2012-now); and Assistant to coastal and offshore geotechnical expert at the Surabaya-Madura (Suramadu) Bridge Project Management in 2006.

Profil Pejabat Eksekutif Executive Officers Profile



Warga Negara Indonesia, 44 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Accounting & Tax Senior Manager pada 25 April 2018 berdasarkan 034/SK-HRD/IV/2018. Meraih gelar Master di Bidang Finance and Accounting dari Universitas Pancasila pada tahun 2015 dan mendapatkan sertifikasi Certified Management Accountant (CMA) dari ICMA Australia pada tahun 2018 serta telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Supervisor Internal Audit di Sierad Group (3 tahun); Business Analyst di Kimberly-Lever Indonesia (Unilever Group) (5 tahun); Head of Accounting di Holcim Indonesia (12 Tahun); dan Senior Manager Accounting and Tax di PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018—sekarang).

Indonesian citizen, 44 years old, currently domiciles in Jakarta. He was appointed as the Accounting and Tax Senior Manager on April 25, 2018, based on the Decree No. 034/SK-HRD/IV/2018. He earned a Master's degree in Finance and Accounting from Pancasila University in 2015 and received a Certified Management Accountant (CMA) certification from ICMA Australia in 2018 and has had various work experiences as Internal Audit Supervisor at Sierad Group (3 years); Business Analyst at Kimberly-Lever Indonesia (Unilever Group) (5 years); Head of Accounting at Holcim Indonesia (12 years); and Senior Manager Accounting and Tax at PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018-present).



Warga Negara Indonesia, 55 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Finance Administration Senior Manager pada 21 Februari 2018 berdasarkan 022/SK-HRD/II/2018. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Advent Indonesia pada tahun 1988 dan telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Senior Manager di PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018—sekarang); General Manager Finance di PT Tirta Bangun Nusantara (2013—2017); dan General Manager Finance di PT Certis Multipersada Pratama Tbk (1996—2012).

Indonesian citizen, 55 years old, currently domiciles in Jakarta. She was appointed as the Finance Administration Senior Manager on February 21, 2018, based on the Decree No. 022/SK-HRD/II/2018. She earned her Bachelor of Accounting from Universitas Advent Indonesia (1988). Previously, she served as a Finance General Manager at PT Tirta Bangun Nusantara (2013-2017); and Finance General Manager at PT Certis Multipersada Pratama Tbk (1996-2012).

Profil Pejabat Eksekutif

Executive Officers Profile



Warga Negara Indonesia, 46 tahun, dan berdomisili di Bekasi. Diangkat sebagai Human Resource/General Affairs General Manager pada 2 September 2013 berdasarkan 073/PKT/HRD-NI/VIII/2013. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya pada tahun 1996 dan gelar Magister Management Human Resources, Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2021 serta telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Corporate Human Resource/General Affairs/Information Technology General Manager dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Nusantara Infrastructure Tbk (2013—sekarang); dan selama 15 tahun menangani berbagai pilar bisnis di Unilever Indonesia.

Indonesian citizen, 46 years old, currently domiciles in Bekasi. She was appointed as the Human Resource/General Affairs General Manager on September 2, 2013, based on the Decree No. 073/PKT/HRD-NI/VIII/2013. She earned her Bachelor of Civil Engineering degree from Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya in 1996 and Master of Human Resources Management, Pelita Harapan University, Jakarta in 2021. She has various experience such as serving as a Corporate Human Resource/General Affairs/Information Technology General Manager and Member of Nomination and Remuneration Committee at PT Nusantara Infrastructure Tbk (2013 up to present); and handling various



Warga Negara Indonesia, 57 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Corporate Affairs General Manager pada 6 Januari 2012 berdasarkan 002/PKT/HRD-NI/I/2012. Meraih gelar Master of Business Administration dari Armstrong University pada tahun 1987 dan Bachelor of Arts, International Business dari Bedford University (1982) serta telah berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang sales & marketing, media, komunikasi, periklanan dan perbankan di berbagai perusahaan seperti Citibank, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Lippo Karawaci, American Express Bank, Advis Marketing Communication Agency dan Putera Sampoerna Foundation; dan sejak 2012 hingga kini sebagai Corporate Affairs General Manager PT Nusantara Infrastructure Tbk yang menangani internal dan external communication (media relations, government relations, community relations, dan CSR).

Indonesian citizen, 57 years old, currently domiciles in Jakarta. She was appointed as the Corporate Affairs General Manager on January 6, 2012, based on the Decree No. 002/PKT/HRD-NI/I/2012. She earned her Master of Business Administration degree from Armstrong University (1987) and Bachelor of Arts degree, majoring in International Business, from Bedford University (1982). She has more than 25 years of experience in the fields of sales and marketing, media, communication, advertising, and banking in various companies, such as Citibank, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Lippo Karawaci, American Express Bank, Advis Marketing Communication Agency, and Putera Sampoerna Foundation, and from 2012 up to present, she has been serving as a Corporate Affairs General Manager of PT Nusantara Infrastructure Tbk to handle the internal and external communication affairs (media relations, government relations, community relations, and CSR).

Profil Pejabat Eksekutif Executive Officers Profile



Warga Negara Indonesia, 42 tahun, dan berdomisili di Depok. Diangkat sebagai Senior Manager-Head of Operational Excellence pada 12 Oktober 2020 berdasarkan 018/SK-HRD/X/2020. Meraih gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002 dan telah memiliki berbagai pengalaman kerja lebih dari 18 tahun di bidang Strategic Management, Commercial Excellence, Business Process Optimization, Project Management, dan Microfinancing di berbagai perusahaan seperti Federal International Finance Group member of Astra International, Holcim Indonesia, dan Semen Indonesia Group.

Indonesian Citizen, 42 years old, and domiciled in Depok. Appointed as Senior Manager-Head of Operational Excellence in October 12, 2020 pursuant to 018/SK-HRD/X/2020. Received Bachelor degree from Bogor Institute of Agriculture in 2002 and had more than 18 years of experience in the field of Strategic Management, Commercial Excellence, Business Process Optimization, Project Management, and Microfinancing in companies such as Federal International Finance Group member of Astra International, Holcim Indonesia, and Semen Indonesia Group.

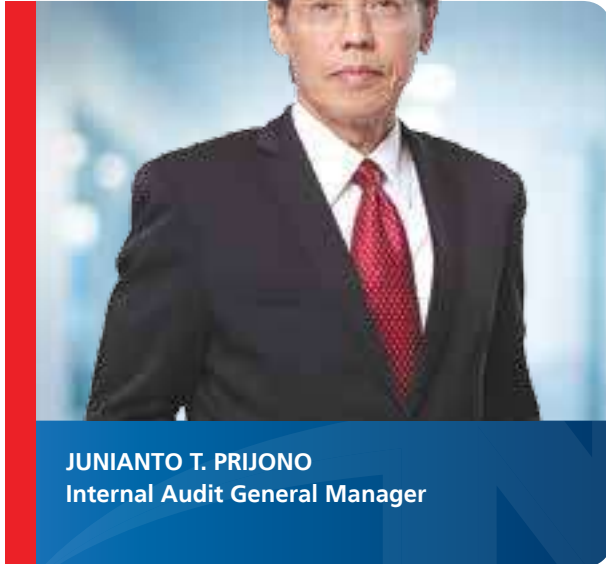


Warga Negara Indonesia, 43 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Legal General Manager pada 1 Oktober 2018 berdasarkan 064/SK-HRD/X/2018. Meraih gelar Sarjana Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 1999, LL.M di US Legal Studies, Golden Gate University, San Francisco pada tahun 2003, dan S.JD, International Law pada tahun 2006 serta telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai General Manager Legal dan Corporate Secretary di PT Nusantara Infrastructure (2018–sekarang); General Counsel & Head of Legal di PT Komet Infra Nusantara (2015–2018); Head of Indonesian Desk di Firma Hukum KhattarWong, LLP dan Shook Lin & Bok LLP, Singapura (2011–2015); Senior Legal Officer di Orchard Maritime Logistics Pte. Ltd.-Singapore (2009–2011); Executive Officer di firma Hukum KhattarWong, Singapura (2006–2009); dan Off-shore legal practice-experience in California, USA and Den Haag, Netherlands (2000–2009).

Indonesian citizen, 43 years old, currently domiciles in Jakarta. She was appointed as the Legal General Manager on October 1, 2018, based on the Decree No. 064/SK-HRD/X/2018. She earned her Bachelor of Law degree from Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1999), LL.M degree in US Legal Studies from Golden Gate University, San Francisco (2003), and SJD in International Law (2006). Previously, she served as General Manager Legal and Corporate Secretary at PT Nusantara Infrastructure (2018–present); General Counsel & Head of Legal at PT Komet Infra Nusantara (2015–2018); Head of Indonesian Desk at Law Firm Khattar Wong, LLP and Shook Lin & Bok LLP, Singapore (2011–2015); Senior Legal Officer at Orchard Maritime Logistics Pte. Ltd. Singapore (2009–2011); Executive Officer at Khattar Wong Law firm, Singapore (2006–2009); and Off-shore legal practice-experience in California, USA and Den Haag, Netherlands (2000–2009).

Profil Pejabat Eksekutif

Executive Officers Profile



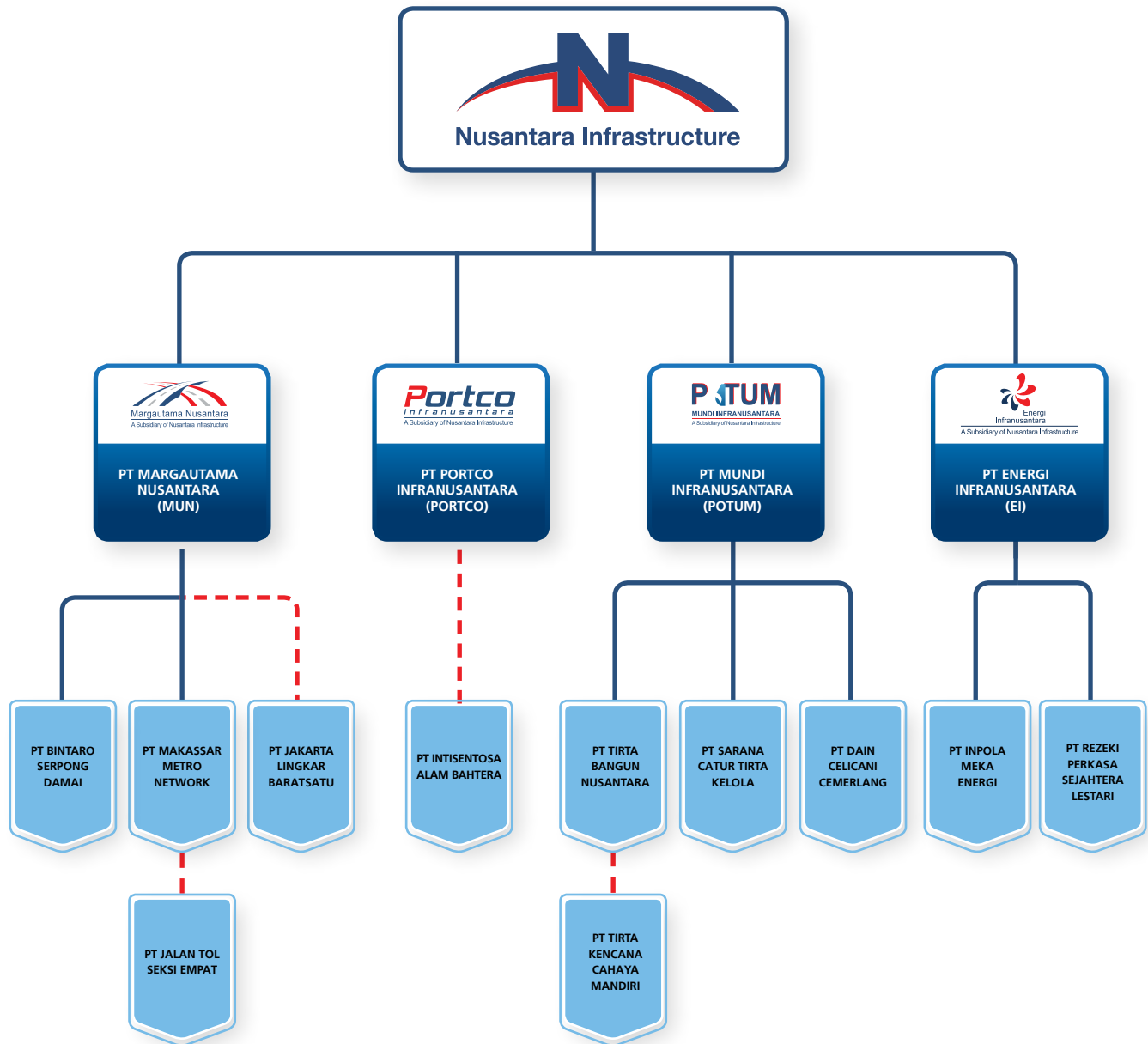
Warga Negara Indonesia, 65 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Internal Audit General Manager berdasarkan SKD:106/NI-DIR1/31/08/2018. Meraih gelar Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya pada tahun 1981 dan Master of Business Administration dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada tahun 1989 serta telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Komisaris PT Nusantara Infrastructure Tbk (2008-2017); Chief Finance Officer di Bosowa Corporation (2008-2009); Star Petrogas Corporation/ Persian Gulf Star Oil Company (2007-2008); PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (2006-2007); Direktur di PT Renaissance Capital Asia (2005-2006); Komisaris PT Bank Lippo Tbk (2002-2004); Deputy Direktur Keuangan – Kontroler & Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero); Deputy Ketua – Dukungan Kerja & Administrasi (2001-2004), Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA); Partner – Finansial Advisory di Deloitte Touche (1991-2001) dan sebagainya.

Indonesian citizen, 65 years old, currently domiciles in Jakarta. He was appointed as the Internal Audit General Manager based on the Decree No. 106/NI-DIR1/31/08/2018. He earned his Bachelor of Accounting degree from the Faculty of Economics of Universitas Brawijaya (1981) and Master of Business Administration from PPM School of Management (1989). Previously, he served as a Commissioner at PT Nusantara Infrastructure Tbk (2008-2017); Chief Finance Officer at Bosowa Corporation (2008-2009); Star Petrogas Corporation/Persian Gulf Star Oil Company (2007-2008); PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (2006-2007); Director at PT Renaissance Capital Asia (2005-2006); Commissioner at PT Bank Lippo Tbk (2002-2004); Deputy Director of Finance - Controller & Risk Management of PT Pertamina (Persero); Deputy Chairperson - Work Support & Administration (2001-2004), Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA); Partner - Financial Advisory at Deloitte Touche (1991-2001) and so on.



Struktur Grup

Group Structure



Entitas Anak /
Subsidiaries

Entitas Asosiasi /
Associated Company

Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

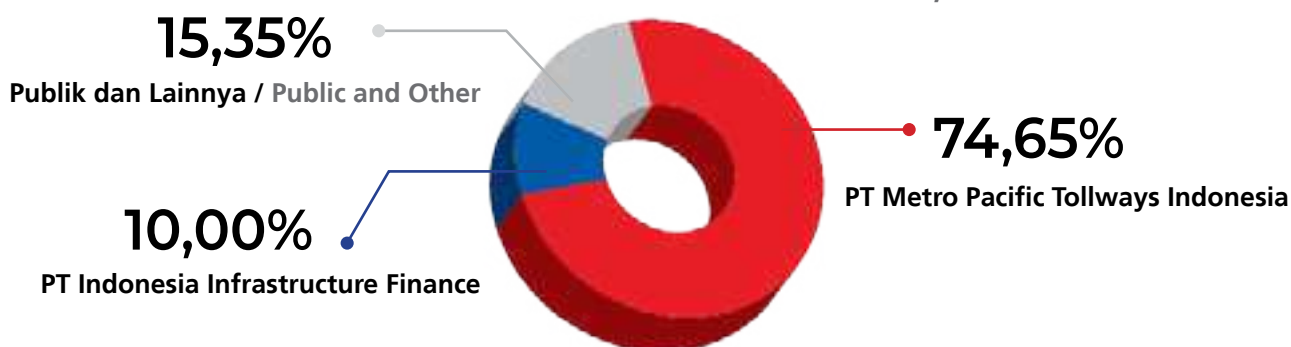
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PER 31 DESEMBER 2020

SHARE OWNERSHIP COMPOSITION AS OF DECEMBER 31, 2020

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (Rp)	Kepemilikan Ownership
SERI A / SERIES A			
PT Bosowa Utama	1	35	0,00%
Sub Jumlah Saham Beredar Seri A Sub-Total of Outstanding Series A Shares	1	35	0,00%
SERI B / SERIES B			
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	13.220.263.850	925.418.469.500	74,65%
PT Indonesia Infrastructure Finance	1.771.071.131	123.974.979.170	10,00%
Masyarakat Public	2.333.918.213	163.374.274.910	13,17%
Saham Treasuri Treasury Stock	385.455.000	26.981.850.000	2,18%
Sub Jumlah Saham Beredar Seri B Sub-Total of Outstanding Series B Shares	17.710.708.193	1.239.749.573.510	100,00%
Jumlah Saham Beredar Total Outstanding Shares	17.710.708.194	1.239.749.573.545	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel Total Shares in Portfolio	63.289.291.807	4.430.250.426.455	

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM NI PER 31 DESEMBER 2020

COMPOSITION OF NI SHAREHOLDERS AS OF DECEMBER 31, 2020



KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN

Komposisi Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham

KOMISARIS DAN DIREKSI

SHARE OWNERSHIP BY MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	2020	
		Jumlah Saham (Lembar) <i>Total Shares (Shares)</i>	Persentase Kepemilikan (%) <i>Ownership Percentage (%)</i>
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Jose Ma. K. Lim	Komisaris Utama / President Commissioner	-	-
Rodrigo Emmanuel Franco	Komisaris / Commissioner	-	-
Johny J. Lumintang	Komisaris Independen / Independent Commissioner	-	-
Farid Harianto	Komisaris / Commissioner	-	-
Direksi / Board of Directors			
M. Ramdani Basri	Direktur Utama & CEO / President Director & CEO	33.670.866	0,19
Danni Hasan	Direktur / Director	-	-
Ridwan Irawan	Direktur / Director	-	-
Denn Charly G. Espanola	Direktur / Director	-	-
Amadeo Navalta Bejec	Direktur / Director	-	-
Christopher Daniel Cabrera Lizo	Direktur / Director	-	-
Francis Emmanuel Dalupan Rojas	Direktur / Director	-	-
Benny S. Santoso	Direktur / Director	-	-

KLASIFIKASI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS CLASSIFICATION

Kategori Category	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Share)	Persentase (%) Percentage (%)
Pemodal Domestik / Domestic Investor		
Ritel Domestik / Domestic Retail	1.171.813.602	6,61
Institusi Domestik / Domestic Institution	16.505.639.009	93,20
Jumlah Pemodal Domestik Total Domestic Investor	17.677.452.611	99,81
Pemodal Asing / Foreign Investor		
Ritel Asing / Foreign Retail	20.150	0,00
Institusi Asing / Foreign Institution	33.235.432	0,19
Jumlah Pemodal Asing Total Foreign Investor	33.255.582	0,19
Jumlah Total / Total	17.710.708.194	100

Struktur Pemegang Saham

Shareholder Structure



*First Pacific Company Limited merupakan suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong. Bapak Anthoni Salim memiliki kepentingan dan memegang kendali secara langsung maupun tidak langsung di First Pacific Company Limited.

*First Pacific Company Limited is a company listed on the Hong Kong Stock Exchange. Mr. Anthoni Salim has an interest and both direct and indirect control in First Pacific Company Limited.

**Melalui MPT Asia Corporation, entitas anak tidak langsung dari First Pacific Company Limited.

**Through MPT Asia Corporation, an indirect subsidiary of First Pacific Company Limited.

Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Tanggal Date	Aksi Korporasi Corporate Action	Jumlah Saham Total Shares	Jumlah Setelah Pencatatan Saham Total Shares After Shares Listing	Modal Disetor Paid Capital	Nama Bursa Efek Name of Stock Exchange
18 Juli 2001 July 18, 2001	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	60.000.000	60.000.000	6.000.000.000	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
18 Juli 2001 July 18, 2001	Penambahan Pencatatan Listing Addition	375.000.000	435.000.000	43.500.000.000	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
8 November 2006 November 8, 2006	Penggabungan Usaha Merger	9.693.571.429	10.128.571.429	354.500.000.015	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
20 Juli 2010 July 20, 2010	Penggabungan Nilai Nominal Merger of Nominal Value	-5.064.285.714	5.064.285.715	354.500.000.050	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange

Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Tanggal Date	Aksi Korporasi Corporate Action	Jumlah Saham Total Shares	Jumlah Setelah Pencatatan Saham Total Shares After Shares Listing	Modal Disetor Paid Capital	Nama Bursa Efek Name of Stock Exchange
12 Agustus 2010 August 12, 2010	Penawaran Umum Terbatas 1:2 Limited Public Offering 1:2	8.476.500.000	13.540.785.715	947.855.000.050	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
26 Juli 2013 July 26, 2013	Konversi Waran Seri 1:1 Warrant Series Conversion 1:1	154.308.244	15.235.671.880	1.066.497.031.565	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
28 Desember 2018 December 28, 2018	Penambahan Saham Seri B dengan HMETD B Series Shares Addition with Preemptive Rights	2.475.036.314	17.710.708.194	1.239.749.573.545	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange

PERATURAN KEPEMILIKAN DAN HAK SAHAM NUSANTARA INFRASTRUCTURE

OWNERSHIP REGULATIONS AND SHARES RIGHTS OF NUSANTARA INFRASTRUCTURE

Jenis Saham Types of Share	Peraturan Kepemilikan Ownership Regulations	Hak Rights
Saham Seri A Series A Share	Akta No. 23 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Deed No. 23 dated May 12, 2015, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta	Saham Seri A merupakan saham tanpa hak suara, tidak berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau <i>Right Issue</i> apabila Perusahaan akan melakukan Penawaran Umum Terbatas, tidak berhak untuk melakukan penambahan saham, dan Saham Seri A tidak dapat dialihkan kepada siapa pun. Hak yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A hanyalah hak atas dividen yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari hak atas dividen yang diterima oleh Pemegang Saham Seri B. Series A shares are shares without voting rights, are not entitled to Preemptive Rights (HMETD) or Right Issue if the Company will conduct a Limited Public Offering, are not entitled to add shares, and Series A Shares cannot be transferred to anyone. The rights held by Series A Shareholders are only the right to dividends, which is 50% (fifty per cent) of the rights to dividends received by the Series B Shareholders.
Saham Seri B Series B Shares	Akta No. 23 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Deed No. 23 dated May 12, 2015, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta	Saham Seri B tidak dapat dipindahkan dengan cara apa pun kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan khususnya peraturan di bidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perusahaan. Series B shares cannot be transferred in any way unless otherwise specified in the legislation, especially regulations in the capital market and the Company's Articles of Association.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing Chronology

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak melakukan pencatatan efek lainnya dalam bentuk apapun selain yang telah diungkapkan dalam "Kronologi Pencatatan Saham". Dengan demikian, tidak terdapat adanya informasi tentang nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

Until the end of 2020, the Company did not record other securities in any form other than those disclosed in the "Share Listing Chronology". Therefore, there is no information regarding the names of other securities, the year of issuance of other securities, interest rate/return for other securities, maturity date of other securities, offering value of other securities, name of exchange where other securities are listed, and rating of securities.

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

List of Subsidiaries and Associated Entities

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

Entitas Anak <i>Subsidiary</i>	Tahun Awal Kegiatan Beginning Year of Commercial Activities	Tahun Penyertaan Year of Investment	Kepemilikan Saham Share Ownership	Bidang Usaha Business Line	Status Operasi Operational Status	Total Aset (dalam miliar Rupiah) Total Assets (in million Rupiah)
Entitas Anak Langsung / Direct Subsidiary						
PT Margautama Nusantara	2011	2010	76,51%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	3.498.559
PT Potum Mundi Infranasantara	2012	2011	99,99%	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Beroperasi Operating	288.849
PT Portco Infranasantara	2012	2011	99,99%	Pengusahaan Pelabuhan Port Management	Beroperasi Operating	167.327
PT Energi Infranasantara	2013	2012	99,99%	Energi Terbarukan Renewable Energy	Beroperasi Operating	720.571
PT Telekom Infranasantara	2014	2014	100,00%	Telekomunikasi Telecommunication	Beroperasi Operating	88.491
PT Marga Metro Nusantara	2019	2018	80,00%	Pembangunan, perdagangan dan jasa Construction, tradings and service	Beroperasi Operating	38.820

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

List of Subsidiaries and Associated Entities

Entitas Anak Subsidiary	Tahun Awal Kegiatan Beginning Year of Commercial Activities	Tahun Penyertaan Year of Investment	Kepemilikan Saham Share Ownership	Bidang Usaha Business Line	Status Operasi Operational Status	Total Aset (dalam miliar Rupiah) Total Assets (in million Rupiah)
Entitas Anak Tidak Langsung, Melalui PT Margautama Nusantara Indirect Subsidiary through PT Margautama Nusantara						
PT Bintaro Serpong Damai	1999	2006	88,93%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	678.809
PT Makassar Metro Network	1998	2006	99,62%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	2.109.069
Entitas Anak Tidak Langsung, Melalui PT Potum Mundi Infranasantara Indirect Subsidiary through PT Potum Mundi Infranasantara						
PT Tirta Bangun Nusantara	2012	2012	99,99%	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Beroperasi Operating	47.857
PT Dain Celicani Cemerlang	2014	2012	74,52%	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Beroperasi Operating	114.974
PT Sarana Catur Tirta Kelola	1997	2013	65,00%	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Beroperasi Operating	213.594
Entitas Anak Tidak Langsung, Melalui PT Energi Infranasantara Indirect Subsidiary through PT Energi Infranasantara						
PT Inpol Meka Energi	-	2013	61,23%	Energi Terbarukan Renewable Energy	Beroperasi Operating	425.532
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari	2018	2018	80,00%	Energi Terbarukan Renewable Energy	Beroperasi Operating	237.102
Entitas Anak Tidak Langsung, Melalui PT Makassar Metro Network Indirect Subsidiary through PT Makassar Metro Network						
PT Jalan Tol Seksi Empat	2008	2013	99,39%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	668.189

ENTITAS ANAK LANGSUNG

PT Margautama Nusantara (MUN)

PT Margautama Nusantara (MUN) berdiri pada 11 Mei 2007 dengan tujuan untuk menjalankan bisnis usaha pada bidang pengelolaan jalan tol dan saat ini berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2013, Perusahaan melakukan akuisisi pada 75% saham MUN dan menjadikan MUN secara resmi sebagai entitas anak Perusahaan. Sebelum diakuisisi oleh Perusahaan, MUN memiliki 2 (dua) entitas anak, yaitu PT Bintaro Serpong Damai (BSD) dengan kepemilikan saham 66,68%, dan PT Makassar Metro Network (MMN) dengan kepemilikan saham 73,88%. MUN juga memiliki 1 (satu) entitas anak tidak langsung yaitu PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) dengan kepemilikan saham 73,43% serta 1 (satu) entitas asosiasi yaitu PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) dengan kepemilikan saham 35%.

Untuk memperkuat aspek permodalan MUN serta meningkatkan kinerja dalam pengelolaan jalan tol, MUN membangun kerja sama dengan Capital Advisor Partners Asia Pte Ltd (CapAsia) yang merupakan sebuah perusahaan swasta di sektor investasi di Asia Tenggara, yang diwakili oleh CIIF Infrastructure Holdings Sdn Bhd dan CAIF III Infrastructure Holding Sdn Bhd. Diharapkan dengan adanya kerja sama tersebut, kinerja dan pencapaian MUN dalam bidang pengelolaan jalan tol dapat meningkat. Hingga akhir tahun 2020, kepemilikan saham MUN oleh Perusahaan adalah sebesar 76,51%.

PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)

PT Potum Mundi Infranasantara didirikan pada tahun 2011 sebagai salah satu entitas anak Perusahaan yang berfokus pada pengelolaan sektor penyediaan air bersih. Saham di PT Potum oleh Perusahaan hingga akhir tahun 2020 adalah sebesar 99,99%.

Di tahun 2012, PT Potum melakukan akuisisi saham dari PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) dan PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) masing-masing sebesar 51%. Kedua perusahaan tersebut telah memiliki kontrak pengelolaan air bersih di wilayah Cikokol, Tangerang, dan Medan serta secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam konsesi proyek instalasi penyediaan air bersih di wilayah-wilayah tersebut. Pada tahun 2013, PT Potum mengakuisisi saham PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) sebesar 65%.

DIRECT SUBSIDIARIES

PT Margautama Nusantara (MUN)

PT Margautama Nusantara was established on May 11, 2007, with an objective to carry out business in the field of toll road management, and is currently located in Jakarta. In 2013, the Company acquired 75% shares of MUN; thus, making it as the Company's subsidiary. Prior to the acquisition and up to present, MUN owns 2 (two) subsidiaries, namely PT Bintaro Serpong Damai (BSD) with 66.68% share ownership, and PT Makassar Metro Network (MMN) with 73.88% share ownership. MUN also owns 1 (one) indirect subsidiary, namely PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) with 73.43% share ownership and 1 (one) associated entity, namely PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) with 35% share ownership.

To strengthen MUN's capital and improving performance in toll road management, MUN cooperated with Capital Advisor Partners Asia Pte. Ltd. (CapAsia), a private company engaged in the investment sector in Southeast Asia, represented by CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd. and CAIF III Infrastructure Holding Sdn. Bhd. With this cooperation, it is expected that MUN's performance and achievement in toll road management can improve. As of 2020, the Company owns 76.51% share ownership in MUN.

PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)

PT Potum Mundi Infranasantara was established in 2011 as the Company's subsidiary engaging in the sector of clean water supply and management. As of the end of 2020, the Company owned 99.99% shares of Potum.

In 2012, Potum acquired the shares of PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) and PT Dain Celicani Cemerlang (DCC), each amounting to 51%. Both companies have clean water management contracts in the Cikokol region, Tangerang, and in Medan, and are involved, both directly and indirectly in the concessions of water supply installation projects in these regions. In 2013, Potum acquired 65% shares of PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK), a company that holds the concession of clean water treatment and distribution

SCTK sendiri merupakan sebuah perusahaan pemegang konsesi pengolahan dan distribusi air bersih yang berfokus pada pelayanan bagi pelanggan industri di area Serang, Banten. Kemudian pada tahun 2018, PT Potum kembali melakukan akuisisi saham milik TBN, sehingga kini kepemilikan PT Potum di TBN menjadi 100% dan pada tahun 2019, PT Potum kembali melakukan akuisisi saham milik DCC sehingga kepemilikan di DCC menjadi 74,52%. Melalui PT Potum, Perusahaan turut ambil bagian dalam penyediaan air bersih yang penting untuk menangani krisis air bersih di Indonesia.

PT Portco Infranasantara (Portco)

Didirikan pada 8 Maret 2011, PT Portco Infranasantara didirikan oleh Perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan layanan manajemen pelabuhan. Seluruh aktivitas bisnis usaha dijalankan PT Portco dengan menerapkan prosedur Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS) dan *Business to Business* (B2B). PT Portco telah mendapatkan izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pada Oktober 2011 untuk mendukung PT Portco menjalankan usahanya dalam bentuk Keputusan Menteri yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan. Guna meningkatkan performa pelayanannya, PT Portco mengembangkan bisnisnya dengan menjadi pemegang saham PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) sebesar 39%. Hingga akhir tahun 2020, kepemilikan saham PT Portco oleh Perusahaan adalah sebesar 99,99%.

PT Energi Infranasantara (EI)

Perusahaan mendirikan PT Energi Infranasantara (EI) pada tahun 2012 sebagai entitas bisnis yang bergerak di bidang pengelolaan sektor energi terbarukan. Hingga akhir tahun 2020, kepemilikan saham Perusahaan di EI adalah sebesar 99,99%.

Di tahun 2013, EI mengakuisisi saham PT Inpol Meka Energi (IME), sebuah perusahaan pengembang pembangkit listrik tenaga air, sebesar 61,23%. Dengan akuisisi ini, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung secara otomatis dimiliki oleh EI. IME memiliki proyek konstruksi pembangunan PLTA 2x7,5 MW yang telah selesai pada tahun 2020 dan sudah mulai beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak 17 Desember 2020.

focusing on providing services to industrial customers in Serang region, Banten. Then in 2018, Potum acquired the remaining shares of TBN, making its ownership in TBN 100%, and in 2019, Potum also increased its ownership at DCC through share acquisition reaching 74.52% share ownership at DCC. Through Potum, the Company takes part in providing clean water which is essential to address the clean water crisis in Indonesia.

PT Portco Infranasantara (Portco)

Established on March 8, 2011, PT Portco Infranasantara aims to provide port management service. All business activities of Portco are carried out through the Public-Private Partnership (PPP) and Business-to-Business (B2B) schemes. To support its business, Portco had obtained the Port Corporation (BUP) business permit in October 2011 in the form of a ministerial decree issued by the Minister of Transportation. Portco also holds 39% shares of PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) in order to improve its service performance and develop its business. As of the end of 2020, the Company owned 99.99% shares of Portco.

PT Energi Infranasantara (EI)

The Company established PT Energi Infranasantara in 2012 as a business entity engaging in the renewable energy management sector. As of the end of 2020, the Company owned 99.99% shares of EI.

In 2013, EI acquired 56.23% shares of PT Inpol Meka Energi (IME), a hydropower development company. Through this acquisition, EI automatically owns the Lau Gunung Hydro Power Plant (PLTA). IME also has a 2x7.5 MW PLTA construction project which was completed in 2020 and has started operating (*Commercial Operating Date/COD*) since December 17, 2020.

El pada 16 Agustus 2018 melakukan akuisisi saham PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) sebesar 80%. RPSL merupakan sebuah perusahaan *Independent Power Producer* (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa (PLTBm) yang berlokasi di Siantan, Mempawah, Kalimantan Barat, dengan kapasitas 1x15 MW dan sudah beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak tanggal 23 April 2018. PLTBm ini menjadi pembangkit listrik bertenaga *bio massa* pertama di Kalimantan Barat. Seluruh akuisisi yang dilakukan Perusahaan melalui El menjadi salah satu bentuk strategi bisnis Perusahaan dalam mengembangkan portofolio di bidang Energi Bersih (*Green*) Baru dan Terbarukan (EBT).

ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG

SEKTOR PENGELOLAAN JALAN TOL

- **PT Bintaro Serpong Damai (BSD)**

PT Bintaro Serpong Damai (BSD) adalah perusahaan yang memegang konsesi jalan tol sepanjang 7,25 KM antara Serpong dan Pondok Aren di wilayah Tangerang Selatan. Saham BSD diakuisisi oleh Perusahaan melalui MUN dengan kepemilikan saham sebesar 88,93%. Mulai menjalankan operasionalnya sejak 2 Februari 1999, Jalan Tol Serpong-Pondok Aren menjadi jalur utama yang memiliki peran besar dalam membantu menekan waktu tempuh dan mengurangi kepadatan kendaraan secara efisien di wilayah Tangerang Selatan.

- **PT Makassar Metro Network (MMN)**

PT Makassar Metro Network (MMN) didirikan pada tahun 1998 dengan nama PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) dan merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan jalan tol yang berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020, PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) resmi berganti nama menjadi PT Makassar Metro Network (MMN) yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bosowa Marga Nusantara sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 2 tertanggal 2 November 2020 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta. Melalui MUN, kepemilikan saham MMN oleh Perusahaan sejak tahun 2006 hingga kini adalah sebesar 99,62%.

On August 16, 2018, El acquired 80% shares of PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL), an Independent Power Producer (IPP) for Biomass Power Plant (PLTBm) located in Siantan, Mempawah, West Kalimantan, with the capacity of 1x15 MW and has been operating (*Commercial Operating Date/COD*) since April 23, 2018. This PLTBm is the first bio-mass powered power plant in West Kalimantan. All acquisitions made by the Company through El are a form of the Company's business strategy in developing a portfolio in the field of Renewable Green Energy (EBT).

INDIRECT SUBSIDIARIES

TOLL ROAD MANAGEMENT SECTOR

- **PT Bintaro Serpong Damai (BSD)**

PT Bintaro Serpong Damai (BSD) is the holder of concession of 7.5 km toll road of Serpong-Pondok Aren in South Tangerang. The Company, through MUN, acquired 88.93%% shares of BSD. The Serpong-Pondok Aren Toll Road commenced its operations on February 2, 1999 and has become the main route with a key role in helping to reduce travel time and efficiently break down vehicle congestion in the South Tangerang area.

- **PT Makassar Metro Network (MMN)**

PT Makassar Metro Network (MMN) was established in 1998 in Makassar, South Sulawesi, under the name of PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) and engaged in the toll road management sector. In 2020, PT Bosowa Marga Nusantara officially changed its name to PT Makassar Metro Network as stipulated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT Bosowa Marga Nusantara in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2 dated November 2, 2020, drawn up before Karin Christiana Basoeki, S.H., Notary in Jakarta. Through MUN, the Company has owned 99.62%% shares of MMN since 2006.

MMN merupakan perusahaan pemegang konsesi jalan tol penghubung sepanjang 5,95 km antara Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan Jalan A.P. Pettarani (*flyover* Urip Sumoharjo) yang juga terhubung dengan Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). Kedua jalan tol ini menjadi jalur utama antar kota di wilayah tersebut.

Pembangunan tahap awal dilakukan pada akhir Jalan Tol Seksi II, tepatnya di persimpangan Jl. Urip Sumoharjo dengan melewati persimpangan Jl. Boulevard Panakkukang, Jl. Hertasning, kemudian berakhir di Persimpangan Jl. Sultan Alauddin. Lajur jalan tol memiliki jumlah 2 x 2 dengan lebar 3,50 meter dan mempunyai dua *on-off ramp*, yaitu di Boulevard dan Alauddin.

Pada tahun 2020, proyek pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani sepanjang 4,3 KM yang dilaksanakan MMN dan Pemerintah Daerah telah melalui tahapan Uji Laik Fungsi (ULF). Pembangunan jalan tol layang pertama di Makassar ini bertujuan untuk menekan kemacetan lalu lintas dan menunjang terwujudnya konektivitas secara lebih optimal di area Timur Indonesia yang berdampak pada tercapainya percepatan pada aspek pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

- **PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)**

PT Makassar Metro Network (MMN) dalam bisnisnya memiliki entitas anak, yakni PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) dengan kepemilikan saham MMN pada JTSE adalah sebesar 99,39%. JTSE memegang konsesi ruas Jalan Tol Seksi IV di Makassar dengan jalur sepanjang 11,57 kilometer. Ruas jalan tol milik JTSE terhubung dengan ruas jalan tol yang dioperasikan oleh MMN, mulai dari Jembatan Tallo sampai dengan Simpang Mandai Makassar dan menjadi jalur akses ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

SEKTOR PENYEDIAAN AIR BERSIH

- **PT Tirta Bangun Nusantara (TBN)**

PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) didirikan dari kerja sama antara Perusahaan dengan PT Enviro Nusantara pada bulan Juli 2012. PT Enviro Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa pengolahan air bersih dan air limbah di kawasan industri, kompleks perumahan, pelabuhan, fasilitas

MMN is the concession holder of 5.95 km toll road connecting the Soekarno-Hatta Port of Makassar with A.P. Pettarani Road (Urip Sumoharjo flyover), which is also connected with Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) or Section Four Toll Road. Both toll roads become the main route between cities in the region.

The initial construction was carried out at the end of Section II Toll Road, precisely at the junction of Jl. Urip Sumoharjo passing the intersection of Jl. Boulevard Panakkukang and Jl. Hertasning, and ends at Jl. Sultan Alauddin. The toll road has 2 x 2 lanes with a width of 3.50 meters, and has two on-off ramps located on Boulevard and Alauddin.

In 2020, the construction project of 3.4 km A.P. Pettarani Elevated Toll Road carried out by MMN and the Regional Government passed the Functional Feasibility Test stage. The construction of this first elevated toll road in Makassar aims to reduce traffic congestion and support the realization of more optimum connectivity in the eastern part of Indonesia, which has an impact on achieving the acceleration of economic growth in the community.

- **PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)**

In its business, MMN owns a subsidiary, namely PT Jalan Tol Seksi Empat, with share ownership of 99.39%. JTSE holds the concession of 11.57 km Section IV Toll Road in Makassar, which is connected with the toll road operated by MMN, starting from the Tallo Bridge to Simpang Mandai, Makassar, and provides access to the Sultan Hasanuddin International Airport of Makassar.

CLEAN WATER SUPPLY SECTOR

- **PT Tirta Bangun Nusantara (TBN)**

PT Tirta Bangun Nusantara was established in July 2012 as the result of cooperation between the Company and PT Enviro Nusantara, a company engaged in the field of clean water and waste water treatment service for industrial areas, residential complexes, port, oil and gas facilities, mining, and integrated commercial

minyak dan gas, pertambangan, dan kawasan komersial terpadu (*super-block*). Dengan lingkup usaha tersebut, TBN diharapkan dapat mendukung optimalisasi kinerja Perusahaan Air Minum Jaya (PAM Jaya) dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). PT Potum yang merupakan *sub-holding* sektor penyediaan air bersih sebelumnya hanya memiliki 51% saham TBN, kemudian pada tahun 2018 kepemilikan Potum pada TBN meningkat menjadi sebesar 100% atau keseluruhan saham TBN.

- **PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)**

PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) merupakan perusahaan pengelola air dengan sahamnya telah diakuisisi oleh Potum sebesar 51% pada bulan Oktober 2012 melalui penandatanganan *Share Subscription Agreement* yang telah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 11 April 2013. Kemudian, di tahun 2019, kepemilikan saham DCC oleh Potum telah ditingkatkan menjadi sebesar 74,52%.

DCC memiliki hak eksklusif untuk pengolahan air dengan cakupan hingga termasuk membangun, mengoperasikan, dan mengelola Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berada di Kawasan Industri Medan (KIM), Sumatera Utara, dengan berada di bawah pengawasan TBN. IPA memiliki sumber air baku yang berasal dari Sungai Deli, yang kemudian air bersihnya disalurkan IPA kepada 154 pabrik yang ada di Kawasan Industri Medan (KIM). Periode kontrak kerja sama adalah 20 tahun dan berada di bawah skema Bangun Guna Serah (BOT/*Build Operate and Transfer*).

- **PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)**

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) merupakan perusahaan yang berdiri pada 1997 dan telah diakuisisi oleh Perusahaan melalui Potum pada Desember 2013 dengan kepemilikan saham sebesar 65%. SCTK berfokus pada bidang pengolahan dan pendistribusian air bersih dengan lokasi operasi berada di Desa Cijeruk, Kabupaten Serang, Banten. SCTK saat ini melakukan pendistribusian air bersih kepada sekitar 171 pabrik yang ada di Kawasan Industri Modern Cikande, Pancatama *Industrial Estate* dan pabrik-pabrik di luar kawasan industri di wilayah Serang Timur.

estates (*super-block*)s. With this business scope, TBN is expected to be able to support the optimization of performance of Perusahaan Air Minum Jaya (PAM Jaya) and Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). As the *sub-holding company* in clean water supply sector, Potum initially held 51% shares of TBN. Then, in 2018, Potum was able to increase its share ownership at TBN to 100%.

- **PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)**

PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) is a water management company whose shares were acquired by Potum by 51% in October 2012 through the signing of the *Share Subscription Agreement*, which was approved by the Ministry of Law and Human Rights on April 11, 2013. In 2019, Potum's share ownership of DCC increased to 74.52%.

DCC has exclusive rights for water treatment, covering the scopes of building, operating, and managing a Water Treatment Plant located in the Medan Industrial Estate in North Sumatra, under the supervision of TBN. The source of raw water for this Water Treatment Plant comes from the Deli River. The clean water is distributed by the plant to 154 factories within the Medan Industrial Estate. The cooperation contract period is 20 years and is under the Build-Operate-Transfer (BOT) scheme.

- **PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)**

PT Sarana Catur Tirta Kelola was established in 1997 and acquired by the Company through Potum in December 2013 with 65% share ownership. SCTK focuses on the field of clean water treatment and distribution within the operational area of Cijeruk Village, Serang Regency, Banten. At present, SCTK distributes clean water to 171 factories within the Cikande Modern Industrial Estate, Pancatama Industrial Estate, and other factories outside the industrial estate in East Serang area.

Sungai Ciujung yang berada di Serang Timur menjadi sumber air *Water Treatment Plant* (WTP) SCKT. Dalam menjalankan usahanya, SCKT bekerja sama dengan PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang dalam bentuk konsesi penuh yang meliputi sistem penyediaan air minum hingga sambungan akhir ke pelanggan industri khusus di daerah pelayanan Serang Timur. Adanya dukungan dari Potum dan TBN diharapkan dapat menunjang pencapaian target oleh SCKT untuk meningkatkan kapasitas penyerapan hingga 375 liter/detik.

The source of water for SCKT's Water Treatment Plant is the Ciujung River which is located in East Serang. In conducting its business, SCKT cooperates with PDAM Tirta Albantani of Serang Regency in the form of full concession, which includes drinking water supply system and final distribution to specific industrial customers in East Serang service area. With the support of Potum and TBN, it is expected that SCKT can meet its target to increase water discharge to 375 liters/second.

SEKTOR ENERGI BARU TERBARUKAN

• PT Inpola Meka Energi (IME)

PT Inpola Meka Energi (IME) merupakan perusahaan *Independent Power Producer* (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung 2x7.5 MW yang berada di Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2013, Perusahaan mengakuisisi saham IME sebesar 55% melalui entitas anak Perusahaan, PT Energi Infranusantara (EI). Pada tahun 2019, kepemilikan saham di IME berubah menjadi 56,23% dan pada bulan Februari 2020, kepemilikan saham EI kembali meningkat menjadi 61,23% dengan mengakuisisi saham milik pemegang saham lainnya. Guna semakin meningkatkan performanya, IME memiliki ikatan kontrak dengan PT PLN (Persero) dalam usahanya menyediakan listrik bagi masyarakat di Sumatera Utara dengan memanfaatkan jaringan PLN.

• PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) merupakan perusahaan *Independent Power Producer* (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang berada di Siantan, Mempawah, Kalimantan Barat dengan kapasitas 15 MW. RPSL telah beroperasi sejak *Commercial Operating Date* (COD) pada tanggal 23 April 2018 dan menjadi pembangkit listrik bertenaga biomassa pertama di Kalimantan Barat. Pada 16 Agustus 2018, melalui entitas anak usaha, PT Energi Infranusantara (EI), Perusahaan melakukan pengakuisisi sebesar 80% saham milik RPSL.

RENEWABLE ENERGY SECTOR

• PT Inpola Meka Energi (IME)

PT Inpola Meka Energi is an Independent Power Producer (IPP) for the 2x7,5 MW Lau Gunung Hydro Power Plant (PLTA), which is located in Tanah Pinem, Dairi Regency, North Sumatra. In 2013, the Company acquired 55% shares of IME through its subsidiary, PT Energi Infranusantara (EI). In 2019, IME's share ownership changed to 56.23% and in February 2020, EI's share ownership increased to 61.23% by acquiring shares owned by other shareholders. To further elevate its performance, IME entered into a commitment with PT PLN (Persero) in order to provide electricity for the people of North Sumatra using the network of PLN.

• PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari is an Independent Power Producer (IPP) for the 1x15 MW Biomass Power Plant (PLTBm) located in Siantan, Mempawah, West Kalimantan. RPSL has been operating since April 23, 2018 (*Commercial Operating Date/COD*), and becomes the first biomass power plant in West Kalimantan. Through its subsidiary, EI, the Company was able to acquire 80% shares of RPSL on August 16, 2018.

ENTITAS ASOSIASI

ASSOCIATED ENTITIES

Entitas Anak <i>Associated Entity</i>	Tahun Penyertaan <i>Year of Investment</i>	Kepemilikan Saham <i>Share Ownership</i>	Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	Status Operasi <i>Operating Status</i>
Melalui PT Margautama Nusantara / Through PT Margautama Nusantara				
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	2010	35%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating
Melalui PT Portco Infranusantara / Through PT Portco Infranusantara				
PT Intisentosa Alam Bahtera	2012	39%	Pengusahaan Pelabuhan Port Management	Beroperasi Operating
Melalui PT Tirta Bangun Nusantara / Through PT Tirta Bangun Nusantara				
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM)	2012	28%	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Beroperasi Operating

ENTITAS ASOSIASI

SEKTOR PENGELOLAAN JALAN TOL

• PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) merupakan entitas asosiasi dari MUN yang menjalankan aktivitas usahanya melalui pengoperasian ruas jalan tol penghubung Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan Penjaringan (kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng) dengan jalur sepanjang 9,7 kilometer. Pada 29 Agustus 2018, melalui MUN, Perusahaan menambah kepemilikan saham JLB menjadi 35%. Karena posisinya yang terhubung langsung dengan 3 (tiga) jalan tol lain yaitu jalan tol Jakarta Tangerang dan jalan tol JORR W-2 Utara di daerah Kebon Jeruk dan dengan jalan tol Bandara Soekarno Hatta (Prof. Sedyatmo) di Penjaringan, jalan tol ini memiliki lokasi yang sangat strategis.

SEKTOR PELABUHAN

• PT Intisentosa Alambahtera (ISAB)

PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelabuhan, pergudangan, jasa bongkar muat, dan jasa penyewaan tangki penyimpanan yang berdiri pada tahun 1998 dan mulai beroperasi secara komersial pada November 2000 di Lampung. ISAB memiliki status sebagai entitas asosiasi Perusahaan melalui Portco dengan adanya kepemilikan saham sebesar 39%.

ISAB saat ini memiliki ikatan kontrak Perjanjian Kerja Sama Operasi dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) terkait pembangunan dan pengoperasian

ASSOCIATED ENTITIES

TOLL ROAD MANAGEMENT SECTOR

• PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

PT Jakarta Lingkar Baratsatu is an associate entity of MUN and operates the 9.7 km toll road connecting Kebon Jeruk, West Jakarta, with Penjaringan (Soekarno-Hatta International Airport in Cengkareng). On August 29, 2018, the Company, through MUN, increased its share ownership of JLB to 35%. This toll road has a strategic location as it is directly connected with 3 (three) other toll roads, namely the Jakarta-Tangerang Toll Road, the North JORR W-2 Toll Road in Kebon Jeruk, and the Soekarno-Hatta Airport (Prof. Sedyatmo) Toll Road in Penjaringan.

PORT SECTOR

• PT Intisentosa Alambahtera (ISAB)

PT Intisentosa Alambahtera is a company engaged in the field of port services, warehousing, stevedoring services, and storage tank rental services. It was established in 1998 and began commercially operating in November 2000 in Lampung. Through Portco, the Company owns 39% shares of ISAB, making it the Company's associate entity.

At present, ISAB is bound by an Operational Cooperation Agreement with PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Pelindo II) in relation to the construction and operation

terminal kargo kering dan cair di Pelabuhan Panjang, Lampung, berupa Bangun Guna Serah (BOT) dan hak menggunakan dan mengelola lahan tambahan untuk keperluan jasa tangki penyimpanannya.

Wilayah operasi ISAB adalah di area pelabuhan dengan luas 9,1 hektar dan memiliki spesifikasi area kedalaman/ *draft* 13.5 m (LWS), 7 *lines liquid bulk* dengan kapasitas 250 MT/jam/line, dan *size of vessel capacity* hingga 70 ribu DWT, serta gudang dengan luas mencapai 11.200 m² berkapasitas *mobile bagging system* 700 MT/hari, dengan kapasitas gudang mencapai 60 ribu MT untuk *dry bulk* dan 40 ribu MT untuk *bags*, kapasitas *stevedoring* (bongkar muat) mencapai 8.000 MT/hari untuk *dry* dan 5.000 MT/hari/line untuk *liquid*. Di samping itu, kapasitas *tank farm*/tangki yang dimiliki adalah 105 ribu MT dan kapasitas produksi *refinery plant* adalah 2.000 MT/hari.

of dry and liquid cargo terminals in Panjang Port of Lampung, in the form of Build-Operate-Transfer (BOT), and the right to use and manage additional land for storage tank services.

ISAB's operational area covers the 9.1 ha port area with draft area of 1.5 m (LWS), 7 lines of liquid bulk with a capacity of 250 MT/hour/line, and size of vessel capacity of up to 70 thousand DWT; as well as a warehouse with total area reaching 11,200 m² equipped with a mobile bagging system with a capacity of 700 MT/day. The warehouse capacity reaches 60 thousand MT for dry bulk and 40 thousand MT for bags, while stevedoring (loading and unloading) capacity reaches 8,000 MT/day for dry and 5,000 MT/day/line for liquid. In addition, the capacity of ISAB's tank farm reaches 105 thousand MT with the refinery plant's production capacity reaches 2,000 MT/day.

SEKTOR PENYEDIAAN AIR BERSIH

• PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM)

PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM) merupakan perusahaan dengan fokus usaha di bidang pembangunan dan pengoperasian instalasi pengolahan air bersih atau *Water Treatment Plant* (WTP) di wilayah Cikokol, Tangerang, Banten. Pada tahun 2012, TKCM menjadi entitas asosiasi Perusahaan melalui TBN dengan kepemilikan saham sebesar 28%. Melalui kerja sama dengan PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Tangerang, TKCM berperan dalam menyediakan 1.275 liter/detik air curah untuk kemudian oleh PDAM TKR didistribusikan kepada pelanggan rumah tangga, industri, dan komersial di wilayah Tangerang dan juga oleh PDAM TKR dialokasikan sebagian kapasitas aliran air dari TKCM ke wilayah Jakarta.

Hingga kini, jumlah pelanggan PDAM TKR adalah sebanyak 120.000 sambungan. Kontrak kerja sama antara TKCM dan PDAM TKR adalah dalam bentuk skema Bangun-Guna-Serah atau *Build-Operate-Transfer* (BOT). Masa kontrak TKCM telah diperpanjang menjadi selama 20 tahun (2017-2037) dengan adanya peningkatan pada kapasitas dari sebelumnya 300 liter/detik menjadi sebanyak 1.575 liter/detik yang saat ini masih berada dalam proses pembangunan.

CLEAN WATER SUPPLY SECTOR

• PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM)

PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri's business focuses on the construction and operation of Water Treatment Plant in Cikokol area in Tangerang, Banten. In 2012, TKCM became the Company's associate entity through TBN with 28% share ownership. Through the cooperation with PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Tangerang, TKCM provides 1,275 liters/second of bulk water to be distributed by PDAM TKR to domestic, industrial, and commercial customers in the Tangerang area. PDAM TKR also allocates a portion of water flow capacity from TKCM to the Jakarta area.

Up to present, the number of PDAM TKR customers has reached up to 120,000 connections. The cooperation contract between TKCM and PDAM TKR is in the form of a Build-Operate-Transfer (BOT) scheme. TKCM has extended its contract period to 20 years (2017-2037) with an increase in capacity from 300 liters/second to 1,575 liters/second, which is still under construction.

Alamat Entitas Anak, Anak Tidak Langsung, dan Asosiasi

Addresses of Subsidiaries, Indirect Subsidiaries, and Associate Entities

ENTITAS ANAK LANGSUNG

DIRECT SUBSIDIARIES

Perusahaan / Company	Sektor / Sector	Alamat dan Kontak / Address and Contact
PT Margautama Nusantara	Pengelola Jalan Tol Toll Road Management	Equity Tower 38th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100
PT Potum Mundi Infranasantara	Pengelola Air Bersih Clean Water Management	Equity Tower 38th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100
PT Portco Infranasantara	Pelabuhan Port	Equity Tower 38th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100
PT Energi Infranasantara	Energi Terbarukan Renewable Energy	Equity Tower 38th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100
PT Telekom Infranasantara	Menara Telekomunikasi Telecommunication Tower	Equity Tower 38th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100

ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG

INDIRECT SUBSIDIARIES

Perusahaan / Company	Sektor / Sector	Alamat dan Kontak / Address and Contact
PT Bintaro Serpong Damai	Pengelola Jalan Tol Toll Road Management	Intermark Associate Tower Lantai 16 Jl. Lingkar Timur, BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten +62 21 537 3015
PT Makassar Metro Network	Pengelola Jalan Tol Toll Road Management	Gedung Menara Bosowa Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman No. 5 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia +62 411 368 1035
PT Jalan Tol Seksi Empat	Pengelola Jalan Tol Toll Road Management	Gedung Menara Bosowa Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman No. 5 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia +62 411 368 1035

Alamat Entitas Anak, Anak Tidak Langsung, dan Asosiasi

Addresses of Subsidiaries, Indirect Subsidiaries, and Associate Entities

Perusahaan / Company	Sektor / Sector	Alamat dan Kontak / Address and Contact
PT Tirta Bangun Nusantara	Pengelolaan Air Bersih Clean Water Management	Menara Global Lantai 23 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12950, Indonesia +62 21 5292 2648
PT Dain Celicani Cemerlang	Pengelolaan Air Bersih Clean Water Management	Komplek Perkantoran Permata Kebayoran Plaza Jl. Raya Kebayoran Lama, No. 225 Blok B10, Jakarta 12220, Indonesia +62 21 722 9045-46
PT Sarana Catur Tirta Kelola	Pengelolaan Air Bersih Clean Water Management	Jl. Yusuf Martadilaga No. 25 Serang, Banten, Indonesia +62 254 206813
PT Inpolo Meka Energi	Energi Terbarukan Renewable Energy	Plaza PP Lantai 4 Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, Indonesia +62 21 8778 4135
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari	Energi Terbarukan Renewable Energy	Jl. Raya Wajok Hulu Km 7,5 RT 008/ RW 001, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat +62 561 882013

ENTITAS ASOSIASI

ASSOCIATE ENTITIES

Perusahaan / Company	Sektor / Sector	Alamat dan Kontak / Address and Contact
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Pengelola Jalan Tol Toll Road Management	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 54, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260, Indonesia +62 21 570 9091,
PT Intisentosa Alambahtera	Pelabuhan Port	Pelabuhan Panjang Jl. Yos Sudarso Km. 7 Panjang, Bandar Lampung 35241, Indonesia +62 721 311 04, +62 721 341 262
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Pengelolaan Air Bersih Clean Water Management	Instalasi Pengolahan Air Cikokol Jl. Perintis Kemerdekaan III, Cikokol, Tangerang 15118, Indonesia +62 21 553 1891

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

12 FEBRUARI 2020
FEBRUARY 12, 2020



PENGHARGAAN DI TAHUN 2020

2020 AWARDS

Tanggal Date	Nama Penghargaan Award Title	Diberikan Oleh Awarded By
12 Februari 2020 February 12, 2020	1. Zero Accident. Penghargaan diperoleh melalui entitas anak PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). Zero Accident Award, received through PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), the Company's subsidiary.	Gubernur Sulawesi Selatan Governor of South Sulawesi
	2. Kinerja Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Penghargaan diperoleh melalui entitas anak PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). Occupational Health and Safety Advisory Committee (P2K3) Performance Award, received through PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), the Company's subsidiary.	
	3. Pencapaian Kepatuhan Pelaksanaan Perundang-undangan Ketenagakerjaan di Atas 80%. Penghargaan diperoleh melalui entitas anak PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). Achievement of Implementation and Compliance with Manpower Law and Regulation reaching above 80%, received through PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), the Company's subsidiary.	
	4. Kinerja Terbaik Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penghargaan diperoleh melalui entitas anak PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). Best Performance in the Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Systems, received through PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), the Company's subsidiary.	

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

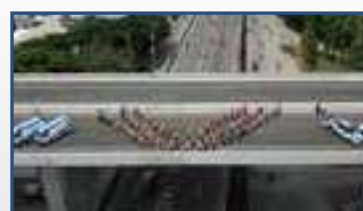
29 JULI 2020
JULY 29, 2020



25 NOVEMBER 2020
NOVEMBER 25, 2020



3 DESEMBER 2020
DECEMBER 3, 2020



Tanggal Date	Nama Penghargaan Award Title	Diberikan Oleh Awarded By
29 Juli 2020 July 29, 2020	TOP CSR 2020 kategori #Star3 TOP CSR 2020 Award in the #Star3 Category	Majalah TOP Business TOP Business Magazine
25 November 2020 November 25, 2020	<i>Silver Achievement</i>, kategori Services dalam ajang <i>The 9th Indonesia Operational Excellence Conference Award 2020</i>. Penghargaan diperoleh melalui entitas anak PT Bintaro Serpong Damai (BSD). Silver Achievement in the Services Category at the 9th Indonesia Operational Excellence Conference Award 2020, received through PT Bintaro Serpong Damai (BSD), the Company's subsidiary. <i>Silver Achievement</i>, kategori Services dalam ajang <i>The 9th Indonesia Operational Excellence Conference Award 2020</i>. Penghargaan diperoleh melalui entitas anak PT Makassar Metro Network (MMN). Silver Achievement in the Services Category at the 9th Indonesia Operational Excellence Conference Award 2020, received through PT Makassar Metro Network (MMN), the Company's subsidiary.	SHIFT Indonesia
3 Desember 2020 December 3, 2020	Jalan Tol Berkelanjutan Terbaik ke-3 dari Seluruh Tol di Indonesia. Penghargaan diperoleh melalui entitas anak PT Makassar Metro Network (MMN) dan PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). The 3rd Best Sustainable Toll Road of All Toll Roads in Indonesia, received through PT Makassar Metro Network (MMN) and PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), the Company's subsidiaries.	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Toll Road Regulatory Agency (BPJT)

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications



SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU PADA TAHUN 2020

CERTIFICATES VALID IN 2020

No.	Jenis Sertifikat <i>Type of Certificate</i>	Lembaga yang Memberikan <i>Certified By</i>	Masa Berlaku Hingga <i>End of Validity</i>
1.	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality Management System	UKAS Management System	30 Maret 2021 March 30, 2021
2.	ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	UKAS Management System	1 April 2021 April 1, 2020
3.	OHSAS 18001:2007 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety Management System	Swiss Accreditation	24 Februari 2021 February 24, 2021

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions and Professions

Jenis Lembaga <i>Type of Institution</i>	Nama <i>Name</i>	Alamat <i>Address</i>
Informasi Perdagangan dan Pencatatan Saham Share Trading and Listing	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Gedung Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Lantai 4 Tower 1 Floor 4
Biro Administrasi Efek Share Registrar	PT Adimitra Jasa Korpora	Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 13250, Indonesia
Akuntan Publik Public Accountant	Agung Purwanto Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta 12190 Indonesia
Informasi Investor Investor Information	Investor Relationship	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9 Jakarta 12190, Indonesia





Tinjauan Unit Pendukung Bisnis

Overview on Business Supports



Bagi Perusahaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI) berperan besar dalam mendukung kinerja Perusahaan. Keberadaan SDM berdampak besar pada keberlanjutan kinerja Perusahaan, dan Perusahaan melakukan implementasi TI ke seluruh lini secara masif untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja kondusif dan terintegrasi yang efisien, akuntabel, transparan, dan dapat diandalkan oleh seluruh karyawan.

For the Company, Human Resources (HR) and Information Technology (IT) play a major role in supporting the Company's performance. The existence of HR has a major impact on the sustainability of the Company's performance. The Company massively implements IT in all lines to support the creation of a conducive and integrated work environment that is efficient, accountable, transparent, and can be relied upon by all employees.



Sumber Daya Manusia

Human Resources

Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Perusahaan memiliki peran penting sebagai penggerak roda bisnis usaha yang dijalankan Perusahaan. SDM menjadi salah satu aset penting yang keberadaannya berdampak besar pada keberlanjutan kinerja Perusahaan di masa kini dan masa mendatang sehingga Perusahaan menaruh perhatian penting pada aspek ini agar pengelolaannya dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat tidak hanya bagi Perusahaan sendiri, namun juga bagi para karyawan sebagai SDM Perusahaan.

Untuk menjalankan pengelolaan dan pengurusan SDM secara komprehensif, Perusahaan memiliki divisi SDM sebagai pihak yang bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan SDM Perusahaan secara keseluruhan.

KOMPOSISI KARYAWAN

Hingga akhir tahun 2020, karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan mencapai sejumlah 313 orang. Dibandingkan jumlah yang ada di tahun 2019 sebanyak 309 karyawan, jumlah di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,29%.

Human Resources (HR) within the Company has an important role as a driving force for the business business run by the Company. HR is one of the important assets whose existence has a major impact on the sustainability of the Company's performance in the present and in the future. As such, the Company pays important attention to this aspect for a better management that can bring benefits not only to the Company itself, but also to the employees as the Company's HR.

To carry out its HR management and arrangement comprehensively, the Company has an HR division as the party in charge and responsible for the management of the Company's HR as a whole.

EMPLOYEE COMPOSITION

As of the end of 2020, total employees of the Company reached 313 employees, an increase of 1.29% compared to the total employees of the previous year recorded at 309 employees.



Sumber Daya Manusia

Human Resources

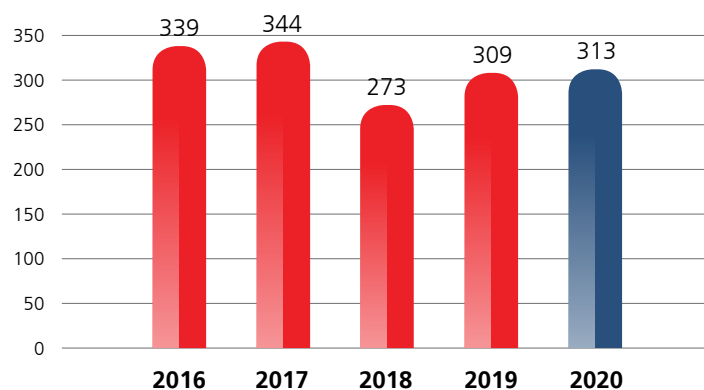
Jumlah Karyawan Perusahaan dan Entitas Anak

Total Employees of the Company and Subsidiaries

Nama Perusahaan / Name of Company	2020	2019	2018
PT Nusantara Infrastructure Tbk	48	43	43
Entitas Anak Perusahaan Langsung / Direct Subsidiaries			
PT Margautama Nusantara	10	11	14
PT Potum Mundi Infranasantara	6	6	4
PT Portco Infranasantara	1	2	2
PT Energi Infranasantara	8	5	3
PT Telekom Infranasantara	1	1	1
Entitas Anak Perusahaan Tidak Langsung / Indirect Subsidiaries			
PT Bintaro Serpong Damai	37	32	31
PT Makassar Metro Network	52	56	57
PT Jalan Tol Seksi Empat	22	20	19
PT Tirta Bangun Nusantara	10	8	8
PT Dain Celicani Cemerlang	22	17	16
PT Sarana Catur Tirta Kelola	48	46	36
PT Inpolo Meka Energi	7	21	9
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari	41	41	29
Jumlah / Total	313	309	273

Pergerakan Jumlah Karyawan dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Movement of the Number of Employees in the Last 5 (Five) Years



Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition Based on Gender

Jenis Kelamin / Gender	Tahun / Year	
	2020	2019
Laki-Laki / Male	256	256
Perempuan / Female	57	53
Jumlah / Total	313	309

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Employee Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian / <i>Employment Status</i>	Tahun / <i>Year</i>	
	2020	2019
Karyawan Tetap / Permanent Employee	269	244
Karyawan Kontrak / Contract Employee	44	65
Jumlah / Total	313	309

Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Jabatan

Employee Composition Based on Position Group

Kelompok Jabatan / <i>Position Group</i>	Tahun / <i>Year</i>	
	2020	2019
Executive Vice President	6	0
General Manager	20	23
Senior Manager	10	8
Manager	26	23
Assistant Manager	66	63
Staff	146	139
Non-Staff	39	53
Jumlah / Total	313	309

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition Based on Education Level

Tingkat Pendidikan / <i>Education Level</i>	Tahun / <i>Year</i>	
	2020	2019
S3 / Doctorate Degree	3	4
S2 / Master's Degree	29	26
S1 / Bachelor's Degree	141	135
D3 / Diploma III Degree	37	32
SMA atau setingkat/Senior / Senior High School or equivalents	92	100
SMP atau setingkat/Junior / Junior High School or equivalents	5	6
SD / Elementary School	6	6
Jumlah / Total	313	309

Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia

Employee Composition Based on Age Group

Kelompok Usia / <i>Age Group</i>	Tahun / <i>Year</i>	
	2020	2019
> 60 tahun / > 60 years old	11	10
51-60 tahun / 51-60 years old	37	33
41-50 tahun / 41-50 years old	86	85
31-40 tahun / 31-40 years old	98	93
21-30 tahun / 21-30 years old	81	85
< 21 tahun / < 21 years old	0	3
Jumlah / Total	313	309

REKRUTMEN DAN TINGKAT PERPUTARAN KARYAWAN

Rekrutmen

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan akan terpenuhinya jumlah SDM untuk menunjang aktivitas operasional, Perusahaan menjalankan proses rekrutmen untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Proses rekrutmen yang dilakukan Perusahaan senantiasa berlandaskan pada asas keadilan dan terbuka bagi seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi. Perusahaan memastikan tidak adanya praktik diskriminasi yang merugikan dan menekankan dalam prosesnya untuk mengacu pada keahlian dan kemampuan calon karyawan dibandingkan latar belakang yang dimiliki calon karyawan tersebut.

Pada tahun 2020, Perusahaan beserta Entitas Anak Langsung dan Tidak Langsung merekrut karyawan baru dengan total sebanyak 20 orang. Jumlah ini lebih rendah 14 orang dibandingkan jumlah yang direkrut di tahun 2019 sebanyak 34 orang. Rincian terkait penambahan karyawan yang dilakukan Perusahaan serta Entitas Anak Langsung dan Tidak Langsung dalam 3 (tiga) tahun terakhir terangkum dalam tabel berikut:

RECRUITMENT AND EMPLOYEE TURNOVER RATE

Recruitment

In order to meet the Company's needs of the number of human resources to support operational activities, the Company carries out a recruitment process to obtain qualified human resources according to the required competencies.

The recruitment process carried out by the Company is based on the principle of fairness and is open to all qualified people. The Company ensures that there are no harmful discriminatory practices and emphasizes in the process to refer to the skills and abilities of the prospective employee against the background of the candidate employee.

In 2020, the Company and its Direct and Indirect Subsidiaries recruited a total of 20 new employees, 14 people less than the 34 recruited in 2019. Details of new employees recruited by the Company and its Direct and Indirect Subsidiaries in the last 3 (three) years are summarized in the following table:

Nama Perusahaan / Company Name	2020	2019	2018
PT Nusantara Infrastructure Tbk	4	2	6
Entitas Anak Perusahaan Langsung / Direct Subsidiaries			
PT Margautama Nusantara	0	2	1
PT Potum Mundi Infranasantara	0	1	2
PT Portco Infranasantara	0	0	2
PT Energi Infranasantara	4	0	1
PT Telekom Infranasantara	0	0	0
Entitas Anak Perusahaan Tidak Langsung / Indirect Subsidiaries			
PT Bintaro Serpong Damai	2	5	0
PT Makassar Metro Network	0	0	3
PT Jalan Tol Seksi Empat	0	0	3
PT Tirta Bangun Nusantara	2	0	0
PT Dain Celicani Cemerlang	4	1	0
PT Sarana Catur Tirta Kelola	1	0	0
PT Inpolo Meka Energi	0	4	1
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari	3	19	5
Jumlah / Total	20	34	24

Tingkat Turnover Karyawan

Sebagai sebuah badan usaha, di dalam proses bisnis yang dijalankan terdapat adanya perputaran karyawan (*turnover*) di lingkungan Perusahaan yang terjadi karena berbagai faktor, seperti pengunduran diri, berakhirnya masa kontrak, mutasi antar karyawan, maupun pensiun atau meninggal dunia. Meski keadaan di tahun 2020 dipenuhi tantangan yang menekan bisnis usaha Perusahaan, di tahun 2020 Perusahaan berhasil menjaga stabilitas kinerjanya dengan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang tahun 2020. Rincian terkait data dan tingkat perputaran karyawan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian / Description	2020	2019	2018
Pegawai Baru / New Employee	20	34	24
Mengundurkan Diri / Resignation	8	19	7
Pensiun/Meninggal Dunia / Retired/Pass Away	6	6	4
Habis Kontrak / Contract Ended	15	2	1
PHK / Layoff	0	0	0
Mutasi Antar Perusahaan / Transfer between Companies	2	9	6
Jumlah Pegawai pada Akhir Tahun Employees By the End of the Year	313	309	273

Tingkat *turnover* karyawan selama 3 (tiga) tahun terakhir dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tahun / Year	Persentase Turnover Karyawan / Employee Turnover Percentage
2020	10,00%
2019	6,00%
2018	5,31%

Employee Turnover Rate

Employee turnover occurs due to various factors, such as resignation, expiration of the contract period, transfer between employees, retirement or death. Even though the situation in 2020 was filled with challenges that put pressure on the Company's business, the Company did not laying-off (PHK) any staff during the year. The staff turnover rate at under 10% for 2020 is low by world standards. Details of employee turnover rates for the last 3 (three) years are as follows:

The in percentage terms, the Company's turnover rate in the last 3 (three) years are as follows:

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM TAHUN 2020

Selain pada pengelolaan SDM secara keseluruhan, Perusahaan juga berfokus pada peningkatan kualitas kompetensi SDM untuk menunjang tercapainya pertumbuhan bisnis yang signifikan, menjaga kestabilan performa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta meningkatkan kualitas dari kinerja yang dihasilkan. Langkah pengembangan kompetensi SDM ini menjadi bagian dari strategi yang dicanangkan dan dijalankan Perusahaan untuk memastikan bahwa Perusahaan didukung dan ditunjang oleh SDM yang profesional, ahli di bidangnya, memiliki kompetensi dan integritas tinggi, serta visi yang dipegangnya telah selaras dengan visi yang menjadi acuan Perusahaan.

HR COMPETENCY DEVELOPMENT IN 2020

Aside from focusing on the overall HR management, the Company addresses the improvement of quality of HR competencies in order to support significant business growth, maintain stable performance in conducting duties and responsibilities, and enhance the quality of the resulting performance. This HR competency development step is part of the strategy launched and implemented by the Company to ensure that the Company is supported by professional human resources with expertise in their respective fields, possessing high competence and integrity with vision that is in line with that of the Company.

Upaya dan komitmen Perusahaan untuk meningkatkan kualitas kompetensi SDM diwujudkan melalui keikutsertaan karyawan maupun manajemen pada berbagai program pelatihan, yang di antaranya mencakup pelatihan kompetensi teknis, pelaksanaan operasional, pengembangan kemampuan kepemimpinan, hingga peningkatan intelegensi individu yang seluruhnya dapat diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal secara berkala.

The Company's efforts and commitment to improve the quality of HR competencies are manifested through the participation of employees and management in various training programs, which include technical competency training, operational implementation, leadership skill development, and individual intelligence enhancement which can all be carried out by internal and external parties on a regular basis.

Sepanjang tahun 2020, SDM Perusahaan telah mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan yang dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni pelatihan *hard skill* dan pelatihan *soft skill*. Informasi terkait hal tersebut dijabarkan dalam tabel berikut:

Throughout 2020, the Company's HR has participated in various training and development activities which are grouped into two types, namely hard skill training and soft skill training. Information related to this is described in the following table:

Program Pelatihan Training Program	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Hari Total Training Day	Jumlah Peserta Total Participants	Jumlah Jam Total Training Hour
Pelatihan Hard Skill Hard Skill Training	Pelatihan aplikasi pelaporan Limbah Training on Waste Reporting Application	1	2	16
	Simulasi <i>Fire Fighters</i> Fire Fighters Simulation	1	18	144
	Sosialisasi Aplikasi Remote LTCX Dissemination of Remote LTCX Application	1	14	112
	Festronik	1	2	16
	Bedah habis Kluster Ketenagakerjaan Thorough Discussion on Employment Cluster	1	2	16
	ISO 39001 <i>Road Traffic Safety Management</i> (RTS)	3	12	288
	ISO 39001 <i>Road Traffic Safety Management</i> (RTS)	3	11	264
	ISO 39001 <i>Road Traffic Safety Management</i> (RTS)	3	2	48
	Pembayaran Sisa (<i>Workshop</i> Evaluasi 2018 dan Perencanaan 2019) Remaining Payment (<i>Workshop</i> on 2018 Evaluation and 2019 Planning)	2	47	752
	Rapat Kerja Tahun 2020 Rapat Kerja Tahun 2020 / 2020 Work Meeting	2	15	240
	<i>Coaching Skill Development online program</i>	1	21	168
Pelatihan Soft Skill Soft Skill Training	PDCA Methodology For Problem Solving	1	7	56
	<i>Leadership Academy Program</i> (MUN)	19	3	456
	<i>Leadership Academy Program</i> (BSD)	19	9	1368
	<i>Leadership Academy Program</i> (MMN)	19	3	456
	<i>Leadership Academy Program</i> (JTSE)	19	4	608
	<i>Training for Coach</i>	1	7	56
	<i>Training for Coach</i>	1	3	24
	<i>Training for Coach</i>	1	4	32
	<i>Training for Coach</i>	1	7	56
Total		100	193	5.176

Realisasi biaya pengembangan kompetensi SDM selama tahun 2020 adalah sebesar Rp538,62 juta, turun 14,46% dari realisasi biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan kompetensi SDM di tahun 2019 sebesar Rp629,67 juta. Jumlah waktu/jam yang terealisasi dari seluruh pelatihan yang dilakukan di tahun 2020 juga menurun menjadi 5.176 jam dari tahun sebelumnya yakni 8.752 jam dengan jumlah peserta di tahun 2020 mencapai 193 orang.

PENGEMBANGAN KARIER KARYAWAN

Perusahaan senantiasa memberi dukungan penuh pada pengembangan karier karyawan ke jenjang yang lebih tinggi agar motivasi karyawan dalam bekerja dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Pengembangan karier tersebut dilaksanakan melalui mekanisme promosi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi operasional dan keuangan Perusahaan.

Mekanisme promosi dilakukan dengan seleksi karyawan berdasarkan rekomendasi yang diperoleh tim khusus di tingkat manajemen bentukan Perusahaan dari koordinasi langsung yang dilakukan dengan pimpinan divisi atau departemen.

The realization of HR competency development costs during 2020 amounted to Rp538.62 million, a decrease of 14.46% from the realization of costs incurred for HR competency development in 2019 amounted to Rp629.67 million. The number of time/hours realized from all training carried out in 2020 also decreased to 5,176 hours from the previous year, namely 8,752 hours, with the number of participants in 2020 reaching 193 people.

EMPLOYEE CAREER DEVELOPMENT

The Company fully supports the development of employees' career to a higher level so that employee's motivation to work can be maintained and improved. Career development is carried out through promotion mechanisms tailored to the needs as well as operational and financial conditions of the Company.

The promotion mechanism is carried out by selecting employees based on recommendations obtained by a special team at the management level formed by the Company through direct coordination with division or department leaders.



Terdapat syarat yang harus dipenuhi bagi karyawan untuk mendapatkan promosi. Setelah Divisi SDM menilai bahwa karyawan tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan dianggap pantas memperoleh promosi, karyawan tersebut diwajibkan melewati masa percobaan selama enam bulan di posisi barunya untuk dievaluasi kinerjanya. Jika terdapat adanya karyawan yang dipandang telah sangat mampu dan telah memenuhi kriteria, baik teknis maupun non-teknis untuk jabatan tujuan, dan sehubungan dengan program retensi bagi SDM, Perusahaan melalui Divisi SDM dapat melakukan promosi tanpa mengikuti prosedur dengan catatan bahwa karyawan tersebut mampu memperlihatkan kinerja yang optimal dengan tingkat di atas rata-rata dan dinilai telah mencukupi secara keseluruhan oleh pimpinan atau Divisi SDM.

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

Perusahaan melalui divisi SDM dan seluruh pimpinan divisi berkolaborasi dan bersinergi untuk melakukan penilaian terhadap kinerja para karyawan Perusahaan. Pengawasan dan penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan, yakni *Key Performance Indikator* (KPI). Adanya indikator tersebut serta kerja sama yang dilakukan dengan seluruh pihak terkait mendukung divisi SDM untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dari kinerja karyawan dan menilai efektivitas dari sistem manajemen SDM di Perusahaan. Dari hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan, Perusahaan dapat menentukan beberapa aspek yang berkaitan dengan karyawan, mulai dari penetapan besaran remunerasi, pemberian fasilitas, bentuk penghargaan, hingga realisasi kenaikan jabatan.

REMUNERASI DAN REWARD

Perhatian Perusahaan pada hak karyawan diwujudkan salah satunya melalui komitmen Perusahaan untuk memberikan remunerasi yang tepat, sesuai, dan menunjang karyawan memperoleh kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang memadai. Pemberian remunerasi dilakukan dengan memperhatikan dan menyesuaikan standar pemberian remunerasi yang ada di perusahaan-perusahaan lain di industri yang sama dan memiliki bidang usaha sejenis. Dengan adanya remunerasi yang tepat, sesuai, dan memadai tersebut, Perusahaan berupaya untuk mendukung karyawan mengembangkan produktivitas dengan lebih baik dan menaikkan tingkat kedisiplinan dari para karyawan di wilayah kerja Perusahaan. Remunerasi diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, serta fasilitas yang disesuaikan dengan tingkat jabatan dan performa kinerja dari karyawan tersebut.

There are conditions that must be met for employees to earn a promotion. After the HR Division assesses that the employee has met the established criteria and is deemed suitable for promotion, the employee is required to go through a six-month probation period in their new position to be evaluated on their performance. If there are employees deemed highly capable and have met the criteria, both technical and non-technical, for the intended position, and in connection with the HR retention program, the Company through the HR Division can conduct promotions regardless of the procedures, provided that the employee is able to demonstrate optimum performance above average and is considered to be sufficient as a whole by the Company's lead management or the HR Division.

EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION

The Company through the HR division and all division heads collaborate and work together in assessing the performance of the Company's employees. Supervision and assessment are carried out using predetermined indicators, namely Key Performance Indicators (KPI). The existence of these indicators, along with the cooperation from all related parties, helps the HR division conduct a comprehensive evaluation of employee performance and assess the effectiveness of the HR management system. From the results of evaluations and assessments carried out, the Company can determine several aspects related to employees, including the determination of remuneration amount, provision of facilities, forms of appreciation, and realization of promotion.

REMUNERATION AND REWARD

The Company's attention to employee rights is manifested through, among others, its commitment to providing appropriate remuneration and supporting the quality of employees' life and welfare. Remuneration is provided by taking into account and by adjusting with the remuneration standards of other companies in the same industry.. Due to appropriate and adequate remuneration, the Company strives to support its employees to develop better productivity and increase their level of discipline in the Company's work areas. Remuneration is given in the form of salary, allowances, and facilities, tailored to the level of the employee's position and performance.

Selain remunerasi, Perusahaan juga memiliki program penghargaan karyawan (*employee reward program*) sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan karyawan hingga prestasi yang telah dicapai karyawan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Program penghargaan karyawan tersebut diberikan dalam rupa fasilitas dan uang tunai yang diberikan bersamaan dengan pendapatan bulanan atau bonus tahunan dengan mengacu pada pertimbangan atas kontribusi langsung karyawan tersebut secara keseluruhan kepada Perusahaan.

PENERAPAN SISTEM KERJA *NEW NORMAL*

Di tahun 2020, sistem kerja baru "*New Normal*" mulai diterapkan oleh Nusantara Grup sejak 15 Juni 2020. Penerapan sistem kerja ini dilakukan dengan mulai membuka kembali berbagai kantor baik di *holding* maupun unit bisnis Perusahaan dengan tetap mengacu pada standar prosedur Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yakni karyawan yang ada di kantor tidak melebihi dari 50% total karyawan keseluruhan. Untuk memastikan penerapan berjalan dengan tepat dan aman, pihak Manajemen Perusahaan melakukan prosedur dan kegiatan, antara lain:

Pembentukan Tim Satgas Covid-19

Guna memastikan penerapan *New Normal* dapat berjalan sesuai dengan rencana, Perusahaan membentuk Tim Satgas Covid-19 yang dipimpin oleh Ibu Helda Manuhutu, *Human Resource/General Affairs General Manager* Perusahaan. Tim Satgas ini bertanggung jawab dalam membantu pihak Manajemen Perusahaan untuk menyampaikan informasi terkini terkait dengan perkembangan pandemi Covid-19, baik dari lapangan maupun dari media massa. Selain itu, keberadaan Tim Satgas juga diharapkan dapat mendukung seluruh individu Perusahaan untuk memperoleh informasi yang akurat dan kredibel terkait Covid-19 dan menjadi pihak yang dapat menunjang sosialisasi berbagai informasi yang ingin disampaikan oleh pihak Manajemen kepada seluruh individu Perusahaan.

In addition to remuneration, the Company has established an employee reward program as a token of appreciation for the dedication and contributions of its employees as well as for their achievements in carrying out duties and responsibilities. The employee reward program is provided in the form of facilities and cash given together with monthly income or annual bonus, by considering the employees' overall direct contribution to the Company.

IMPLEMENTATION OF NEW NORMAL WORK SYSTEM

The "*New Normal*" work system has been implemented by Nusantara Group since June 15, 2020. The work system was implemented by starting to reopen various offices, both at the head office and business units of the Company, by always observing the standard Covid-19 procedures determined by the Government, i.e. the number of employees working from the office does not exceed 50% of the total employees. To ensure that the implementation runs properly and safely, the Company's management carries out various procedures and activities, including:

Formation of Covid-19 Task Force Team

In order to ensure that the *New Normal* implementation is according to the plan, the Company established a Covid-19 Task Force Team led by Ms. Helda Manuhutu, the Company's Human Resource/General Affairs General Manager. This Task Force Team is responsible for assisting the Company's Management in providing the latest information related to the development of the Covid-19 pandemic, both from the field, the government and from the mass media. The Task Force Team is also expected to be able to support all personnel of the Company in obtaining accurate and credible information related to Covid-19, and to become a party that can support the dissemination of various information that the Management wishes to convey to all personnel.

Penyelenggaraan *Rapid Test* dan Pemberian Vaksin Flu

Perusahaan menyelenggarakan aktivitas *rapid test* pada 12-13 Juni 2020 untuk membantu meninjau penyebaran virus sehingga dapat mencegah virus Covid-19 tersebar lebih luas di lingkungan kerja Perusahaan. Dalam kesempatan yang sama, Perusahaan juga memberikan vaksin flu kepada seluruh karyawan untuk membantu peningkatan imunitas dan daya tahan tubuh. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya preventif Manajemen agar para karyawan tetap dalam keadaan prima saat beraktivitas di kantor dalam era *new normal*.

Sosialisasi *New Normal*

Untuk mempersiapkan sistem kerja *new normal* di lingkungan kerja, Perusahaan mengadakan acara sosialisasi terkait *new normal* secara virtual pada 13 Juni 2020. Dalam sosialisasi tersebut, Manajemen menjelaskan beberapa hal seperti penerapan protokol dan berbagai aturan yang perlu dipatuhi oleh setiap karyawan ketika datang ke kantor di masa *new normal*, termasuk di dalamnya pembagian jadwal masuk yang telah dibagi oleh Perusahaan menjadi 2 (dua) tim berbeda. Sistem kerja yang diterapkan pun menjadi lebih fleksibel dengan tidak mengacu pada ketentuan jam kerja, yakni delapan jam seperti sebelumnya. Karyawan dapat memilih waktu untuk datang dan pulang sesuai dengan kebutuhan dengan tetap mengutamakan optimalisasi kinerja.

Selain melalui sosialisasi, seluruh informasi terkait sistem kerja *new normal* ini juga disampaikan melalui penyebaran *flyer "starter pack"* yang dibagikan kepada setiap karyawan sebagai pedoman serta menempatkan *banner* sosialisasi di pintu masuk kantor yang dapat dilihat oleh seluruh karyawan.

Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan Kebersihan di Lingkungan Perusahaan

Perusahaan memastikan upaya pencegahan penyebaran virus terus dilakukan melalui pelaksanaan sistem kerja *new normal*, di antaranya melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan kebersihan di seluruh lingkungan Perusahaan, seperti menyediakan *hand sanitizer* bagi seluruh karyawan, memberikan masker kain, menyediakan vitamin, serta menyediakan makan siang untuk meminimalisir mobilitas karyawan. Adanya fasilitas tersebut menjadi langkah proteksi dini Perusahaan untuk menjaga lingkungan kerja Perusahaan tetap bersih, sehat, dan memutus rantai penularan Virus Covid-19.

Implementation of *Rapid Test* and Administration of Flu Vaccines

The Company held a rapid test activity on 12-13 June 2020 to review the spread of the Covid-19 virus and prevent the virus from spreading in the Company's work environment. On the same occasion, the Company also provided normal flu vaccines to all employees to help increase their immunity. This activity is one of the management's preventive efforts to ensure that employees remained in prime condition while conducting their duties at the office in the new normal era.

New Normal Socialization

To prepare for the new normal work system in the work environment, the Company held a virtual socialization event related to the new normal concept on June 13, 2020. In this socialization, the Management explained several issues, such as the implementation of various protocols and rules that every employee needs to obey when coming to the office in the new normal era, including the division of work schedules by the Company into 2 (two) different teams. The work system applied will become more flexible by not referring to the stipulated working hours, which is eight hours as before. Employees can choose the time to come to the office and go home according to their needs while still prioritizing performance optimization.

Apart from socialization, all information related to the new normal work system is also conveyed through the distribution of "starter pack" flyers to each employee as a guideline and the placement of a socialization banner at the office entrance that can be seen by all employees.

Provision of Health Facilities and Cleanliness within the Company's Environment

The Company ensures that efforts to prevent the spread of the virus are continuously carried out through the implementation of new normal work system. One of the efforts is the provision of health and hygiene facilities throughout the Company, such as hand sanitizers for all employees, cloth face masks, vitamins, and lunch to minimize employees' movement. The existence of these facilities is an early protection measure for the Company to keep its work environment clean and healthy, while striving to break the chain of transmission of the Covid-19 Virus.

Formulir Aktivitas Harian dan Absen *Online*

Perusahaan membuat formulir *online* sebagai sarana untuk mendata aktivitas harian karyawan yang berada di lingkungan kantor Gedung Equity, Jakarta. Seluruh karyawan yang menyelenggarakan pertemuan di dalam kantor dengan pihak eksternal juga diwajibkan mengisi formulir, termasuk karyawan yang memiliki agenda pertemuan di luar kantor dengan pihak eksternal serta karyawan yang harus masuk di luar jadwal. Selain formulir aktivitas harian, Perusahaan melalui tim HR dan IT juga menyusun sistem absen *online* untuk mempermudah proses data kehadiran karyawan setiap harinya.

Virtual Workout Class

Fokus Perusahaan pada kesehatan karyawan juga diwujudkan melalui penyelenggaraan kelas *workout* secara virtual melalui Aplikasi Zoom. Kelas tersebut dilaksanakan secara rutin setiap Sabtu pagi pukul 08.30 selama satu jam yang bertujuan untuk menjaga kesehatan serta meningkatkan imunitas karyawan.

LEADERSHIP ACADEMY PROGRAM (LAP)

Komitmen Perusahaan untuk memastikan adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas salah satunya diwujudkan dengan pengembangan kompetensi karyawan melalui Program "*Leadership Academy Program (LAP)*".

Program ini diselenggarakan pada 22 September 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dan menjadi program jangka panjang yang memiliki tujuan utama untuk menunjang pengembangan kemampuan dan keahlian karyawan melalui optimalisasi kemampuan kepemimpinan (*leadership skill*), kompetensi, dan kapabilitas. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dalam hal pemecahan masalah dan pengambilan keputusan; perencanaan dan pengorganisasian; kerja sama tim; pembentukan pola pikir serta integritas.

Leadership Academy Program (LAP) terbagi menjadi tiga tahapan utama, yakni *in class training*, *coaching*, dan *project assignment*, sebagai berikut:

Daily Activity and Online Absence Forms

The Company creates online forms as a means of recording the employees' daily activities in the Equity Building office in Jakarta. Employees who have to fill out the forms are those holding in-office meetings with external parties, those having a meeting agenda with external parties outside the office, and those that have to enter the office outside of their schedule. In addition to daily activity forms, the Company through its HR and IT teams has also developed an online attendance system to simplify the processing of employee attendance data every day.

Virtual Workout Class

The Company's focus on employees' health is also manifested in the form of virtual workout classes held through the Zoom Application. The class is held regularly every Saturday morning at 08.30 for one hour and aims to maintain the health and increase the immunity of the employees.

LEADERSHIP ACADEMY PROGRAM (LAP)

The Company's commitment to ensuring the support of quality Human Resources (HR) is manifested, among others, in the development of employees' competencies through the "*Leadership Academy Program (LAP)*".

Held from 22 September 2020 to 30 June 2021, the LAP is a long-term program that has the main objective of supporting the development of employees' abilities and expertise by optimizing leadership skills, competencies, and capabilities. This program is expected to increase employees' productivity in terms of problem solving and decision making; planning and organizing; teamwork; forming a mindset, and integrity.

The LAP is divided into three main stages, namely in-class training, coaching, and project assignments, as follows:

In Class Training

In Class Training merupakan tahap pertama yang juga disebut sebagai pembekalan dengan berfokus pada pelatihan khusus terkait pendalaman teori yang mulai diselenggarakan pada 22 September hingga 26 Oktober 2020. Seluruh peserta mendapat pembekalan dari Steveland Bridge (SVB) dengan narasumbernya, Bapak Edwin Djakaria yang dilakukan secara virtual dengan menggunakan Aplikasi Zoom. Acara dilakukan satu hari dalam seminggu dengan durasi selama 3 (tiga) jam dengan tujuan memberikan pemahaman (knowledge) terkait kompetensi manajerial. Pembekalan dilakukan dalam 6 (enam) sesi dengan tiap minggunya dengan topik *growth mindset, integrity, building team & talent, problem solving & decision making, planning & organizing*, serta *project management*.

Coaching

Tahap selanjutnya adalah *coaching* yang diselenggarakan sekitar 6 bulan sejak 6 November 2020 hingga 30 Juni 2021. Dalam kegiatan ini, individu yang berpengalaman atau lebih terampil memberikan bimbingan hingga masukan kepada karyawan lainnya untuk membantu mengembangkan keterampilan, kinerja, dan karier karyawan lainnya. Tujuan dari *coaching* adalah untuk mengasah kemampuan manajerial dengan menggunakan metode dan proses belajar dari orang lain (*learning from others*). Coaching dilakukan dalam 12 (dua belas) sesi. 9 (sembilan) di antaranya dilakukan oleh *internal coach*, yakni para *leaders* yang telah mendapat pembekalan berupa *training for coach*, sementara 3 (tiga) sesi lainnya dipandu oleh profesional coach dari SVB, yakni *coach* Edwin Djakaria dan *coach* Willy Ariwiguna.

Assignment: Project Improvement

Assignment: Project Improvement menjadi tahapan terakhir dari LAP dengan penyelenggaraannya dilaksanakan bersamaan dengan tahap kedua, yakni sejak November 2020 hingga 30 Juni 2021. Di tahap ini, setiap kelompok yang terlibat akan menciptakan inovasi yang nantinya dapat diterapkan secara nyata di Perusahaan serta dapat diikutsertakan dalam berbagai penghargaan. Setiap kelompok akan mempresentasikan update rencana kerjanya dan perkembangan masing-masing kelompok ditinjau dari sini. Dalam sesi presentasi ini, setiap kelompok akan memperoleh masukan dan saran dari para pembimbing dan top manajemen untuk menyempurnakan inovasi yang dimiliki.

In-Class Training

In-Class Training, also called debriefing, is the first stage that focuses on special training related to theoretical materials, which was held on September 22 to October 26, 2020. All participants received training from Steveland Bridge (SVB) with Mr. Edwin Djakaria as the resource person. The training was conducted virtually using the Zoom Application one day a week for 3 (three) hours, with the aim of providing understanding (knowledge) related to managerial competence. The debriefing is carried out in 6 (six) sessions each week with the topics of growth mindset, integrity, team building and talent, problem solving and decision making, planning and organizing, and project management.

Coaching

The next stage is coaching which is held for about 6 months from November 6, 2020 to June 30, 2021. In this activity, skilled individuals with more experiences provide guidance and input to other employees to help develop the skills, performance, and careers of other employees. The purpose of coaching is to hone managerial skills using learning methods and processes from others (learning from others). Coaching is carried out in 12 (twelve) sessions; 9 (nine) of which are conducted by internal coaches, namely leaders who have received training for coaches, while the other 3 (three) sessions are guided by professional coaches from SVB, namely coach Edwin Djakaria and coach Willy Ariwiguna.

Assignment: Project Improvement

Assignment: Project Improvement is the last stage of the LAP with its implementation being carried out in conjunction with the second stage, namely from November 2020 to June 30, 2021. At this stage, each group involved will create innovations that can later be applied significantly in the Company and can participate in various awards. Each group will present an updated work plan and the progress of each group is reviewed from here. In this presentation session, each group will get input and suggestions from their supervisors and top management to improve their innovations.

Teknologi Informasi

Information Technology



Di tengah ketatnya persaingan bisnis serta keberadaan perkembangan aspek Teknologi Informasi (TI) yang semakin bergerak dinamis, Perusahaan memandang penerapan TI yang komprehensif ke seluruh lini mampu mendukung Perusahaan mencapai kinerja optimal, meraih tujuan serta target yang telah ditetapkan, serta mewujudkan visi Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan membangun serta mengembangkan sistem TI di seluruh lini sebagai bentuk upaya Perusahaan memanfaatkan TI yang dapat menunjang Perusahaan meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, serta efektivitas dan efisiensi dari aktivitas operasional, baik di Perusahaan maupun di entitas anak usaha.

Pada tahun 2020, Perusahaan memanfaatkan aspek Teknologi Informasi dengan semakin masif. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas operasional Perusahaan secara keseluruhan, sehingga aspek TI dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang Perusahaan tetap dapat menjalankan operasional bisnis meski kondisi cenderung tidak kondusif.

Amid the strong business competition and the increasingly dynamic developments in Information Technology (IT), the Company views that a comprehensive IT application at all lines is the backbone for the Company to achieve optimal performance, reach the goals and targets that have been set, and realize the Company's vision. To that end, the Company builds and develops IT systems across all lines in an effort to utilize IT to support the improvement of performance and service quality, as well as the effectiveness and efficiency of operational activities, both in the Company and in its subsidiaries.

In 2020, the Company used its Information Technology systems help minimize the impact of the Covid-19 pandemic on its operational activities. Hence, the IT aspect is optimally utilized to support the Company in carrying out its business operations amid the unfavorable conditions and business climate.

Teknologi Informasi Information Technology

Aktivitas operasional yang pada tahun 2020 mulai memanfaatkan penggunaan TI antara lain seperti kegiatan *meeting*, RUPST, dan *Public Expose* yang sebelumnya dilaksanakan secara fisik dan tatap muka, diubah dengan menggunakan sistem *online* melalui aplikasi.

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka menciptakan pelaksanaan kinerja optimal di tengah persaingan ketat serta mewujudkan secara nyata visi Perusahaan, Perusahaan berfokus pada penerapan TI secara menyeluruh. Luasnya kegiatan usaha Perusahaan yang dimiliki oleh Perusahaan serta jumlah entitas anak usaha yang terbilang banyak, adanya pemanfaatan TI ini menjadi aspek penting bagi Perusahaan yang dipandang mampu membantu Perusahaan menjalankan aktivitas operasional dan meningkatkan aspek efisiensinya.

Implementasi TI ke seluruh lini dilakukan secara masif untuk mendukung Perusahaan menciptakan lingkungan kerja kondusif dan terintegrasi yang efisien, akuntabel, transparan, dan dapat diandalkan oleh seluruh karyawan. Sistem TI yang diterapkan Perusahaan berperan untuk menghadirkan sistem yang optimal yang mampu mendukung bisnis yang dijalankan Perusahaan dan juga mendorong level produktivitas dan efisiensi Perusahaan di bidang pelayanan yang diberikan.

Perusahaan pun mendorong seluruh entitas anak usaha untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam menerapkan dan memanfaatkan sistem TI di dalam bisnis yang dijalankan, sehingga bersama-sama antara Perusahaan dan entitas anak usaha dapat memperoleh kinerja yang semakin baik dan meningkatkan kualitas performa untuk memberikan nilai tambah dan dampak positif tidak hanya kepada para pelanggan, tapi juga kepada para pemangku kepentingan yang terlibat.

PIHAK PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Perusahaan memiliki Divisi Teknologi Informasi sebagai pihak pengelola Teknologi Informasi (TI) yang berperan dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengelolaan dan

Operational activities that took advantage of the use of IT in 2020 included meetings, AGMS, and Public Expose; from previously being held physically and face-to-face, they were held online through digital applications in 2020.

INFORMATION TECHNOLOGY POLICIES

In order to create optimum performance amid the fierce competition and to realize the Company's vision, the Company focuses on the comprehensive application of IT. As the Company has a relatively extensive business activities base and a fairly large number subsidiaries, the use of IT is essential for the Company to carry out its operational activities and improve efficiency.

IT implementation in the Company creates a conducive and integrated work environment that is efficient, accountable, transparent and reliable for all employees. The IT system implemented by the Company plays a role in presenting an optimal system capable of supporting the business carried out by the Company while boosting the level of productivity and efficiency of the Company in terms of services provided.

The Company also encourages all its subsidiaries to participate actively in implementing and utilizing IT systems in their business. Thus, the Company, together with its subsidiaries, can deliver better performance, improve the quality of their services to provide added value and positive impact, not only to customers, but also to the stakeholders involved.

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

The Company has established the Information Technology Division as the party managing the Information Technology (IT). With the support of the Information Technology

pengembangan aspek TI di Perusahaan. Dengan adanya dukungan kinerja Divisi Teknologi Informasi, Perusahaan memastikan aspek TI mampu berperan secara optimal dalam menunjang Perusahaan melaksanakan strategi bisnisnya.

VISI DAN MISI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI

Visi

Menjadikan Teknologi Informasi sebagai alat utama pendukung pekerjaan yang mudah digunakan, aman, dan nyaman.

Misi

- Membangun infrastruktur Teknologi Informasi yang efisien dan ramah lingkungan.
- Membangun aplikasi yang mudah digunakan dan aman.

ROADMAP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Tata Kelola Teknologi Informasi adalah sebuah metode yang berperan sebagai sarana bagi Perusahaan untuk memastikan adanya pemenuhan aspek kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku di bidang TI. Untuk itu, Perusahaan menyusun peta jalan atau *roadmap* Tata Kelola Teknologi Informasi dengan menggunakan acuan pilar *Green Computing*, *Web Presence*, *Operational Excellence*, *Security*, dan kebijakan sistem pendukung lainnya sebagai implementasi komitmen Perusahaan dalam menciptakan penerapan aspek Teknologi Informasi yang bermutu dan tetap berada pada koridor kepatuhan di seluruh lini. Kehadiran *roadmap* ini diharapkan dapat menunjang Perusahaan memenuhi kebutuhan bisnis usaha, menunjang efektivitas dan efisiensi dari aktivitas operasional, hingga membantu Perusahaan mencapai tujuan dan target kinerja yang lebih baik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat sasaran.

Division, the Company ensures that its IT aspect is able to optimally support the Company in implementing its business strategy.

VISION AND MISSION OF INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION

Vision

Making Information Technology the main tool in supporting work that is easy to use, safe, and comfortable.

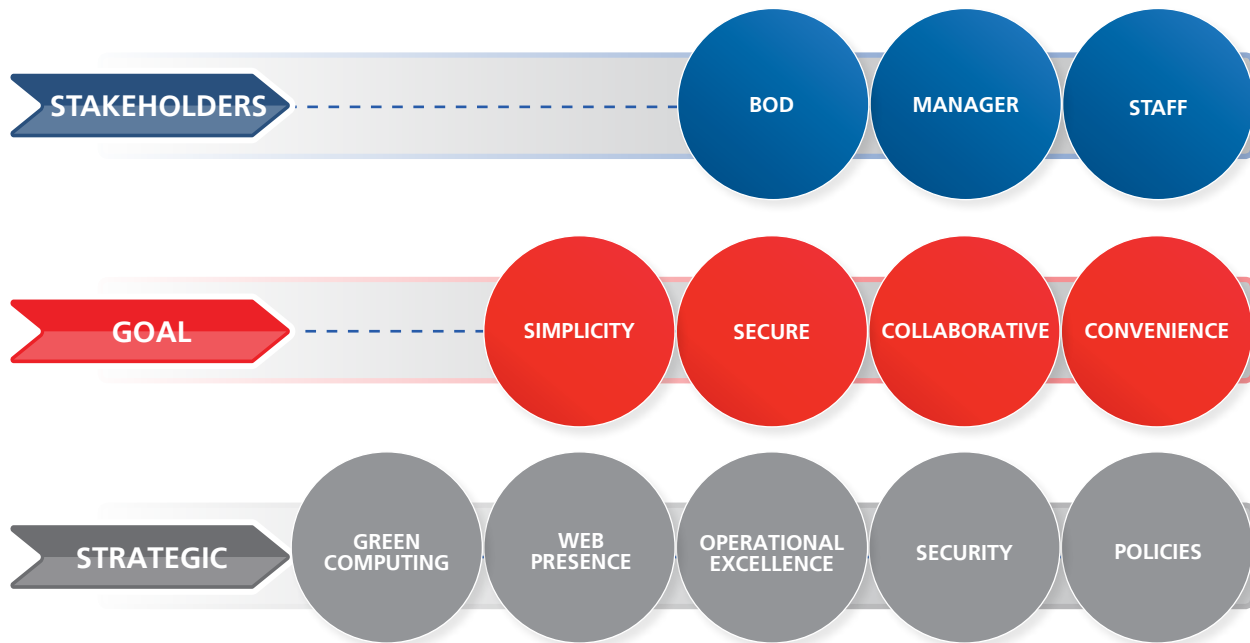
Mission

- Building an efficient and environmentally friendly Information Technology infrastructure.
- Building applications that are easy to use and safe.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE ROADMAP

Information Technology Governance acts as a means for the Company to ensure the fulfillment of the aspect of compliance with applicable rules and regulations in the IT sector. For this reason, the Company prepares a roadmap for Information Technology Governance using the pillars of Green Computing, Web Presence, Operational Excellence, Security, and other supporting system policies as an implementation of the Company's commitment to creating quality information technology that is compliant on all fronts. The establishment of this roadmap is expected to support the Company in fulfilling business needs, support the effectiveness and efficiency of operational activities, and assist the Company in achieving better performance goals and targets through the accurate utilization of Information Technology.

SISTEM TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE SYSTEM



INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi (TI) di Perusahaan memiliki infrastruktur dengan fungsi sebagai bentuk sumber daya teknologi yang dimanfaatkan bersama oleh karyawan Perusahaan secara efektif dan efisien guna mendukung pelaksanaan aktivitas operasional di seluruh lini. Infrastruktur TI di Perusahaan terdiri dari 2 (dua) pilar utama, yakni:

1. Perangkat Keras, terdiri dari PBX, *switch*, *firewall*, dan *server*. Komponen ini berguna sebagai fondasi atau landasan dan menjadi media dari aplikasi-aplikasi yang akan digunakan oleh karyawan.
2. Perangkat Lunak, terdiri dari sistem operasi dan aplikasi. Komponen-komponen ini yang kemudian dimanfaatkan dan digunakan secara langsung oleh karyawan untuk menunjang pelaksanaan kinerja operasional.

Mengacu pada dua pilar tersebut, layanan yang diberikan dalam kegiatan operasional secara garis besar adalah sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE

Information Technology (IT) in the Company has an infrastructure with the function of being a form of technology resources that are shared by the Company's employees effectively and efficiently to support the implementation of operational activities at all lines. The IT infrastructure in the Company consists of 2 (two) main pillars, namely:

1. Hardware, consisting of PBX, switch, firewalls, and servers. This component is useful as a foundation and becomes a medium for applications that will be used by employees.
2. Software, consisting of the operating system and applications. These components are then used directly by employees to support the implementation of operational performance.

Referring to these two pillars, the services provided in operational activities are as follows:

1. Layanan virtualisasi
Layanan yang diperuntukkan khusus untuk tim internal TI yang digunakan untuk mengoptimalkan fungsi perangkat keras.
2. Layanan telekomunikasi dan presentasi
Layanan yang menggunakan teknologi analog (komunikasi audio) dengan basis IP (*video conference* dan presentasi).
3. Layanan surat elektronik atau *email*
Layanan yang digunakan untuk berkomunikasi oleh karyawan, baik dengan pihak internal maupun eksternal.
4. Layanan *Integrated Toll Management System* (ITMS)
Layanan ITMS merupakan layanan yang telah dioperasikan oleh MMN dan JTSE sejak tahun 2013 dan beberapa layanannya juga telah diimplementasikan oleh BSD. ITMS digunakan untuk menunjang Perusahaan meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keamanan transaksi di jalan tol dengan melalui sistem pelaporan *account tool book* yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara garis besar, sistem layanan ini berisi beberapa modul, antara lain:

- a. *Central Tool Computer System* (CTCS)
CTCS adalah modul *server* utama yang menopang serta mengolah seluruh dokumen laporan lalu lintas dan pendapatan di setiap gerbang tol. CTCS ditempatkan di Kantor Pusat Penanggungjawab Pengumpulan Tol (PPT) dan menjadi modul yang menyimpan dan mengeluarkan data laporan *traffic*, pendapatan harian, bulanan, serta tahunan. CTCS terhubung secara *online* ke seluruh *Plaza Toll Computer System* (PTCS) di gerbang tol dengan sarana infrastruktur yang memadai.
- b. *Plaza Toll Computer System* (PTCS)
PTCS merupakan modul *server* utama yang berperan untuk menopang seluruh dokumen laporan lalu lintas serta pendapatan yang diperoleh dari setiap gerbang tol. PTCS ini terhubung ke gardu *Lane Toll Computer System* secara *online* dan mampu merangkum seluruh aktivitas transaksi yang terjadi serta kejadian-kejadian yang ada selama proses transaksi yang seluruhnya memiliki pengaruh terhadap statistik lalu lintas serta pendapatan tol. PTCS dapat menyimpan dan menyampaikan laporan lalu lintas serta pendapatan dalam berbagai periode, baik per *shift*, per hari, hingga per bulan.

1. Virtualization services
Services intended specifically to internal IT teams that are used to optimize hardware functions.
2. Telecommunication and presentation services
Services that use analog technology (audio communication) on an IP basis (video conferencing and presentations).
3. E-mail or e-mail services
Services that are used by employees to communicate, both with internal and external parties.
4. Integrated Toll Management System (ITMS) Service
The ITMS service is a service that has been operated by MMN and JTSE since 2013. BSD has also implemented part of the ITMS services. ITMS is used to support the Company in increasing the speed, accuracy, and security of transactions on toll roads by means of an accountable reporting system for the account toolbook.

Broadly speaking, this service system contains several modules, including:

- a. Central Tool Computer System (CTCS)
CTCS is the main server module that supports and processes all traffic and revenue reports at each toll gate. CTCS is placed at the Head Office in Charge of Toll Collection (PPT) and becomes a module that stores and issues data on traffic reports and daily, monthly and annual revenues. CTCS is connected online to the entire Plaza Toll Computer System (PTCS) at toll gates with adequate infrastructure.
- b. Plaza Toll Computer System (PTCS)
PTCS is the main server module that has a role to support all traffic and revenue reports obtained from each toll gate. PTCS is connected to the Lane Toll Computer System substation online and is able to summarize all transaction activities that occur and events that occur during the transaction process, all of which have an influence on traffic statistics and toll revenues. PTCS can store and submit traffic and revenue reports for various periods, in shift system, daily, or monthly.

- c. *Lane Toll Computer System (LTCS)*
LTCS merupakan modul utama yang ditempatkan di gardu tol dan berfungsi untuk menangani proses transaksi yang dilakukan semua jenis golongan kendaraan, baik secara tunai maupun non-tunai.
 - d. *Real Time Transaction Monitoring System (RTMS)*
RTMS berfungsi untuk memantau proses dan jenis transaksi serta golongan kendaraan yang melakukan transaksi tersebut. RTMS juga berfungsi mengawasi aktivitas yang ada di dalam dan di luar gardu tol dan menjadi instrumen pendukung LTCS.
 - e. *Monitoring Camera CCTV System*
Sistem ini dipasang di dalam gardu tol untuk mengawasi dan merekam aktivitas petugas di lapangan serta kendaraan yang melewati gardu tol. *Camera CCTV System* dapat diawasi setiap saat oleh pengawas atau Kepala *Shift* Pengumpul Tol (KSPT).
 - f. *Pembayaran Elektronik*
Pembayaran tol telah menggunakan sistem Uang Elektronik (UNIK) dari berbagai bank, seperti Flazz BCA, Tap Cash BNI, e-money Mandiri, serta Brizzi BRI.
 - g. *Transaksi Dual Gate*
Penerapan sistem transaksi *dual gate* dapat mendukung optimalisasi kinerja gerbang tol dan membantu mengurai antrean yang dapat terjadi di gerbang tol melalui penerapan dua tarif tol yang berbeda dalam satu gardu.
 - h. *Toll Traffic Information System*
Sistem *Toll Traffic Information System* adalah sarana untuk menyampaikan informasi kondisi lalu lintas secara *real time* dengan menggunakan bantuan teknologi videotron.
 - i. *Real Time Monitoring Traffic dan Revenue*
Aplikasi ini berfungsi untuk mengawasi pendapatan tol secara *real time* dengan berbasis *website* dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan akses data.
5. Pengembangan Sistem Transaksi
- MMN dan JTSE melalui Tim Operasional Teknologi Informasi (TI) yang dimilikinya telah mengembangkan sistem transaksi dengan *Single Reader/Reader Bersama/Reader Multi SAM* yang memiliki kegunaan untuk mengoptimalkan implementasi pembayaran di gardu tol menggunakan Uang Elektronik. Produk Uang Elektronik dari berbagai bank seperti BNI, BRI, BCA, dan Mandiri telah terintegrasi dalam *Single Reader* yang diterapkan.

- c. *Lane Toll Computer System (LTCS)*
LTCS is the main module placed at toll booths and functions to handle transaction processes, both cash and non-cash, carried out by all types of vehicle classes.
 - d. *Real Time Transaction Monitoring System (RTMS)*
RTMS functions to monitor the processes and types of transactions, as well as the class of vehicles that carry out these transactions. RTMS also functions to supervise activities inside and outside toll booths and is a supporting instrument for LTCS.
 - e. *CCTV Camera System Monitoring*
This system is installed in toll booths to monitor and record the activities of officers in the field as well as vehicles passing through toll booths. The CCTV Camera System can be monitored at any time by the supervisor or the Toll Collector Shift Head (KSPT).
 - f. *Electronic Payments*
Toll payments have used the Electronic Money (UNIK) system from various banks, such as Flazz BCA, Tap Cash BNI, e-money Mandiri, and Brizzi BRI.
 - g. *Dual Gate Transaction*
The implementation of a dual gate transaction system can support the optimization of toll gate performance and help unravel the queues that can occur at toll gates through the application of two different toll rates in one gate.
 - h. *Toll Traffic Information System*
The Toll Traffic Information System is a means to convey information on traffic conditions in real time using the help of videotron technology.
 - i. *Real-Time Traffic and Revenue Monitoring*
This application functions to monitor toll revenues in real-time on a website basis, with the aim of increasing data access speed.
5. Transaction System Development
- Through their Information Technology (IT) Operational Team, MMN and JTSE have developed a transaction system with a Single Reader/Shared Reader/Multi SAM Reader application used to optimize the Electronic Money payments at toll booths. Electronic Money products from various banks, such as BNI, BRI, BCA, and Mandiri, have been integrated in a Single Reader.

Selain itu, inovasi lain juga dilakukan melalui SAM-National Payment Gateway (NPG) yang merupakan sistem transaksi tol yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Dengan memasang satu SAM-NPG pada *slot reader*, produk Uang Elektronik dari berbagai bank yang telah terintegrasi dapat terdeteksi secara langsung. Adanya pengembangan ini menjadi wujud nyata Perusahaan dalam mendukung upaya dan komitmen Pemerintah untuk menerapkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). BSD kemudian turut serta mengikuti MMN dan JTSE dengan melakukan pemasangan dinas *card reader* ke dalam sistem GTO-nya.

6. Pemasangan GTO di BSD

Tim TI MMN dan JTSE ditugaskan untuk melakukan pemasangan GTO di ruas jalan tol BSD sekaligus memberikan pembekalan mengenai proses perawatan dan pemeliharaan. Kegiatan ini selain untuk meningkatkan kinerja pelayanan ruas jalan tol, juga menjadi bentuk integrasi antar entitas anak usaha Perusahaan.

7. Traffic Management Center (TMC)

- *Control Room*

Control Room telah digunakan oleh Ruas Tol Makassar sebagai pusat pemantauan keadaan darurat yang dapat terjadi di sepanjang jalan tol. Petugas Monitoring dapat melakukan koordinasi langsung dengan Sentra Komunikasi melalui *Closed Circuit Television* (CCTV), sehingga upaya penanganan akan hal darurat dapat berjalan dengan lebih efektif dan terintegrasi. Tahun 2020 juga telah dilakukan penambahan *display* untuk meningkatkan fungsi monitoring petugas *Traffic Information System* (TIS).

- *Videotron A.P. Pettarani*

Perusahaan melalui MMN dan JTSE menambah dua titik *videotron* di sepanjang jalan Pelindo sampai Pettarani dengan tujuan untuk memperluas konektivitas *Traffic Information System* (TIS) *videotron* baru di jalan A.P. Pettarani. Selain itu, *videotron* ini telah terintegrasi dengan *Control Room* dan *videotron* yang ada di area Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar.

In addition, other innovations are carried out through the SAM-National Payment Gateway (NPG), which is a toll transaction system issued by Bank Indonesia (BI). By installing a SAM-NPG in the reader slot, integrated Electronic Money products from various banks can be detected directly. This development is a concrete manifestation of the Company in supporting the efforts and commitment of the Government to implement the National Non-Cash Movement (GNNT). BSD has followed the efforts of MMN and JTSE by installing a card reader into its GTO system.

6. Installing GTO in BSD

The IT team of MMN and JTSE is tasked with the installation of GTOs on the BSD toll roads as well as provision of briefings regarding the maintenance and renovation process. In addition to improving the performance of toll road services, this activity is also a form of integration between the Company's subsidiaries.

7. Traffic Management Center (TMC)

- *Control Room*

The Control Room has been used by the Makassar Toll Road as a monitoring center for emergencies that can occur along toll roads. Monitoring officers can coordinate directly with the Communication Center via Closed Circuit Television (CCTV), so that emergency handling efforts can run in a more effective and integrated manner. In 2020, a display was added to improve the monitoring function of the Traffic Information System (TIS) officers.

- *Videotron A.P. Pettarani*

The Company, through MMN and JTSE, added two videotron points along the Pelindo-Pettarani road with the aim of expanding the new videotron Traffic Information System (TIS) connectivity on A.P. Pettarani Toll Road. In addition, this videotron has been integrated with the Control Room and videotron in the Soekarno-Hatta Port area, Makassar.

- *Variable Message Sign (VMS) BSD Arah Jakarta*

Perusahaan menerapkan *Traffic Information System (TIS)* sebanyak empat titik di Ruas Tol BSD, yakni:

1. *On Ramp A Row40*
2. *On Ramp B Row40*
3. *On Ramp A Row30*
4. *Main Road KM 10+400 Arah Jakarta*

VMS ini menggunakan jaringan kabel *Fiber Optic (FO)* dan saling terintegrasi. VMS dapat diakses melalui *Control Room* yang berada di kantor operasional Pondok Aren.

8. Pemasangan *Weight in Motion* Gerbang Tol Kembangan Selatan 1 di Tol JLB

JLB memasang alat pendeteksi batas kendaraan berat atau WIM (*Weight in Motion*) di Gerbang Tol Kembangan Selatan 1. WIM sendiri merupakan alat untuk menimbang berat kendaraan yang masuk. Kendaraan yang terdeteksi melebihi standar yang ditentukan kemudian tidak dapat masuk tol serta tidak ada transaksi dan secara langsung dikeluarkan dari jalur tol untuk masuk ke jalan arteri, sementara kendaraan yang terdeteksi tidak melebihi standar dan berada dalam kondisi normal dapat melakukan transaksi untuk masuk ke jalur tol.

9. *Digital Toll Road Operational Management System*

Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol dan kemudahan aksesibilitas data dalam memonitor proses pelayanan, PT. Bintaro Serpong Damai dalam hal ini Divisi Operasional telah meluncurkan aplikasi *Digital Toll Road Operational Management System* pada tahun 2020. Project ini dilakukan untuk mendigitalisasi proses kerja di Divisi Operasional, dengan menu aplikasi berupa:

- *Real-Time Traffic Monitoring*
- *Settlement Monitoring Transaction*
- *Toll Equipment Performance*
- *Monitoring Toll Transaction base on SPM*
- *Monitoring Traffic Management base on SPM*
- *Live streaming CCTV*

- *BSD Variable Message Sign (VMS) Direction of Jakarta*

The Company implements a *Traffic Information System (TIS)* at four points on the BSD Toll Road, namely:

1. *On Ramp A Row40*
2. *On Ramp B Row40*
3. *On Ramp A Row30*
4. *Main Road KM 10+400 Jakarta Direction*

This VMS uses a *Fiber Optic (FO)* cable network and is integrated with each other. VMS can be accessed through the *Control Room* located at the Pondok Aren operational office.

8. Installation of *Weight-in-Motion* for Kembangan Selatan 1 Toll Gate at JLB Toll Road

JLB has installed a heavy vehicle limit detector or WIM (*Weight Motion*) at Kembangan Selatan 1 Toll Gate. WIM is a tool to measure the weight of incoming vehicles. Vehicles that are detected to exceed the specified standards are then unable to enter the toll road; there will be no transactions and the vehicles will be immediately removed from the toll lane to enter the arterial road. Meanwhile, vehicles that are detected to not exceed the standard and are in normal conditions can make transactions to enter the toll road.

9. *Digital Toll Road Operational Management System*

To improve services to toll road users and ease data accessibility in monitoring service processes, PT. Bintaro Serpong Damai, through the Operations Division, launched the *Digital Toll Road Operational Management System* application in 2020. This project was carried out to digitize the work process in the Operations Division, with an application menu in the form of:

- *Real-Time Traffic Monitoring*
- *Settlement Monitoring Transaction*
- *Toll Equipment Performance*
- *Monitoring Toll Transaction base on SPM*
- *Monitoring Traffic Management base on SPM*
- *Live streaming CCTV*



Dengan adanya aplikasi ini sangat memudahkan untuk melakukan monitoring performa pelayanan kepada pengguna jalan dan meningkatkan aksesibilitas data pada saat membutuhkan informasi untuk dijadikan referensi pengambilan keputusan. Melalui aplikasi ini pula performa pemenuhan SPM yang menjadi kewajiban pengelola jalan tol dapat dikontrol dengan mudah.

This application facilitates the monitoring activity of service performance to road users and increases data accessibility when needing information to be used as a reference for decision making. Through this application, the SPM fulfillment, which is the obligation of toll road managers, can be easily controlled.

10. Centralized Hybrid Toll Gates System



Proyek peningkatan kualitas dan optimalisasi proses transaksi pengumpulan tol di Gerbang Tol Pondok Aren yang bertujuan untuk mereduksi *idletime* dalam siklus waktu transaksi. Dengan melakukan *re-engineering* dan *combine* proses serta standarisasi proses, proyek ini memberikan benefits berupa efisiensi biaya *toll revenue collection* sebesar 40% dari biaya sebelumnya dengan tidak mengurangi *value added* kepada pelanggan dan proses internal.

PROGRAM KERJA TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2020

Selama tahun 2020, Perusahaan melalui Divisi Teknologi Informasi telah melakukan berbagai penerapan dan pengembangan aspek Teknologi Informasi di berbagai sektor yang dimiliki Perusahaan guna mendukung pelaksanaan strategi bisnis dan pencapaian kinerja sesuai harapan dan target yang telah ditetapkan. Penerapan dan pengembangan tersebut dihadirkan melalui pelaksanaan program kerja bidang Teknologi Informasi di sepanjang tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan layanan Microsoft 365 Business secara menyeluruh untuk memenuhi keperluan komunikasi dan kolaborasi di lingkungan Grup Nusantara Infrastructure. Layanan Microsoft 365 Business ini menyediakan layanan email, *virtual meeting*, *sharing files*, *group collaboration* dan *chat group* sehingga memudahkan karyawan dalam bekerja yang dapat dilakukan kapanpun dan di mana saja.

10. Centralized Hybrid Toll Gates System



This is a project to improve the quality and optimization of the toll collection transaction process at the Pondok Aren Toll Gate which aims to reduce idle time in the transaction cycle time. By re-engineering and combining processes and standards, this project provides benefits in the form of toll revenue collection cost efficiency of 40% from previous costs without reducing value added to customers and internal processes.

INFORMATION TECHNOLOGY WORK PROGRAMS IN 2020

Through the Information Technology Division, the Company has carried out various applications and developments of the Information Technology aspect in various sectors of the Company in 2020, in order to support the implementation of business strategies and achievement of performance according to the set expectations and targets. This application and development are presented through the implementation of Information Technology work programs throughout 2020, as follows:

1. Comprehensive implementation of Microsoft 365 Business services to meet communication and collaboration needs within the Nusantara Infrastructure Group. This Microsoft 365 Business service provides email, virtual meeting, sharing file, group collaboration, and group chat services, making it easier for employees to work anytime and anywhere.

2. Penerapan absen *online* untuk mendukung program kerja dari rumah/*work from home* (WFH) & kerja dari kantor/*work from office* (WFO).
3. Penerapan sistem *dashboard* yang menampilkan data *traffic* dan *revenue* secara periodik untuk anak usaha Perusahaan di sektor tol melalui grup PT Marga Utama Nusantara.
4. *Digital Toll Road Operational Management System*
Dalam rangka meningkatkan pelayanan industri jalan tol ke arah digital, perlu dilakukannya perubahan dan pengembangan sistem yang dapat mempercepat pekerjaan serta memudahkan setiap karyawan dalam penggunaannya. Peningkatan kualitas pekerjaan yang efisien dan tepat adalah salah satu bentuk arah pengembangan sistem ini dibuat. Tim Operasional BSD melakukan banyak inisiasi guna menciptakan sistem kerja yang modern. Melalui beberapa masukan dan analisa Tim Operasional, kami Tim IT Operasional BSD membantu mewujudkan keinginan Tim Operasional BSD untuk menyediakan sebuah sistem yang mudah digunakan dan dimengerti oleh *user*. Dengan itu terciptalah sebuah sistem yang dapat membantu pekerjaan Tim Operasional BSD. Sistem tersebut adalah aplikasi berbasis web yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Aplikasi yang dibangun secara bertahap ini, telah selesai pada pertengahan tahun 2020 dan telah digunakan seluruhnya oleh Tim Operasional BSD. Dampak dari aplikasi tersebut sangatlah signifikan, banyaknya proses pekerjaan yang terpotong dan dimudahkan oleh aplikasi tersebut.
5. *Toll Collector Management System*
Dengan beroperasinya Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, maka lingkup pemantauan operasional jalan tol dan kondisi lalu lintas juga meningkat, sementara saat ini pemantauan TIS terbatas hanya pada Jalan Tol Seksi I, II, dan IV. Untuk memperluas wilayah pemantauan TIS ke Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, maka dilakukan pemasangan CCTV baru dan sistem jaringan *fiber optic* pada ruas jalan tol tersebut, sebagai bagian dari pengembangan TIS.
6. *Centralized Hybrid Toll Gate System*
 - a. *Dual Reader – Dual Printer*
Peningkatan kualitas di bidang pengumpulan pendapatan tol yang berdampak pada turunnya biaya *toll revenue collection* dengan tetap mengutamakan standar pelayanan kepada pengguna jalan. Kami
2. Application of online attendance to support work from home (WFH) and work from office (WFO) programs.
3. Implementation of a dashboard system that displays periodic traffic and revenue data for the Company's subsidiaries in the toll sector through PT Marga Utama Nusantara group.
4. Digital Toll Road Operational Management System
In order to improve toll road industry services to a digital direction, it is necessary to make changes and develop a system that can accelerate work and facilitate every employee in the utilization. Improvement of work quality to be more efficient and precise is one form of the development direction of this system. With this in mind, the Operations Team of BSD has made several initiatives to create a modern work system. Through some input and analysis from the Operations Team, BSD's Operational IT Team is able to realize the desire of BSD's Operations Team to provide a system that is easy to use and understand by users, and can support the duties of the Operational Team. This system is a web-based application that can be accessed anywhere and anytime. Built in stages, this system was completed in mid-2020 and has been used entirely by BSD's Operation Team with highly significant impact, such as the convenient and effective implementation of work processes by the Operations Team.
5. Toll Collector Management System
With the operation of A.P. Pettarani Elevated Toll Road, the scope of monitoring of toll road operations and traffic conditions has also increased while currently, TIS monitoring is limited to Toll Road Sections I, II, and IV. To expand the TIS monitoring area to A.P. Pettarani Elevated Toll Road, a new CCTV and fiber optic network system on the toll road has been installed as part of the development of TIS.
6. Centralized Hybrid Toll Gate System
 - a. Dual Reader – Dual Printer
This is an improvement of quality in toll revenue collection, which has an impact on lowering toll revenue collection costs while still prioritizing service standards to road users. We made an innovation by

melakukan inovasi dengan memasang *Dual Reader* – *Dual Printer* pada gardu *hybrid*. Posisi *reader* dan *printer* tersebut diletakkan di luar gardu sehingga pengendara dapat langsung melakukan transaksi secara mandiri tanpa bantuan Petugas Pultol. Jumlah *reader* dan *printer* yang dipasang masing-masing 2 unit. Hal ini untuk memudahkan pengendara dengan berbagai golongan kendaraan untuk melakukan transaksi. Kendaraan dengan golongan I dapat melakukan transaksi menggunakan *reader* dan *printer* posisi bawah, sedangkan kendaraan dengan golongan lainnya dapat melakukan transaksi menggunakan *reader* dan *printer* posisi atas.

- b. Tombol Karcis dan Bantuan Nir Sentuh
Jika terjadi kendala dalam transaksi, maka pengendara dimudahkan untuk meminta bantuan kepada petugas dengan menekan Tombol Bantuan yang telah disediakan. Hal ini merupakan upaya peningkatan layanan agar pengendara dapat cepat terlayani oleh petugas di gerbang.
- c. *Single Operator* 2 Gerbang
Kontrol pada gardu *hybrid* sebelumnya memerlukan 2 petugas pengumpul tol pada setiap gerbang, di mana masing-masing pengumpul tol bertugas untuk menentukan golongan kendaraan yang akan bertransaksi. Kami mengembangkan sebuah sistem yang dapat memantau keadaan gardu transaksi dari jauh dengan bantuan kamera CCTV. Oleh karena itu, kami berinisiasi untuk melakukan sentralisasi kontrol gardu *hybrid* yang dapat dilakukan oleh satu orang saja.

7. *Development Wallet System with DANA*

Kemudahan transaksi pada ruas jalan tol perlu untuk selalu ditingkatkan dan salah satu bentuk inovasi dalam menyediakan pelayanan transaksi yang efektif dan efisien yaitu dengan dikembangkannya *wallet system*. Pada Desember 2019 yang lalu, Tim Operasional IT MMN dan JTSE melakukan *visit* ke kantor DANA yang memiliki teknologi pembayaran menggunakan QR Code. Pada tahun 2020, Tim IT MMN dan JTSE telah melakukan trial, testing, dan developing untuk transaksi dengan menggunakan QR Code DANA pada mesin GTO. Penerapan sistem QR Code ini mulai diimplementasikan pada awal tahun 2021. Teknologi ini yang nantinya akan mendukung pengembangan *Single Lane Free Flow* (SLFF).

installing a Dual Reader – Dual Printer in a hybrid booth. The readers and the printers are placed outside the booth so that drivers can immediately carry out transactions independently without the assistance of toll road officers. The number of readers and printers installed are 2 units each to make it easier for drivers with various classes of vehicles to make transactions. Class I vehicles can make transactions using the reader and printer in the lower position, while other classes vehicles can make transactions using the reader and printer in the upper position.

- b. Ticket Buttons and Touch-less Assistance
If there is a problem in the transaction, it will be easy for the driver to ask the officer for help by pressing the Help Button that has been provided. This is an effort to improve services so that drivers can be served quickly by officers at the gate.
- c. 2 Gates Single Operator
Control at the hybrid booth previously required 2 toll collectors at each gate, where each toll collector was tasked with determining the class of vehicles that would transact. We have developed a system that can remotely monitor the state of the transaction booth with the help of CCTV cameras. Therefore, we took the initiative to centralize control of hybrid booths that can be done by only one person.

7. *Wallet System Development with DANA*

Ease of transactions on toll roads needs to be constantly improved. One form of innovations in providing effective and efficient transaction services is the development of a wallet system. In December 2019, the IT Operations Team of MMN and JTSE visited DANA office which has developed payment technology using QR Code. In 2020, both MMN and JTSE had conducted trial and testing, as well as development stage for transactions using the DANA QR Code on the GTO machine. The application of the QR Code system will be implemented in early 2021. This technology will later support the development of Single Lane Free Flow (SLFF).

8. CCTV TIS Jalan Tol Layang A.P. Pettarani

Dengan beroperasinya Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, maka lingkup pemantauan operasional jalan tol dan kondisi lalin juga meningkat, sementara saat ini pemantauan TIS terbatas hanya pada Jalan Tol Seksi I, II, dan IV. Untuk memperluas wilayah pemantauan TIS ke Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, maka dilakukan pemasangan CCTV baru dan sistem jaringan *fiber optic* pada ruas jalan tol tersebut, sebagai bagian dari pengembangan TIS.

9. Pengembangan Layanan Transaksi

a. *Mobile Reader*

Dengan rampungnya pengerjaan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani dan telah siap dioperasikan maka dilakukan langkah antisipasi untuk mengendalikan potensi terjadinya lonjakan antrian kendaraan dengan pengadaan *Mobile Reader*. *Mobile Reader* ini digunakan sebagai tools yang efektif untuk membantu mengurai dan mempercepat transaksi sehingga dapat menurunkan panjang antrian yang terjadi di gerbang. Selain itu, jika terjadi kerusakan peralatan tol maka *Mobile Reader* ini menjadi peralatan backup untuk pelayanan transaksi.

b. Tombol Bantuan

Jika terjadi kendala dalam transaksi, maka pengendara dimudahkan untuk meminta bantuan kepada petugas dengan menekan Tombol Bantuan yang telah disediakan. Hal ini merupakan upaya peningkatan layanan agar pengendara dapat cepat terlayani oleh petugas di gerbang.

c. *Dual Reader-Dual Printer*

MMN dan JTSE berupaya untuk menekan penyebaran COVID-19 pada gerbang Jalan Tol Makassar. Tim IT MMN dan JTSE melakukan inovasi dengan memasang *Dual Reader – Dual Printer* pada gardu *hybrid*. Posisi *reader* dan *printer* tersebut diletakkan di luar gardu sehingga pengendara dapat langsung melakukan transaksi secara mandiri tanpa bantuan Petugas Pultol. Jumlah *reader* dan *printer* yang dipasang masing-masing 2 unit. Hal ini untuk memudahkan pengendara dengan berbagai golongan kendaraan untuk melakukan transaksi. Kendaraan dengan golongan I dapat melakukan transaksi menggunakan *reader* dan *printer* posisi bawah, sedangkan kendaraan dengan golongan lainnya dapat melakukan transaksi menggunakan *reader* dan *printer* posisi atas.

8. CCTV TIS on A.P. Pettarani Elevated Toll Road

With the operation of A.P. Pettarani Elevated Toll Road, the scope of monitoring of toll road operations and traffic conditions has also increased while currently, TIS monitoring is limited to Toll Road Sections I, II, and IV. To expand the TIS monitoring area to A.P. Pettarani Elevated Toll Road, a new CCTV and fiber optic network system on the toll road has been installed as part of the development of TIS.

9. Development of Transaction Services

a. *Mobile Reader*

As the construction of A.P. Pettarani Elevated Toll Road has been completed and it is ready for operation, anticipatory steps are taken to control the potential for a spike in vehicle queues by procuring a *Mobile Reader*. This *Mobile Reader* is used as an effective tool to help unravel congestion and speed up transactions so as to reduce the length of queues that may occur at the toll gate. In addition, if there is damage to the toll equipment, the *Mobile Reader* becomes a backup tool for transaction services.

b. *Button Help*

If there is a problem in the transaction, it will be easy for the driver to ask the officer for help by pressing the *Help Button* that has been provided. This is an effort to improve services so that drivers can be served quickly by officers at the gate.

c. *Dual Reader-Dual Printer*

MMN and JTSE are working to reduce the spread of COVID-19 at the gate of Makassar Toll Road. The IT Team of MMN and JTSE has made an innovation by installing a *Dual Reader – Dual Printer* in a hybrid booth. The readers and the printers are placed outside the booth so that drivers can immediately carry out transactions independently without the assistance of Toll Road Officers. The number of readers and printers installed are 2 units each to make it easier for drivers with various classes of vehicles to make transactions. Class I vehicles can make transactions using the reader and printer in the lower position, while other classes vehicles can make transactions using the reader and printer in the upper position.

- d. Top-Up UNIK Menggunakan Aplikasi Whatsapp
Pandemi COVID-19 membuat kita semua melakukan pembatasan kontak langsung dengan sesama di segala aktivitas. MMN dan JTSE ikut mendukung segala tindakan pencegahan penyebaran virus dengan menutup *booth* Top-Up UNIK yang disediakan di 3 akses masuk Jalan Tol Makassar. MMN dan JTSE memberikan solusi dengan menyediakan sistem Top-Up UNIK menggunakan aplikasi Whatsapp. Dengan pilihan sistem Top-Up tersebut diharapkan dapat mempermudah pengguna Jalan Tol Makassar untuk melakukan Top-Up UNIK pada *smartphone* yang dimiliki.

10. LTCS Login via Android

Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 juga dilakukan di internal petugas gerbang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan dibuatnya aplikasi login LTCS untuk KSPT dengan memanfaatkan teknologi *bluetooth*. Petugas KSPT dapat melakukan login LTCS pada *smartphone Android* yang dimiliki sehingga tidak perlu melakukan login menggunakan *keyboard* yang biasa digunakan untuk login pada GTO maupun pada gardu *hybrid*.

11. Pemasangan CCTV di WTP SCTK. Sistem ini dipasang di WTP untuk mengawasi dan merekam aktivitas petugas di lapangan.

- d. UNIK Top-Up Using Whatsapp Application

The COVID-19 pandemic forced us to limit direct contact with other people in all activities. In this regard, MMN and JTSE also support all measures to prevent the spread of the virus by closing the UNIK Top-Up booths which are provided at 3 entrances to Makassar Toll Road. MMN and JTSE provide solutions for UNIK Top-Up system using the Whatsapp application. With the choice of the Top-Up system, it is hoped that it can make it easier for Makassar Toll Road users to do UNIK Top-Up on their smartphones.

10. LTCS Login via Android

Efforts to prevent the spread of COVID-19 are also being carried out internally by gate officials. One of the efforts carried out is the creation of LTCS login application for KSPT using the Bluetooth technology. KSPT officers can log in to LTCS on their Android smartphone so they do not need to log in using the keyboard that is usually used to log in to GTO or at hybrid booths.

11. CCTV installation at WTP SCTK. This system is installed in the WTP to monitor and record the activities of officers in the field.

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2021

Penerapan Teknologi Informasi yang optimal hingga kini telah membawa banyak dampak positif bagi Perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kualitas kinerja operasional secara keseluruhan di seluruh sektor. Melihat hal tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk terus menjalankan penerapan dan pengembangan aspek Teknologi Informasi yang semakin baik di tahun-tahun mendatang. Maka dari itu, Perusahaan telah menyusun rencana strategi pengembangan aspek Teknologi Informasi untuk tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Rencana persiapan penerapan *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang meliputi bagian *Procurement, Inventory, Finance, Accounting* dan *Maintenance* di seluruh lingkungan Grup Nusantara Infrastructure.
2. *Touch Sensor Printing*
Dengan belum turunnya grafik penyebaran COVID-19 secara signifikan dan pemberian vaksin secara massal

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLANS FOR 2021

The optimum implementation of Information Technology to date has had many positive impacts on the Company which, in turn, resulted in the improvement of quality of overall operational performance in all sectors. Seeing this, the Company is committed to continuously implementing and developing Information Technology so as to be better in years to come. Therefore, the Company has compiled a strategic plan for the development of Information Technology for 2021, as follows:

1. Preparation for the implementation of *Enterprise Resource Planning* (ERP), which includes *Procurement, Inventory, Finance, Accounting, and Maintenance* throughout the Nusantara Infrastructure Group.
2. *Touch Sensor Printing*
With no significant reduction in the spread of COVID-19 and the targeted mass delivery of vaccines for more

yang ditargetkan baru akan selesai lebih dari satu tahun, maka MMN dan JTSE masih melakukan inovasi guna menekan penyebaran di area Jalan Tol Makassar. Tim Operasional IT melakukan berbagai inovasi, salah satunya adalah printer dengan sensor lambaian tangan. Dengan pengembangan dari *printer* ini, pengemudi tidak perlu menekan tombol cetak karcis tol lagi. Pengemudi cukup melambaikan tangan saja di depan mesin *printer* yang telah dipasang sensor jika ingin mencetak karcis tol.

3. Mini Videotron pada Bullnoise Gardu Tol

Rambu informasi tarif yang tersedia di tiap gerbang tol direncanakan untuk dikembangkan menjadi rambu digital. Dengan sistem digital ini, rambu tersebut juga dapat dijadikan media untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada pengemudi dan juga menjadi peluang untuk peningkatan NTR dengan pemasangan iklan.

4. Automatic Vehicle Classification (AVC) dan Single Lane Free Flow (SLFF)

Single Lane Free Flow (SLFF) merupakan lanjutan pengembangan dari otomatisasi gerbang tol yang bertujuan untuk mengurangi antrian dan pemberhentian ketika kendaraan membayar tarif tol yang biasanya terjadi di dalam ruas jalan tol. MMN dan JTSE selalu mengikuti perkembangan teknologi dan turut mendukung semua program dan kebijakan Pemerintah. Untuk menindaklanjuti persiapan SLFF, Tim Operasional IT MMN dan JTSE telah melakukan *visit* ke perusahaan-perusahaan penyedia teknologi yang berkaitan dengan sistem tersebut. *Visit* ini dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari teknologi yang dapat diterapkan di ruas Jalan Tol Makassar.

5. Memastikan terlaksananya *wallet system* DANA berjalan lancar pada tahun 2021

6. Melakukan konfigurasi sistem peralatan tol agar administrasi pengumpulan tol menjadi lebih efektif dan efisien

7. Trial program *paperless* untuk kegiatan transaksi tol, yakni dari struk yang berupa *hardcopy* dikonversi menjadi struk sistem digital

8. Develop Mobile VMS untuk mendukung sistem perambuan atas aktivitas *maintenance* maupun operasional jalan tol

than one year, MMN and JTSE will continue to make innovations to reduce the spread in Makassar Toll Road area. The IT Operations Team of both companies has made various innovations, one of which is a printer with a hand wave sensor. With this printer development, drivers do not need to press the print toll ticket button again. The drivers only need to wave their hand in front of a printer that has been installed with sensors if they want to print toll tickets.

3. Mini Videotron at Bullnoise Toll Booth

The tariff information signs available at each toll gate are planned to be developed into digital signs. With the digital system, these signs can also be used as a medium to convey information and education to drivers, and also become an opportunity to increase NTR by placing advertisements.

4. Automatic Vehicle Classification (AVC) and Single Lane Free Flow (SLFF)

Single Lane Free Flow (SLFF) is a continuation of the development of toll gate automation which aims to reduce queues and stops when vehicles pay toll rates, which usually occur on toll roads. MMN and JTSE always keep abreast of technological developments and support all Government's programs and policies. To follow up the preparations for SLFF, the IT Operations Team of MMN and JTSE has visited several companies that provide technology related to the system. These visits are conducted to find out and study the technology that can be applied on Makassar Toll Road.

5. Ensure that the DANA wallet system runs smoothly by 2021.

6. Configure the toll equipment system so that toll collection administration becomes more effective and efficient.

7. Conduct the paperless trial program for toll transaction activities, namely, hardcopy of receipts converted into digital system receipts.

8. Develop Mobile VMS to support the traffic signs system for toll road maintenance and operation activities.

9. Program peningkatan kapasitas angkat truk Derek dari 6 ton menjadi 10 ton

10. *Visual Management System*

Dengan berkembangnya digitalisasi yang telah terbentuk di PT BSD, kami berencana untuk lebih memajukan lagi teknologi dan informasi pada perusahaan. *Visual Management System* adalah web aplikasi yang menyajikan informasi terkini mengenai keadaan dan pekerjaan yang sedang berlangsung di PT BSD. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mempercepat penyampaian informasi kepada *management*, baik kepada *management* PT BSD sendiri maupun *Holding*. Aplikasi tersebut akan ditampilkan pada layar monitor pada kantor pusat PT BSD dan kantor operasional PT BSD.

11. *GPS Tracking System*

Sistem GPS akhir-akhir ini sudah berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya pada tahun ini, banyak *platform* digital yang telah menerapkannya sebagai alat pelacakan lokasi kendaraan. Kami berinisiasi untuk menggunakan teknologi tersebut pada kendaraan patroli di jalan tol demi memudahkan kami dalam menjalankan pemenuhan standar pelayanan minimum.

12. *Traffic Audio Announcer*

Banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan tol yang dapat mengganggu kenyamanan kendaraan lain yang melintas, membuat kami berinisiasi untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat membantu kami dalam menghadapi masalah tersebut. Saat ini, informasi kendaraan yang berhenti di bahu jalan dikirimkan dari sentral komunikasi di kantor operasional ke patroli untuk dilakukan peneguran. Di mana waktu untuk patroli sampai ke tempat kendaraan tersebut belum optimal, dikarenakan kendaraan patroli tidak selalu berdekatan dengan titik yang dituju. Kami mengadopsi sebuah ide yang telah diterapkan oleh kepolisian di Indonesia, yaitu dengan memasang sebuah pengeras suara di beberapa titik jalan tol sebagai alat bantu kami dalam menyampaikan informasi atau teguran kepada pengendara yang berhenti di bahu jalan. Dalam percobaannya, kami telah berhasil mempercepat proses peneguran ke pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan.

9. Implement a program to increase the lifting capacity of crane trucks from 6 tons to 10 tons.

10. *Visual Management System*

With the development of digitalization that has taken place at PT BSD, we plan to further advance the technology and information for the Company. *Visual Management System* is a web application that provides up-to-date information about the state and ongoing work at PT BSD. The application aims to accelerate the delivery of information to the management of PT BSD and to the holding company. The application will be displayed on the monitor screen at PT BSD's head office and operational office.

11. *GPS Tracking System*

GPS system has demonstrated rapid development in recent years. This year, many digital platforms implemented GPS system as a vehicle location tracking tool. We will take the initiative to use this technology on patrol vehicles on toll roads to make it easier for us to fulfill minimum service standards.

12. *Traffic Audio Announcer*

The large amount of vehicles stopping on the side of toll roads, which can interfere with the other passing vehicles, drives us take the initiative to develop a system that can deal with this issue. At present, information on vehicles that stop on the road side is sent from the communication center in the operational office to the patrols for a warning. To reach these vehicles, the patrols need some time as they are often not close by the vehicles' location; and this time required to reach there is not optimal. To address this, we adopt an idea that has been implemented by the police in Indonesia, namely by installing a loudspeaker at several toll road points as our aid in conveying information or warnings to the drivers who stop on the road side. In our experiments, we have succeeded in accelerating the process of warning to the driver of these vehicles.

13. Smart Inspection

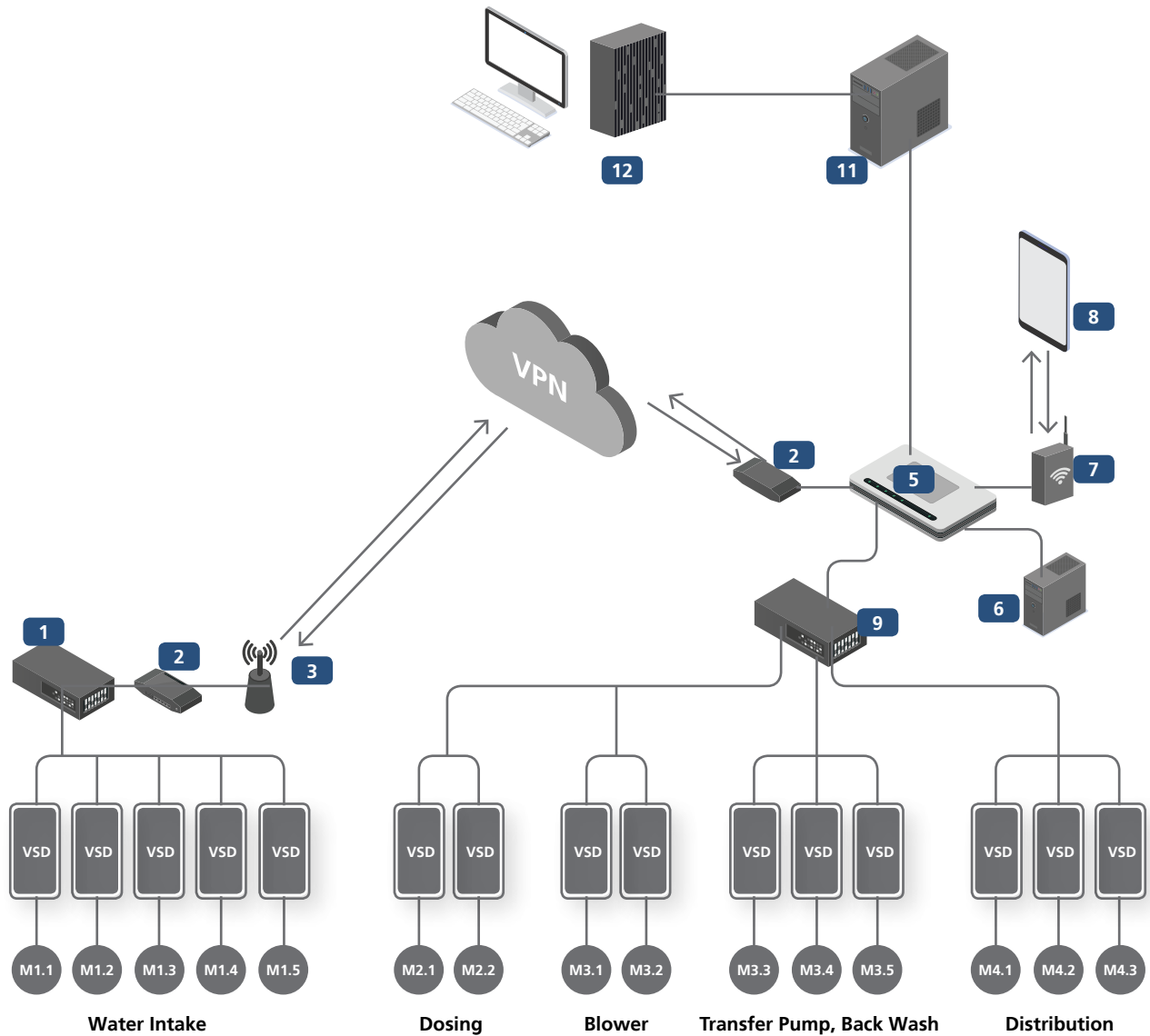
Sebagai industri yang bergerak dibidang pelayanan, kami berencana untuk membangun sebuah sistem yang memudahkan karyawan dalam penggunaannya dan dapat secara langsung berdampak pada pengguna jalan. Proses pemeriksaan inspeksi saat ini, dalam hal *preventive* dan *corrective maintenance* di jalan tol dilakukan secara manual. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin modern, kami berencana menciptakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai inspeksi di jalan tol. Aplikasi tersebut dalam menampung seluruh kebutuhan *maintenance* jalan tol maupun analisa kerusakan yang terjadi. Tidak hanya itu, aplikasi tersebut dapat diakses dengan berbagai *platform* sehingga informasi yang dihadirkan dapat langsung diterima oleh seluruh karyawan.

14. Penyempurnaan pemasangan CCTV di seluruh area operasional SCKT, mulai dari *Intake*, Unit Operasi 1, Unit Operasi 2, serta *Booster Pump*, sehingga seluruh kegiatan operasional dan pengawasan keamanan dapat termonitor dari ruang kontrol yang berada di UP2.
15. Pemasangan SCM (*Streaming Current Monitor*) atau sering juga disebut sebagai *Otomatic dossering system*, di mana sistem ini mengatur kerja pompa dosing secara otomatis untuk mensuplai koagulan sesuai dosis optimumnya. Penggunaan SCM ini akan meningkatkan efisiensi konsumsi koagulan yang pemakaiannya sangat bergantung pada kualitas air.
16. Penyempurnaan pemasangan VSD (*Variable Speed Drive*) di unit operasi SCKT yang akan mengoptimalkan konsumsi energi, sehingga biaya pemakaian listrik akan menjadi lebih efisien.
17. System SCADA (*Supervisory Control And Data Acquisition*) akan diimplementasikan di SCKT dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional.
18. Penerapan konsep Industri 4.0 yang dikembangkan oleh TBN dengan nama AquaDigi merupakan aplikasi *front end* untuk mendukung kemudahan operasional dan komunikasi mulai dari operator lapangan, administrasi, manajemen, sampai dengan pelanggan.

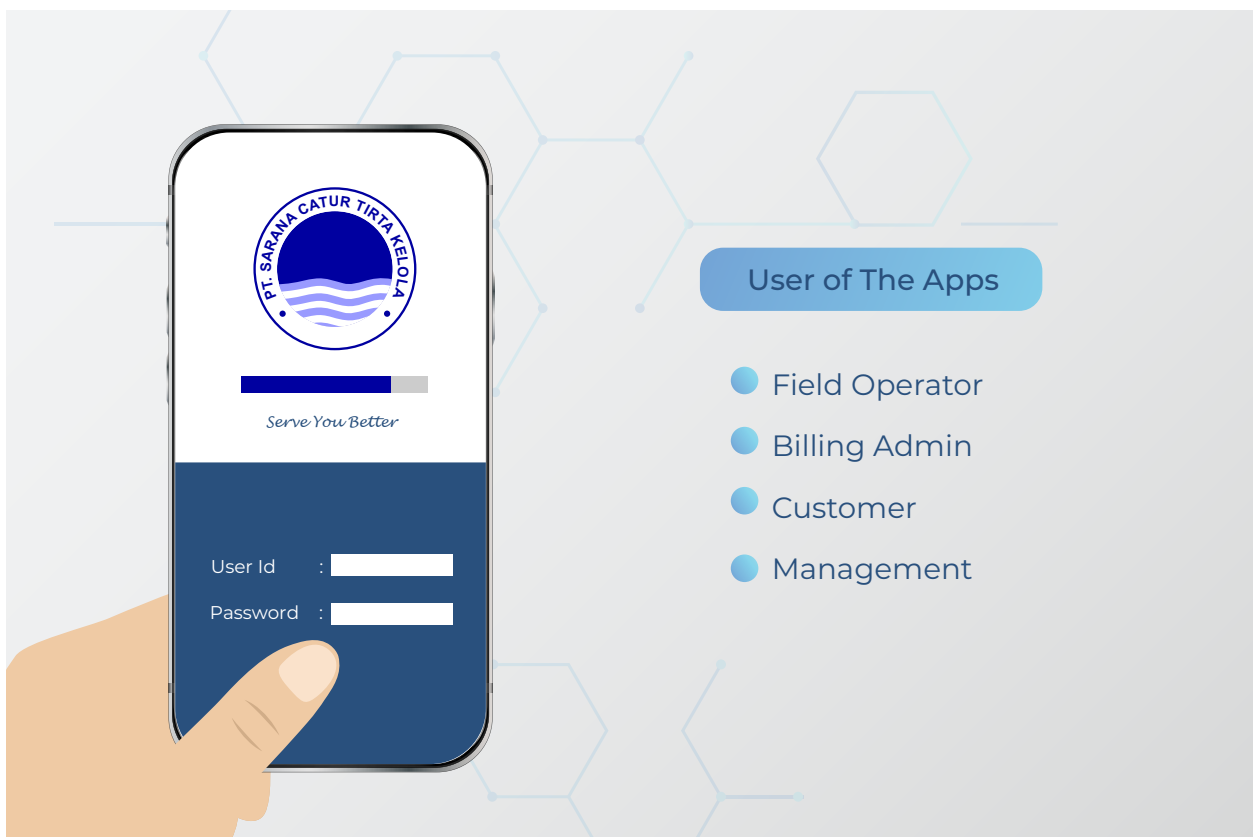
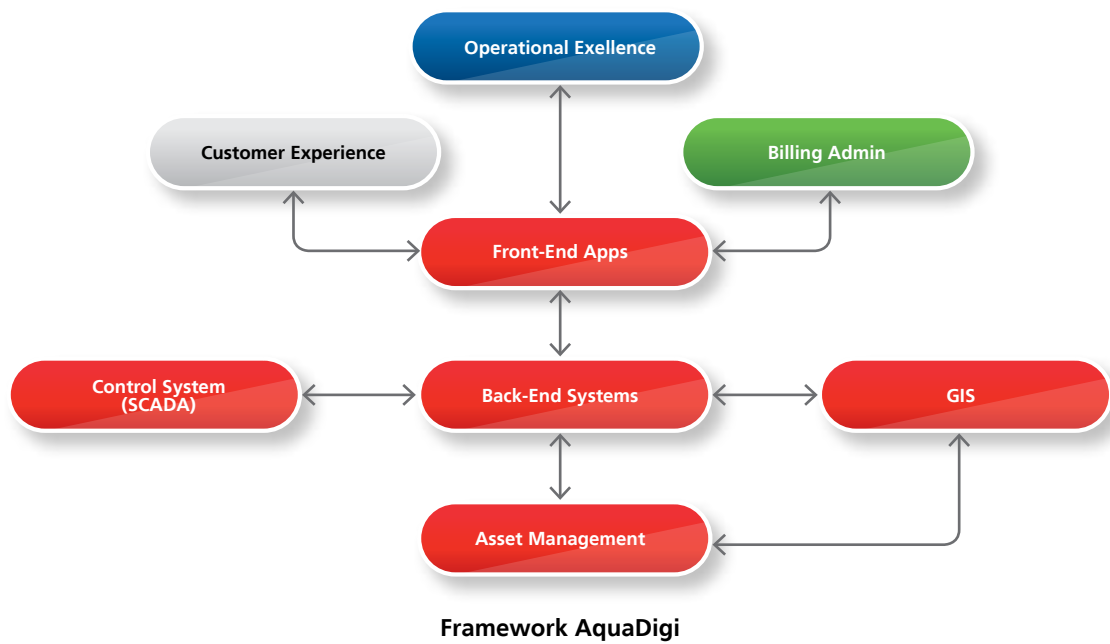
13. Smart Inspection

As a company engaging in service industry, we plan to build a system that can be easily used by our employees and can directly impact road users. The current inspection process is carried out manually in terms of preventive and corrective maintenance on toll roads. With the development of increasingly modern technology, we plan to create an application that can be used for inspection on toll roads. This application accommodates all toll road maintenance needs and analyzes the damage that occurs. Furthermore, this application can be accessed on various platforms so that the information presented can be immediately received by all employees.

14. Improve CCTV installation in all operational areas of SCKT, starting from the Intake, Operation Unit 1, Operation Unit 2, and Booster Pump, so that all operational activities and security surveillance can be monitored from the control room at UP2.
15. Conduct the installation of SCM (Streaming Current Monitor), or often referred to as an automatic dosing system. This system regulates the operation of the dosing pump automatically to supply coagulants according to the optimum dose. The use of this SCM will increase the efficiency of consumption of coagulants whose use is very dependent on water quality.
16. Improve the installation of VSD (Variable Speed Drive) in the SCKT operating unit which will optimize energy consumption, so that electricity consumption costs will be more efficient.
17. Implement the SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) system at SCKT in order to increase operational efficiency and effectiveness.
18. Implement the Industry 4.0 concept developed by TBN under the name AquaDigi, which is a front-end application to support ease of operation and communication starting from field operators, administration, management, to customers.



SCADA sistem yang akan diimplementasikan di SCKT (point 17)
SCADA system to be implemented at SCKT (point 17)





PENUGASAN PETUGAS • OFFICER ASSIGNMENT

Mengetik *button* untuk setiap penugasan yang diambil dan bisa di-*tracking* secara *Live* proses pekerjaannya.

Typing button for every assignment taken that can be tracked live during its workmanship process.



TRANSAKSI NON TUNAI • NON-CASH TRANSACTION

Pilihan pembiayaan *Online Billing*.

Online Billing financing option.



DAFTAR PELANGGAN • CUSTOMERS LIST

Berdasarkan Area/Petugas Lapangan, ada fungsi filter.

Based on Area/Field Officer, with filter function.



ONLINE BILLING

Laporan penagihan secara *online* dapat dipantau oleh pelanggan dan juga menampung riwayat tagihan 2/6 bulan terakhir.

Customers can monitor the online billing reports, which also contains billing history up to the last 2 or 6 months.



INFO PELAYANAN & GANGGUAN • SERVICE AND PROBLEM INFO

Informasi pelayanan maupun perbaikan bisa diinformasikan secara berkala di kolom *news*.

Information on service or repair is distributed periodically at the news column.



CUSTOMER SERVICE

Pelayanan *customer service* 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

A 24-hour a day, 7-day a week customer service feature.

Planning

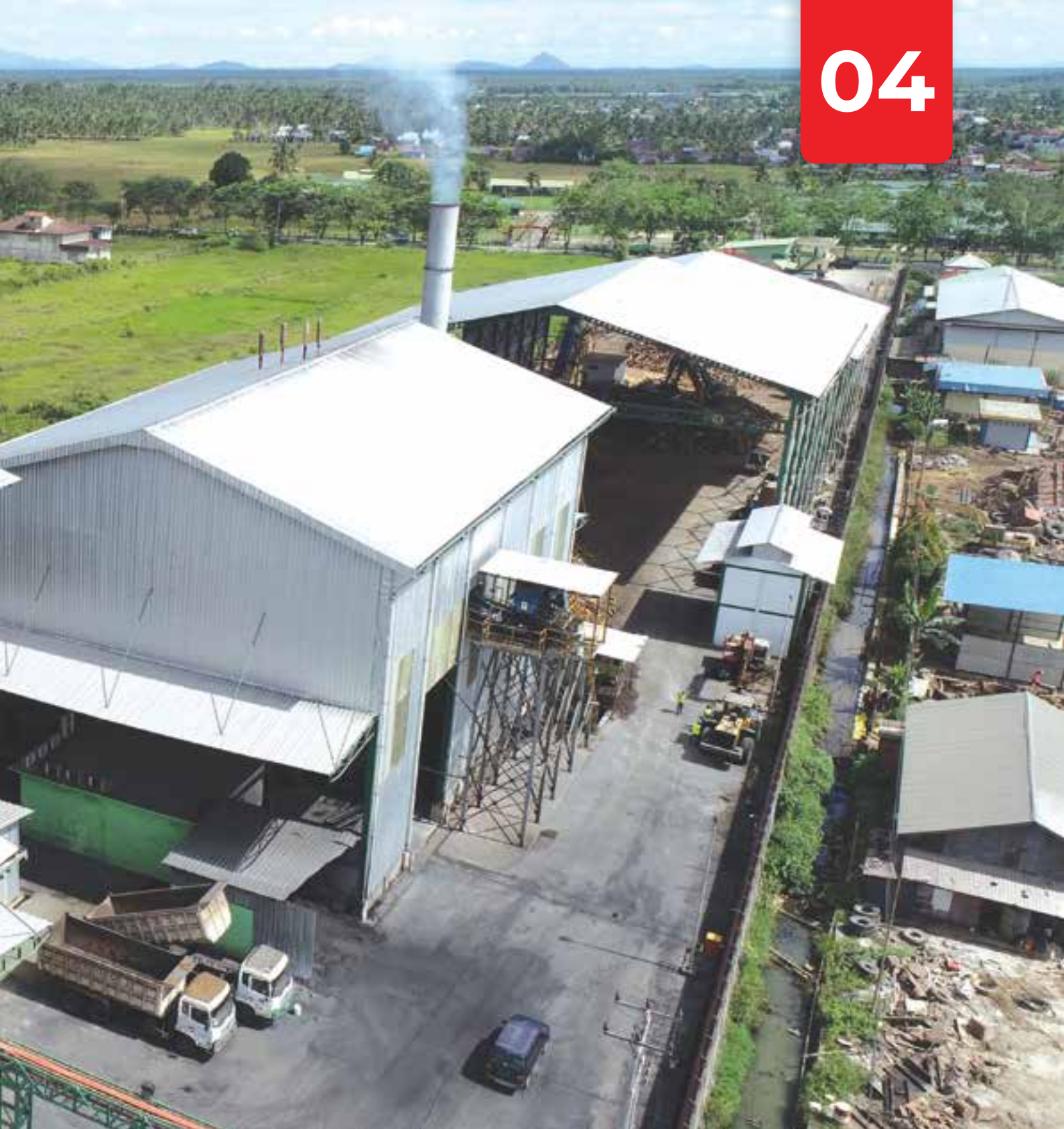
- Asset Database Management
- Asset Maintenance
- Customer Database





Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Kinerja baik yang berhasil dipertahankan oleh PT Nusantara Infrastructure Tbk di tahun 2020 yang penuh tantangan dijadikan sebagai landasan bagi Perusahaan dalam mewujudkan visi besar yang dipegang, yaitu menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur, serta turut menjadi bentuk dorongan akan peningkatan nilai Perusahaan untuk seluruh pemangku kepentingan.

The decent performance maintained by PT Nusantara Infrastructure Tbk amid challenges in 2020 became a foundation for the Company in achieving its great vision, namely to become a leading Indonesian company in infrastructure development and investment, as well as an encouragement to increase the Company's value to all stakeholders.



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

TINJAUAN EKONOMI TAHUN 2020

Perekonomian Global

Pada tahun 2020, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat seluruh dunia terdampak secara signifikan karena adanya pandemi Virus Covid-19. Penyebaran virus yang terjadi secara cepat dan masif mengakibatkan pemerintah di seluruh dunia menerapkan kebijakan pembatasan pada kegiatan sosial, tak terkecuali kegiatan ekonomi dan bisnis. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) sebagaimana dirangkum dalam laporannya dengan judul *World Economic Outlook Update* edisi Januari 2021, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diestimasikan berkontraksi sebesar -3,5%. Karantina wilayah (*lockdown*) yang dijalankan oleh banyak negara secara serentak di tahun 2020 dinilai menjadi penyebab adanya kondisi ekonomi yang tidak kondusif tersebut.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang bergerak ke arah negatif, surutnya aktivitas ekonomi di tahun 2020 turut memberikan dampak besar pada volume perdagangan dunia sehingga mengalami penyusutan sebesar -9,6%. Berdasarkan data yang dihimpun oleh IMF, di tahun 2020 juga tercatat harga minyak bumi mengalami penurunan dengan persentase yang cukup signifikan yakni sebesar -32,7%.

2020 ECONOMIC OVERVIEW

Global Economy

In 2020, the social and economic life of people around the world was significantly affected by the Covid-19 Virus pandemic. The rapid and massive spread of the virus has resulted in governments around the world implementing restrictions on social activities, including economic and business activities. According to the International Monetary Fund (IMF) as summarized in its report entitled *World Economic Outlook Update* for January 2021, the economic growth in 2020 was estimated to contract by -3.5%. The regional quarantine (*lockdown*) implemented by many countries simultaneously in 2020 was considered to be the cause of this unfavorable economic condition.

In line with economic growth moving in a negative direction, the decline in economic activity in 2020 also had a major impact on world trade volume, which experience a shrinkage of -9.6%. Based on the data compiled by the IMF, in 2020 the price of oil has decreased by a significant percentage of -32.7%.



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Perekonomian Nasional

Kondisi tidak kondusif akibat adanya pandemi Covid-19 juga terjadi pada ekonomi dalam negeri. Di tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia turut melakukan penerapan kebijakan pembatasan aktivitas dengan menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di beberapa daerah, terutama yang memiliki jumlah kasus positif Virus Covid-19 yang tinggi guna menekan laju penyebaran virus. Adanya PSBB ini turut mempengaruhi aktivitas sosial dan bisnis masyarakat Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut data yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kontraksi pertumbuhan terjadi pada perekonomian Indonesia di tahun 2020 sebesar -2,07% jika dibandingkan dengan perekonomian di tahun 2019. Terdapat adanya kontraksi sebesar -0,42% pada pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV-2020 dibandingkan dengan kuartal III-2020, sementara dibandingkan dengan yang tercatat pada kuartal IV-2019, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar -2,19%.

National Economy

The non-conducive condition due to the Covid-19 pandemic also occurred in the domestic economy. In 2020, the Government of the Republic of Indonesia implemented an activity-limiting policy by strict enforcement of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in several regions, especially in regions with a high number of positive cases of the Covid-19 Virus to reduce the virus' spread rate.

According to the data compiled by the Central Statistics Agency (BPS), growth contraction in the Indonesian economy in 2020 was -2.07% compared to the economy in 2019. There was a contraction of -0.42% in the national economic growth in quarter IV-2020 compared to quarter III-2020, while compared to what was recorded in quarter IV-2019, national economic growth contracted by -2.19%.



Hingga kini, Perusahaan telah membangun dan memelihara sinergi yang kuat dengan seluruh entitas usaha dengan total 4 (empat) entitas anak, 8 (delapan) entitas anak tidak langsung, dan 3 (tiga) entitas asosiasi.

To date, the Company has built and maintained strong synergies with all business entities in total of 4 (four) subsidiaries, 8 (eight) indirect subsidiaries, and 3 (three) associated entities.

TINJAUAN INDUSTRI INFRASTRUKTUR

Dibandingkan pergerakan industri infrastruktur di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2020 industri ini menunjukkan adanya perlambatan. Hal tersebut terjadi terutama disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi banyak sektor industri bisnis, termasuk salah satunya adalah sektor infrastruktur. Pemerintah sebelumnya telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengeluarkan anggaran untuk sektor infrastruktur sebesar Rp423,3 triliun, meningkat 7,4% dari anggaran di tahun 2019 sebesar Rp394,1 triliun.

Namun kemudian setelah melihat kondisi pandemi Covid-19 dan penyebaran virus yang semakin masif di tahun 2020, pemerintah mengambil langkah dengan mengalokasikan sebagian dari porsi anggaran infrastruktur untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, pengobatan pasien, peningkatan kapasitas dan kebutuhan medis, hingga dana untuk perlindungan sosial. Adanya alokasi dana tersebut menjadikan anggaran infrastruktur di tahun 2020 menurun menjadi Rp281,1 triliun.

Meski begitu, pemerintah di tahun 2020 tetap memegang teguh komitmennya untuk terus berupaya merealisasikan pembangunan infrastruktur nasional yang merata di tengah kondisi tidak stabil akibat pandemi Covid-19. Merujuk pada data yang telah dihimpun oleh Kementerian Keuangan, hingga akhir tahun 2020 terdapat beberapa proyek infrastruktur yang berhasil selesai dengan menggunakan anggaran dalam APBN 2020, antara lain seperti pembangunan jaringan irigasi dengan panjang mencapai 280,84 KM dan memiliki rata-rata fisik selesai mencapai 90,34%, sebanyak 45 bendungan dengan rata-rata fisik selesai mencapai persentase 53,61%, jalan baru dengan panjang hingga 208,74 KM, rehabilitasi pada jaringan irigasi dengan luas mencapai 160,515 hektare dan memiliki rata-rata fisik selesai 96,78% serta rehabilitasi jaringan irigasi yang memiliki rata-rata fisik selesai hingga 88,19%. Selain itu, proyek pembangunan rel kereta api dengan panjang 368,4 KM, jembatan dengan panjang 5.829,97 M, jaringan gas di 23 kabupaten/kota tersambung mencapai 92,43%, serta pembangunan 5 (lima) pelabuhan juga berhasil diselesaikan oleh pemerintah pada tahun 2020.

OVERVIEW OF THE INFRASTRUCTURE INDUSTRY

Compared to the movement in previous years, the infrastructure industry showed a slowdown in 2020. This happened mainly due to the Covid-19 pandemic, which affected many sectors of the business industry, including the infrastructure sector. The government previously prepared the State Budget (APBN) by issuing a budget for the infrastructure sector of Rp423.3 trillion, an increase of 7.4% from the 2019 budget of Rp394.1 trillion.

However, after seeing the conditions of the Covid-19 pandemic and the increasingly massive spread of the virus in 2020, the government took steps by allocating a portion of the infrastructure budget to support the handling of the Covid-19 pandemic in Indonesia. This included patient treatment, capacity building, medical needs, and funds for social protection. With this allocation of funds, the infrastructure budget in 2020 has decreased to Rp281.1 trillion.

Nevertheless, the government in 2020 still adhered to its commitment to relentlessly realize the equitable national infrastructure development in the midst of unstable conditions due to the Covid-19 pandemic. Referring to the data compiled by the Ministry of Finance, until the end of 2020, there have been several infrastructure projects that have been successfully completed using the budget in the 2020 State Budget, including the construction of irrigation networks with a length of 280.84 KM and a physical average of up to 90.34%, as many as 45 dams with an average physical completion reaching a percentage of 53.61%, new roads with lengths of up to 208.74 KM, rehabilitation of irrigation networks with an area of 160.515 hectares and an average physical completion of 96.78%, as well as rehabilitation of irrigation networks which had an average physical completion of up to 88.19%. In addition, the railway construction project with a length of 368.4 KM, a bridge with a length of 5,829.97 M, gas networks in 23 connected districts/cities reached 92.43%, and the construction of 5 (five) ports was also successfully completed by the government in 2020.

TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

PT Nusantara Infrastructure Tbk adalah perusahaan dengan bisnis usaha yang berorientasi di bidang infrastruktur dengan 4 (empat) sektor utama, yakni pengelolaan jalan tol, pelabuhan, penyediaan/pengelolaan air bersih, serta energi terbarukan.

Perusahaan melakukan investasi pada beberapa entitas anak usaha, baik langsung maupun tidak langsung serta entitas asosiasi yang bergerak di 4 (empat) sektor tersebut dengan tujuan untuk mencapai visi “Menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur” serta misi “Memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan standar tertinggi untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan nilai terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan”.

Hingga kini, Perusahaan telah membangun dan memelihara sinergi yang kuat dengan seluruh entitas usaha dengan total 4 (empat) entitas anak, 8 (delapan) entitas anak tidak langsung, dan 3 (tiga) entitas asosiasi.

Pendapatan per Segmen Usaha

Hingga akhir tahun 2020, tercatat Pendapatan Konsolidasian Perusahaan adalah sebesar Rp1,57 triliun, turun sebesar 1,41% dari Pendapatan Konsolidasian yang tercatat di tahun 2019, yakni sebesar Rp1,59 triliun. Segmen Pengelolaan Jalan Tol menyumbang sebesar 87,48% dan menjadi segmen usaha yang berkontribusi paling besar, kemudian diikuti oleh segmen Energi Terbarukan dengan kontribusi sebesar 7,81%, dan terakhir segmen Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih sebesar 4,71%.

Segmen Pengelolaan Jalan Tol pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada Pendapatannya sebesar 0,87% dengan mencatat besaran Rp1,37 triliun dibandingkan Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp1,36 triliun. Sementara pada segmen Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih, di tahun 2020 pada Pendapatannya tercatat sebesar Rp73,90 miliar dan mengalami penurunan hingga Rp15,73 miliar atau setara 17,55% dari besaran yang tercatat di tahun 2019, yakni sebesar Rp89,63 miliar. Sisi segmen Energi Terbarukan juga mengalami penurunan pada Pendapatannya hingga 13,14% dengan hasil sebesar Rp122,66 miliar dibandingkan Pendapatan di tahun 2019 sebesar Rp141,21 miliar.

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

PT Nusantara Infrastructure Tbk is a company with business-interests in four (four) main infrastructure sectors, namely toll roads management, seaports, clean water supply/management and renewable energy.

The Company invests in several subsidiaries, both directly and indirectly as well as associated entities engaged in these 4 (four) sectors with the aim of achieving the vision of “Becoming a leading Indonesian company in investment and infrastructure development” and the Company’s mission of “Meeting infrastructure needs with the highest standards to improve quality of life and create the best value for all stakeholders”.

To date, the Company has built and maintained strong synergies with all business entities in the form of 4 (four) subsidiaries, 8 (eight) indirect subsidiaries, and 3 (three) associated entities.

Revenue Per Business Segment

Until the end of 2020, the Company’s Consolidated Revenues were recorded at Rp1.57 trillion, decreased by 1.41% of the Consolidated Revenues recorded in 2019, which was Rp1.59 trillion. Toll Road Management segment contributed by 87.48% and was the business segment that contributed the most, followed by Renewable Energy segment with a contribution of 7.81%, and finally Clean Water Supply/Management segment with a contribution of 4.71%.

The Toll Road Management segment’s Revenues experienced a decrease by 0.87% in 2020 by recording an amount of Rp1.37 trillion compared to 2019’s Revenues of Rp1.36 trillion. The Clean Water Supply/Management segment in 2020 recorded a Revenue of Rp73.90 billion and decreased up to Rp15.73 billion or equal to 17.55% from the amount in 2019, which was Rp89.63 billion. Renewable Energy segment also experienced a decrease in Revenues up to 13.14% with the results of Rp122.66 billion compared to the Revenues in 2019 amounted to Rp141.21 billion.

(dalam jutaan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	2018	YOY 2019-2020
Pengelolaan Jalan Tol / Toll Road Management	1.373.555	1.361.752	505.133	0,87%
Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih Clean Water Supply/Management	73.904	89.634	86.986	-17,55%
Energi Terbarukan (sejak bulan Agustus 2018) Renewable Energy (since August 2018)	122.660	141.209	55.332	-13,14%
Pendapatan Konsolidasian / Consolidated Income	1.570.119	1.592.595	781.768	-1,41%

Persentase Kontribusi Pendapatan Segmen Usaha terhadap Pendapatan Konsolidasian**Percentage of Revenues Contribution of Business Segment to Consolidated Revenues**

Uraian / Description	2020	2019	2018
Pengelolaan Jalan Tol / Toll Road Management	87,48%	85,51%	64,61%
Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih / Clean Water Supply/Management	4,71%	5,63%	11,12%
Energi Terbarukan (sejak bulan Agustus 2018) Renewable Energy (since August 2018)	7,81%	8,87%	7,08%

Laba (Rugi) Tahun Berjalan per Segmen Usaha

Hasil Laba (Rugi) Tahun Berjalan Konsolidasian yang dibukukan Perusahaan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp112,62 miliar, turun 45,16% dari tahun 2019 sebesar Rp205,37 miliar. Segmen Pengelolaan Jalan Tol menjadi kontributor terbesar pada hasil Laba (Rugi) Tahun Berjalan di tahun 2020 dengan persentase mencapai 118,07%, yang kemudian diikuti oleh segmen Energi Terbarukan dengan persentase sebesar 7,65%, dan segmen Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih dengan sumbangan 1,51%.

Laba Tahun Berjalan dari segmen Pengelolaan Jalan Tol pada tahun 2020 mengalami penurunan 39,37% menjadi Rp132,97 miliar dari sebelumnya di tahun 2019 yang memiliki besaran nominal Rp219,31 miliar. Selanjutnya dari segmen Energi Terbarukan, tercatat di tahun 2020 Laba Tahun Berjalannya mencapai Rp8,62 miliar, turun 66,40% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp25,65 miliar. Kemudian dari segmen Penyediaan/pengelolaan Air Bersih, pada tahun 2020 telah membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp1,70 miliar, menurun 91,10% dari sebelumnya di tahun 2019 yang jumlahnya telah dibukukan sebesar Rp19,15 miliar. Terakhir dari segmen Pelabuhan, hingga akhir tahun 2020 jumlah Rugi Tahun Berjalan adalah sebesar Rp6,11 miliar, turun hingga 380,37% dari tahun 2019 yang memiliki Laba Tahun Berjalan sebesar Rp2,18 miliar.

Current Year Profit (Loss) Trends per Business Segment

The Consolidated Profit (Loss) Results for the Current Year that the Company booked in 2020 was Rp112.62 billion, decreased by 45.16% from 2019 amounting to Rp205.37 billion. Toll Road Management segment became the largest contributor to the Profit (Loss) for the Current Year in 2020 with a percentage reaching 118.07%, which was then followed by Renewable Energy segment with a percentage of 7.65%, and Clean Water Supply/Management segment with a contribution of 1.51%.

The Profit for the Current Year from the Toll Road Management segment in 2020 decreased by 39.37% to Rp132.97 billion from 2019 which had a nominal amount of Rp219.31 billion. Furthermore, the Renewable Energy segment recorded the 2020 Profit for the Current Year amounted to Rp8.62 billion, down by 66.40% compared to 2019 which was Rp25.65 billion. Next, from the Clean Water Supply/Management segment, the 2020 Profit for the Current Year was amounted to Rp1.70 billion, decreased by 91.10% from 2019, which amounted to Rp19.15 billion. Finally, from the Port segment, until the end of 2020 the amount of Profit for the Current Year was Rp6.11 billion, decreased by 380.37% from 2019 which amounted to Rp2.18 billion.

(dalam jutaan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	2018	YOY 2019-2020
Pengelolaan Jalan Tol / Toll Road Management	132.972	219.310	212.016	-39,37%
Investasi / Investment	79.303	89.988	227.571	-11,87%
Pelabuhan / Port	(6.112)	2.180	7.766	-380,37%
Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih Clean Water Supply/Management	1.704	19.151	17.799	-91,10%
Energi Terbarukan (sejak bulan Agustus 2018) Renewable Energy (since August 2018)	8.618	25.645	(1.193)	-66,40%
Laba Tahun Berjalan Konsolidasian Consolidated Earnings in Current Year	112.622	205.367	217.086	-45,16%

Persentase Kontribusi Laba Tahun Berjalan Segmen Usaha terhadap Laba Tahun Berjalan Konsolidasian

Percentage of Contribution of Current Year's Operating Profits Business Segments to Consolidated Current Year's Earnings

Uraian / Description	2020	2019	2018
Pengelolaan Jalan Tol / Toll Road Management	118,07%	106,79%	97,66%
Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih / Clean Water Supply/Management	1,51%	9,33%	104,83%
Pelabuhan / Port	-5,43%	1,06%	3,58%
Energi Terbarukan (sejak bulan Agustus 2018) Renewable Energy (since August 2018)	7,65%	12,49%	-0,55%

Jumlah Aset per Segmen Usaha

Hingga akhir tahun 2020, Jumlah Aset Konsolidasian Perusahaan mencapai Rp5,85 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 15,15% dari Jumlah Aset Konsolidasian di tahun 2019 sebesar Rp5,08 triliun. Segmen Pengelolaan Jalan Tol menjadi segmen usaha yang berkontribusi dengan jumlah terbesar hingga mencapai 76,56% yang kemudian disusul oleh segmen Energi Terbarukan dengan persentase 12,34% serta segmen Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih dengan persentase 7,08% dan segmen Pelabuhan dengan persentase 2,76%.

Tercatat pada tahun 2020 Jumlah Aset di segmen Pengelolaan Jalan Tol mengalami peningkatan menjadi Rp4,48 triliun dari tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp3,54 triliun dengan persentase kenaikan 26,54%. Kemudian di segmen Pelabuhan, hingga akhir tahun 2020 Jumlah Aset yang dimiliki mencapai Rp161,16 miliar, turun 3,68% dibandingkan nominal yang dimiliki di tahun 2019 yakni

Total Assets per Business Segment

Until the end of 2020, the Company's total Consolidated Assets reached Rp5.85 trillion. This amount increased by 15.15% of the Total Consolidated Assets in 2019 amounting to Rp5.08 trillion. Toll Road Management segment became the business segment that contributes with the largest number up to 76.56%, followed by Renewable Energy segment with a percentage of 12.34%, Clean Water Supply/Management segment with a percentage of 7.08%, and Port segment with a percentage of 2.76%.

The 2020 Total Assets in Toll Road Management segment increased to Rp4.48 trillion from 2019, which was recorded at Rp3.54 trillion with an increased percentage of 26.54%. Furthermore, in Port segment, until the end of 2020, the total assets owned reached Rp161.16 billion, decreased by 3.68% compared to the nominal owned in 2019, which was Rp167.33 billion. Furthermore, in the Clean Water Supply/

sebesar Rp167,33 miliar. Selanjutnya di segmen Penyediaan/ Pengelolaan Air Bersih, Jumlah Aset di tahun 2020 adalah sebesar Rp413,80 miliar, dan jumlah ini mengalami penurunan hingga 1,97% dari periode sebelumnya di tahun 2019 sebesar Rp422,13 miliar. Terakhir di segmen Energi, terjadi peningkatan dengan persentase 13,73% dari Rp634,47 miliar di tahun 2019 menjadi Rp721,58 miliar di tahun 2020.

Management segment, the total assets in 2020 amounted to Rp413.80 billion, and this amount decreased by 1.97% from the previous period in 2019 amounting to Rp422.13 billion. Finally, in the Renewable Energy segment, there was an increase with a percentage of 13.73% from Rp634.47 billion in 2019 to Rp721.58 billion in 2020.

(dalam jutaan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	2018	YOY 2019-2020
Pengelolaan Jalan Tol / Toll Road Management	4.476.152	3.537.338	3.285.066	26,54%
Investasi / Investment	2.642.400	2.481.186	1.492.009	6,50%
Pelabuhan / Port	161.164	167.327	182.707	-3,68%
Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih Clean Water Supply/Management	413.797	422.129	653.241	-1,97%
Energi Terbarukan (sejak bulan Agustus 2018) Renewable Energy (since August 2018)	721.577	634.472	645.410	13,73%
Jumlah Aset Konsolidasian / Total Consolidated Assets	5.846.683	5.077.400	4.305.691	15,15%

Persentase Kontribusi Jumlah Aset Segmen Usaha terhadap Aset Konsolidasian

Percentage of Contribution of Total Assets of Business Segments to Consolidated Assets

Uraian / Description	2020	2019	2018
Pengelolaan Jalan Tol / Toll Road Management	76,56%	69,66%	76,31%
Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih / Clean Water Supply/Management	7,08%	8,31%	15,17%
Pelabuhan / Port	2,76%	3,30%	7,10%
Energi Terbarukan (sejak bulan Agustus 2018) Renewable Energy (since August 2018)	12,34%	12,50%	14,99%

Pengelolaan 4 (empat) sektor utama Perusahaan tersebut dilakukan oleh entitas anak usaha. PT Margautama Nusantara (MUN) menjadi entitas anak usaha yang mengelola sektor Pengelolaan Jalan Tol dengan kepemilikan saham sebesar 74,98%, kemudian PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) menjadi pihak yang bertanggung jawab mengelola sektor Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%, selanjutnya PT Portco Infranasantara (Portco) adalah entitas anak usaha yang berperan menjalankan pengelolaan di sektor Pelabuhan dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%, dan terakhir PT Energi Infranasantara (EI) adalah perusahaan yang melakukan pengelolaan di sektor Energi Terbarukan dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%.

The management of the 4 (four) main sectors of the Company is carried out by the subsidiaries. PT Margautama Nusantara (MUN) becomes a subsidiary that manages the Toll Road Management sector with a share ownership of 74.98%, then PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) becomes the party responsible for managing the Clean Water Supply/Management sector with a share ownership of 99.99%. Next, PT Portco Infranasantara (Portco) is a subsidiary that plays a role in managing the Port sector with a share ownership of 99.99%, and finally PT Energi Infranasantara (EI) is a company that manages the Renewable Energy sector with share ownership of 99.99%.

SEGMENT USAHA PENGELOLAAN JALAN TOL

Pada segmen usaha Pengelolaan Jalan Tol, seluruh aktivitas usahanya dilaksanakan melalui PT Margautama Nusantara (MUN) yang merupakan entitas anak Perusahaan. MUN didirikan pada tahun 2007 dengan berfokus pada bisnis di bidang pengelolaan jalan tol. Di tahun 2013, Perusahaan mengakuisisi saham MUN dengan kepemilikan saham 75%. MUN memiliki 2 (dua) entitas anak yang keberadaannya turut mendukung MUN menjalankan bidang usahanya di industri jalan tol, yakni PT Bintaro Serpong Damai (BSD) dan PT Makassar Metro Network (MMN), serta 1 (satu) entitas anak tidak langsung yakni PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) dan 1 (satu) entitas asosiasi yakni PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB).

BSD adalah perusahaan yang memiliki tanggung jawab dalam memegang konsesi jalan tol sepanjang 7,25 KM yang terbentang antara Serpong dan Pondok Aren dengan keduanya berlokasi di Tangerang Selatan. MMN sebelumnya didirikan dengan nama PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) dan berubah menjadi PT Makassar Metro Network (MMN) pada tahun 2020 dan memegang konsesi jalan tol penghubung sepanjang 5,95 KM antara Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan Jalan A.P. Pettarani yang turut terhubung dengan Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). Pada tahun 2020, proyek pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani sepanjang 4,3 KM telah melalui Uji Laik Fungsi (ULF).

JTSE merupakan perusahaan yang memegang konsesi ruas Jalan Tol Seksi IV di Makassar yang memiliki jalur hingga mencapai 11,57 KM dan terhubung dengan ruas jalan tol yang dikelola dan dioperasikan oleh MMN, mulai dari Jembatan Tallo sampai dengan Simpang Mandai Makassar. Ruas tol ini juga menjadi jalur akses untuk menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Kemudian JLB merupakan entitas asosiasi yang bertugas mengoperasikan ruas jalan tol penghubung dengan panjang 9,7 KM antara Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan Penjaringan (kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng).

TOLL ROAD MANAGEMENT BUSINESS SECTOR

In the Toll Road Management business sector, all business activities are carried out through PT Margautama Nusantara (MUN), the Company's subsidiary. MUN was founded in 2007 with a business focus on toll road management. In 2013, the Company acquired MUN's shares with a 75% share ownership. MUN has 2 (two) subsidiaries whose existence supports MUN in running its business in the toll road industry, namely PT Bintaro Serpong Damai (BSD) and PT Makassar Metro Network (MMN), and 1 (one) indirect subsidiary, namely PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) and 1 (one) associated entity, namely PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB).

BSD is a company that has the responsibility of holding the 7.25 KM concession for toll roads that stretch between Serpong and Pondok Aren, both of which are located in South Tangerang. MMN was previously established under the name PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) and was changed to PT Makassar Metro Network (MMN) in 2020. It holds a 5.95 KM-connecting toll road concession between Soekarno-Hatta Port, Makassar, and A.P. Pettarani Road, which is also connected to Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). In 2020, the 4.3-KM A.P. Pettarani Elevated Toll Road has passed the Proper Function Test (ULF).

JTSE is a company that holds the concession for Section IV Toll Road in Makassar, which has lanes of up to 11.57 KM and is connected to the toll roads managed and operated by MMN, starting from the Tallo Bridge to Simpang Mandai Makassar. This toll road section is also an access point to get to Sultan Hasanuddin International Airport, Makassar. JLB is an associated entity in charge of operating the connecting toll road section with a length of 9.7 KM between Kebon Jeruk, West Jakarta, and Penjaringan (Soekarno-Hatta International Airport area, Cengkareng).

Kegiatan Operasional Tahun 2020

Tahun 2020 secara operasional menjadi tahun yang dinilai sangat menantang bagi segmen usaha Pengelolaan Jalan Tol. Hal tersebut ditandai dengan berbagai situasi penting yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan bisnis di segmen ini, antara lain pemberlakuan PSBB akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya volume lalu lintas yang terjadi di semua entitas anak usaha serta penyelesaian konstruksi Jalan Layang A.P. Pettarani yang khususnya berdampak pada volume lalu lintas di JTSE/MMN. Sedangkan pada BSD, terdapat adanya dampak positif pada volume lalu lintas BSD yang terjadi dikarenakan pengoperasian ruas tol Serpong-Kunciran yang dilakukan di bulan Desember 2019 melalui beberapa pintu gerbang yang terhubung dengan Ruas Serpong-Kunciran. Kendati terdapat kinerja positif, adanya pandemi Covid-19 juga memberikan dampak penurunan kontribusi volume dari Ruas Serpong-Kunciran.

Meskipun terjadi penurunan volume pada seluruh ruas entitas anak usaha MUN, situasi tersebut kemudian disikapi dengan senantiasa menjalankan optimalisasi pada aspek manajemen lalu lintas dan keselamatan berkendara, di antaranya dengan melalui upaya memastikan tersedianya rambu-rambu lalu lintas, optimalisasi petugas patroli dan pengawasan dari *control room*, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti petugas kepolisian dan dinas perhubungan.

Kinerja dan Profitabilitas Tahun 2020

Di tahun 2020, volume transaksi harian di grup MUN (BSD, JTSE, dan MMN) secara total rata-rata mengalami penurunan yang signifikan, yakni sebesar 27,2% menjadi 133,7 ribu di tahun 2020 dari 183,7 ribu yang tercatat di tahun 2019.

Adanya penurunan volume transaksi tersebut berpengaruh pada aspek pendapatan dan mendorong aspek pendapatan konsolidasi MUN turut mengalami penurunan sebesar 21,1%, dari Rp415,4 miliar di tahun 2019 menjadi Rp328,3 miliar di tahun 2020. Tercatat penurunan terbesar disumbang oleh PT JTSE dengan penurunan sebesar 28,8% dari Rp122,7 miliar di tahun 2019 menjadi Rp87,3 miliar di tahun 2020. Kemudian dari MMN, tercatat adanya penurunan pendapatan sebesar 20,3% dari Rp76,9 miliar di tahun 2019 menjadi Rp61,4 miliar di tahun 2020.

2020 Operational Activities

The year 2020 was considered as a very challenging year in terms of operation for the Toll Road Management business segment. This condition was marked by significant situations with influence on business development in this segment, including the implementation of the PSBB due to the Covid-19 pandemic, which had an impact on the decrease in traffic volume that occurs in all subsidiaries and the completion of the A.P. Pettarani Elevated Toll Road construction, which in particular had an impact on traffic volume in JTSE/MMN. Meanwhile in BSD, there was a positive impact on BSD traffic volume that occurred due to the operation of the Serpong-Kunciran toll road which was carried out in December 2019 through several gates connected to the Serpong-Kunciran toll road. Despite the positive performance, the Covid-19 pandemic also caused a decline on volume contribution of the Serpong-Kunciran Section.

Despite the decrease in volume across all segments of MUN's subsidiary, this situation was then addressed by continuously optimizing the aspects of traffic management and driving safety, including by ensuring the availability of traffic signs, optimizing patrol officers and supervision from the control room, as well as coordination with related parties such as police officers and transportation service.

2020 Performance and Profitability

In 2020, the daily transaction volume in the MUN group (BSD, JTSE, and MMN) on average experienced a significant decline, which was 27.2% to 133.7 thousand in 2020 from 183.7 thousand recorded in 2019.

The decrease in transaction volume affected the revenue aspect and prompted the consolidated revenue aspect of MUN to also decrease by 21.1%, from Rp415.4 billion in 2019 to Rp328.3 billion in 2020. The largest decline was contributed by PT JTSE with a decrease by 28.8% from Rp122.7 billion in 2019 to Rp87.3 billion in 2020. Then from MMN, there was a decline in revenue of 20.3% from Rp76.9 billion in 2019 to Rp61.4 billion in 2020.

Terakhir dari BSD tercatat penurunan yang terjadi adalah sebesar 16,8% dari Rp215,8 miliar di tahun 2019 menjadi Rp179,6 miliar di tahun 2020. Secara umum, pemberlakuan penyesuaian tarif secara penuh di seluruh entitas anak usaha yang terjadi di tahun 2020 berkontribusi pada tambahan pendapatan segmen Pengelolaan Jalan Tol sehingga kontraksi yang lebih dalam tidak terjadi pada penurunan pendapatan perusahaan.

Di samping itu, pendapatan iklan dari penyewaan billboard di tahun 2020 turut memberikan sumbangan sebesar 66% yang kemudian disusul pendapatan dari penyewaan utilitas untuk pipa avtur sebesar 14%, selanjutnya penyewaan utilitas untuk fiber optic sebesar 8%, dan sisanya lain-lain sebesar 12%.

Prospek Usaha

Terkait dengan prospek di tahun 2021, dari sisi internal terdapat beberapa prospek yang kemudian diharapkan bisa memberikan dampak positif, antara lain beroperasinya Tol Layang A.P. Pettarani di Makassar yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan volume dan pendapatan kepada MMN. Di samping itu, berjalannya pengoperasian ruas Ciputat-Serpong dan Kunciran-Bandara yang terhubung dengan ruas Serpong-Kunciran sebagai bagian dari JORR 2 juga diharapkan akan menyumbang tambahan volume kendaraan kepada BSD Tol.

Beberapa proyek pengembangan bisnis yang dirintis dalam rangka penambahan konsesi di ruas Tol BSD pun telah memperoleh dukungan dan persetujuan prinsip dari Kementerian PUPR, yakni Konstruksi Penanganan Banjir (Peninggian) pada KM 08+000 Jalan Tol Pondok Aren-Serpong yang telah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Bina Marga; Konstruksi Tidak Sebidang Ramp Junction Serpong dengan Exit Ramp Pamulang dan Pelebaran Jalan Arteri Exit Pamulang pada Jalan Tol Pondok Aren-Serpong dan telah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Bina Marga; dan Konstruksi Tidak Sebidang *On Ramp* Rawa Buntu pada Jalan Tol Pondok Aren-Serpong.

Finally, from BSD, there was a decrease of 16.8% from Rp215.8 billion in 2019 to Rp179.6 billion in 2020. In general, the full implementation of tariff adjustments across all subsidiaries that occurred in 2020 contributed to the additional revenue from the Toll Road Management segment, thus preventing a deeper contraction to occur in the decline in company revenues.

In addition, advertising revenue from billboard rentals in 2020 also contributed by 66%, which was then followed by revenue from utility rentals for avtur pipes by 14%, then utility rentals for fiber optics by 8%, and others by 12%.

Business Prospects

Regarding the prospect in 2021 from the internal sector, there are several prospects which are then expected to have a positive impact, including the operation of the A.P. Pettarani Elevated Toll Road in Makassar which is expected to contribute to increasing volume and revenue for MMN. In addition, the ongoing operation of the Ciputat-Serpong and Kunciran-Airport sections which are connected to the Serpong-Kunciran section as part of JORR 2 is also expected to contribute additional vehicle volume to the BSD Toll Road.

Several business development projects initiated in the context of adding concessions to the BSD Toll Road have also received support and principle approval from the Ministry of PUPR, namely Flood Management Construction (Elevation) at KM 08+000 Pondok Aren-Serpong Toll Road which has been approved by the Directorate General of Highways. Clan; Non-Plant Construction of the Serpong Junction Ramp with the Pamulang Exit Ramp and the Widening of the Pamulang Arterial Road on the Pondok Aren-Serpong Toll Road which has been approved by the Directorate General of Highways; and Rawa Buntu On Ramp Non-Planted Construction on the Pondok Aren-Serpong Toll Road.

Selain proyek penambahan lingkup, saat ini MUN juga sedang mengikuti Prakualifikasi Jalan Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR *Elevated*) Cikunir-Ulujami dan Proses Studi Kelayakan Jalan Tol Bandung *Intra Urban Toll Road* (BIUTR), serta pembangunan Akses Makassar *New Port*.

SEGMENT USAHA PELABUHAN

Perusahaan melakukan kegiatan usaha pada segmen Pelabuhan dengan melalui PT Portco Infranasantara (Portco) sebagai entitas anak. Perusahaan pada tahun 2011 mengakuisisi Portco dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%. Portco telah memiliki izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pada Oktober 2011 dalam bentuk Keputusan Menteri dari Menteri Perhubungan. Portco menjalankan aktivitas operasionalnya berupa pengoperasian pelabuhan di Lampung yang berlokasi di samping Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang melalui entitas asosiasi, yakni PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) dengan kepemilikan saham sebesar 39%

Kegiatan Operasional Tahun 2020

Program kerja ISAB di tahun 2020 dilakukan dengan fokus mengoptimalkan pendapatan, kegiatan operasional dan pelayanan yang optimal, serta memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Strategi pengelolaan kegiatan operasional dan pelayanan dilakukan dengan mengoptimalkan proses bongkar muat serta optimalisasi pemanfaatan dermaga. Pelabuhan yang dioperasikan oleh ISAB memiliki fasilitas *dry bulk* dan *liquid bulk*. Fasilitas ini lazim digunakan pada industri pupuk, gula dan minyak sawit (*Crude Palm Oil/CPO*), termasuk produk turunannya. Sampai dengan 31 Desember 2021, ISAB memiliki perjanjian kerja sama dengan Louis Dreyfus Commodities (LDC) dan dengan Sugarlabinta memiliki perjanjian kerja sampai dengan 2 November 2021 yang masing-masing bergerak di *industri refinery CPO* dan gula rafinasi.

Seiring perkembangan usaha, ISAB terus melakukan optimalisasi aktivitas bongkar muat serta pemanfaatan dermaga. Hingga tahun 2020, ISAB mencatat kepemilikan kapasitas *dry bulk* melalui jetty sebesar 374 kMT dan melalui gudang sebesar 12 kMT. Sedangkan untuk *liquid bulk* melalui jetty sebesar 663 kMT serta melalui kebun sebesar 464 kMT. Di samping itu, jumlah vessel menurun 4% dari 233 di tahun 2019 menjadi 224 di tahun 2020 dengan total volume kargo 1.513 kMT.

In addition to expansion projects, MUN is currently participating in the Prequalification of the Jakarta Outer Ring Road (JORR *Elevated*) Cikunir-Ulujami Toll Road and the Feasibility Study Process for the Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), as well as the construction of the Makassar New Port Access.

PORT BUSINESS SECTOR

The Company carries out business activities in the Port sector through PT Portco Infranasantara (Portco) as its subsidiary. In 2011, the Company acquired Portco with a 99.99% share ownership. Portco has obtained a Port Business Entity (BUP) license in October 2011 in the form of a Ministerial Decree from the Minister of Transportation. Portco carries out its operational activities in the form of operating a port in Lampung located next to Panjang Port Container Terminal through an associated entity, namely PT Intisentosa Alambahtera (ISAB), with 39% share ownership.

Operational Activities in 2020

ISAB's work programs in 2020 focused on optimizing revenues, operational activities, and services, as well as improving occupational safety and health. The management strategy for operational activities and services optimized loading and unloading process as well as dock utilization. The port operated by ISAB has dry bulk and liquid bulk facilities, which are commonly used for fertilizer, sugar, and Crude Palm Oil (CPO) industries, and its derivative products. As of December 31, 2021, ISAB had cooperation agreements with Louis Dreyfus Commodities (LDC) and with Sugarlabinta, which is valid until November 2, 2021. These companies are engaged in CPO refinery and granulated sugar industry, respectively.

Along with its business development, ISAB continued to optimize loading and unloading activities and dock utilization. Until 2020, ISAB recorded dry bulk capacity through jetty t 374 kMT and through warehouse at 12kMT. Meanwhile, liquid bulk capacity through jetty was at 663 kMT and through plantation at 464 kMT. In addition, total vessels decreased by 4% from 233 in 2019 to 224 in 2020 with total cargo volume at 1,513 kMT.

Pengembangan ini juga dibarengi dengan peningkatan pengelolaan keselamatan kesehatan kerja, dan lingkungan. Terkait lingkungan, ISAB telah mengantongi sertifikat *International Sustainability and Carbon Certification* (ISCC) sebagai bukti komitmennya terhadap kaidah keamanan dan kelestarian lingkungan dalam suplai CPO.

Kinerja dan Profitabilitas Tahun 2020

Pada tahun 2020, ISAB membukukan pendapatan sebesar Rp 89.6 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp97,22 miliar dengan laba bersih tahun 2020 sebesar -Rp8,55 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp15,03 miliar. Penurunan atas laba bersih tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran sewa lahan kepada Pelindo II untuk periode 2016 – 2020 sebesar Rp14,16 miliar yang dibukukan perusahaan di dalam beban umum dan administrasi. Profitabilitas ISAB juga mengalami penurunan 157%, dengan penyusutan rasio utang dan aset terhadap ekuitas menjadi 1,82 kali dan 2,82 kali dari 1,56 kali dan 2,56.

This development was accompanied by improved management of occupational health, safety, and environment. ISAB has owned International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) as a proof of its commitment to environmental safety and conservation in supplying CPO.

Performance and Profitability in 2020

In 2020, ISAB posted revenues amounting to Rp89.6 billion compared to that of 2019 at Rp97.22 billion. Net profit in 2020 amounted to -Rp8.55 billion compared to that of 2019 at Rp15.03 billion. Such decrease in net profit was mainly due to the payment of land rent to Pelindo II for 2016 – 2020 period amounting to Rp14.16 billion, which was recorded as general and administrative expenses. ISAB's profitability also decreased by 157%, with reduction in debt and assets to equity ratios to 1.82 times and 2.82 times from 1.56 times and 2.56 times, respectively.

Kapasitas Tangki Penyimpanan (Metrik Ton)

2020	2019	2018
105.000	105.000	105.000

Storage Tank Capacity (Metric Tons)

Loading & Unloading Komoditas (Metrik Ton)

Jenis Cargo Cargo Type	2020	2019	2018
Dry Cargo	385.557	461.917	677.970
Liquid Cargo	1.127.285	1.462.007	1.258.840
Total	1.512.842	1.923.924	1.936.810

Commodity Loading & Unloading (Metric Tons)

Jumlah Kapal Loading & Unloading di Pelabuhan ISAB (Unit Kapal)

Jenis Cargo Cargo Type	2020	2019	2018
Dry Cargo	9	12	17
Liquid Cargo	215	221	198
Total	224	233	215

Total Loading & Unloading Vessels in ISAB Port (Vessel Unit)

Prospek Usaha

1. Pengembangan usaha LDC dengan pembangunan Glycerin Plant kapasitas 240 ton/day dan filling line kapasitas 225 ton/bulan.
2. Penambahan pipa penghubung dari lini 1 (dermaga) ke Dermaga Pelindo dan TBL (Tunas Baru Lampung) untuk membantu pembongkaran CPO dari tongkang saat terjadi congesti di Dermaga ISAB.

Business Prospects

1. Development of LDC business through the construction of Glycerin Plant with a capacity of 240 tons/day and filling line with a capacity of 225 tons/month.
2. Addition of connecting pipes from line 1 (dock) to Pelindo and TBL (Tunas Baru Lampung) Docks to support CPO unloading from barges in the event of congestion in ISAB Dock.

3. Penambahan pompa ekspor 2 unit dengan kapasitas 500 mt/jam di Lini 2 untuk mempercepat proses Loading (ekspor) melalui pipanisasi ke Dermaga ISAB.
4. Pengembangan jangka menengah dengan rencana pembangunan 5 unit tanki timbun @ 4,000 tons dan 1 unit tanki Methanol @ 5.000 ton di line 1, sebagai tanki konsolidasi (kawasan non-berikat).

3. Addition of 2 units of export pumps with a capacity of 500 mt/hour in Line 2 to accelerate loading (export) process through piping to ISAB Dock.
4. Medium-term development with the planned construction of 5 storage tanks @ 4,000 tons and 1 unit of Methanol tank @ 5,000 tons in line 1 as consolidation tank (non-bonded zone).

SEGMENT USAHA PENYEDIAAN AIR BERSIH

Segmen Usaha Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih dijalankan Perusahaan melalui entitas anak usahanya, yakni PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% yang berdiri sejak tahun 2011.

Pada tahun 2012, Potum mengakuisisi saham PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) sebesar 51%, kemudian pada tahun 2018 kepemilikan sahamnya meningkat menjadi sebesar 100%. Di tahun yang sama, Potum juga mengakuisisi PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) sebesar 51% yang memiliki kontrak pengelolaan air bersih di Medan, Sumatera Utara dan pada tahun 2019 telah ditingkatkan menjadi sebesar 74,52%. Kemudian pada tahun 2013, Potum mengakuisisi saham PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) sebesar 65% yang berfokus pada pengolahan dan pendistribusian air bersih di Kabupaten Serang, Banten.

Kegiatan Operasional Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan melalui entitas anak usaha, Potum, mengoperasikan tiga instalasi pengolahan air bersih atau *Water Treatment Plant* (WTP), yaitu Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM WTP) yang berada di Cikokol, Tangerang, Banten; Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK WTP) di Serang, Banten, dan Dain Celicani Cemerlang (DCC WTP) di Medan, Sumatera Utara. Dari ketiga WTP tersebut Perusahaan berhasil memenuhi kebutuhan air bersih untuk wilayah perkotaan, industri dan perniagaan yang berada di ketiga WTP tersebut berada.

Kinerja dan Profitabilitas Tahun 2020

Di tahun 2020, Segmen Usaha Air Bersih berhasil mencatatkan kinerja dan profitabilitas yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kontribusi Segmen Usaha Air Bersih terhadap Pendapatan Perusahaan yaitu

CLEAN WATER SUPPLY BUSINESS SECTOR

The Clean Water Supply/Management Business Sector is run by the Company through its subsidiary, namely PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) with 99.99% share ownership, which was founded in 2011.

In 2012, Potum acquired 51% shares in PT Tirta Bangun Nusantara (TBN), and its shares ownership increased to 100% in 2018. In the same year, Potum also acquired PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) by 51%, which has a clean water management contract in Medan, North Sumatra, and in 2019 this shares ownership has increased to 74.52%. Then in 2013, Potum acquired shares of PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) by 65%, which focuses on processing and distributing clean water in Serang Regency, Banten.

2020 Operational Activities

Throughout 2020, the Company through its subsidiary, Potum, operated three water treatment plants (WTP), namely Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM WTP) in Cikokol, Tangerang, Banten; Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK WTP) in Serang, Banten, and Dain Celicani Cemerlang (DCC WTP) in Medan, North Sumatra. Of the three WTPs, the Company has succeeded in meeting the needs of clean water for urban, industrial and commercial areas near the three WTPs.

2020 Performance and Profitability

In 2020, the Clean Water Business Segment managed to record a fairly good performance and profitability. This can be seen from the increasing contribution of the Clean Water Business Segment to the Company's Revenues,

sebesar Rp73,90 miliar dan Laba Bersih sebesar Rp1,62 miliar. Pendapatan Segmen Air Bersih ini dikontribusikan oleh entitas anak usaha, yaitu Potum, entitas anak tidak langsung yaitu SCTK, DCC, dan TBN. Dalam masa Pandemi Covid-19 Segmen Usaha Air bersih masih mampu menunjukkan kinerja yang baik. Jumlah volume air yang didistribusikan ke pelanggan masih sama dengan tahun lalu meskipun dalam masa pandemi.

Prospek Usaha

Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Pemerintah pada periode 2020-2024 difokuskan pada tiga kerangka utama yaitu infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan. Air bersih yang menjadi kebutuhan dasar menjadi salah satu perhatian pemerintah dan masuk ke dalam infrastruktur pelayanan dasar. Mengingat cakupan wilayah Indonesia yang sangat luas dengan jumlah penduduk mencapai 269 juta jiwa, Pemerintah memerlukan peran swasta untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia.

NI sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang investasi dan infrastruktur hadir untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan air bersih. Melalui segmen usaha Air Bersih, Perusahaan berupaya merealisasikan target Agenda Pembangunan Nasional Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 untuk meningkatkan pertumbuhan produksi air bersih sebesar 7,1 % per tahun hingga tahun 2019.

Kebutuhan terhadap air bersih ini tidak hanya didominasi oleh masyarakat, tapi lingkungan bisnis juga memerlukan ketersediaan air bersih yang cukup dan berkelanjutan. Besarnya peluang dalam bisnis penyediaan air bersih ini, menjadikan prospek usaha Perusahaan di Segmen Usaha Air Bersih sangat baik. Perusahaan optimis dapat meningkatkan kinerja Segmen Usaha Air Bersih di tahun 2020 dengan lebih baik lagi.

which was Rp73.90 billion and Net Profit of Rp1.62 billion. Revenues from the Clean Water Segment was contributed by subsidiaries, namely Potum, indirect subsidiaries, namely SCTK, DCC, and TBN. During the Covid-19 Pandemic, the Clean Water Business Segment was still able to show good performance. The volume of water distributed to the customers was still the same as last year despite the pandemic.

Business Prospects

The infrastructure development launched by the Government in the 2020-2024 period is focused on three main frameworks, namely basic service infrastructure, economic infrastructure, and urban infrastructure. Clean water, which is a basic need, is one of the government's concerns and is included in basic service infrastructure. Given Indonesia's vast territory with a population of 269 million, the Government needs the private sector to be able to meet the needs of clean water for all Indonesians.

NI as a business actor engaged in investment and infrastructure is here to support government programs in clean water provision. Through the Clean Water business segment, the Company seeks to realize the target of the Government's National Development Agenda as stated in the 2015 – 2019 National Medium Term Development Plan (RPJMN) to increase clean water production growth by 7.1% per year until 2019.

The need for clean water is not only dominated by the community, but the business environment also requires the availability of sufficient and sustainable clean water. The vast opportunity in the clean water supply business makes the Company's business prospects in the Clean Water Business Segment even better. The Company believes that it can further improve the performance of the Clean Water Business Segment in 2020.

Untuk pengembangan usaha, di tahun 2020, Perusahaan sedang melakukan beberapa kajian pra studi kelayakan maupun uji tuntas dalam beberapa proyek air bersih, dan diharapkan sudah selesai tahun depan serta menambah portfolio perusahaan.

SEGMENT USAHA ENERGI TERBARUKAN

Melalui PT Energi Infranasantara (EI) yang didirikan pada tahun 2012, Perusahaan menjalankan bisnis usahanya di Segmen Usaha Energi Terbarukan dengan fokus utama pada pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang menjadi salah satu program yang dicanangkan pemerintah. Hingga akhir tahun 2020, kepemilikan saham Perusahaan di EI adalah sebesar 99,99%.

Di tahun 2013, EI melakukan akuisisi saham PT Inpol Meka Energi (IME) dengan kepemilikan saham sebesar 61,23%. IME sendiri merupakan perusahaan *Independent Power Producer* (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung yang berlokasi di Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2020, PLTA dengan kapasitas 2x7,5 MW telah selesai dibangun dan sudah mulai beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak 17 Desember 2020.

Kemudian pada tahun 2018, EI mengakuisisi PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestara (RPSL), perusahaan *Independent Power Producer* (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Siantan, Mempawah, Kalimantan Barat sebesar 80%. PLTBm ini telah beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak 23 April 2018.

Kegiatan Operasional Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun dengan berbagai tantangan. Walaupun di awal tahun 2020 RPSL memiliki kinerja penjualan listrik yang menurun, perusahaan dapat mengatasi masalah tersebut dan mampu menjual volume listrik lebih tinggi di kuartal kedua dan seterusnya hingga akhir tahun dibandingkan dengan tahun 2019. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kegiatan operasional RPSL di tahun 2020 tidak dipengaruhi oleh terjadinya pandemi COVID-19.

For business development, in 2020, the Company is conducting several pre-feasibility studies and due diligence in several clean water projects, and is expected to be completed next year and add to the company's portfolio.

RENEWABLE ENERGY BUSINESS SECTOR

Through PT Energi Infranasantara (EI) which was established in 2012, the Company runs its business in the Renewable Energy Business Sector with a major focus on developing Renewable Energy (EBT), one of the programs launched by the government. Until the end of 2020, the Company's share ownership in EI was 99.99%.

In 2013, EI acquired PT Inpol Meka Energi (IME)'s shares with 56.23% shares. IME is an Independent Power Producer (IPP) company for the 15 MW Lau Gunung Hydroelectric Power Plant (PLTA) located in Tanah Pinem, Dairi Regency, North Sumatra Province. In 2020, a 2x7.5 MW-capacity PLTA has been completed and has had a Commercial Operating Date (COD) since December 17, 2020.

In 2018, EI acquired PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestara (RPSL), an Independent Power Producer (IPP) company for Biomass Power Plants (PLTBm) in Siantan, Mempawah, West Kalimantan, with 80% shares ownership. This PLTBm has had a Commercial Operating Date (COD) since April 23, 2018.

2020 Operational Activities

The year 2020 was a year with various challenges. Even though at the beginning of 2020 RPSL had decreased electricity sales performance, the Company was able to overcome this problem and was able to sell a higher volume of electricity in the second quarter and beyond until the end of the year compared to 2019. This action also showed that RPSL's operational activities in 2020 were not affected by the COVID-19 pandemic.

Pada kuartal terakhir tahun 2020, konstruksi pembangunan PLTA Lau Gunung 2 x 7.5 MW selesai dilakukan. Sebelum resmi mulai beroperasi (COD) pada tanggal 17 Desember 2020, pembangkit telah melalui masa *commissioning* dan memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada tanggal 12 Desember 2020, sehingga mampu membukukan pendapatan untuk satu bulan.

Kinerja dan Profitabilitas Tahun 2020

Pada tahun 2020, kontributor terbesar untuk pendapatan EI, sama seperti tahun lalu, berasal dari RPSL. Dari total pendapatan Rp122.7 miliar, kontribusi pendapatan dari IME adalah sebesar Rp87 juta. Hal tersebut dikarenakan bahwa PLTA Lau Gunung baru resmi beroperasi pada pertengahan bulan Desember 2020. Secara keseluruhan, tingkat profitabilitas EI mengalami penurunan di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. EI membukukan laba bersih sebesar Rp8.6 miliar di akhir tahun 2020.

Prospek Usaha

Kinerja EI pada tahun 2021 diperkirakan akan stabil dan bahkan kembali meningkat dengan lebih tingginya penjualan volume produksi RPSL serta semakin besarnya kontribusi pendapatan dari IME. Kedua hal tersebut diharapkan akan meningkatkan tingkat profitabilitas EI dibandingkan tahun 2020. EI akan terus mengembangkan usahanya dalam bidang energi baru dan terbarukan (EBT), dengan menaruh perhatian yang lebih dalam mengembangkan potensi pembangkit tenaga air, biomassa, surya, dan sampah.

TINJAUAN KEUANGAN

Seluruh informasi yang disajikan dalam sub bab ini dirangkum berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan entitas anak yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota Ernst & Young) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019. Penyusunan Laporan Keuangan telah dilakukan dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia dan telah memenuhi kriteria standar penyajian informasi.

The construction of the 2 x 7.5 MW Lau Gunung Hydroelectric Power Plant (PLTA) was completed in the last quarter of 2020. Before officially starting its operation (COD) on December 17, 2020, the plant had gone through the commissioning period and obtained an Operation Eligible Certificate (SLO) on December 12, 2020 to be able to book revenues for one month.

2020 Performance and Profitability

In 2020, the largest contributor to EI's revenue, the same as last year, will come from RPSL. Of the total revenue of Rp122.7 billion, the contribution of revenues from IME was Rp87 million, as Lau Gunung hydropower plant was officially operational in mid-December 2020. Overall, EI's profitability level decreased in 2020 when compared to the previous year. EI posted a net profit of Rp8.6 billion at the end of 2020.

Business Prospects

EI's performance in 2021 is expected to increase again with higher sales of RPSL production volume and a greater contribution to revenues from IME. Both of these are expected to increase the level of EI's profitability compared to 2020. EI will continue to develop its business in the field of new and renewable energy (EBT), by paying more attention to developing hydropower, biomass, solar and waste potentials.

FINANCIAL OVERVIEW

All information presented in this sub-chapter is summarized based on the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries which have been audited by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Member) for the years ended on December 31, 2020 and 2019. Financial Statements have been prepared by referring to the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia and have met the standard criteria for presenting information.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**Income Statements and Other Consolidated Comprehensive Income**

(dalam jutaan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Pendapatan dan Penjualan / Revenues and Sales			
Pendapatan Usaha dan Penjualan / Revenues and Sales	517.204	630.173	-17,93
Pendapatan Usaha Lainnya / Other Operating Income	21.200	18.905	12,14
Pendapatan Konstruksi / Construction Revenues	1.031.715	943.517	9,35
Jumlah / Total	1.570.119	1.592.595	-1,41
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan / Direct Costs and Cost of Sales			
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan / Direct Costs and Cost of Sales	(200.986)	(214.591)	-6,34
Beban Konstruksi / Construction Costs	(1.031.715)	(943.517)	9,35
Jumlah / Total	(1.232.701)	(1.158.108)	6,44
Laba Kotor / Gross Profit	337.418	434.487	-22,34
Beban Umum dan Administrasi / General and Administrative Expenses	(172.698)	(157.265)	9,81
Beban Operasional Lainnya – Bersih / Other Operating Expenses – Net	(31.956)	2.832	-1228,39
Laba Usaha / Operating Profit	132.764	261.149	-49,16
Penghasilan (Beban) Lain-lain / Other Income (Expenses)	2.880	38.688	-92,56
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	135.644	299.837	-54,76
Beban Pajak Penghasilan / Income Tax Expenses	(23.022)	(94.470)	-75,63
Laba Tahun Berjalan / Profit For The Year	112.622	205.367	-45,16
(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive (Loss)/Income	(17.104)	624	-2841,03
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	95.518	205.991	-53,63
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: / Profit for the Year Attributable To:			
Pemilik Entitas Induk / Owners of Parent Entity	69.392	143.814	-51,75
Kepentingan Non Pengendali / Non-Controlling Interests	43.230	61.553	-29,77
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: / Profit for the Year Attributable To:			
Pemilik Entitas Induk / Owners of Parent Entity	57.939	144.019	-59,77
Kepentingan Non Pengendali / Non-Controlling Interests	37.579	61.972	-39,36
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah) / Earnings per Basic Share (in Rupiah)	3,92	8,12	-51,72

Pendapatan Usaha dan Penjualan

Pendapatan usaha dan penjualan pada tahun 2020 tercatat berada di angka Rp517,20 miliar, menurun dari tahun 2019 sebesar Rp630,17 miliar dengan persentase penurunan sebesar 17,93% atau setara dengan Rp112,97 miliar. Menurunnya pendapatan usaha dan penjualan ini disebabkan terutama oleh menurunnya volume *traffic* jalan tol, volume penjualan listrik, dan air bersih sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020.

Revenues and Sales

Revenues and sales in 2020 were recorded at Rp517.20 billion, decreased from 2019 amounting to Rp630.17 billion with a decreasing percentage of 17.93% or equivalent to Rp112.97 billion. The decrease in revenues and sales was mainly due to declining traffic volume of toll roads, electricity sales, and clean water due to the COVID-19 pandemic that engulfed Indonesia since 2020.

Dari segmen usaha Pengelolaan Jalan Tol, pendapatan tahun 2020 naik 0,87% menjadi Rp1,37 triliun dari sebelumnya di tahun 2019 sebesar Rp1,36 triliun di mana hal tersebut terjadi terutama karena pendapatan konstruksi atas pembangunan tol Pettarani. Namun, dari sisi volume traffic jalan tol, segmen ini mengalami penurunan karena dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020.

Kemudian dari segmen usaha Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih hingga akhir tahun 2020 tercatat pendapatan yang berhasil dibukukan adalah sebesar Rp73,90 miliar dan mengalami penurunan sebesar 17,55% dibandingkan pendapatan tahun 2019 sebesar Rp89,63 miliar. Hal tersebut terjadi akibat adanya penurunan volume penjualan air bersih sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia.

Selanjutnya pendapatan segmen usaha energi terbarukan turun sebesar 13,14% dari pendapatan tahun 2019 dengan jumlah Rp141,21 miliar menjadi Rp122,66 miliar pada tahun 2020. Adanya penurunan tersebut terutama karena penurunan volume penjualan tenaga listrik sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia.

Di samping itu, terdapat adanya peningkatan pada pendapatan konstruksi Perusahaan menjadi sebesar Rp1.031,72 miliar pada tahun 2020 dari sebelumnya di tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp943,52 miliar. Kenaikan sebesar 9,35% ini terjadi disebabkan oleh adanya peningkatan nilai konstruksi pembangunan jalan tol layang Pettarani.

Beban-Beban

Hingga akhir tahun 2020, beban langsung dan beban pokok perusahaan mengalami penurunan 6,34% atau sebanyak Rp13,60 miliar menjadi Rp200,99 miliar dari sebelumnya di tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp214,59 miliar. Peningkatan ini terutama dikarenakan penurunan volume *traffic* jalan tol. Sementara di segmen penjualan air bersih dan listrik, beban langsung dan beban pokok mengalami peningkatan yang disebabkan adanya perbedaan alokasi biaya gaji dan tunjangan yang dicatat pada tahun 2020 dan 2019.

Revenues from the Toll Road Management sector in 2020 increased by 0.87% to Rp1.37 trillion from 2019 amounted to Rp1.36 trillion. This was mainly due to construction revenues from the construction of the Pettarani toll road. However, in terms of toll road traffic volume, this segment has decreased due to the impact of the COVID-19 pandemic that has hit Indonesia since March 2020.

The revenues from Clean Water Supply/Management sector until the end of 2020 was Rp73.90 billion and experienced a decrease of 17.55% compared to the 2019 revenues of Rp89.63 billion. This was due to a decrease in the volume of clean water sales as a result of the COVID-19 pandemic that hit Indonesia.

Furthermore, revenues from renewable energy sector decreased by 13.14% from the 2019 revenues amounting to Rp141.21 billion to Rp122.66 billion in 2020. The decline was mainly due to a decrease in the volume of electricity sales as a result of the COVID-19 pandemic that hit Indonesia.

In addition, there was an increase in the Company's construction revenues to Rp1,031.72 billion in 2020 from 2019, which was previously recorded at Rp943.52 billion. The 9.35% increase was due to an increase in the construction value of the Pettarani elevated toll road.

Expenses

Until the end of 2020, both direct expenses and principal expenses decreased by 6.34% or as much as Rp13.60 billion to Rp200.99 billion from 2019 which was previously recorded at Rp214.59 billion. This increase was mainly due to a decrease in toll road traffic volume. Meanwhile, in the clean water and electricity sales segment, direct expenses and cost of goods increased due to differences in the allocation of salaries and allowances recorded in 2020 and 2019.

Pada sektor Pengelolaan Jalan Tol, tercatat adanya penurunan sebanyak 15,86% pada jumlah biaya dari tahun 2019 sebesar Rp119,18 miliar menjadi Rp100,28 miliar di tahun 2020 yang disebabkan oleh penurunan volume *traffic* jalan tol.

Kemudian di sektor Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih, jumlah biaya naik 8,02% di tahun 2020 menjadi Rp27,01 miliar dari jumlah biaya di tahun 2019 sebesar Rp25,00 miliar. Kenaikan ini terjadi karena adanya biaya perbaikan pengelolaan air bersih dan biaya overhead lainnya.

Sektor energi pada tahun 2020 mengalami peningkatan 4,68% di jumlah biayanya dengan besaran mencapai Rp73,69 miliar dibandingkan jumlah biaya di tahun 2019 yang memiliki nominal mencapai Rp70,40 miliar. Terjadinya peningkatan ini terutama disebabkan adanya alokasi biaya gaji yang pada tahun 2019 dicatat sebagai beban administrasi umum sedangkan pada tahun 2020 dicatat sebagai beban pokok penjualan tenaga listrik.

Sementara pada aspek beban konstruksi, Perusahaan mencatat adanya peningkatan pada tahun 2020 sebesar 9,35% menjadi Rp1.031,71 miliar dari beban konstruksi di tahun 2019 sebesar Rp943,52 miliar. Penyebab peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pendapatan konstruksi atas pembangunan jalan tol layang Pettarani.

Laba Usaha, Laba Sebelum Pajak, dan Laba Tahun Berjalan

Laba usaha Perusahaan pada tahun 2020 tercatat mengalami penurunan sebesar 49,16% menjadi Rp132,76 miliar dari sebelumnya di periode 2019 tercatat sebesar Rp261,14 miliar. Menurunnya laba usaha terjadi disebabkan penurunan volume *traffic* jalan tol, volume penjualan listrik, dan air bersih sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020.

In Toll Road Management sector, there was a 15.86% decrease in total costs from Rp119.18 billion in 2019 to Rp100.28 billion in 2020 due to a decrease in toll road traffic volume.

Next, in the Clean Water Supply/Management sector, the total cost increased by 8.02% in 2020 to Rp27.01 billion from the total cost in 2019 of Rp25.00 billion. This increase was due to the cost of improving clean water management and other overhead costs.

In 2020, the energy sector experienced an increase of 4.68% in total costs reaching Rp73.69 billion compared to the total costs in 2019 which had a nominal value of Rp70.40 billion. This increase was mainly due to the allocation of salary costs which in 2019 were recorded as general administrative expenses, while in 2020 they were recorded as cost of goods sold for electricity.

Meanwhile, in the construction cost aspect, the Company recorded an increase in 2020 by 9.35% to Rp1,031.71 billion from construction expenses in 2019 of Rp943.52 billion. The reason for this increase was mainly due to an increase in construction revenue from the construction of the Pettarani elevated toll road.

Operating Income, Profit Before Tax and Net Income for the Year

The Company's operating profit in 2020 experienced a decrease by 49.16% to Rp132.76 billion from the 2019 period, where it was recorded at Rp261.14 billion. The decline in operating profit occurred due to a decrease in toll road traffic volume, electricity sales volume, and clean water as a result of the COVID-19 pandemic that has hit Indonesia since March 2020.

Kemudian pada laba sebelum pajak, di tahun 2020 memiliki nominal sebesar Rp135,64 miliar, turun 54,76% dibandingkan nominal tahun 2019 sebesar Rp299,83 miliar. Laba sebelum pajak mengalami penurunan terutama dikarenakan penurunan volume *traffic* jalan tol, volume penjualan listrik, dan air bersih sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020.

Selanjutnya, laba bersih tahun berjalan hingga akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp112,62 miliar, menurun 45,16% dari Rp205,37 miliar pada tahun 2019. Adanya penurunan ini terutama dikarenakan penurunan volume *traffic* jalan tol, volume penjualan listrik, dan air bersih sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020.

(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lainnya

Pada tahun 2020, pendapatan komprehensif lainnya menurun sebanyak 2841,03% atau setara Rp17,73 miliar menjadi Rp(17,10) miliar dari sebelumnya laba Rp0,62 miliar di tahun 2019. Menurunnya pendapatan komprehensif ini terjadi terutama dikarenakan peningkatan kerugian yang belum terealisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia dijual.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Hingga 31 Desember 2020, laba komprehensif tahun berjalan Perusahaan berada di nominal Rp95,52 miliar dan mengalami penurunan sebesar Rp110,47 miliar dengan persentase 53,63% dari laba komprehensif tahun berjalan di tahun 2019 yang berada di nominal Rp205,99 miliar. Penurunan ini terutama dipicu oleh adanya penurunan volume *traffic* jalan tol, volume penjualan listrik, dan air bersih sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 serta kerugian belum terealisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

In terms of profit before tax in 2020, it had a nominal value of Rp135.64 billion, a decrease by 54.76% compared to the nominal in 2019 of Rp299.83 billion. Profit before tax decreased mainly due to a decrease in toll road traffic volume, sales volume of electricity, and clean water as a result of the COVID-19 pandemic that hit Indonesia since March 2020.

Furthermore, net profit for the year as of the end of 2020 was Rp112.62 billion, a decrease of 45.16% from Rp205.37 billion in 2019. This decline was mainly due to a decrease in toll road traffic volume, sales volume of electricity and clean water as the impact of the COVID-19 pandemic that has hit Indonesia since March 2020.

Other Comprehensive Income

In 2020, other comprehensive income decreased by 2841.03% or equivalent to Rp17.73 billion to Rp(17.10) billion from the previous profit of Rp0.62 billion in 2019. The decline in comprehensive income was mainly due to an increase in unrealized losses on changes in the fair value of available-for-sale financial assets.

Total Comprehensive Income for the Year

As of 31 December 2020, the nominal value of the Company's comprehensive income for the year was at Rp95.52 billion and decreased by Rp110.47 billion with a percentage of 53.63% of the comprehensive income for the year in 2019 which was at a nominal value of Rp205.99 billion. This decline was mainly triggered by a decrease in toll road traffic volume, electricity sales volume and clean water as a result of the COVID-19 pandemic that has hit Indonesia since March 2020 as well as unrealized losses on financial assets available for sale.

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN****ASET**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan (%) <i>Growth (%)</i>
Aset Lancar / Current Assets	643.801	813.662	-20,88
Aset Tidak Lancar / Non Current Assets	5.202.882	4.263.737	22,03
Jumlah Aset / Total Assets	5.846.683	5.077.400	15,15

Aset lancar Perusahaan pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp643,80 miliar dan dibandingkan dengan nominal di tahun 2019 sebesar Rp813,66 miliar, terdapat adanya penurunan sebesar Rp169,86 miliar atau 20,88% yang terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas yang terutama digunakan untuk pembelian aset tak berwujud dan aset tetap, serta untuk operasional perusahaan.

Di samping itu, aset tidak lancar Perusahaan hingga akhir tahun 2020 tercatat Rp5,20 triliun, meningkat hingga 22,03% atau setara dengan Rp939,15 miliar dari aset tidak lancar di tahun 2019 yang memiliki besaran Rp4,26 triliun. Meningkatnya aset tidak lancar di tahun 2020 ini terutama terjadi karena penambahan aset tak berwujud atas Proyek Jalan Tol Pettarani.

**STATEMENTS OF CONSOLIDATED
FINANCIAL POSITION****ASSETS**

(in million Rupiah)

The Company's current assets in 2020 reached Rp643.80 billion and compared to the nominal in 2019 of Rp813.66 billion, there was a decrease of Rp169.86 billion or 20.88% which was mainly due to a decrease in cash and cash equivalents which were mainly used for the purchase of intangible assets and fixed assets, as well as company operations.

In addition, the Company's non-current assets by the end of 2020 was Rp5.20 trillion, an increase of 22.03 or equal to Rp939.15 billion of the non-current assets in 2019, which amounted to Rp4.26 trillion. The increase in non-current assets in 2020 was mainly due to the addition of intangible assets to the Pettarani toll road project.

LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan (%) <i>Growth (%)</i>
Liabilitas / Liability			
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liability	499.998	481.639	3,81
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liability	1.991.578	1.401.974	42,06
Jumlah Liabilitas / Total Liability	2.491.576	1.883.613	32,28
Ekuitas / Equity			
Jumlah Ekuitas / Total Equity	3.355.108	3.193.787	5,05
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liability and Equity	5.846.683	5.077.400	15,15

LIABILITY AND EQUITY

(in million Rupiah)

Liabilitas Perusahaan hingga 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.491,58 miliar dan jika dibandingkan liabilitas di tahun 2019 yang memiliki jumlah sebesar Rp1.883,61 miliar tercatat mengalami peningkatan sebesar 32,28% atau setara dengan Rp607,96 miliar. Adanya penerimaan pinjaman bank menjadi penyebab terjadinya peningkatan pada liabilitas Perusahaan di tahun 2020.

The Company's liabilities as of 31 December 2020 amounted to Rp2,491.58 billion and if compared to the liabilities in 2019 which amounted to Rp1,883.61 billion, an increase of 32.28% or equivalent to Rp607.96 billion. The existence of bank loan receipts was the cause of an increase in the Company's liabilities in 2020.

Sementara aspek Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp161,32 miliar atau 5,05% dari Rp3.193,79 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp3.355,11 miliar pada tahun 2020. Kenaikan pada jumlah ekuitas ini terutama terjadi dikarenakan oleh laba bersih yang diterima Perusahaan pada tahun berjalan.

Meanwhile, the Equity aspect experienced an increase of Rp161.32 billion or 5.05% from Rp3,193.79 billion in 2019 to Rp3,355.11 in 2020. The increase in total equity was mainly due to the net profit received by the Company in the current year.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows from Operating Activities	264.870	371.502	-28,70
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flows Used in Investing Activities	(1.216.773)	(724.563)	67,93
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Used in Financing Activities	727.835	279.661	160,26
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net Decrease of Cash and Cash Equivalents	(224.068)	(73.401)	205,27
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	590.393	663.794	-11,06
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	366.325	590.393	-37,95

STATEMENTS OF CONSOLIDATED CASH FLOW

(in million Rupiah)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perusahaan membukukan arus kas dari aktivitas operasi di tahun 2020 adalah sebesar Rp264,87 miliar dan mengalami penurunan sebesar Rp106,63 miliar dengan persentase 28,70% dibandingkan nilai di tahun 2019 sebesar Rp371,50 miliar. Terjadinya penurunan ini dikarenakan penurunan penerimaan dari pelanggan sebagai akibat dari menurunnya pendapatan dan penjualan pada tahun 2020.

Cash Flow from Operating Activities

The Company recorded a cash flow from operating activities in 2020 amounting to Rp264.87 billion and experiencing a decrease of Rp106.63 billion with a percentage of 28.70% compared to the value in 2019 amounting to Rp371.50 billion. This decrease was due to a decrease in receipts from customers as a result of declining revenues and sales in 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas investasi Perusahaan tercatat sebesar Rp1.216,77 miliar, naik sebanyak Rp492,21 miliar atau sebesar 67,93% dari nominal yang tercatat di tahun 2019 sebesar Rp724,56 miliar karena adanya perolehan aset tak berwujud atas pembangunan Tol Layang Pettarani.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Hingga akhir tahun 2020, arus kas dari aktivitas pendanaan memiliki besaran Rp727,84 miliar, sedangkan jumlah di tahun 2019 sebesar Rp279,66 miliar, sehingga tercatat adanya peningkatan sebesar 160,26% atau setara Rp448,17 miliar. Naiknya jumlah ini terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank yang digunakan Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek yang sedang berjalan.

Cash Flow from Investing Activities

In 2020, the cash flow from the Company's investing activities was recorded at Rp1,216.77 billion, increased by Rp492.21 billion or as much as 67.93% of the nominal recorded in 2019 of Rp724.56 billion due to the acquisition of intangible assets for the construction of the Pettarani elevated toll road.

Cash Flow from Financing Activities

Until the end of 2020, cash flow from financing activities amounted to Rp727.84 billion, while the amount in 2019 was Rp279.66 billion, as such there was an increase of 160.26% or the equivalent of Rp448.17 billion. The increase was mainly caused by the receipt of bank loans used by the Company to finance ongoing projects.

RASIO-RASIO KEUANGAN**FINANCIAL RATIOS**

Uraian / Description	2020	2019
Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio		
Modal Kerja Bersih (dalam jutaan Rupiah) / Net Working Capital (in million Rupiah)	143.803	427.446
Rasio Lancar / Current Ratio	128,76%	188,75%
Rasio Kas / Cash Ratio	136,49%	81,58%
Rasio Operasi / Operating Ratio		
Rasio Margin Kotor / Gross Margin Ratio	21,49%	27,28%
Margin Usaha / Operating Margin	8,46%	16,40%
Margin Laba Bersih / Net Profit Margin	7,17%	12,90%
Margin EBITDA / EBITDA Margin	15,36%	19,53%
Tingkat Pengembalian Aset / Return on Assets	1,19%	2,83%
Tingkat Pengembalian Ekuitas / Return on Equity	2,07%	4,50%
Rasio Leverage / Leverage Ratio		
Rasio Utang terhadap Ekuitas / Debt to Equity Ratio	59,96%	42,58%
Rasio Utang terhadap Aset / Debt to Assets Ratio	34,41%	26,78%
Debt Service Coverage Rasio / Debt to Service Coverage Ratio	0,72x	0,15x
Interest Coverage	20,93%	19,66%

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perusahaan melakukan penentuan solvabilitas dengan berlandaskan pada 3 (tiga) indikator utama, yakni rasio *gearing* bersih, rasio liabilitas terhadap jumlah aset, serta rasio EBITDA terhadap utang berbunga. Solvabilitas Perusahaan pada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan ketiga indikator tersebut tercantum dalam tabel sebagai berikut:

ABILITY TO PAY DEBTS

The Company determines its solvency based on 3 (three) main indicators, namely the net gearing ratio, liabilities to total assets ratio, and EBITDA to interest bearing debt ratio. The Company's solvency in 2019 and 2020 based on the three indicators is listed in the table as follows:

Uraian Description	Perbandingan (dalam kali lipat) Comparison (times)	
	2020	2019
Rasio Gearing Bersih / Net Gearing Ratio	0,49	0,24
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset / Liabilities to Total Assets Ratio	0,42	0,37
Rasio EBITDA terhadap Jumlah Utang Berbunga / EBITDA to Interest Bearing Debt Ratio	0,12	0,26

KOLEKTABILITAS PIUTANG

Di tahun 2020, Perusahaan mencatat rata-rata periode kolektibilitas piutang berada di kisaran 19,22 hari. Angka ini lebih cepat jika dibandingkan rata-rata pada periode tahun 2019, yakni kisaran 21,99 hari dan menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitas Perusahaan terbilang sehat dengan jumlah piutang usaha mencapai Rp28,74 miliar, dan dari jumlah tersebut hanya sekitar 55,43% atau Rp15,93 miliar yang memiliki waktu jatuh tempo dengan lebih dari 30 hari.

RECEIVABLE COLLECTABILITY

In 2020, the Company recorded an average collectability period of accounts receivable in the range of 19.22 days. This figure was faster than the average numbers in the 2019 period, which was in the range of 21.99 days and showed that the Company's collectability level was fairly healthy with the amount of trade receivables reaching Rp28.74 billion and of that amount only around 55.43% or Rp15.93 billion had a maturity date of more than 30 days.

STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE

Uraian Description	Kontribusi (Dalam Miliar Rupiah) Contribution (In Billion Rupiah)		Kontribusi (%) Contribution (%)		Persentase Pertumbuhan Growth Percentage
	2020	2019	2020	2019	
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	1.992	1.402	37,25%	30,50	22,14%
Ekuitas / Equity	3.355	3.194	62,75%	69,50	9,71%
Jumlah Sumber Dana Jangka Panjang Total Long Term Source of Funds	5.347	4.596	100,00%	100,00	16,34%

Kemampuan Perusahaan dalam menjalankan pembiayaan pembelanjaan modal dengan tujuan untuk mencapai kepentingan pengembangan bisnis usaha tergambar melalui struktur modal yang dimiliki. Perusahaan secara umum mengedepankan pembiayaan dengan melalui kas internal dan/atau pembiayaan dari bank yang telah ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan belanja barang modal dan proyek baru.

The Company's ability to carry out capital expenditure financing with the aim of achieving business development interests is reflected in the capital structure it owns. Companies generally prioritize financing through internal cash and/or financing from existing banks to meet the needs for capital expenditures and new projects.

Hingga akhir tahun 2020, Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan tercatat memiliki besaran nominal mencapai Rp1,99 triliun, naik dari besaran di tahun 2019 yakni Rp1,40 triliun. Adanya kenaikan ini terjadi disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank yang digunakan Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek yang sedang berjalan.

Sementara aspek Ekuitas Perusahaan di tahun 2020 juga turut mengalami peningkatan menjadi Rp3,35 triliun dari sebelumnya di tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp3,19 triliun. Peningkatan ini terutama dikarenakan laba bersih yang diabsorpsi Perusahaan pada tahun berjalan.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Struktur modal Perusahaan menjadi aspek yang senantiasa diperhatikan oleh Perusahaan untuk menjaga kemampuan kinerja keuangan agar tetap stabil. Untuk itu, komitmen untuk memastikan dan memelihara aspek kesehatan rasio Laba terhadap Ekuitas (*Return on Equity*) dan rasio-rasio lain yang ditetapkan oleh pemberian pinjaman senantiasa dipegang teguh dan dilaksanakan oleh Perusahaan dalam menjalankan bisnis usahanya. Rasio-rasio tersebut dijadikan sebagai bagian dari pengelolaan modal Perusahaan untuk mendukung tercapainya kelancaran dalam aktivitas bisnis yang dilakukan dan berdampak pada terwujudnya nilai tambah bagi seluruh pihak, terutama Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

Until the end of 2020, the Company's Non-Current Liabilities were recorded at a nominal amount of up to Rp1.99 trillion, increased from 2019 amounted to Rp1.40 trillion. This increase occurred due to the receipt of bank loans used by the Company to finance ongoing projects.

Meanwhile, the Company's Equity aspect in 2020 also experienced an increase to Rp3.35 trillion from 2019, which amounted to Rp3.19 trillion. This increase was mainly due to the net profit absorbed by the Company in the current year.

Management Policy on Capital Structure

The Company's capital structure is an aspect that the Company always pays attention to in order to maintain its financial performance capability to remain stable. To that end, the Company's commitment to ensuring and maintaining the healthy aspect of the Return on Equity ratio and other ratios determined by lending is always upheld and implemented by the Company in its business. These ratios are used as part of the Company's capital management to support the smooth running of its business activities and have an impact on the creation of added value for all parties, especially Shareholders and Stakeholders.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

Pihak Pertama <i>First Party</i>	Pihak Kedua <i>Second Party</i>	Tujuan Ikatan <i>Objective of Bond</i>	Sumber Dana <i>Source of Funds</i>	Mata Uang <i>Currency</i>	Proteksi Risiko <i>Risk Protection</i>
PT Inpolo Meka Energi	PT Pembangunan Perumahan	Proyek PLTA Lau Gunung Lau Gunung Hydropower Plant Project	Ekuitas dan Uang Bank Equity and Bank Loan	Rupiah	-
PT Inpolo Meka Energi	PT Sulindo Putra Timur	Proyek PLTA Lau Gunung Lau Gunung Hydropower Plant Project	Ekuitas dan Uang Bank Equity and Bank Loan	Rupiah	-
PT Makassar Metro Network	PT Wijaya Karya Beton Tbk	Proyek Pettarani Pettarani Project	Ekuitas Equity	Rupiah	-

Pihak Pertama <i>First Party</i>	Pihak Kedua <i>Second Party</i>	Tujuan Ikatan <i>Objective of Bond</i>	Sumber Dana <i>Source of Funds</i>	Mata Uang <i>Currency</i>	Proteksi Risiko <i>Risk Protection</i>
PT Makassar Metro Network	PT Nippon Koei Co., Ltd.	Proyek Pettarani Pettarani Project	Utang Loan	USD	-
PT Makassar Metro Network	PT Indokoei International	Proyek Pettarani Pettarani Project	Utang Loan	Rupiah	-
PT DCC	PT Suryanata	Proyek Penambahan Reservoir Reservoir Addition Project	Ekuitas Equity	Rupiah	-
PT Sarana Catur Tirtakelola	PT KSB Sales Indonesia	<i>Spare Part</i> Pompa Lumpur Mud Pump Spare Part	Ekuitas Equity	Rupiah	-
PT Sarana Catur Tirtakelola	PT Infratek Makmur Bersama	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sambungan Pelanggan Baru ke PT Batavia Indo Global dan PT ALU Prima II Pipe Joint Installation and Procurement Work of New Customer to PT Batavia Indo Global and PT ALU Prima II	Ekuitas Equity	Rupiah	-
PT Sarana Catur Tirtakelola	PT Maxon Prime Technology	<i>Sludge Pump</i>	Ekuitas Equity	Rupiah	-

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mendukung pengembangan bisnis usaha Perusahaan dan mencapai keberlanjutan bisnis di masa mendatang. Investasi yang dilakukan oleh Perusahaan salah satunya merupakan Investasi Barang Modal atau *Capital Expenditure* yang didefinisikan sebagai aktivitas pengeluaran dana dengan tujuan untuk membeli sejumlah Aset atau Investasi dengan harapan dapat menunjang kelangsungan usaha dan menghadirkan nilai tambah yang bermanfaat di masa depan.

Di tahun 2020, Perusahaan melakukan investasi Barang Modal melalui penambahan pada aset konsesi & non konsesi dengan nilai yang terealisasi mencapai Rp1.214,79 miliar. Rincian terkait investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

GOODS AND CAPITAL INVESTMENT

Investment is one of the steps taken by the Company to support the development of the Company's business and achieve business sustainability in the future. One of the investments made by the Company is Capital Expenditure which is defined as the activity of spending funds with the aim of buying a number of assets or investments with the hope of supporting business continuity and presenting added value that is useful in the future.

In 2020, the Company invested in Capital Goods through the addition of concessional & non-concession assets with a realized value of Rp1,214.79 billion. The details regarding the capital goods investment made by the Company in 2020 are as follows:

(dalam jutaan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian / Description	Tujuan / Objectives	Nilai / Value
Pembelian asset konsesi / Purchase of concession assets	Belanja modal / Capital expenditure	1.128.779
Pembelian asset non konsesi / Purchase of non-concession assets	Belanja modal / Capital expenditure	86.018
Jumlah / Total		1.214.797

PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN AKUNTAN

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 – Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diotorisasi, Grup masih mengevaluasi dampak potensial penerapan peraturan pelaksana PP 35/2021, termasuk dampaknya pada laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode pelaporan berikutnya.

Pembiayaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Pembiayaan

Pada tanggal 29 Desember 2020, Potum, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melalui PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penjamin dengan jumlah pokok tidak lebih dari Rp95.000.000.000.

Fasilitas tersebut terdiri dari :

- Tranche A Rp67.500.000.000 untuk melunasi sisa fasilitas kredit ICBC termasuk pembayaran bunga, penalti, dan biaya lain terkait pelunasan Fasilitas Kredit ICBC.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE ACCOUNTANT'S REPORTING DATE

Government Regulation No. 35 of 2021 - Job Creation Law

On February 2, 2021, the Government promulgated and enforced Government Regulation Number 35 of 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation which aims to create the widest possible employment opportunities.

PP 35/2021 regulates employment agreements for a certain period of time (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest periods and termination of employment, which may affect the minimum benefit benefits that must be provided to employees.

As of the authorization date of the consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of implementing the implementing regulations of PP 35/2021, including the impact on the Group's consolidated financial statements for the next reporting period.

Refinancing Loans to Financing Institutions

On December 29, 2020, Potum, a subsidiary, obtained a loan facility from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) through PT Bank Central Asia Tbk as a Guarantee Agent with a principal amount of not more than Rp95,000,000,000.

The facilities consist of:

- Tranche A Rp67,500,000,000 to pay off the remaining ICBC credit facility including payment of interest, penalties, and other costs related to the repayment of the ICBC Credit Facility.

- Tranche B Rp22.750.000.000 untuk melunasi sebagian pinjaman pemegang saham SCTK kepada Potum.
- Tranche C Rp3.000.000.000 untuk mendanai sebagian jumlah minimal *debt service reserve account*.
- Tranche D Rp1.750.000.000 untuk membayar seluruh biaya dan pengeluaran terkait pemberian Fasilitas.

Perjanjian pinjaman antara Potum dan IIF memiliki JIBOR 3 bulan dan margin sebesar 5,1%, dan dengan jaminan sebagai berikut:

- Gadai saham
- Surat Kesanggupan
- Jaminan perusahaan
- Jaminan gadai rekening atas rekening transaksi
- Hak Tanggungan
- Dokumen Jaminan Fidusia
- Perjanjian Pengalihan

Pada tanggal 6 Januari 2021, sesuai dengan Perjanjian Novasi atas Pinjaman, Potum mengalihkan pinjaman tersebut kepada SCTK, entitas anak tidak langsung. Maka segala hak dan kewajiban beralih secara hukum kepada SCTK sejak tanggal efektif sampai dengan 10 tahun ke depan. Tanggal efektif tersebut diartikan saat setelah syarat-syarat perjanjian novasi terpenuhi dan tidak boleh lebih dari 12 bulan setelah tanggal perjanjian ini.

Perjanjian ini berlaku efektif dalam hal syarat-syarat di bawah ini telah terpenuhi :

- Penyerahan semua persetujuan korporasi SCTK
- Penyerahan SIPA (Izin Pengusahaan SDA berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 364/KPTS/M/2019) yang telah diperbarui mengambil air baku minimal 350 liter/sec dari sungai Cijung
- Penyerahan semua persetujuan korporasi dari Pemilik Kewajiban
- Pemberi Pinjaman telah menerima pendapat hukum
- Pembukaan rekening-rekening BCA oleh SCTK yang akan menggantikan rekening pembayaran kewajiban dan rekening cadangan pembayaran kewajiban setelah terjadinya novasi pinjaman

- Tranche B Rp22,750,000,000 to pay off part of SCTK's shareholder loan to Potum.
- Tranche C Rp3,000,000,000 to partially fund the minimum debt service reserve account.
- Tranche D Rp1,750,000,000 to pay all costs and expenses related to the provision of the Facility.

The loan agreement between Potum and IIF has a 3-month JIBOR and a margin of 5.1 %, with the following collaterals:

- Pawn shares
- Letter of Intent
- Company guarantee
- Guaranteed pawning on account transactions
- Mortgage right
- Fiduciary Guarantee Documents
- Transfer Agreement

On January 6, 2021, pursuant to the Novation Agreement on Loans, Potum transferred the loan to SCTK, an indirect subsidiary. Therefore, all rights and obligations are legally transferred to SCTK from the effective date until the next 10 years. The effective date is defined as the time after the terms of the novation agreement are fulfilled and cannot be more than 12 months after the date of this agreement.

This agreement is effective if the following requirements have been fulfilled:

- Submission of all SCTK corporate approvals
- Submission of the updated SIPA (SDA Concession Permit based on the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing No. 364/KPTS/M/2019) taking raw water of at least 350 liters/sec from the Cijung river
- Submission of all corporate approvals from Liability Owner
- The Lender has received a legal opinion
- The opening of BCA accounts by SCTK which will replace the liability payment account and the obligation payment reserve account after the loan novation occurs

Sampai dengan penyelesaian tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, syarat-syarat tersebut belum terpenuhi. Pinjaman ini masih dalam tanggung jawab Potum terhitung 12 bulan semenjak perjanjian Potum dengan IIF.

DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Risiko mata uang merupakan risiko dengan kondisi nilai wajar mengalami fluktuasi akibat adanya perubahan pada nilai tukar mata uang asing dan berpengaruh pada pendapatan dan pengeluaran. Perusahaan hingga akhir tahun 2020 menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan uang asing dan menjadikan pendapatan dan pengeluaran Grup hampir seluruhnya dilakukan dalam mata uang Rupiah, sehingga perubahan nilai tukar mata uang asing tidak berdampak besar pada aktivitas usaha dan Perusahaan tidak memiliki kebijakan khusus terkait risiko ini.

Dalam melakukan pengelolaan liabilitas Grup, digunakan instrumen keuangan derivatif terutama *cross currency swaps* oleh Grup sesuai dengan kebijakan keuangan yang telah dimiliki.

PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI

Uraian <i>Description</i>	Target 2020 <i>2020 Target</i>	Realisasi 2020 <i>2020 Realization</i>	Pencapaian Target (%) <i>Target Achievements (%)</i>
Pendapatan dan Penjualan <i>Revenues and Sales</i>	103.689.805.764	89.599.712.523	86
Laba Bruto / Gross Profit	62.053.799.504	39.224.967.602	63
Laba Usaha / Operating Profit	5.368.093.321	(8.547.537.485)	-159
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	5.368.093.321	(8.547.537.485)	-159
Aset / Assets	(73.783.634.687)	(103.031.929.143)	140
Liabilitas / Liabilities	(72.266.854.888)	(56.581.760.699)	78
Ekuitas / Equity	103.689.805.764	89.599.712.523	86

ASPEK PEMASARAN

Guna meningkatkan kualitas kinerja dengan pengembangan portofolio usaha, Perusahaan menjalankan berbagai strategi pemasaran yang dinilai tepat untuk mendukung hal

As of the completion date of these consolidated financial statements, these requirements have not been fulfilled. This loan is still under Potum's responsibility as of 12 months from the Potum agreement with IIF.

IMPACT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATES

Currency risk is a risk with conditions in which the fair value fluctuates due to changes in foreign currency exchange rates and affects income and expenses. Until the end of 2020, the Company carried out its business activities using foreign currency and made almost all of the Group's revenues and expenditures denominated in Rupiah, so that changes in foreign currency exchange rates did not have a major impact on business activities and the Company did not have a specific policy regarding this risk.

In managing the Group's liabilities, derivative financial instruments, especially cross currency swaps, are used by the Group in accordance with the existing financial policies.

COMPARISON OF TARGETS WITH REALIZATION

MARKETING ASPECTS

In order to improve the quality of performance by developing a business portfolio, the Company carries out various marketing strategies that are considered appropriate to

tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui pembentukan konsorsium untuk segmen usaha jalan tol yang digunakan untuk berpartisipasi dalam tender yang dikelola oleh badan pengelola segmen usaha terkait, seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Di samping itu, Perusahaan juga berpartisipasi dalam berbagai pameran infrastruktur nasional maupun internasional yang dinilai memiliki potensi besar dalam menghadirkan kerja sama baru di masing-masing segmen usaha Perusahaan.

Perusahaan juga secara aktif memantau aspek-aspek seperti potensi akuisisi atau merger yang dapat timbul sewaktu-waktu dalam rangka peningkatan aset, profitabilitas, hingga pemenuhan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Selain itu, Perusahaan juga melakukan inisiasi pada sejumlah proyek infrastruktur yang ada di daerah-daerah, sehingga mampu turut mendukung pemerintah dalam menjalankan percepatan dan pemerataan pembangunan nasional.

KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Terkait dengan kebijakan dan pembayaran dividen, Perusahaan mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan terkait dividen, mencakup ada atau tidaknya serta mekanisme pembagian dividen yang seluruhnya dilakukan dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tahun 2020, tidak terdapat adanya pembagian dividen serta dana digunakan untuk tujuan kepentingan Perusahaan dan karena ekspansi Perusahaan yang sedang berlangsung.

support this. One of the strategies implemented is through the formation of a consortium for the toll road business segment that is used to participate in tenders managed by the management agency of the relevant business segment, such as the Toll Road Regulatory Agency (BPJT).

In addition, the Company also participates in various national and international infrastructure exhibitions which are considered to have great potential in presenting new collaborations in each of the Company's business segments.

The Company also actively monitors aspects such as potential acquisitions or mergers that may arise at any time in order to increase assets, profitability, and fulfill the interests of shareholders and stakeholders. In addition, the Company also initiates a number of infrastructure projects in the regions to support the government in carrying out the acceleration and equitable distribution of national development.

DIVIDEND PAYMENT AND POLICY

Regarding the policies and dividend payments, the Company refers to the prevailing regulations, namely Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association. Through the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors has the authority to determine policies related to dividends, including whether or not there is a dividend distribution mechanism, all of which are carried out with the approval of the Board of Commissioners.

Based on the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held in 2020, there was no distribution of dividends and funds were used for the purposes of the Company's interests and due to the Company's ongoing expansion.

PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dikarenakan adanya *Right Issue* di tahun 2018, Perusahaan mulai Desember 2019 hingga Desember 2020 diwajibkan untuk melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) Hasil *Right Issue* di Desember 2020.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Sifat Hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi tertentu. Sifat dari hubungan Grup dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	Sifat dari Hubungan <i>Nature and Relationship</i>	Sifat dari Transaksi <i>Transaction Nature</i>
PT Intisentosa Alambahtera	Entitas asosiasi tidak langsung Associate entity	Piutang non-usaha (modal kerja) Non-trade receivables (working capital)
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Entitas asosiasi tidak langsung Associate entity	Piutang usaha dan piutang non-usaha Trade and non-trade receivables

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan secara rinci dalam tabel sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian <i>Description</i>	Persentase terhadap Total Aset <i>Percentage to Total Assets</i>		Nominal	
	2020	2019	2020	2019
Piutang Usaha / Trade Receivables				
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	0,001%	0,001%	72.000.000	72.000.000
Piutang Non-Usaha / Non-Trade Receivables				
PT Intisentosa Alambahtera	0,521%	0,656%	30.481.356.360	33.302.623.777
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	0,360%	0,000%	21.000.000.000	-
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	0,101%	0,117%	5.933.562.040	5.933.562.040
Direktur Perusahaan / Company Directors	0,005%	0,010%	300.000.000	509.090.639
Sub-jumlah / Sub-total	0,987%	0,783%	57.714.918.400	39.745.276.456
Jumlah / Total	0,988%	0,784%	57.786.918.400	39.817.276.456

USE OF FUNDS FROM PUBLIC OFFERING

Due to the existence of the *Right Issue* in 2018, from December 2019 to December 2020, the Company was required to report the Realization of the Use of Funds Report (LRPD) on the Result of the *Right Issue* in December 2020.

MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/ RELATED PARTIES

Relationship Nature with Related Parties

In the normal course of business, the Group conducts business and financial transactions with certain related parties. The nature of the Group's relationships with related parties is as follows:

The balances arising from transactions with related parties are described in details in the table as follows: (in full Rupiah, unless otherwise stated)

Penjualan

Sales

Uraian / Description	31 Desember 2020 December 31, 2020	31 Desember 2019 December 31, 2019
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	2.699.954.265	2.671.279.761

Piutang kepada PT Intisentosa Alambahtera merupakan piutang modal kerja berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 3 April 2012 yang dikenakan bunga sesuai dengan USD LIBOR ditambah 3,5% per tahun dan memiliki tanggal jatuh tempo sampai 10 Januari 2020. Pada tanggal penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit ini, Portco masih dalam proses perpanjangan tanggal jatuh tempo perjanjian pinjaman ini sampai 10 Januari 2021.

Receivables to PT Intisentosa Alambahtera represent working capital receivables based on the Shareholder Loan Agreement dated 3 April 2012 which bears interest in accordance with USD LIBOR plus 3.5% per annum and has a maturity date of 10 January 2020. On the date of issuance of the audited financial statements, Portco is still in the process of extending the maturity date of this loan agreement until 10 January 2021.

Piutang kepada PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri merupakan piutang investasi antara TKCM dan TBN yang digunakan untuk keperluan pembiayaan terkait proyek peningkatan kapasitas produksi IPA.

Receivables to PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri represent investment receivables between TKCM and TBN which are used for financing purposes related to the IPA production capacity increase project.

Piutang ini tidak dikenakan bunga dan dapat ditagih sewaktu-waktu sehingga disajikan sebagai piutang jangka pendek pada tanggal pelaporan.

These receivables do not bear interest and can be collected at any time so that they are presented as short-term receivables at the reporting date.

Manajemen tidak melakukan pembentukan penyisihan penurunan nilai atas piutang tersebut karena manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut akan tertagih.

The management does not provide an allowance for impairment of these receivables because management believes that the receivables will be collectible.

Kompensasi Jangka Pendek Manajemen Kunci

Grup memberikan kompensasi jangka pendek kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp29.783.058.340 dan Rp20.011.369.531 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Key Management Short-Term Compensation

The Group provided short-term compensation to the Board of Commissioners and the Board of Directors amounting to Rp29,783,058,340 and Rp20,011,369,531 for the years ended on 31 December 2020 and 2019, respectively.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Pada tahun 2020, tidak terdapat adanya informasi keuangan yang memiliki sifat luar biasa dan jarang terjadi.

FINANCIAL INFORMATION BEARING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

In 2020, there was no financial information bearing extraordinary and rare events.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan menemukan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang signifikan terhadap aktivitas operasional Perusahaan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi di bawah ini yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya, kecuali PSAK 73:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan", yang diadopsi dari IFRS 9;
- PSAK 72: "Pendapatan dari kontrak dengan Pelanggan", yang diadopsi dari IFRS 15;
- PSAK 73: "Sewa", yang diadopsi dari IFRS 16;
- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: "Definisi Material";
- Amandemen PSAK 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".

PSAK 73

Pada 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan retrospektif modifikasi dengan memilih pendekatan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman transisi dalam PSAK 73.

AMENDMENTS TO THE LAW AND REGULATIONS WHICH HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY

Until the end of 2020, the Company did not found significant law and regulations on the Company's operational activities. (mohon konfirmasi)

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY

On January 1, 2020, the Group adopted the statement of financial accounting standards and interpretations of the new and revised financial accounting standards below which are effective from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of the following new and revised standards and interpretations did not result in major changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial year, except for PSAK 73:

- PSAK 71: "Financial Instruments", adopted from IFRS 9;
- PSAK 72: "Revenue from contracts with Customers", adopted from IFRS 15;
- PSAK 73: "Leases", adopted from IFRS 16;
- Amendments to PSAK 1 and PSAK 25: "Definition of Materials";
- Amendment to PSAK 15: "Investments in Associates and Joint Ventures".

PSAK 73

On January 1, 2020, the Group adopted PSAK 73 using a modified retrospective approach by selecting the available practical approach based on the transitional guidelines in PSAK 73.

Dengan demikian laporan keuangan tahun 2019 tidak disajikan kembali dan disajikan sesuai standar sebelumnya dan interpretasi terkait. Grup melanjutkan penilaian sewa historis dengan tidak menilai kembali kontrak sewa sebelum PSAK 73 berlaku. Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang ditetapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak sewa yang dibuat atau dimodifikasi pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pendekatan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman transisi dalam PSAK 73, yang antara lain:

- Penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa;
- Sewa operasi dengan sisa masa sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai sewa jangka pendek;
- Pengecualian biaya langsung awal untuk pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal;
- Penggunaan tinjauan ke belakang dalam menentukan masa sewa dimana kontrak berisi opsi untuk perpanjangan atau pemutusan masa sewa;
- Menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya diidentifikasi berdasarkan PSAK 30, dan tidak menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya tidak diidentifikasi berdasarkan standar ini;
- Tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan sebagai konsekuensinya Grup menganggap seluruh kontrak sebagai sewa; dan
- Tidak mengakui liabilitas sewa dan aset hak guna untuk aset pendasar yang bernilai rendah.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang tersisa, didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman penyewa pada tanggal 1 Januari 2020. Suku bunga pinjaman penyewa yang diterapkan pada kewajiban sewa pada tanggal 1 Januari 2020 berkisar antara 8,20% - 8,75%.

Accordingly, the 2019 financial statements are not restated and are presented in accordance with previous standards and related interpretations. The Group continues to assess historical leases by not revaluing lease contracts before PSAK 73 comes into effect. The Group applies the definition of lease and related guidance set out in PSAK 73 for all lease contracts entered into or modified on or after January 1, 2020.

The practical approaches available are based on the transitional guidelines in PSAK 73, which include:

- Use of a single discount rate for lease portfolios with similar characteristics;
- Operating leases with remaining lease term of less than 12 months as of January 1, 2020 as short-term leases;
- Exemption of initial direct costs for the measurement of right-of-use assets at the initial application date;
- Use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options for extension or termination of the lease term;
- Apply PSAK 73 for leases previously identified under PSAK 30, and not apply PSAK 73 for leases not previously identified under this standard;
- Does not separate the non-lease component from the lease component, and as a consequence the Group considers the entire contract as a lease; and
- Does not recognize lease liabilities and right-of-use assets for low-value underlying assets.

Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the lessee's loan interest rate as of January 1, 2020. The interest rate on the tenant's loan applied to the lease obligation as of January 1, 2020 ranges from 8.20%-8.75%.

Dampak perubahan terhadap laporan keuangan periode berjalan adalah sebagai berikut:

The impact of changes to the current period's financial statements are as follows:

	Standar baru <i>New standard</i>	Standar sebelumnya <i>Previous standard</i>	Penyesuaian <i>Adjustment</i>
Laporan posisi keuangan / Statements of financial position			
Aset / Assets			
Uang muka dan beban dibayar di muka – jangka pendek <i>Advances and prepaid expenses - short term</i>	14.405.217.420	15.098.387.922	(693.170.502)
Aset hak guna – neto / Right of use assets - net	3.360.524.535	-	3.360.524.535
Jumlah aset / Total assets	17.765.741.955	15.098.387.933	2.667.354.033
Liabilitas / Liabilities			
Liabilitas sewa jangka pendek / Short-term lease liabilities	2.777.692.120	-	2.777.692.120
Liabilitas sewa jangka panjang / Long-term lease liabilities	17.080.715	-	17.080.715
Jumlah liabilitas / Total liabilities	70.146.860.895	67.486.457.976	2.660.402.919

Dampak perubahan terhadap laporan keuangan periode berjalan adalah sebagai berikut:

Impact of changes on financial statements of the current year:

	Standar baru <i>New Standard</i>	Standar sebelumnya <i>Previous Standard</i>	Penyesuaian <i>Adjustment</i>
Laporan laba rugi <i>Statement of Profit and Loss</i>	Laporan laba rugi <i>Statement of Profit and Loss</i>	Laporan laba rugi	Laporan laba rugi
Umum dan administrasi <i>General and administrative</i>	172.697.679.322	173.203.643.907	(505.964.585)
Beban keuangan / Financial charges	61.632.049.506	61.032.827.549	599.221.957
Jumlah / Total	234.329.728.828	234.236.471.456	93.257.372

Standar Akuntansi yang Telah Disahkan dan Sudah Berlaku Efektif

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup dan akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021:

- Amandemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis", tentang referensi ke kerangka konseptual, berlaku efektif 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan;
- Amandemen PSAK 57: "Biaya untuk memenuhi suatu kontrak", berlaku efektif 1 Januari 2022 dengan

New Accounting Standards Yet Effective

The following are several issued accounting standards by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Group and will be effective for reporting periods beginning on or after:

Effective on or after the date of January 1, 2021:

- Amendment PSAK 22: "Business Combinations", regarding reference to conceptual frameworks, effective on January 1, 2022 with earlier application is permitted;
- Amendment PSAK 57: "Contract Fulfillment Costs", effective on January 1, 2022 with earlier application is

- Amandemen PSAK 1: “Penyajian laporan keuangan”, berlaku efektif 1 Januari 2023.

Grup sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan namun Belum Berlaku Efektif

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup. Kecuali disebutkan lain, Grup tidak mengharapkan bahwa adopsi pernyataan tersebut di masa depan memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangannya.

Mulai Efektif pada atau setelah 1 Januari 2021

- Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021.

- Amendment PSAK 1: “Presentations of Financial Statement”, effective on January 1, 2023.

The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on the Group's consolidated financial statements.

Accounting Standards Issued but Not Yet Effective

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group. Unless otherwise indicated, the Group does not expect that the future adoption of the said pronouncements to have a significant impact on its financial statements.

Effective beginning on or after January 1, 2021

- Amendment to PSAK 22: Definition of Business, effective from January 1, 2021.





Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan oleh Perusahaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang ada dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness atau kewajaran.

The Company implements Good Corporate Governance by prioritizing the principles in the General Guidelines for GCG as issued by KNKG, specifically transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



RUPS memegang peranan sebagai organ tertinggi dalam struktur yang memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan.

The GMS is the highest executive body within the corporate structure exercising powers, within specified limits, not possessed by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT Nusantara Infrastructure Tbk terus berkomitmen untuk mencapai tujuannya menjadi perusahaan terkemuka di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur serta menjalankan bisnis usaha yang berkelanjutan melalui kinerja yang optimal dan berkualitas. Hal tersebut salah satunya diwujudkan melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara efektif, efisien, sesuai, dan tepat sasaran.

Penerapan GCG dilakukan Perusahaan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG, sehingga dapat mendukung Perusahaan menciptakan citra Perusahaan yang baik, membangun lingkungan kerja yang kondusif, mewujudkan korporasi yang sehat dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, hingga menghadirkan nilai tambah yang bermanfaat dan berdampak baik bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE COMMITMENT

PT Nusantara Infrastructure Tbk continuously commits to achieving its goal of becoming the leading company in the field of investment and infrastructure development, as well as running a sustainable business through quality performance. One of the ways to achieve this is through the implementation of effective, efficient, and appropriate Good Corporate Governance (GCG) that is right on target.

The Company implements GCG through GCG principles to support the Company in creating a good corporate image, building a conducive work environment, creating healthy and compliant corporation with applicable laws and regulations, and providing useful and impactful added value for the shareholders and related stakeholders.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance



PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan oleh Perusahaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang ada dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh KNKG, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* atau kewajaran.

PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Company implements Good Corporate Governance by prioritizing the principles in the General Guidelines for GCG as issued by KNKG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

1. Transparansi

Untuk meningkatkan objektivitas pada kegiatan usaha, Perusahaan akan selalu berinisiatif untuk menyediakan dan mengungkapkan informasi dan kebijakan yang material dan relevan secara tertulis dan tepat waktu dengan cara yang jelas, mudah diakses dan dipahami oleh seluruh pemegang saham, kreditur dan *stakeholder* lainnya. Perusahaan akan tetap menjunjung tinggi rahasia Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi tanpa mengurangi prinsip keterbukaan yang dianut sesuai asas Keterbukaan GCG.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang baik dan berkesinambungan sehingga Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan selalu memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Organ Perusahaan dan karyawan harus selalu berpegang teguh pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) dalam melakukan tanggung jawabnya dan kegiatan usahanya.

3. Tanggung Jawab

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai *stakeholder*, Perusahaan akan selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian, mematuhi peraturan internal Perusahaan dalam melaksanakan setiap kegiatan usahanya sehingga diharapkan Perusahaan akan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.

4. Kemandirian

Di dalam menjalankan usahanya, Perusahaan senantiasa berupaya untuk memastikan hal tersebut dapat terlaksana secara independen serta terhindar dari praktik merugikan seperti dominasi oleh pihak mana pun, benturan kepentingan, dominasi oleh salah satu organ perusahaan atas organ perusahaan lainnya, hingga segala macam bentuk tekanan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga diharapkan segala keputusan yang dibuat senantiasa bersifat independen dan objektif.

5. Kesenjangan dan Kewajaran

Perusahaan senantiasa menerapkan kesetaraan dan kewajaran dalam memperlakukan *stakeholder* dan pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Perusahaan

1. Transparency

To increase objectivity in operations, the Company will always take the initiative to provide and disclose material and relevant information and policies in writing that are timely, clear easily accessible and are understood by shareholders, creditors and other stakeholders. The Company will uphold the confidentiality of the corporation, the positions and personal rights without prejudice to the GCG Openness principle.

2. Accountability

Accountability is prerequisite needed to achieve good and sustainable performance so that the Company can be managed properly and measurably in accordance with the interests of shareholders and other stakeholders. The Company's instruments and employees must always adhere to business ethics and code of conduct in carrying out their responsibilities and business activities.

3. Responsibilities

To show its responsibility to the community and the environment as the stakeholders, the Company will always be prudent and comply with internal regulations in running the operation in order to be recognized as a Good Corporate Citizen.

4. Independence

In conducting its business, the Company strives for independency and avoids harmful practices, such as dominance from certain parties, conflict of interest and the domination by one instrument over other instruments, creating pressures that can influence the decision-making process. As such, it is expected that the Company will make decisions independently and objectively.

5. Equality and Fairness

The Company always implement equality and fairness in treating their stakeholders and third parties with connection to the Company, and always provide equal

serta selalu memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam proses penerimaan karyawan dan berkariir tanpa melihat dan membedakan latar belakang individu tersebut.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan penerapan prinsip-prinsip GCG ke dalam seluruh aktivitas usaha yang dijalankan guna mencapai kinerja bisnis yang sehat, optimal, dan terus berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, Perusahaan bertujuan untuk:

1. Mendorong pemberdayaan kemandirian, profesionalisme, dan objektivitas organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan operasionalnya, agar selalu dilandasi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan serta kewajaran. Selain itu juga untuk memastikan terlaksananya prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kinerja dan daya saing Perusahaan dalam industri infrastruktur nasional maupun internasional.
3. Mendorong terciptanya hubungan dan lingkungan kerja yang baik, kondusif, dan profesional di antara organ-organ Perusahaan, karyawan, dan masyarakat serta lingkungan.
4. Menghindari praktik yang melanggar etika bisnis dengan mencegah adanya benturan kepentingan, penyelewengan, pernyataan palsu, gratifikasi, dan diskriminasi.
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi atau penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*) dalam industri infrastruktur.

LANDASAN HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengacu pada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang (UU) No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;

opportunities to the community in the process of recruitment and career progression regardless of their background.

THE PURPOSE OF IMPLEMENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Company commits to prioritize the application of GCG principles into all business activities in order to achieve healthy, optimum, and sustainable business performance. Through the application of these GCG principles, the Company aims to:

1. Encourage the empowerment of independence, professionalism, and objectivity of the Company's instruments in making decisions and carrying out operational activities, so that they are always based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and equality and fairness. In addition, to ensure the implementation of the principle of prudence and compliance with applicable laws and regulations;
2. Improve the performance and competitiveness of the Company in the national and international infrastructure industry;
3. Encouraging the creation of good, conducive and professional working environment and relationships among the Company's instruments, employees, the community and the environment;
4. Avoiding practices that violate business ethics by preventing conflicts of interest, fraud, false statements, gratuities, and discrimination; and
5. Encouraging national economic growth by increasing the investment or Foreign Direct Investment in the infrastructure industry.

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Company implements Good Corporate Governance pursuant to the prevailing regulations, namely:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law No. 8 of 1995 on Capital Markets;

3. Pedoman Nasional *Good Corporate Governance* dari Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta
5. Peraturan Bursa Efek Indonesia.

3. National Guidelines of Good Corporate Governance Policy (KNKG);
4. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Open Corporate Governance Guidelines, as well as
5. Indonesia Stock Exchange regulations.

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OJK

Dengan posisinya sebagai Perusahaan Terbuka, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi pedoman dalam tata kelola Perusahaan Terbuka yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Informasi terkait penerapan pedoman tersebut yang telah dilakukan oleh Perusahaan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF ASPECTS AND PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE IN ACCORDANCE WITH OJK REGULATIONS

As a Public Company, the Company has implemented all regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), as regulated in OJK Regulation No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Company. The information regarding such implementation, as performed by the Company, is described in the following table:

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Penerapan / Implementation
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham		
Aspect 1: The Relation Between Public Company with the Shareholders in Securing Shareholder's Rights		
Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Principle 1. Increase the Value of the General Meeting of Shareholders (GMS)	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public Company has a way or technical procedure of voting, either open or closed, which prioritizes the independence and interest of shareholders.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 1 dan Rekomendasi 1. The Company has fulfilled Principle 1 and Recommendation 1.
	2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan diundang untuk datang ke setiap RUPS yang dilaksanakan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners are invited to attend every General Meeting of Shareholders held by the Company.
	3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Summary of GMS minutes is available on the Company's website for at least 1 (one) year.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 1 dan Rekomendasi 3. The Company has fulfilled Principle 1 and Recommendation 3

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Penerapan / Implementation
Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2. Improve the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.	1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public Company has a communication policy with the shareholders or investors.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 2 dan Rekomendasi 4. The Company has fulfilled Principle 2 and Recommendation 4.
	2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Public Company discloses its communication policy with the shareholders or investors in their Website.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 2 dan Rekomendasi 5. The Company has fulfilled Principle 2 and Recommendation 5.
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: The Functions and Roles of the Board of Commissioners		
Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3. Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determining the size of the Board of Commissioners by considering the Public Company's	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 3 dan Rekomendasi 6. The Company has fulfilled Principle 3 and Recommendation 6.
	2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determining the composition of the members of the Board of Commissioners considering the diversity of skills, knowledge, and experience required.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 3 dan Rekomendasi 7. The Company has fulfilled Principle 3 and Recommendation 7.
Prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4. Improving the quality of duties and responsibilities of the Board of Commissioners	1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has Self-Assessment policy to assess their own performance.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 4 dan Rekomendasi 8, tetapi penilaian terhadap Dewan Komisaris secara tidak langsung dilakukan saat perumusan remunerasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. The Company has fulfilled Principle 4 and Recommendation 8, but the assesment to the Board Commissioners is indirectly carried out during the formulation of remuneration by the Nomination and Remuneration Committee.

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Penerapan / Implementation
Prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4. Improving the quality of duties and responsibilities of the Board of Commissioners	2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan terbuka. The Self-Assessment policy is disclosed through the Annual Report of Public Company.	Perusahaan belum menjalankan Prinsip 4 dan Rekomendasi 9, tetapi penilaian terhadap Dewan Komisaris secara tidak langsung dilakukan saat perumusan remunerasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. The Company has not fulfilled Principle 4 and Recommendation 9, but the assessment to the Board Commissioners is indirectly carried out during the formulation of remuneration by the Nomination and Remuneration Committee.
	3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has policy to regulate the resignation of members of the Board of Commissioners when they are involved in financial crimes.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 4 dan Rekomendasi 10. The Company has fulfilled Principle 4 and Recommendation 10.
	4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam Proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Nomination and Remuneration Committee formulate succession policy in the Nomination Process of members of the Board of Directors.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 4 dan Rekomendasi 11. The Company has fulfilled Principle 4 and Recommendation 11.
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: Functions and Roles of the Board of Directors		
Prinsip 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Principles 5. Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors	1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the Board of Directors size must consider the conditions of the Public Company and the effectiveness of decision-making process.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 5 dan Rekomendasi 12. The Company has fulfilled Principle 5 and Recommendation 12.
	2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Determining the composition of the Board of Directors takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 5 dan Rekomendasi 13. The Company has fulfilled Principle 5 and Recommendation 13.

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Penerapan / Implementation
Prinsip 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Principles 5. Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors	3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 5 dan Rekomendasi 14. The Company has fulfilled Principle 5 and Recommendation 14.
Prinsip 6. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6. Improving the quality of duties and responsibilities of the Board of Directors	1. Direksi memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a Self-Assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	Perusahaan belum memenuhi Prinsip 6 dan Rekomendasi 15, tetapi penilaian terhadap Direksi secara tidak langsung dilakukan saat pengusulan remunerasi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS. The Company has not fulfilled the Principles 6 and Recommendation 15, but the evaluation of the Board of Directors is indirectly carried out when the Board of Commissioners submits remuneration proposals to the GMS.
	2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The Self-Assessment policy is disclosed through the Annual Report of the Public Company.	Perusahaan belum memenuhi Prinsip 6 dan Rekomendasi 16, tetapi penilaian terhadap Direksi secara tidak langsung dilakukan saat pengusulan remunerasi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS. The Company has not fulfilled the Principles 6 and Recommendation 15, but the evaluation of the Board of Directors is indirectly carried out when the Board of Commissioners submits remuneration proposals to the GMS.
	3. Direksi memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy in place related to the resignation of its members if they are involved in a financial crime.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 6 dan Rekomendasi 17. The Company has fulfilled Principle 6 and Recommendation 17.

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Penerapan / Implementation
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Participation of Stakeholders		
Prinsip 7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7. Improving aspects of Corporate Governance through stakeholder participation	1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>Insider Trading</i> . Public Company has a policy to prevent Insider Trading.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 7 dan Rekomendasi 18. The Company has fulfilled Principle 7 and Recommendation 18.
	2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Fraud. / The Public Company has Anti-Corruption and Anti-Fraud policies.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 7 dan Rekomendasi 19. The Company has fulfilled Principle 7 and Recommendation 19.
	3. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok dan vendor. The public company has a policy for the selection and development of suppliers and vendors capability.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 7 dan Rekomendasi 20. The Company has fulfilled Principle 7 and Recommendation 20.
	4. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The public company has policy on the fulfillment of creditor's rights.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 7 dan Rekomendasi 21. The Company has fulfilled Principle 7 and Recommendation 21.
	5. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan <i>whistleblowing system</i> . The public company has whistleblowing system policy.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 7 dan Rekomendasi 22. The Company has fulfilled Principle 7 and Recommendation 22.
	6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan. The Public Company has policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and the Employees.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 7 dan Rekomendasi 23. The Company has fulfilled Principle 7 and Recommendation 23.
Aspek 5: Meningkatkan Keterbukaan Informasi Aspect 5: Improving Information Transparency		
Prinsip 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8. Improve the Implementation of Information Transparency.	1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. The Public Company utilizes information technology in a more widespread way, beyond Website, as the medium of information transparency.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 8 dan Rekomendasi 24. The Company has fulfilled Principle 8 and Recommendation 24.

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Penerapan / Implementation
	2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali. The Public Company's Annual Report discloses the final beneficiary of at least 5% share ownership, beside the disclosure of the final beneficiary through the Main and Controlling Shareholders.	Perusahaan telah memenuhi Prinsip 8 dan Rekomendasi 25. The Company has fulfilled Principle 8 and Recommendation 25.

STRUKTUR DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

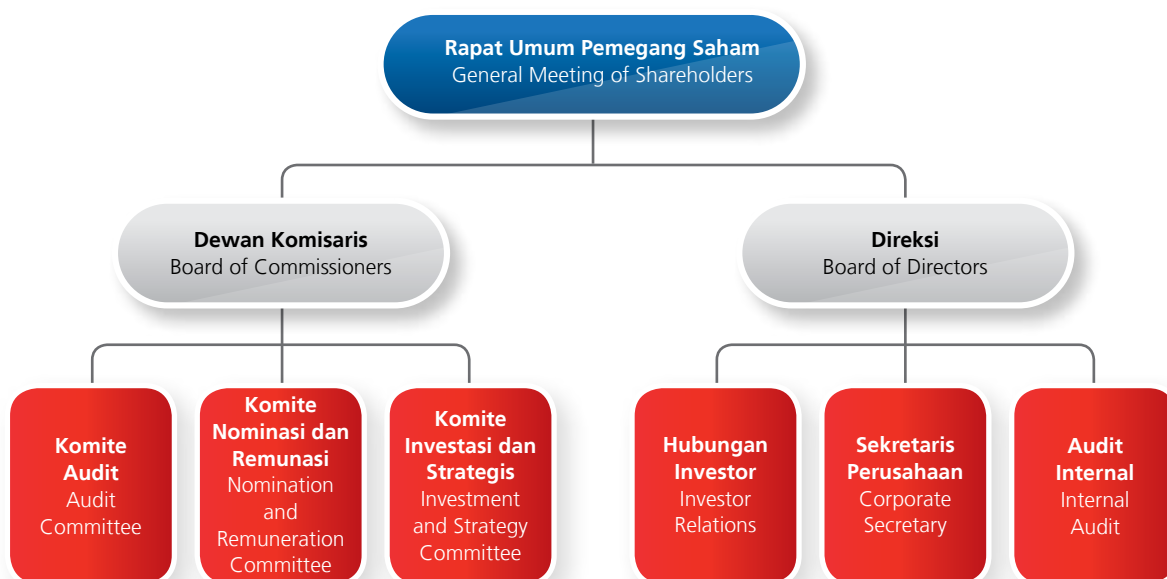
Struktur GCG

Struktur Tata Kelola atau GCG di dalam Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS memegang peranan sebagai organ tertinggi dalam struktur yang memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan. Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang berperan menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Direksi adalah organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan Perusahaan dan menjadi perwakilan Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND POLICY

GCG Structure

Good Corporate Governance or GCG in the Company consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The GMS has a role as the highest instrument in the structure that has special power not owned by the Board of Commissioners or Board of Directors do within the specified limits. The Board of Commissioners is the Company's instrument that carries out the supervisory function and provides advice to the Board of Directors. The Board of Directors is the Company's instrument that has the duties and responsibilities to manage and administer the Company and serves as the Company's representative inside and outside the court.



Kebijakan GCG

Perusahaan memiliki kebijakan dalam penerapan GCG berupa pedoman-pedoman atau aturan tertulis agar Perusahaan dapat tetap berada pada koridor korporasi yang sehat, yang disebut juga dengan *soft structure* GCG. *Soft structure* GCG mengarahkan Perusahaan sehingga mampu mengatur kegiatan bisnisnya agar tetap berada pada dasar kepentingan bersama antara pihak yang terlibat di dalamnya. Aspek kebijakan GCG tersebut mencakup pedoman-pedoman sebagai berikut:

No.	Nama Kebijakan GCG / Name of GCG Policy
1.	Pedoman GCG / GCG Guidelines
2.	Piagam Komite Audit / Audit Committee Charter
3.	Piagam Internal Audit / Internal Audit Charter
4.	Pedoman HSE (<i>Health, Safety, and Environment</i>) / HSE (Health, Safety, and Environment) Guidelines
5.	Pedoman SEMS (<i>Social and Environment Management System</i>) SEMS (Social and Environment Management System) Guidelines

GCG Policy

The Company has GCG implementation policies in the form of guidelines or written rules to ensure that the Company stays as a healthy corporation, also known as the GCG soft structure. The GCG soft structure directs the Company to regulate its business activities so as to remain on the basis of common interests between the parties involved. This GCG policy aspects include the following guidelines:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**Penyelenggaraan RUPS Tahun 2020**

Pada tahun 2020, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak 1 (satu) kali, yakni RUPS Tahunan pada 19 Agustus 2020.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**The Holding of 2020 GMS**

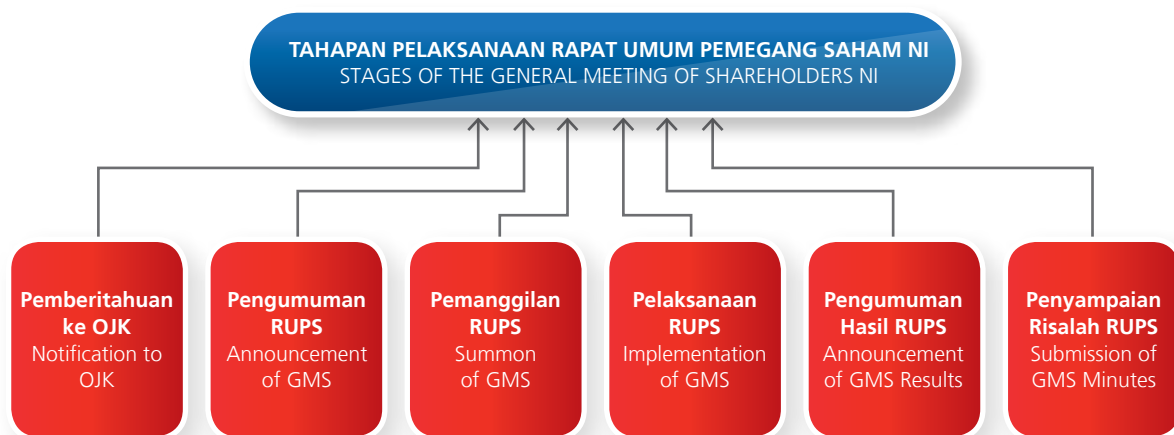
In 2020, the Company held the General Meeting of Shareholders (GMS) once, namely the Annual GMS on August 19, 2020.

MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2020

Penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

MECHANISM FOR THE HOLDING OF ANNUAL GMS 2020

The holding of GMS by the Company complied with the mechanism stated in the Company's Articles of Association and OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Plans and Organizing of the General Meeting of Shareholders for Public Company and as amended by OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 dated March 14, 2017



Tabel Tahapan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan NI 2020

Table of the Stages of NI's Annual General Meeting of Shareholders 2020

Kegiatan <i>Activities</i>	Ketentuan POJK <i>POJK Regulations</i>	Pelaksanaan <i>Implementation</i>
Pemberitahuan ke OJK Notification to OJK	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik. Notification regarding the implementation date and agenda of GMS was disclosed clearly and meticulously and was submitted no later than 5 (five) working days before the date of GMS announcement to the public.	Telah dilaksanakan pada 6 Juli 2020 Has been implemented on July 6, 2020
Pengumuman RUPST AGMS Announcement	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada Bursa Efek pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Announced at least in 1 (one) national daily newspaper in Indonesian Language, the stock exchange website and the Company's official website no later than 14 (fourteen) days before the date of GMS summons. Proof of Advertisement Announcement shall be submitted to the OJK no later than 2 (two) working days after the announcement of the GMS and submitted to the Stock Exchange on the same day the advertisement is posted.	Telah dilaksanakan pada 13 Juli 2020 Has been implemented on July 13, 2020

Kegiatan Activities	Ketentuan POJK POJK Regulations	Pelaksanaan Implementation
Pemanggilan RUPS Summon of GMS	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs OJK dan situs resmi web perusahaan terbuka paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Announced in at least 1 (one) Indonesian language daily newspaper, OJK website and the Bank's official website no later than 21 (twenty one) days before the GMS. Proof of the summon through advertisement is submitted to the OJK no later than 2 (two) working days after GMS Summon and submitted to IDX on the same day the advertisement is posted.	Telah dilaksanakan pada 28 Juli 2020 Has been implemented on July 28, 2020
Pelaksanaan RUPS Implementation of GMS	-	Tanggal / Date : 19 Agustus 2020 August 19, 2020 Tempat / Place: Finansial Club Jakarta-Ruang Adonara, Graha CIMB Niaga, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 Jakarta Financial Club – Adonara Hall, Graha CIMB Niaga, Floor 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Kebayoran Baru, South Jakarta 12190 Jumlah Saham / Number of Share: 14.991.339.913 Kuorum / Quorum: 86,53%



Kegiatan <i>Activities</i>	Ketentuan POJK <i>POJK Regulations</i>	Pelaksanaan <i>Implementation</i>
Pengumuman Hasil RUPS <i>Announcement of AGMS Results</i>	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan resume keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Report of GMS results is submitted to OJK and IDX no later than 2 (two) working days after the GMS is completed with resumption of GMS decision issued by the Notary. Proof of publication of GMS Summary Minutes shall be submitted to OJK no later than 2 (two) working days after the announcement of the GMS and submitted to IDX on the same day of the advertisement date.	Disampaikan kepada OJK pada 24 Agustus 2020 Submitted to OJK on August 24, 2020
Penyampaian Hasil Risalah RUPS <i>Submission of AGMS Minutes</i>	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. The Deed of GMS Minutes shall be submitted to OJK no later than 30 (thirty) working days after the GMS is held.	Disampaikan kepada OJK pada 18 Juni 2020 Submitted to OJK on June 18, 2020

Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2020 dan Pelaksanaan Hasil Keputusan RUPS hingga Akhir Tahun 2020

Pada tahun 2020, Perusahaan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada 19 Agustus 2020 yang telah dihadiri oleh pemegang 14.991.339.913 lembar saham dan telah mewakili 86,53% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

Resolution of the 2020 Annual GMS and the Implementation of GMS Resolutions Until the End of 2020

In 2020, the Company held Annual GMS on August 19, 2020, which was attended by the holders of 14,991,339,913 shares, representing 86.53% of all shares with voting rights issued by the Company.

RUPS Tahunan 19 Agustus 2020 Annual GMS August 19, 2020		
Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolutions	Realisasi dan Tindak Lanjut oleh Manajemen <i>Realization and Follow Up by the Management</i>
MATA ACARA PERTAMA / FIRST AGENDA		
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 Approval of the Company's Annual Report including the Ratification of the Annual Financial Report and the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2019	Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, termasuk laporan tahunan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya dengan pendapat: "laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"; dan Approved and accepted the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2019, including the annual report of the Company's Board of Directors, and ratified the supervisory duty report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Report for the fiscal year ending on December 31, 2019, audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Members of Ernst & Young Global Limited) in accordance with the report with the opinion that stated: "the consolidated Financial Statement gives a fair view, and is free from material misstatements, the consolidated financial position of PT Nusantara Infrastructure, Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2019, as well as the financial performance and consolidated cash flow for the year then ended is in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards"; and	Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.
	Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. / Approve to grant full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners over their lawful management and supervising activities during the fiscal year 2019 to the extent that they are reflected in the Company's Annual Report.	

RUPS Tahunan 19 Agustus 2020 Annual GMS August 19, 2020		
Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolutions	Realisasi dan Tindak Lanjut oleh Manajemen Realization and Follow Up by the Management
MATA ACARA KEDUA / SECOND AGENDA		
Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2019 Approval of the use of Net Profit for the Fiscal Year Endong on December 31, 2019	Menyetujui laba hingga akhir tahun 2019 sebesar Rp143.813.665.548 (seratus empat puluh tiga Miliar delapan ratus tiga belas Juta enam ratus enam puluh lima Ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah) dan dari laba tersebut sebesar Rp1.438.136.556 (satu Miliar empat ratus tiga puluh delapan Juta seratus tiga puluh enam Ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Approved the profit until the end of 2019 amounting to Rp143,813,665,548 (one hundred forty three Billion eight hundred thirteen Million six hundred sixty-five Thousand five hundred and forty eight Rupiah) and from that profit amounting to Rp1,438,136,556 (one Billion four one hundred thirty eight Million one hundred thirty six Thousand five hundred and fifty six Rupiah) was allocated as a reserve fund, in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law. Sisanya disisihkan sebagai cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dapat digunakan untuk kebutuhan Perseroan termasuk pengembangan usaha, modal kerja, sosial dan pembagian dividen masa depan; sehingga untuk tujuan kepentingan Perseroan dan karena ekspansi Perseroan yang sedang berlangsung, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan. The remaining fund was set aside as other reserves in accordance with Article 70 of the Limited Liability Company Law, which could be used for the Company's needs, including business development, working capital, social and future dividend distribution; as such, for the purposes of the Company's interests and due to the Company's ongoing expansion, the Company would not distribute its dividends to the Company's shareholders.	Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.

RUPS Tahunan 19 Agustus 2020 Annual GMS August 19, 2020		
Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolutions	Realisasi dan Tindak Lanjut oleh Manajemen Realization and Follow Up by the Management
MATA ACARA KETIGA / THIRD AGENDA		
Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Appointment of Public Accountant to conduct audit on the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2020	- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan besaran jasa audit untuk Akuntan Publik yang ditunjuk; dan Grant the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will conduct an audit of the Company's financial statements for the financial year ending on 31 December, 2020 and determine the amount of audit services for the appointed Public Accountant; and - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang berlaku, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya. Grant the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accounting Firm if, for reasons based on the provisions of the Capital Market regulations or other applicable laws, the appointed Public Accounting Firm cannot carry out its duties.	Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.
MATA ACARA KEEMPAT / FOURTH AGENDA		
Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2020 Determination of duties and authority as well as salaries and benefits for members of the Company's Directors and salaries or honorarium and benefits for members of the Company's Board of Commissioners for 2020	Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Approve to grant authority to the Nomination and Remuneration Committee, which in this case is carried out by the Company's Board of Commissioners, to determine the honorarium or salary, as well as other allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors for the fiscal year 2020 with due regard to the Company's financial condition.	Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.

RUPS Tahunan 19 Agustus 2020 Annual GMS August 19, 2020		
Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolutions	Realisasi dan Tindak Lanjut oleh Manajemen Realization and Follow Up by the Management
MATA ACARA KELIMA / FIFTH AGENDA		
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") Perseroan Accountability Report of Realization of the Use of Funds from the Company's Limited Public Offering II ("PUT II").	Bahwa Mata Acara Rapat Kelima, bersifat pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") Perseroan, maka tidak ada pengambilan keputusan ataupun pemungutan suara sehubungan dengan Mata Acar Rapat Kelima. As the Fifth Meeting Agenda is a report on the Realization of the Use of Funds from the Company's Limited Public Offering II ("PUT II"), there is no decision making or voting in connection with the Fifth Meeting Agenda.	Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.
MATA ACARA KEENAM / SIXTH AGENDA		
Persetujuan atas perubahan Penggunaan Dana Hasil PUT II Perseroan Approval on the change on the Use of Funds of the Company's PUT II	Menyetujui perubahan Penggunaan Dana Hasil PUT II Perseroan menjadi sebagai berikut: Approve the change of the Use of Funds of the Company's PUT II as follows: Dana yang diperoleh dari hasil PUT II akan digunakan untuk: The funds from PUT II results will be used for: • sekitar 87% akan digunakan oleh Perseroan sebagai setoran modal ke dalam PT Margautama Nusantara (MUN), Entitas Anak Perseroan, dan selanjutnya dana tersebut akan digunakan oleh MUN sebagai setoran modal ke dalam PT Bosowa Marga Nusantara (BMN), Entitas Anak MUN, yang kemudian akan digunakan oleh BMN sebagai pendanaan untuk pelaksanaan proyek jalan tol di Makassar; • sisanya, yaitu sekitar 13% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam rangka pengembangan usaha, yang termasuk tapi tidak terbatas pada biaya pelaksanaan basic design, studi kelayakan, dan biaya uji tuntas. around 87% will be used by the Company as capital deposits for PT Margautama Nusantara (MUN), a Subsidiary of the Company, and subsequently the funds will be used by MUN as capital deposits for PT Bosowa Marga Nusantara (BMN), a Subsidiary of MUN, which later will be used by BMN as funding for the implementation of toll road projects in Makassar; the remaining funds, which is around 13%, will be used for the working capital of the Company and/or its Subsidiaries in the context of business development, which includes but not limited to basic design implementation costs, feasibility studies, and due diligence costs.	Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.

RUPS Tahunan 19 Agustus 2020 Annual GMS August 19, 2020		
Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolutions	Realisasi dan Tindak Lanjut oleh Manajemen Realization and Follow Up by the Management
MATA ACARA KETUJUH / SEVENTH AGENDA		
Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana Perseroan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang menggunakan Standar Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 ("KBLI 2017") Approval of the Adjustment to Article 3 (three) of the Company's Articles of Association, in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services, in which the Company is required to have a Business Identification Number ("NIB") which uses the 2017 Indonesian Business Field Clarification Standards ("KBLI 2017")	- Menyetujui penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan dan untuk mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Approve the adjustment of Article 3 (three) of the Company's Articles of Association, in accordance with and to comply with the Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services; - Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk, mempersiapkan dan menandatangani akta-akta, dokumen, dan pendaftaran yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. The Company's Board of Directors has the power with substitution rights to take necessary actions in connection with the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association, including preparing and signing deeds, documents, and registration required in accordance with the applicable regulations.	Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.

RUPS Tahunan 19 Agustus 2020 Annual GMS August 19, 2020		
Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolutions	Realisasi dan Tindak Lanjut oleh Manajemen Realization and Follow Up by the Management
MATA ACARA KEDELAPAN / EIGHTH AGENDA		
Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan Approval of the Change of the Company's Management	- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan To honorably discharge all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors and provide payment and discharge of responsibility (<i>acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors; and - Selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut: To appoint members of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors with the following composition: <u>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</u> - Bapak JOSE MA. KAMANTIGUE LIM sebagai KOMISARIS UTAMA; JOSE MA. KAMANTIGUE LIM as PRESIDENT DIRECTOR; - Bapak RODRIGO EMMANUEL FRANCO sebagai KOMISARIS; RODRIGO EMMANUEL FRANCO as COMMISSIONER; - Bapak LETNAN JENDERAL (PURN) JOHNY J. LUMINTANG sebagai KOMISARIS INDEPENDEN; dan LIEUTENANT GENERAL (RET.) JOHNY J. LUMINTANG as INDEPENDENT COMMISSIONER; and - Bapak FARID HARIANTO sebagai KOMISARIS. FARID HARIANTO as COMMISSIONER.	Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.

RUPS Tahunan 19 Agustus 2020 Annual GMS August 19, 2020		
Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolutions	Realisasi dan Tindak Lanjut oleh Manajemen Realization and Follow Up by the Management
	<u>Direksi / Board of Directors</u> 1. Bapak MUHAMMAD RAMDANI BASRI sebagai DIREKTUR UTAMA; MUHAMMAD RAMDANI BASRI as PRESIDENT DIRECTOR; 2. Bapak OMAR DANNI HASAN sebagai DIREKTUR; OMAR DANNI HASAN as DIRECTOR; 3. Bapak BENNY SETIAWAN SANTOSO sebagai DIREKTUR; BENNY SETIAWAN SANTOSO as DIRECTOR; 4. Bapak RIDWAN ABDUL CHALIF IRAWAN sebagai DIREKTUR; RIDWAN ABDUL CHALIF IRAWAN as DIRECTOR; 5. Bapak DENN CHARLY GONZALES ESPANOLA sebagai DIREKTUR; DENN CHARLY GONZALES ESPANOLA as DIRECTOR; 6. Bapak AMADEO NAVALTA BEJEC sebagai DIREKTUR; AMADEO NAVALTA BEJEC as DIRECTOR; 7. Bapak CHRISTOPHER DANIEL CABRERA LIZO sebagai DIREKTUR; dan CHRISTOPHER DANIEL CABRERA LIZO as DIRECTOR; and 8. Bapak FRANCIS EMMANUEL DALUPAN ROJAS sebagai DIREKTUR. FRANCIS EMMANUEL DALUPAN ROJAS as DIRECTOR • Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil semua tindakan dan menyetujui hal-hal yang diperlukan, termasuk mempersiapkan dan menandatangani akta-akta, dokumen, dan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan yang diambil atas Mata Acara Rapat Kedelapan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Authorize the Board of Directors to take actions and approve necessary matters, including preparing and signing deeds, documents, and registration required in connection with decisions made on the Eighth Meeting Agenda, in accordance with the applicable laws and regulations.	

Penerapan Protokol Kesehatan dan Tindakan Pencegahan pada Penyelenggaraan RUPST Tahun 2020

Mengingat pada tahun 2020 terdapat adanya peristiwa pandemi akibat penyebaran secara masif Virus Covid-19, Perusahaan melakukan penyesuaian pada pelaksanaan RUPST Tahun 2020 ("Rapat") dengan menerapkan

Implementation of Health Protocols and Preventive Measures at the 2020 AGMS

Considering that in 2020 there was a pandemic event due to the massive spread of the Covid-19 Virus, the Company made adjustments to the implementation of the 2020 AGMS ("Meetings") by implementing health protocols

protokol kesehatan dan tindakan pencegahan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan RUPST dapat berjalan dengan baik dan tidak menjadi tempat penyebaran virus yang dapat merugikan seluruh pihak yang hadir.

Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku serta sebagai upaya Perusahaan dalam mendukung pencegahan penyebaran risiko penularan penyakit Virus Covid-19, sebelum dan selama penyelenggaraan RUPST dilakukan penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan sesuai dengan panduan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak menyediakan dan/atau membagikan minuman dan makanan selama penyelenggaraan Rapat.
2. Perusahaan juga tidak menyediakan dan/atau membagikan *souvenir* kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.
3. Para Pemegang Saham Perusahaan diimbau untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020; Dengan demikian dalam kondisi Pandemi Covid-19 seperti saat ini kehadiran fisik dalam Rapat tidak diperlukan untuk tujuan melaksanakan hak-hak Para Pemegang Saham.

Perusahaan mengimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada PT Adimitra Jasa Korpora ("AJK") selaku pihak independen yang di tunjuk oleh Perusahaan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perusahaan, guna mewakili Pemegang Saham yang hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat di akses pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI sebagai pihak penyedia e-RUPS, dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat.

Pemberian Kuasa dan/atau pilihan suara melalui fasilitas eASY.KSEI hanya dapat diubah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

and preventive measures. This was done to ensure that the AGM could run well and would not become a place for the spread of viruses that could harm all parties present.

As stipulated in the applicable regulations as well as the Company's efforts to support the prevention of the spread of the risk of transmission of the Covid-19 Virus, before and during the AGM, the implementation of health protocols and preventive measures in accordance with the guidelines for preventing and controlling the spread of Covid-19 that have been established by the Government are as follows:

1. The Company must not provide and/or distribute drinks and food during the meeting.
2. The Company also must not provide and/or distribute souvenirs to shareholders or their proxies who attend the meeting.
3. Shareholders of the Company are encouraged to use alternative electronic power of attorney to cast their votes in the Meeting in accordance with the provisions of OJK Regulation No.15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020; Thus, in the current conditions of the Covid-19 Pandemic, physical presence at the Meeting is not required for the purpose of exercising the rights of the Shareholders.

The Company urges the Shareholders to authorize PT Adimitra Jasa Korpora ("AJK") as an independent party appointed by the Company, which is the Company's Securities Administration Bureau, to represent Shareholders who are present and vote at the Meeting, through the Electronic General facility. KSEI Meeting System (eASY.KSEI) which can be accessed on the <https://akses.ksei.co.id> link that has been provided by KSEI as the provider of the e-GMS, by selecting the type of power of attorney "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and entering a vote for each agenda item of the Meeting.

The granting of power of attorney and/or voting options through the eASY.KSEI facility can only be changed no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting.

Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir surat kuasa yang telah di sediakan dan dapat di unduh dari situs *web* Perusahaan <https://www.nusantarainfrastructure.com>.

4. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang akan di berlakukan Perusahaan secara ketat sebagai berikut:

- (i) Wajib selalu menggunakan masker sebelum memasuki gedung dan selama berada di area gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung. Perusahaan tidak menyediakan masker karenanya masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa dan memakai masker mereka sendiri;
- (ii) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh) baik yang akan dilakukan oleh Perusahaan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya dengan suhu tubuh di atas kisaran referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, gangguan tenggorokan, sesak napas, akan diminta untuk memberikan Kuasa Kepada AJK;
- (iii) Wajib mengisi, melengkapi, dan menyerahkan Formulir Pernyataan Kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan sebelum memasuki ruang Rapat dan menghadiri Rapat;
- (iv) Wajib mengikuti *Rapid Test* yang diadakan oleh Perusahaan sebelum memasuki ruang Rapat dan menghadiri Rapat;
- (v) Wajib memakai *face shield* yang disediakan oleh Perusahaan saat berada di ruang Rapat selama Rapat berlangsung;
- (vi) Wajib menerapkan kebijakan *Physical Distancing* dalam menunggu antrian dengan jarak 1-2 meter sesuai arahan Perusahaan dan Manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
- (vii)Wajib Mengikuti arahan Perusahaan dalam hal kapasitas tempat duduk di ruang Rapat sudah tidak lagi tersedia mengingat kewajiban Perusahaan untuk menerapkan kebijakan *physical distancing* dalam mengatur tempat duduk dengan jarak 1–2 meter.

For Shareholders who will provide power of attorney without using eASY.KSEI facilities, Shareholders can use the power of attorney form that has been provided and can be downloaded from the Company's website <https://www.nusantarainfrastructure.com>.

4. Every Shareholder or Proxy who will be physically present at the Meeting must follow and pass the health protocol and preventive measures that will be strictly enforced by the Company as follows:

- (i) Always wear a mask before entering the building and while in the building area and/or the meeting room during the meeting. The company does not provide masks, therefore each Shareholder or their Proxy must bring and wear their own mask;
- (ii) Required to follow procedures for medical examinations (including body temperature checks) which will be carried out by the Company and the management of the building where the Meeting is held. Shareholders or their proxies with a body temperature above the reference range set by the Ministry of Health and/or showing symptoms of fever, cough, runny nose, sore throat, shortness of breath, will be asked to give power of attorney to AJK;
- (iii) Required to fill, complete and submit a Health Declaration Form containing health and travel information before entering the Meeting room and attending the Meeting;
- (iv) Must take a Rapid Test held by the Company before entering the Meeting room and attending the Meeting;
- (v) Must wear a face shield provided by the Company while in the Meeting room during the Meeting;
- (vi) Must implement the Physical Distancing policy in waiting for queues with a distance of 1-2 meters in accordance with the direction of the Company and the Management of the Building where the Meeting is held;
- (vii)Must adhere to the Company's direction if the seating capacity in the Meeting room is no longer available, considering the Company's obligation to implement a physical distancing policy in arranging seats with a distance of 1-2 meters.

Bagi yang tidak mengikuti, tidak menjalankan dan/atau tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut di atas, tidak akan diijinkan masuk untuk menghadiri Rapat.

Those who do not follow, do not implement and/or do not comply with the implementation of the health protocols and precautions mentioned above, will not be allowed to attend the Meeting.

5. Perusahaan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

5. The Company will announce again if there are changes and/or additional information in line with the latest conditions and developments regarding the prevention and control of the spread of Covid-19.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2019

Pada tahun 2019, Perusahaan menyelenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali, yakni RUPS Tahunan pada 26 April 2019.

The Holding of the GMS 2019

In 2019, the Company held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS on April 26, 2019.

RUPS Tahunan 26 April 2019 Annual GMS April 26, 2019		
Agenda	Hasil Keputusan Resolutions	Realisasi dan Tindak Lanjut oleh Manajemen Realization and Follow Up by the Management
MATA ACARA PERTAMA / FIRST AGENDA		
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018 Approval of the Company's Annual Report including the Ratification of the Annual Financial Report and the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2018.	Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, termasuk laporan tahunan Direksi dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (A Member firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya Nomor: 00230/2.1032/AU.1/03/0687-1/1/III/2019 Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018, tanggal 18 Maret 2019 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" To approve and accept both the Company's Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2018, including the Board of Directors' annual report and ratify the supervisory report of the Company's Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2018 which had been audited by a Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (A Member firm of Ernst & Young Global Limited) according to their report Number: 00230/2.1032/AU.1/03/0687-1/1/III/2019 Regarding: Consolidated Financial Statements December 31, 2018, dated March 18, 2019 with the opinion of "the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Nusantara Infrastructure Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2018, as well as the consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia ".	Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris. Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.

RUPS Tahunan 26 April 2019 Annual GMS April 26, 2019		
Agenda	Hasil Keputusan Resolutions	Realisasi dan Tindak Lanjut oleh Manajemen Realization and Follow Up by the Management
	Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. Approved the full payment and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the 2018 financial year as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report.	
MATA ACARA KEDUA / SECOND AGENDA		
Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 Approval for the use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year ending December 31, 2018	Menyetujui laba hingga akhir tahun 2018 sebesar Rp179.651.455.872 (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dan dari laba tersebut sebesar Rp1.796.514.559 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) digunakan sebagai penyisihan cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Approved the profit until the end of 2018 amounting to Rp. 179,651,455,872 (one hundred seventy-nine billion six hundred and fifty-one million four hundred fifty-five thousand eight hundred and seventy-two Rupiah) and from that profit amounting to Rp1,796,514,559 (one billion seven hundred ninety-six million five hundred fourteen thousand five hundred and fifty nine Rupiah) was used as an allowance for reserves, in accordance with the provisions of Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.	Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris. Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.
MATA ACARA KETIGA / THIRD AGENDA		
Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; Appointment of Public Accountant who will conduct audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2019;	- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk. Granted the authority and power to the Board of Commissioners to designate a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority to conduct audits of the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2019 and determine the amount of audit services for the appointed public accountant. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya. Grants the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm if for any reason based on the provisions of the Capital Market regulations, the appointed Public Accounting Firm cannot carry out its duties.	Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris. Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.

RUPS Tahunan 26 April 2019 Annual GMS April 26, 2019		
Agenda	Hasil Keputusan Resolutions	Realisasi dan Tindak Lanjut oleh Manajemen Realization and Follow Up by the Management
MATA ACARA KEEMPAT / FOURTH AGENDA		
Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan gajiataun honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019 Determination of duties and authority as well as salaries and benefits for members of the Company's Directors and salaries or honorarium and benefits for members of the Company's Board of Commissioners for 2019	Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Approved to grant authority to the Nomination and Remuneration Committee, which in this case is carried out by the Company's Board of Commissioners, to determine the honorarium or salary, as well as other allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the financial year 2019 with due regard to the financial condition of the Company.	Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris. Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.
MATA ACARA KELIMA / FIFTH AGENDA		
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2018. Accountability Report of Realization of the Use of Funds from Limited Public Offering II Year 2018.	Karena agenda kelima RUPST bersifat pelaporan maka tidak diambil keputusan dan tidak dilakukan <i>voting</i> suara. Because the fifth agenda of the AGMS was reporting, no decisions were made and no voting was made.	Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris. Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memegang peranan sebagai salah satu Organ Perusahaan yang bertugas menjalankan tanggung jawab secara kolektif dalam bidang pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga berfungsi untuk memastikan bahwa di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal dan menyeluruh.

Perusahaan membentuk Dewan Komisaris dengan mengacu pada berbagai kebijakan dan ketentuan, antara lain Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki Pedoman Kerja yang berguna sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi dan perannya di Perusahaan. Penyusunan

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners plays a role as one of the Company's Instruments in charge of carrying out collective responsibility in the field of supervision and providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners also ensures that all levels of the Company's organization implement GCG principles optimally and thoroughly.

The Company established the Board of Commissioners by referring to the regulations and provisions, including the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 about Limited Liability Companies, and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Board of Commissioners Work Guidelines

To support the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has a Work Guidelines as its guides in fulfilling its functions and roles in the Company. The work guidelines are formulated

Pedoman Kerja dilakukan dengan berlandaskan pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman GCG Perusahaan dan memuat hal-hal seperti komposisi serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, persyaratan, hingga tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki Dewan Komisaris.

Persyaratan Dewan Komisaris

Terdapat adanya beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris, antara lain:

1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atas pailitnya suatu perusahaan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
5. Salah satu anggota Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan.

Ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah anggota tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman GCG Perusahaan, serta ketentuan lain yang berlaku. Satu periode masa jabatan Dewan Komisaris paling lama adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir satu periode masa jabatan, dengan tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat. Dewan Komisaris dapat diangkat kembali setelah periode jabatan sebelumnya berakhir. Dewan Komisaris yang akan diangkat harus lulus dari penilaian Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dapat terjadi apabila anggota tersebut mengundurkan diri, meninggal dunia, diketahui tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau diberhentikan oleh keputusan RUPS. Jika terjadi adanya

based on the Company's Articles of Association and GCG Guidelines and contain matters such as the composition and mechanism for the appointment and dismissal of the Board of Commissioners, requirements, up to the duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners.

Board of Commissioners' Requirements

There are requirements that must be met by prospective members of the Board of Commissioners, including:

1. Have good behavior and moral standing;
2. Capable of performing legal actions; and
3. Has never been declared bankrupt or has never been a member of a Board of Directors or a Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt within five years before the appointment.
4. Has never been convicted of a criminal offense in the financial sector within 5 (five) years prior to his appointment; and
5. One member of the Independent Commissioner must have an accounting and financial background.

Conditions of the Terms of Office of the Board of Commissioners

The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners are held by the General Meeting of Shareholders (GMS) after members meet the requirements stipulated in the Company's Articles of Association, GCG Guidelines and other applicable provisions. One term of office of the Board of Commissioners is 5 (five) years at maximum or until the closing of the Annual GMS at the end of one term of office, without prejudice to the Shareholders' rights to dismiss the current members of the Board of Commissioners at any time. The Board of Commissioners are reappointed after the previous terms of office end. Prospective members of the Board of Commissioners must pass the Fit and Proper Test assessment by the Financial Services Authority.

The termination of the terms of office of a member of the Board of Commissioners may occur if the member resigns, passes away, no longer meets the requirements of the applicable laws, and/or is discharged by the GMS resolutions. If there is a change of members of the Board

pergantian anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir, anggota baru yang menggantikan hanya akan menjabat selama sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebelumnya yang menjabat pada periode tersebut kecuali RUPS menentukan lain.

Komposisi Dewan Komisaris

Hingga akhir tahun 2020, komposisi Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang dengan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama serta 2 (tiga) orang lainnya menjabat sebagai Komisaris dan 1 (satu) orang menjabat sebagai Komisaris Independen. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 terkait jumlah anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang.

of Commissioners before their terms of office end, the new members who replaces will only serve for the remaining terms of office of the previous members who serve in that period unless the GMS determines otherwise.

Composition of the Board of Commissioners

Until the end of 2020, the composition of the Board of Commissioners consists of 4 (four) members, with one member serving as the President Commissioner and 2 (three) other members serving as Commissioners and 1 (one) member serving as Independent Commissioner. This number has met the provisions stipulated in the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the number of members of the Board of Commissioners, which consists of at least 2 (two) people.

Informasi terkait komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The information regarding the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2020 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Masa Akhir Jabatan Term Expiry
Jose Ma. Kamantigue Lim	Komisaris Utama President Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	31 Agustus 2018 August 31, 2018	RUPST 2023 AGMS 2023
Rodrigo Emmanuel Franco	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta		
Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	31 Agustus 2018 August 31, 2018	RUPST 2023 AGMS 2023

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Pengangkatan <i>Deed of Appointment</i>	Tanggal Pengangkatan <i>Date of Appointment</i>	Masa Akhir Jabatan <i>Term Expiry</i>
Farid Harianto	Komisaris <i>Commissioner</i>	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 94 tanggal 18 November 2020 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 94 dated November 18, 2020, made before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	19 Agustus 2020 August 19, 2020	RUPST 2023 AGMS 2023

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas utama yakni:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
- Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan; dan
- Mengawasi efektivitas penerapan GCG, pengelolaan Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal (*Internal Control*) yang diimplementasikan oleh Perusahaan.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tanggung jawab yang dimiliki Dewan Komisaris di Perusahaan adalah:

- Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan mengawasi agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan kepada masyarakat oleh pejabat yang berwenang dari Perusahaan;
- Baik langsung maupun tidak langsung untuk tidak membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perusahaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat; dan
- Secara sendiri-sendiri ataupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan ini.

DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Duties of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the following main duties:

- Supervise the Company's management policies conducted by the Board of Directors;
- Advise the Board of Directors in carrying out the management of the Company; and
- Monitor the effectiveness of GCG activities, administration of Risk Management, and Internal Control implemented by the Company.

Responsibilities of the Board of Commissioners

The responsibilities held by the Board of Commissioners in the Company are as follows:

- Supervise management policies, management processes in general, both regarding the Company and the Company's business, and give advice to the Directors.
- Maintaining the confidentiality of Company information and monitoring so that confidential information is not disclosed until the announcement of the issue to the public by authorized officials from the Company.
- Either directly or indirectly does not make untrue statements about material facts or does not disclose material facts so that the statements do not mislead the state of the Company at the time it was made.
- Individual or joint responsibility for losses of other parties as a result of violation of this provision.

Wewenang Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris didukung dengan adanya wewenang untuk:

- Setiap waktu dalam jam kerja kantor, Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan;
- Memeriksa pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya;
- Memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain;
- Berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; dan
- Berhak dan dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris.

HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai organ-organ Perusahaan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan bisnis usaha yang berjalan baik, Dewan Komisaris dan Direksi dituntut untuk dapat memiliki kerja sama yang baik dengan hubungan kerja yang baik pula. Adanya hubungan kerja yang baik ini dapat menunjang Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing secara optimal.

Di dalam proses menjalankan aktivitas usaha, Dewan Komisaris senantiasa menghormati fungsi dan peran yang dimiliki Direksi, yakni melakukan pengelolaan dan pengurusan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi pun senantiasa menghormati fungsi dan peran yang dimiliki Dewan Komisaris, yakni melakukan pengawasan serta pemberian nasihat yang membangun kepada Direksi terkait kebijakan pengurusan Perusahaan.

Direksi sendiri memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada Dewan Komisaris berbagai laporan yang dibutuhkan dan Dewan Komisaris memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi terkait Perusahaan, yang ketersediaan dan keakuratannya wajib dipastikan oleh Direksi sebagai organ pelaksana aktivitas operasional usaha Perusahaan.

Authorities of the Board of Commissioners

The implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners is supported with the authorities to:

- At any time during office hours, to enter buildings and yards or other places used or controlled by the Company;
- Checking books, letters and other evidence;
- Check and match the situation of cash and others;
- Have the right to know all actions taken by the Directors;
- Have the right and can use independent professional services and/or form committees to assist the Board of Commissioners' duties.

WORK RELATION BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

As the Company's instruments with an important role in realizing its business, the Board of Commissioners and the Board of Directors are required to have both good cooperation and working relation. The existence of a good working relation can support the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their respective duties and responsibilities.

In the process of carrying out business activities, the Board of Commissioners always respects the functions and roles of the Board of Directors, namely managing and managing the Company as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The Board of Directors respects the functions and roles of the Board of Commissioners, namely to supervise and provide constructive advice to the Board of Directors regarding the Company's management policies.

The Board of Directors itself has the responsibility to submit reports to the Board of Commissioners and the Board of Commissioners has the right to gain access to information related to the Company, of which availability and accuracy must be ensured by the Board of Directors as the implementing instrument of the Company's business operations.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 yakni paling sedikit satu kali dalam dua bulan. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, rapat Dewan Komisaris dilaksanakan setiap kali dianggap perlu melalui permintaan tertulis oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang anggota Direksi atau 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 10% jumlah saham dengan hak suara yang telah ditempatkan oleh Perusahaan.

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat internal sebanyak 6 kali dengan rincian tanggal dan agenda sebagai berikut:

Tanggal / Date	Agenda
3 Februari 2020 February 3, 2020	Pembahasan Kondisi Umum Perusahaan Discussion on the Company's General Condition
27 April 2020 April 27, 2020	Pembahasan perkembangan pembangunan jalan tol layang A. P. Pettarani Makassar Discussion on the development of A.P. Pettarani Makassar elevated toll road construction
24 Juni 2020 June 24, 2020	Pembahasan laporan tahunan dan rencana pelaksanaan RUPS Discussion on annual report and GMS implementation plan
25 September 2020 September 25, 2020	Pembahasan perkembangan pembangunan jalan tol layang A. P. Pettarani Makassar Discussion on the development of A.P. Pettarani Makassar elevated toll road construction
28 Oktober 2020 October 28, 2020	Pembahasan Laporan Keuangan per 30 September 2020 Discussion on Financial Statements as of 30 September 2020
21 Desember 2020 December 21, 2020	Pembahasan perkembangan proyek Perusahaan dan Anak Usaha Discussion on projects development of the Company and its Subsidiaries

Board of Commissioners Meeting

Meetings of the Board of Commissioners refers to the provisions of POJK No. 33/POJK.04/2014 and is held at least once in two months. As stipulated by the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners' Meeting is held whenever it is deemed necessary through the written request by 1 (one) member of the Board of Commissioners or 1 (one) member of the Board of Directors or 1 (one) or more shareholder representing 10% of the Company's shares with voting rights.

Internal Meeting Agenda of the Board of Commissioners

In 2020, the Board of Commissioners held 6 internal meetings with the following dates and agendas:

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Internal

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal dijabarkan dalam tabel-tabel berikut:

The Attendance of Members of the Board of Commissioners in Internal Meetings

The attendance of members of the Board of Commissioners in internal meetings is described in the following table:

Tanggal Date	Jose Ma. K. Lim Komisaris Utama President Commissioner	Rodrigo E. Franco Komisaris Commissioner	Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang Komisaris Independen Independent Commissioner	Farid Harianto Komisaris Commissioner	Alasan Ketidakhadiran Reason For Absence
3 Februari 2020 February 3, 2020	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Dewan Komisaris Not yet joined the Board of Commissioners

Tanggal Date	Jose Ma. K. Lim Komisaris Utama President Commissioner	Rodrigo E. Franco Komisaris Commissioner	Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang Komisaris Independen Independent Commissioner	Farid Harianto Komisaris Commissioner	Alasan Ketidakhadiran Reason For Absence
27 April 2020 April 27, 2020	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Dewan Komisaris Not yet joined the Board of Commissioners
24 Juni 2020 June 24, 2020	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Dewan Komisaris Not yet joined the Board of Commissioners
25 September 2020 September 25, 2020	✓	✓	✓	✓	-
28 Oktober 2020 October 28, 2020	✓	✓	✓	✓	-
21 Desember 2020 December 21, 2020	✓	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Jose Ma. K. Lim	6	6	100%
Rodrigo E. Franco	6	6	100%
Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	6	6	100%
Farid Harianto	6	3	50%

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Perusahaan memastikan komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, serta pengalaman yang dapat menunjang Perusahaan meraih kinerja optimal dari berbagai sisi. Komitmen dan upaya Perusahaan tersebut diterapkan sesuai dengan yang tercantum dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Diversity of the Board of Commissioners

The Company ensures that the composition of the Board of Commissioners has a variety of expertise, knowledge, and experience that can support the Company in achieving optimal performance from various sides. The commitment and efforts of the Company are implemented in accordance with the recommendations of the Financial Services Authority, which are contained in the Attachment of the Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 on Good Corporate Governance Guidelines for Public Company.

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Akademik Academic Background	Keahlian Skill	Usia Age	Gender
Jose Ma. K. Lim	Filipina Phillipines	Sarjana Ilmu Filsafat dan Magister Administrasi Bisnis Bachelor of Philosophy and Master of Business Administration	Administrasi Bisnis, Filosofi Business Administration, Philosophy	68 tahun 68 years old	Laki-laki Male
Rodrigo E. Franco	Filipina Phillipines	Sarjana Manajemen Bisnis dan Magister Administrasi Bisnis Bachelor of Business Management and Master of Business Administration	Manajemen Bisnis, Administrasi Bisnis Business Management, Business Administration	61 tahun 61 years old	Laki-laki Male
Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	Indonesia Indonesian	Akademi Militer Indonesia Indonesian Military Academy	Kemiliteran, Hukum Military, Law	74 tahun 74 years old	Laki-laki Male
Farid Harianto	Indonesia Indonesian	Sarjana Teknik Elektro, Master of Applied Economics and Managerial Science, dan Ph.D. in Applied Economics and Managerial Science Bachelor of Electrical Engineering, Master of Applied Economics and Managerial Science, and Ph.D. in Applied Economics and Managerial Science	Ekonomi, Keuangan Economics, Finance	68 tahun 68 years old	Laki-laki Male

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Hingga akhir tahun 2020, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di Perusahaan. Informasi terkait hal tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Board of Commissioners' Share Ownership

By the end of 2020, all members of the Board of Commissioners did not own any share in the Company. Related information is described in the table as follows:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	PT Nusantara Infrastructure Tbk		Saham Perusahaan Publik Lain <i>Shares of Other Public Companies</i>	
		Nilai Score	Persentase Percentage	Nilai Score	Persentase Percentage
Jose Ma. K. Lim	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Rodrigo E. Franco	Komisaris Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Farid Harianto	Komisaris Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

KOMISARIS INDEPENDEN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perusahaan diwajibkan untuk memiliki Komisaris Independen dengan komposisi paling kurang 30% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali, baik berupa hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga yang dapat mempengaruhi kapabilitasnya dalam bertindak secara independen. Komisaris Independen memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan dan juga menjadi wakil dalam hal kepentingan pemegang saham minoritas.

Perusahaan memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen dari total 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris yang dijabat oleh Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang. Informasi lebih rinci terkait profil Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang dapat dilihat pada pembahasan "Profil Dewan Komisaris" di dalam bab "Profil Perusahaan".

INDEPENDENT COMMISSIONER

s stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company is required to have Independent Commissioners with a composition of at least 30% of the total members of the Board of Commissioners.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders that may hinder or inhibit their position to act independently in accordance with the principles GCG principles. The Independent Commissioner is responsible for supervising and also representing the interests of minority shareholders.

The Company has 1 (one) Independent Commissioner from the total of 4 (four) members of the Board of Commissioners, held by TNI Lieutenant General (Ret.) Johny J. Lumintang. Further information on TNI Lieutenant General (Ret.) Johny J. Lumintang can be viewed in the "Board of Commissioners' Profile" discussion in the "Company Profile" chapter.

Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Periode Jabatan <i>Terms of Office</i>
Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	31 Agustus 2018 – RUPST 2023 August 31, 2018 – AGMS 2023

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Dalam menentukan Komisaris Independen, Perusahaan mengacu pada kriteria sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014, yakni:

1. Berasal dari luar Perusahaan;
2. Tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Dewan Komisaris, dilakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris melalui proses evaluasi. Penilaian tersebut dilakukan secara berkala dengan mengkaji hasil pencapaian tugas dan tanggung jawab serta peran serta padanya dalam kinerja Perusahaan di sepanjang tahun buku. Penilaian dalam bentuk evaluasi dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya, hasil dari penilaian tersebut digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020 dinilai telah cukup baik dan mampu mendukung Perusahaan mempertahankan kinerja yang cukup stabil meski kondisi ekonomi dan industri bisnis usaha di tahun 2020 terhitung tidak kondusif.

Penilaian terhadap Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yakni:

1. Komite Audit yang berperan membantu Dewan Komisaris untuk memastikan penyusunan Laporan Keuangan telah dilakukan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, penerapan pengendalian internal telah berjalan baik, proses audit internal dan eksternal telah sesuai dengan standar

The Criteria for Determining the Independent Commissioner

To determine the Independent Commissioner, the Company refers to the criteria in accordance with POJK No. 33/POJK.04/2014, namely:

1. Originating from outside the Company;
2. Do not own shares, either directly or indirectly, in the Company;
3. Has no affiliation with the Company, other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders; and
4. Has neither direct nor indirect relationship with the Company's business activities.

Evaluation of the Board of Commissioners' Performance

In order to improve the Board of Commissioners' performance quality, a performance evaluation for the Board of Commissioners is carried out through an evaluation process. The assessment is held periodically by reviewing the results of the achievement of duties and responsibilities, as well as their participation in the Company's performance throughout the fiscal year. The assessment, in the form of evaluation, is carried out by the Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS). Furthermore, the results of the assessment are used as one of the considerations determining the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners.

Based on the evaluation results, the Board of Commissioners' performance in 2020 was thought to be good and was capable to support the Company in maintaining a stable performance despite less conducive economic condition and business industry in 2020.

Evaluation of Performance for the Committees Under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners performs its duties with supports from the committees under it, namely:

1. The Audit Committee assists the Board of Commissioners to ensure that the preparation of Financial Statements has been carried out fairly and in accordance with the applicable accounting principles, the implementation of internal control runs well, the internal and external audit process is in accordance with the prevailing standards,

yang ada, serta hasil temuan audit telah ditindaklanjuti dengan baik.

2. Komite Nominasi dan Remunerasi yang berperan membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan penetapan terkait nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.
3. Komite Investasi dan Strategi yang berperan membantu Dewan Komisaris untuk memberikan masukan, kajian, serta perencanaan dan pengawasan terhadap inisiatif pengembangan usaha Perusahaan dalam upaya penerapan kebijakan investasi Perusahaan.

Berdasarkan hasil pantauan dan penilaian oleh Dewan Komisaris, komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Investasi dan Strategi di sepanjang tahun 2020 telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai komite pendukung kinerja Dewan Komisaris dan telah menunjang Dewan Komisaris memenuhi perannya melakukan fungsi pengawasan di Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2020

Hingga akhir tahun 2020, Dewan Komisaris telah memenuhi tanggung jawabnya dengan melaksanakan fungsinya melalui proses pengawasan dan pemberian arahan hingga masukan kepada Direksi. Berbagai tugas dan tanggung jawab pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020 antara lain menyelenggarakan rapat koordinasi bersama seluruh anggota Dewan Komisaris, menghadiri rapat gabungan dengan Direksi untuk memberikan masukan dan saran kepada Direksi, penyampaian rekomendasi dan arahan kepada Direksi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis.

DIREKSI

Direksi merupakan salah satu Organ Perusahaan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan, memastikan aktivitas bisnis usaha Perusahaan dapat berjalan dengan baik, serta bertugas menjadi perwakilan Perusahaan.

and the audit findings have been properly followed up.

2. The Nomination and Remuneration Committee assists the Board of Commissioners in carrying out decisions related to the nomination and remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Investment and Strategy Committee assists the Board of Commissioners in providing inputs, reviews, and planning and supervision of the Company's business development initiatives in an effort to implement the Company's investment policies.

Based on the monitoring and assessment results by the Board of Commissioners, the committees under the Board of Commissioners have fulfilled their duties and responsibilities properly and produced effective and efficient performance. In 2020, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Investment and Strategy Committee have carried out their duties properly as committees to support the performance of the Board of Commissioners and have supported the Board of Commissioners in fulfilling their role in carrying out the supervisory function in the Company.

Duties and Responsibilities Implementation of the Board of Commissioners in 2020

Until the end of 2020, the Board of Commissioners has fulfilled its responsibilities by carrying out its functions in monitoring and providing directions and inputs to the Board of Directors. The Board of Commissioners has performed various supervisory duties and responsibilities throughout 2020, including holding coordination meetings with all members of the Board of Commissioners, attending joint meetings with the Board of Directors to give inputs and suggestions to the Board of Directors, and submitting spoken or written recommendation and directions to the Board of Directors.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is one of the Company's Instruments with the duties, responsibilities and authority over the management of the Company, ensures the performance of the Company's business activities, and serves as the Company's representative.

Pembentukan Direksi dilakukan Perusahaan dengan mengacu pada berbagai kebijakan dan ketentuan, antara lain Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pedoman Kerja Direksi

Untuk mendukung Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, Direksi memiliki Pedoman Kerja yang berguna sebagai pedoman bagi Direksi dalam memenuhi fungsi dan perannya di Perusahaan. Pedoman Kerja Direksi disusun sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 35 POJK No.33 tahun 2014 dan telah tercantum dalam *Manual* GCG Perusahaan. Pedoman Kerja tersebut mengatur berbagai hal terkait Direksi, antara lain komposisi, pengangkatan dan pemberhentian Direksi, persyaratan, tugas, tanggung jawab, wewenang Direksi, serta rapat Direksi.

Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Persyaratan Direksi

Terkait komposisi serta pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Perusahaan mengacu pada beberapa dasar berikut:

- Jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan;
- Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi Perusahaan yang sahamnya tercatat di pasar modal BEI, proses penilaian calon anggota Direksi dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi;
- Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; dan
- Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan Perusahaan sehari-hari.

The basis for the formation of the Board of Directors refers to the applicable policies and regulations, such as Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Guidelines for the Board of Directors

To support itself in carrying out their duties and responsibilities, the Board of Directors has a Work Guidelines which serves as guidelines for the Board of Directors in fulfilling its functions and roles in the Company. The Board of Directors Work Guidelines are formulated as stipulated in the provisions of Article 35 POJK No.33 of 2014 and have been listed in the Company's GCG Manual. These Work Guidelines regulate matters related to the Board of Directors, including the composition, appointment and dismissal of the Board of Directors, requirements, duties, responsibilities, authority, and the Board of Directors' meeting.

Composition, Appointment and Dismissal, and Requirements of the Board of Directors

Regarding the composition, appointment, and dismissal of the Board of Directors, the Company refers to the following basis:

- The size of the Board of Directors should be adjusted to the complexity of the Company with due consideration to the effectiveness in decision making;
- Members of the Board of Directors are chosen and terminated by GMS through a transparent process. For a company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI), the assessment process of candidates for the Board of Directors is conducted prior to the AGMS by the Nomination and Remuneration Committee;
- The termination of the members of the Board of Directors by the GMS should be based on reasonable arguments after the person is given the chance to defend him/herself; and
- All members of Company's Board of Directors should be domiciled in Indonesia, in a location that enables them to conduct daily tasks concerning the Company's management.

Persyaratan Direksi

Terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Direksi dalam hal pemilihan atau pengangkatan Direksi, yaitu:

- Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atas pailitnya suatu perusahaan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Ketentuan Masa Jabatan Direksi

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertugas dan berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi. Pengangkatan dilakukan setelah anggota tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman GCG Perusahaan, dan ketentuan lain yang berlaku serta telah lulus dari penilaian Uji Kelayakan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan. Direksi memiliki masa jabatan yang berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan pada akhir satu periode masa jabatan kecuali ditentukan lain dalam RUPS tersebut, dengan tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi yang sedang menjabat. Direksi dapat diangkat kembali setelah periode jabatan sebelumnya berakhir.

Masa jabatan Direksi berakhir apabila anggota tersebut mengundurkan diri, meninggal dunia, diketahui tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau diberhentikan oleh keputusan RUPS. Apabila terdapat pergantian anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir, anggota baru yang menggantikan hanya akan menjabat selama sisa masa jabatan anggota Direksi sebelumnya yang menjabat pada periode tersebut kecuali RUPS menentukan lain.

Board of Directors' Requirements

There are requirements that must be met by the Board of Directors in terms of appointment, namely:

- Have good behavior and moral standing;
- Capable of performing legal actions;
- Has never been declared bankrupt or has never been a member of a Board of Directors or a Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt within five years before the appointment.
- Has never been sentenced for committing a criminal offense in the financial field within five years before the appointment.

Provision of the Board of Directors' Terms of Office

The General Meeting of Shareholders (GMS) has the duty and authority to appoint and dismiss members of the Board of Directors. The appointment is made after the members meet the requirements stipulated in the Company's Articles of Association, GCG Guidelines, and other applicable provisions and has passed the Fit and Proper Test assessment by the Financial Services Authority. The Board of Directors has a terms of office that is valid from the date specified in the GMS and ends at the closing of the Annual GMS at the end of one terms of office unless stipulated otherwise in the GMS, without prejudice to the Shareholders' right to dismiss the current member of the Board of Directors at any time. The Board of Directors can be reappointed after the end of their previous terms of office.

The terms of office of the Board of Directors ends if a member resigns, passes away, no longer fulfills the requirements of the applicable laws, and/or is terminated by a resolution of the GMS. If there is a change of members of the Board of Directors before their terms of office ends, new members will only serve for the remaining terms of office of the previous members who serve in that period unless the GMS determines otherwise.

Komposisi Direksi

Hingga akhir tahun 2020, Direksi Perusahaan memiliki komposisi yang terdiri dari 8 (delapan) orang dengan salah satunya menjabat sebagai Direktur Utama. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 yakni paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang.

Composition of the Board of Directors

Until the end of 2020, the Company's Board of Directors has a composition consisting of 8 (eight) members, one of which is the President Director. This amount has met the provisions stipulated in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, namely consisting of at least 2 (two) people.

Informasi terkait komposisi Direksi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Information on the Board of Directors' composition as of December 31, 2020, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Masa Akhir Jabatan Term Expiry
M. Ramdani Basri	Direktur Utama & CEO President Director & CEO	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	31 Agustus 2018 August 31, 2018	RUPST 2023 AGM 2023
Danni Hasan	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta		
Ridwan Irawan	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta		
Denn Charly G. Espanola	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta		
Amadeo Navalta Bejec	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta		

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Masa Akhir Jabatan Term Expiry
Christopher Daniel Cabrera Lizo	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	31 Agustus 2018 August 31, 2018	RUPST 2023 AGMS 2023
Francis Emmanuel Dalupan Rojas	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta		
Benny S. Santoso	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 94 tanggal 18 November 2020 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 94 dated November 18, 2020, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	19 Agustus 2020 August 19, 2020	RUPST 2023 AGMS 2023

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Direksi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi antara lain sebagai berikut:

Tugas Direksi

Secara kolektif dan umum, Direksi memiliki tugas yakni:

- Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan serta membuat program jangka panjang dan jangka pendek untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
- Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko Perusahaan, yang meliputi seluruh aspek kegiatan Perusahaan;

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS

As stipulated in the Board of Directors' Work Guidelines, the duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors are as follows:

Duties of the Board of Directors

In collective and general manners, the Board of Directors has the following duties:

- Develop the Company's vision, mission, and values as well as long-term and short-term programs to be discussed with and approved by the Board of Commissioners or the GMS in accordance with the provisions of the Articles of Association.
- Manage and apply the Company's resources effectively and efficiently, with regards to the interests of the stakeholders.
- Prepare and implement the Company's risk management system covering all aspects of the Company's activities.

- Memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan; dan
- Membuat perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pembagian Lingkup Kerja Direksi

Secara khusus, Direktur Utama dan Direktur Perseroan masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

CEO & President Director:

- Bertanggung jawab untuk memberikan kepemimpinan strategis dari keseluruhan bisnis dengan bekerja sama dengan Dewan dan manajemen lainnya untuk menetapkan tujuan, rencana dan strategi jangka pendek dan jangka panjang;
- Memastikan organisasi yang efektif dan efisien dalam hal struktur, tata kelola dan sumber daya manusia serta kemampuan kepemimpinan; dan
- Mewakili Perusahaan kepada pemegang saham, Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan lainnya.

Managing Director:

- Mengelola dan mendorong proses pengambilan keputusan strategi Direksi ke seluruh grup bisnis Perusahaan;
- Bertanggung jawab atas kinerja Perusahaan selaras dengan tujuan, rencana, dan strategi jangka pendek dan jangka panjang;
- Bertanggung jawab atas hasil keseluruhan pada kapitalisasi pasar, pertumbuhan, profitabilitas, dan keberlanjutan; dan
- Mengawasi kinerja Direksi secara keseluruhan dalam peran dan tanggung jawab mereka.

Operation Director:

- Bertanggung jawab penuh untuk memimpin keseluruhan operasi dalam seluruh sektor bisnis dan memastikan bisnis berjalan pada tingkat yang optimal dan efisien, berdasarkan kebijakan, sasaran, dan sasaran Perusahaan; dan
- Mendorong pertumbuhan organik bisnis dan produktivitas dalam setiap sektor bisnis selaras dengan tujuan Perusahaan.

- Ensure smooth communications between the Company and stakeholders by empowering the function of the Corporate Secretary.
- Establish a clear written plan with a focus on carrying out the requirements of corporate social responsibility.

Division of Scope of Work of the Board of Directors

Specifically, the President Director and the Company's Directors have their own duties as follows:

CEO & President Director:

- Responsible for providing strategic leadership of the entire business by working closely with the Board and other management to establish short and long term goals, plans and strategies;
- Ensuring an effective and efficient organization in terms of structure, governance and human resources and leadership capabilities; and
- Representing the Company to shareholders, the Board of Commissioners and other stakeholders. .

Managing Director:

- Manage and encourage the strategic decision-making process of the Board of Directors throughout the Company's business groups;
- To be responsible for the Company's performance in line with its short and long term goals, plans and strategies;
- Responsible for the overall results on market capitalization, growth, profitability and sustainability; and
- Oversee the overall performance of the Board of Directors in their roles and responsibilities.

Operation Director:

- Fully responsible for leading the entire operation in all business sectors and ensuring the business runs at an optimal and efficient level, based on the Company's policies, goals and objectives; and
- Encouraging organic business growth and productivity in every business sector in line with the Company's objectives.

Finance Director:

- Memberikan kepemimpinan pada strategi Keuangan dan Akuntansi kepada Dewan, untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dan posisi strategis Perusahaan;
- Mengambil kontrol keseluruhan dari fungsi akuntansi Perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kebijakan pengelolaan kas Perusahaan untuk seluruh sektor bisnis; dan
- Bertanggung jawab untuk mencari sumber pendanaan pada kondisi paling optimal untuk proyek-proyek investasi.

Business Development Director:

- Mengeksplor dan menciptakan peluang bisnis baru yang selaras dengan tujuan dan strategi jangka pendek dan jangka panjang; dan
- Mengembangkan kebijakan dan strategi untuk mengembangkan bisnis melalui *Merger & Acquisitions*, serta ekspansi aset.

Tanggung Jawab Direksi

- Menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan, yang memuat antara lain Laporan Keuangan, laporan kegiatan Perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG;
- Meminta persetujuan RUPS atas Laporan Tahunan dan meminta pengesahan RUPS atas Laporan Keuangan;
- Memastikan tersedianya Laporan Tahunan sebelum RUPS diselenggarakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian;
- Melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya, dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan; dan
- Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal Perusahaan yang kompeten dalam rangka menjaga kekayaan dan meningkatkan kinerja Perusahaan serta mematuhi peraturan dan perundang-undangan.

Wewenang Direksi

- Direktur Utama memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak dan mengatasnamakan Direksi untuk mewakili Perusahaan;

Finance Director:

- Provide leadership on Financial and Accounting strategies to the Board, to optimize the Company's financial performance and strategic position;
- Take overall control of the Company's accounting functions and take full responsibility for the Company's cash management policies for all business sectors; and
- Responsible for finding funding sources at the most optimal conditions for investment projects.

Business Development Director:

- Explore and create new business opportunities that are aligned with short-term and long-term goals and strategies; and
- Develop policies and strategies to develop business through Mergers & Acquisitions, as well as asset expansion.

Responsibilities of the Board of Directors

- Arranges the responsibility for managing the Company in the form of Annual Report, which includes, among others, Financial Statements, Company activity reports, and GCG implementation reports;
- Request GMS approval for the Annual Report and GMS validation for the Financial Report;
- Ensuring the availability of Annual Report before the GMS is held, in accordance with applicable regulations so as to enable shareholders to make an assessment;
- Carrying out its duties for the benefit of the Company, to achieve its goals and objectives, by complying with applicable laws and regulations as well as Articles of Association; and
- Develop and implement a competent internal control system in order to preserve wealth and improve Company performance and comply with regulations and laws.

Authorities of the Board of Directors

- The President Director has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors to represent the Company.

- Direksi berwenang memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, tanpa pelimpahan tanggung jawab;
 - Apabila Direktur Utama tidak hadir, berhalangan hadir, atau berhalangan karena sebab apapun, dua orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak dan mengatasnamakan Direksi serta mewakili atau melakukan penyertaan modal ke dalam perusahaan lain. Dalam praktiknya, tindakan anggota Direksi tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dari Direktur Utama;
 - Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berwenang untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dengan harus memberikan surat kuasa yang menyatakan bahwa telah terjadi pelimpahan wewenang kepada pemegang kuasa tersebut.
- The Board of Directors has the authority to authorize committees to support his administration or to the Company's employees to conduct certain tasks, although the full responsibility thereof still resides with the Board of Directors.
 - If the President Director is absent for any reason, two members of the Board of Directors have the authority to act on behalf of the Board of Directors and represent or conduct capital participation in other companies. The action of the members of the Board of Directors must be approved in writing by the President Director.
 - Without prejudice to its responsibility, the Board of Directors has the authority to assign one or more proxies to act on behalf of the Board of Directors and for that purpose, the Board of Directors must draw up a power of attorney granting power to the proxy.

Independensi Direksi

Sebagai organ Perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Perusahaan, Direksi dituntut untuk mampu memenuhi tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan dilaksanakan dengan itikad baik tanpa adanya intervensi dari Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan lainnya demi kepentingan Perusahaan. Jika terdapat adanya masalah, Direksi diwajibkan mengutamakan kepentingan Perusahaan dan mengesampingkan kepentingan pribadi guna menghindari potensi adanya benturan kepentingan yang merugikan.

Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 yakni paling sedikit satu kali dalam dua bulan. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, rapat Direksi dilaksanakan setiap kali dianggap perlu melalui permintaan tertulis oleh 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi atau 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 10% jumlah saham dengan hak suara yang telah ditempatkan oleh Perusahaan.

Agenda Rapat Internal Direksi

Sepanjang tahun 2020, Direksi menyelenggarakan rapat internal sebanyak 12 kali dengan rincian tanggal dan agenda sebagai berikut:

Independency of the Board of Directors

As the Company's instrument with responsibility for managing the Company, the Board of Directors must be able to fulfill its duties and responsibilities independently and in good faith without any intervention from the Shareholders or other stakeholders for the benefit of the Company. If a problem occurs, the Board of Directors is obliged to prioritize the interests of the Company and put aside personal interests in order to avoid potential adverse conflicts of interest.

Board of Directors' Meeting

The Board of Directors' Meeting refers to the provisions of POJK No. 33/POJK.04/2014 and is held at least once every two months. As stipulated in the Company's Articles of Association, the Board of Directors' Meeting is held every time it is deemed necessary through the written request from 1 (one) member of the Board of Directors or 1 (one) member of the Board of Commissioners or 1 (one) or more shareholders representing 10% of the Company's shares with voting rights.

Internal Meeting Agenda of the Board of Directors

In 2020, the Board of Directors held 12 internal meetings with the description of the dates and agenda as follows:

Tanggal / Date	Agenda
22 Januari 2020 January 22, 2020	Pembahasan Kondisi Perusahaan, Update Proyek-Proyek, Prospek Sektor dan Anak Usaha Discussion of Company Conditions, Update on Projects, Prospects of Sectors and Subsidiaries
19 Februari 2020 February 19, 2020	Pembahasan Kondisi Perusahaan, Update Proyek-Proyek, Prospek Sektor dan Anak Usaha Discussion of Company Conditions, Update on Projects, Prospects of Sectors and Subsidiaries
24 Maret 2020 March 24, 2020	Pembahasan Kondisi Perusahaan, Update Proyek-Proyek, Prospek Sektor dan Anak Usaha Discussion of Company Conditions, Update on Projects, Prospects of Sectors and Subsidiaries
22 April 2020 April 22, 2020	Pembahasan Kondisi Perusahaan, Update Proyek-Proyek, Prospek Sektor dan Anak Usaha Discussion of Company Conditions, Update on Projects, Prospects of Sectors and Subsidiaries
20 Mei 2020 May 20, 2020	Pembahasan Kondisi Perusahaan, Update Proyek-Proyek, Prospek Sektor dan Anak Usaha Discussion of Company Conditions, Update on Projects, Prospects of Sector and Subsidiaries
22 Juni 2020 June 22, 2020	Pembahasan Kondisi Perusahaan, Update Proyek-Proyek, Prospek Sektor dan Anak Usaha Discussion of Company Conditions, Update on Projects, Prospects of Sectors and Subsidiaries
22 Juli 2020 July 22, 2020	Pembahasan Kondisi Perusahaan, Update Proyek-Proyek, Prospek Sektor dan Anak Usaha Discussion of Company Conditions, Update on Projects, Prospects of Sector and Subsidiaries
20 Agustus 2020 August 20, 2020	Pembahasan Kondisi Perusahaan, Update Proyek-Proyek, Prospek Sektor dan Anak Usaha Discussion of Company Conditions, Update on Projects, Prospects of Sectors and Subsidiaries
22 September 2020 September 22, 2020	Pembahasan Kondisi Perusahaan, Update Proyek-Proyek, Prospek Sektor dan Anak Usaha Discussion of Company Conditions, Update on Projects, Prospects of Sectors and Subsidiaries
21 Oktober 2020 October 21, 2020	Pembahasan Kondisi Perusahaan, perkembangan proyek-proyek, dan prospek sektor dan anak usaha Discussion of Company Conditions, Update on Projects, Prospects of Sectors and Subsidiaries
20 November 2020 November 20, 2020	Pembahasan Kondisi Perusahaan, perkembangan proyek-proyek, dan prospek sektor dan anak usaha Discussion of Company Conditions, Update on Projects, Prospects of Sectors and Subsidiaries
16 Desember 2020 December 16, 2020	Pembahasan Kondisi Perusahaan, perkembangan proyek-proyek, dan prospek sektor dan anak usaha Discussion of Company Conditions, Update on Projects, Prospects of Sectors and Subsidiaries

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Internal

Kehadiran anggota Direksi dalam rapat internal dijabarkan dalam tabel-tabel berikut:

Attendance of Members of the Board of Directors in Internal Meeting

The attendance of members of the Board of Directors in the internal meeting is described in the following table:

Tanggal Date	M. Ramdani Basri Direktur Utama & CEO President Director & CEO	Danni Hasan Direktur Director	Ridwan Irawan Direktur Director	Denn Charly G. Espanola Direktur Director	Amadeo Navalta Bejec Direktur Director	Christopher Daniel Cabrera Lizo Direktur Director	Francis Emmanuel Dalupan Rojas Direktur Director	Benny S. Santoso Direktur Director	Alasan Ketidakhadiran Reason For Absence
22 Januari 2020 January 22, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Direksi Not yet joined the Board of Directors
19 Februari 2020 February 19, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Direksi Not yet joined the Board of Directors

Tanggal Date	M. Ramdani Basri Direktur Utama & CEO President Director & CEO	Danni Hasan Direktur Director	Ridwan Irawan Direktur Director	Denn Charly G. Espanola Direktur Director	Amadeo Navalta Bejec Direktur Director	Christopher Daniel Cabrera Lizo Direktur Director	Francis Emmanuel Dalupan Rojas Direktur Director	Benny S. Santoso Direktur Director	Alasan Ketidakhadiran Reason For Absence
24 Maret 2020 March 24, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Direksi Not yet joined the Board of Directors
22 April 2020 April 22, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Direksi Not yet joined the Board of Directors
20 Mei 2020 May 20, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Direksi Not yet joined the Board of Directors
22 Juni 2020 June 22, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Direksi Not yet joined the Board of Directors
22 Juli 2020 July 22, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Direksi Not yet joined the Board of Directors
20 Agustus 2020 August 20, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
22 September 2020 September 22, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
21 Oktober 2020 October 21, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
20 November 2020 November 20, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
16 Desember 2020 December 16, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
M. Ramdani Basri	12	12	100%
Danni Hasan	12	12	100%
Ridwan Irawan	12	12	100%
Denn Charly G. Espanola	12	12	100%
Amadeo Navalta Bejec	12	12	100%

Tanggal Date	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Christopher Daniel Cabrera Lizo	12	12	100%
Francis Emmanuel Dalupan Rojas	12	12	100%
Benny S. Santoso	12	5	42%

Keberagaman Komposisi Direksi

Perusahaan memastikan komposisi Direksi memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, serta pengalaman yang dapat menunjang Perusahaan meraih kinerja optimal dari berbagai sisi. Komitmen dan upaya Perusahaan tersebut diterapkan sesuai dengan yang tercantum dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Diversity of the Board of Directors' Composition

The Company ensures that the Board of Directors' composition has a diversity of expertise, knowledge, and experience that can support the Company in achieving optimal performance from various sides. The Company's commitment and efforts are implemented in accordance with those listed in the recommendations of the Financial Services Authority in the Attachment to the Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Good Corporate Guidelines for Public Company.

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Akademik Academic Background	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
M. Ramdani Basri	Indonesia Indonesian	Magister Kebijakan Publik dan Executive Education bidang Infrastruktur Ekonomi Master of Public Policies and Executive Education in Infrastructure Economy	Ekspansi dan diversifikasi organisasi, restrukturisasi organisasi, industri keuangan, pasar modal, manajerial Organizational expansion and diversification, organizational restructuring, financial industry, capital markets,	59 tahun 59 years old	Laki-laki Male
Danni Hasan	Indonesia Indonesian	Sarjana Teknik Kimia dan Magister Manajemen Industri Bachelor of Chemical Bachelor of Chemical Engineering and Master of Industrial Management	Ekspansi dan diversifikasi organisasi, restrukturisasi organisasi, industri keuangan dan perminyakan, pasar modal, manajerial Organizational expansion and diversification, organizational restructuring, financial and oil industry, capital markets, managerial	57 tahun 57 years old	Laki-laki Male

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Akademik Academic Background	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
Ridwan Irawan	Indonesia Indonesian	Sarjana Ekonomi dan Magister Internasional Banking & Finansial Services Bachelor of Economics and Master of International Banking & Financial Services	Akademisi, peneliti, industri keuangan, pasar modal, restrukturisasi organisasi, manajerial Academician, researcher, financial industry, capital market, organizational restructuring, managerial	54 tahun 54 years old	Laki-laki Male
Denn Charly G. Espanola	Filipina Phillipines	Sarjana Oseanografi Bachelor of Oceanography	Oseanografi Oceanography	50 tahun 50 years old	Laki-laki Male
Amadeo Navalta Bejec	Filipina Phillipines	Sarjana Akuntansi dan Magister Administrasi Bisnis Bachelor of Accounting and Master of Business Administration	Akuntansi, Administrasi Bisnis Business Accounting, Business Administration	46 tahun 46 years old	Laki-laki Male
Christopher Daniel Cabrera Lizo	Filipina Phillipines	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting	Akuntansi Accounting	48 tahun / 48 years old	Laki-laki Male
Francis Emmanuel Dalupan Rojas	Filipina Phillipines	Sarjana Manajemen Bisnis dan Magister Administrasi Bisnis Bachelor of Business Management and Master of Business Administration	Manajemen Bisnis, Administrasi Bisnis Business Management, Business Administration	48 tahun / 48 years old	Laki-laki Male
Benny S. Santoso	Indonesia Indonesian	Pendidikan di Ngee Ann College, Singapura Education at Ngee Ann College, Singapore	<i>Business Studies</i>	62 tahun / 62 years old	Laki-laki Male

Transparansi Rangkap Jabatan Direksi

Informasi terkait hubungan kepengurusan anggota Direksi di perusahaan lain berupa rangkap jabatan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Transparency of Concurrent Position

Information on the management position of the Board of Directors' members in other companies in the form of concurrent position is described in the following table:

Nama Name	Kepengurusan di Perusahaan Lain / <i>Management in Other Companies</i>	
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris <i>As Member of the Board of Commissioners</i>	Sebagai Anggota Direksi <i>As Members of the Board of Directors</i>
M. Ramdani Basri	Komisaris di PT Margautama Nusantara (2007-sekarang) Commissioner of PT Margautama Nusantara (2007 - now)	-
Danni Hasan	-	Direktur Utama di PT Margautama Nusantara (2007-sekarang) President Director of PT Margautama Nusantara (2007 - now)
Ridwan Irawan	-	-
Denn Charly G. Espanola	Presiden Komisaris di PT Metro Pacific Tollways Indonesia (2018-sekarang) President Commissioner of PT Metro Pacific Tollways Indonesia (2018 - now)	-
Amadeo Navalta Bejec	-	Vice President of Corporate Finance di NLEX Corporation (2003-sekarang) Vice President of Corporate Finance in NLEX Corporation (2003 - now)
Christopher Daniel Cabrera Lizo	-	- SVP – Chief Finance Officer di Metro Pacific Tollways Corporation (2009-sekarang) SVP – Chief Finance Officer of Metro Pacific Tollways Corporation (2009 - now) - Chief Operating Officer dan Chief Finance Officer di MP Cala Holdings Inc. (2015-sekarang) Chief Operating Officer & Chief Finance Officer of MP Cala Holdings Inc. (2015 - now) - Treasurer & Director di Cavitex Infrastructure Corporation (2013-sekarang) Treasurer & Director of Cavitex Infrastructure Corporation (2013 - now) - Treasurer & Director di NLEX Corporation (2009-sekarang) Treasurer & Director of NLEX Corporation (2009 - now) - Treasurer & Director di Tollways Management Corporation (2009-sekarang) Treasurer & Director of Tollways Management Corporation (2009 - now)
Francis Emmanuel Dalupan Rojas	-	Vice President of Business Development di Metro Pacific Tollways Corporation (2013-sekarang) Vice President of Business Development at Metro Pacific Tollways Corporation (2013 - now)

Nama Name	Kepengurusan di Perusahaan Lain / Management in Other Companies	
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As Members of the Board of Directors
Benny S. Santoso	- Komisaris PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2004-sekarang) Commissioner of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2004-present) - Komisaris Utama PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (2010-sekarang) President Commissioner of PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (2010-present) - Komisaris PT Fask Food Indonesia Tbk (1992-sekarang) Commissioner of PT Fask Food Indonesia Tbk (1992-present)	Direktur PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (1994-sekarang) Director of PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (1994-present)

Kepemilikan Saham Direksi

Share Ownership by the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	PT Nusantara Infrastructure Tbk		Saham Perusahaan Publik Lain Shares of Other Public Companies	
		Nilai Value	Persentase Percentage	Nilai Value	Persentase Percentage
M. Ramdani Basri	Direktur Utama & CEO President Director & CEO	33,670,866	0,19%	Nihil / None	Nihil / None
Danni Hasan	Direktur / Director	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Ridwan Irawan	Direktur / Director	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Denn Charly G. Espanola	Direktur / Director	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Amadeo Navalta Bejec	Direktur / Director	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Christopher Daniel Cabrera Lizo	Direktur / Director	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Francis Emmanuel Dalupan Rojas	Direktur / Director	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Benny S. Santoso	Direktur / Director	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja Direksi yang hasilnya kemudian akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penetapan remunerasi Direksi. Penilaian dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Evaluation of the Board of Directors' Performance

Performance evaluation of the Board of Directors is held periodically to evaluate the Board of Directors' performance, the results of which will be used as a consideration for determining the remuneration of the Board of Directors. The assessment is held by the Nomination and Remuneration Committee, which is subsequently carried out by the Board of Commissioners and the Shareholders through the General Meeting of Shareholders.

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Perusahaan menggunakan sejumlah indikator sebagai kriteria, antara lain:

1. Pengelolaan Sektor Usaha yang Ada

Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya mengembangkan kinerja sektor bisnis yang telah berjalan, baik secara vertikal maupun horizontal.

2. Pengembangan Sektor Usaha Baru

Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya melihat peluang pengembangan usaha di sektor usaha yang belum dibidangi oleh Perusahaan.

3. Kinerja Bisnis Perusahaan yang Berkelanjutan

Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya menjaga dan mengembangkan kinerja bisnis Perusahaan yang memiliki proyeksi jangka panjang.

4. Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya menerapkan pengelolaan organisasi Perusahaan yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan asas kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kinerja Saham Perusahaan dan Penghargaan atas Kinerja Saham

Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya menjaga dan meningkatkan kinerja saham Perusahaan, terutama kinerja yang memungkinkan saham Perusahaan mendapatkan penghargaan.

Setelah dilakukan evaluasi, kinerja Direksi di sepanjang tahun 2020 dinilai cukup baik. Direksi dinilai telah mampu menjaga kinerja yang cukup stabil di tengah kondisi ekonomi dan industri bisnis usaha yang terhitung tidak kondusif pada tahun 2020 sehingga mampu mendukung Perusahaan mempertahankan posisinya melewati tahun 2020 dengan cukup baik.

Penilaian terhadap Kinerja Unit di Bawah Direksi

Fungsi pengurusan dan pengelolaan Perusahaan dilakukan Direksi dengan dibantu oleh unit-unit yang berada di bawah Direksi, yakni:

1. Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai organ penghubung antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan, mulai dari otoritas terkait hingga masyarakat luas, sehingga mampu menciptakan citra perusahaan yang baik secara berkelanjutan.

In assessing the Board of Directors' performance, the Company uses several indicators as criteria, namely:

1. Management of Existing Business Sectors

The Board of Directors is assessed based on its capability to develop existing business sectors, both vertically and horizontally.

2. New Business Sector Development

The Board of Directors is assessed based on its ability to see opportunities for business development in sectors not covered by the Company.

3. Sustainable Business Performance

The Board of Directors is assessed based on its capability to maintain and enhance the long term performance of the Company's business

4. Implementation of Good Corporate Governance

The Board of Directors is assessed based on its capability to run Company's operations in accordance with Good Corporate Governance principles and compliance with prevailing laws and regulations.

5. Share Performance and Appreciation for the Share Performance

The Board of Directors is assessed based on its capability to enhance the performance of the Company's shares, especially the performance of shares that allow the Company to garner awards.

After conducting an evaluation, the Board of Directors' performance throughout 2020 was considered good. The Board of Directors was able to maintain a fairly stable performance in the midst of economic conditions and the business industry, which was considered not conducive in 2020, and was able to support the Company in maintaining its position through 2020 quite well.

Performance Evaluation for Units Under the Board of Directors

The Company's management is carried out by the Board of Directors, assisted by units under the Board of Directors, namely:

1. Corporate Secretary, who acts as a liaison instrument between the Company and the stakeholders, ranging from relevant authorities to the wider community, to create a good corporate image in a sustainable manner.

2. Audit Internal yang berperan sebagai pihak yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan *assurance* dan *consulting* guna meningkatkan kualitas operasional Perusahaan serta bertanggung jawab pada pengelolaan risiko dan pengendalian internal Perusahaan.

2. Internal Audit, which acts as the party that runs and takes responsibility for the implementation of assurance and consulting activities in order to improve the quality of the Company's operations and is responsible for the Company's risk management and internal control.

Direksi menilai bahwa unit-unit kerja yang berada di bawah Direksi telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik dan memperoleh capaian kinerja yang efektif dan efisien. Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai unit pendukung kinerja Direksi dan telah membantu Direksi menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan Perusahaan di sepanjang tahun 2020.

The Board of Directors assesses that the work units under it have carried out their functions and roles properly and have achieved effective and efficient performance. The Corporate Secretary and Internal Audit have carried out their duties properly as performance support units for the Board of Directors and have assisted the Board of Directors in carrying out its responsibilities in managing the Company throughout 2020.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2020

Pada tahun 2020, Direksi telah memenuhi tanggung jawabnya dengan melaksanakan berbagai tugas dalam hal pengelolaan dan pengurusan Perusahaan secara keseluruhan. Berbagai kebijakan strategis telah Direksi susun dan jalankan secara optimal, terutama dalam upaya menghadapi krisis yang muncul akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 dan mempengaruhi bisnis usaha dan ekonomi dunia. Direksi mampu menjaga tingkat kualitas kinerja Perusahaan yang meskipun menurun karena adanya pandemi Covid-19, dapat terhitung tetap stabil dengan tidak adanya penurunan yang sangat signifikan.

Duties and Responsibilities Implementation of the Board of Directors in 2020

In 2020, the Board of Directors has fulfilled its responsibilities by carrying out various tasks in managing the Company as a whole. The Board of Directors have compiled and implemented various strategic policies, especially in an effort to deal with crises that arise due to the Covid-19 pandemic in 2020 which affected the world's business and economy. The Board of Directors was able to maintain the quality level of the Company's performance which, although decreasing due to the Covid-19 pandemic, could be considered stable without a very significant decline.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2020, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian tanggal dan agenda sebagai berikut:

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Joint Meeting Agenda of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In 2020, the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors was held 6 (six) times with details of the date and agenda as follows:

Tanggal / Date	Agenda
3 Februari 2020 February 3, 2020	Laporan Manajemen tentang kondisi Perusahaan 2020 Management report on the Company's condition
27 April 2020 April 27, 2020	Pembahasan perkembangan pembangunan jalan tol layang A. P. Pettarani Makassar Discussion on the development of A.P. Pettarani Makassar elevated toll road construction
24 Juni 2020 June 24, 2020	Pembahasan perkembangan portofolio proyek dan rencana pelaksanaan RUPS Discussion on project portfolio development and GMS implementation plan

Tanggal / Date	Agenda
25 September 2020 September 25, 2020	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2020 dan rencana corporate action Perusahaan Discussion on Consolidated Financial Statements of September 30, 2020 and the Company's corporate action plan
28 Oktober 2020 October 28, 2020	Pembahasan perkembangan portofolio proyek Discussion on project portfolio development
21 Desember 2020 December 21, 2020	Pembahasan pengembangan bisnis Discussion on business development

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan dijabarkan dalam tabel-tabel berikut:

Attendance of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in Joint Meetings

The attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in joint meetings is described in the following tables:

Tanggal Date	M. Ramdani Basri Direktur Utama & CEO President Director & CEO	Danni Hasan Direktur Director	Ridwan Irawan Direktur Director	Denn Charly G. Espanola Direktur Director	Amadeo Navalta Bejec Direktur Director	Christopher Daniel Cabrera Lizo Direktur Director	Francis Emmanuel Dalupan Rojas Direktur Director	Benny S. Santoso Direktur Director	Alasan Ketidakhadiran Reason For Absence
3 Februari 2020 February 3, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Direksi Not yet joined the Board of Directors
27 April 2020 April 27, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Direksi Not yet joined the Board of Directors
24 Juni 2020 June 24, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Direksi Not yet joined the Board of Directors
25 September 2020 September 25, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
28 Oktober 2020 October 28, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
21 Desember 2020 December 21, 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Jose Ma. K. Lim Komisaris Utama President Commissioner	Rodrigo E. Franco Komisaris Commissioner	Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang Komisaris Independen Independent Commissioner	Farid Harianto Komisaris Commissioner	Alasan Ketidakhadiran Reason For Absence
3 Februari 2020 February 3, 2020	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Dewan Komisaris Not yet joined the Board of Commissioners
27 April 2020 April 27, 2020	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Dewan Komisaris Not yet joined the Board of Commissioners
24 Juni 2020 June 24, 2020	✓	✓	✓	-	Belum bergabung menjadi Dewan Komisaris Not yet joined the Board of Commissioners
25 September 2020 September 25, 2020	✓	✓	✓	✓	-
28 Oktober 2020 October 28, 2020	✓	✓	✓	✓	-
21 Desember 2020 December 21, 2020	✓	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Jose Ma. K. Lim	6	6	100%
Rodrigo E. Franco	6	6	100%
Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	6	6	100%
Farid Harianto	6	3	50%
Direksi / Board of Directors			
M. Ramdani Basri	6	6	100%
Danni Hasan	6	6	100%
Ridwan Irawan	6	6	100%
Denn Charly G. Espanola	6	6	100%
Amadeo Navalta Bejec	6	6	100%
Christopher Daniel Cabrera Lizo	6	6	100%
Francis Emmanuel Dalupan Rojas	6	6	100%
Benny S. Santoso	6	3	50%

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan dan ditetapkan oleh RUPS dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara berkala Perusahaan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi pada kebijakan, besaran, dan struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyesuaikan pada hasil kinerja, beban tugas dan tanggung jawab, kondisi operasional dan keuangan Perusahaan, serta tingkat remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis.

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2020, jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebesar Rp29,78 miliar. Terkait dengan besaran remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak menjabarkan besaran remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Procedures and Basis for Remuneration Determination

The remuneration for the the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined by the GMS with reference to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. The Company, through the Nomination and Remuneration Committee, periodically evaluates the remuneration policies, amount, and structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors by adjusting its performance results, duties and responsibilities, operational and financial condition, as well as the remuneration level for the Board of Commissioners and the Board of Directors in companies with similar line of business.

Remuneration Amount of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In 2020, the total remuneration for the Board of Commissioners was Rp29.78 billion. Regarding the amount of remuneration for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Company has a policy to avoid describing the amount of remuneration for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

AFFILIATION BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Organ Perusahaan <i>Family Relationship with the Company's Instruments</i>						Hubungan Usaha dengan Organ Perusahaan <i>Business Relationship with the Company's Instruments</i>					
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris / Board of Commissioners												
Jose Ma. K. Lim		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rodrigo E. Franco		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Letjend TNI (Purn) Johnny J. Lumintang		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Farid Harianto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Direksi / Board of Directors												
M. Ramdani Basri		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Danni Hasan		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Organ Perusahaan <i>Family Relationship with the Company's Instruments</i>						Hubungan Usaha dengan Organ Perusahaan <i>Business Relationship with the Company's Instruments</i>					
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Ridwan Irawan		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Denn Charly G. Espanola		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Amadeo Navalta Bejec		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Christopher Daniel Cabrera Lizo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Francis Emmanuel Dalupan Rojas		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Benny S. Santoso		✓		✓		✓		✓		✓		✓

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan senantiasa mengedepankan peningkatan kualitas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi guna meraih peningkatan kualitas kinerja Perusahaan secara keseluruhan dan menunjang pertumbuhan bisnis yang terus berkelanjutan. Untuk itu, Perusahaan menjalankan upaya peningkatan kualitas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui pengembangan kompetensi dari penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan, baik yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal.

Di sepanjang tahun 2020, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan, sementara dari jajaran Direksi terdapat Bapak Benny S. Santoso yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, yakni *Cyber Security, Legal and Regulatory Update* yang diselenggarakan pada 15 Oktober 2020 dan *Update on Indonesia's Economic Outlook 2021* yang diselenggarakan pada 8 Desember 2020.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan peran pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Investasi dan Strategi.

COMPETENCE DEVELOPMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Company prioritizes the improvement of performance quality of the Board of Commissioners and the Board of Directors in order to boost the Company's overall performance and support sustainable business growth. To that end, the Company is making efforts to improve the performance quality of the Board of Commissioners and the Board of Directors through competency development, from the implementation of various education and training held by internal and external parties.

Throughout 2020, all members of the Board of Commissioners did not attend education and training. Meanwhile from the Board of Directors, Mr. Benny S. Santoso attended education and training, namely the *Cyber Security, Legal and Regulatory Update* which was held on October 15, 2020 and the *Update on Indonesia's Economic Outlook 2021* which will be held on December 8, 2020.

SUPPORTING INSTRUMENTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The implementation of the Board of Commissioners' supervisory role is assisted by its supporting instruments, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Investment and Strategy Committee.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan komite yang diangkat oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaan tugasnya dipertanggung jawabkan kepada Dewan Komisaris. Di dalam Perusahaan, Komite Audit berperan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan Laporan Keuangan telah memiliki aspek-aspek kewajaran dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku, kesesuaian dari pelaksanaan dan tindak lanjut dari audit internal dan eksternal berdasarkan standar yang berlaku, serta bertanggung jawab dalam pemilihan auditor Perusahaan. Perusahaan membentuk Komite Audit dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pedoman Kerja Komite Audit

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan berlandaskan pada pedoman kerja yang terangkum dalam Piagam Komite Audit yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Komisaris. Komite Audit menggunakan Piagam Komite Audit sebagai pedoman dan panduan dalam bekerja dengan isi mencakup antara lain struktur dan posisi Komite Audit, persyaratan keanggotaan, tugas, tanggung jawab, wewenang Komite Audit, mekanisme rapat, pelaporan, masa tugas, serta rencana tahunan Komite Audit.

Kualifikasi Keanggotaan dan Independensi Komite Audit

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK No. 55 tahun 2015 tentang jumlah Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan, komposisi Komite Audit di Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan susunan yang terdiri dari 1 orang Komisaris Independen dan 2 pihak independen dengan keahlian dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Guna memenuhi syarat independensi, anggota Komite Audit Perusahaan tidak ditunjuk dari pejabat eksekutif Kantor Akuntan Publik yang bertugas memberikan jasa audit dan/atau jasa non-audit kepada Perusahaan dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a committee appointed by the Board of Commissioners and the implementation of its duties is accountable to the Board of Commissioners. Within the Company, the Audit Committee plays a role in supporting the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners and has the responsibility to ensure that the Financial Statements have aspects of fairness and conformity with applicable accounting principles, conformity of the implementation and follow-up of internal and external audits based on standards, and is responsible for selecting the Company's auditors. The Company formed the Audit Committee with reference to the provisions stipulated in POJK No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee.

Audit Committee Work Guidelines

The implementation of duties and responsibilities is based on the work guidelines summarized in the Audit Committee Charter, which has been approved and endorsed by the Board of Commissioners. The Audit Committee uses the Audit Committee Charter as guidelines in working with contents covering, among others, the structure and position of the Audit Committee, membership requirements, duties, responsibilities, authority of the Audit Committee, meeting mechanisms, reporting, terms of office, and the Audit Committee's annual plan.

Membership Qualifications and Independency of the Audit Committee

As regulated in Article 4 POJK No. 55 of 2015 on the number of Audit Committee members consisting of at least 3 (three) members from the Independent Commissioners and a party from outside the Company, the composition of the Audit Committee in the Company has met these requirements, with a composition consisting of 1 Independent Commissioner and 2 independent parties with expertise in accounting and/or finance.

In order to meet the independency requirements, members of the Company's Audit Committee are not appointed from executive officers of the Public Accounting Firm who are in charge of providing audit and/or non-audit services to the Company within the last six months as stipulated in the prevailing regulations in Indonesia. Apart from

Selain Komisaris Independen, anggota Komite Audit bukan termasuk orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit tidak diperbolehkan memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal adanya anggota Komite Audit yang memperoleh saham karena suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut, anggota yang bersangkutan diwajibkan untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain.

Selain itu, anggota Komite Audit tidak diperkenankan untuk memiliki hubungan keluarga yang terjadi karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. Hubungan usaha juga tidak diperkenankan dimiliki oleh anggota Komite Audit, baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki kaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Seluruh anggota Komite Audit yang saat ini menjabat telah memenuhi syarat independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan dan organ-organnya, termasuk hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, serta kepemilikan saham Perusahaan.

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Audit

Informasi terkait komposisi dan masa jabatan Komite Audit pada tahun 2020 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

the Independent Commissioner, members of the Audit Committee are not among those who have the authority and responsibility to plan, lead, or control the Company's activities within the last six months before their appointment by the Board of Commissioners.

Audit Committee members are not allowed to own the Company's shares, either directly or indirectly. In the event that a member of the Audit Committee acquires shares due to a legal event, within a period of no later than six months after the shares are acquired, the member concerned is obliged to transfer his/her shares to another party.

Furthermore, Audit Committee members are not allowed to have family relationships that occur due to marriage and descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Company's Major Shareholders. A member of the Audit Committee, is not allowed to have direct or indirect business relationship with the Company's business activities.

All current members of the Audit Committee have met the independency requirements and have no conflict of interest with the Company and its instruments, including family, financial, management, and share ownership relations.

Composition and Terms of Office of the Audit Committee

Information on the composition and terms of office of the Audit Committee in 2020 are described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Masa Akhir Jabatan Term Expiry
Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	Ketua Head	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018 Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018	20 September 2018 September 20, 2018	RUPST 2023 AGMS 2023
Tavip Santoso	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018 Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018		
Tufrida Hasyim	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018 Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018		

PROFIL KOMITE AUDIT

Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang

Ketua Komite Audit

Profil Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang dapat dilihat pada pembahasan “Profil Dewan Komisaris” di dalam bab “Profil Perusahaan”.

Tavip Santoso

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia dan berusia 56 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada 20 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018. Meraih gelar Sarjana Administrasi Niaga dari Universitas Terbuka pada tahun 1990 dan *Master of Business Administration* dari Royal Melbourne Institute of Technology, Australia pada tahun 1995. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun pada posisi manajemen senior di perusahaan-perusahaan besar di bidang keuangan perusahaan, penilaian aset/saham, manajemen strategis dan investasi.

Tufrida Hasyim

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia dan berusia 63 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada 20 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018. Meraih gelar Sarjana di Bidang Statistik dari Institut Pertanian Bogor pada tahun

AUDIT COMMITTEE PROFILE

Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang

Head of Audit Committee

Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang's profile can be viewed in the “Profile of the Board of Commissioners” in the “Company Profile” chapter.

Tavip Santoso

Member of the Audit Committee

Indonesian Citizen, 56 years old. Appointed as member of the Audit Committee on September 20, 2018 pursuant to Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018. Received Bachelor of Business Administration degree from Open University in 1990 and Master of Business Administration degree from Royal Melbourne Institute of Technology, Australia in 1995. He has more than 14 years experience in senior management positions in large companies in the areas of corporate finance, asset/stock valuation, strategic management, and investment.

Tufrida Hasyim

Member of the Audit Committee

Indonesian Citizen, 63 years old. Appointed as member of the Audit on September 20, 2018 pursuant to Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018. Received Bachelor of Statistics degree from Bogor Agricultural Institute in 1982 and

1982 dan Magister dari Universitas Indonesia pada tahun 1991. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun baik di sektor swasta maupun publik. Beliau juga memiliki berbagai kualifikasi dan sertifikat terkait keahliannya, di antaranya adalah gelar Perencana Keuangan Tersertifikat (Certified Financial Planner, CFP) dari Financial Planning Standards Board (FPSB) pada tahun 2013; sertifikat Kualifikasi Auditor Internal (Qualified Internal Auditor, QIA) pada tahun 2009; dan gelar Akuntan Manajemen Bersertifikat (Certified Management Accountant, CMA) dari Institute of Certified Management Accountant (ICMA), Australia pada tahun 2006.

Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Sebagai organ pendukung kinerja Dewan Komisaris, Komite Audit memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengkaji seluruh informasi keuangan yang disusun dan akan dikeluarkan oleh Perusahaan, termasuk Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya;
2. Mengkaji kepatuhan Perusahaan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengatur aktivitas usaha Perusahaan;
3. Mengkaji hasil pemeriksaan audit internal;
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai segala risiko yang mungkin muncul, yang dapat memengaruhi Perusahaan, serta menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi; dan
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, serta informasi lainnya yang merupakan rahasia Perusahaan.

Untuk memastikan terpenuhinya tanggung jawab tersebut, maka Komite Audit memiliki wewenang untuk mengakses arsip dan informasi mengenai staf, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite Audit juga memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan pihak mana pun yang telah disetujui untuk melaksanakan audit internal.

Pembagian Tugas Anggota Komite Audit

Guna mewujudkan pencapaian kinerja Komite Audit yang efektif dan efisien, Perusahaan menetapkan pembagian tugas dari masing-masing anggota Komite Audit, antara lain sebagai berikut:

Masters degree from University of Indonesia in 1991. She has more than 20 years of experience in private and public sectors. She also has various qualifications and certificates of expertise, including the title of Certified Financial Planner (CFP) from Financial Planning Standards Board (FPSB) in 2013; certificate of Qualified Internal Auditor (QIA) in 2009; and Certified Management Accountant (CMA) degree from the Institute of Certified Management Accountant (ICMA), Australia in 2006.

The Responsibilities and Authorities of the Audit Committee

As the supporting instrument for the Board of Commissioners' performance, the Audit Committee has the following responsibilities and authorities:

1. Review all financial information prepared by the Company, including Financial Statements, and other financial information;
2. Review the Company's compliance with the applicable rules and regulations and manage the Company's activities as a public Company;
3. Review the implementation of internal audit results;
4. Report all potential risks that may affect the Company to the Board of Commissioners and apply risk management policies and procedures assigned by the Board of Directors; and
5. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and other information.

To ensure the fulfillment of the aforementioned responsibilities, the Audit Committee has the authority to access the files and information regarding the staff, funds, assets and resources of the Company in relation to the implementation of their tasks. In exercising this authority, the Audit Committee cooperates with any party appointed to carry out internal audits.

Task Distribution Among Audit Committee's Members

To realize an effective and efficient work performance for the Audit Committee, the Company determines a task distribution from each member of the Audit Committee, such as the following:

Nama / Name	Fungsi / Function
Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	Merangkap Komisaris Independen serta bertanggung jawab di seluruh aktivitas Komite Audit. Holds a concurrent position as an independent Commissioner and is responsible for all of the Audit Committee's activities.
Tavip Santoso	Bertanggung jawab pada bidang hukum dan kepatuhan. Responsible for law and compliance.
Tufrida Hasyim	Bertanggung jawab pada bidang akuntansi dan/atau keuangan. Responsible for accounting and/or finance.

Pernyataan Independensi Anggota Komite Audit

Komite Audit Perusahaan dikepalai oleh seorang Komisaris Independen dan memiliki 2 (dua) orang anggota profesional yang berasal dari luar Perusahaan. Komite Audit menjalankan tugasnya secara profesional, mandiri, dan independen dengan bebas dari intervensi dari pihak mana pun.

Statement of Independence of Audit Committee Members

The Company's Audit Committee is chaired by a member of the Board of Commissioners and 2 (two) other professional members from outside the Company. In carrying out its duties, the Audit Committee is independent and works professionally and independently.

Kriteria Independensi Komite Audit <i>Audit Committee Independence Criteria</i>	Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	Tavip Santoso	Tufrida Hasyim
Bukan merupakan orang dalam di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir. Not an insider at Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, or other party providing audit services, non-audit services, and/or other consulting services to the Company within the past six months.	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Company's activities in the past six months.	✓	✓	✓
✓= ya / yes x= tidak / no			

Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Anggota Komite Audit

Shareholding by the Audit Committee's Members

Nama / Name	Saham Perusahaan / Company Shares	
	Nilai / Value	Persentase / Percentage
Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	Nihil / None	Nihil / None
Tavip Santoso	Nihil / None	Nihil / None
Tufrida Hasyim	Nihil / None	Nihil / None

Hubungan Usaha dan Afiliasi Antar sesama Anggota Komite Audit dengan Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Pengendali

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan usaha dan afiliasi dengan sesama anggota Komite Audit, Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Pengendali.

Catatan: Hubungan usaha termasuk di antaranya utang-piutang, kerja sama bisnis, dan sebagainya, sementara bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya.

Rapat Komite Audit

Komite Audit diwajibkan menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan, atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Seluruh pembahasan dicatat dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Apabila tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil dengan menggunakan pengambilan suara mayoritas anggota Komite Audit yang hadir. Apabila keputusan masih tidak bisa ditentukan, maka Ketua Komite Audit memiliki wewenang untuk menentukan keputusan yang akan disetujui secara bersama-sama.

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali dengan rincian tanggal dan agenda sebagai berikut:

Tanggal / Date	Agenda
21 Januari 2020 January 21, 2020	- <i>Review Minutes of Meeting</i> (MOM) Komite Audit Tahun 2019 Reviewed the 2019 Audit Committee's Minutes of Meeting (MOM) - Menyusun rencana rapat Komite Audit Tahun 2020 Composed a meeting plan for Audit Committee in 2020 - Menyusun rencana Site Visits di tahun 2020, yakni Lau Gunung, SCTK dan TKCM, Pettarani Makassar, dan ISAB Lampung Composed Site Visits plan in 2020, namely Lau Gunung, SCTK and TKCM, Pettarani Makassar, and ISAB Lampung
1 September 2020 September 1, 2020	Diskusi dengan Departemen Internal Auditor, mencakup penyampaian laporan dan rencana Internal Audit tahun 2020 Discussion with the Department of Internal Auditors, including submission of Internal Audit reports and plans in 2020

Business Relationship and Affiliation Between Audit Committee Members with the Board of Directors, Board of Commissioners, or Controlling Shareholders

All members of the Audit Committee have no business relationship and affiliation with other members of the Audit Committee, Board of Directors, Board of Commissioners, or Controlling Shareholder.

Note: Business relationships include debts, business cooperation, and so on, while forms of affiliation include special relationships mainly due to blood ties such as husband/wife/children/parents/siblings/brother/sister in-law, and so on.

Audit Committee Meetings

The Audit Committee is expected to conduct meetings at least once every three months, or at any time if necessary. All discussions and decision-making process at the Audit Committee meeting are carried out by deliberation to reach consensus, and recorded in the minutes of the meeting which are then signed by all members of the Audit Committee present at the meeting. If a consensus cannot be reached, a decision will be made by voting by the majority of Audit Committee members present. If this method still cannot produce a decision, the Head of the Audit Committee is authorized to determine the decision to be jointly approved.

In 2020, the Audit Committee held 4 meetings with the following dates and agenda:

Tanggal / Date	Agenda
30 November 2020 November 30, 2020	Penyampaian laporan pembatalan seluruh kunjungan site dikarenakan pandemi Covid-19 dan akan dijadwalkan ulang di tahun 2021 dengan catatan jika pandemi sudah berakhir Submission of site visits cancellation report due to Covid-19 pandemic and rescheduling for 2021, if the pandemic has ended on that year
1 Desember 2020 December 1, 2020	Diskusi terkait materi yang disampaikan oleh KAP EY dalam rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada hari yang sama Discussion on the materials submitted by KAP EY in the previous meeting of the same day

The attendance of Audit Committee members in meetings is described in the following tables:

Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat dijabarkan dalam tabel-tabel berikut:

Tanggal Date	Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	Tavip Santoso Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Tufrida Hasyim Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Alasan Ketidakhadiran Reason For Absence
21 Januari 2020 January 21, 2020	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-
1 September 2020 September 1, 2020	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-
30 November 2020 November 30, 2020	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-
1 Desember 2020 December 1, 2020	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Peningkatan kualitas kinerja Komite Audit dipandang penting karena dapat menunjang peningkatan kinerja Komite Audit dalam mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris sehingga turut berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Dewan Komisaris secara khusus dan kinerja Perusahaan secara umum.

Sepanjang tahun 2020, seluruh anggota Komite Audit tidak mengikuti program pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan.

Competence Development Program For Audit Committee

Quality improvement for Audit Committee's performance is considered important as it can support the performance improvement of the Audit Committee in supporting the implementation of Board of Commissioners' functions to generate impact on improving the quality of the performance of the Board of Commissioners in particular and the performance of the Company in general.

In 2020, all members of the Audit Committee did not attend any competency development programs in the form of education and training.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada Dewan Komisaris, Komite Audit menyusun laporan dari setiap penugasan yang diberikan serta menyusun laporan tahunan secara berkala untuk kemudian seluruhnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan maka komite audit melaksanakan *regular meeting* dengan mengundang internal auditor untuk mendapatkan informasi tentang penerapan *Good Corporate Governance* khususnya pelaksanaan SOP baik yang menyangkut operasional maupun keuangan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi memegang peranan sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang pengangkatannya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu pada ketentuan POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Nominasi memiliki tugas utama untuk membantu Dewan Komisaris terkait hal nominasi dan remunerasi di Perusahaan yang mencakup penetapan kriteria dan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, serta evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang kemudian hasil tersebut diserahkan kepada RUPS untuk ditinjau lebih lanjut dan menjadi salah satu bahan pertimbangan terkait besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki wewenang untuk menyampaikan rekomendasi terkait penentuan dan penetapan imbalan remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Kualifikasi Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan yang ditetapkan dalam POJK No. 34 tahun 2014, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang anggota dengan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang menjabat sebagai Komisaris Independen di Perusahaan dengan anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak dari luar Perusahaan, maupun pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Activity Implementation Report of the Audit Committee

As a form of responsibility to the Board of Commissioners, the Audit Committee compiles reports on each given assignment and periodic annual reports to be submitted to the Board of Commissioners.

In order to carry out its supervisory function, the audit committee conducts regular meetings by inviting the internal auditors to obtain information on the implementation of Good Corporate Governance, especially the implementation of both operational and financial SOPs.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee is a supporting instrument for the Board of Commissioners whose appointment is carried out by the Board of Commissioners with reference to the provisions of POJK No.34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. The Nomination Committee's main task is assisting the Board of Commissioners with regard to nomination and remuneration in the Company, including determining the criteria and implementing the fit and proper test, as well as evaluating the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which are then submitted to the GMS for further reviews and formulated into considerations on the remuneration amount for the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Nomination and Remuneration Committee has the authority to submit recommendation on determining the remuneration amount for each member of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Membership Qualification of the Nomination and Remuneration Committee

In accordance with the stipulation in POJK No. 34 of 2014, the Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members, with 1 (one) head concurrently serving as an Independent Commissioner in the Company and other members who can be appointed from members of the Board of Commissioners, parties outside the Company, as well as parties holding managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources.

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Rincian komposisi dan masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Composition and Terms of Office of the Nomination and Remuneration Committee

Details of composition and terms of office of Nomination and Remuneration Committee in 2020 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Masa Akhir Jabatan Term Expiry
Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	Ketua Head	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018 Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018	20 September 2018 September 20, 2018	RUPST 2023 AGMS 2023
Helda M. Manuhutu	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018 Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018		
Sugiarti Zainal	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018 Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018		

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang dapat dilihat pada pembahasan "Profil Dewan Komisaris" di dalam bab "Profil Perusahaan".

Helda M. Manuhutu Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Helda M. Manuhutu dapat dilihat pada pembahasan "Profil Pejabat Eksekutif" di dalam bab "Profil Perusahaan".

Sugiarti Zainal Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia dan berusia 52 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada 20 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018. Menyelesaikan D1 Pendidikan Kesekretariatan LPK Saint Mary. Beliau memiliki pengalaman kerja antara lain

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROFILE

Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang Head of Nomination and Remuneration Committee

Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang's profile can be viewed in the "Board of Commissioners' Profile" discussion in the "Company Profile" chapter.

Helda M. Manuhutu Member of Nomination and Remuneration Committee

Helda M. Manuhutu's profile can be viewed in the "Executive Officers' Profile" discussion in the "Company Profile" chapter.

Sugiarti Zainal Member of Nomination and Remuneration Committee

Indonesian Citizen, 52 years old. Appointed as member of Nomination and Remuneration Committee on September 20, 2018 pursuant to Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of Meeting dated September 20, 2018. Graduated from D1 Secretary Education LPK Saint Mary. She has experience as Secretary of PT Unilever

sebagai Sekretaris PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 1991 dan bergabung dengan Divisi SDM sebagai Asisten Manajer sejak 2001, kemudian menjadi Asisten Manajer Remunerasi dan menangani *Benefit & Compensation* (2005-2014), selanjutnya Beliau menangani *salary survei* untuk memastikan daya saing karyawan dibandingkan dengan industri FMCG di Indonesia (2006-2014), dan karier terakhir di PT Unilever Indonesia Tbk sebagai HR Business Partner Supply Chain Cikarang Factory hingga akhir Februari 2020. Saat ini berprofesi sebagai Professional Coach, Trainer, dan Konsultan Bisnis dan HR.

Indonesia Tbk in 1991 and joined the HR Division as Assistant Manager since 2001, then as Assistant Manager of Remuneration and handled Benefit & Compensation. She also handled a salary survey to ensure the employees' competitiveness compared with other FMCG industries in Indonesia (2006-2014), and her latest career was at PT Unilever Indonesia Tbk as HR Business Partner for Cikarang Factory Supply Chain up to the end of February 2020. Currently, she works as Professional Coach, Trainer, and Business and HR Consultant.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi berperan sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, berikut kebijakan dan sistem remunasinya; dan
2. Membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengusulkan besaran remunasinya.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee serve as the Board of Commissioners' supporting instrument with the following duties and responsibilities:

1. Assisting the Board of Commissioners in determining the criteria for selecting candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as the remuneration system; and
2. Assisting the Board of Commissioners to prepare candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors and propose their remuneration.

Pernyataan Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan senantiasa mengutamakan penerapan prinsip independensi dan objektivitas serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan untuk senantiasa menjaga independensinya guna mencegah terjadinya benturan kepentingan akibat intervensi dari pihak lain.

Statement of Independency of the Nomination and Remuneration Committee Members

The Nomination and Remuneration Committee carries out its duties and responsibilities by prioritizing the application of the principles of independence and objectivity and the Company's interests. All members of the Nomination and Remuneration Committee are required to maintain their independence in order to prevent conflicts of interest due to intervention from other parties.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian tanggal dan agenda sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Meeting

In 2020, the Nomination and Remuneration Committee held 4 (four) meetings with details of the dates and agenda as follows:

Tanggal / Date	Agenda
22 Januari 2020	Pemaparan Komposisi Total Benefit Dewan Direksi NI Group
January 22, 2020	Exposure of Total Benefit Composition for the Board of Directors of NI Group

Tanggal / Date	Agenda
16 April 2020 April 16, 2020	Usulan Komite Remunerasi untuk ikut dalam Salary Survey External untuk melihat posisi salary NI group (Manajemen Eksekutif dan Karyawan) di pasar Indonesia, di Industri Infrastruktur Proposal of the Remuneration Committee to participate in the External Salary Survey to see the salary position of the NI group (Executive Management and Employees) in the Indonesian market, in the Infrastructure Industry
25 Agustus 2020 August 25, 2020	Menindaklanjuti Persetujuan Pemegang Saham terkait penggunaan Konsultan Eksternal (Korn-Ferry) yang akan melakukan Market Salary Survey dan Analisa terhadap NI Group Following up on Shareholder Approval regarding the use of an External Consultant (Korn-Ferry) who will conduct a Market Salary Survey and Analysis of the NI Group
11 Desember 2020 December 11, 2020	Melakukan review terhadap Laporan Analisa Konsultan Eksternal terkait Market Salary Survey NI Group Reviewing External Consultant Analysis Reports related to NI Group's Market Salary Survey

Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat dijabarkan dalam tabel-tabel berikut:

The attendance of the Nomination and Remuneration Committee members to the meeting is described in the following tables:

Tanggal Date	Letjend TNI (Purn) Johnny J. Lumintang Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Head of Nomination and Remuneration Committee	Helda M. Manuhutu Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of Nomination and Remuneration Committee	Sugiarti Zainal Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of Nomination and Remuneration Committee	Alasan Ketidakhadiran Reason For Absence
22 Januari 2020 January 22, 2020	Hadir / Present	Hadir / Present	Hadir / Present	-
16 April 2020 April 16, 2020	Hadir / Present	Hadir / Present	Hadir / Present	-
25 Agustus 2020 August 25, 2020	Hadir / Present	Hadir / Present	Hadir / Present	-
11 Desember 2020 December 11, 2020	Hadir / Present	Hadir / Present	Hadir / Present	-

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Perusahaan turut menaruh perhatian pada peningkatan kualitas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi. Hal tersebut dikarenakan kinerja yang berkualitas dapat menunjang peningkatan kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris yang kemudian berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Dewan Komisaris secara khusus dan kinerja Perusahaan secara umum. Di sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

Competence Development Program For Nomination and Remuneration Committee

The Company also pays attention to the improvement of performance quality for the Nomination and Remuneration Committee. This attention is due to quality performance that can support the improvement of the Nomination and Remuneration Committee to support the implementation of the Board of Commissioners' function, which in turn improves the Board of Commissioners' performance specifically and the Company's performance in general. In 2020, the Nomination and Remuneration Committee participated in education and training with the following details:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type	Nama Pelatihan/ Pendidikan Training/ Education Name	Tempat/Tanggal Place/ Date	Penyelenggara Organizer
Letjend TNI (Purn) Johnny J. Lumintang	-	-	-	-
Helda M. Manuhutu	<i>Training Program People Development Non Certified</i>	Program People Development	Jakarta, Desember 2020 Jakarta, December 2020	SVB (Stevland Bridge)
	<i>Coaching Ibu Laksmi Tobing – Non Certified</i>	General Coaching with Ibu Laksmi Tobing Prof Coach Indonesia	Juni 2020 June 2020	ASIA Leaders
	<i>Certified Work Load Analysis and Reward Creative System</i>	Work Load Analysis and Reward Creative System	7-8 September 2020 September 7-8, 2020	Productivity & Quality Maintenance
Sugiarti Zainal	<i>Certified BNSP Public Speaking</i>	<i>Training & Sertifikasi Public Speaking</i> Public Speaking Training & Certification	Jakarta, 9 – 10 Juli 2020 Jakarta, July 9-10, 2020	ESQ
	<i>Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Program</i>	Practitioner Neuro Linguistic Programme Practitioner of Neuro Linguistic Programme	Jakarta, 5 – 11 Februari 2020 Jakarta, February 5-11, 2020	Inspirasi Indonesia
	<i>Practitioner Phototherapy</i>	<i>Creative Practice Workshop</i>	Jakarta, 15 – 18 Juni 2020 Jakarta, June 15-18, 2020	Points of You Indonesia
	<i>Certified Instructor of NLP Indonesia untuk modul-modul: Certified Instructor of NLP Indonesia for the following modules:</i> - <i>Creative Thinking</i> - <i>Be Agile Be Productive</i> - <i>Smart Selling From Home</i>	<i>Certified Instructor of NLP Indonesia</i>	Jakarta, 4 – 18 September 2020 Jakarta, September 4 – 18, 2020	Akademi NLP Indonesia NLP Academy Indonesia

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai salah satu Organ Pendukung Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam mengkaji skema remunerasi di Perusahaan. Berdasarkan penilaian dari Komite Nominasi dan Remunerasi, skema remunerasi Perusahaan di sepanjang tahun 2020 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Activity Implementation Report of the Nomination and Remuneration Committee

As one of the Board of Commissioners' Supporting Instruments, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities through a series of activities aimed at assisting the implementation of the duties of the Board of Commissioners in reviewing the remuneration scheme in the Company. Based on the assessment of the Nomination and Remuneration Committee, the Company's remuneration scheme throughout 2020 has been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations.

Evaluasi Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik serta telah berkontribusi positif kepada fungsi pertimbangan dan peninjauan kebijakan nominasi dan remunerasi di Perusahaan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada masing-masing anggota dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris berharap bahwa kinerja yang baik di tahun 2020, dapat dipertahankan hingga tahun-tahun selanjutnya.

KOMITE INVESTASI DAN STRATEGI

Komite Investasi dan Strategi (KIS) merupakan komite khusus yang pembentukan dan pengangkatannya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk menjalankan peran pengawasan pada aspek pengembangan bisnis usaha Perusahaan melalui pelaksanaan aktivitas investasi serta penyusunan dan penerapan strategi bisnis Perusahaan.

Di dalam Perusahaan, KIS memiliki tugas utama, yakni menyampaikan usulan, meninjau, merencanakan, mengumpulkan, hingga mengawasi setiap inisiatif terkait pengembangan bisnis usaha Perusahaan dalam proses penerapan kebijakan investasi Perusahaan. Masukan dan usulan tersebut selanjutnya disampaikan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk memastikan kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki Perusahaan dalam upayanya mencapai target dan tujuan utama.

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Investasi dan Strategi

Komposisi dan masa jabatan KIS pada tahun 2020 terangkum dalam tabel sebagai berikut:

Board of Commissioners' Evaluation on Nomination and Remuneration Committee's Performance

Throughout 2020, the Board of Commissioners considered that the Nomination and Remuneration Committee had carried out its duties and responsibilities very well and had contributed positively to the function of considering and reviewing the nomination and remuneration policies in the Company. The Board of Commissioners expresses appreciation to each member of the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners hopes that the good performance in 2020 can be maintained for the following years.

INVESTMENT AND STRATEGY COMMITTEE

The Investment and Strategy Committee (KIS) is a special committee whose formation and appointment is carried out by the Board of Commissioners with the aim of carrying out a supervisory role in the aspects of developing the Company's business through the implementation of investment activities as well as the formulation and implementation of the Company's business strategies.

Within the Company, KIS has the main task of submitting suggestions, reviewing, planning, collecting, and monitoring every initiative related to the development of the Company's business in the process of implementing the Company's investment policies. The inputs and suggestions are then submitted to the Board of Commissioners to ensure the Company's capabilities in its efforts to achieve its main targets and objectives.

Composition and Terms of Office of the Investment and Strategy Committee

The composition and terms of office of KIS in 2020 are summarized in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Masa Akhir Jabatan Term Expiry
M. Ramdani Basri	Ketua Head	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018 Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018	20 September 2018 September 20, 2018	RUPST 2023 AGMS 2023
Danni Hasan	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018 Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018		
Ridwan Irawan	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018 Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018		

Profil Komite Investasi dan Strategi

Profil Ketua dan Anggota KIS dapat dilihat pada pembahasan "Profil Direksi" di dalam bab "Profil Perusahaan".

Investment and Strategy Committee Profile

The profile of the Head and Members of KIS can be viewed in the "Board of Directors' Profile" discussion in the "Company Profile" chapter.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE INVESTASI DAN STRATEGI

Tugas dan tanggung jawab yang diemban KIS antara lain sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan Kebijakan Investasi dan Petunjuk Investasi Tahunan;
2. Membantu pengkajian dan analisis usulan investasi/divestasi tertentu baik dari aspek finansial, legal, maupun aspek lainnya dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang pada saat usulan tersebut diajukan;
3. Memberikan rekomendasi atas hasil analisis yang dilakukan terhadap usulan investasi/divestasi dimaksud, dengan disertai latar belakang dan alasan-alasan yang jelas tentang diterima atau ditolaknya usulan suatu investasi/divestasi; dan
4. Memberikan pertimbangan dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi/divestasi sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INVESTMENT AND STRATEGY COMMITTEE

The duties and responsibilities of KIS are as follows:

1. Assisting in preparing the Investment Policy and Annual Investment Technical Instructions;
2. Assisting to assess and analyze the proposed investments/divestments to ensure financial viability, legality and due regard for social, political, economic and environmental development factors at the time the investment/divestments are proposed;
3. Providing recommendations based on the analysis carried out on the proposed investments/divestments referred to above, along with the background and clear reasons for the approval or rejection of the investments/divestments proposals; and
4. Providing considerations for implementation of investments /divestments decision referred to in points 1 and 2.

Pernyataan Independensi Anggota Komite Investasi dan Strategi

Komite Investasi dan Strategi memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan dengan berkomitmen penuh pada penerapan prinsip-prinsip independensi untuk menjaga independensi dan objektivitas KIS di Perusahaan. Independensi tersebut diterapkan guna menghindari potensi benturan kepentingan dan dapat tetap mengutamakan kepentingan Perusahaan.

Rapat Komite Investasi dan Strategi

Hingga akhir tahun 2020, Komite Investasi dan Strategi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda pembahasan mengenai hal-hal terkait usulan/rencana investasi atau divestasi dari keseluruhan proyek yang dijalankan Perusahaan.

Program Pengembangan Kompetensi Komite Investasi dan Strategi

Adanya kompetensi berkualitas dari seluruh anggota Komite Investasi dan Strategi dapat mendukung pencapaian kinerja KIS yang optimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris sehingga turut berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Dewan Komisaris secara khusus dan kinerja Perusahaan secara umum. Di sepanjang tahun 2020, anggota KIS tidak mengikuti pelatihan dan pendidikan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Investasi dan Strategi

Sepanjang tahun 2020, Komite Investasi dan Strategi telah melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya serta rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menganalisis kebijakan dan petunjuk investasi tahunan Perusahaan. Rekomendasi kebijakan dan petunjuk investasi tahunan yang diberikan oleh Komite Investasi dan Strategi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Direksi di dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengurusan Perusahaan dibantu oleh organ pendukung Direksi, yakni Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

Statement of Independency of Members of the Investment and Strategy Committee

The Investment and Strategy Committee ensures that all of its duties and responsibilities are carried out with a full commitment to the application of the principles of independence to maintain the independence and objectivity of KIS in the Company. This independence is implemented in order to avoid potential conflicts of interest and to continue to prioritize the interests of the Company.

Investment and Strategy Committee Meeting

Until the end of 2020, the Investment and Strategy Committee has held meetings as many as 4 (four) times with an agenda to discuss matters related to investment proposals/plans or divestments of all projects carried out by the Company.

Competence Development Program of the Investment and Strategy Committee

The quality competence of all members of the Investment and Strategy Committee can support the achievement of optimal KIS performance in supporting the implementation of the Board of Commissioners' function for an impact on improving the quality of its performance in particular and the performance of the Company in general. In 2020, KIS members did not participate in training and education.

Activity Implementation Report of the Investment and Strategy Committee

Throughout 2020, the Investment and Strategy Committee has carried out various duties and responsibilities as well as a series of activities aimed at assisting the implementation of the duties of the Board of Commissioners in analyzing the Company's annual investment policies and guidelines. The annual investment policy recommendations and guidelines provided by the Investment and Strategy Committee have been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations.

BOARD OF DIRECTOR'S SUPPORTING INSTRUMENTS

In performing its Company management function, the Board of Directors is supported by the Board of Director's supporting instruments, namely Corporate Secretary and Internal Audit.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas untuk menjadi pihak yang menghubungkan Perusahaan dengan para pemangku kepentingan, mulai dari otoritas terkait hingga masyarakat luas. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam menghadirkan citra Perusahaan yang baik di mata masyarakat luas yang salah satunya diwujudkan melalui pengelolaan program komunikasi yang baik, tepat, efektif, dan efisien dengan berbagai pihak berkepentingan. Sekretaris Perusahaan berhak untuk memperoleh akses pada informasi-informasi terkait Perusahaan yang material dan relevan. Sekretaris Perusahaan diharapkan dapat menguasai berbagai peraturan dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, terutama terkait dengan aspek keterbukaan informasi.

Mekanisme penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi yang mencakup:

- Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
- Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- Sebagai penghubung dengan pihak-pihak pemegang kepentingan di luar Perusahaan seperti para pemegang saham, lembaga otoritas pasar modal dan keuangan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan;
- Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS; dan
- Menjadi juru bicara Perusahaan untuk media.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is a supporting instrument for the Board of Directors who reports directly to the President Director. The Corporate Secretary has a duty to be the party that connects the Company with stakeholders, ranging from relevant authorities to the wider community. The Corporate Secretary is also responsible for presenting a good image of the Company in the eyes of the wider community, one of which is manifested through the management of a good, precise, effective, and efficient communication program with various interested parties. The Corporate Secretary has the right to gain access to material and relevant information related to the Company. It is hoped that the Corporate Secretary will be able to master various laws and regulations in the capital market sector, especially those related to the aspect of information disclosure.

The mechanism for the appointment of Corporate Secretary is carried out by referring to the provisions stipulated in POJK No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies. Based on these provisions, the Corporate Secretary has functions that include:

- Ensuring that the Company adheres to the rules on disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles;
- Providing information needed by the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically and/or at any time as requested;
- Acting as a liaison officer with the Company's stakeholders such as shareholders, capital market institutions and financial authorities and other concerned parties; and
- Administering and archiving the Company's documents, including but not limited to the Shareholders Register, Special Register and minutes of the Board of Directors' Meeting, the Board of Commissioners' meeting and the GMS.
- Acting as the spokesperson of the Company to the media.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dahlia Evawani

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia dan berusia 44 tahun. Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan pada 30 Juli 2013 berdasarkan Surat keputusan Direksi. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas Jakarta pada tahun 2000. Beliau telah bergabung dengan Perusahaan sejak 19 Januari 2007 dan sebelumnya memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Staf Akuntansi di ABN Amro Bank N.V (2000), di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (2000-2004), dan di PT Daruma Investama (2007-2008).

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dengan posisinya sebagai organ pendukung Direksi, Sekretaris Perusahaan memegang tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Menjadi koordinator untuk semua kegiatan aksi perusahaan yang dilakukan oleh Perusahaan;
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan;
4. Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan untuk mematuhi ketentuan UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
5. Menjadi narahubung antara Perusahaan dengan Otoritas Pasar Modal dan masyarakat;
6. Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya baik dalam Perusahaan maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan;
7. Membuat Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan 5% saham atau lebih; dan
8. Mengoordinasikan pelaksanaan RUPS.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsinya di Perusahaan dan menunjang pencapaian kinerja Sekretaris Perusahaan, kinerja Direksi secara khusus dan kinerja Perusahaan secara umum dengan lebih optimal, Sekretaris

CORPORATE SECRETARY PROFILE

Dahlia Evawani

Corporate Secretary

Indonesian Citizen, 44 years old. Appointed as Corporate Secretary on July 30, 2013 based on Decision Letter of the Board of Directors. Received Bachelor of Economics degree from STIE Perbanas Jakarta in 2000. She joined the Company since January 19, 2007 and previously had experience as Accounting Staff at ABN Amro Bank N.V(2000), Indonesian Bank Restructuring Agent (IBRA) (2000 – 2004), and at PT Daruma Investama (2007 – 2008).

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

As a Board of Directors' supporting instrument, Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

1. Following developments in the capital market, especially of regulations related to capital markets;
2. Acting as a coordinator for all corporate actions carried out by the Company;
3. Providing the public with any information needed by the investors in relation to the Company's condition;
4. Providing input to the Board of Directors of the Company on compliance with the provisions of Law No. 8 of 1995 on Capital Market and the implementing regulations;
5. Acting as a liaison officer for the Company with the Capital Market Authority and the public;
6. Setting up a Special Register related to the Board of Directors, the Board of Commissioners and their families both in the Company and its affiliates including on share ownership, business relations and other roles that could result in conflict of interest with the Company;
7. Maintaining a Shareholder's Register including those with share ownership of 5% or more; and
8. Coordinating the convening of the GMS.

Corporate Secretary Competence Development Program

In order to support the implementation of its functions in the Company and to support the achievement of the performance of the Corporate Secretary, the performance of the Board of Directors in particular and the performance

Perusahaan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan. Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

of the Company in general optimally, the Corporate Secretary participates in various education and training courses. Throughout 2020, the Corporate Secretary has attended education and training with the following details:

No.	Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Materials</i>	Tempat/ Tanggal <i>Place/Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
1.	Pendalaman POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Keuangan (LJK), Emiten serta Perusahaan Publik Further Understanding of POJK No.51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Institutions (LJK), Issuers and Public Companies	4 Februari 2020 February 4, 2020	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) & Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) & Financial Services Authority (OJK)
2.	Sosialisasi Taksonomi XBRL-02 Dissemination of XBRL-02 Taxonomy	28 Februari 2020 February 28, 2020	PT Bursa Efek Indonesia (BEI) & OJK PT Bursa Efek Indonesia (BEI) & OJK
3.	Dampak Covid-19 terhadap Penerapan PSAK 8, PSAK 68 dan PSAK 71 The Impact of Covid-19 to the Implementation of PSAK 8, PSAK 68 and PSAK 71	29 April 2020 April 29, 2020	BEI & Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
4.	Exposure Draft (ED) Primary Financial Statement & Draft Exposur (DE) Amendemen PSAK 73 Sewa Primary Financial Statement Exposure Draft (ED) & Draft Exposure (DE) of PSAK 73 Amendment on Lease	13 Mei 2020 May 13, 2020	BEI & IAI
5.	Sosialisasi Peraturan Nomor I-B Tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang Dissemination on Regulation No. I-B on Debt Securities Listing	9 Juni 2020 June 9, 2020	BEI
6.	Sustainability Report : A Practical Guidance Sustainability Report: A Practical Guidance	25 Juni 2020 June 25, 2020	ICSA
7.	Why You Should Protect Your Data Why You Should Protect Your Data	2 Juli 2020 July 2, 2020	ICSA
8.	Reporting on Emission and Climate Risk Reporting on Emission and Climate Risk	3 Juli 2020 July 3, 2020	Global Reporting Initiative (GRI) dan BEI
9.	Manfaat Pendanaan Perusahaan Melalui Penerbitan Sukuk dan Outlook Pasar Modal Syariah Indonesia 2020 Benefits of Company Financing Through Sukuk Issuance and Outlook on 2020 Syariah Capital Market in Indonesia	8 Juli 2020 July 8, 2020	BEI
10.	Pendalaman atas POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Further Study on POJK No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Changes in Business Activities	9 Juli 2020 July 9, 2020	ICSA
11.	POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic GMS of Public Companies	16 Juli 2020 July 16, 2020	ICSA

No.	Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Materials</i>	Tempat/ Tanggal <i>Place/Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
12.	Preparing Stakeholder Engagement and Sustainability Strategy Preparing Stakeholder Engagement Sustainability Strategy	4 Agustus 2020 August 4, 2020	BEI
13.	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Dissemination of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions	14 Agustus 2020 August 14, 2020	ICSA & OJK
14.	Pentingkah Market Capitalization? Is Market Capitalization Important?	3 September 2020 September 3, 2020	ICSA
15.	Sosialisasi dan diseminasi terkait Pasar Modal, kewajiban yang harus dipenuhi oleh Emiten, dan peran anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Socialization and dissemination on the Capital Market, the obligations that must be fulfilled by Issuers, and the roles of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners	8 September 2020 September 8, 2020	BEI, OJK & IAI
16.	The 6th Indonesian Finance Association Internasional Conference" dengan tema COVID 19, Current Challenges, and the Future of Financial Market The 6th Indonesian Finance Association Internasional Conference" with the theme of COVID 19, Current Challenges, and the Future of Financial Market	17-18 September 2020 September 17-18, 2020	BEI
17.	Excellent Attitude for Corporate Secretary Excellent Attitude for Corporate Secretary	28 September 2020 September 28, 2020	ICSA
18.	Strategi Penerbitan Sukuk di Masa Pandemi untuk Menarik Investor Sukuk Issuance Strategy during Pandemic Period to Attract Investors	1 Oktober 2020 October 1, 2020	BEI & OJK
19.	Klasifikasi sektoral Jakarta Stock Industrial Classification Sectoral Classification of Jakarta Stock Industrial Classification	15 Oktober 2020 October 15, 2020	BEI & OJK
20.	Restrukturisasi dan Tindakan Korporasi ("Seminar RTK") dengan tema "Advancing Companies' Performance Through Corporate Restructuring and Corporate Actions" Restructuring and Corporate Action ("RTK Seminar") with the theme of "Advancing Companies' Performance Through Corporate Restructuring and Corporate Actions"	20 Oktober 2020 October 20, 2020	BEI & OJK
21.	Tantangan Corporate Secretary di Masa Pandemi / Corporate Secretary Challenges during the Pandemic	22 Oktober 2020 October 22, 2020	ICSA

No.	Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Materials</i>	Tempat/ Tanggal <i>Place/Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
22.	Corporate Culture	19 November 2020 November 19, 2020	ICSA
23.	Dasar Fiqh dan Proses Seleksi Saham Syariah Indonesia <i>Basics of Fiqh and Selection Process of Indonesian Syariah Shares</i>	10 Desember 2020 December 10, 2020	BEI, OJK & DSN MUI
24.	Internal Communication Engagement <i>Internal Communication Engagement</i>	16 Desember 2020 December 16, 2020	ICSA
25.	Peluang Baru: Bagaimana Akuntan Publik Mengoptimalkan Jasa Audit <i>New Opportunities: How Public Accountants Optimize Audit Services</i>	16 Desember 2020 December 16, 2020	Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) Public Accounting Professional Committee (KPAP)

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Hingga akhir tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan perannya yang seluruhnya telah disampaikan dalam Laporan Sekretaris Perusahaan dan telah dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Berbagai kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perusahaan;
2. Menyelenggarakan pelaksanaan Paparan Publik Tahunan;
3. Menyampaikan Laporan Tahunan yang diaudit dan Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI);
4. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris sekaligus membuat risalah hasil rapat;
5. Menjadi koordinator untuk semua kegiatan Komite Audit;
6. Melakukan pelaporan kepatuhan kepada regulator;
7. Melakukan keterbukaan informasi atas setiap aksi korporasi yang dilakukan entitas anak Perusahaan; dan
8. Menjalin komunikasi dengan OJK, *Self Regulatory Organization* (SRO), BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan pihak terkait lainnya.

Activity Implementation Report of Corporate Secretary

Until the end of 2020, Corporate Secretary has carried out various activities in the context of carrying out its functions and roles, all of which have been stated in the Corporate Secretary's Report and reported to the Board of Directors and the Board of Commissioners. Such activities are as follows:

1. Organizing the Company's Annual General Meeting of Shareholders;
2. Organizing the implementation of the Annual Public Expose;
3. Submitting the audited Annual Report and Financial Report to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX);
4. Attending Board of Commissioners' Meetings and Joint Meetings of the Directors and Board of Commissioners as well as making minutes of the results of the meeting;
5. Become a coordinator for all Audit Committee activities
6. Reporting compliance with regulators;
7. Disclose information on every corporate action taken by a subsidiary; and
8. Establish communication with OJK, *Self Regulatory Organization* (SRO), IDX, Indonesian Central Securities Depository (KSEI), Indonesian Securities Clearing Guarantee (KPEI), and other related parties.

AUDIT INTERNAL

Audit Internal merupakan salah satu organ Perusahaan yang memiliki fungsi dan peran menjalankan secara independen kegiatan *assurance* dan *consulting* yang dirancang dengan tujuan menghadirkan nilai tambah serta meningkatkan kualitas dari operasional Perusahaan. Selain itu, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur yang dilakukan Audit Internal pada proses evaluasi dan peningkatan efektivitas pengelolaan risiko dan pengendalian internal dalam proses tata kelola, Perusahaan didukung untuk mencapai target dan tujuannya dalam mewujudkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Pedoman Kerja Audit Internal

Audit Internal memiliki pedoman kerja berupa Piagam Audit Internal sebagai panduan untuk Audit Internal Perusahaan dalam pemenuhan fungsinya, yakni pelaksanaan proses audit terhadap pelaksanaan sistem operasional di Perusahaan. Piagam tersebut disusun dan telah diperbaharui pada tanggal 17 Januari 2020. Dalam Piagam Audit Internal, memuat berbagai hal terkait Audit Internal, seperti Tujuan Audit Internal, Lingkup Pekerjaan, Independensi, Kedudukan dan Struktur, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kewenangan, Kualifikasi, serta Kode Etik dan Standar Pelaksanaan Audit.

Di samping Piagam Audit Internal, terdapat dasar atau acuan lain yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja Audit Internal yaitu kode etik dan *Internasional Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari The Institute of Internal Auditors.

Independensi, Kedudukan, dan Struktur Audit Internal

Di dalam Perusahaan, Audit Internal merupakan pihak yang bekerja secara independen dengan kedudukan berada di bawah Direktur Utama, sehingga Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Guna mendukung pelaksanaan tugasnya, Audit Internal memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit serta memiliki akses yang tidak terbatas namun tetap dalam batas kewajaran pada seluruh kegiatan Perusahaan. Audit Internal memegang peranan penting sebagai mitra manajemen dalam upaya pencapaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

INTERNAL AUDIT

Internal Audit is one of the Company's instruments that has the function and role of independently carrying out assurance and consulting activities designed with the aim of presenting added value and improving the quality of the Company's operations. In addition, through a systematic and orderly approach carried out by Internal Audit in the evaluation process and increasing the effectiveness of risk management and internal control in the governance process, the Company receives support to achieve its targets and objectives in realizing the optimal and appropriate implementation of Good Corporate Governance as expected.

Internal Audit Guidelines

The Internal Audit has a work guideline in the form of Internal Audit Charter as a guide for the Company's Internal Audit in fulfilling its functions, namely the implementation of audit process on the Company's operational system. The Charter was established and updated in January 17, 2020. The Internal Audit Charter consists of matters related to Internal Audit, namely: Internal Audit Objectives, Scope of Work, Independence, Position and Structure, Accountability, Responsibility, Authority, Qualification, Code of Conduct and Standards of Audit Implementation.

In addition to this Charter, other basis or references used by the Internal Audit Department are the code of conduct, professional standards, and framework issued by the Internal Audit Association. and the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing of The Institute of Internal Auditors.

Independency, Position, and Structure of Internal Audit

Within the Company, Internal Audit is a party that works independently under the President Director, thus Internal Audit must report directly to the President Director. In order to support the implementation of its duties, Internal Audit has a direct line of communication with the Board of Commissioners and the Audit Committee and has unlimited but reasonable access to all Company activities. Internal Audit plays an important role as a management partner in the effort to achieve the implementation of Good Corporate Governance.

Pada tahun 2020, unit Audit Internal Perusahaan memiliki komposisi dengan jumlah 3 orang dengan salah satunya menjabat sebagai General Manager Audit Internal.

PROFIL GENERAL MANAGER AUDIT INTERNAL

Junianto T. Prijono

General Manager Audit Internal

Profil Junianto T. Prijono dapat dilihat pada pembahasan "Profil Pejabat Eksekutif" di dalam bab "Profil Perusahaan" halaman 112.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Tugas utama yang dimiliki Audit Internal Perusahaan secara kolektif mencakup penilaian dari efektivitas dan kecukupan pada proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola yang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh manajemen Perusahaan. Pelaksanaan tugas utama tersebut dijalankan untuk memastikan bahwa:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan yang telah disetujui, termasuk penugasan khusus atau proyek yang diminta oleh manajemen atau Komite Audit;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Bekerja sama dengan Komite Audit;
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Program Pengembangan Kompetensi Audit Internal

Guna menghadirkan pelaksanaan fungsinya di Perusahaan dengan efektif dan efisien serta menunjang pencapaian kinerja Audit Internal, kinerja Direksi secara khusus dan

In 2020, the Company's Internal Audit unit has a composition consisting of 3 members, with one of the members being the General Manager of Internal Audit.

INTERNAL AUDIT GENERAL MANAGER PROFILE

Junianto T. Prijono

General Manager of Internal Audit

Junianto T. Prijono's profile can be viewed in the "Executive Officers' Profile" discussion in the "Company Profile" chapter page 112.

Duties and Responsibilities of Internal Audit

The collective main task that the Company's Internal Audit has includes assessing the effectiveness and adequacy of the risk management, internal control, and governance processes implemented by the Company's management. The implementation of these main tasks is carried out to ensure :

1. The development and implementation of the approved annual internal audit plan, including special assignments or projects requested by the management or the Audit Committee;
2. The examination and evaluation of the implementation of internal control and risk management systems in accordance with the Company's policies;
3. The examination and assessment of the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;
4. The provision of recommendations for improvements and objective information about the activities audited at all levels of management;
5. The preparation of an audit report and submit the report to the Board of Directors and the Board of Commissioners;
6. Close work with the Audit Committee;
7. The monitoring, analysis and reporting of the implementation of any suggested improvements;
8. The development of a program to evaluate the quality of internal audit activities; and
9. The holding of special inspections as necessary.

Competence Development Program of Internal Audit

In order to provide an effective and efficient implementation of its functions in the Company and to support the achievement of Internal Audit performance, the performance

kinerja Perusahaan secara umum dengan lebih optimal, Audit Internal mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan. Sepanjang tahun 2020, Audit Internal telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

of the Board of Directors in particular and the Company's general performance in a more optimal manner, Internal Audit has participated in various education and training courses. Throughout 2020, Internal Audit has attended education and training with the following details:

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Type</i>	Nama Pelatihan/ Pendidikan <i>Training/Education Name</i>	Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Adhitya Suwanda/ Internal Audit Spv	<i>Risk Management</i>	<i>"Risk Management: Strengthening the second line of defence"</i>	Jakarta, 30 April 2020 Jakarta, April 30, 2020	Binus Business School

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal

Sepanjang tahun 2020, Internal Audit telah melaksanakan serangkaian kegiatan evaluasi atas pengendalian internal di berbagai entitas perusahaan anak, antara lain audit operasional pada proses operasi, pemeliharaan jalan tol, pengadaan barang dan jasa, keuangan, IT, dan logistik.

Activity Implementation Report of Internal Audit

Throughout 2020, the Internal Audit carried out a series of evaluation activities on internal control in various subsidiary companies, including operational audits on operation processes, toll road maintenance, procurement of goods and services, finance, IT and logistics.

AUDIT EKSTERNAL

Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi Auditor Eksternal Perusahaan yang jasanya digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan Perusahaan dan turut berperan dalam memenuhi fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan milik Perusahaan sehingga opini yang diberikan dapat bersifat objektif. Tugas dari KAP sebagai Auditor Eksternal ialah memastikan setiap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam bentuk apa pun telah disusun secara tepat dan akurat serta telah memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku sehingga KAP diberikan akses penuh untuk mengakses seluruh data Perusahaan, baik data keuangan maupun data lainnya yang dibutuhkan.

EXTERNAL AUDIT

The Public Accounting Firm (KAP) becomes the Company's External Auditor whose services are used to conduct audits of the Company's financial statements and play a role in fulfilling the independent supervisory function of the Company's financial aspects to provide objective opinion. KAP's job as an External Auditor is to ensure that every financial statement issued by the Company in any form has been prepared accurately and meets the applicable Financial Accounting Standards (SAK), as such KAP is given full access to all of the Company's data, both financial and other necessary data.

Penetapan Auditor Eksternal dilakukan melalui RUPS Tahunan berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, Auditor Eksternal atau Akuntan Publik hanya dapat memberikan jasa audit kepada suatu perusahaan selama lima tahun buku berturut-turut dan dapat kembali memberikan jasa audit kepada perusahaan tersebut setelah selama dua tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa auditnya.

The External Auditor is determined by the Annual General Meeting of Shareholders based on the recommendations given by the Board of Commissioners and the Audit Committee. As regulated in Government Regulation No. 20 of 2015 concerning the Practice of Public Accountants, External Auditors or Public Accountants can only provide audit services to a company for five consecutive fiscal years and may return to provide audit services to the company after two consecutive years of not providing audit services.

Kriteria Auditor Eksternal

Perusahaan memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh Auditor Eksternal yang akan dipilih, antara lain:

- Memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
- Telah berpengalaman melakukan audit di bidang infrastruktur;
- Tidak memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak lain yang dapat mengendalikan perusahaan serta pihak lain yang memiliki kepentingan dalam kegiatan usaha Perusahaan; dan
- Terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik pada OJK.

External Auditor's Criteria

The Company has several criteria that must be met by the appointed External Auditor, namely:

- Has a good reputation and track record.
- Has infrastructure audit experience.
- Has no relationships both directly and indirectly with the Board of Commissioners, the Board of Directors and others in control of the company and other parties who have an interest in the Company's operations.
- Registered as a Public Accounting Firm with the OJK.

AUDITOR EKSTERNAL PERUSAHAAN

Informasi terkait auditor eksternal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan dengan rincian mencakup Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik, serta jasa yang diberikan selama 5 (lima) tahun terakhir termuat dalam tabel sebagai berikut:

THE COMPANY'S EXTERNAL AUDITOR

Information of the external auditor whose services are used by the Company with details covering Public Accounting Firm, Public Accountant's Name, and services provided in the last 5 (five) years are listed in the following table:

Tahun Buku Fiscal Year	Nama Akuntan Publik Public Accountant Name	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Jasa Service
2020	Agung Purwanto, S.E., Ak., CPA., CA	Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota Ernst & Young)	Audit terhadap Laporan Keuangan Audit on Financial Statements
2019	Agung Purwanto, S.E., Ak., CPA., CA	Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota Ernst & Young)	Audit terhadap Laporan Keuangan Audit on Financial Statements
2018	Agung Purwanto, S.E., Ak., CPA., CA	Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota Ernst & Young)	Audit terhadap Laporan Keuangan Audit on Financial Statements
2017	Ledo Ekodianto, S.E., Ak, CPA, CA	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota BDO International) (Member of BDO International)	Audit terhadap Laporan Keuangan Audit on Financial Statements
2016	Ledo Ekodianto, S.E., Ak, CPA, CA	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota BDO International) (Member of BDO International)	Audit terhadap Laporan Keuangan Audit on Financial Statements

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko menjadi bagian penting dalam upaya dan komitmen Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penerapan manajemen risiko yang tepat dan komprehensif mampu mendukung Perusahaan mencapai

RISK MANAGEMENT

Risk management is an important part of the Company's efforts and commitment to implement Good Corporate Governance. The implementation of appropriate and comprehensive risk management can support the Company

kinerja yang optimal dengan menekan potensi risiko dan meminimalisir dampak yang mungkin terjadi akibat risiko tersebut.

Perusahaan memastikan bahwa manajemen risiko telah diterapkan di seluruh proses operasional Perusahaan dan seluruh lini Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai salah satu upaya Perusahaan dalam mengimplementasikan manajemen risiko yang terintegrasi secara efektif dan efisien. Perusahaan secara berkala mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat dipahami dan dievaluasi tingkat efektivitasnya.

Kebijakan Manajemen Risiko

Perusahaan memiliki kebijakan terkait Manajemen Risiko yang berfungsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan risiko di setiap unit kerja yang ada di Perusahaan. Kebijakan tersebut meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Mendeteksi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas;
2. Melakukan pengukuran tingkat dan besaran setiap risiko dengan memperhitungkan skala dampak dan kemungkinan terjadinya risiko;
3. Melakukan evaluasi terhadap sumber risiko sebagai dasar pemetaan dan pengendalian risiko yang signifikan;
4. Menyusun rencana strategi pengendalian terhadap risiko yang mempunyai prioritas tinggi;
5. Melaksanakan kegiatan pengendalian risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha Perusahaan; dan
6. Melakukan pemantauan risiko secara berkelanjutan, khususnya yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi usaha Perusahaan.

Jenis dan Mitigasi Risiko Perusahaan

Berbagai risiko yang Perusahaan hadapi dalam proses menjalankan aktivitas bisnis usahanya memiliki sifat material. Guna mencegah potensi dampak buruk yang ditimbulkan dari risiko-risiko tersebut, Perusahaan melakukan peninjauan secara rutin pada kebijakan *hedge and control* yang berlaku untuk setiap jenis risiko. Dengan adanya peninjauan tersebut, Perusahaan dapat menentukan langkah mitigasi yang tepat untuk menekan dampak negatif dari risiko-risiko tersebut terhadap bisnis usaha Perusahaan secara keseluruhan.

in achieving optimal performance by reducing potential risks and minimizing the impact that may occur due to these risks.

The Company ensures that risk management has been implemented throughout the Company's operational processes and all lines. To that end, the Company established a Risk Management Policy as one of the Company's efforts to implement integrated risk management effectively and efficiently. The Company periodically communicates this policy to all stakeholders to be understood and evaluated for its effectiveness.

Risk Management Policy

The Company has policies related to Risk Management, which serve to optimize the implementation of risk management in every work unit in the Company. The policy includes, among others, the following:

1. Detecting risks as early as possible on each activity.
2. Measuring the level and magnitude of each risk, by taking into account the magnitude of the impact and the likelihood of the risk potential to occur.
3. Evaluating the source of risks and causes of risks, as the basis in mapping and controlling significant risks.
4. Preparing a strategic risk control plan for high priority risks.
5. Carrying out control activities for risks that endanger the Company's survival.
6. Continuously monitoring risks, especially those that have a significant impact on the condition of the Company.

Company Risk Types and Mitigation

The various risks that the Company faces in the process of carrying out its business activities are of a material nature. In order to prevent potential adverse impacts arising from these risks, the Company conducts regular reviews of the hedge and control policies that apply to each type of risk. With this review, the Company can determine the appropriate mitigation steps to minimize the negative impact of these risks on the Company's business as a whole.

Jenis Risiko / Risk Type	Mitigasi Risiko / Risk Mitigation
Risiko Suku Bunga bagi Nilai Wajar dan Arus Kas / Interest Rate Risk For Reasonable Value and Cash Flow	
Risiko suku bunga yang berasal dari pinjaman bank dengan tingkat suku bunga yang berbeda-beda dapat memengaruhi arus kas Perusahaan. Hal ini juga didorong oleh dana tunai yang disimpan pada berbagai tingkat suku bunga. Interest rate risk arising from bank loans with different interest rates may affect Company's cash flow. This risk factor is also driven by cash held at various interest rates.	Perusahaan melakukan evaluasi terhadap tren tingkat suku bunga pasar dan mengkaji tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh berbagai bank dan lembaga keuangan lainnya agar memperoleh suku bunga yang paling menguntungkan. The Company evaluates market trends and examines interest rates offered by various banks and other financial institutions in order to obtain the most profitable rates.
Risiko Mata Uang / Currency Risk	
Risiko mata uang adalah risiko yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat memengaruhi pendapatan dan pengeluaran untuk perusahaan yang kegiatan usahanya menggunakan mata uang asing. Currency risk is caused by fluctuations in foreign currency exchange rates that may affect income and expenses for companies whose business activities are carried out in foreign currencies.	Perusahaan belum menerapkan kebijakan mengenai risiko mata uang karena pendapatan dan pengeluaran Perusahaan dan entitas anak hampir seluruhnya dalam Rupiah. The Company has not implemented a currency risk policy since the Company and its subsidiaries' revenue and expenses are almost entirely in Rupiah.
Risiko Kredit / Credit Risk	
Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Credit risk is the risk where one of the parties to a financial instrument fails to meet its liability and causes the other party to suffer financial loss.	Perusahaan hanya memberikan pembayaran secara kredit dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel serta melakukan pemantauan terhadap saldo piutang secara berkelanjutan agar eksposur Perusahaan terhadap piutang yang tidak tertagih tidak signifikan. The Company only provides credit payments with recognized and credible third parties and monitors continuous balance of receivables to ensure that the Company's exposure to non-performing receivables is insignificant.
Risiko Likuiditas / Liquidity Risk	
Risiko likuiditas muncul terutama dari perbedaan jatuh tempo aset keuangan dan kewajiban, sehingga suatu pihak mengalami keterlambatan pemenuhan kewajiban keuangan karena kekurangan dana jangka pendek. Liquidity risk mainly arises from differences in the maturity of financial assets and liabilities, resulting in a party experiencing delays in the fulfillment of financial obligations due to short-term cash shortages.	Perusahaan secara menyeluruh memantau kebutuhan likuiditas dan terus menelaah kondisi pasar uang untuk memberi peluang bagi optimalisasi biaya-biaya pendanaan. The Company closely monitors liquidity needs and continues to examine money market conditions to identify opportunities to optimize financing costs.

Jenis Risiko / Risk Type	Mitigasi Risiko / Risk Mitigation
Risiko Permodalan / Capital Risk	
Risiko permodalan disebabkan oleh penurunan kualitas aset baik sebagai dampak kredit macet atau hal lainnya yang memaksa suatu perusahaan untuk menambah setoran modal dan/atau menerbitkan saham baru. Capital risk is caused by a decrease in asset quality either as a result of bad debt or other matters that compel a company to increase its capital deposits and/or issue new shares.	Manajemen Perusahaan memperhatikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas. Dalam memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menerbitkan saham baru, mengusahakan pendanaan melalui pinjaman, melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada ataupun menjual aset untuk mengurangi pinjaman. The Company's management is concerned with maintaining a sound capital ratio between liabilities and equity. In maintaining and adjusting its capital structure, the Company may issue new shares, seek financing through loans, restructure existing debt or sell assets to reduce loans.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tercermin melalui pelaksanaan dan penerapan Sistem Manajemen Internal (SPI) yang efektif di seluruh lini Perusahaan. SPI sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki aspek-aspek seperti laporan dan informasi keuangan yang andal, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta kegiatan operasional yang telah berlangsung baik dan optimal.

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang ada di Perusahaan diterapkan dengan melibatkan peran serta jajaran Dewan Komisaris, Direksi, hingga pejabat eksekutif serta telah mengacu pada kerangka Sistem Pengendalian Internal yang diakui secara global, yakni yang diterbitkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization (COSO)*.

Menurut COSO, tujuan dari pengendalian internal terdiri dari tujuan operasional yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi; tujuan pelaporan yang berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang andal, tepat waktu, transparan, memenuhi kriteria, serta persyaratan lain yang ditetapkan; dan tujuan kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku. Terdapat beberapa komponen yang ada dalam unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO, antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company's commitment to implementing Good Corporate Governance is reflected in the effective implementation and application of the Internal Management System (SPI) in all lines of the Company. SPI itself aims to ensure that the Company has aspects such as reliable financial reports and information, compliance with the applicable laws and regulations, as well as sustainable and optimum operational activities

Internal Control System Policy

The Company's Internal Control System (SPI) is implemented by involving the participation of the Board of Commissioners, Board of Directors, and executive officers and has referred to the globally recognized Internal Control System framework, published by The Committee of Sponsoring Organization (COSO).

According to COSO, the objectives of internal control consist of operational objectives related to the effectiveness and efficiency of operations; reporting objectives related to the interests of reliable, timely, and transparent financial reporting, meeting the criteria and other stipulated requirements; and compliance objectives related to the Company's compliance with the rules and regulations. There are several components in the elements of internal control according to COSO, including control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities.

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan mengatur beberapa ketentuan, antara lain:

1. Setiap transaksi keuangan yang dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan Perusahaan harus sesuai dengan prinsip Pedoman Standar Keuangan (PSAK) yang berlaku;
2. Perusahaan akan selalu mengumumkan setiap transaksi material dengan nilai lebih dari 20% dari ekuitas Perusahaan kepada masyarakat pada sedikitnya melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK; dan
3. Dalam rangka menerapkan pengendalian internal yang baik dan kompeten, setiap transaksi yang dicatat harus selalu mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan otoritas yang berlaku.

Melalui pengendalian internal yang diterapkan dengan tepat dan baik, diharapkan dapat menunjang jalannya aktivitas operasional Perusahaan dengan lebih efektif dan efisien, pengamanan aset Perusahaan lebih optimal, meningkatnya kepercayaan terhadap Laporan Keuangan Perusahaan, serta Perusahaan dapat lebih baik dalam aspek pemenuhan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Tinjauan dan evaluasi terhadap efektivitas dari penerapan Sistem Pengendalian Internal di seluruh lini Perusahaan dilakukan oleh Audit Internal. Organ tersebut juga berperan dalam melakukan pengawasan untuk mendukung asersi Direksi terkait efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan yang diterapkan. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada manajemen Perusahaan agar dapat ditindaklanjuti dan pelaksanaan dapat terus dimonitor sehingga SPI dapat berjalan efektif dan sesuai yang diharapkan.

Perusahaan melalui Audit Internal pada tahun 2020 telah melakukan evaluasi dan memperoleh hasil bahwa SPI telah berjalan dengan baik yang tergambar dari opini "Wajar Tanpa Pengecualian" pada Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

The Company's Internal Control System manages several components, such as:

1. Any financial transaction recorded and presented in the Company's Financial Statements must conform to the applicable Financial Standards Guidelines (PSAK);
2. The Company will always announce any material transactions valued at more than 20% of the Company's equity to the public at least through 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation and submit the proof of announcement to the Financial Services Authority OJK; and
3. In order to apply sound and reliable internal controls, each recorded transaction shall always be subject to the approval of a competent official in accordance with the applicable authority.

Through appropriate and proper internal controls implementation, the Company hopes that it can support the Company's operational activities more effectively and efficiently, optimally safeguarding the Company's assets, increasing confidence in the Company's Financial Statements, and improving the fulfillment of compliance pursuant to the prevailing regulations.

Review on the Effectiveness of Internal Control System

Internal Audit reviews and evaluates the effectiveness of the implementation of the Internal Control System at all lines of the Company. This instrument also plays a role in monitoring to support the Board of Directors' assertions regarding the effectiveness of the Company's internal control system. The results of the evaluation are then submitted to the Company's management to be followed up and the implementation can be continuously monitored for an effective SPI application as expected.

In 2020, the Company, through the Internal Audit, has evaluated and obtained results that the SPI has been running well as reflected in the "Unqualified" opinion on the Company's Financial Statements for the 2020 Fiscal Year, which has been audited by a Public Accounting Firm (KAP).

PERKARA HUKUM DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Perkara Hukum

Hingga akhir tahun 2020, tidak terdapat adanya perkara penting serta kasus hukum yang melibatkan Perusahaan maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan entitas anak.

Sanksi Administratif

Hingga akhir tahun 2020, tidak terdapat adanya sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Perusahaan, Dewan Komisaris, maupun Direksi oleh otoritas terkait.

ETIKA DAN NORMA PERILAKU

Dalam menjalankan bisnisnya di bidang infrastruktur, Perusahaan senantiasa mengutamakan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan yang dibangun dan dipelihara sesuai dengan standar etika bisnis dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Untuk itu, Perusahaan memiliki Kode Etik yang diturunkan ke dalam Etika dan Norma Perilaku sebagai bentuk komitmen Perusahaan menjalankan aktivitas usaha yang positif dan memberi nilai tambah. Etika dan Norma Perilaku ini terangkum dalam GCG Manual Perusahaan dan diterapkan ke seluruh lini. Seluruh individu Perusahaan diwajibkan untuk menerapkan Etika dan Norma Perilaku ini ke dalam aktivitas operasional sehari-hari sebagai dasar pembentukan sikap dan perilaku yang beretika secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pokok-Pokok Etika dan Norma Perilaku

Pokok-pokok yang terkandung dalam Etika dan Norma Perilaku disusun oleh Perusahaan dengan menurunkan Kode Etik ke dalam Etika dan Norma Perilaku yang kini diterapkan secara menyeluruh dan senantiasa mengacu pada ketentuan dan kebijakan Perusahaan serta regulasi berupa perundang-undangan yang berlaku. Etika dan Norma Perilaku yang diterapkan oleh Perusahaan mencakup:

1. Kepatuhan terhadap Hukum

Seluruh individu Perusahaan wajib untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Perusahaan serta menjunjung tinggi dan menghormati Norma Sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat.

LEGAL CASES AND ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Legal Cases

By the end of 2020, there were no important cases and legal cases involving both the Company and the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and subsidiaries.

Administrative Sanctions

By the end of 2020, no administrative sanctions were imposed on either the Company or the Board of Commissioners and the Board of Directors.

ETHICS AND CONDUCT

In running its business in the infrastructure sector, the Company prioritizes good relations with the stakeholders that are established and nurtured in accordance with business ethical standards and do not deviate from the prevailing regulations.

Therefore, the Company has a Code of Ethics which is divided into Ethics and Codes of Conduct as the Company's commitment to running positive and value-adding business activities. These Ethics and Conducts are summarized in the Company's GCG Manual and are applied to all lines. All Company individuals are required to apply these Ethics and Conducts into their daily operational activities as the basis for forming ethical attitudes and behaviors consistently in accordance with the applicable regulations.

Principles of Ethics and Conducts

The principles contained in the Ethics and Code of Conduct are compiled by the Company by deriving the Code of Ethics into Ethics and Conducts which are now being applied thoroughly and in reference to the provisions and policies of the Company as well as regulations in the form of applicable laws. The Ethics and Conducts applied by the Company include:

1. Compliance with the Law

All Company individuals are required to comply with and implement the rules and regulations and the Company's internal regulations, uphold and respect the Social Norms in the community.

2. Beradaptasi secara Gesit dan Unggul terhadap Perubahan Lingkungan
Selalu gesit serta siap mengatasi dan mengelola risiko usaha akibat perubahan di lingkungan industri infrastruktur dan mampu memantau serta mengikuti dengan cepat segala sesuatu kesempatan yang positif akibat perubahan atau pengembangan lingkungan.
3. Menjaga Kerahasiaan Informasi
Segala bentuk informasi Perusahaan harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kelaziman dalam dunia usaha dan dilarang menyalahgunakan, membocorkan secara sengaja informasi Perusahaan untuk kepentingan ekonomis pribadi atau pihak lain. Karyawan juga diharapkan dapat berkontribusi aktif untuk mencegah atau menangani apabila mengetahui kemungkinan atau telah terjadinya suatu penggunaan informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain tanpa sepengetahuan Perusahaan. Mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan Perusahaan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar.
4. Benturan Kepentingan
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, para pemegang saham utama, Dewan Komisaris, Direksi serta karyawan dilarang menyalahgunakan jabatan dan wewenang serta harus senantiasa mendahulukan kepentingan Perusahaan. Pada saat pengambilan keputusan, apabila terdapat pihak yang memiliki benturan kepentingan, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak pengambil keputusan lainnya dan tidak diperkenankan ikut serta.
5. Pernyataan Palsu
Pernyataan Palsu adalah pernyataan tertulis ataupun lisan yang dibuat secara tidak benar atau menyesatkan secara sengaja yang dapat merugikan Perusahaan, pemangku kepentingan ataupun pihak lain. Pernyataan palsu tersebut mencakup beberapa hal namun tidak terbatas pada memalsukan dokumen dan memberikan laporan palsu yang bertujuan untuk menggelapkan ataupun menyembunyikan transaksi bagi kepentingan Perusahaan, pribadi, pihak lain, maupun pemangku kepentingan.
6. Perlindungan terhadap Privasi Individu
Perusahaan mengedepankan perlindungan terhadap privasi individu dan mencegah adanya pengungkapan yang tidak sesuai hukum, moral dan etika atas informasi pribadi.
2. Agile and Excellent Adaptation to Environmental Changes
Always be agile and ready to deal with and manage business risks due to changes in the infrastructure industry's environment and able to monitor and quickly follow all positive opportunities due to environmental changes or developments.
3. Maintenance of Information Confidentiality
All Company's information must be kept confidential in accordance with the prevailing laws and regulations in the business world and are prohibited from misusing, deliberately leaking Company information for personal economic interests or other parties. Employees are also expected to actively contribute to preventing or dealing with any knowledge of the possibility or the use of confidential information for the benefit of other parties without the Company's knowledge. Business partners are entitled to obtain relevant information in accordance with business relationship with the Company so that each party can make decisions based on fair and reasonable considerations.
4. Conflict of Interest
In carrying out their duties and obligations, the majority shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees are prohibited from abusing their position and authority and must always prioritize the Company's interests. When making a decision, if there is a party with a conflict of interest, that party must notify the other decision makers and is not allowed to participate.
5. False Statement
False statements are written or oral statements that are deliberately incorrect or misleading which can harm the Company, stakeholders or other parties. These false statements include but are not limited to falsifying documents and providing false reports that aim to embezzle or conceal transactions for the benefit of the Company, personal, other parties, or stakeholders.
6. Protection of Individual Privacy
The Company promotes protection of individual privacy and prevents unlawful, moral and ethical disclosure of personal information.

7. Pengembangan Masyarakat Lingkungan

Perusahaan berupaya untuk menjalin hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, dengan berkomitmen untuk menjaga semua pihak, termasuk karyawan, pemangku kepentingan dan pelanggan serta masyarakat di lingkungan sekitar. Perusahaan juga memperhatikan lingkungan yang diwujudkan salah satunya dengan melibatkan masyarakat untuk mengadakan kegiatan yang berguna bagi masyarakat dan seperti memberi pelatihan kepada masyarakat lingkungan yang memiliki kekurangan fisik dan mental. Perusahaan juga memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi dan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan.

8. Hubungan dengan Pegawai dan Pejabat Pemerintah

Perusahaan selalu berupaya untuk menjaga hubungan antar Pegawai dalam Perusahaan dan hubungan Perusahaan dengan pejabat pemerintah/negara tetap baik berdasarkan hubungan yang lazim, wajar dan beretika. Dalam hal menjaga hubungan baik antar pegawai, Perusahaan harus memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh pegawai melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu. Dalam hal menjaga hubungan baik dengan pemerintah, Perusahaan bersifat proaktif namun dengan batasan hubungan yang lazim, wajar dan beretika dalam memperluas bisnis, yang diterjemahkan untuk menemukan aset yang tepat, originasi kesepakatan dan membangun hubungan baik dengan pemerintah sesuai dengan nilai Perusahaan, *Proactive*. Di dalam berhubungan antara pegawai Perusahaan dengan pejabat pemerintah, Perusahaan melarang pemberian hadiah yang memiliki nilai di luar batas kewajaran yang dapat menimbulkan persepsi dari pihak lain sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi keputusan orang yang menerima hadiah tersebut.

9. Hadiah

Perusahaan melarang penerimaan hadiah dalam bentuk apa pun yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan. Terkecuali jika hadiah tersebut memiliki nilai dalam batas kewajaran dan tidak menimbulkan persepsi dari pihak lain sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi keputusan orang yang menerima hadiah tersebut.

7. Environment and Community Development

The Company strives to forge mutually beneficial partnership relationships, by committing itself to safeguarding all parties, including employees, stakeholders and customers as well as the community in the surrounding environment. The Company also pays attention to the environment, one of which is manifested by involving the community to hold activities that are useful for the community and such as providing training to environmental communities who have physical and mental deficiencies. The Company also provides scholarship assistance to children who excel and cannot afford to continue their education.

8. Relationship With Employees and Government Officials

The Company always strives to maintain good relations between employees in the Company and between the Company and government/state officials based on a normal, reasonable and ethical relationship. In terms of maintaining good relations between employees, the Company must ensure the availability of information that employees need to know through a good and timely communication system. In terms of maintaining good relations with the government, the Company is proactive but within the boundaries of a normal, reasonable and ethical relationship in expanding its business, which translates to finding the right assets, origination of agreements and building good relations with the government in accordance with the Company's values. In dealing between Company employees and government officials, the Company prohibits rewards giving with values outside the normal limits that can lead to the perception of other parties as something that can influence the decision of the person who receives the rewards.

9. Rewards

The Company prohibits the acceptance of rewards of any kind related to the Company's business activities. The exception is if the reward has a value within reasonable limits and does not cause the perception of the other party as something that can influence the decision of the person receiving the gift.

10. Donasi

Pemberian donasi berupa uang atau aset Perusahaan untuk amal diperbolehkan oleh Perusahaan selama masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masih dalam batas kewajaran, kepatutan serta sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Pemberian donasi berupa uang atau aset Perusahaan kepada Partai Politik atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif atau eksekutif diperbolehkan oleh Perusahaan sepanjang nilai donasi, syarat-syarat dan ketentuan pemberian donasi sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Keterlibatan dalam Kegiatan Politik

Perusahaan memperbolehkan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Karyawan untuk mengikuti kegiatan politik atau menjadi anggota suatu Partai Politik, tetapi Perusahaan melarang anggota Dewan Komisaris, Direksi atau karyawan untuk melakukan kegiatan politik di dalam lingkungan Perusahaan dengan alasan apa pun, termasuk dilarang memaksa orang lain untuk memilih atau mengikuti suatu partai politik. Perusahaan melarang penggunaan aset atau fasilitas yang diberi Perusahaan untuk kegiatan politik, seperti: penggunaan mobil atau kantor Perusahaan untuk kampanye politik, pemberian penyuluhan terhadap karyawan Perusahaan di dalam lingkungan kantor untuk kegiatan kampanye politik.

Sosialisasi dan Internalisasi

Sosialisasi dan internalisasi menjadi langkah penting yang dilakukan Perusahaan untuk mewujudkan penerapan Etika dan Norma Perilaku secara optimal dan menyeluruh ke semua lini Perusahaan. Perusahaan menginformasikan kepada seluruh individu Perusahaan terkait Etika dan Norma Perilaku dengan memanfaatkan berbagai media internal yang dapat diakses kapan saja dengan mudah oleh seluruh individu Perusahaan, seperti memo internal, surel, buletin internal, situs web, hingga berbagai pelatihan yang diadakan internal. Diharapkan, melalui proses ini, setiap individu yang bekerja di Perusahaan dapat menjalankan perannya dengan memahami dan menerapkan etika dan norma dalam berperilaku dan bersikap dengan patuh.

10. Donation

Donations in the form of money or Company assets for charity are permitted by the Company as long as it is in accordance with the laws and regulations and is within the limits of reasonableness, appropriateness and in accordance with those determined by the Company. Donations for members of the legislative or executive bodies are allowed by the Company as long as the value of the donation, the terms and conditions for giving the donation are in accordance with and do not conflict with the prevailing laws and regulations.

11. Involvement in Political Activities

The Company allows members of the Board of Commissioners, Directors or Employees to participate in political activities or become members of a political party, but the Company prohibits members of the Board of Commissioners, Board of Directors or employees from carrying out political activities within the Company for any reason, including being prohibited from forcing others to vote or follow a political party. The Company prohibits the use of assets or facilities provided by the Company for political activities, such as: the use of Company cars or offices for political campaigns, providing counseling to Company employees in the office environment for political campaign activities.

Socialization and Internalization

Socialization and internalization are important steps taken by the Company to achieve optimal and comprehensive implementation of Ethics and Conduct in all lines of the Company. The Company informs all Company individuals regarding Ethics and Conduct by utilizing various internal media that can be accessed easily at any time by all Company individuals, such as internal memos, e-mails, internal newsletters, websites, to various internal trainings. It is hoped that, through this process, every individual who works in the Company can carry out their role by understanding and applying ethics and norms in behaving and behaving in an obedient manner.

Pemberlakuan Etika dan Norma Perilaku

Perusahaan memastikan bahwa komitmen penerapan Etika dan Norma Perilaku sebagai Kode Etik senantiasa dipegang teguh dengan menjamin bahwa Etika dan Norma Perilaku tersebut berlaku bagi seluruh individu Perusahaan, dari jajaran Manajemen hingga karyawan. Seluruh elemen Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dan kebijakan yang terangkum dalam Etika dan Norma Perilaku tanpa terkecuali. Pemberlakuan Etika dan Norma Perilaku ini menjadi bentuk tanggung jawab Perusahaan untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum serta etika yang berlaku guna menghadirkan lingkungan kerja yang kondusif, sehat, dan nyaman bagi seluruh pihak di dalamnya.

Unit Audit Internal menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hingga penerapan Etika dan Norma Perilaku Perusahaan dengan senantiasa mendapat dukungan dari seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, serta jajaran manajemen terkait lainnya.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2020

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan menemukan adanya pelanggaran pada Kode Etik Perusahaan sebanyak 9 pelanggaran. Informasi terkait jumlah pelanggaran dan sanksi yang diberikan terangkum dalam tabel berikut:

Jenis Sanksi Type of Sanction	Jumlah / Total	
	2020	2019
Teguran / Reprimand	-	-
Peringatan 1 / First Warning	1	-
Peringatan 2 / Second Warning	-	-
Peringatan 3 / Third Warning	-	-
Pengunduran Diri / Resignation	8	9
Pemutusan Hubungan Kerja / Dismissal	-	-

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Komitmen Perusahaan untuk menghadirkan kondisi dan lingkungan kerja yang kondusif, bersih, dan sehat diwujudkan melalui penyediaan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) yang bertujuan untuk mendukung penegakan prinsip-prinsip GCG secara optimal di seluruh lini Perusahaan. Melalui WBS, seluruh pihak berkesempatan untuk dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik, budaya perusahaan, peraturan Perusahaan, hingga perundang-undangan yang dilakukan

Application of Ethics and Conduct

The Company ensures that the commitment to the application of Ethics and Conduct as a Code of Ethics is always upheld by ensuring that the Ethics and Conduct apply to all individuals in the Company, from the management to the employees. All elements of the Company are required to comply with the provisions and policies summarized in the Ethics and Conduct without exception. Enforcement of Ethics and Conduct is a form of the Company's responsibility to always comply with applicable legal and ethical provisions in order to provide a conducive, healthy and comfortable work environment for all parties in it.

The Internal Audit Unit is the party responsible for the implementation up to the implementation of the Company's Ethics and Conduct by always receiving support from all members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers, and other related management ranks.

Total Codes of Conduct Violation in 2020

By the end of 2020, the Company found 9 violations on Codes of Conduct. Information on the violations and sanctions given is summarized in the following table.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Company's commitment to providing a conducive, clean and healthy working condition and environment is manifested through the provision of a Whistleblowing System (WBS) which aims to support the optimal upholding of GCG principles in all lines of the Company. Through WBS, all parties have the opportunity to submit reports of suspected violations of the code of ethics, corporate culture, company regulations, and laws by individual companies based on evidence that can be justified, not

oleh individu Perusahaan dengan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan berlandaskan fitnah, serta disampaikan untuk mendukung kepentingan Perusahaan. Perusahaan sendiri diwajibkan untuk menindaklanjuti laporan dengan pelanggaran dalam bentuk apa pun dan dilakukan oleh siapa pun, yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Laporan

Laporan dugaan atau kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh individu Perusahaan dapat disampaikan menggunakan berbagai jalur komunikasi yang disediakan Perusahaan dalam WBS. Laporan tersebut kemudian akan disampaikan dan ditangani oleh Kepala Unit Bisnis terkait dan diteruskan ke Audit Internal dan Departemen Sumber Daya Manusia untuk ditindaklanjuti.

Perlindungan bagi Pelapor

Perusahaan memastikan pelapor memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindakan merugikan seperti ancaman, intimidasi, maupun tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan dari pihak mana pun. Identitas pelapor juga akan dirahasiakan oleh Perusahaan sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan yang diberikan Perusahaan kepada pelapor.

Jumlah Pengaduan Tahun 2020

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak menerima laporan pengaduan pelanggaran, sehingga tidak terdapat adanya proses tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh Perusahaan.

KETERBUKAAN INFORMASI

Sebagai perusahaan publik, implementasi prinsip GCG berupa transparansi menjadi salah satu komitmen utama Perusahaan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Implementasi tersebut kemudian diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait Perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Informasi dan data Perusahaan disampaikan secara tepat waktu, akurat, dan terkini dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga informasi dapat diakses dengan semakin luas, mudah, dan cepat.

based on slander, and submitted to support the interests of the Company. The Company itself is obliged to follow up the reports with violations of any kind and be carried out by anyone, which violates the stipulated provisions.

Report Submission and Handling Mechanism

Reports of allegations or incidents of violations committed by individual companies can be submitted using various communication channels provided by the Company in the WBS. The reports will then be submitted and handled by the Head of the related Business Unit and forwarded to Internal Audit and the Human Resources Department for further action.

Protection For Reporters

The Company ensures that whistleblowers receive protection from all forms of harmful actions such as threats, intimidation or unpleasant actions from any party. The identity of the reporter will also be kept confidential by the Company as a form of protection measures provided by the Company to the whistleblower.

Total Complaints in 2020

By the end of 2020, the Company did not receive any violation report, thus the Company did not perform follow-ups on the complaints received.

INFORMATION DISCLOSURE

As a public company, the implementation of GCG principles in the form of transparency is one of the Company's main commitments in implementing Good Corporate Governance. This implementation is then realized through the disclosure of information related to the Company to shareholders and stakeholders. Company information and data are delivered in a timely, accurate and up-to-date manner using information technology, enabling information to be accessed in broader, easier and quicker fashion.

Di dalam pemenuhan implementasi aspek transparansi tersebut, Perusahaan senantiasa berpegang teguh pada prinsip pertanggungjawaban, terutama dalam penerbitan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, laporan pengungkapan lainnya, dan siaran pers. Perusahaan juga telah mengkaji kesesuaian seluruh informasi dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain transparansi dengan pihak eksternal, Perusahaan juga menerapkan transparansi dengan pihak internal guna menjamin adanya kesetaraan dalam hal penyebaran informasi. Perusahaan menggunakan berbagai media untuk penyampaian informasi kepada pihak internal, antara lain seperti *email*, memo, dan buletin internal, serta rapat koordinasi yang rutin diselenggarakan.

Selama masa pandemi yang terjadi di sepanjang tahun 2020, Perusahaan melakukan pemaparan informasi untuk publik secara *online* dengan menggunakan aplikasi pendukung, seperti Zoom atau Microsoft Teams. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi akibat adanya pertemuan secara fisik di lingkungan kerja.

Korespondensi dan Laporan Berkala

Informasi Perusahaan baik keuangan maupun non keuangan telah disampaikan oleh Perusahaan secara tepat waktu, lengkap dan akurat, terkini, memadai, dan utuh sesuai dengan sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Secara berkala, Perusahaan mengeluarkan berbagai laporan untuk menjadi media informasi tersebut, antara lain berupa:

- Laporan Triwulanan Perusahaan;
- Keterbukaan informasi terkait *corporate action* dan *public expose*; dan
- Laporan Tahunan.

Korespondensi Perusahaan di Tahun 2020

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan telah melakukan korespondensi dengan pihak-pihak seperti PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga penting lain dengan rincian informasi sebagai berikut:

In fulfilling the implementation of the transparency aspect, the Company always adheres to the principle of accountability, especially in the issuance of Annual Reports, Financial Reports, other disclosure reports, and press releases. The company has also reviewed the suitability of all information in order to comply with the prevailing laws and regulations.

Apart from transparency with external parties, the Company also applies transparency with internal parties to ensure equality in the dissemination of information. The company uses various media to convey information to internal parties, such as e-mails, memos and internal newsletters, as well as regular coordination meetings.

During the pandemic that occurred throughout 2020, the Company conducted online public disclosure of information by using supporting applications, such as Zoom or Microsoft Teams. This is done to reduce the risk of transmission that can occur due to physical encounters in the work environment.

Routine Correspondence and Report

Company information, both financial and non-financial matters, has been submitted by the Company in a timely, complete and accurate manner, up-to-date, adequate and intact in accordance with the provisions concerning Transparency of the Company's Financial Conditions. Periodically, the Company issues various reports to serve as a medium of information, including:

- Company Quarterly Reports;
- Information disclosure related to corporate actions and public expose;
- Annual Report.

Company's Correspondence in 2020

Until the end of 2020, the Company has conducted correspondence with parties such as the Indonesia Stock Exchange (IDX), the Financial Services Authority (OJK), and other important institutions with detailed information as follows:

No.	Tanggal Date	Lembaga/ Perusahaan Institution/ Company	Kegiatan Activity	No. Surat Number of Letter
1	7 Januari 2020 January 7, 2020	OJK & IDX	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Periode Desember 2019 Monthly Report on Securities Holder Registration for the Period of December 2019	001/NI-CORSEC/I/2020
2	8 Januari 2020 January 8, 2020	OJK & IDX	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II PT Nusantara Infrastructure Tbk per 31 Desember 2019 Submission of the Report on the Realization of Use of the Proceeds from the Limited Public Offering II of PT Nusantara Infrastructure Tbk as of December 31, 2019	002/NI-CORSEC/I/2020
3	10 Januari 2020 January 10, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Perubahan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode Desember Tahun 2019 Submission of Changes in Debt/Liability Data in Foreign Currencies for the Period of December 2019	003/NI-CORSEC/I/2020
4	27 Januari 2020 January 27, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Checklist Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 Tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik Submission of a Checklist for Compliance with the Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2015 concerning the Website of Issuers or Public Companies	004/NI-CORSEC/I/2020
5	5 Februari 2020 February 5, 2020	OJK & IDX	Laporan Informasi atau Fakta Material Information or Material Facts Report	005/NI-CORSEC/II/2020
6	10 Februari 2020 February 10, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Perubahan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode Januari 2020 Submission of Changes to Data on Debts/Liabilities in Foreign Currencies for the Period of January 2020	006/NI-CORSEC/II/2020
7	10 Februari 2020 February 10, 2020	OJK & SPE	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Periode Januari 2020 Monthly Report on Securities Holder Registration for the Period of January 2020	007/NI-CORSEC/II/2020
8	4 Maret 2020 March 4, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Penjelasan atas Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas Keterbukaan Informasi PT Nusantara Infrastructure Tbk Submission of Explanations on Responses from the Financial Services Authority on Information Disclosure of PT Nusantara Infrastructure Tbk	008/NI-CORSEC/III/2020
9	6 Maret 2020 March 6, 2020	IDX	Penjelasan Tanggapan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72 dan 73 Tahun 2020 Terhadap Laporan Keuangan Perseroan Explanation of Responses to the Implications of the Effectiveness of PSAK 71, 72 and 73 of 2020 on the Company's Financial Statements	009/NI-CORSEC/III/2020
10	10 Maret 2020 March 10, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Perubahan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode Februari 2020 Submission of Changes in Data on Debts/Liabilities in Foreign Currencies for the Period of February 2020	010/NI-CORSEC/III/2020

No.	Tanggal Date	Lembaga/ Perusahaan Institution/ Company	Kegiatan Activity	No. Surat Number of Letter
11	10 Maret 2020 March 10, 2020	OJK & SPE	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Periode Februari 2020 Monthly Report on Securities Holder Registration for the Period of February 2020	011/NI-CORSEC/III/2020
12	17 Maret 2020 March 17, 2020	OJK & SPE	Keterbukaan Informasi Mengenai Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang berfluktuasi Secara Signifikan Disclosure of Information Regarding the Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies in Market Conditions That Fluctuate Significantly	012/NI-CORSEC/III/2020
13	17 Maret 2020 March 17, 2020	OJK & SPE	Penunjukan PT Samuel Sekuritas Indonesia Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Oleh Perseroan Appointment of PT Samuel Sekuritas Indonesia in connection with the Company's Shares Buyback Plan	013/NI-CORSEC/III/2020
14	13 April 2020 April 13, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Perubahan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode Maret 2020 Submission of Changes to Data on Debts/Liabilities in Foreign Currencies for the Period of March 2020	014/NI-CORSEC/IV/2020
15	17 April 2020 April 17, 2020	OJK & IDX	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan (Diaudit) 31 Des 2019 Submission of Annual (Audited) Consolidated Financial Statements of Dec 31, 2019	015/NI-CORSEC/IV/2020
16	17 April 2020 April 17, 2020	OJK & IDX	Pemberitahuan Adanya Perubahan Total Aset dan Total Kewajiban pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2019 (Diaudit) Notification of Changes in Total Assets and Total Liabilities in the Consolidated Financial Statements for the Year Ended on December 31, 2019 (Audited)	016/NI-CORSEC/IV/2020
17	21 April 2020 April 21, 2020	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Ownership Report or Any Change in Ownership of Public Company Shares	017/NI-CORSEC/IV/2020
18	21 April 2020 April 21, 2020	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Ownership Report or Any Change in Ownership of Public Company Shares	018/NI-CORSEC/IV/2020
19	21 April 2020 April 21, 2020	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Ownership Report or Any Change in Ownership of Public Company Shares	019/NI-CORSEC/IV/2020
20	21 April 2020 April 21, 2020	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Ownership Report or Any Change in Ownership of Public Company Shares	020/NI-CORSEC/IV/2020
21	21 April 2020 April 21, 2020	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Ownership Report or Any Change in Ownership of Public Company Shares	021/NI-CORSEC/IV/2020

No.	Tanggal Date	Lembaga/ Perusahaan Institution/ Company	Kegiatan Activity	No. Surat Number of Letter
22	21 April 2020 April 21, 2020	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka / Ownership Report or Any Change in Ownership of Public Company Shares	022/NI-CORSEC/IV/2020
23	21 April 2020 April 21, 2020	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Ownership Report or Any Change in Ownership of Public Company Shares	023/NI-CORSEC/IV/2020
24	22 April 2020 April 22, 2020	OJK & IDX	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan 31 Des 2019 Submission of Advertisement Evidence of Annual Consolidated Financial Statements on Dec 31, 2019	024/NI-CORSEC/IV/2020
25	14 Mei 2020 May 14, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Perubahan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode April 2020 Submission of Changes to Data on Debts/Liabilities in Foreign Currencies for the Period of April 2020	025/NI-CORSEC/V/2020
26	15 Mei 2020 May 15, 2020	OJK & SPE	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Periode Maret 2020 Monthly Report on Securities Holder Registration for the Period of March 2020	026/NI-CORSEC/V/2020
27	15 Mei 2020 May 15, 2020	OJK & SPE	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Periode April 2020 Monthly Report on Securities Holder Registration for the Period of April 2020	027/NI-CORSEC/V/2020
28	29 Mei 2020 May 29, 2020	IDX	Penjelasan Tanggapan atas Dampak Pandemi Covid-19 Explanation of the Response to the Impact of the Covid-19 Pandemic	028/NI-CORSEC/V/2020
29	10 Juni 2020 June 10, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Perubahan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode Mei 2020 Submission of Changes to Data on Debts/Liabilities in Foreign Currencies for the Period of May 2020	029/NI-CORSEC/V/2020
30	12 Juni 2020 June 12, 2020	OJK & SPE	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Periode Mei 2020 Monthly Report on Securities Holder Registration for the Period of May 2020	030/NI-CORSEC/VI/2020
31	15 Juni 2020 June 15, 2020	IDX	Penjelasan Tanggapan atas Dampak Pandemi Covid-19 Periode Juni 2020 Explanation of the Response to the Impact of the Covid-19 Pandemic for the June 2020 Period	031/NI-CORSEC/VI/2020
32	18 Juni 2020 June 18, 2020	OJK & IDX	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2020 (Unaudited) Submission of Consolidated Interim Financial Statements for the Three Month Period Ended March 31, 2020 (Unaudited)	032/NI-CORSEC/VI/2020

No.	Tanggal Date	Lembaga/ Perusahaan Institution/ Company	Kegiatan Activity	No. Surat Number of Letter
33	18 Juni 2020 June 18, 2020	OJK & IDX	Pemberitahuan Adanya Perubahan Total Aset dan Total Kewajiban pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2019 (Diaudit) Notification of Changes in Total Assets and Total Liabilities in the Consolidated Financial Statements for the Year Ended December 31, 2019 (Audited)	033/NI-CORSEC/VI/2020
34	30 Juni 2020 June 30, 2020	OJK & IDX	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit PT Nusantara Infrastructure Tbk terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Report on the Evaluation Results of the Audit Committee of PT Nusantara Infrastructure Tbk on the Implementation of Providing Audit Services on Annual Historical Financial Information	034/NI-CORSEC/VI/2020
35	30 Juni 2020 June 30, 2020	OJK & IDX	Penyampaian Laporan Tahunan 2019 PT Nusantara Infrastructure Tbk Submission of the 2019 Annual Report of PT Nusantara Infrastructure Tbk	035/NI-CORSEC/VI/2020
36	6 Juli 2020 July 6, 2020	OJK, IDX, KSEI, Notaris, BAE OJK, IDX, KSEI, Notary, BAE	Pemberitahuan Agenda Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Notification of the Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders	036/NI-CORSEC/VII/2020
37	9 Juli 2020 July 9, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Perubahan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode Juni 2020 Submission of Changes in Data on Debts/Liabilities in Foreign Currencies for the Period of June 2020	037/NI-CORSEC/VII/2020
38	10 Juli 2020 July 10, 2020	OJK & SPE	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Periode Juni 2020 Monthly Report on Securities Holder Registration for the Period of June 2020	038/NI-CORSEC/VII/2020
39	13 Juli 2020 July 13, 2020	OJK, IDX, KSEI, Notaris, BAE OJK, IDX, KSEI, Notary, BAE	Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Announcement of the Plan for the Annual General Meeting of Shareholders	039/NI-CORSEC/VII/2020
40	13 Juli 2020 July 13, 2020	OJK, IDX, KSEI, Notaris, BAE OJK, IDX, KSEI, Notary, BAE	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Submission of Evidence of Announcement Advertisement of Annual General Meeting of Shareholders	040/NI-CORSEC/VII/2020
41	15 Juli 2020 July 15, 2020	OJK & IDX	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II PT Nusantara Infrastructure Tbk per 30 Juni 2020 Submission of the Report on the Realization of Use of the Proceeds from the Limited Public Offering II of PT Nusantara Infrastructure Tbk as of June 30, 2020	041/NI-CORSEC/VII/2020
42	15 Juli 2020 July 15, 2020	IDX	Penjelasan Tanggapan atas Dampak Pandemi Covid-19 Periode Juli 2020 Explanation of Responses to the Impact of the Covid-19 Pandemic for the July 2020 Period	042/NI-CORSEC/VII/2020

No.	Tanggal Date	Lembaga/ Perusahaan Institution/ Company	Kegiatan Activity	No. Surat Number of Letter
43	16 Juli 2020 July 16, 2020	KSEI	Surat Kuasa Penunjukan Pejabat Berwenang Power of Attorney for Appointment of Competent Officers	043/NI-CORSEC/VII/2020
44	28 Juli 2020 July 28, 2020	OJK, IDX, KSEI, Notaris, BAE OJK, IDX, KSEI, Notary, BAE	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Summons to the Annual General Meeting of Shareholders	044/NI-CORSEC/VII/2020
45	28 Juli 2020 July 28, 2020	OJK, IDX, KSEI, Notaris, BAE OJK, IDX, KSEI, Notary, BAE	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Submission of Advertisement Proof of Invitation for the Annual General Meeting of Shareholders	045/NI-CORSEC/VII/2020
46	30 Juli 2020 July 30, 2020	OJK & IDX	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2020 (Tidak Diaudit) Submission of Consolidated Interim Financial Statements for the Six Month Period Ended on June 30, 2020 (Unaudited)	046/NI-CORSEC/VII/2020
47	30 Juli 2020 July 30, 2020	OJK & IDX	Pemberitahuan Adanya Perubahan Total Aset dan Total Kewajiban pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir Pada 30 Juni 2020 (Tidak Diaudit) Notification of Changes in Total Assets and Total Liabilities in the Consolidated Financial Statements for the Year Ended on June 30, 2020 (Unaudited)	047/NI-CORSEC/VII/2020
48	30 Juli 2020 July 30, 2020	OJK & IDX	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim Submission of Advertisement Evidence of Interim Financial Report Information	048/NI-CORSEC/VII/2020
49	10 Agustus 2020 August 10, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Perubahan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode Juli 2020 Submission of Changes to Data on Debts/Liabilities in Foreign Currencies for the Period of July 2020	049/NI-CORSEC/VIII/2020
50	10 Agustus 2020 August 10, 2020	OJK & SPE	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Periode Juli 2020 Monthly Report on Securities Holder Registration for the Period of July 2020	050/NI-CORSEC/VIII/2020
51	14 Agustus 2020 August 14, 2020	KSEI	Penyampaian Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia / Submission of the Equity Securities Registration Agreement at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	051/NI-CORSEC/VIII/2020
52	15 Juli 2020 July 15, 2020	IDX	Penjelasan Tanggapan atas Dampak Pandemi Covid-19 Periode Agustus 2020 Explanation of Responses to the Impact of the Covid-19 Pandemic for the August 2020 Period	052/NI-CORSEC/VIII/2020



No.	Tanggal Date	Lembaga/ Perusahaan Institution/ Company	Kegiatan Activity	No. Surat Number of Letter
53	24 Agustus 2020 August 24, 2020	OJK, IDX, KSEI, Notaris, BAE OJK, IDX, KSEI, Notary, BAE	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Results of the Annual General Meeting of Shareholders	053/NI-CORSEC/ VIII/2020
54	24 Agustus 2020 August 24, 2020	OJK, IDX, KSEI, Notaris, BAE OJK, IDX, KSEI, Notary, BAE	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS Submission of Advertisement Evidence of Summary of GMS Minutes	054/NI-CORSEC/ VIII/2020
55	24 Agustus 2020 August 24, 2020	OJK, IDX, KSEI, Notaris, BAE OJK, IDX, KSEI, Notary, BAE	Informasi Perubahan Pengurus / Management Change Information	055/NI-CORSEC/ VIII/2020
56	10 September 2020 September 10, 2020	OJK & IDX	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Periode Agustus 2020 Monthly Report on Securities Holder Registration for the Period of August 2020	056/NI-CORSEC/IX/2020
57	10 September 2020 September 10, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Perubahan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode Agustus 2020 Submission of Changes to Data on Debts/Liabilities in Foreign Currencies for the Period of August 2020	057/NI-CORSEC/IX/2020
58	11 September 2020 / September 11, 2020	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja	Penunjukan Akuntan Publik Yang Akan Memberikan Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Nusantara Infrastructure Tbk Appointment of a Public Accountant Who Will Provide Audit Services for the Annual Historical Financial Information of PT Nusantara Infrastructure Tbk	058/NI-CORSEC/IX/2020
59	18 September 2020 September 18, 2020	OJK	Penyampaian Akta Risalah RUPS Tahunan Submission of the Minutes of the Annual GMS	059/NI-CORSEC/IX/2020
60	21 September 2020 September 21, 2020	IDX	Penyampaian Laporan Perusahaan Tercatat dalam Satu Grup Perusahaan Submission of Report on Listed Companies in One Company Group	059/NI-CORSEC/IX/2020
61	12 Oktober 2020 October 12, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Perubahan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode September 2020 Submission of Changes in Data on Debts/Liabilities in Foreign Currencies for the Period of September 2020	060/NI-CORSEC/X/2020

No.	Tanggal Date	Lembaga/ Perusahaan Institution/ Company	Kegiatan Activity	No. Surat Number of Letter
62	12 Oktober 2020 October 12, 2020	OJK & IDX	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Periode September 2020 Monthly Report on Securities Holder Registration for the Period of September 2020	061/NI-CORSEC/X/2020
63	20 Oktober 2020 October 20, 2020	PT Adimitra Jasa Korpora	Tanggapan atas Surat Permintaan Penyampaian Informasi Mengenai Pembelian Kembali Saham/Buyback Response to Request for Submission of Information Regarding Shares Buyback	062/NI-CORSEC/X/2020
64	23 Oktober 2020 October 23, 2020	IDX	Penyampaian Laporan Perusahaan Tercatat dalam Satu Grup Perusahaan (Pengkinian Data) Submission of Report on Listed Companies in One Group Company (Updating Data)	063/NI-CORSEC/X/2020
66	4 November 2020 November 4, 2020	OJK	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT Nusantara Infrastructure Tbk Report on the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the framework of an audit of the annual historical financial information at PT Nusantara Infrastructure Tbk	065/NI-CORSEC/XI/2020
67	12 Oktober 2020 October 12, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Perubahan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode Oktober 2020 Submission of Changes in Data on Debts/Liabilities in Foreign Currencies for the Period of October 2020	066/NI-CORSEC/XI/2020
68	6 November 2020 November 6, 2020	OJK	Penyampaian Penjelasan atas Penelahaan Laporan Tahunan 2019 Submission of Explanations on the Review of the 2019 Annual Report	067/NI-CORSEC/XI/2020
69	11 November 2020 November 11, 2020	OJK & IDX	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Periode Oktober 2020 Monthly Report on Securities Holder Registration for the Period of October 2020	068/NI-CORSEC/XI/2020
70	20 November 2020 November 20, 2020	OJK & IDX	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 September 2020 (Tidak Diaudit) Submission of Consolidated Interim Financial Statements for the Six Month Period Ended September 30, 2020 (Unaudited)	069/NI-CORSEC/XI/2020
71	20 November 2020 November 20, 2020	OJK & IDX	Pemberitahuan Adanya Perubahan Total Aset dan Total Kewajiban pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir Pada 30 September 2020 (Tidak Diaudit) Notification of Changes in Total Assets and Total Liabilities in the Consolidated Financial Statements for the Year Ended 30 September 2020 (Unaudited)	070/NI-CORSEC/XI/2020

No.	Tanggal Date	Lembaga/ Perusahaan Institution/ Company	Kegiatan Activity	No. Surat Number of Letter
72	20 November 2020 November 20, 2020	IDX	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek Explanation of the Volatility of Securities Transactions	071/NI-CORSEC/XI/2020
73	3 Desember 2020 December 3, 2020	Vendor Laporan Tahunan Annual Report Vendor	Undangan Pemilihan Vendor Pembuatan Laporan Tahunan 2020 Invitation to Selection of Vendor for 2020 Annual Report Preparation	072/NI-CORSEC/XII/2020
74	8 Desember 2020 December 8, 2020	IDX	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan Annual Public Expose Implementation Plan	073/NI-CORSEC/XII/2020
75	14 Desember 2020 December 14, 2020	OJK & SPE	Penyampaian Perubahan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode November 2020 Submission of Changes in Data on Debts/Liabilities in Foreign Currencies for the Period of November 2020	074/NI-CORSEC/XII/2020
76	14 Desember 2020 December 14, 2020	OJK & IDX	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Periode November 2020 Monthly Report on Securities Holder Registration for the Period of November 2020	075/NI-CORSEC/XII/2020
77	16 Desember 2020 December 16, 2020	OJK	Laporan Informasi atau Fakta Material Information or Material Facts Report	076/NI-CORSEC/XII/2020
78	16 Desember 2020 December 16, 2020	IDX	Jadwal Dividen Tunai Interim Interim Cash Dividend Schedule	077/NI-CORSEC/XII/2020
79	18 Desember 2020 December 18, 2020	OJK & IDX	Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pembagian Dividen Interim Tunai Submission of Evidence of Advertisements on the Schedule of Interim Cash Dividend Distribution	078/NI-CORSEC/XII/2020
80	18 Desember 2020 December 18, 2020	IDX	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan Submission of Annual Public Expose Materials	079/NI-CORSEC/XII/2020
81	30 Desember 2020 December 30, 2020	IDX	Laporan Public Expose Tahunan Annual Public Expose Report	083/NI-CORSEC/XII/2020

Situs Web Perusahaan

Perusahaan memiliki situs web sebagai media dan sarana penyampaian komunikasi dan informasi yang cepat, mudah diakses, serta efektif dan efisien. Situs web Perusahaan dapat diakses pada alamat www.nusantarainfrastructure.com dan memuat berbagai informasi penting terkait Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Sekilas Perusahaan, yang berisi penjelasan tentang Perusahaan, profil Dewan Komisaris dan Direksi, Visi, Misi dan Budaya Perusahaan, Struktur Grup Perusahaan.
2. Struktur Grup Perusahaan yang menggambarkan fokus bisnis Perusahaan di 4 (empat) sektor infrastruktur yaitu sektor jalan tol, energi terbarukan, air bersih, dan pelabuhan.
3. Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang menjelaskan tentang komitmen GCG Perusahaan, struktur GCG, Pedoman GCG, Piagam Komite Audit, Piagam Internal Audit, Pedoman HSE, dan sebagainya.
4. Ikhtisar Investor, yang memuat laporan-laporan berkala perusahaan, seperti Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. Program CSR, dengan nama kanal Nusantara Care, memuat informasi kegiatan CSR Perusahaan.
6. Grafik pergerakan saham META secara *live*.
7. Dan lain sebagainya.

Media Internal

Tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi kepada pihak eksternal, Perusahaan juga menaruh perhatian pada penyampaian informasi kepada pihak internal Perusahaan yang diwujudkan menggunakan media dalam bentuk *e-newsletter* bertajuk "Kabar Nusantara" atau KANU sebagai sarana penyampaian informasi terkait Perusahaan kepada seluruh individu Perusahaan secara luas. KANU dapat diakses secara *online* melalui <http://kanu.nusantarainfrastructure.com/> dan melalui penyebaran dengan *email* ke seluruh karyawan. KANU terbit sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau setiap 4 (empat) bulan sekali dengan memuat berbagai informasi Perusahaan, mulai dari aktivitas operasional, berita terkini, hingga sosialisasi kode etik dan budaya Perusahaan. Selain di dalam Perusahaan, majalah ini juga diedarkan di lingkungan entitas anak guna menciptakan hadirnya integrasi internal.

Company Website

The Company maintains a website as a medium and means of delivering communication and information that is fast, easily accessible, effective, and efficient. The Company's website can be accessed at the address www.nusantarainfrastructure.com, which contains various important information related to the Company in accordance with the rules and regulations, including:

1. Company Overview, which contains a description of the Company, profiles of the Board of Commissioners and the Board of Directors, Vision, Mission and Corporate Culture, Company Group Structure.
2. Corporate Group Structure that illustrates the Company's business focus in 4 (four) infrastructure sectors, namely the toll road, renewable energy, clean water and port sectors.
3. Good Corporate Governance that explains the Company's GCG commitments, GCG structure, GCG Guidelines, Audit Committee Charter, Internal Audit Charter, HSE Guidelines, and so on.
4. Investor Overview, which contains periodic company reports, such as Annual Reports and Financial Statements.
5. The CSR program, with the name Nusantara Care channel, contains information about the Company's CSR activities.
6. Live charts of META shares;
7. And others.

Internal Media

Other than focusing on delivering information to external parties, the Company also pays attention to the delivery of information to the Company's internal parties which is manifested by using media in the form of an e-newsletter titled "Kabar Nusantara" or KANU as a mean of conveying information related to the Company to all Company individuals extensively. KANU can be accessed online through <http://kanu.nusantarainfrastructure.com/> and email distribution to all employees. KANU is published 3 (three) times a year or once every 4 (four) months and contains various Company information, from operational activities, the latest news, to the socialization of the code of ethics and the Company's culture. Apart from within the Company, this magazine is also circulated within the subsidiaries in order to create an internal integration presence.

PAPARAN PUBLIK

Komitmen Perusahaan untuk mengimplementasikan transparansi informasi Perusahaan secara optimal diwujudkan melalui paparan publik atau *public expose* yang diselenggarakan secara berkala setiap tahun. Paparan publik atau *public expose* merupakan bentuk media komunikasi dengan para pemegang saham, pemangku kepentingan, calon investor, analis, perwakilan Anggota Bursa, hingga media yang dianggap penting dan mampu mendukung Perusahaan menyampaikan informasi secara luas dan merata.

Di tahun 2020, Perusahaan menyelenggarakan paparan publik pada tanggal 23 Desember 2020 secara virtual melalui Media Konferensi Video Zoom Webinar dan *streaming* di channel Youtube Perusahaan yang dihadiri oleh para pemegang saham, analis, sekuritas, media, dan tamu undangan dari unit bisnis Perusahaan dengan pokok agenda penyampaian informasi adalah:

- Perkembangan terkini terkait Perusahaan;
- Pembahasan sektor jalan tol, yakni *update* terkini dari proyek Jalan Tol Layang A.P. Pettarani;
- Pembahasan sektor energi terbarukan, yakni *update* terkini terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Lau Gunung di Sumatera Utara;
- Pencapaian dan penghargaan yang diraih oleh anak Perusahaan, salah satunya di ajang OPEXCON Award 2020;
- Performa Perusahaan (terutama kaitannya dengan situasi pandemi Covid-19);
- Tinjauan operasional Perusahaan;
- Tinjauan performa keuangan Perusahaan; dan
- Tinjauan laporan posisi keuangan.

HUBUNGAN MEDIA

Dalam rangka menghadirkan penyampaian informasi yang merata, luas, dan tepat sasaran, Perusahaan bekerja sama dengan media lokal dan nasional, berupa media cetak, televisi, media digital serta radio dan menjalin hubungan baik dengan seluruh media tersebut. Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah menyampaikan sebanyak 16 siaran pers dan melakukan 12 kegiatan hubungan media dengan rincian sebagai berikut:

PUBLIC EXPOSE

The Company's commitment to optimally implement transparency of Company information is manifested through public expose, which is held periodically every year. Public expose is a form of communication media with shareholders, stakeholders, potential investors, analysts, representatives of Exchange Members, and media deemed important and capable of supporting the Company to convey information widely and evenly.

In 2020, the Company held a public expose on December 23, 2020 virtually through the Media Video Conference Zoom Webinar and streaming on Youtube channel, attended by shareholders, analysts, securities, media, and invited guests from the Company's business units with the main agenda of information delivery, such as:

- The Company's latest development;
- Discussion on toll road sector, namely the latest update of A.P. Petarani Elevated Toll Road project;
- Discussion on renewable energy sector, namely the latest update on Lau Gunung Hydroelectric Power Plant (PLTA) project in North Sumatra;
- The subsidiaries' achievements and awards, one of which was during the OPEXCON Award 2020;
- The Company's performance (especially those related to Covid-19 pandemic);
- The Company's operational overview;
- The Company's financial performance overview; and
- Financial position report overview.

MEDIA RELATIONS

In order to provide an equitable, broad, and right-to-target information delivery, the Company cooperates with local and national media, in the form of print media, television, digital media and radio and maintains good relations with all of these media. Throughout 2020, the Company submitted 16 press releases and conducted 12 media relation activities with the following details:

Siaran Pers di Tahun 2020

Press Releases in 2020

No.	Judul / Title	Tanggal / Date
1.	Mulai 31 Januari 2020, Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 1 & 11 Resmi Terapkan Tarif Baru Starting From January 31, 2020, Ujung Pandang Toll Road Section 1 and 11 Will Officially Implement New Fare	27 Januari 2020 January 27, 2020
2.	Mulai 31 Januari 2020, Jalan Tol Ruas Pondok Aren-Serpong Akan Memberlakukan Penyesuaian Tarif Starting From January 31, 2020, Pondok Aren – Serpong Toll Road Will Implement Fare Adjustment	29 Januari 2020 January 29, 2020
3.	Dukung Percepat Infrastruktur Nasional, NI Tingkatkan Kontribusi Melalui Pembangunan Proyek Jakarta Outer Ring Road Elevated In Supporting the Acceleration of National Infrastructure, NI Improved Its Contribution Through the Construction of Elevated Jakarta Outer Ring Road Project	6 Februari 2020 February 6, 2020
4.	Tingkatkan Aset Jalan Tol & Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Dua Sektor Bisnis PT NI Tbk Siap Beroperasi di Tahun 2020 To Improve Toll Road & Mini Hydro Power Plant (PLTM) Assets, Two Business Sectors of PT NI Tbk Are Ready to Operate in 2020	18 Februari 2020 February 18, 2020
5.	PT NI Tbk Catatkan Pencapaian Kinerja dan Performa Bisnis Positif Sepanjang Tahun 2019 / PT NI Tbk Recorded Positive Performance and Business in 2019	April 2020 April 2020
6.	Tanggap Covid-19, PT Bintaro Serpong Damai (Tol BSD) dan Sari Roti Bagikan Sembako dan Ribuan Roti Kepada Masyarakat Sekitar / In Response to Covid-19, PT Bintaro Serpong Damai (BSD Toll) and Sari Roti Distributed Staple Foods and Thousands of Bread to Nearby Community	8 Mei 2020 May 8, 2020
7.	Proyek Jalan Tol Layang A.P. Pettarani Makassar Masuki Tahap Akhir Pemasangan Balok Jembatan A.P. Pettarani Makassar Elevated Toll Road Project Entered Final Stage With Bridge Beam Installation	17 Mei 2020 May 17, 2020
8.	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung Akan Perkuat Pasokan Listrik di Kabupaten Dairi & Kabupaten Karo Lau Gunung Hydro Power Plant (PLTA) Will Strengthen Electricity Supply at Dairi Regency and Karo Regency	17 Juni 2020 June 17, 2020
9.	Beri Kemudahan Para Pengguna Jalan, Manajemen Tol Makassar Terapkan Sistem Top Up UNIK Pertama di Jalan Tol Melalui Aplikasi Whatsapp Offering Convenience To Pedestrians, Makassar Toll Management Implemented the First UNIK Top-Up System at Toll Roads Through Whatsapp Application	24 Juli 2020 July 24, 2020
10.	Di Tengah Kondisi Pandemi Covid-19, PT Nusantara Infrastructure Tbk Mampu Pertahankan Pertumbuhan Pendapatan Pada Kuartal II 2020 Amidst the Covid-19 Pandemic, PT Nusantara Infrastructure Tbk Was Able to Maintain Revenue Growth in the Second Quarter of 2020	4 Agustus 2020 August 4, 2020
11.	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT NI Tbk Results of Annual Meeting of Shareholders (AGMS) PT NI Tbk	24 Agustus 2020 August 24, 2020
12.	Update Progress Proyek Pembangunan Jalan Tol A.P. Pettarani, Makassar Update on A.P. Pettarani Toll Road Construction Project, Makassar	9 September 2020 September 9, 2020
13.	Sambut Ikon Baru Kota Makassar: Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, Tahapan Menuju Solusi Kemacetan Kota Welcome, Makassar City's New Icon: A.P. Pettarani Elevated Toll Road, A Step Toward A Traffic Jam Solution	18 September 2020 September 18, 2020
14.	Dua Unit Bisnis PT NI Tbk Di Sektor Tol, Raih Silver Achievement Dalam Opexcon 2020 Two Business Units of PT NI Tbk In Toll Road Sector Received Silver Achievement in Opexcon 2020	25 November 2020 November 25, 2020

No.	Judul / Title	Tanggal / Date
15.	Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) PT NI Tbk (META) Resmi Beroperasi Renewable Energy Power Plant (EBT) PT NI Tbk (META) Officially Operated	17 Desember 2020 / December 17, 2020
16.	Paparan Publik: Partisipasi PT NI Tbk Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional Public Expose: PT NI Tbk's Participation In Supporting National Infrastructure Development	23 Desember 2020 December 23, 2020

Kegiatan Hubungan Media di Tahun 2020

Media Relations Activities in 2020

No.	Media Media	Aktivitas Activity	Tanggal Date	Detail Detail
1.	Media lokal Makassar dan nasional Makassar local media and national media	Konferensi Pers Penyesuaian Tarif Press Conference on Fare Adjustment	27 Januari 2020 January 27, 2020	Konferensi penyesuaian tarif pada Tol BMN-JTSE Conference on Fare Adjustment for BMN-JTSE Toll
2.	Media lokal Makassar Tangerang Selatan dan nasional Makassar local media, South Tangerang local media, and national media	Konferensi Pers Penyesuaian Tarif Press Conference on Fare Adjustment	29 Januari 2020 January 29, 2020	Konferensi penyesuaian tarif pada Tol BSD Conference on fare adjustment for BSD Toll
3.	Bisnis Indonesia	Interview Khusus Special Interview	5 Maret 2020 March 5, 2020	Update project dan pipeline bisnis NI jangka pendek, menengah dan panjang Update on NI's short-term, mid-term, and long-term project and business
4.	CNBC TV	Interview khusus dalam Program "Squawk Box" Special Interview in "Squawk Box" program	6 Maret 2020 March 6, 2020	Peluang investasi infrastruktur dalam kondisi ekonomi terkini Infrastructure investment opportunity in the latest economic condition
5.	Beritasatu TV	Media Visit "BeritaSatu Group" "BeritaSatu Group" Media Visit	11 Maret 2020 March 11, 2020	Kunjungan ke kantor BeritaSatu Group Visitation to BeritaSatu Group's office
6.	Beritasatu TV	Interview khusus dalam Program "Corporate Action" Special interview in "Corporate Action" Program	11 Maret 2020 March 11, 2020	Prospek dan strategi bisnis Perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan nasional The Company's prospects and business strategy in supporting the acceleration of national development
7.	Sonora Radio	Adlibs	7 Mei 2020 May 7, 2020	CSR Jalan Tol Peduli: Tanggap Covid bersama Sari Roti CSR Toll Road Care: Responding to Covid with Sari Roti
8.	Brava Radio	Adlibs	8 Mei 2020 May 8, 2020	CSR Jalan Tol Peduli: Tanggap Covid bersama Sari Roti CSR Toll Road Care: Responding to Covid with Sari Roti

No.	Media Media	Aktivitas Activity	Tanggal Date	Detail Detail
9.	Sonora Radio	Interview Khusus Special Interview	14 Mei 2020 May 14, 2020	Cara Perusahaan beradaptasi dalam menghadapi kehidupan Baru (<i>New Normal</i>) di tengah Pandemi Covid-19 How the Company adapts in facing new life (<i>New Normal</i>) amidst Covid-19 Pandemic
10.	CNBC TV	Interview khusus dalam Program " <i>Closing Bell</i> " Special interview in " <i>Closing Bell</i> " Program	17 Juni 2020 June 17, 2020	Investasi Infrastruktur dan dampak Covid-19 bagi Perusahaan Infrastructure investment and Covid-19 impact on the Company
11.	Media lokal Makassar dan nasional Makassar local media and national media	Media Briefing – Pettarani Update	18 September 2020 September 18, 2020	Paparan update terkini proyek Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, Makassar Meeting on the latest update on A.P. Pettarani Elevated Toll Road project, Makassar
12.	Media nasional National media	Public Expose	23 Desember 2020 December 23, 2020	Update kinerja dan pencapaian Perusahaan selama tahun 2020 Update on the Company's performance and achievement in 2020

AKSES PUBLIK, HUBUNGAN INVESTOR, DAN LAYANAN KONSUMEN

Perusahaan memfasilitasi akses komunikasi dua arah yang dapat dihubungi oleh seluruh pihak untuk memenuhi kebutuhan akses informasi publik, hubungan investor, serta layanan konsumen.

Hubungan Investor

Equity Tower 38th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9 Jakarta 12190, Indonesia
+62 21 515 0100
+62 21 515 1221
www.nusantarainfrastructure.com
information@nusantarainfrastructure.com

Sekretaris Perusahaan

Dahlia Evawani
+62 21 515 0100
+62 21 515 1221
corsec@nusantarainfrastructure.com

PUBLIC ACCESS, INVESTOR RELATIONS AND CUSTOMER SERVICES

The Company facilitates two-way communication access that can be contacted by all parties to meet the needs of access to public information, investor relations, and customer service.

Investor Relations

Equity Tower 38th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9 Jakarta 12190, Indonesia
+62 21 515 0100
+62 21 515 1221
www.nusantarainfrastructure.com
information@nusantarainfrastructure.com

Corporate Secretary

Dahlia Evawani
+62 21 515 0100
+62 21 515 1221
corsec@nusantarainfrastructure.com

MEDIA KOMUNIKASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Guna menjamin seluruh informasi Perusahaan dapat tersampaikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, Perusahaan memiliki beragam media untuk target sasaran yang berbeda.

COMMUNICATION MEDIA TO THE SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS

In order to ensure that all Company's information can be conveyed effectively, efficiently, and right on target, the Company has a variety of media for different targets.

Sasaran / Target	Media Komunikasi / Communication Media
Pemegang Saham Shareholders	Laporan Tahunan, RUPS, Paparan Publik, Hubungan Investor, situs web, seminar Annual Report, GMS, Public Expose, Investor Relations, the Company's official website, seminars
Lembaga Publik Public Institution	Situs web Perusahaan www.nusantarainfrastructure.com Company's official website www.nusantarainfrastructure.com
Karyawan Employees	Internal memo, email, majalah internal (KANU), situs web, pelatihan Internal memos, emails, internal magazines (KANU), web sites, training
Konsumen Consumers	Profil Perusahaan, email, situs web, media sosial Company Profile, email, website, social media
Perusahaan Pesaing Competitors	Pertemuan pemangku kepentingan, situs web, media sosial Stakeholder meeting, website, social media
Mitra Kerja dan Rekanan Partners and Suppliers	Profil Perusahaan, situs web, konferensi, media sosial Company Profile, website, conference, social media
Organisasi Profesi Professional Organization	<i>Analyst meeting</i> , pertemuan pemangku kepentingan, web dan media sosial Analyst meetings, stakeholder meetings, web sites and social media
Publik Pasar Modal Capital Market Public	Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Keterbukaan Informasi, Situs Web Perusahaan, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Situs Web Bursa Efek Indonesia (BEI) Annual Reports, Financial Statements, Information Disclosure Reports, Company Websites, Financial Services Authority (OJK) Websites and Indonesia Stock Exchange (IDX) Websites
Masyarakat/Umum General Public	Paparan Publik, situs web, media sosial Public Expose, website, social media



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



Seluruh kegiatan yang ada dalam program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di bawah naungan Nusantara Care dengan tiga pilar yakni Edukasi, Kesehatan, serta Lingkungan dan Komunitas dijalankan dengan berfokus pada langkah-langkah nyata Perusahaan untuk memberikan manfaat dan nilai tambah kepada seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas bisnis usaha Perusahaan.

All activities in the Company's Corporate Social Responsibility program are conducted under Nusantara Care with three pillars, namely Education, Health, as well as Environment and Community with focus on the Company's actions to provide benefits and added values to all parties involved, directly and indirectly, through business activities.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dengan posisinya sebagai sebuah badan usaha yang berfokus pada aspek pembangunan infrastruktur, Perusahaan memegang teguh komitmen untuk memastikan terselenggaranya keseimbangan pada aspek-aspek seperti lingkungan, masyarakat, serta proses bisnis yang dijalankan Perusahaan. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan secara nyata melalui penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang menysasar pada berbagai bidang seperti operasi yang wajar, Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan, ketenagakerjaan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), sosial kemasyarakatan, serta produk dan pelanggan.

Komitmen Perusahaan untuk menciptakan dan memelihara hubungan harmonis dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan tergambar dalam fokus Perusahaan

COMMITMENT AND POLICY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION

With its position as a business entity that focuses on the aspects of infrastructure development, the Company is committed to ensuring the exertion of balance in aspects such as the environment, society, and business processes carried out by the Company. This commitment is then manifested in a tangible way through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) program that targets various fields such as fair operations, human rights, environment, labor and Occupational Health and Safety (K3), social community, as well as products and customers.

The Company's commitment to create and maintain a harmonious relationship with its shareholders and stakeholders is illustrated by its CSR program. This focuses



Nusantara Care

Sebagai wujud komitmen Perusahaan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi ekonomi, sosial dan lingkungan pemangku kepentingan Perusahaan, Perusahaan melaksanakan program-program CSR dengan mengacu kepada ISO 26000.

To show the Company's commitment to the implementation of sustainable corporate social responsibility, programs that have positive impacts on economic, social and environmental aspects of the stakeholders, the Company implements CSR programs with reference to ISO 26000.

menyelenggarakan program CSR yang berorientasi pada dimensi bisnis dan ekonomi untuk mendukung pemenuhan keberlanjutan usaha Perusahaan serta dimensi sosial dan lingkungan sekitar untuk menunjang tercapainya pertumbuhan berkelanjutan bersama dengan para pemangku kepentingan. Hal tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Dimensi bisnis dengan fokus pada komitmen dan langkah perwujudan nilai tambah dan kepuasan dari pelanggan.
2. Dimensi sosial terkait sisi etika bisnis dan usaha serta pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan, sisi kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja, serta sisi sosial kemasyarakatan.
3. Dimensi lingkungan yang berorientasi pada komitmen untuk mengedepankan pemenuhan aspek kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup, terutama di sekitar wilayah operasional Perusahaan.

on social and environmental issues that help communities and foster sustainable growth. The program covers the following aspects:

1. The business dimension that focuses on added value and the customers' satisfaction.
2. The social dimension that focuses on business ethics and the implementation of Corporate Social Responsibility including employees' health, safety, and welfare and that of the local communities involved.
3. The environmental dimension, which is oriented towards the fulfillment of environmental sustainability and balance, especially near the Company's operational areas, and lastly.

4. Prinsip-prinsip GCG sebagai dasar pada pengelolaan pemangku kepentingan, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.
4. The GCG principles that are the basis for stakeholders' management regarding transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

KESEIMBANGAN BISNIS YANG BERKELANJUTAN SUSTAINABLE BUSINESS BALANCE

PEMEGANG SAHAM

Shareholder



Nusantara Care



Lingkungan
Environment



**Manajemen/
Karyawan**
**Management/
Employees**



**Pemangku
Kepentingan**
Stakeholder



Masyarakat
Community



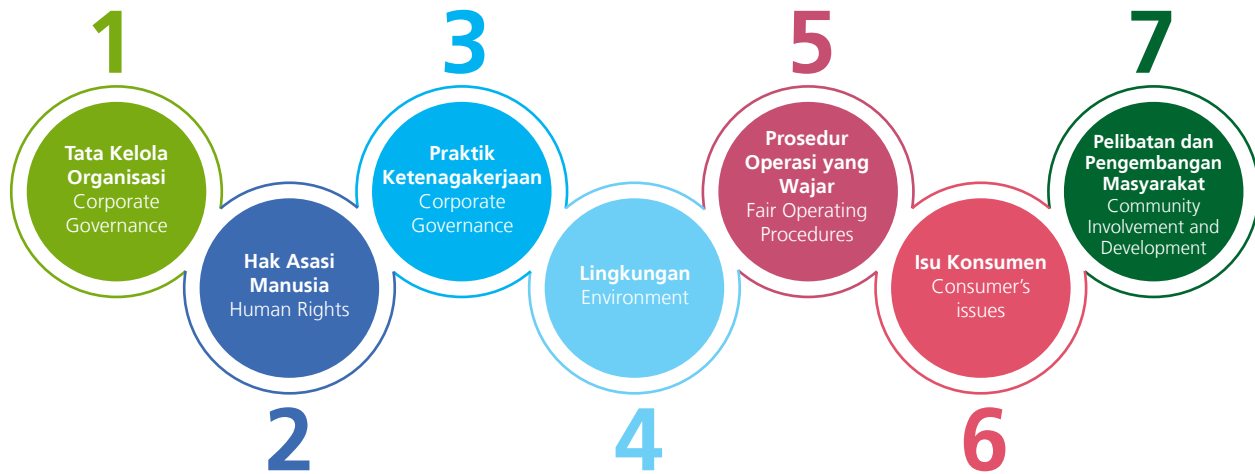
**Konsumen dan
Mitra Usaha**
**Customers &
Partners**

International Organization for Standardization (ISO) atau Organisasi Internasional untuk Standarisasi merupakan sebuah badan penetap standar industrial dan komersial dunia yang telah diakui oleh dunia dalam hal standarisasi. Pada November 2010, organisasi tersebut telah merilis ISO 26000 yang berisi tentang panduan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*). Meski ISO tersebut sifatnya hanya sekedar himbauan dan tidak wajib, ISO ini menjadi salah satu pedoman penting secara internasional bagi banyak pihak dalam mengembangkan dan melaksanakan program CSR di dalam sebuah organisasi. Penerapan ISO 26000 di Indonesia sendiri pada tahun 2010 telah diratifikasi oleh Pemerintah dan kemudian pada tahun 2012 dijadikan sebagai Standar Nasional (SNI).

The International Organization for Standardization (ISO) is a recognised world industrial and commercial standard-setting bureau. In November 2010, the organization released ISO26000, which contained Guidelines on Corporate Social Responsibility. Although ISO is just an appeal and is not mandatory, this ISO is an important international guideline for many parties in developing and implementing CSR programs within an organization. The implementation of ISO 26000 in Indonesia itself in 2010 was ratified by the Government and then in 2012 it became a National Standard (SNI).

SUBYEK INTI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERDASARKAN ISO 26000

CORE SUBJECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BASED ON ISO 26000



Sebagai wujud komitmen Perusahaan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi ekonomi, sosial dan lingkungan pemangku kepentingan Perusahaan, Perusahaan melaksanakan program-program CSR dengan mengacu kepada ISO 26000. Sementara itu, dalam lingkup pelaporan tahunan, implementasi program CSR yang dilakukan Perusahaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perusahaan memastikan hak-hak pemangku kepentingan senantiasa dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dengan mengutamakan pemberian informasi yang relevan, transparan, akurat, dan tepat waktu serta melalui mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika. Untuk kepentingan komunikasi dengan pemegang saham/investor, Perusahaan memiliki perangkat penghubung yaitu *Corporate Affairs* yang berperan sebagai penghubung dengan pihak internal dan eksternal Perusahaan. Fokus Perusahaan pada pelaksanaan program CSR secara optimal menjadi gambaran bahwa pemangku kepentingan merupakan pihak penting yang keberadaannya mendukung kelangsungan kegiatan Perusahaan.

To show the Company's commitment to the implementation of sustainable corporate social responsibility, programs that have positive impacts on economic, social and environmental aspects of the stakeholders, the Company implements CSR programs with reference to ISO 26000. Meanwhile, for the annual reporting, the implementation of CSR programs refers to the Financial Services Authority Regulation (OJK) No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies and OJK Circular No. 30/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

The Company ensures that the rights of stakeholders are respected, protected and fulfilled by providing the relevant, transparent, accurate and timely information and through healthy and ethical communication mechanisms. For the purpose of communication with the shareholders/investors, the Company has the Corporate Affairs unit, which acts as liaison with the internal and external parties. The Company's focus on the optimum implementation of its CSR program illustrates the importance of stakeholders in supporting the continuity of the Company's activities.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perusahaan telah memiliki Departemen HSE (*Health, Safety, and Environment*) yang secara resmi dibentuk pada tahun 2018 untuk menjadi pihak yang berperan besar dalam pemenuhan aspek-aspek terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan di seluruh aktivitas operasi Perusahaan sekaligus bertanggung jawab untuk memastikan di berbagai program CSR yang terselenggara di bawah Nusantara Care dapat terwujud sesuai harapan.

Departemen *Healthy, Safety, and Environment* (HSE)

Aspek HSE di dalam strategi pencapaian Visi dan Misi Perusahaan berada di posisi penting dan menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan bisnis Perusahaan dan umumnya berada di bawah unit bisnis dan proyek masing-masing. Melalui pembentukan departemen khusus yang mengelola penerapan HSE di seluruh lini bisnis, diharapkan dapat menunjang penerapan HSE secara lebih optimal dan dapat membantu menekan dampak buruk dan negatif yang ditimbulkan dari proses bisnis yang berisiko merusak lingkungan, sosial, hingga fisik melalui peninjauan, studi kelayakan, desain dasar, hingga pelaksanaan konstruksi dan operasi.

Departemen HSE bertanggung jawab mengawasi dan memastikan bahwa semua aktivitas Perusahaan sesuai dengan praktik terbaik HSE yang berlaku secara global. Divisi HSE memiliki tugas untuk mengoordinasikan, mengaudit, melatih, mendokumentasikan dan mengarsipkan kegiatan HSE di seluruh Unit Bisnis dan proyek-proyek yang tengah dilaksanakan. Setiap unit bisnis memiliki Komite HSE khusus yang melapor kepada Departemen HSE NI dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proyek dalam portofolionya, baik operasional, dalam konstruksi atau dalam tahap perencanaan, sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan pedoman HSE NI.

Semua proyek Perusahaan dan entitas anak langsung maupun tidak langsung diaudit secara internal oleh Departemen HSE sebagai bagian dari kepatuhan terhadap protokol HSE Grup yang ditetapkan dalam Manual Lingkungan.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES

The Company has a HSE (*Health, Safety, and Environment*) Department, officially established in 2018, as a party that plays a major role in fulfilling aspects related to health, safety and the environment in all of the Company's operational activities, as well as being responsible for ensuring that various CSR programs organized by Nusantara Care can be realized as expected.

Healthy, Safety, and Environment Department (HSE)

The HSE aspect, as part of the strategy to achieve the Company's Vision and Mission, is important and has become an integral part of all of the Company's business activities. HSE generally falls under the jurisdiction of the respective business units and their projects. By forming a special department that manages the implementation of HSE in all lines of business, it is expected that the department can support a more optimum implementation of HSE and help reduce the negative impacts on the social and physical environment arising from the Company's business activities. This is achieved through HSE audits and reviews conducted throughout the life-cycle of projects, from inception and pre-feasibility study, through to feasibility study, basic design, construction and operation.

The HSE Department is responsible for overseeing and ensuring that all activities are in line with HSE worldwide best practices. The HSE Department has the task to coordinate, audit, train, document and archive HSE activities in all Business Units and ongoing projects. Each business unit has a special HSE Committee that reports to the NI HSE Department and is responsible for ensuring that all projects in their portfolio, whether operational or under construction or still in the planning stages, are fully in compliance with NI's HSE principles and guidelines.

All projects under PT Nusantara Infrastructure Tbk and subsidiaries are directly or indirectly audited internally by HSE Department as part of compliance with Group HSE protocol set out in the Environmental Manual.

Pedoman HSE NI didasarkan pada hukum dan peraturan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan Pemerintah Indonesia serta pedoman HSE Bank Dunia, IFC (International Finance Corporation), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Selain itu, semua proyek yang berada di bawah Perusahaan dan entitas anak langsung dan tidak langsung diwajibkan mengikuti Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan Grup (SEMS) yang memerinci kebijakan, prosedur operasi, pengaturan kelembagaan, dan alur kerja yang akan diikuti untuk mengidentifikasi risiko sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari proyek-proyek yang terlibat, dan karenanya memastikan penghindaran, minimalisasi atau mitigasi risiko-risiko tersebut.

SEMS harus diikuti selama seluruh siklus proyek dari awal proyek, melalui penilaian, tender, penghargaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan dan penonaktifan.

Divisi HSE dipimpin oleh Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Hingga akhir 2020, Kepala Divisi HSE dijabat oleh Dr. D.E. Parry. Kepala Departemen HSE memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk protokol HSE di seluruh unit bisnis dan proyek Grup, dan telah menempatkan struktur manajemen dan pelaporan yang bergerak dari level Grup dan unit bisnis, hingga ke level proyek.

PROFIL KEPALA DIVISI HSE

Dr. D.E. Parry

Kepala Divisi HSE

Warga Negara Inggris, 78 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Kepala Divisi HSE pada tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan HRD. Meraih gelar *Diploma in Education* dari Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1966, gelar *Bachelor of Arts Honours (BA Hons) Geography* pada tahun 1965 dan *Master of Science (MSc)* bidang *Natural Resource Survei (Soil Science, Geomorphology and Ecology)* pada tahun 1968 dengan keduanya dari Universitas Sussex, Inggris, serta gelar *Doctor of Philosophy (PhD)* bidang

The NI HSE Guidelines are based on the Indonesian Government's health, safety and environmental laws and regulations as well as World Bank HSE guidelines, IFC (International Finance Corporation), Asian Development Bank and PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). In addition, all projects under PT Nusantara Infrastructure Tbk and its subsidiaries, directly and indirectly are required to follow the Group Social and Environmental Management System (SEMS) detailing policies, operating procedures, institutional arrangements, and workflows that must be followed to identify social and environmental risks that may arise from the projects, and therefore to ensure avoidance, minimization or mitigation of these risks.

The SEMS must be adhered throughout the entire project cycle from the beginning through assessment, tendering, awards, construction, operation, maintenance and deactivation.

HSE Department is headed by Head of Department who reports directly to the Directors. Up to the end of 2020, the HSE Department Head is Dr. D.E. Parry. The HSE Department Head has overall responsibility for HSE protocol in all Group projects and business units, and has setup a management and reporting structure from Group and business unit up to the project level.

PROFILE OF HSE DEPARTMENT HEAD

Dr. D.E. Parry

HSE Department Head

British citizen, 78 years old, and domiciled in Jakarta. He was appointed as HSE Department Head on July 1, 2019 pursuant to the HRD Decree. Received Diploma in Education degree from University of Oxford, England, in 1966, Bachelor of Arts Honours (BA Hons) Geography (1965) and Master of Science (MSc) in the Natural Resource Survey (Soil, Science, Geomorphology and Ecology) in 1968, both from the University of Sussex, England, and Doctor of Philosophy (PhD) degree in Remote Sensing (Satellite Imagery) and Natural

Remote Sensing (Satellite Imagery) and Natural Resources Evaluation dari Universitas Aston di Birmingham, Inggris pada tahun 1979 dan telah memiliki berbagai pengalaman kerja panjang yang dimulai dari ketika menjabat sebagai *Soil Scientist, Land-use Planner* di Dallol Maori Irrigation Project, Nigeria, Afrika pada tahun 1968 dan kini telah berpengalaman selama 52 tahun sebagai ahli lingkungan dan *soil scientist* di lingkungan tropis termasuk Afrika, Timur Tengah, Sub Benua India dan Asia Tenggara serta memiliki pengalaman hampir 45 tahun bekerja di sektor infrastruktur di Indonesia.

Bergabungnya Dr. David Emlyn Parry dengan Perusahaan di tahun 2013 mendorong terwujudnya peningkatan kualitas kinerja Perusahaan dengan keahliannya di bidang identifikasi proyek, perencanaan, dan pengembangan serta memiliki beragam pengalaman di berbagai sektor industri, antara lain seperti irigasi, pertanian, kehutanan, pengelolaan daerah aliran sungai, pengadaan air bersih, sanitasi, drainase perkotaan, perencanaan lalu lintas, hingga pengembangan sistem *mass rapid test*.

Nusantara Care

Nusantara Care memegang peranan sebagai media dan sarana penggerak yang memastikan bahwa seluruh program CSR telah berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang diharapkan kepada seluruh pihak terkait. Melalui Nusantara Care, Perusahaan mengintegrasikan berbagai program CSR yang dapat diterapkan secara berkesinambungan oleh Perusahaan sebagai entitas induk dan perusahaan lain sebagai entitas anak serta bermitra dengan lembaga pendidikan dan yayasan.

Program CSR Nusantara Care yang dijalankan Perusahaan berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan keselamatan, serta komunitas dan lingkungan.

1. Pilar Edukasi

Perusahaan menaruh perhatian besar pada aspek edukasi atau pendidikan karena perannya yang begitu besar untuk menjadi landasan penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas guna mendukung terwujudnya pembangunan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan melakukan implementasi pilar edukasi melalui program "Nusantara Mengajar" yang menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Program ini menjadi wujud nyata komitmen Perusahaan dalam mendukung hadirnya kecerdasan bangsa dan pendidikan di Indonesia yang lebih berkualitas.

Resources Evaluation from Aston University in Birmingham, England, in 1979. He has extensive working experiences where he began as a Soil Scientist and Land-use Planner on the Dallol Maori Irrigation Project, Niger, Africa, in 1968, and currently has 52 years experiences as environmentalist and soil scientist in tropical environment and soil scientist in tropical environments including Africa, Middle East, Indian Sub-Continent and Southeast Asia, including 45 years of experience in Indonesia in all infrastructure sectors.

When Dr. David Emlyn Parry joined the Company in 2013, his expertise in project identification, project planning and development plus his experiences in various industrial sectors, including irrigation, agriculture, forestry, watershed management, water supply, clean, sanitation, urban drainage, traffic planning, to the development of a mass rapid transit system helped improve the quality of the Company's performance with

Nusantara Care

Nusantara Care is the medium and driving force that ensures the Company's CSR programs bring benefits to all related parties. Through Nusantara Care, the Company integrates various CSR programs that can be applied by itself as the parent entity and by other companies as subsidiaries and partners with various educational institutions and foundations.

The Nusantara Care program includes 3 (three) pillars, namely education, health and safety, and the community and the environment.

1. Education Pillar

The Company pays great attention to education, as it has a major role in laying the foundation for nurturing qualified human resources. To that end, through "Nusantara Mengajar" program, the Company implements the education pillar as part of its Corporate Social Responsibility program. This program is a part of its contribution and concrete participation for the advancement of education in Indonesia.

2. Pilar Kesehatan

Kesehatan karyawan dan masyarakat, terutama yang berada di sekitar wilayah Perusahaan, turut menjadi fokus Perusahaan di dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perwujudan pilar kesehatan ini dilakukan melalui penyelenggaraan asuransi kesehatan dan seminar kesehatan di seluruh sektor bisnis. Dengan adanya program yang berorientasi pada pilar ini, Perusahaan turut berpartisipasi pada upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan karyawan Perusahaan.

3. Pilar Lingkungan dan Komunitas

Dalam pilar ini, Perusahaan mengedepankan upaya-upaya nyata pada pengembangan aspek sosial serta lingkungan, terutama yang ada di sekitar area lingkungan operasional Perusahaan dan entitas anak. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah aktivitas pemberian bantuan berupa donasi serta aktivitas pengelolaan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. Melalui aktivitas-aktivitas yang ada tersebut, Perusahaan menjalankan komitmennya untuk terus memberikan dampak positif serta nilai tambah melalui keberadaannya di tengah masyarakat dan lingkungan.

Guna memastikan pelaksanaan aktivitas dan program di dalam ketiga pilar tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, disusun dan diterapkan strategi pengembangan yang telah terintegrasi melalui program Nusantara Care, meliputi:

1. Berdampak

Menghadirkan dampak secara langsung kepada masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar wilayah Perusahaan dengan meningkatnya kualitas kesejahteraan hidup masyarakat.

2. Terfokus

Berkomitmen tinggi untuk berfokus pada aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, lingkungan sosial, dan penanggulangan bencana alam.

3. Berkelanjutan

Secara konsisten terus menjalankan program dan memastikan adanya pengembangan dan peningkatan kualitas sehingga dapat terlaksana lebih baik di masa depan.

2. Health Pillar

The health of the employees and the communities, especially those in the vicinity of the Company's projects, are also the Company's focus in implementing the Corporate Social Responsibility program. The health pillar is realized in all business sectors through the provision of health insurance and health seminars. The existence of this pillar is expected to enhance the health of employees and the Indonesian community at large.

3. Community Pillar

Through this pillar, the Company focuses on the development of social and environmental aspects, especially those around the operational areas of the Company and its subsidiaries. These efforts include providing assistance in the form of donations and activities to manage and maintain environmental sustainability. Through these activities, the Company carries out its commitment to provide positive impacts and added values through its presence in the community and the environment.

To ensure that the implementation of activities and programs within the three pillars has been running well and as expected, an integrated development strategy was planned and implemented through Nusantara Care program, namely:

1. Impactful

To directly affect the communities around the operational areas in terms of enhancing their quality of life.

2. Focused

Highly committed to focusing on the areas of education, health, community welfare, social environment, and natural disaster relief.

3. Sustainable

Upholding existing programs consistently and continuously develop for future enhancement.

4. Kemitraan

Membangun kerja sama yang baik dan memelihara hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya pemerintah, karyawan, hingga organisasi lainnya yang memiliki kaitan dengan Perusahaan.

4. Partnership

Establishing partnerships and maintaining relationship with all the Company's stakeholders, including government, employees, and other organizations related to the Company.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan oleh Perusahaan dengan senantiasa mematuhi berbagai peraturan dan regulasi terkait sebagai dasar hukumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pasal 15 huruf B Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
8. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
9. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
10. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

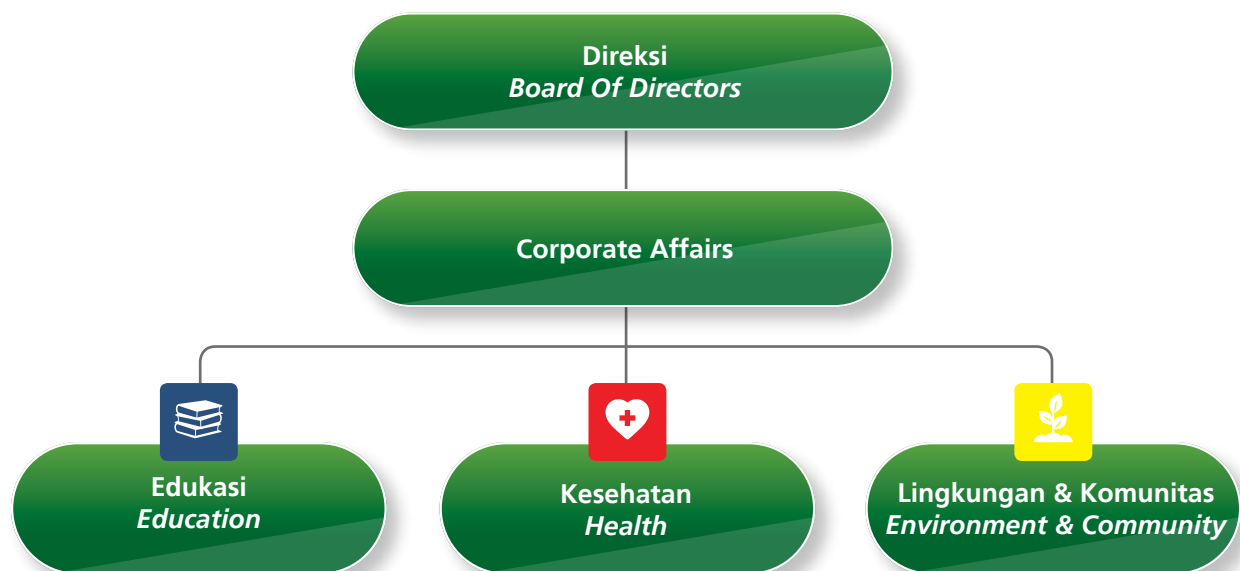
LEGAL BASIS OF THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The implementation of the Company's CSR is conducted pursuant to the rules and regulations as its legal basis, including:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Article 15 letter B of Law No. 25 of 2007 on Investment;
3. Government Regulation No. 47 of 2012 on Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
4. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management;
5. Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permit;
6. Law No. 13 of 2003 on Manpower;
7. Law No. 23 of 1992 on Health;
8. Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety;
9. Law No. 24 of 2011 on Social Security Agency;
10. Government Regulation No. 50 of 2012 on the Implementation of the Occupational Health and Safety Management System; and
11. Regulation of the Minister of Public Works No. 16/PRT/M/2014 on Minimum Standard of Toll Road Services.

PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

MANAGER OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi tugas dan tanggung jawab dari Divisi *Corporate Affairs*. Divisi tersebut menjadi pihak yang menjalankan pengelolaan pada pelaksanaan program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan seluruh kinerja dipertanggung jawabkan secara langsung kepada Direksi.

The Company's Corporate Social Responsibility program is the duty and responsibility of the Corporate Affairs Division. The division manages the implementation of the Company's CSR programs and reports their performance directly to the Directors.

Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki Divisi *Corporate Affairs* sebagai pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

The duties and responsibilities of Corporate Affairs Division as CSR manager are as follows:

1. Melakukan pengembangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta mengimplementasikan strategi-strateginya;
2. Menciptakan dan menjaga hubungan baik dengan para mitra untuk mengikuti program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
3. Menyusun dan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang kredibel;
4. Membangun hubungan kemitraan dengan mitra yang dipandang potensial untuk memperoleh lebih banyak paparan serta manfaat dan dampak yang lebih luas kepada masyarakat; dan
5. Menjalankan pemantauan dan mengkaji program CSR yang telah dilaksanakan oleh semua unit bisnis strategis.

1. Develop and oversee the implementation of CSR strategies.
2. Establish relationships with business partners to participate in Corporate Social Responsibility programs;
3. Starting and building a credible Corporate Social Responsibility program;
4. Develop partnerships with potential partners to get more exposure and a wider impact to the community;
5. Oversee and monitor CSR programs implemented by all strategic business units.

FOKUS KEGIATAN DAN BIAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Seluruh kegiatan yang ada dalam program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dijalankan dengan berfokus pada langkah-langkah nyata Perusahaan untuk memberikan manfaat dan nilai tambah kepada seluruh pihak sekitar Perusahaan yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas bisnis usaha Perusahaan. Melalui Nusantara Care, Perusahaan bersama seluruh entitas anak mewujudkan nyatakan fokus tersebut dengan menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang tepat, sesuai, dan berdampak positif.

Guna menghasilkan program yang berdampak positif tersebut, Perusahaan senantiasa memastikan adanya dukungan dana yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program sehingga dapat terselenggara sesuai rencana dan harapan. Setiap tahun, Perusahaan telah mengalokasikan dana untuk program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan pada tahun 2020 dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp607.594.049.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG WAJAR

Operasi yang adil atau wajar sebagaimana termuat dalam ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial memiliki definisi sebagai praktik yang mencakup: anti korupsi, keterlibatan yang bertanggung jawab dalam politik, kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok (*supply chain*), serta penghargaan atas *property rights*.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Operasi yang Wajar

Di dalam seluruh pelaksanaan aktivitas usaha, Perusahaan telah memastikan terdapat adanya penerapan operasi yang wajar, termasuk yakni adanya komitmen untuk menjunjung tinggi anti korupsi di seluruh kegiatan operasional, serta adanya larangan bagi seluruh karyawan Perusahaan untuk terlibat dalam hal politik dengan mengatasnamakan Perusahaan.

FOCUS OF ACTIVITIES AND FEES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

All activities in the Company's Corporate Social Responsibility program are conducted with focus on the Company's actions to provide benefits and added values to all parties involved, directly and indirectly, through business activities. With Nusantara Care, the Company and its subsidiaries realize their focus by conducting proper, on-point program and activities with positive impact.

In order to realize such program, the Company continuously ensures appropriate financial support to support its proper, on-time implementation. Every year, the Company allocates funds for Corporate Social Responsibility program. In 2020, the allocated funds amounted to Rp607,594,049.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES RELATED TO FAIR OPERATIONS

Fair operations, as stated in ISO 26000 on Social Responsibility Guidelines, is defined as practices that include: anticorruption; responsible involvement in politics; fair competition; promotion of social responsibility in the supply chain; and respect for property rights.

Social Responsibility Policy related to Fair Operation

In the implementation of business activities, the Company ensures fair operations, including the commitment to uphold anticorruption in all operational activities, as well as the prohibiting all Company employees from being involved in political matters on behalf of the Company.

Selain itu, komitmen tersebut turut diterapkan Perusahaan melalui adanya Etika dan Norma Perilaku PT Nusantara Infrastructure Tbk yang termuat dalam Manual GCG Perusahaan. Di dalam Etika dan Norma Perilaku tersebut, Perusahaan memberi penegasan pada seluruh karyawan untuk selalu menjunjung tinggi dan mengimplementasikan kejujuran, kedisiplinan, kegesitan, serta keterampilan dan pengetahuan yang memadai di dalam seluruh pelaksanaan fungsi dan perannya di Perusahaan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Perusahaan. Seluruh karyawan juga diharapkan secara tegas menolak seluruh perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme karena dampak buruknya terhadap perkembangan Perusahaan secara keseluruhan.

Kode Etik Bisnis mengatur hal-hal seperti:

1. Kepatuhan terhadap hukum;
2. Beradaptasi secara gesit dan unggul terhadap perubahan lingkungan;
3. Menjaga kerahasiaan informasi;
4. Benturan kepentingan;
5. Pernyataan palsu;
6. Perlindungan terhadap privasi individu;
7. Pengembangan masyarakat lingkungan;
8. Hubungan dengan pegawai dan pejabat pemerintah;
9. Hadiah;
10. Donasi; dan
11. Keterlibatan dalam kegiatan politik.

Pelaksanaan Inisiatif CSR di Bidang Operasi yang Wajar

Perusahaan mengedepankan fokusnya pada isu yang berkaitan dengan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang di dalamnya mencakup praktik pungutan liar, pemerasan, dan tindakan merugikan lainnya di dalam penyelenggaraan bisnisnya sebagai sebuah badan usaha.

Di dalam pelaksanaan proses operasional bisnis sehari-hari, Perusahaan memastikan tidak melibatkan adanya praktik KKN dan praktik sejenisnya yang merugikan di dalamnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan *Whistleblowing System* (WBS) secara optimal ke seluruh

Furthermore, the Company enforces such commitment through the Ethics and Code of Conduct of PT Nusantara Infrastructure Tbk which is explained in the Company's GCG Manual. In the Ethics and Code of Conduct, the Company emphasizes that all employees are expected to show honesty, discipline, agility, and apply all skills and knowledge for the Company's growth and development. All Employees are also expected to firmly reject all behaviors of Corruption, Collusion and Nepotism because they are against the law and will greatly harm the Company's growth

The Business Code of Ethics regulates, among others:

1. Compliance with the law;
2. Adapting in an agile and competitive way against environmental changes;
3. Maintaining confidentiality of information;
4. Conflict of interest;
5. False statements;
6. Protection of individual privacy;
7. Development of environmental communities;
8. Relationships with employees and government officials;
9. Gifts;
10. Donations; and
11. Involvement in political activities;

Implementation of CSR Initiatives in the Field of Fair Operations

The Company prioritizes its focus on issues related to anticorruption, collusion, and nepotism, including the practice of extortion and other harmful activities in its business implementation as a company.

In conducting daily business operations, the Company ensures that corruption, collusion, nepotism, and similar practices are not present during activity. One of the efforts taken is the implementation of Whistleblowing System (WBS) in all lines as a mean for all Company's individuals

ini sebagai sebuah sarana bagi seluruh individu Perusahaan untuk menyampaikan laporan terkait dugaan tindakan kecurangan hingga pelanggaran pada hukum dan etika yang dilakukan oleh individu lain di dalam Perusahaan.

Perusahaan juga melakukan langkah antisipasi di dalam proses pengadaan barang dan jasa yang memiliki potensi adanya kecurangan, yakni melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui tahapan yang berjenjang, yaitu: *Business Unit -> Strategic Business Unit -> Holding Company*. Mekanisme ini dilakukan oleh komite tender yang terdiri dari beberapa perwakilan departemen, antara lain, *Procurement, Technical & Maintenance, Finance & Corporate Legal/ Human Resource* untuk nominal tertentu sesuai dengan skala prioritas dan beberapa kebutuhan khusus;
2. Mekanisme pengawasan atas penerimaan barang/jasa melalui tahapan verifikasi oleh beberapa departemen terkait, seperti: *User-Procurement- Accounting & Finance*; dan
3. Mekanisme audit yang dilakukan berlapis oleh auditor internal *Holding Company* dan auditor eksternal yang independen.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Menurut ISO 26000, aspek tanggung jawab sosial terkait pemenuhan hak asasi manusia didefinisikan memiliki cakupan pada hal-hal seperti non-diskriminasi dan perhatian pada kelompok rentan; menghindari kerumitan; hak-hak sipil dan politik; hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; serta hak-hak dasar pekerja.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Perusahaan di dalam menjalankan proses bisnisnya senantiasa berkomitmen tinggi untuk menjunjung dan memegang teguh pada prinsip untuk menegakkan hak asasi manusia dengan memberi perlakuan yang sama dan setara kepada seluruh individu dan tidak membedakan berdasarkan latar belakang seperti jenis kelamin, suku, agama, ras, warna kulit, usia, keadaan fisik, hingga keyakinan dan agama.

to submit reports regarding suspected acts of fraud to violations of law and ethics committed by other individuals in the Company.

The Company also takes anticipatory steps in procuring goods and services which have the potential to be fraudulent, namely through the following mechanisms:

1. The mechanism for procurement of goods and services through stages, namely: *Business Unit -> Strategic Business Unit -> Holding Company*. This mechanism is carried out by a tender committee consisting of several department representatives, including *Procurement, Technical & Maintenance, Finance & Corporate Legal/ Human Resources* for a certain nominal according to priority scale and some special needs;
2. Supervision mechanism for the receipt of goods/services through the verification phase by several related departments, such as: *User – Procurement - Accounting & Finance*.
3. The audit mechanism is carried out in layers by the *Holding Company* internal auditors and independent external auditors.

SOCIAL RESPONSIBILITIES RELATED TO FULFILLING HUMAN RIGHTS

According to ISO 26000, the social responsibility related to human rights include non-discrimination and attention to vulnerable groups; avoiding hassle; civil and political rights; economic, social, and cultural rights; and the basic rights of workers.

Corporate Social Responsibility Regarding the Fulfillment of Human Rights

In conducting its business, the Company continuously commits to upholding the principles of human rights through equal treatment to all individuals and zero discrimination based on backgrounds such as gender, ethnicity, race, skin color, age, physical condition, beliefs, and religions.

Perusahaan juga menindak tegas dan melarang dengan keras adanya praktik intimidasi atau pelecehan dalam bentuk apa pun di lingkungan kerja, dan untuk menekan terjadinya praktik tersebut, Perusahaan telah menyediakan sarana dan media bagi seluruh individu Perusahaan untuk menyampaikan pelaporan pengaduan terkait dugaan intimidasi maupun pelecehan yang mereka saksikan atau mereka alami.

Perusahaan memastikan lingkungan kerja telah terbangun dengan baik dan kondusif serta nyaman dan aman bagi seluruh karyawan. Hal tersebut diwujudkan salah satunya melalui komitmen Perusahaan untuk mendorong terciptanya keberagaman, persatuan, serta hubungan harmonis yang saling menghargai satu sama lain, sehingga dapat mendukung Perusahaan menjadi sebuah badan usaha yang terus tumbuh berkelanjutan dengan memenuhi prinsip korporasi yang sehat. Selain itu, Perusahaan juga berupaya untuk menciptakan suasana inklusivitas yang dapat menunjang seluruh individu Perusahaan untuk turut berkontribusi secara aktif dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan dengan menyampaikan berbagai ide serta pendapat.

Upaya untuk menghadirkan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi seluruh individu juga tidak hanya menjadi kewajiban Perusahaan, namun juga menjadi hal yang wajib diupayakan oleh seluruh karyawan. Perusahaan mendorong seluruh individu Perusahaan untuk turut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kewajiban di dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang berlaku serta melarang dengan tegas adanya pelanggaran pada Hak Asasi Manusia dalam bentuk apa pun.

Berangkat dari hal-hal tersebut, Perusahaan mewajibkan seluruh karyawan untuk:

1. Menghormati, menghargai, dan membangun hubungan harmonis yang saling percaya dengan sesama rekan kerja;
2. Menghindari keterlibatan pada percakapan dan aktivitas yang dapat menyinggung perasaan orang lain; dan
3. Menjalin jaringan yang kolaboratif dengan seluruh individu untuk mempromosikan semangat tim dan inklusivitas.

The Company takes firm action and strictly prohibits any form of intimidation or harassment in the work environment. To prevent these practices, the Company provides facilities and media for all Company individuals to report complaints related to allegations of intimidation or harassment that they witness or experience.

The Company ensures that its work environment is conducive, comfortable and safe for all employees. The Company's is committed to encourage diversity, unity, and the development of harmonious relationships based on respect. By so doing, the Company will continue to grow sustainably. In addition, the Company also strives to create an atmosphere of inclusiveness that can support all the Company's individuals to actively contribute and support business growth by conveying various ideas and opinions.

The Company encourages all individuals to participate in upholding human rights and obligations in the process of carrying out their duties and responsibilities in accordance with applicable law and strictly prohibits violations of human rights in any form.

Based on the factors above, the Company encourages all employees to:

1. Respect, appreciate, and build a relationship based on trust with their colleagues;
2. Avoid any discussion and activity that may hurt other employee's feeling; and
3. Build collaborative network with all individuals to promote team spirit and inclusiveness.

ISU-ISU HAM YANG BERKAITAN DAN RELEVAN DENGAN PROSES BISNIS PERUSAHAAN

Kesetaraan Gender

Perusahaan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan tidak melakukan praktik-praktik yang mengarah pada diskriminasi. Perusahaan menerapkan komitmennya untuk menjaga proses operasional yang sehat dengan memegang teguh semangat kesetaraan gender yang dilakukan melalui pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan (*gender equity and equality*) untuk memperoleh pekerjaan di Perusahaan dengan tetap memastikan individu tersebut telah memenuhi persyaratan.

Selain pada proses tersebut, prinsip kesetaraan gender juga diterapkan dalam proses pengembangan karier struktural, operasional, maupun fungsional bahkan tidak menutup kemungkinan untuk sampai ke jenjang tertinggi dalam struktur organisasi.

Kesempatan Kerja

Pemenuhan Hak Asasi Manusia juga diwujudkan dalam proses rekrutmen karyawan baru yang dilaksanakan dengan adil, setara, transparan, dan non diskriminasi dengan tidak membedakan calon karyawan berdasarkan latar belakang seperti suku, agama, ras, antar golongan, serta tingkatan sosial.

Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

Perusahaan mengutamakan kesejahteraan karyawan dengan menjadikan aspek tersebut sebagai bagian dari fokus utama Perusahaan dalam pengelolaan SDM Perusahaan sekaligus upaya mengedepankan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut menjadi penting karena adanya kesejahteraan yang memadai dapat mendukung tercapainya motivasi dan kinerja kerja yang optimal. Selain itu, aspek kesejahteraan karyawan juga dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam diri karyawan dan keluarganya.

Berangkat dari hal tersebut, Perusahaan memenuhi hak karyawan untuk memiliki kesejahteraan yang baik dan berkualitas dengan memberikan remunerasi yakni imbalan kerja berupa gaji dan tunjangan termasuk di dalamnya adalah imbalan pasca kerja serta program kesehatan karyawan.

HUMAN RIGHTS ISSUES RELATED TO ACTIVITIES OR RELEVANT TO THE COMPANY'S BUSINESS

Gender Equality

The Company supports Human Rights by avoiding practices that lead to discrimination. The Company commits to maintaining healthy operational process by upholding the spirit of gender equality, realized by providing equal opportunity for women (*gender equity and equality*) to work at the Company, ensuring that the individuals meet all of the requirements.

In addition to the process above, the gender equality principle is also implemented in the structural, operational and functional career development, even up to the highest level in the organizational structure.

Employment Opportunity

The fulfillment of Human Rights is also realized in the employee recruitment process, which is conducted in a fair, equal, transparent, and non-discriminative manner, regardless of the prospective employee's background, such as ethnicity, religion, race, group and social level.

Employee Remuneration and Welfare

The Company prioritizes the employees' welfare by including the aspect as part of the Company's main focus in human resources management and putting human rights forward. This aspect becomes important as sufficient welfare can support the achievement of optimum motivation and performance. In addition, employee welfare is required to create safety and comfort for the employees and their families.

Based on such factors, the Company, fulfils the employees' rights to have proper, quality welfare by giving remuneration, namely benefits in the form of salaries and benefits, including post-employment benefits and an employee health program.

Perusahaan senantiasa memastikan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam aspek pemenuhan hak karyawan, termasuk salah satunya memberikan remunerasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besaran jumlah remunerasi tersebut dipastikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang ditetapkan dan berlaku di area operasional Perusahaan.

Jaminan Kesehatan Karyawan

Hak karyawan untuk memperoleh kesehatan yang optimal turut menjadi fokus Perusahaan di dalam pemenuhan aspek Hak Asasi Manusia yang kemudian dihadirkan melalui pemberian jaminan kesehatan dengan mengikutsertakan karyawan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun; serta Asuransi Bumida berupa Jaminan Sosial Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja.

Selain program jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asuransi Bumida, Perusahaan juga memberikan sarana penggantian biaya atau klaim pengobatan. Program kesehatan BPJS Kesehatan dan pengobatan di luar BPJS Kesehatan yang diberikan Perusahaan mencakup rawat jalan, rawat inap, *Medical Check Up* (MCU), kacamata, dan fasilitas olah raga bagi karyawan.

Seluruh program fasilitas kesehatan tersebut diberikan oleh Perusahaan dengan tujuan untuk menunjang peningkatan kualitas kesehatan secara khusus dan kesejahteraan secara umum dari seluruh karyawan, sehingga dapat berdampak pula pada peningkatan motivasi karyawan dalam bekerja yang kemudian secara langsung mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan di Perusahaan.

Di beberapa entitas anak, di samping memberikan BPJS Ketenagakerjaan, turut disediakan pula program asuransi bagi para karyawannya. Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan dan entitas anak telah memberikan jaminan kesehatan dengan nominal mencapai sebesar Rp5,54 miliar, lebih kecil dari biaya tahun 2019 sebesar Rp5,86 miliar.

The Company ensures its compliance with all applicable regulations in fulfilling the employees' rights, such as providing remuneration based on the applicable provisions. The amount of remuneration has been adjusted with the applicable provisions and is well above the Minimum Wage standard applicable in the Company's operational area.

Employee Health Insurance

The employees' rights for prime health is also part of the Company's focus in fulfilling Human Rights' aspect, presented in the granting of health insurance by registering employees to the Social Security Organizing Agency (BPJS) program, Old Age Insurance, Work Accident Insurance, Death Insurance, and Pension Insurance; and Social Security for Work Relationships Outside Working Hours provided through Bumida Insurance.

Apart from the BPJS Health, BPJS Employment and Bumida Insurance programs, the Company also provides reimbursement for medical claims. BPJS health programs, health and medication outside BPJS Health that are provided by the Company include outpatient care, inpatient care, Medical Check-up (MCU), eyeglasses, and sports facilities for employees.

The health facility programs are provided by the Company with the aim of supporting the improvement of health quality in particular and general welfare of all employees, which in turn will increase the employees' motivation to work and directly affect their productivity level in the Company.

In several subsidiaries, in addition to providing health insurance through BPJS, the Company also provides a health insurance program. By the end of 2020, health insurance provided by the Company and its subsidiaries reached Rp5.54 billion, a lower number from the costs in 2019 amounting to Rp5.86 billion.

Jumlah klaim selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The amount of claim in the last 5 (five) years is as follows:

Tahun / Year	Jumlah Klaim (dalam juta Rupiah) / Amount of Claim (in million Rupiah)
2020	5.540
2019	5.865
2018	3.030
2017	3.435
2016	2.870

Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki serikat pekerja, namun meski begitu Perusahaan tetap menjamin hak karyawannya untuk secara bebas berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

Freedom of Association and Gathering

By the end of 2020, the Company does not have a union, however the Company guarantees its workers' rights to associate, gather and express opinions.

Pekerja di Bawah Umur

Perusahaan memastikan dalam mempekerjakan karyawan, tidak terdapat adanya pekerja yang berada di bawah umur, dan hal tersebut terbukti dengan hingga kini Perusahaan tidak memiliki pekerja di bawah umur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen tersebut terangkum dalam persyaratan penerimaan pegawai, yakni calon pekerja harus memenuhi syarat minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau dengan batas minimal usia 18 tahun ke atas.

Minors (Under-Age Employees)

The Company ensures that until now there are no underage workers working at its premises, and this is proven with the absence of minors in line with the applicable regulations. This commitment is set forth in the personnel requirements that ask the prospective workers to have at least completed high school education (SMA) or with a minimum age limit 18 years old.

Waktu Kerja

Untuk memastikan karyawan dapat bekerja dengan efektif dan efisien dan memegang komitmennya untuk memberikan kinerja terbaiknya namun tetap menjunjung tinggi hak karyawan untuk tetap memiliki kehidupan sosial yang baik dan sehat, Perusahaan memiliki ketentuan dan kebijakan terkait waktu kerja karyawan di Perusahaan, yakni sebagai berikut:

1. Waktu kerja Perusahaan adalah 8 (delapan) jam sehari dan atau 40 jam seminggu yang diatur secara terpisah.
2. Karyawan wajib hadir di tempat kerja pada waktu yang ditentukan dan wajib melakukan absensi pada waktu masuk dan pulang kerja.
3. Karyawan yang terlambat masuk kerja atau akan meninggalkan pekerjaannya, sebelum waktunya, wajib mendapat izin dari atasan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dianggap telah melakukan pelanggaran kedisiplinan.

Working Time

To ensure that the employees work effectively and efficiently and commit to provide their best performance while still upholding their rights to have a good and healthy social life, the Company has regulations regarding employee working hours at the Company, namely:

1. Company working time is 8 (eight) hours a day and or 40 hours a week which is set separately.
2. Employees must be present at the workplace at the specified time and must attend at the time of entry and return from work.
3. Employees who are late for work or will leave their jobs before their time, must obtain permission from superiors. If these obligations are not carried out, they are considered to have committed disciplinary violations.

4. Bagi karyawan yang mengajukan izin meninggalkan Perusahaan untuk melaksanakan keperluan pribadi, apabila waktu izin lebih dari 5 (lima) jam, maka hal tersebut akan diperhitungkan secara otomatis sebagai pengambilan hak cuti tahunan karyawan yang bersangkutan.
5. Karyawan yang tidak masuk kerja, wajib memberitahukan kepada atasan disertai alasan yang dapat diterima. Ketidakhadiran karena sakit selama 2 (dua) hari atau lebih secara berturut-turut wajib disertai dengan Surat Keterangan Dokter.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan kerja, jam kerja dan jam istirahat termasuk absensi karyawan, merupakan pelanggaran terhadap disiplin dan tata tertib.

Kerja dan Upah Lembur

Jam lembur merupakan waktu di luar jam kerja yang dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pada dasarnya, Perusahaan senantiasa berupaya untuk menjalankan aktivitas operasional yang efektif dan efisien sehingga tidak terdapat adanya jam lembur, namun apabila kemudian diperlukan adanya jam lembur, hal tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan telah mendapat izin tertulis dari atasan terkait. Bagi karyawan yang melakukan kerja dengan jam lembur, Perusahaan memberikan upah dengan besaran nominal yang mengacu pada perhitungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Ketentuan Cuti dan Izin Meninggalkan Pekerjaan

Perusahaan menghormati hak karyawan untuk memperoleh cuti dan izin meninggalkan dengan memberikan hak-hak tersebut kepada karyawan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap karyawan yang telah bekerja 12 bulan berturut-turut berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja.
2. Hak cuti tahunan karyawan akan gugur apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya hak cuti tahunan, karyawan tidak mempergunakan hak cutinya tersebut kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan.
3. Tanpa mengurangi kepentingan karyawan maka Perusahaan berhak untuk mengatur cuti tahunan karyawan berdasarkan kebutuhan Perusahaan.

4. For employees who apply for permission to leave the Company to carry out personal needs, if the permit time is more than 5 (five) hours, then this will be calculated automatically as taking the annual leave entitlement of the employee concerned.
5. Employees who do not come to work, must notify their superiors with acceptable reasons. Absence due to illness for 2 (two) days or more in a row must be accompanied by a Doctor's Certificate.
6. Violations of working conditions, hours of work and hours of service including employee absences, constitute violations of discipline.

Work and Overtime Wages

Overtime hours are the time outside of working hours used to complete work as regulated in applicable laws and regulations. In general, the Company always strives to carry out operational activities that are effective and efficient so that there is no overtime hours. However, if overtime hours are required, this can only be done for the benefit of the Company and with written permission from the relevant supervisor. For employees who work overtime, the Company provides a nominal wage that refers to the calculation set by the Government through the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number KEP.102/MEN/VI/2004 concerning Overtime and Overtime Wages.

Terms of Leave and Permission to Leave Work

The Company respects the employees' rights to receive leave and permission to leave by providing such rights in accordance with the following regulations:

1. Every employee who has worked 12 months in a row is entitled to annual leave for 12 working days.
2. Employee's annual leave will be terminated if within 6 (six) months after the termination of annual leave. Employees do not use the leave rights unless otherwise determined by the Company.
3. Without prejudice to employee interests, the Company has the right to arrange employee annual leave based on the Company's needs.

4. Hak atas cuti tahunan tidak dapat dikompensasikan atau diganti dengan suatu pembayaran apa pun juga kecuali untuk mereka yang berakhir hubungan kerjanya dengan Perusahaan.
5. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, karyawan diwajibkan mengajukan terlebih dahulu kepada atasan untuk disetujui minimal 1 (satu) minggu takwim sebelum cuti tahunan diambil dengan mengisi formulir cuti yang telah disediakan. Pengecualian dapat diberikan kepada kasus darurat yang diatur secara terpisah.

Selain cuti tahunan tersebut, Perusahaan juga memberikan cuti besar bagi karyawan yang telah bekerja pada Perusahaan sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara berturut-turut, yakni cuti panjang di luar cuti tahunan dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan terpisah.

Istirahat Melahirkan dan Gugur Kandungan

Bagi karyawan perempuan, Perusahaan memberikan waktu untuk istirahat melahirkan dan gugur kandungan, dengan ketentuan:

1. Istirahat melahirkan adalah hari-hari istirahat karyawan selama 3 (tiga) bulan yaitu 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan sesuai dengan pertimbangan atau rekomendasi dari dokter.
2. Karyawan yang mengalami gugur kandung mendapat hari-hari istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan pertimbangan atau rekomendasi dokter.

Izin Meninggalkan Pekerjaan

1. Perusahaan dapat memberi izin untuk meninggalkan pekerjaan dan/atau tidak masuk kerja setelah terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari atasan.
2. Izin untuk meninggalkan pekerjaan dapat diberikan untuk keperluan sebagai berikut:
 - Karyawan menikah 3 hari
 - Karyawan menikahkan anaknya 2 hari
 - Karyawan mengkhitan atau membaptis anak 2 hari
 - Istri karyawan melahirkan atau keguguran 2 hari
 - Suami/istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu meninggal dunia 2 hari
 - Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia 1 hari

4. The right to annual leave cannot be compensated or replaced with any payment except for those who have ended their work relationship with the Company.
5. To exercise the right to annual leave, employees are required to first submit to superiors for approval at least 1 (one) calendar month before annual leave is taken by filling in the leave form provided. Exceptions can be given to emergency cases that are regulated separately.

In addition to annual leave, the Company also provides large leave for employees who have worked for at least 6 (six) consecutive years, so the Company will provide extended leave outside annual leave, which is further stipulated in separate regulations.

Childbirth Rest and Abstinence

For female employees, the Company gives time for childbirth and maternity breaks, provided that:

1. Birth breaks are employee rest days for 3 (three) months, namely 1.5 (one and a half) months before and months after giving birth according to the doctor's consideration or recommendation.
2. Employees who experience biological death get rest days for 1.5 months or in accordance with doctor's consideration or recommendation.

Permission to Leave a Job

1. The Company can give permission to leave work and or not come to work after first obtaining written permission from superiors.
2. Permission to leave work may be granted for the following purposes:
 - The employee is married for 3 days
 - Employees marry their children 2 days
 - Employees circumcise or baptize children 2 days
 - The employee's wife gives birth or miscarries 2 days
 - Husband/wife, parents or in-laws, children or son-in-law die 2 days
 - A family member in one house dies 1 day

- Korban kebakaran, banjir dan/atau bencana alam 1 hari
 - Pindah rumah, bukan rumah kontrak 1 hari
 - Jumlah hari yang dimaksud adalah hari takwim, terhitung hari terjadinya peristiwa.
3. Karyawan wajib meminta izin tertulis kepada atasan dengan mengisi formulir yang berlaku di Perusahaan.
 4. Karyawan yang meninggalkan pekerjaan tanpa izin atau tanpa pemberitahuan kepada Perusahaan atau tanpa surat keterangan atau alasan yang dapat diterima oleh Perusahaan, maka karyawan tersebut dianggap mangkir dan dikenakan sanksi yang berlaku.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Perusahaan senantiasa mengedepankan langkah-langkah kongkret untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan kondusif sekaligus menjadi wujud kepatuhan Perusahaan pada ketentuan yang berlaku, yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dengan memastikan masalah-masalah ketenagakerjaan dapat ditangani dan ditindaklanjuti dengan baik melalui ketentuan dan tata cara penyelesaian keluhan dan pengaduan karyawan yang telah disusun oleh Perusahaan, yaitu:

1. Antara Perusahaan dengan karyawan senantiasa harus membangun dan menjaga hubungan kerja yang serasi, selaras, seimbang, harmonis dengan tetap profesional dan memastikan adanya komunikasi timbal balik yang baik antar keduanya.
2. Seluruh individu Perusahaan harus menghindari praktik-praktik yang mengacu pada tindakan kesalahpahaman, perlakuan yang tidak/kurang wajar atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Apabila hal tersebut masih terjadi, harus segera diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip dalam hubungan industrial Pancasila.

Tata cara terkait penyelesaian keluhan dan pengaduan karyawan yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Karyawan menyampaikan terlebih dahulu keluhan dan/atau pengaduan kepada atasan untuk kemudian dibicarakan dan diselesaikan bersama.

- Fire, flood and/or natural disaster victims for 1 day
 - Moving house, not a 1-day contract house
 - The number of days referred to is takwim's day, counting the days of the occurrence of the event.
3. Employees must request written permission from superiors by filling in the applicable forms at the Company.
 4. Employees who leave work without permission or without notice to the Company or without a statement or reason that can be accepted by the Company, then the employee is considered absent and subject to applicable sanctions.

Complaints Mechanism of Manpower Problems

The Company puts forward concrete steps to support the creation of a healthy and conducive work environment as well as a manifestation of the Company's compliance with the applicable regulations, namely Labor Law No. 13 of 2003, by ensuring that labor issues can be handled and followed up properly through the provisions and procedures for resolving employee complaints prepared by the Company, namely:

1. The Company and employees must always maintain and develop harmonious, balanced working relationships and be a good reciprocal communicator.
2. All misunderstandings, treatments that are perceived to be/are not fair or are in conflict with the laws and regulations or Company Regulations in the end should be avoided. Whenever it happens, it must be resolved immediately by consensus to be guided by the principles of Pancasila's industrial relations.

The procedures for resolving complaints and employee complaints are as follows:

1. First Phase

All employee complaints and/or complaints are first submitted to the supervisor for discussion and resolution.

2. Tahap Kedua

Jika keluhan dan/atau pengaduan tidak dapat diselesaikan di tahap pertama dengan atasan, maka karyawan terkait dapat menyampaikan keluhan dan/atau pengaduan kepada atasan yang lebih tinggi atau Kepala Divisi/Departemen terkait dengan sepengetahuan atasan.

3. Tahap Ketiga

Apabila kemudian setelah melalui tahap kedua masih belum menemukan jalan keluar, keluhan dan/atau pengaduan dapat diteruskan kembali ke bagian Sumber Daya Manusia (SDM) untuk selanjutnya diselesaikan bersama-sama dengan atasannya.

4. Tahap Keempat

Setelah melalui tiga tahap sebelumnya dan masih belum dapat diselesaikan secara mufakat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perselisihan industrial dan Perusahaan dapat menggunakan metode penyelesaian dengan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

2. Second Phase

If in the First Stage complaints and/or complaints cannot be resolved, with the knowledge of superiors, the employee concerned can submit complaints or complaints to the higher level supervisor or Division/Department Head concerned.

3. Third Phase

If after going through Phase Two there is still a dead end, the employee concerned can forward his complaints or complaints to the Human Resources (HR) department to be resolved jointly with his supervisor.

4. Fourth Phase

After being deliberately negotiated, it turns out that there are still differences that cannot be resolved by consensus, then differences of opinion can be considered as industrial disputes and their resolution can be reached by referring to the applicable laws and regulations.

PEMENUHAN HAM UNTUK PIHAK LUAR PERUSAHAAN

Selain berfokus pada pemenuhan HAM di internal, Perusahaan juga menaruh perhatian pada upaya pemenuhan HAM di eksternal Perusahaan, mencakup antara lain menyediakan kesempatan dan sarana memadai bagi masyarakat luas untuk menyampaikan pengaduan, keluhan, hingga masukan dan saran, menyalurkan bantuan sosial dan dukungan kepada masyarakat sekitar area Perusahaan melalui berbagai acara sosial kemasyarakatan, hari raya keagamaan, maupun hari perayaan nasional.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Lingkungan

Sebagai sebuah badan usaha, perhatian pada upaya membangun dan menjaga kelestarian lingkungan turut menjadi poin penting yang senantiasa diwujudkan. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan hal tersebut dapat hadir secara nyata dengan berbagai langkah kongkret dengan mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

HUMAN RIGHTS FULFILLMENT FOR PARTIES OUTSIDE OF THE COMPANY

In addition to focusing on the fulfillment of human rights internally, the Company also pays attention to the effort to fulfill human rights externally. This includes provision of adequate opportunities and facilities for the wider community to submit complaints, complaints, to input and suggestions, channel social assistance and support to the community living close to the Company's area through various social events, religious holidays, and national celebrations.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE ENVIRONMENT

Corporate Social Responsibilities Policies in the Environmental Field

As a business entity, the attention to efforts to build and protect the environment is an important point which should be realized. The Company commits to ensuring that this can manifest itself with a variety of concrete steps pursuant to the Law No.32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law No.12 of 2012 concerning Environmental Permits.

Komitmen ini terus dipegang teguh oleh Perusahaan dengan memasukkannya ke dalam Pedoman CSR Nusantara Care Pilar Lingkungan dan Komunitas. Dengan adanya pedoman tersebut, Perusahaan semakin mengukuhkan komitmennya untuk terus mengutamakan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan melalui berbagai upaya yang dimulai dari lingkungan kerja Perusahaan dan entitas anak hingga lingkungan sekitar wilayah operasional bisnis Perusahaan dan entitas anak.

Komitmen untuk Mengurangi Emisi

Di tengah perkembangan industri dan kehidupan modern yang terus bergerak maju, penggunaan emisi turut mengalami peningkatan dan berdampak besar pada keberlanjutan lingkungan yang lestari. Untuk tetap menjaga lingkungan tetap harmoni dan lestari, dibutuhkan komitmen yang besar untuk mengurangi emisi yang berpengaruh buruk pada lingkungan dan kehidupan yang berkelanjutan.

Perusahaan sebagai salah satu perusahaan infrastruktur publik yang juga memiliki bidang usaha di lini bisnis energi terbarukan turut menerapkan dan menjalankan komitmen untuk mendukung terwujudnya pengurangan emisi dengan berupaya untuk menjadi contoh dalam semua aspek penerapan Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan atau *Health, Safety, and Environment* (HSE).

Perusahaan berfokus pada penyediaan sumber energi terbarukan atau *renewable energy* melalui pembangunan dan pengelolaan energi baru dan terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm). Aspek lingkungan hidup menjadi bagian dari fokus Perusahaan di dalam menjalankan bisnis karena seiring dengan adanya kelestarian lingkungan hidup, pertumbuhan bisnis Perusahaan dapat berjalan secara sehat, positif, dan berkelanjutan.

KOMITMEN UNTUK MENJALANKAN AKTIVITAS OPERASIONAL DENGAN EFISIENSI SUMBER DAYA ALAM

Komitmen untuk membangun dan memelihara kelestarian lingkungan dilakukan oleh Perusahaan dengan memulainya dari lingkungan terdekat, yakni wilayah kerja Perusahaan di mana Perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan memastikan seluruh kegiatan bisnis yang

The Company continuously upholds this commitment by incorporating it into the Nusantara Care CSR Guidelines in the Environment and Community Pillars. With these guidelines, the Company further strengthens its commitment to continue to prioritize environmental sustainability in a sustainable manner through various efforts, starting from its work environment and subsidiaries up to the environment close to their business operational area.

Commitment to Reduce Emissions

Amidst industrial development and modern life that continues to move forward, emissions of greenhouse gases (GHG) has increased, causing major impacts on the sustainability of the environment. To keep the harmony and sustainability of the environment, it takes a big commitment to reduce emissions that adversely affect the environment and sustainable lives.

The Company, as one of the public infrastructure companies that also runs business in the energy sector, also implements and carries out a commitment to support the realization of emissions reduction by striving to be an example of the application of Health, Safety, and Environment (HSE) in all aspects.

The Company focuses on providing new energy from renewable sources such as the construction and management of Hydroelectric Power Plants (PLTA) and Biomass Power Plants (PLTBm). The maintainance of a healthy physical environment is essential for ensuring the future sustainable growth of the Company's business.

THE COMMITMENT TO RUN OPERATIONAL ACTIVITIES WITH NATURAL RESOURCES EFFICIENCY

The Company is committed to building and maintaining environmental sustainability by starting from the nearest environment, namely the Company's work area where it carries out its operational activities. The Company ensures that all business activities does not produce adverse impacts

dilakukan tidak menghasilkan dampak buruk pada lingkungan dan proses pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung kegiatan bisnis dilakukan dengan bijaksana serta seefektif dan seefisien mungkin. Untuk itu, Perusahaan melakukan beberapa upaya untuk menjalankan aktivitas operasional dengan efisiensi sumber daya alam yang sebaik mungkin, antara lain melalui:

Listrik

- Sektor energi terbarukan memakai bohlam LED yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi untuk kantor operasional.
- Sektor tol juga menggunakan bohlam lampu yang ramah lingkungan di sepanjang jalan tol yang di kelola. Sementara itu, MMN dan JTSE menggunakan sistem kerja dengan material dan alat ramah lingkungan yang merupakan tujuan implementasi pengelolaan jalan tol ramah lingkungan. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan bohlam lampu yang ramah lingkungan di sepanjang jalan tol yang dikelola pada tahun 2020. Di mana lampu yang akan digunakan adalah Lampu Panasonic tipe NNP19994 dengan keunggulan *energy saving* sehingga menekan emisi CO2 pada lampu hingga mencapai 55%, dengan masa pakai hingga 50.000 jam, serta dilengkapi dengan sistem peredupan otomatis (*auto dimming*).
- Memilih dan memakai peralatan kantor yang hemat energi; dan
- Bekerja di gedung yang berkonsep *green energy*.

Air

- Memakai air dengan bijaksana dan wajar di seluruh lingkungan Perusahaan.

Tanah

Perusahaan melakukan penanaman dan pemeliharaan pada berbagai jenis pohon di sekitar jalan tol guna menghasilkan O2 sekaligus menyerap CO2. Selain itu, pohon-pohon tersebut juga memiliki kegunaan untuk meredam kebisingan dari jalan tol sehingga tidak menimbulkan gangguan untuk masyarakat sekitar jalan tol. Jenis tanaman yang tepat untuk ditanam adalah tanaman yang memiliki tajuk tebal dan daun rindang serta ditanam dengan cukup rapat dan tinggi untuk menyerap kebisingan hingga 95%.

on the environment and that the process of utilizing natural resources to support business activities is carried out wisely, as effectively and efficiently as possible. To that end, the Company makes efforts to carry out operational activities with the best possible efficiency of natural resources, include among others:

Electricity

- The renewable energy sector uses LED bulbs that are more environmentally friendly and energy efficient for operational offices.
- The toll road sector also uses environmentally friendly light bulbs along the toll roads it manages. Meanwhile, MMN and JTSE use a work system with environmentally friendly materials and tools which is the objective of implementing environmentally friendly toll road management. The company is committed to increasing the use of environmentally friendly light bulbs along the toll roads that are managed by 2020. Where the lamp will be used is the NNP19994 type Panasonic lamp with the advantage of energy saving so as to reduce CO2 emissions in the lamp by up to 55%, with a lifetime of up to 55%. 50,000 hours, and is equipped with an auto dimming system.
- Use energy efficient office supplies;
- Use buildings with the green energy concept;

Water

- Using water wisely and fairly in the Company's environment.

Soil

The Company plants and takes care of trees along the toll road with a to produce O2 and reduce CO2. In addition, the trees serve to reduce noise from the toll roads so as not to disturb the surrounding community. Effective plant species to reduce sound are plants that have thick canopies and leafy leaves which are planted sufficiently tightly and high that will absorb 95% of the noise.

Terkait dengan tanah, Perusahaan melakukan pengelolaan pada pemanfaatan tanah, berupa:

1. Menjalankan program beautifikasi dan penghijauan jalan tol dengan melakukan penanaman tanaman jenis kembang kertas, pucuk merah, dan palem putri.
2. Meneruskan pelaksanaan program pembibitan kembang kertas sebagai bagian dari upaya berkelanjutan penanaman dan penghijauan area jalan tol.

Bahan Bakar

- Menghemat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mobil operasional dan patroli.

Kertas

- Menekan penggunaan kertas untuk aktivitas bisnis dengan memanfaatkan secara menyeluruh penggunaan Teknologi Informasi;
- Mengimplementasikan konsep *paperless* dengan salah satunya melalui penggunaan kembali kertas bekas dalam aktivitas administrasi dan menjalankan peralihan dari penggunaan manual dengan kertas menjadi dengan sistem komputer (*web online/desktop*). Selain mendukung konsep *paperless*, dapat berdampak positif dengan mempercepat proses sistem informasi dan pelaporan.

Plastik

- Menjalankan kampanye *go green* secara masif di seluruh wilayah operasional Perusahaan dengan tidak menyediakan air minum kemasan plastik.

KOMITMEN UNTUK MELESTARIKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN MEMBENTUK LINGKUNGAN YANG HARMONIS

Seluruh kegiatan operasional yang dijalankan Perusahaan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan patuh terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Perusahaan juga berfokus pada upaya melestarikan lingkungan melalui pelaksanaan berbagai program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan.

The Company also manages land use management in the form of:

1. Carrying out a toll road beautification and greening program in the form of planting paper flowers, red shoots and women's palms.
2. Continuing the paper flower nursery program as a continuous effort to plant and green the toll road area.

Fuel

- Reducing fuel oil (BBM) consumption in operational and patrol cars.

Paper

- Implementing paperless offices by optimizing Information Technology;
- Implementing paperless concept, one of which is by using used paper in administrative activities and making transition from a paper-based to computer system (*online/desktop*). Aside from supporting paperless concept, this activity also accelerates the information and reporting system.

Plastic

- Running massive-scale *go green* campaign in all operational areas by not providing water in plastic packages.

COMMITMENT TO BIODIVERSITY CONSERVATION AND FORMATION OF HARMONIOUS ENVIRONMENT

All of the Company's operational activities are carried out with due regard to environmental sustainability and compliance with Law No. 32 of 2009 on Environment Protection and Management. In addition, the Company also focuses on environment conservation through the implementation of various Environmental Social Responsibility programs as a form of responsibility towards the environment.

**BSD Tol Tanam Pohon Bersama Jasa Marga dan Korlantas POLRI****BSD Tol Planted Trees With Jasa Marga and Indonesian Traffic Corps (Korlantas POLRI)**

PT Bintaro Serpong Damai (Tol BSD) bekerjasama dengan Jasa Marga dan Korlantas POLRI area Tol Serpong – Pondok Aren KM 8+00 menyelenggarakan kegiatan penanaman pohon dengan tema “Lestarkan lingkungan, Hijaukan harimu!” pada 17 Januari 2020 yang dihadiri oleh Direktur Operasional dan Teknik Tol BSD, Kristianto, perwakilan dari pihak Jasa Marga dan Korlantas POLRI. Sebanyak 200 pohon berjenis Mahoni dan Trambesi ditanam di beberapa titik, termasuk di area Tol Serpong – Pondok Aren untuk menciptakan ruang terbuka hijau sekaligus menambah estetika di sekitar area tol agar terlihat lebih asri dan nyaman.

PT Bintaro Serpong Damai (BSD Toll) cooperated with Jasa Marga and Indonesian Traffic Corps (Korlantas POLRI) for Serpong – Pondok Aren KM 8+00 area to organize a tree-planting event with the theme “Conserve the Environment, Make Your Day Green!” on January 17, 2020, which was attended by BSD Toll Director of Operations and Engineering Kristianto, Jasa Marga representatives, and Korlantas POLRI. A total of 200 Mahogany and Monkey Pod Trees were planted at several points, including in the Serpong - Pondok Aren toll road area. In the future, BSD Toll Management will increase the number of trees to be planted in the Serpong - Pondok Aren Toll Area, creating green open space while adding aesthetics around the toll area to make it look more beautiful and comfortable.



Penghijauan di Area Tol oleh Manajemen BSD
Greening of Toll Area by BSD Management

Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke-75, Manajemen PT Bintaro Serpong Damai (Tol BSD) kembali mengadakan kegiatan penanaman pohon di sepanjang Jalan Tol Ruas Pondok Aren-Serpong pada 7 Desember 2020. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh direksi dan manajemen sebagai bentuk kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan dengan memanfaatkan lahan yang berada di sekitar area tol sebagai area resapan air, sekaligus sebagai upaya untuk menghijaukan ruas jalan tol dengan penanaman pohon.

KOMITMEN UNTUK MEMENUHI DAN MEMATUHI IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Perusahaan senantiasa memastikan seluruh aktivitas operasional bisnis, baik yang dijalankan oleh Perusahaan maupun entitas anak telah memperoleh dan mematuhi izin pengelolaan lingkungan. Upaya Perusahaan dalam melestarikan lingkungan dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pada sektor pengelolaan air bersih, pemenuhan izin telah dilakukan Perusahaan dengan melalui entitas anak, PT Potum Mundi Infranasantara, yakni telah memenuhi kewajiban pembuatan dokumen lingkungan (AMDAL) serta Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)

To celebrate the 75th Public Service Work Day, PT Bintaro Serpong Damai (BSD Toll) Management organized tree-planting activity along the Pondok Aren – Serpong Toll Line on December 7, 2020. This activity was attended by the directors and management to show the Company's concern for the environment by utilizing the land around the toll road area as a water catchment area and as an effort to green the area around the toll line.

COMMITMENT TO FULFILL AND COMPLY WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PERMIT

The Company ensures that all business activities, operated by itself and its subsidiaries, have received and are compliant with the environmental management permit. The Company conserves the environment in compliance with the applicable regulations, namely Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits.

For the clean water management sector, through its subsidiary PT Potum Mundi Infranasantara, the Company has fulfilled the obligation to produce environmental documents (AMDAL), Environmental Management and Monitoring Documents (DPPL) in accordance with the

sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada sektor energi terbarukan, Perusahaan juga telah memenuhi aspek perizinan dengan melalui entitas anak, PT Inpol Meka Energi (IME) dengan diperolehnya Surat Keputusan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi No. 6.a/2/240/III/2016 pada tanggal 31 Maret 2016 tentang Izin Lingkungan PT Inpol Meka Energi terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung yang akan dikelola dan dioperasikan oleh IME.

Selain PLTA Lau Gunung, Perusahaan melalui entitas anak tidak langsung, PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) juga menjalankan usaha di sektor energi terbarukan dengan membangun dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Siantan, Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat. RPSL dipastikan telah mematuhi setiap aspek kelayakan lingkungan hidup yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pontianak No. 91 Tahun 2014. Sebagaimana tercantum dalam surat keputusan tersebut, pembangunan PLTBm ditinjau dari aspek lingkungan hidup juga dianggap telah layak dan RPSL diwajibkan melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang termuat dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Pontianak melalui Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pontianak secara berkala setiap 6 (enam) bulan. RPSL juga telah mengantongi izin pembuangan limbah cair dan izin penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun (B3).

Untuk memastikan seluruh aktivitas sektor bisnis berjalan dengan tidak membawa kerugian bagi lingkungan, Perusahaan telah menyusun Laporan Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Laporan Pemantauan Lingkungan (RPL) dengan komponen yang dikelola dan dipantau mencakup kualitas dari udara dan kebisingan, kualitas dari air bersih dan air permukaan, limbah padat/sampah, pengelolaan kesehatan masyarakat, serta pengelolaan sosial ekonomi.

mandate of Law No.32 of 2009 concerning Protection and Management Living environment.

In the renewable energy sector, the Company has also obtained a license through its subsidiary, PT Inpol Meka Energi (IME), with the acquisition of the Decree of the Dairi Regency Integrated Licensing Services Office No. 6.a/2/240/III/2016 on March 31, 2016 concerning the Environmental Permit of PT Inpol Meka Energi for the construction of the PLTA.

Besides operating Lau Gunung Hydroelectric Power Plant, the Company through indirect subsidiary PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL), also builds and operates the Biomass Power Plant (PLTBm) Siantan, Mempawah, Pontianak, West Kalimantan. The RPSL has complied with every aspect of environmental feasibility set by the Pontianak Regent through his decision letter, No. 91 of 2014. Through the decree, the construction of Siantan PLTBm, as reviewed from the environmental aspect, has been deemed feasible. RPSL must carry out environmental management and monitoring as per the approved Environmental Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL) documents, and report the implementation results every 6 (six) months to the Pontianak Regent through the Pontianak Regency Environmental and Disaster Management Agency. The RPSL also has life protection and management permits that includes a liquid waste disposal permit and temporary storage permit for hazardous and toxic substances (B3).

To ensure that all activities in the business sector run without causing harm to the environment, the Company has also made Environmental Management Report (RKL) and Environmental monitoring report (RPL). The components that are managed and monitored are air quality and noise, clean water and surface water quality, solid waste/rubbish, public health management and socio-economic management.

Sertifikasi Bidang Lingkungan

Perusahaan melalui anak usahanya di sektor tol, yakni MUN telah memiliki sertifikasi di bidang lingkungan dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14001:2015 yang dikeluarkan oleh SGS United Kingdom Ltd sejak 25 Juli 2018 sampai dengan 1 April 2021. Beberapa pabrik yang pengelolaannya dilakukan oleh entitas anak tidak langsung, yaitu PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM) juga telah memiliki sertifikasi ISO 9000:2008 dan OHSAS 18001:2007.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Perusahaan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan masalah lingkungan melalui media komunikasi resmi perusahaan yang dapat dilihat pada pembahasan "Akses Informasi dan Data Perusahaan" di dalam bab Tata Kelola Perusahaan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN SERTA ASPEK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Di dalam menjalankan bisnis usahanya, Perusahaan senantiasa mengedepankan wujud nyata penerapan standar Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan dan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghadirkan aktivitas operasional dengan nihil kecelakaan (*zero accident*) yang berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan.

Perusahaan juga melibatkan peran serta seluruh karyawan untuk turut memegang komitmen dalam mengutamakan penerapan K3 sehingga tujuan Perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, serta nihil kecelakaan dan dampak buruk dapat tercapai sesuai harapan.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Ketenagakerjaan serta Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perusahaan memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset penting yang keberadaannya sangat penting di dalam bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan memastikan kepentingan karyawan terutama yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dapat sepenuhnya terpenuhi melalui penerapan kebijakan-kebijakan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yakni Undang-Undang RI No. 13/2013 tentang Ketenagakerjaan.

Environmental Certification

The Company, through its subsidiaries in toll sector, namely MUN, has had a certification in the environment sector by implementing environmental management system based on ISO 14001:2015, which was published by SGS United Kingdom Ltd since July 25, 2018 to April 1, 2021. Some factories which are managed by indirect subsidiaries, namely PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM), have also been awarded ISO 9000: 2008 certification and OH SAS 18001: 2007.

Complaints Mechanism For Environmental Problems

The Company provides a mean for the public to submit complaints about environmental issues through official company communication media, which can be seen in the discussion on "Access to Company Information and Data" in the Good Corporate Governance chapter.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES FOR LABOR AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (K3)

In conducting its business, the Company puts forward the real implementation of Safety, Health, Environment, and Community standards in accordance with the prevailing regulations for operational activities without accidents (*zero accident*) that cause negative impact for both humans and the environment.

The Company also engages the participation of all employees to share their commitment in prioritizing K3 implementation, in order to achieve the Company's goal of creating safe, comfortable, and healthy work environment with zero accident and negative impact.

Corporate Social Responsibility Policies Related to Employment and Occupational Health and Safety Aspects (K3)

The Company views Human Resources as assets.. As such, the Company ensures that the employees' demands, particularly in relation to Employment and Occupational Health and Safety (K3), are fulfilled through the implementation of policies in line with the prevailing regulations, among others RI Law No. 13/2013 on Employment.

Selain itu, Perusahaan juga memiliki beberapa kebijakan internal terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), antara lain:

1. Pedoman *Health, Safety and Environment* (HSE) PT Nusantara Infrastructure Tbk 2018.
2. Pedoman *Sosial and Environmental Management System* (SEM) atau Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan Grup.

Survei Kepuasan dan Keterikatan Karyawan

Hingga akhir tahun 2020, pelaksanaan survei kepuasan dan keterikatan karyawan belum terealisasi oleh Perusahaan. Kendati demikian, Perusahaan tetap memegang teguh dan menjunjung komitmen untuk senantiasa mengedepankan kepentingan dan pemenuhan hak karyawan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terjaganya kestabilan tingkat turnover karyawan yang dimiliki Perusahaan pada tahun 2020 menggambarkan tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan Perusahaan.

Tingkat Turnover Karyawan

Dalam pelaksanaan proses operasional bisnis, terdapat adanya perputaran karyawan yang terjadi karena berbagai faktor. Dengan adanya pengelolaan SDM yang memadai dan tepat, tercipta dampak positif pada tingkat *turnover* Perusahaan dan tercapainya langkah Perusahaan dan entitas anak dalam mempertahankan tingkat *turnover* dalam tiga tahun terakhir.

Tahun	Persentase Turnover Karyawan / Percentage of Employee Turnover
2020	10,00%
2019	6,00%
2018	5,31%

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Health, Safety, and Environment (HSE)

Aspek Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (HSE) menjadi bagian dari fokus utama Perusahaan karena keberadaannya yang berpengaruh besar dalam langkah pencapaian pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Aspek tersebut telah diterapkan secara menyeluruh di semua bagian Grup Perusahaan dengan penanganan dan pengelolaannya dilakukan oleh Departemen HSE

Furthermore, the Company also has internal policies related to Occupational Health and Safety (K3), including:

1. Health, Safety and Environment (HSE) Guidelines of PT Nusantara Infrastructure Tbk 2018.
2. Social Guidelines and Environmental Management System (SEMS) or Group's Social and Environmental Management System.

Employee Satisfaction and Attachment Survey

Until the end of 2020, the Company had not yet implemented an employee satisfaction and engagement survey. Nevertheless, the Company continued to uphold its commitment to always prioritize the interests and fulfillment of employees' rights as stipulated in the prevailing laws and regulations. The stability of the employee turnover rate in the Company in 2020 illustrated the level of satisfaction and engagement of the Company's employees.

Employee Turnover Rate

In business employee turnover occurs due to a variety of factors. Through diligent HR management the Company and its subsidiaries have maintained a very low turnover rate in the last three.

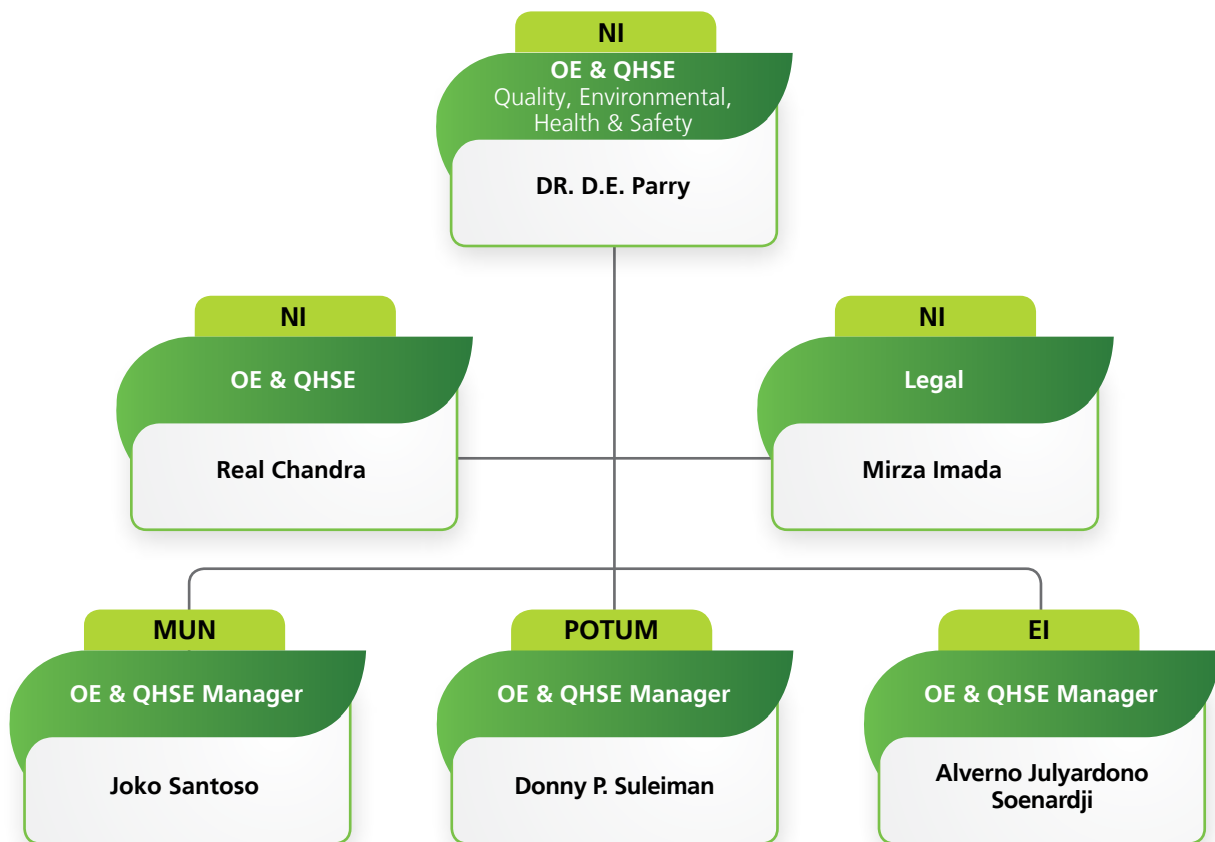
CORPORATE RESPONSIBILITIES RELATED TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3)

Health, Safety, and Environment (HSE)

The Health, Safety and Environment (HSE) aspect is part of the Company's main focus as its existence has a major influence in the steps to achieve sustainable business growth. This aspect has been applied comprehensively in all parts of the Company Group, with handling and management carried out by the HSE Department. The department runs planning, organizing, implementing and monitoring,

Perusahaan. Departemen tersebut berfungsi menjalankan perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan, serta pelaporan yang berkaitan dengan sistem Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan. Departemen HSE telah diresmikan keberadaannya pada Juli 2019 oleh Direksi Perusahaan untuk mendukung komitmen Perusahaan menghasilkan bisnis usaha dengan tingkat kecelakaan kerja nol atau *zero accident*, baik di lingkungan kerja Perusahaan maupun entitas anak.

as well as reporting in relation to the Health, Safety and Environment systems. The HSE Department was established in July 2019 by the Company's Board of Directors to support its commitment to implement a business with zero accident rate in operational areas owned by the Company and its subsidiaries.



Divisi HSE NI bekerja dengan mengacu kepada Pedoman HSE NI dan Pedoman SEMS NI yang didasarkan pada hukum dan peraturan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan Pemerintah Indonesia, pedoman HSE Bank Dunia, IFC (International Finance Corporation), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

The HSE NI Division works with reference to the HSE NI Guidelines and the NI SEMS Guidelines which are based on the laws and regulations on health, work safety and environment of the Government of Indonesia, the HSE guidelines of the World Bank, IFC (International Finance Corporation), the Asian Development Bank (Asian Development Bank) and PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Semua proyek di bawah PT Nusantara Infrastructure Tbk dan entitas anak perusahaan langsung dan tidak langsung diaudit secara internal oleh Departemen HSE sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Protokol HSE Grup yang ditetapkan dalam Pedoman HSE NI serta diwajibkan mengikuti Pedoman Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan Grup (SEMS) NI yang memerinci kebijakan, prosedur operasi, pengaturan kelembagaan, dan alur kerja yang akan diikuti untuk mengidentifikasi risiko sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari proyek-proyek yang terlibat, dan karenanya memastikan penghindaran, minimalisasi atau mitigasi risiko-risiko tersebut. SEMS harus diikuti selama seluruh siklus proyek dari awal proyek, melalui penilaian, tender, penghargaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan dan penonaktifan.

PELAKSANAAN HSE DI BERBAGAI SEKTOR USAHA NI

Proses bisnis yang dijalankan Perusahaan terdiri dari berbagai sektor usaha, baik oleh entitas anak langsung maupun tidak langsung. Berangkat dari hal tersebut, Perusahaan melalui Departemen HSE menerapkan HSE dengan disesuaikan pada sifat dan kegiatan dari masing-masing entitas usaha dan memastikan telah dilaksanakan secara menyeluruh.

Pelaksanaan dan Sertifikasi HSE di Sektor Jalan Tol

Sektor jalan tol milik Perusahaan dikelola dan dioperasikan oleh entitas anak Perusahaan, yakni PT Margautama Nusantara (MUN), PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Makassar Metro Network (MMN), dan PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). Standar HSE yang ketat menjadi fokus Perusahaan untuk diterapkan dengan tujuan mencapai visi *zero accident* yang telah diberlakukan untuk seluruh pihak, dari karyawan, pelanggan, mitra kerja, hingga aspek lingkungan.

Sejak tahun 2020, Perusahaan telah memiliki sertifikat ISO 45001:2018 yang merupakan sertifikat berstandar internasional merupakan standar bertaraf internasional yang menetapkan berbagai persyaratan untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau dikenal dengan SMK3. Sertifikat yang setiap tahunnya di evaluasi oleh badan sertifikasi surveillance audit ini, terintegrasi dengan ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 untuk ruas tol yang dikelola oleh anak usaha Perusahaan, yakni BSD, MMN,

All projects under PT Nusantara Infrastructure Tbk and its subsidiaries, directly and indirectly, are audited internally by the HSE Department as part of compliance with the Group HSE Protocol set out in the NI HSE Guidelines and are required to follow the NI Group Social and Environmental Management System (SEMS) Guidelines which details the policies, operating procedures, institutional arrangements and workflows to be followed to identify the social and environmental risks that may arise from the projects involved, and thereby ensure the avoidance, minimization or mitigation of those risks. SEMS must be followed throughout the entire project cycle from the start of the project, through appraisal, tender, award, construction, operation, maintenance and decommissioning.

IMPLEMENTATION OF HSE IN VARIOUS NI BUSINESS SECTORS

HSE is carried out by the Company in all its business sectors, both by the direct and indirect subsidiaries. The Company implements HSE through the HSE Department according to the nature and activities of each business entity and ensures its thorough implementation.

HSE Implementation and Certification in Toll Road Sector

The Company's toll road sector is managed and operated by its subsidiaries, namely PT Margautama Nusantara (MUN), PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Makassar Metro Network (MMN), and PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). The strict HSE standards become the Company's focus for implementation to achieve the zero accident vision,

Since 2020, the Company has had an ISO 45001: 2018 certificate which is an international standard certificate that specified various requirements for an occupational health and safety management system, known as SMK3. This certificate, which is evaluated annually by the surveillance audit certification body, is integrated with ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 for toll roads managed by the Company's subsidiaries, namely BSD, MMN, and JTSE. In addition, every 3 (three) years, the Company renews

serta JTSE. Selain itu, per 3 (tiga) tahun sekali, Perusahaan senantiasa berupaya untuk memperbarui sertifikat yang telah dimiliki, untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan. Di sepanjang tahun 2020, MUN dan ketiga entitas anak Perusahaan, yakni BSD, MMN, dan JTSE telah menerapkan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan (K3L) dengan baik.

PT Makassar Metro Network dan PT Jalan Tol Seksi Empat telah menerapkan K3L dalam bentuk Penyediaan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm keselamatan, rompi keselamatan, sepatu keselamatan, sarung tangan keselamatan, sepatu keselamatan, serta sarana prasarana keselamatan seperti APAR, P3K standar A, *water tank*, kendaraan *rescue* dan *ambulance*, dan lain sebagainya.

Perusahaan juga melaksanakan penerapan HSE dengan melakukan komunikasi, konsultasi dan partisipasi karyawan dalam bentuk *briefing*, *safety talk*, *induction visitor/ kontraktor/new employer*, dan beberapa media terkait *safety campaign*. Peningkatan kompetensi yang dijadikan sebagai salah satu penunjang dalam meningkatkan kinerja Keselamatan Kerja, adapun beberapa training yang telah dilakukan yakni:

1. *Fire Fighting Training* dengan menggunakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan pompa portable yang disambungkan dengan *water tank* sebagai sarana penunjang tim *rescue*;
2. *Road Accident Rescue* yang dibagi menjadi dua tahap yakni stabilisasi kendaraan terbalik dan penanganan korban kecelakaan lalu lintas menggunakan KED (*Kendrick Extrication Device*);
3. *Basic Life Support* (BLS) yang dilakukan pada tim Operasional Jalan Tol (OJT) yakni KSPT/Security/Rescue/ Derek/Medik/Patroli, dan tim yang berada di Menara Bosowa. Training ini diberikan dengan penyampaian teori dan implementasi penanganan luka dasar, fungsi P3K serta RJP (Resusitasi Jantung Paru).

Penerapan HSE di Sektor Pelabuhan

Perusahaan melalui entitas anak yakni PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) sebagai badan usaha yang bertugas sebagai pengelola Pelabuhan Panjang dan berfokus pada sektor pelabuhan telah memiliki Divisi HSE untuk menunjang penerapan K3 secara komprehensif di seluruh lini ISAB.

the certificates. Throughout 2020, MUN and the three subsidiaries, BSD, MMN, and JTSE, have implemented the principles of Occupational Health and Safety and the Environment (K3L).

PT Makassar Metro Network and PT Jalan Tol Seksi Empat have implemented K3L by providing and using Personal Protective Equipment (PPE) such as safety helmets, safety vests, safety shoes, safety gloves, and safety infrastructure such as APAR, standard P3K A, water tank, rescue vehicle, ambulance, and others.

The Company also implements HSE through communication, consultation and employee participation in the form of briefings, safety talks, visitors/contractors/new employee' induction, and media related to safety campaigns. Competency improvement is used to enhance Work Safety performance. some of the training that has been carried out includes:

1. Fire Fighting Training using APAR (Light Fire Extinguisher) and portable pump connected to water tank as supporting equipment for the rescue team;
2. Road Accident Rescue , which is divided into two stages, one is stabilization of capsized vehicles and the other is handling traffic accident victims using KED (Kendrick Extrication Device);
3. Basic Life Support (BLS) given to the Toll Road Operational Team (OJT), namely KSPT/Security/Rescue/ Towing/Medical/Patrol, and the Bosowa Tower team. This training delivers the theory and implementation of handling basic injury, administering first aid and RJP (Pulmonary Resuscitation).

HSE Implementation in Port Sector

The Company through its subsidiary, PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) as a business entity that manages Panjang Port, has a HSE Division to support the comprehensive K3 implementation in all of ISAB's sectors.

Divisi HSE di ISAB secara umum memiliki program kerja yang berorientasi pada pencapaian tujuan untuk menghindari dan menekan terjadinya risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat aktivitas kerja, dan kejadian berbahaya lainnya. ISAB melalui Divisi SHE memastikan program K3 dapat berjalan baik dengan secara aktif mengimbau para karyawan untuk bekerja secara aman menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap yang meliputi helm, pelindung mata, masker, sepatu keselamatan, sabuk keselamatan, dan APD terkait lainnya yang diwajibkan.

Perusahaan juga senantiasa patuh pada peraturan yang kemudian diwujudkan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pelaporan triwulan Komite P2K3L sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 04/MEN/1987 tentang P2K3 & Ahli K3. Pengujian berkala untuk analisis limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) juga telah dilakukan oleh Perusahaan untuk mengelola limbah yang dihasilkan oleh aktivitas operasional.

Untuk menunjang pelaksanaan dan penerapan kebijakan K3 secara optimal, Divisi HSE turut menyelenggarakan secara rutin pelatihan dan penerapan terkait prosedur K3 di setiap unit produksi. Seluruh pelatihan dan penerapan tersebut dievaluasi secara rutin setiap dua minggu untuk mengetahui dan memastikan tingkat efektivitas dari program tersebut.

Selain melibatkan karyawan sebagai pihak yang bersinggungan langsung, pelatihan standar K3L yang diselenggarakan ISAB di lingkungan kerja turut melibatkan tamu yang berkunjung. Program ini mencakup pelatihan penanggulangan bencana kebakaran, sosialisasi kebijakan standar keselamatan kepada tamu yang berkunjung ke area pelabuhan ISAB (Land 1 dan Land 2), *guest induction*, pengenalan peringatan rambu keselamatan kepada seluruh tamu, dan penjelasan mengenai jalur evakuasi jika terjadi keadaan darurat.

Perusahaan juga memastikan pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan melalui kerja sama dengan pihak ketiga Oil Spill Combat Team (OSCT) guna memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan, dalam hal mempersiapkan Oil Spill Combat Plan (OSCP) untuk kesiap-siagaan penanggulangan tumpahan minyak.

In general, the HSE Division at ISAB has a work program that is aimed at avoiding and minimizing work accident risks, work activities illnesses, and other dangerous occurrences. ISAB through HSE Division ensures the implementation of K3 program by actively urging employees to work safely by wearing complete Personal Protective Equipment (PPE), which includes helmets, eye protection, masks, safety shoes, safety belts, and other related PPE that are required.

The Company continues to comply with the regulations, as realized through coordination with Local Governments related to P2K3L Committee quarterly reporting in accordance with Regulation No. 04/MEN/1987 concerning P2K3 & K3 Experts. The Company has also conducted periodic tests for the analysis of the waste water treatment plant (WWTP) to manage wastes produced during operations.

To support optimum K3 implementation HSE Division conducts regular training and K3 implementation procedures in all production units. The trainings and implementation are evaluated every two weeks to discover and ensure the program's effectiveness level.

Aside from involving the employees as the parties with direct engagement, the K3L standard training organized by ISAB in the work place involves employees and visitors. The program includes training on fire disaster management, dissemination of safety standard policies to visitors in ISAB port area (Land 1 and Land 2), guest induction, introduction of safety warning to all guests, and explanation of evacuation routes in case of emergency.

The Company also ensures the prevention and control of port waters pollution through cooperation with third parties. The Oil Spill Combat Team (OSCT) to fulfil the obligations as stipulated in the Minister of Transportation Regulation No. 58 of 2013 concerning Management of Pollution in Waters and Ports, in terms of preparing the Oil Spill Combat Plan (OSCP) for oil spill prevention.

Implementasi Kebijakan HSE di Aktivitas Operasional Sektor Air Bersih

PT Potum Mundi Infranasantara (POTUM) merupakan entitas anak Perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan air bersih dan hingga akhir tahun 2020 telah mengoperasikan tiga instalasi pengelolaan air bersih, yakni:

- Tirta Kencana Cahaya Mandiri Water Treatment Plant (TKCM WTP), Cikokol, Tangerang, Banten
- Sarana Catur Tirta Kelola Water Treatment Plant (SCTK WTP), Serang, Banten
- Dain Celicani Cemerlang Water Treatment Plant (DCC WTP), Medan, Sumatera Utara

Perusahaan berkomitmen untuk memastikan seluruh aktivitas operasional yang dijalankan di ketiga pabrik tersebut telah mengikuti protokol HSE yang ketat. Tingkat pengembangan HSE dari masing-masing pabrik berbeda-beda sesuai dengan usia pabrik dan masa kerja di bawah kepemilikan pemegang saham mayoritas Perusahaan.

TKCM WTP Cikokol, Tangerang, Banten

Perusahaan secara rutin melakukan peninjauan atau audit terhadap Tirta Kencana Cahaya Mandiri *Water Treatment Plant* (TKCM WTP), Cikokol, Tangerang, Banten. Di tahun 2013, dilakukan peninjauan oleh Komite Audit INI yang diselenggarakan pada September 2013. Komite Audit yang saat itu dipimpin oleh Dr. D.E. Parry yang pada tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Divisi HSE, menyimpulkan bahwa penyelenggaraan praktik dan protokol HSE yang telah dilakukan oleh Potum pada pabrik tersebut merupakan standar tertinggi dan sepenuhnya telah mematuhi undang-undang dan peraturan Pemerintah Indonesia dan 'praktik terbaik' internasional yang berlaku.

WTP ini dianugerahi sertifikasi ISO 9000:2008 dan OHSAS 18001:2007, keduanya di bawah Lloyd's Register Quality Assurance untuk operasi dan pemeliharaan. Kunjungan berikutnya oleh Komite Audit dan Departemen HSE NI telah mengkonfirmasi bahwa standar yang tinggi telah dipertahankan sebagaimana tercermin dalam berlanjutnya validitas OHSAS 18001 hingga Maret 2021. TKCM saat ini sedang dalam proses mengganti OHSAS dengan sertifikasi ISO 45001 yang sekarang dianggap sebagai standar industri terbaru dan paling komprehensif untuk kesehatan dan keselamatan. Sertifikasi ISO 9001 pabrik diberikan pada

Implementation of HSE Policies in the Operational Activities of Clean Water Sector

PT Potum Mundi Infranasantara (POTUM) is the Company's subsidiary engaging in the clean water management sector and by the end of 2020 has operated three clean water management installations, namely:

- Tirta Kencana Cahaya Mandiri Water Treatment Plant (TKCM WTP), Cikokol, Tangerang, Banten
- Sarana Catur Tirta Kelola Water Treatment Plant (SCTK WTP), Serang, Banten
- Dain Celicani Cemerlang Water Treatment Plant (DCC WTP), Medan, North Sumatra

The Company is committed to ensuring that all operational activities carried out in the three factories have followed strict HSE protocols. HSE development level of each factory varies according to the factory's age and years of service under the ownership of the Company's majority shareholders.

TKCM WTP Cikokol, Tangerang, Banten

The Company regularly reviews or audits Tirta Kencana Cahaya Mandiri *Water Treatment Plant* (TKCM WTP), Cikokol, Tangerang, Banten. In 2013, INI Audit Committee conducted a review in September 2013. The Audit Committee which was then chaired by Dr. D.E. Parry, who in 2020 served as Head of the HSE Division, concluded that the implementation of the HSE practices and protocols that had been carried out by Potum at the factory was of the highest standard and fully complied with the laws and regulations of the Indonesian Government and applicable international 'best practices'.

This WTP was awarded ISO 9000:2008 and OH SAS 18001:2007 certification for operation and maintenance, both certifications are under Lloyd's Register Quality Assurance. Subsequent visits by the Audit Committee and the NI HSE Department have confirmed that the high standards have been maintained as reflected in the continued validity of OHSAS 18001 until March 2021. TKCM is currently in the process of replacing OHSAS with ISO 45001 which is now considered the latest industry standard and the most comprehensive health and safety certification. ISO 45001 certification is targeted before the end of 2020. ISO 9001

tahun 2005 dan telah diperbarui secara teratur dengan sertifikasi terbaru yang berlaku hingga akhir Oktober 2020.

SCTK WTP Serang, Banten

Secara rutin Perusahaan juga menyelenggarakan proses peninjauan atau audit terhadap Sarana Catur Tirta Kelola *Water Treatment Plant* (SCTK WTP), Serang, Banten. SCTK WTP dinilai telah sepenuhnya mematuhi protokol HSE yang diperlukan. Program HSE di SCTK WTP Serang, Banten, telah dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang telah ditetapkan, meliputi penyediaan kelengkapan K3 berupa Alat Pelindung Diri (APD) yang mencakup seragam, helm, sepatu bot, dan sarung tangan untuk karyawan.

Untuk memastikan keselamatan tiap individu, Potum juga mewajibkan seluruh tamu yang melakukan kunjungan ke lokasi pengelolaan air bersih untuk senantiasa mengikuti proses *guest induction*, menggunakan helm, dan memperhatikan rambu yang ada di area operasional. Penerapan optimal program K3 ini dijalankan dengan tertib dan secara berkala dievaluasi guna memastikan bahwa program telah diterapkan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Perusahaan.

DCC WTP Medan, Sumatera Utara

Dain Celicani Cemerlang *Water Treatment Plant* (SCTK WTP), Medan, Sumatera Utara juga menjadi pabrik yang secara rutin ditinjau dan diaudit oleh Perusahaan. Menurut peninjauan yang dilakukan, DCC WTP telah melakukan pengelolaan secara profesional dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam protokol dan pedoman HSE NI.

Komitmen Penerapan HSE secara Menyeluruh di Sektor Energi Terbarukan

Sebagai entitas anak yang berorientasi pada pelaksanaan operasional bisnis di sektor energi terbarukan, Entitas Anak Perusahaan yakni PT Inpolo Meka Energi (IME) dan PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) telah melakukan penerapan kebijakan HSE secara menyeluruh di semua lokasi proyek yang dimiliki.

certification for the plant was granted in 2005 and has been updated regularly and is valid until end of October 2020.

SCTK WTP Serang, Banten

The Company also regularly conducts a review or audit process of the Catur Tirta Manajemen Water Treatment Plant (SCTK WTP), Serang, Banten. SCTK WTP is considered to have fully complied with the required HSE protocol. The HSE program at SCTK WTP Serang, Banten, has been carried out in accordance with the established Standard Operating Procedures (SOP), including the provision of K3 equipment in the form of Personal Protective Equipment (PPE) which includes uniforms, helmets, boots, and gloves for employees.

To ensure the safety of each individual, Potum also requires all guests who visit the clean water management location to always follow the guest induction process, wear helmets, and pay attention to signs in the operational area. The optimal implementation of the K3 program is carried out in an orderly manner and periodically evaluated to ensure that the program has been implemented in accordance with the SOPs set by the Company.

DCC WTP Medan, North Sumatera

Dain Celicani Cemerlang Water Treatment Plant (SCTK WTP), Medan, North Sumatra is also a factory that is regularly reviewed and audited by the Company. According to the review, DCC PAPs have performed its management in a professional manner and have complied with the provisions set out in the NI HSE protocol and guidelines.

Commitment to Thorough HSE Implementation in the Renewable Energy Sector

As a subsidiary committed to business operations in the energy sector, the Company's subsidiary, namely PT Inpolo Meka Energi (IME) and PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL), has thoroughly implemented HSE policies in all of its project locations.

Dengan beroperasinya PLTA Lau Gunung di tahun 2020, IME telah melakukan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan peralatan HSE untuk memastikan area lokasi pembangkit telah mengikuti protokol HSE yang sesuai. IME juga melakukan *safety briefing*, *safety induction*, dan pelatihan K3 untuk semua pegawai yang bekerja di lokasi proyek sehingga dapat selalu berhati-hati dalam menjaga keselamatan kerja. Selain itu, divisi HSE juga rutin melakukan *safety patrol* untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman.

RPSL secara berkala melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di area pembangkit untuk mengetahui potensi bahaya yang ada dan dapat menilai risiko dan tingkat bahayanya serta menentukan langkah pencegahan dan penanggulangan. Hal tersebut juga dilakukan melalui kegiatan rutin safety patrol. Mengacu kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 pasal 9, kegiatan *safety induction* dilakukan sebagai bentuk penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai potensi bahaya yang ada, informasi-informasi keselamatan dan kesehatan kerja, peraturan-peraturan yang berlaku, dan prosedur dalam keadaan darurat kepada pengunjung/tamu dan karyawan baru.

Melalui *safety briefing*, pengumuman penting, instruksi kerja, peringatan-peringatan atau hal-hal penting lainnya terkait keselamatan dan kesehatan kerja dan aktivitas kerja yang akan dilakukan rutin disampaikan. Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dari risiko bahaya di tempat kerja maka dilakukan pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) secara rutin kepada seluruh karyawan, pengunjung/tamu dan pembaharuan rambu-rambu keselamatan sebagai salah satu bentuk pengendalian bahaya di tempat kerja.

Kedua perusahaan melakukan pelaporan rutin Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) per-semester (6 bulan). Pelaporan RKL-RPL ini bertujuan untuk menanggulangi, meminimalisir dampak negatif yang timbul pada saat kegiatan operasional seperti pencemaran atau kerusakan lingkungan dan menghindari konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitar maka dilakukan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan pemantauan

With the operation of PLTA Lau Gunung in 2020, IME has procured, installed and maintained HSE equipment to ensure that the power plant area has followed the appropriate HSE protocol. IME also conducts safety briefings, safety induction, and K3 training for all employees working at the project site so that they can always be careful in maintaining work safety. In addition, the HSE division also routinely carries out safety patrols to create a safe work environment.

RPSL periodically conducts hazard identification and risk assessment in the generating area to determine the potential hazards that exist and can assess the risks and levels of hazards as well as determine prevention and counter measures. This is also done through routine safety patrol activities. Referring to Law No. 1 of 1970 article 9, safety induction activities are carried out as a form of information delivery that aims to provide information about potential hazards, occupational safety and health information, applicable regulations, and procedures in an emergency to visitors/guests and new employees.

Important announcements concerning occupational safety, health and work activities are routinely conveyed to employees through safety briefings and including hazard warnings. To protect the safety and health of workers from the risk of hazards in the workplace, the fulfillment of Personal Protective Equipment (PPE) is carried out on a regular basis for all employees, visitors / guests and the renewal of safety signs as a form of hazard control in the workplace.

Both companies carry out routine reports on Environmental Management Plans (RKL) and Environmental Monitoring Plans (RPL) per semester (6 months). This RKL-RPL reporting aims to mitigate and minimize negative impacts that arise during operational activities such as pollution or environmental damage, and to avoid conflicts with communities and other activities in the vicinity. The reports comply with the Company's quality standards and comply with the applicable regulations, namely Government

lingkungan hidup (RPL) secara berulang dan periodik agar sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan, pelaporan ini juga sebagai bentuk ketaatan hukum memenuhi peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup pasal 32 ayat (1). Pengurusan izin peralatan dan uji riksa berkala peralatan juga dilakukan untuk memastikan kelayakan peralatan berdasarkan syarat dan standar yang ditentukan pemerintah.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Masyarakat menjadi pihak yang turut berperan besar dalam mendukung terwujudnya bisnis Perusahaan yang berkelanjutan. Untuk itu, Perusahaan menjadikan komitmen dan upaya membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat sebagai bagian dari fokus utama Perusahaan dengan senantiasa menghormati nilai, norma, dan budaya masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional Perusahaan dan mendukung terciptanya daya mutu hidup masyarakat yang lebih baik.

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait pada pengembangan sosial kemasyarakatan dilaksanakan Perusahaan dengan berfokus pada langkah-langkah nyata pembangunan kesejahteraan masyarakat, baik fisik maupun non fisik. Seluruh kegiatan yang diselenggarakan dalam program ini oleh Perusahaan senantiasa dipastikan dapat berjalan tepat sasaran dan mampu membawa nilai tambah dan manfaat yang berguna bagi masyarakat dengan tetap mematuhi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen Perusahaan untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bidang ini dijalankan melalui Nusantara Care yang telah dibentuk sejak tahun 2010 dan menjadi program yang telah terintegrasi dengan entitas anak Perusahaan. Keberadaan Nusantara Care diharapkan dapat mendukung terciptanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat pada setiap area di mana proyek berada.

Regulation No. 27 of 1999 concerning Environmental Impact Analysis, article 32 paragraph (1). Equipment permits and periodic equipment check-ups are also carried out to ensure the appropriateness of equipment based on the requirements and standards set by the government.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT ASPECT

The community plays a major role in supporting the creation of sustainable business for the Company. The Company makes a commitment to build good and harmonious relationships with the communities living around the Company's operational areas. This is achieved by respecting the values, norms and culture of the communities and supporting the creation of a better quality of life for them.

SOCIAL RESPONSIBILITY POLICIES ON THE SOCIAL AND COMMUNITY ASPECT

The Corporate Social Responsibility program on social and community development is carried out by the Company, focusing on concrete steps to develop community welfare, physically and non-physically. All activities carried out by the Company in this program are expected to be right on the target and be able to bring added values and benefits to the community while still complying with the prevailing laws and regulations.

The Company's commitment to the Corporate Social Responsibility program implementation in this field is carried out through Nusantara Care, which has been established since 2010 and has become an integrated program with other subsidiaries. Nusantara Care is expected to support the improvement of welfare and empower the community in every project's working area.

**PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN****CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM
RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY
DEVELOPMENT**

Sambungan Listrik Gratis dari RPSL
Free Electricity Connection from RPSL

Bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Barat (Kalbar), Manajemen PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) bekerja sama untuk menghadirkan listrik kepada masyarakat melalui program bantuan sambungan listrik yang berfokus pada pemberian sambungan listrik untuk 81 rumah warga yang berlokasi di Desa Wajok Hulu Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

Bantuan diberikan pada 16 Januari 2020 dengan penyerahan dilakukan secara simbolis. Dengan adanya bantuan penyambungan listrik gratis bagi rumah-rumah yang masih belum memiliki aliran listrik ini, kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dapat meningkat lebih baik dan dapat meminimalisir adanya sambungan listrik liar yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Together with PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Regional Main Unit (UIW) West Kalimantan (Kalbar), the management of PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) worked together to bring electricity to the community through an electricity connection assistance program that focused on providing electricity connections for 81 residential houses in Wajok Hulu Village, Jungkat District, Mempawah Regency and Kubu Raya Regency, West Kalimantan.

The support was given on January 16, 2020 with a symbolic handover. With the assistance of free electricity connection for houses without electricity, the welfare and economy of the community could improve and it could minimize the existence of illegal electricity connections that endangered the safety of the community.





BSD Tol Tanggap Bencana Banjir
BSD Tol's Quick Response to Floods

Pada 23 Januari 2020, Manajemen PT Bintaro Serpong Damai (BSD Tol) memberikan bantuan untuk warga sebagai bentuk kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat yang tertimpa musibah bencana banjir. Bantuan yang diberikan dalam bentuk paket peralatan sekolah untuk anak, karpet masjid, tempat sampah besar, lampu penerangan jalan dan bahan material untuk membuat tempat singgah bagi korban pengungsian disalurkan kepada warga RT 01 & RT 05, RW 13, Kampung Gedong, Kelurahan Jombang, Tangerang Selatan yang berada di sekitar area tol.

On January 23, 2020, the management of PT Bintaro Serpong Damai (BSD Tol) provided assistance to residents as a form of the Company's concern for communities affected by floods. Assistance in the form of school equipment packages for children, mosque carpets, large trash cans, street lighting and materials to make a shelter for displaced victims was distributed to residents of RT 01 & RT 05, RW 13, Kampung Gedong, Jombang Village, South Tangerang, located around the toll area.



**Nusantara Care & Yayasan Pustaka Kelana (YPK) Gelar Pelatihan Jurnalistik**

Nusantara Care and Pustaka Kelana Foundation (YPK) Organized A Journalistic Training

Melalui Nusantara Care, Perusahaan bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Kelana (YPK) mengadakan program pelatihan menulis. Program tersebut terbagi dalam 4 (empat) sesi yang diselenggarakan sejak 11 Januari hingga 8 Februari 2020. Kegiatan ini mengangkat tema "Menulis Itu Menyenangkan" dengan topik khusus "Penulisan Jurnalistik" dengan mengambil lokasi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Adanya kegiatan ini diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi para siswa, terutama untuk menambah pengetahuan mereka terkait proses produksi sebuah informasi hingga menjadi konten media. Selain itu, dalam kegiatan ini, mereka diberikan ilmu untuk belajar serta mengasah keterampilan bahasa yang mereka miliki agar bisa bersikap lebih kritis dalam melihat dan memahami sebuah pemberitaan.

Through Nusantara Care, the Company in collaboration with the Pustaka Kelana Foundation (YPK) held a writing training program. The program was divided into 4 (four) sessions, which were held from 11 January to 8 February 2020. This activity carried the theme "Writing is Fun" with a special topic "Journalistic Writing" taking place at the Library of the Ministry of Education and Culture.

This activity was expected to bring great benefits to students, especially in regard to increasing their knowledge of media journalism. In addition, this activity, provided the students with the opportunity to hone their language skills and develop a more critical appreciation and understanding of the news media.





Nusantara Care & WVI Tanggap Bencana Banjir Jakarta

Nusantara Care and WVI's Quick Response to Floods in Jakarta

Aksi tanggap bencana banjir yang terjadi di Jakarta turut dilakukan oleh Perusahaan melalui program Nusantara Care. Bersama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI), Perusahaan berkolaborasi memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban banjir Jakarta. Bantuan disalurkan melalui WVI pada 30 Januari 2020 dalam bentuk donasi paket kebutuhan sehari-hari, termasuk paket kesehatan dan pendidikan. Pemberian bantuan diselenggarakan secara simbolis oleh Deden Rochmawaty, GM Corporate Affairs sebagai perwakilan Perusahaan. Dengan adanya bantuan dan donasi ini, Perusahaan berharap dapat turut membantu serta meringankan beban para korban banjir, sekaligus menunjang hidup mereka paska bencana.

The Company has also taken action to respond to floods that occurred in Jakarta through the Nusantara Care program. In this program, the Company cooperates with Wahana Visi Indonesia (WVI) to collaborate in providing assistance to communities who are victims of the Jakarta floods. Assistance was distributed through WVI in the form of donations for daily necessities, including health and education packages on January 30, 2020. The donation was symbolically organized by Deden Rochmawaty, GM Corporate Affairs as the Company's representative. With this assistance and donations, the Company hopes to help and ease the burden on flood victims, as well as support their lives after the disaster.





Kelas Inspirasi Nusantara di SMP Nusa Indah
Nusantara Inspiration Class at Nusa Indah Junior High School (SMP)

Perhatian Perusahaan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan generasi muda tergambarkan melalui adanya kerja sama kembali dengan Yayasan Pustaka Kelana (YPK). Pada 6 Maret 2020, Perusahaan bersama dengan YPK menyelenggarakan kegiatan “Kelas Inspirasi” tahap pertama di SMP Nusa Indah, Tangerang. Kelas inspirasi sendiri adalah wadah edukasi yang diadakan dalam bentuk workshop/sosialisasi dengan tujuan untuk lebih menumbuhkan cita-cita kepada anak serta menjadi media pembelajaran bagi mereka untuk lebih mengenal karier dan profesi yang ada saat ini. Dalam kegiatan tersebut, seluruh siswa yang hadir diajak untuk dapat mengenal dan membangun imajinasi mereka, mengenal profesi dan karier di masa depan, sekaligus menumbuhkan dan memperkuat rasa percaya diri dalam mencapai cita-citanya.

PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM UNTUK KORBAN BENCANA

Perusahaan mewujudkan kepeduliannya kepada korban bencana tanah longsor dan banjir bandang di Wilayah Cigudeg, Jasinga, Kabupaten Bogor yang terjadi pada awal Januari 2020 dengan turut berkontribusi pada kegiatan perbaikan fasilitas umum bagi para korban bencana. Melalui program Nusantara Care, Perusahaan memberikan bantuan dalam bentuk kegiatan membangun sarana mandi cuci kakus (MCK) semi permanen, instalasi listrik dan penerangan di MCK, pemasangan toren air serta pembangunan bak sampah sebagai salah satu upaya untuk memulihkan kondisi di wilayah tersebut.

The Company's attention to efforts to improve the quality of education and knowledge of the younger generation is reflected in the collaboration with the Pustaka Kelana Foundation (YPK). On March 6, 2020, the Company together with YPK held the first stage of the “Inspiration Class” at SMP Nusa Indah, Tangerang. The inspiration class itself is an educational forum held in the form of workshops/outreach with the aim of fostering more aspirations in children and being a learning medium for them to get to know more about their current career and profession. In this activity, all students who were present were invited to be able to get to know and build their imaginations, to get to know the professions and careers in the future, as well as to grow and strengthen their self-confidence in achieving their goals.

PUBLIC FACILITIES CONSTRUCTION FOR NATURAL DISASTER VICTIMS

Through Nusantara Care program, Nusantara Infrastructure contributed in public facilities maintenance for landslide and massive flood victims at Cigudeg Area, Jasinga, Bogor Regency in early January 2020. The public facilities maintenance was conducted by building semi-permanent public bathrooms (MCK), electricity and lighting installation at the public bathrooms, water torrent installation, and garbage bins construction. This activity was one of the efforts to restore the area's condition.



Tol Makassar Peduli Kebersihan, Sediakan Fasilitas Cuci Tangan
Tol Makassar Provided Handwashing Facilities in Caring About Cleanliness

Masifnya penyebaran virus Covid-19 yang terus terjadi mendorong Manajemen Tol Makassar untuk mengajak masyarakat di sekitar area kantor dan operasional agar lebih menjaga kebersihan sebagai salah satu langkah efektif untuk menekan penyebaran. Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui penyediaan fasilitas cuci tangan *portable* oleh Manajemen Tol Makassar di 3 (tiga) lokasi berbeda. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan sabun, tisu dan tempat sampah sehingga dapat menjadi sarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kebersihan yang optimal dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Fasilitas cuci tangan pertama berlokasi di area Pasar Niaga Daya, Makassar, sementara 2 (dua) fasilitas lainnya ditempatkan di area Pasar Kampung Beru dan dekat Jembatan Penyeberangan orang (JPO) yang berada di depan SD Sudirman samping Menara Bosowa, Makassar. Penempatan fasilitas cuci tangan *portable* ini difokuskan di wilayah dengan titik pusat keramaian, yang bertujuan agar semakin banyak masyarakat yang dapat lebih menjaga kebersihan diri melalui langkah rajin mencuci tangannya ketika berada di luar rumah.

The massive spread of the Covid-19 virus that continues to occur encourages Makassar Toll Management to invite the community around the office and operational areas to maintain more cleanliness as an effective step to reduce the spread. This spirit is then manifested through the provision of portable hand washing facilities by the Makassar Toll Management in 3 (three) different locations. These facilities are equipped with soap, tissue and trash cans so that they can be an adequate means to support optimal hygiene in the face of the Covid-19 pandemic.

The first hand washing facility is located in the Pasar Niaga Daya area, Makassar, while 2 (two) other facilities are located in the Pasar Kampung Beru area and near the Pedestrian Bridge (JPO) which is in front of SD Sudirman next to the Bosowa Tower, Makassar. Placement of portable hand washing facilities is focused on areas with central points of the crowd, which aims to make more people more able to maintain personal hygiene through washing their hands when outside the home.



PT Inpola Meka Energi Peduli Covid-19
PT Inpola Meka Energi Cared For Covid-19

Perusahaan melalui PT Inpola Meka Energi (IME) menyalurkan bantuan berupa fasilitas penunjang kesehatan dan kebersihan untuk masyarakat sekitar area operasional yang berlokasi di Kecamatan Tanah Pinem. Bantuan ini sebagai bentuk dukungan Perusahaan dalam mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas.

Bantuan fasilitas penunjang kesehatan dan kebersihan ini diserahkan pada 31 Maret 2020 dalam bentuk fasilitas cuci tangan *portable* yang dilengkapi dengan sabun cair. Fasilitas tersebut diletakkan di Kantor Camat Tanah Pinem, Kantor Polisi sektor Tanah Pinem, dan Puskesmas Kuta Buluh Kecamatan Tanah Pinem. Selain itu, pada kesempatan yang berbeda, Perusahaan melalui IME memberikan bantuan kepada Kepala Desa Tanah Pinem dalam bentuk fasilitas cuci tangan portable, sabun cair, cairan disinfektan, serta 5 set Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas penyemprot disinfektan seperti kaca mata pelindung, masker medis dan non medis, sarung tangan, jas hujan dan suplemen vitamin C pada 2 April 2020. Di samping dua daerah tersebut, terdapat daerah lain yang juga menerima bantuan serupa dari Perusahaan, yakni Desa Kuta Buluh, Desa Kuta Gamber, Desa Kempawa serta Desa Pamah yang didistribusikan pada 6-7 April 2020 kepada masing-masing kepala desa.

The Company, through PT Inpola Meka Energi (IME) distributes assistance in the form of health and hygiene support facilities for the community around the operational area located in Tanah Pinem District. This assistance is a form of support from the Company in preventing the spread of COVID-19..

This health and hygiene support facility assistance was handed over on March 31, 2020 in the form of a portable hand washing facility equipped with liquid soap. These facilities are located at the Tanah Pinem Sub-district Office, the Tanah Pinem Sector Police Station, and the Kuta Buluh Community Health Center, Tanah Pinem District. In addition, on different occasions, the Company through IME provided assistance to the Village Head of Tanah Pinem in the form of portable hand washing facilities, liquid soap, disinfectant liquid, and 5 sets of Personal Protective Equipment (PPE) for disinfectant sprayers such as protective glasses, masks medical and non-medical, gloves, raincoats and vitamin C supplements on April 2, 2020. In addition to these two areas, there are other areas that have also received similar assistance from the Company, namely Kuta Buluh Village, Kuta Gamber Village, Kempawa Village and Pamah Village which is distributed on 6-7 April 2020 to each village head.

Guna menghadirkan cakupan pendistribusian bantuan fasilitas penunjang kesehatan dan kebersihan serupa yang semakin luas dan merata ke berbagai daerah, Manajemen IME juga menyalurkan bantuan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi pada 17 April 2020 dengan tujuan untuk diberikan kepada masyarakat Kabupaten Dairi lainnya. Seluruh bantuan tersebut menjadi bentuk langkah nyata kepedulian Perusahaan untuk mendukung pencegahan penyakit akibat virus Covid-19 yang dapat menjangkiti masyarakat.

In order to provide a wider and more even distribution coverage of health and hygiene support facilities to various regions, IME Management distributed assistance to other Dairi Regency communities on April 17, 2020 .. All of this assistance shows the Company's concern to prevent the spread of the Covid-19 virus and other diseases that can infect the community.



Bantuan Sembako dari Manajemen Tol Makassar untuk Panti Asuhan Al-Hijrah dan Annur Muhasin
Staple Food Aid From Tol Makassar Management For Al-Hijrah and Annur Muhasin Orphanages

Dalam rangka mendukung terpenuhinya kebutuhan sehari-hari masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Manajemen Tol Makassar menyalurkan bantuan dalam bentuk pendistribusian sembako. Pihak yang menjadi tujuan penyaluran bantuan ini adalah dua panti asuhan yang berada di sekitar area operasional, yakni Panti Asuhan Al-Hijrah dan Annur Muhasin. Bantuan diberikan pada 9 April 2020 dalam bentuk paket kebutuhan pokok.

In order to support the fulfillment of people's daily needs in the midst of the Covid-19 pandemic, Makassar Toll Management has distributed assistance in the form of distributing basic necessities. The parties to which this aid is distributed are two orphanages located around the operational area, namely the Al-Hijrah and Annur Muhasin orphanages. The donation was given on April 9, 2020 in the form of basic necessities packages.



Fasilitas Kebersihan PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)
Hygiene Facilities For PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) yang merupakan unit bisnis Perusahaan di sektor air bersih turut menunjukkan dukungan serta kepedulian pada upaya mencegah penyebaran Covid-19. Manajemen SCTK bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah Desa Cijeruk mengadakan kegiatan CSR - Tanggap Covid-19 pada 24 April 2020 berupa penyaluran fasilitas kebersihan berbentuk alat sprayer disinfektan. Bantuan diserahkan langsung oleh tim SCTK kepada perwakilan desa untuk masyarakat sekitar area operasional.

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK), which is one of the Company's business units in the clean water sector, also showed its support and concern for Covid-19 prevention efforts. SCTK Management cooperated with the Regional Government of Cijeruk Village to hold CSR activity - Covid-19 Response on April 24, 2020, such as distributing cleaning facilities, namely disinfectant sprayers. The supports were handed over directly by the SCTK team to village representatives for communities around the operational area.



Nusanantara Care & Komunitas Kami Cinta Indonesia (KCI) Tanggap Covid-19
Nusanantara Care and Kami Cinta Indonesia (KCI) Community Response to Covid-19

Tidak hanya memberi dampak pada aspek kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 juga turut mempengaruhi aspek kehidupan sosial masyarakat dengan salah satu

Not only does the Covid-19 pandemic have an impact on public health, but it also affects social life. One of the impacts is the loss of income which then makes it difficult

dampaknya ialah hilangnya penghasilan yang kemudian menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berangkat dari situasi tersebut, Perusahaan bersama dengan Komunitas Kami Cinta Indonesia (KCI) – Kami Peduli menyelenggarakan program "Nusantara Care -Tanggap-Covid-19" pada 22-23 April 2020 di beberapa wilayah di Jakarta. Melalui program tersebut, bantuan kebutuhan pokok disalurkan kepada warga pra-sejahtera dan diharapkan membantu masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

for people to meet their daily needs. Based on this situation, the Company, together with the We Love Indonesia Community (KCI) - We Care, held the "Nusantara Care-Responses-to-Covid-19" program on April 22-23, 2020 in several areas in Jakarta. Through this program, assistance for basic necessities was distributed to underprivileged people in the hope that it could help the community to meet their daily needs.



Tol BSD dan Sari Roti Mendukung Pemenuhan Gizi Masyarakat melalui Penyaluran Bantuan Kebutuhan Pokok dan Roti

BSD Toll and Sari Roti Supported the Nutrition Fulfillment of the Public through the Distribution of Basic Needs and Bread

Adanya Pandemi Covid-19 mendorong Perusahaan untuk terus melakukan berbagai kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk kepedulian Perusahaan. Salah satu unit bisnis Perusahaan yakni PT Bintaro Serpong Damai (BSD) bersama dengan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk atau yang biasa dikenal dengan Sari Roti memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok sehari-hari serta roti kepada 250 kepala keluarga atau 1000 warga Kampung Pasar Jombang, Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan (RT 3/RW 13) yang berada di sekitar Area Operasional Tol BSD.

In the midst of Corona Virus (Covid-19) Pandemic outbreak, the Company through Nusantara Care continuously carried out various Corporate Social Responsibility (CSR) activities as a form of concern and contribution. This time, the Company's business unit, PT Bintaro Serpong Damai (BSD), together with PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, commonly known as Sari Roti, distributed basic daily needs and thousands loaves of bread to 250 families near BSD Toll Operational Area on May 8, 2020. This activity was a form of support and concrete action of the Company's concern in supporting the fulfillment of community nutrition amidst Covid-19 Pandemic.

Kegiatan yang diselenggarakan pada 8 Mei 2020 ini menjadi bentuk dukungan dan aksi nyata kepedulian Perusahaan dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Bantuan didistribusikan langsung oleh perwakilan warga setempat kepada masing-masing kepala keluarga untuk menghindari adanya kerumunan massa.

This activity, which was held on May 8, 2020, is a form of support and concrete action of the Company's concern in supporting the fulfillment of community nutrition in the midst of the Covid-19 pandemic. The aid was distributed directly by representatives of local residents to each head of the family to avoid crowds.



Tol BSD Bagikan Sembako dan Fasilitas Kebersihan ke Masyarakat Sekitar
BSD Toll Distributed Staple Foods and Hygiene Facilities to Nearby Communities

PT Bintaro Serpong Damai (BSD) yang merupakan salah satu unit bisnis Perusahaan di sektor tol bersama dengan Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) BSD menyelenggarakan kegiatan bakti sosial pada 15 Mei 2020 dalam bentuk penyaluran bantuan bahan makanan pokok sehari-hari. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian Perusahaan kepada masyarakat yang terdampak COVID – 19.

PT Bintaro Serpong Damai (BSD), which is one of the Company's business units in the toll sector together with the BSD Highway Patrol Unit (PJR), held social service activities on May 15, 2020 in the form of distributing daily staple food aid. This activity is a form of the Company's concern for the people affected by COVID-19.

Di kesempatan yang berbeda, Manajemen Tol BSD pada 19 Mei 2020 memberikan sejumlah fasilitas kebersihan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai bentuk kepedulian Perusahaan untuk menciptakan kebiasaan selalu menjaga kebersihan lingkungan di lingkup masyarakat.

On different occasions, the BSD Toll Management on May 19 2020 provided a number of cleaning facilities to the Environmental Service of the South Tangerang City Government as a form of the Company's concern to create a habit of always maintaining a clean environment within the community.



Pemberian Fasilitas dan Sosialisasi Cuci Tangan oleh Perusahaan dan IME
Facilities Granting and Dissemination of Handwashing Activity by the Company and IME

Fokus Perusahaan pada upaya menekan penyebaran virus Covid-19 agar tidak semakin meluas dilakukan dengan kolaborasi bersama sejumlah organisasi untuk mengajak masyarakat agar dapat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan. Perusahaan melalui Nusantara Care bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) menyediakan fasilitas cuci tangan umum di berbagai area publik di wilayah Jakarta sejak Maret 2020 sebagai bagian dari program tanggap Pandemi Covid-19

Penyediaan fasilitas cuci tangan juga dilakukan oleh entitas anak di sektor energi terbarukan, PT Inpol Meka Energi (IME). Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, IME memberikan fasilitas cuci tangan *portable* dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk penyebaran spanduk dan poster yang ditempatkan di sejumlah titik. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat mampu menjalankan adaptasi pada kebiasaan baru, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan.

The Company's focus on efforts to reduce the spread of the Covid-19 virus so that it does not become more widespread is carried out in collaboration with a number of organizations to invite the public to continue to adopt a clean and healthy lifestyle by diligently washing their hands. The company through Nusantara Care in collaboration with Wahana Visi Indonesia (WVI) has provided public hand washing facilities in various public areas in the Jakarta area since March 2020 as part of the Covid-19 Pandemic response program

Hand washing facilities are also provided by a subsidiary in the renewable energy sector, PT Inpol Meka Energi (IME). Together with the Dairi Regency Government, North Sumatra, IME provides portable hand washing facilities and conducts outreach to the public in the form of distributing banners and posters placed at a number of points. This socialization aims to invite people to be able to adapt to new habits, so that it is expected to help people understand the importance of maintaining cleanliness and health.



Perusahaan Mendukung Peningkatan Kompetensi Guru Nasional The Company Supported the Improvement of National Teachers' Competence

Sebagai salah satu langkah kepedulian Perusahaan pada langkah peningkatan kualitas masa depan pendidikan Indonesia, Perusahaan melalui Nusantara Care bekerja sama dengan Kampus Guru Cikal (KGC) menyelenggarakan program "Bantu Kuatkan Guru" untuk mendukung para guru dan beberapa sekolah yang terdampak Covid-19. Program dilaksanakan pada 5 Oktober hingga 30 Oktober 2020 dengan tujuan untuk membantu para guru dan murid di beberapa sekolah meningkatkan kualitas kompetensinya dan memastikan kesempatan belajar mengajar tetap terlaksana dengan baik meski di tengah pandemi Covid-19.. Program tersebut berfokus pada upaya mendukung kegiatan belajar mengajar secara virtual; pemberian bantuan sembako untuk para guru; serta program pelatihan dan pendampingan virtual untuk guru guna meningkatkan kompetensi mereka.

As one of the Company's steps to improve the quality of the future of Indonesian education, the Company, through Nusantara Care, in collaboration with the Cikal Teacher Campus (KGC) held a "Help Strengthen Teachers" program to support teachers and several schools affected by Covid-19. The program was implemented from 5 October to 30 October 2020 with the aim of helping teachers and students in several schools improve the quality of their competencies and ensure that teaching and learning opportunities are carried out well even in the midst of the Covid-19 pandemic. The program focuses on supporting virtual teaching and learning activities; providing basic food assistance for teachers; as well as virtual mentoring and training programs for teachers to improve their competence.





Perusahaan Dukung Kebudayaan Lokal Seni Memahat The Company Supported the Local Culture of Sculpting

Selain pada aspek sosial dan masyarakat, Perusahaan juga menaruh perhatian pada aspek kebudayaan, terutama pada upaya pelestarian kebudayaan nasional. Hal tersebut kemudian diwujudkan dengan pemberian dukungan pada budaya karya seni memahat yang dilakukan oleh pengrajin Suku Kamoro, salah satu suku dari Papua. Perusahaan melalui Nusantara Care melakukan upaya dukungan penuh pada pemberdayaan UMKM oleh pengrajin Suku Kamoro sebagai langkah untuk menjaga kebudayaan lokal di Timur Indonesia.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PRODUK DAN PELANGGAN

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Produk dan Pelanggan

Perusahaan menyadari keberadaan pelanggan menunjang Perusahaan menjalankan aktivitas usaha serta mencapai keberlanjutan dan keberlangsungan bisnis. Berangkat dari hal tersebut, Perusahaan senantiasa mengedepankan pemenuhan tanggung jawabnya sosial perusahaan terkait produk dan pelanggan untuk memastikan para pelanggan dapat memperoleh pelayanan yang berkualitas dan memuaskan. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Produk dan Pelanggan diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pada aspek pelayanan untuk memenuhi harapan pelanggan serta menjalin dan memelihara hubungan yang baik dalam jangka panjang.

Apart from social and community aspects, the Company also pays attention to cultural aspects, especially in efforts to preserve national culture. This was then realized by providing support for the culture of sculpting art performed by craftsmen of the Kamoro Tribe, one of the tribes from Papua. The company, through Nusantara Care, is making efforts to fully support the empowerment of SMEs by Kamoro Tribe craftsmen as a step to maintain local culture in Eastern Indonesia.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE PRODUCTS AND CUSTOMERS

Corporate Social Responsibility Related to Products and Customers

The Company realizes that customers exist to support it in carrying out business activities and achieving business sustainability. As such, the Company prioritizes the fulfillment of its corporate social responsibilities related to products and customers to ensure that customers can get quality and satisfying services. The implementation of Corporate Social Responsibility program related to Products and Customers is realized through various efforts, including:

1. Improving the quality of service to meet customers' expectations, establishing and maintaining good long-term relationships.

2. Memastikan produk dan jasa memiliki daya mutu yang optimal dan prima sesuai dengan standar yang ada, baik nasional maupun internasional.
3. Penyampaian informasi yang akurat, jelas, dan sesuai kepada pelanggan terkait produk dan jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan.
4. Menghadirkan sarana bagi pelanggan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pengaduan, keluhan, hingga masukan dan saran terkait produk dan jasa Perusahaan.
5. Menyempurnakan kualitas layanan berdasarkan hasil yang diperoleh dari survei kepuasan pelanggan.

Standarisasi ISO

The International Organization for Standardization (ISO) merupakan sebuah badan organisasi non-pemerintah yang berperan menetapkan standar internasional pada berbagai bidang, seperti industrial dan komersial dunia. Penetapan standar dilakukan dengan melibatkan wakil anggota yang berasal dari 130 negara dan standar tersebut selalu dijadikan rujukan.

Perusahaan pun turut menjalankan pengembangan pada sistem manajemen dan produk dengan memastikan seluruhnya telah sesuai standar dari ISO. Hal tersebut dilakukan agar kepuasan serta kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan Perusahaan dan entitas anak dapat terus terjaga baik.

Standarisasi ISO oleh Perusahaan telah diterapkan di seluruh sektor usaha yang dimiliki. Pada sektor jalan tol, Perusahaan telah memiliki sertifikat ISO 45001:2018 sejak tahun 2020 yang merupakan standar bertaraf internasional yang menetapkan berbagai persyaratan untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau dikenal dengan SMK3. Sertifikat yang setiap tahunnya di evaluasi oleh badan sertifikasi *surveillance audit* ini, terintegrasi dengan ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 untuk ruas tol yang dikelola oleh anak usaha Perusahaan, yakni BSD, MMN, serta JTSE. Selain itu, per 3 (tiga) tahun sekali, Perusahaan senantiasa berupaya untuk memperbarui sertifikat yang telah dimiliki, untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan. Di sepanjang tahun 2020, MUN dan ketiga entitas anak Perusahaan, yakni BSD, MMN, dan JTSE telah menerapkan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan (K3L) dengan baik.

2. Ensuring that products and services have optimal and prime quality in accordance with the prevailing national and international standards.
3. Delivering accurate, clear and appropriate information to the customers regarding the products and services provided by the Company.
4. Providing facilities for the customers via a medium of communication to submit complaints, inputs and suggestions related to the Company's products and services.
5. Improving service quality based on the results from customer satisfaction surveys.

ISO Standardization

The International Organization for Standardization (ISO) is an international organization for standardization that sets international standards in various fields, such as global industrial and commercial fields. The setting of standards is carried out by representative members from 130 countries and the standards always serve as guidelines.

The Company also carries out the development of its management system and products by ensuring that they comply with ISO standards. This step is taken to maintain customer satisfaction and comfort in using the products and services of the Company and its subsidiaries.

ISO standardization by the Company has been implemented in all its business sectors. In the toll road sector, the Company has had ISO 45001: 2018 certificate since 2020 which is an international standard that sets out various requirements for occupational health and safety management systems, known as SMK3. This certificate, which is evaluated annually by the surveillance audit certification body, is integrated with ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015 for toll roads managed by the Company's subsidiaries, namely BSD, MMN, and JTSE. In addition, every 3 (three) years, the Company always strives to renew the certificates it already has, to optimize the Company's performance. Throughout 2020, MUN and the three subsidiaries, namely BSD, MMN, and JTSE have properly implemented the principles of Health and Safety and the Environment (K3L).

Kepatuhan terhadap Standarisasi Layanan

Kepatuhan Perusahaan pada standar dan aturan yang berlaku tidak hanya dilakukan terhadap aspek standarisasi ISO, namun juga terhadap peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Perusahaan memastikan bahwa dalam melakukan pengelolaan jalan tol senantiasa mengutamakan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna. Untuk itu, Perusahaan telah menerapkan berbagai kebijakan serta mematuhi standar petunjuk yang tepat dan sesuai dalam upayanya menjalankan operasional seluruh ruas jalan tol yang dimiliki, antara lain:

1. Patroli jalan secara teratur setiap 30 menit;
2. Tim Tanggap Darurat harus tiba di lokasi kecelakaan dalam waktu 30 menit sejak laporan diterima;
3. Jasa derek tiba dalam waktu 30 menit sejak permintaan diterima dan memberikan layanan derek gratis sampai gerbang tol terdekat;
4. Kejelasan marka jalan dijaga pada level 100% (standar 80%);
5. Penerangan jalan tol berfungsi 100% (standar 80%);
6. Seluruh reflektor berfungsi dengan efisiensi 100%;
7. Waktu tempuh 2,8 kali lebih cepat dibandingkan jalan-jalan arteri;
8. Permukaan jalan tol 100% bebas dari lubang; dan
9. Informasi dan komunikasi kondisi lalu lintas (*spanduk/board/Variable Message Sign (VMS)*) tersedia di akses masuk dan di ruas jalan tol.

Survei Kepuasan Pelanggan

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan, Perusahaan melalui entitas anak tidak langsung yakni PT Makassar Metro Network (MMN) dan PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan secara berkala setiap tahun. Dalam melaksanakan survei, digunakan beberapa indikator yang terdapat dalam *Standard Operational Procedure (SOP)* terkait kepuasan pelanggan.

Compliance With Standardization of Service

The Company's compliance to the prevailing standards and regulations applies not only to ISO standardization, but also to the prevailing laws, namely the Minister of Public Works Regulation No. 16/PRT/M/2014 concerning Toll Road Minimum Service Standards and Minimum Service Standards (SPM) from the Toll Road Regulatory Agency (BPJT).

The Company ensures that, in carrying out toll road management, it always prioritizes safety and comfort for users. To that end, the Company implements various policies and adheres to the prevailing guideline standards to carry out the operation of all toll roads it owns, including:

1. Regular road patrol every 30 minutes;
2. Emergency Response Team must arrive at accident site within 30 minutes after the report received;
3. Crane services arrive within 30 minutes after the request received and provide free crane services until the nearest toll gate;
4. Clarity of road markings maintained at 100% level (80% standard);
5. Toll road lighting functions 100% (80% standard);
6. All reflectors function with 100% efficiency;
7. Travel time is ± 2.8 times faster than arterial roads;
8. Toll road surface 100% free of holes;
9. Information and communication on traffic conditions (*banners/boards/VMS*) are available at the entrance and on toll roads.

Customer Satisfaction Survey

To determine the level of customer satisfaction regarding the services provided, the Company through its indirect subsidiaries, namely PT Makassar Metro Network (MMN) and PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), conducts regular customer satisfaction survey every year. In performing the survey, several indicators are used based on the *Standard Operational Procedure (SOP)* related to customer satisfaction.

Pada tahun 2020, survei kepuasan pelanggan telah dilaksanakan dengan melibatkan pengguna jalan tol sebagai peserta survei. Hasil yang diperoleh dari survei tersebut untuk tingkat kepuasan pelanggan di Tol BSD mencapai 93% dan Tol MMN-JTSE 85%. Selanjutnya, Perusahaan akan menggunakan hasil tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki, menyempurnakan, serta meningkatkan kualitas dari seluruh pelayanan yang diberikan di setiap lini operasional jalan tol.

Layanan Pengaduan dan Keluhan

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan, dan hal tersebut salah satunya diwujudkan secara nyata melalui penyediaan sarana layanan pengaduan dan keluhan untuk memenuhi hak pelanggan dalam menyampaikan keluhan terkait jasa dan pelayanan yang diberikan Perusahaan. Seluruh pengaduan hingga pertanyaan yang masuk dipastikan oleh Perusahaan akan diproses dan ditindaklanjuti. Selain untuk memperbaiki pelayanan kepada pelanggan, layanan ini juga menjadi sarana penting bagi Perusahaan untuk dapat mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan dari pelayanannya, sehingga ke depannya Perusahaan dapat menyempurnakan kualitas pelayanan dan dapat semakin memberikan layanan yang memuaskan.

Layanan pengaduan dan keluhan tersebut dihadirkan oleh Perusahaan melalui entitas-entitas anak yang disosialisasikan dengan memanfaatkan berbagai media publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui akses untuk menyampaikan pengaduan hingga keluhannya.

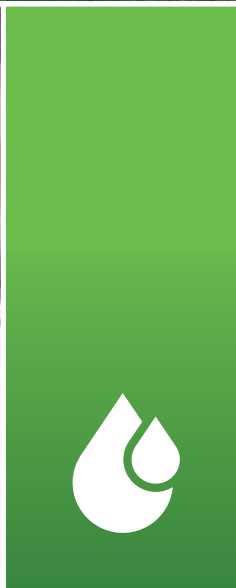
In 2020, a customer satisfaction survey was conducted in December 2020 by involving toll road users as survey participants. The results obtained from the survey for customer satisfaction level at BSD Toll reached 93% and MMN-JTSE Toll reached 85%. Furthermore, the Company will use these results as evaluation materials to improve and refine the quality of all services in every line of toll road operations.

Complaints Services

The Company commits to providing the best service to customers and manifests it in a concrete way through the provision of complaints service to fulfill the customers' rights in submitting complaints related to the Company's services. All complaints and inquiries received are confirmed and followed up by the Company. In addition to improving services to the customers, this service is an important mean for the Company to find out elements that need improvement from its services, so that in the future the Company can improve its service quality and provide more satisfying services.

The Company establishes the complaints service through associated subsidiaries and by using public medias, making it easier for the public to find and submit their complaints.

Layanan Call Center Sektor Jalan Tol Call Center Services Toll Road Sector	Nomor Telepon Phone Number
Tol PT Makassar Metro Network (MMN) dan PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) Tol PT Makassar Metro Network (MMN) and PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)	1-500-722 08114139900
Tol PT Bintaro Serpong Damai (BSD) Tol PT Bintaro Serpong Damai (BSD)	14080
Ruas Tol Jakarta Lingkar Baratsatu West Ring Jakarta Toll Road One	0816974974
Layanan Call Center Sektor Air Call Center Services Water Sector	808 880 123
PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)	(021) 722 9045
PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)	(0254) 206 886
PT Inpolo Meka Energi (IME)	(021) 8778 4135
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)	(0561) 8 82013







Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

**SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN TAHUNAN 2020
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Nusantara Infrastructure Tbk 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**STATEMENT LETTER BOARD OF
COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
ABOUT THE RESPONSIBILITY OF
ANNUAL REPORT 2020
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK**

We, the undersigned, hereby confirm that all the information in the Annual Report of PT Nusantara Infrastructure Tbk for the year 2020 has been presented in full, and the Company accepts full responsibility for all contents.

Thus, this statement letter is made truthfully.

**DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS**



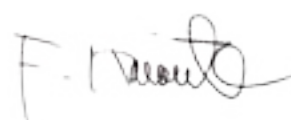
Jose Ma. K. Lim
Komisaris Utama
President Commissioner



Rodrigo E. Franco
Komisaris
Commissioner

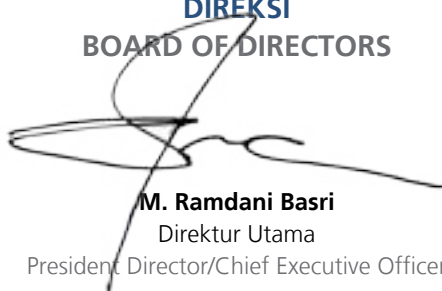


Letjend TNI (Purn) Johnny J. Lumintang
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Farid Harianto
Komisaris
Commissioner

**DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS**



M. Ramdani Basri
Direktur Utama
President Director/Chief Executive Officer



Danni Hasan
Direktur
Director

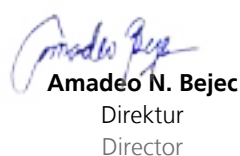
Ridwan Irawan
Direktur
Director



Benny S. Santoso
Direktur
Director



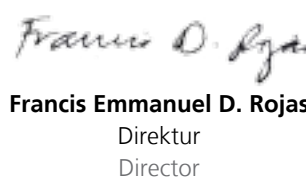
Denn Charly G. Espanola
Direktur
Director



Amadeo N. Bejec
Direktur
Director



Christopher Daniel C. Lizo
Direktur
Director



Francis Emmanuel D. Rojas
Direktur
Director

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statement

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

PT Nusantara Infrastructure Tbk
dan entitas anaknya/and its subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

***Consolidated financial statements as of December 31, 2020 and
for the year then ended with independent auditors' report***

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Konsolidasian.....	4-5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8-140	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
 TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
 LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2020**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
 REGARDING THE RESPONSIBILITY
 THE CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2020**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
 DAN ENTITAS ANAKNYA**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama :	Muhammad Ramdani Basri	1. Name :	
Alamat Kantor :	Equity Tower Lantai 38	Office Address :	
	Sudirman Central Business District (SCBD)		
	Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Lot 9, Jakarta 12190		
Alamat Domisili :	Jl. Mendut No. 3, Menteng, Jakarta Pusat	Residential Address :	
Nomor Telepon :	+6221-515 0100	Telephone Number :	
Jabatan :	Direktur Utama/ President Director	Position :	
2. Nama :	Amadeo N. Bejoc	2. Name :	
Alamat Kantor :	Equity Tower Lantai 38	Office Address :	
	Sudirman Central Business District (SCBD)		
	Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Lot 9, Jakarta 12190		
Alamat Domisili :	Kemang Village Residence Unit 2202	Residential Address :	
	Jl. Pangeran Antasari No.36		
	Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan		
Nomor Telepon :	+6221-515 0100	Telephone Number :	
Jabatan :	Direktur/ Director	Position :	

menyatakan bahwa:

declare that:

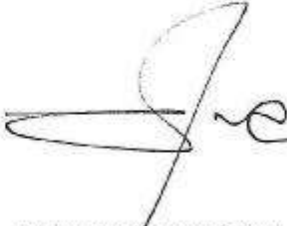
1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan;	1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia	2. The consolidated financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;	3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of the Company;
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material;	b. The consolidated financial statements of the Company do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material information or facts;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.	4. We are responsible for internal control system of the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/ For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 28 Mei 2021/ Jakarta, May 28, 2021


Muhammad Ramdani Basri
 Direktur Utama/ President Director




Amadeo N. Bejoc
 Direktur/ Director

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01319/2.1032/AU.1/06/0687-3/1/V/2021

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Nusantara Infrastructure Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 01319/2.1032/AU.1/06/0687-3/1/V/2021

**The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Nusantara Infrastructure Tbk**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Nusantara Infrastructure Tbk (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as "the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01319/2.1032/AU.1/06/0687-3/1/V/2021 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01319/2.1032/AU.1/06/0687-3/1/V/2021 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Nusantara Infrastructure Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwanto, Sungkoro & Surja

Agung Purwanto

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0687/Public Accountant Registration No. AP.0687

28 Mei 2021/May 28, 2021

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	366.324.551.448	4	590.392.899.081	Cash and cash equivalents
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual	43.850.751.128	5	59.833.735.184	Available-for-sale financial assets
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga	28.669.489.858	6a	27.773.654.022	Third parties
Pihak berelasi	72.000.000	35	72.000.000	Related party
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
Pihak ketiga	69.041.624.556	6b	42.175.033.743	Third parties
Pihak berelasi	57.714.918.400	35	39.745.276.456	Related parties
Piutang atas perjanjian konsesi jasa jangka pendek	4.622.595.229	13a	4.645.486.360	Short-term service concession arrangement receivables
Piutang sewa pembiayaan jangka pendek	14.405.217.420	12	-	Short-term finance lease receivables
Pajak dibayar di muka	10.920.713.900	19a	9.451.653.168	Prepaid tax
Persediaan	8.372.811.173	8	2.531.157.880	Inventories
Uang muka dan beban dibayar di muka	10.632.493.458	7	12.451.573.232	Advances and prepaid expenses
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	29.173.932.000	9	24.589.844.319	Restricted cash in banks
Jumlah Aset Lancar	643.801.098.570		813.662.313.445	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang atas perjanjian konsesi jasa	306.600.808.109	13a	301.117.876.202	Service concession arrangement receivables
Piutang sewa pembiayaan	386.703.358.022	12	-	Finance lease receivables
Klaim pengembalian pajak penghasilan	7.734.851.128	19a	-	Refundable corporate income taxes
Aset pajak tangguhan - neto	5.761.762.613	19e	6.356.325.441	Deferred tax assets - net
Investasi pada entitas asosiasi	851.442.477.438	10	831.314.424.532	Investment in associates
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp118.506.949.388 pada 31 Desember 2020 dan Rp98.713.727.863 pada 31 Desember 2019	126.481.334.438	11	451.458.308.398	Property, plant, and equipment - net of accumulated depreciation of Rp118,506,949,388 as of December 31, 2020 and Rp98,713,727,863 as of December 31, 2019
Aset takberwujud atas perjanjian konsesi - neto	3.343.417.531.148	13b	2.290.478.036.707	Intangible assets of service concession arrangement - net
Aset hak guna - neto	3.360.524.535	14	-	Right of use assets - net
Uang muka proyek dan pembelian aset tetap	108.275.495.241	7	290.205.570.818	Advances for projects and purchase of property, plant, and equipment
Aset takberwujud lainnya	58.995.370.933	15	58.995.370.933	Other intangible assets
Aset tidak lancar lainnya	4.108.780.574		33.811.552.833	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.202.882.294.179		4.263.737.465.864	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	5.846.683.392.749		5.077.399.779.309	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - Pihak ketiga	102.299.576.629	16	22.843.937.711	Trade payables - Third parties
Utang non-usaha - Pihak ketiga	38.553.579.392	17	32.177.466.597	Non-trade payables - Third parties
Beban akrual	161.019.708.427	18	308.345.408.931	Accrued expenses
Utang pajak	22.637.018.105	19b	23.697.612.752	Taxes payables
Pendapatan diterima di muka	3.583.830.237	20	5.946.204.795	Unearned revenues
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Liabilitas sewa	2.777.692.120	14	-	Lease liabilities
Utang pembiayaan konsumen	2.680.932.702	21	4.318.085.232	Consumer financing liabilities
Pinjaman jangka panjang	166.445.524.606	22	84.310.069.981	Long-term loans
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	499.997.862.218		481.638.785.999	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - net of current maturities:
Liabilitas sewa	17.080.715	14	-	Lease liabilities
Utang pembiayaan konsumen	1.326.971.616	21	2.923.274.220	Consumer financing liabilities
Pinjaman jangka panjang	1.838.418.598.811	22	1.268.364.887.007	Long-term loans
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	842.576.679	20	651.428.099	Long-term unearned revenues
Utang non-usaha - Pihak ketiga	10.964.082.597	17	-	Non-trade payables - Third parties
Jaminan pelanggan	3.265.983.571		2.866.845.999	Customer deposits
Liabilitas pajak tangguhan	67.352.088.060	19e	70.680.591.910	Deferred tax liabilities
Provisi pemeliharaan jalan tol jangka panjang	8.842.719.995	2p	8.284.000.324	Long-term toll road maintenance provision
Liabilitas imbalan pasca-kerja	60.547.539.716	36	48.203.142.503	Post-employment benefit liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.991.577.641.760		1.401.974.170.062	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	2.491.575.503.978		1.883.612.956.061	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to the Owners of Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp35 per saham Seri A dan Rp70 per saham Seri B				Share capital - par value of Rp35 per share Series A and Rp70 per share Series B
Modal dasar - 2 saham Seri A dan 80.999.999.999 saham Seri B				Authorized - 2 shares of Series A and 80,999,999,999 shares Series B
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A dan 17.710.708.193 saham Seri B	1.239.749.573.545	23	1.239.749.573.545	Issued and fully paid capital - 1 share Series A and 17,710,708,193 shares Series B
Tambahan modal disetor - neto	469.155.766.335	24	469.155.766.335	Additional paid-in capital - net
Modal saham yang diperoleh kembali	(84.522.927.500)	23	(84.522.927.500)	Treasury stock
Penghasilan komprehensif lain	(10.467.838.264)		(93.500.059)	Other comprehensive income
Komponen ekuitas lainnya	469.420.386.634	25	497.379.919.488	Other equity components
Saldo laba				Retained earnings
Sudah ditentukan penggunaannya	16.306.772.114	25	14.868.635.558	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	497.639.008.535		466.184.741.427	Unappropriated
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.597.280.741.399		2.602.722.208.794	Total Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity
Kepentingan nonpengendali	757.827.147.372	26	591.064.614.454	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas	3.355.107.888.771		3.193.786.823.248	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.846.683.392.749		5.077.399.779.309	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN DAN PENJUALAN				REVENUES AND SALES
Pendapatan usaha dan penjualan	517.203.734.662	28	630.172.697.946	Revenues and sales
Pendapatan usaha lainnya	21.200.516.115	28	18.905.252.329	Other operating revenues
Pendapatan konstruksi	1.031.715.055.184	29	943.516.814.193	Construction revenues
Jumlah	1.570.119.305.961		1.592.594.764.468	Total
BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN				DIRECT COSTS AND COST OF SALES
Beban langsung				
dan beban pokok penjualan	(200.985.987.479)	30	(214.590.751.681)	Direct costs and cost of sales
Beban konstruksi	(1.031.715.055.184)	29	(943.516.814.193)	Construction costs
Jumlah	(1.232.701.042.663)		(1.158.107.565.874)	Total
LABA BRUTO	337.418.263.298		434.487.198.594	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	(172.697.679.322)	31	(157.264.682.966)	General and administrative expenses
Beban operasional lainnya	(31.956.569.280)	32	(16.073.737.513)	Other operating expenses
LABA USAHA	132.764.014.696		261.148.778.115	PROFIT FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Penghasilan keuangan	23.397.762.152	33	33.231.820.770	Financial income
Beban keuangan	(61.632.049.506)	34	(70.082.067.284)	Financial cost
Bagian laba bersih entitas asosiasi	41.114.557.804	10	75.538.409.860	Share in net profit of associates
LABA SEBELUM PAJAK	135.644.285.146		299.836.941.461	PROFIT BEFORE TAX
(BEBAN)/PENGHASILAN PAJAK				TAX (EXPENSES)/BENEFIT
Kini	(25.789.021.172)	19c	(52.098.425.043)	Current
Tangguhan	2.766.621.630	19c, 19e	(42.371.782.887)	Deferred
JUMLAH BEBAN PAJAK	(23.022.399.542)		(94.470.207.930)	TOTAL TAX EXPENSES
LABA TAHUN BERJALAN	112.621.885.604		205.366.733.531	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	13.495.102	10	32.959.556	Share in other comprehensive income of associates
(Rugi)/laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(15.982.984.056)	5	3.278.560.832	Unrealized (loss)/gain on changes in fair value financial asset available-for-sale
Rugi aktuarial dari program imbalan pasca kerja	(1.101.504.038)		(3.583.282.096)	Actuarial loss from defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait	(32.680.608)		895.820.524	Related income tax
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(17.103.673.600)		624.058.816	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	95.518.212.004		205.990.792.347	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
		2020	Catatan/ Notes	2019
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
	Pemilik entitas induk	69.392.144.520		143.813.655.548
	Kepentingan nonpengendali	43.229.741.084	26	61.553.077.983
		112.621.885.604		205.366.733.531
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
	Pemilik entitas induk	57.939.481.847		144.018.947.092
	Kepentingan nonpengendali	37.578.730.157	26	61.971.845.255
		95.518.212.004		205.990.792.347
LABA PER SAHAM				
	Dasar	3,92	27	8,12
				EARNING PER SHARE Basic

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 December 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to the owners of the parent												
Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Modal saham yang diperoleh kembali/ Treasury stock	Penghasilan/(rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income/(loss)	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Saldo Laba/Retained Earnings		Jumlah/ Total	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity		
						Sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated					
Saldo 31 Desember 2018		1.239.749.573.545	469.155.766.335	(84.522.927.500)	(2.582.958.970)	490.825.028.872	13.072.120.959	326.451.767.845	2.452.148.371.086	527.107.934.091	2.979.256.305.177	Balance as of December 31, 2018
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	25,26	-	-	-	-	6.554.890.616	-	-	6.554.890.616	(10.755.005.529)	(4.200.114.913)	Change in value of transaction with non-controlling interests
Cadangan umum	25	-	-	-	-	-	1.796.514.599	(1.796.514.599)	-	-	-	General reserves
Pembagian dividen oleh entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	25	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.960.159.363)	(9.960.159.363)	Dividend distribution from subsidiaries to non-controlling interests
Penambahan modal di entitas anak	1d, 26	-	-	-	-	-	-	-	-	22.700.000.000	22.700.000.000	Addition of capital in the subsidiaries
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	2.489.458.911	-	-	(2.284.167.367)	205.291.544	418.767.272	624.058.816	Other comprehensive income
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	143.813.655.548	143.813.655.548	61.553.077.983	205.366.733.531	Profit for the year
Saldo 31 Desember 2019		1.239.749.573.545	469.155.766.335	(84.522.927.500)	(93.500.059)	497.379.919.488	14.868.635.558	466.184.741.427	2.602.722.208.794	591.064.614.454	3.193.786.823.248	Balance as of December 31, 2019
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	25,26	-	-	-	-	(27.959.532.854)	-	-	(27.959.532.854)	20.925.802.761	(7.033.730.093)	Change in value of transaction with non-controlling interests
Cadangan umum	25	-	-	-	-	-	1.438.136.556	(1.438.136.556)	-	-	-	General reserves
Pembagian dividen interim oleh Perusahaan kepada pemilik entitas induk	25	-	-	-	-	-	-	(35.421.416.388)	(35.421.416.388)	-	(35.421.416.388)	Interim dividend distribution from the Company to the owners of the parent
Penambahan modal di entitas anak	1d, 26	-	-	-	-	-	-	-	-	108.258.000.000	108.258.000.000	Addition of capital in the subsidiaries
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(10.374.338.205)	-	-	(1.078.324.468)	(11.452.662.673)	(5.651.010.927)	(17.103.673.600)	Other comprehensive income
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	69.392.144.520	69.392.144.520	43.229.741.084	112.621.885.604	Profit for the year
Saldo 31 Desember 2020		1.239.749.573.545	469.155.766.335	(84.522.927.500)	(10.467.838.264)	469.420.386.634	16.306.772.114	497.639.008.535	2.597.280.741.399	757.827.147.372	3.355.107.888.771	Balance as of December 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2020	Catatan/ Notes	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	502.339.988.248		669.636.640.733	Cash received from customers
Pembayaran ke pemasok dan karyawan	(171.578.147.824)		(207.814.995.449)	Cash paid to suppliers and employees
Pembayaran beban keuangan	(61.632.049.506)		(93.368.884.063)	Payment of financial cost
Pembayaran pajak penghasilan	(28.361.403.858)		(61.724.393.850)	Payment of income tax
Penerimaan pendapatan keuangan (Kenaikan)/penurunan kas yang dibatasi penggunaannya	23.397.762.152		33.231.820.772	Receipt of financial income (Increase)/decrease in restricted cash
Penerimaan atas beban dan pendapatan operasi lainnya	(4.584.087.681)		29.595.994.630	Cash received from other operating income and expenses
	5.287.505.504		1.945.718.667	
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	264.869.567.035		371.501.901.440	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset takberwujud	(1.128.778.828.092)	13b	(609.243.986.628)	Acquisition of intangible assets
Perolehan aset tetap	(86.017.788.991)	11	(142.947.482.265)	Acquisition of property, plant, and equipment
Peningkatan investasi saham pada entitas anak	(1.976.000.000)	1d	(3.750.000.000)	Increase in investment in shares of a subsidiary
Penerimaan dividen tunai	-	10	35.000.000.000	Receipt of cash dividend
Peningkatan uang muka	-	7	(8.202.000.000)	Increase in advances
Pelunasan piutang investasi	-	6b	4.550.000.000	Settlement of investment receivables
Penjualan aset tetap	-	11	30.000.000	Proceeds from sale of property, plant, and equipment
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.216.772.617.083)		(724.563.468.893)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman jangka panjang	762.989.031.609	22	487.995.238.193	Drawdowns of long-term loans
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(115.721.540.269)	22	(213.232.699.700)	Payments of long-term loans
Penurunan atas liabilitas pembiayaan konsumen	(3.233.455.134)	21	(2.766.160.528)	Decrease of consumer financing liabilities
Setoran modal di muka kepentingan nonpengendali di entitas anak	10.964.082.597		-	Advance for capital contributions of - non-controlling interest in subsidiaries
Setoran modal kepentingan nonpengendali di entitas anak	108.258.000.000	26	22.700.000.000	Capital contributions of non-controlling interest in subsidiaries
Pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk	(35.421.416.388)	25	-	Payment of dividend to parent of the entity
Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali	-		(9.960.159.363)	Payment of dividend to non-controlling interests
Pembayaran biaya emisi saham	-	22	(5.075.272.628)	Payment of share issuance cost
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	727.834.702.415		279.660.945.974	Net Cash Received in Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(224.068.347.633)		(73.400.621.479)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	590.392.899.081		663.793.520.560	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	366.324.551.448		590.392.899.081	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian perusahaan

PT Nusantara Infrastructure Tbk ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Sawitia Bersama Darma di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 1 September 1995 dari Abdullah Ashal, S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.375. HT.01.01.Tahun 1995 tanggal 28 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 15, Tambahan No. 1140 tanggal 20 Februari 2001.

Pada tanggal 13 Maret 2018 telah dibuat Akta Notaris No. 69 dari Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn Notaris di Jakarta, mengenai perubahan anggaran dasar sehubungan dengan penambahan ketentuan dividen. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0111765 tanggal 15 Maret 2018.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 119 tanggal 31 Agustus 2018 dari Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0240614 tanggal 7 September 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang jasa, perdagangan dan pembangunan yang berhubungan dengan bidang usaha infrastruktur, pertambangan, minyak dan gas bumi. Saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan investasi pada beberapa perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan jalan tol (Tangerang dan Makassar), jasa pelabuhan, jasa telekomunikasi, pengolahan air, perdagangan dan pembangunan. Perusahaan memulai kegiatan operasinya secara komersial pada tanggal 2 Januari 2000.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Menara Equity Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

1. GENERAL

a. The Company's establishment

PT Nusantara Infrastructure Tbk (the "Company") was established under the name of PT Sawitia Bersama Darma in Jakarta based on Notarial Deed No. 3 dated September 1, 1995 of Abdullah Ashal S.H., notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-17.375. HT.01.01.Tahun 1995 dated December 28, 1995 and published in State Gazette No. 15, Supplement No. 1140 dated February 20, 2001.

On March 13, 2018, Notarial Deed No. 69 of Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn Notary in Jakarta has been released, regarding the changes in the Company's Articles of Association concerning addition of dividend policy. The deed has been received and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0111765 dated March 15, 2018.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 119 dated August 31, 2018 of Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn Notary in Jakarta, regarding the changes of composition of Company's Boards of Commissioners and Directors. The deed has been received and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0240614 dated September 7, 2018.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is to engage in services, trading and development related to infrastructure, mining, oil and natural gas. Currently the Company's main activity is investing in shares of companies engaged in management of toll roads (Tangerang and Makassar), port services, telecommunication services, water treatment, trading and construction. The Company started its commercial activities on January 2, 2000.

The Company is domiciled in Jakarta and its head office's address is at Equity Tower 38th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham perusahaan

Pada tanggal 29 Juni 2001, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan Surat No. S-1609/PM/2001 untuk melakukan penawaran umum perdana 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham, dengan harga penawaran Rp200 per saham. Pada tanggal 18 Juli 2001, seluruh saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I

Pada tanggal 14 Juli 2010, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dengan suratnya No. S-6435/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham terdaftar pada atau sebelum 26 Juli 2010. Melalui HMETD, yang berlaku sampai 3 Agustus 2010, para pemegang saham dapat membeli 8.508.000.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp70 per saham dengan harga penawaran Rp88 per saham. Pada tahun 2010, 8.476.500.000 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh sehubungan dengan HMETD.

Seiring dengan penerbitan HMETD, untuk setiap 5 HMETD, Perusahaan menerbitkan 1 (satu) Waran Seri I diberikan secara gratis. Pemegang Waran Seri I bisa membeli saham Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham dengan harga pelaksanaan Rp88 per saham, yang dapat dilaksanakan mulai 7 Februari 2011 sampai dengan 26 Juli 2013. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan berjumlah 1.695.300.000, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp149.186.400.000. Pada tahun 2012, 4.044.336 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh sehubungan dengan Waran Seri I. Sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan Waran Seri I tanggal 26 Juli 2013, jumlah pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 1.694.886.165 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh. Sisa jumlah Waran Seri I yang tidak dilaksanakan adalah sebanyak 413.835 saham Seri B.

1. GENERAL (continued)

b. Public offering of the company's shares

On June 29, 2001, the Company obtained an Effective Statement from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) in his Letter No. S-1609/PM/2001 to conduct initial public offering of 60,000,000 shares with par value of Rp100 per share, at an offering price of Rp200 per share. On July 18, 2001, all of these shares were listed in the Indonesia Stock Exchange.

Limited public offering by issuing pre-emptive rights I

On July 14, 2010, the Company obtained an Effective Statement from Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (BAPEPAM-LK) in his letter No. S-6435/BL/2010 to conduct a limited public offering by issuing pre-emptive rights to shareholders registered on or before July 26, 2010. Through the pre-emptive rights, which is applicable until August 3, 2010, the shareholders can purchase 8,508,000,000 Series B shares with par value of Rp70 per share, at an offering price of Rp88 per share. In 2010, 8,476,500,000 Series B shares have been issued and fully paid in relation to the pre-emptive rights.

In line with the issuance of pre-emptive rights, for every 5 rights issue, the Company issue 1 (one) Series I Warrant for free. The holders of Series I Warrants could purchase Series B share with par value of Rp70 per share with exercise price of Rp88 per share, which can be exercised from February 7, 2011 to July 26, 2013. Number of Series I Warrants issued totaled to 1,695,300,000, with total amount of Rp149,186,400,000. In 2012, the 4,044,336 shares Series B have been issued and fully paid in relation to Series I Warrants. Until the end of Series I Warrants exercise period on July 26, 2013, total Series I Warrant exercised are 1,694,886,165 Series B shares have been issued and fully paid. Total unexercised Series I Warrant are 413,835 shares Series B.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham perusahaan (lanjutan)

Penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) II

Pada tanggal 3 Desember 2018, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-174/D.04/2018 untuk melakukan penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham terdaftar pada atau sebelum 21 Desember 2018. Melalui HMETD, yang berlaku sampai 21 Desember 2018, para pemegang saham dapat membeli 2.475.036.314 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp70 per saham dengan harga penawaran Rp200 per saham. Pada tahun 2018, 2.475.036.314 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh sehubungan dengan HMETD.

Seiring dengan penerbitan HMETD, setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Desember 2018 berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada Harga Pelaksanaan.

Melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Pemegang Saham Untuk Memenuhi Kewajiban Sehubungan Dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Nusantara Infrastructure Tbk tertanggal 6 November 2018, PT Metro Pacific Tollways Indonesia ("MPTI") selaku pemegang 72,94% saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam Penawaran Umum Terbatas II ini. Dalam hal tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang melaksanakan HMETD yang dimilikinya, selain MPTI yang melaksanakan HMETD yang dimilikinya, maka pemegang saham Perseroan tersebut akan mengalami dilusi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh saham Perusahaan sejumlah 17.710.708.194 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL (continued)

b. Public offering of the company's shares (continued)

Limited public offering by issuing pre-emptive rights II

On December 3, 2018, the Company obtained an Effective Statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) in his letter No. S-174/D.04/2018 to conduct a limited public offering by issuing pre-emptive rights to shareholders registered on or before December 21, 2018. Through the pre-emptive rights, which is applicable until December 21, 2018, the shareholders can purchase 2,475,036,314 Series B shares with par value of Rp70 per share, at an offering-price of Rp200 per share. In 2018, 2,475,036,314 Series B shares have been issued and fully paid in relation to the pre-emptive rights.

In line with the issuance of Rights, each holder of 6 (six) existing shares whose names are registered in the Registered Holders of the Company's shares on December 13, 2018 entitled to obtain 1 (one) Rights, whereby every 1 (one) Rights gives the holder the right to buy 1 (one) new share on the Implementation Price.

Through a Shareholder's Declaration to Fulfill Obligations Regarding Capital Additions by Providing Pre-emptive Rights PT Nusantara Infrastructure Tbk dated November 6, 2018, PT Metro Pacific Tollways Indonesia ("MPTI") as the holder of 72.94% of the Company's shares stated that it will implement Rights owned in accordance with the portion of ownership in this Limited Public Offer II. In the event that there is no shareholder of the Company carrying out the Pre-emptive Rights, in addition to the MPTI which holds the Pre-emptive Rights it holds, then the Company's shareholders will experience dilution.

As of December 31, 2020 and 2019, all of the Company's outstanding shares of 17,710,708,194 shares have been listed in the Indonesian Stock Exchange.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Komisaris Utama	: Jose Ma. Kamantigue Lim
Komisaris	: Rodrigo Emmanuel Franco
Komisaris	: Farid Harianto
Komisaris Independen	: Letjend TNI (Purn) Johnny J. Lumintang
Direktur Utama	: Muhammad Ramdani Basri
Direktur	: Omar Danni Hasan
Direktur	: Benny Setiawan Santoso
Direktur	: Ridwan Abdul Chalif Irawan
Direktur	: Denn Charly Gonzales Espanola
Direktur	: Amadeo Navalta Bejec
Direktur	: Christopher Daniel Cabrera Lizo
Direktur	: Francis Emmanuel Dalupas Rojas
Direktur Independen	: -
Ketua Komite Audit	: Letjend TNI (Purn) Johnny J. Lumintang
Anggota Komite Audit	: Tavip Santoso
Anggota Komite Audit	: Tufida Murniati Hasyim
Sekretaris Perusahaan	: Dahlia Evawani
Pelaksana Tugas Ketua Internal Audit dan Governance	: Junianto Tri Prijono

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah keseluruhan karyawan tetap yang dimiliki oleh Perusahaan dan entitas anaknya adalah sebanyak 270 (2019: 251) orang (tidak diaudit).

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Selanjutnya Perusahaan dan entitas anaknya disebut sebagai "Grup".

1. GENERAL (continued)

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees

The Company's Boards of Commissioners and Directors and Audit Committee as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Jose Ma. Kamantigue Lim	: President Commissioner
Rodrigo Emmanuel Franco	: Commissioner
-	: Commissioner
Letjend TNI (Purn) Johnny J. Lumintang	: Independent Commissioner
Muhammad Ramdani Basri	: President Director
Omar Danni Hasan	: Director
Denn Charly Gonzales	: Director
Amadeo Navalta Bejec	: Director
Christopher Daniel Cabrera Lizo	: Director
Francis Emmanuel Dalupan Rojas	: Director
-	: Director
-	: Director
Ridwan Abdul Chalif Irawan	: Independent Director
Letjend TNI (Purn) Johnny J. Lumintang	: Chairman of Audit Committee
Tavip Santoso	: Member of Audit Committee
Tufrida Murniati Hasyim	: Member of Audit Committee
Dahlia Evawani	: Corporate Secretary
Junianto Tri Prijono	: Acting Chairman of Internal Audit and Governance

As of December 31, 2020, the Company and its Subsidiaries' total permanent employees are 270 (2019: 251) employees (unaudited).

d. The Company's Consolidated Subsidiaries

The Company and its Subsidiaries will be referred as the "Group".

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada entitas-entitas anak berikut ini:

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

The Company has direct and indirect ownership in the following subsidiaries:

Entitas anak/ <i>Subsidiaries</i>	Kegiatan usaha/ <i>Business activity</i>	Tempat kedudukan/ <i>Domicile</i>	Tahun Awal kegiatan komersial/ <i>Commencement of commercial operations</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Ownership percentage</i>		Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ <i>Total assets before elimination (in million Rupiah)</i>	
				31 Des./ <i>Dec. 31, 2020</i>	31 Des./ <i>Dec. 31, 2019</i>	31 Des./ <i>Dec. 31, 2020</i>	31 Des./ <i>Dec. 31, 2019</i>
<u>Pemilikan Langsung/<i>Direct ownership:</i></u>							
PT Telekom Infranasantara (Telekom)	Perdagangan, perlengkapan dan telekomunikasi lain/ <i>Trading, supplies and other telecommunications</i>	Jakarta	2014	100,00%	100,00%	86.258	179.842
PT Margautama Nusantara (MUN)	Pembangunan, perdagangan, jasa, dan sub-holding untuk jalan tol/ <i>Construction, trading, services, and sub-holding for toll road</i>	Jakarta	2011	76,51%	74,98%	4.443.905	3.498.558
PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah/ <i>Water and waste management services</i>	Jakarta	2012	99,99%	99,99%	413.332	422.108
PT Energi Infranasantara (EI)	Pembangunan, perdagangan, jasa, dan sub-holding untuk energi/ <i>Construction, trading, services, and sub-holding for energy</i>	Jakarta	2013	99,99%	99,99%	719.867	631.704
PT Portco Infranasantara (Portco)	Manajemen pelabuhan/ <i>Port management</i>	Jakarta	2013	99,99%	99,99%	161.164	167.418
PT Marga Metro Nusantara (Marga)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ <i>Construction, trading and services</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	70,00%	70,00%	73.168	38.820
<u>Pemilikan Tidak Langsung/<i>Indirect ownership:</i></u>							
PT Makassar Metro Network (MMN) (formerly PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)) (melalui/through MUN)	Pengelola jalan tol/ <i>Toll road operator</i>	Makassar	1998	76,10%	74,58%	2.976.577	2.109.069
PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (melalui/through MUN)	Pengelola jalan tol/ <i>Toll road operator</i>	Tangerang	1999	66,68%	66,68%	718.432	677.904
PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) (melalui/through MMN dan/ and MUN)	Pengelola jalan tol/ <i>Toll road operator</i>	Makassar	2008	75,66%	73,43%	676.881	668.189
PT Metro Jakarta Ekspresway (MJE) (melalui/through JTSE, MMN dan/ and MUN)	Pengelola jalan tol/ <i>Toll road operator</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	61,87%	61,87%	51	51
PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) (melalui/through Potum)	Jasa pengelolaan air bersih/ <i>Water management services</i>	Serang	1997	65,00%	65,00%	213.686	221.747
PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) (melalui/through Potum)	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah/ <i>Water and waste management services</i>	Medan	2014	74,52%	74,52%	114.530	105.466
PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) (melalui/through Potum)	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah/ <i>Water and waste management services</i>	Jakarta	2013	99,99%	99,99%	45.202	42.454
PT Sarana Tirta Rezeki (STR) (melalui/through Potum dan/ and SCTK)	Jasa pengelolaan air bersih/ <i>Water management services</i>	Serang	1997	52,00%	52,00%	28.370	36.096
PT Jasa Sarana Nusa Makmur (JSNM) (melalui/through Potum dan/ and SCTK)	Jasa pengelolaan air bersih/ <i>Water management services</i>	Serang	2007	64,97%	64,97%	6.460	6.561
PT Inpol Meka Energi (IME) (melalui/through EI)	Jasa penyediaan tenaga listrik/ <i>Power supply services</i>	Jakarta	2020	61,23%	56,23%	427.492	332.257
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPST) (melalui/through EI)	Jasa penyediaan tenaga listrik/ <i>Power supply services</i>	Pontianak	2018	80,00%	80,00%	244.195	238.655

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada entitas-entitas anak berikut ini (lanjutan):

Entitas anak/ <i>Subsidiaries</i>	Kegiatan usaha/ <i>Business activity</i>	Tempat kedudukan/ <i>Domicile</i>	Tahun Awal kegiatan komersial/ <i>Commencement of commercial operations</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Ownership percentage</i>		Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ <i>Total assets before elimination (in million Rupiah)</i>	
				31 Des./ <i>Dec. 31,</i> 2020	31 Des./ <i>Dec. 31,</i> 2019	31 Des./ <i>Dec. 31,</i> 2020	31 Des./ <i>Dec. 31,</i> 2019
<u>Pemilikan Tidak Langsung/<i>Indirect ownership:</i></u>							
PT Auriga Energi (Auriga) (melalui/ <i>through EI</i>)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ <i>Construction, trading and services</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	100%	100%	100	100
PT Energi Parindu Nusantara (EPN) (melalui/ <i>through Auriga dan/and EI</i>)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ <i>Construction, trading and services</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	100%	100%	100	100
PT Centara Energi (CE) (melalui/ <i>through Auriga dan/and EI</i>)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ <i>Construction, trading and services</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	100%	100%	100	100
PT Eris Serra Energi (ESE) (melalui/ <i>through Auriga dan/and EI</i>)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ <i>Construction, trading and services</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	100%	100%	100	100
PT Eridanusa Energi Nusantara (EEN) (melalui/ <i>through Auriga dan/and EI</i>)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ <i>Construction, trading and services</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	100%	0%	100	

PT Margautama Nusantara (MUN)

Berdasarkan akta notaris No. 19 tanggal 10 Desember 2019 oleh Karin Christiana Basoeki, S.H, notaris di Jakarta, MUN melakukan penambahan modal dasar menjadi sebesar Rp302.050.000.000 atau setara dengan 4.315 lembar saham. Atas penambahan modal dasar tersebut, NI telah melakukan penyetoran sesuai dengan porsi kepemilikan saham, sementara porsi lainnya disetorkan oleh pemegang saham minoritas. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0002102.AH.01.02 tanggal 10 Januari 2020. Atas transaksi tersebut, tidak terjadi dilusi atas kepemilikan saham MUN.

Berdasarkan akta notaris No. 45 tanggal 29 April 2020 dari Karin Christiana Basoeki, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan penambahan modal pada MUN senilai Rp269.990.000.000 atau setara dengan 278 saham. Atas transaksi tersebut, kepemilikan Perusahaan di MUN meningkat menjadi 76,51%. Dari transaksi tersebut, Perusahaan mencatat selisih transaksi dengan pihak nonpengendali sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 26.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

The Company has direct and indirect ownership in the following subsidiaries (continued):

Awal tan sial/ ement ercial ions	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage		Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ Total assets before elimination (in million Rupiah)	
	31 Des./ Dec. 31, 2020	31 Des./ Dec. 31, 2019	31 Des./ Dec. 31, 2020	31 Des./ Dec. 31, 2019
operasi/ rating	100%	100%	100	100
operasi/ rating	100%	100%	100	100
operasi/ rating	100%	100%	100	100
operasi/ rating	100%	100%	100	100
operasi/ rating	100%	0%	100	

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

**PT Makassar Metro Network (MMN)/
Sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara
(BMN)**

Pada 2 November 2020, nama entitas anak, PT Bosowa Marga Nusantara, telah diubah menjadi PT Makassar Metro Network berdasarkan akta Notaris Karin Christina Basoeki, S.H., No. 02 tanggal 2 November 2020, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0185421.AH.01.11. tanggal 5 November 2020.

Berdasarkan akta notaris No. 8 tanggal 12 Desember 2019 oleh Citra Buana Tungga, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta. MMN melakukan penambahan modal dasar dan modal ditempatkan masing-masing menjadi sebesar Rp2.468.080.000.000 dan Rp617.020.000.000 atau masing-masing setara dengan 2.468.080 dan 617.020 lembar saham. Atas penambahan modal ditempatkan tersebut, Perusahaan telah mengambil bagian sebesar Rp390.000.000.000 atau setara dengan 390.000 lembar saham, sementara PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("JM") tidak mengambil bagian penambahan modal ditempatkan. Dari transaksi tersebut, kepemilikan Perusahaan dan JM pada MMN masing-masing menjadi 99,46% dan 0,54% kepemilikan saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0106448.AH.01.02. tanggal 18 Desember 2019. Dari transaksi tersebut, Perusahaan mencatat jumlah selisih transaksi dengan pihak nonpengendali..

PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

Berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 30 Desember 2019 dari Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp389.900.000.000 atau setara dengan 389.900 saham. MMN meningkatkan kepemilikannya di JTSE melalui konversi hutang sebesar Rp17.000.000.000 atau setara dengan 17.000 saham. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0001892 tanggal 3 Januari 2020.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

**PT Makassar Metro Network (MMN)/
Formerly PT Bosowa Marga Nusantara
(BMN)**

On November 2, 2020, the name of a subsidiary, PT Bosowa Marga Nusantara, was changed to PT Makassar Metro Network based on notarial deed No. 02 of Karin Christina Basoeki, S.H., dated November 2, 2020 which was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0185421.AH.01.11. dated November 5, 2020.

Based on the notary deed No. 8 dated December 12, 2019 by Citra Buana Tungga, S.H, M.Kn, notary in Jakarta, MMN increased its authorized capital and issued capital to Rp2,468,080,000,000 and Rp617,020,000,000 or equivalent to 2,468,080 and 617,020 shares, respectively. For such additional issued capital, the Company took part in amount of Rp390,000,000,000 or equivalent to 390,000 shares, meanwhile PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("JM") did not take part in this injection. From the transaction, the ownership of the Company and JM in MMN became 99.46% and 0.54%, respectively. The deed was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0106448.AH.01.02. dated December 18, 2019. From such transaction, the Company recorded the amount of difference in transactions with non-controlling parties.

PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

Based on notarial deed No. 16 dated December 30, 2019 by Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") increased its issued and fully paid capital amounting to Rp389,900,000,000 or equivalent to 389,900 shares. MMN increased its ownership interest in JTSE through conversion of payables amounting to Rp17,000,000,000 or equivalent to 17,000 shares. The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0001892 dated January 3, 2020.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT Energi Infranusantara (EI)

Berdasarkan akta notaris No. 61 tanggal 29 Maret 2019 dari Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta, IME menerbitkan saham baru senilai Rp228.000.000.000 atau setara dengan 228.000 saham.

Kontribusi EI atas seluruh modal saham yang baru ditempatkan tersebut menyebabkan penurunan persentase kepemilikan kepentingan nonpengendali dari 45,35% menjadi 43,77% dan peningkatan persentase kepemilikan EI dari 54,65% menjadi 56,23%. Dari transaksi tersebut, EI mencatat selisih transaksi dengan pihak nonpengendali sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 26.

Berdasarkan akta notaris No. 19 tanggal 24 Februari 2020 dari Citra Buana Tungga S.H., notaris di Jakarta, EI melakukan pembelian saham IME milik PT Tagora Green Energy dengan harga perolehan sebesar Rp7.033.836.568 untuk 64.000 saham, setara dengan 5% kepemilikan saham, sehingga kepemilikan Potum menjadi 61,23%. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0105995 tanggal 25 Februari 2020. Dari transaksi tersebut, EI mencatat jumlah selisih transaksi dengan pihak nonpengendali sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 26.

Berdasarkan akta notaris No. 26 tanggal 30 Juni 2020 dari Citra Buana Tungga S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan penyeteroran modal ke EI sebesar Rp22.700.000.000 untuk 22.700 saham, setara dengan 5% kepemilikan saham, sehingga kepemilikan Perusahaan menjadi 100%. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0315170 tanggal 29 Juli 2020.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Energi Infranusantara (EI)

Based on notarial deed No. 61 dated March 29, 2019 by Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn. notary in Jakarta, IME issued new shares amounting to Rp228,000,000,000 or equivalent to 228,000 shares.

EI's full contribution of the newly issued share capital reduced the ownership interest percentage of the non-controlling interest from 45.35% to 43.77% and increased the ownership interest percentage of EI from 54.65% to 56.23%. From these transactions, EI recognized difference transactions with non-controlling interest as disclosed in Note 26.

Based on notarial deed No. 19 dated February 24, 2020 by Citra Buana Tungga S.H., notary in Jakarta, EI purchased the share investment of IME owned by a shareholder, PT Enviro Nusantara, with an acquisition cost of Rp7,033,836,568 for 64,000 shares, representing 5% share ownership, so EI's share ownership become 61.23 The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0105995 dated February 25, 2020. From the transaction, the EI recognized amount of difference transactions with non-controlling interest as disclosed in Note 26.

Based on notarial deed No. 26 dated June 30, 2020 by Citra Buana Tungga S.H., notary in Jakarta, EI purchased the share investment of EI owned in amount of with an acquisition cost of Rp22,700,000,000 for 22,700 shares, representing 9.76% share ownership, so Company's share ownership become 100% The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0315170 dated July 29, 2020.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT Inpolo Meka Energi (IME)

Berdasarkan akta notaris No. 61 tanggal 29 Maret 2019 oleh Karin Christiana Basoeki, S.H., notaris di Jakarta, IME melakukan penambahan modal dasar menjadi sebesar Rp128.099.500.000 atau setara dengan 1.280.995 lembar saham. Atas penambahan modal dasar tersebut, EI, entitas anak, telah melakukan penyetoran sebesar Rp22.800.000.000 untuk 228.000 saham, dan PT PP (Persero) atau PP melakukan penyetoran sebesar Rp15.200.000.000 atau setara dengan 152.000 saham. Sehingga kepemilikan EI dan PP pada IME masing-masing menjadi 56,23% dan 38,77%. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0028606.AH.01.02. tanggal 24 Mei 2019. Dari transaksi tersebut, IME mencatat jumlah selisih transaksi dengan pihak nonpengendali sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 26.

Berdasarkan akta notaris No. 19 tanggal 24 Februari 2020 dari Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, EI, entitas anak, melakukan pengambilalihan saham ditempatkan dan disetor milik PT Tagora Green Energy ("TGE") pada Perusahaan sebesar Rp6.400.000.000 atau setara dengan 6.400 saham. EI meningkatkan kepemilikannya di Perusahaan melalui konversi utang TGE pada EI dan pembayaran sebesar Rp1.500.000.000 kepada TGE. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0105995 tanggal 25 Februari 2020. Dari transaksi tersebut, IME mencatat jumlah selisih transaksi dengan pihak nonpengendali sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 26.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Inpolo Meka Energi (IME)

Based on the notary deed No. 61 dated March 29, 2019 by Karin Christiana Basoeki, S.H., notary in Jakarta, IME increase the authorized capital to Rp128,099,500,000 or equivalent to 1,280,995 shares. For such additional authorized capital, EI, a subsidiary, made deposits of Rp22,800,000,000 or equivalent to 228,000 shares, and PT PP (Persero) or PP made deposits of Rp15,200,000,000 or equivalent to 152,000 shares. Thus, the ownership of EI and PP on the IME became 56.23% and 38.77%, respectively. The deed was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0028606.AH.01.02. dated May 24, 2019. From such transaction, IME records the amount of difference in transactions with non-controlling parties as disclosed in Note 26.

Based on notarial deed No. 19 dated February 24, 2020 by Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, EI, a subsidiary, took over the PT Tagora Green Energy ("TGE") issued and paid shares of the Company amounting to Rp6,400,000,000 or equivalent to 6,400 shares. EI increased its ownership interest in the Company through conversion payables of TGE to EI and payment amounted by Rp1,500,000,000. The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0105995 dated February 25, 2020. From such transaction, IME recorded the amount of difference in transactions with non-controlling parties as disclosed in Note 26.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

Berdasarkan akta notaris No. 24 tanggal 30 Juni 2020 oleh Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, RPSL, entitas anak tidak langsung, melakukan penambahan modal dasar dan modal ditempatkan masing-masing menjadi sebesar Rp105.595.000.000 atau masing-masing setara dengan 105.595.000 lembar saham. Atas penambahan modal ditempatkan tersebut, EI telah mengambil bagian sebesar Rp476.000.000 atau setara dengan 476.000 lembar saham, sementara PT Tridarma Energi Barata Nusantara mengambil bagian penambahan sebesar Rp119.000.000 atau setara dengan 119.000 lembar saham. Setelah transaksi tersebut, kepemilikan EI dan PT Tridarma Energi Barata Nusantara pada RPSL tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham yaitu masing-masing masih memiliki 80% dan 20% kepemilikan saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0401948 tanggal 26 Oktober 2020.

PT Energi Parindu Nusantara (EPN)

Berdasarkan akta notaris No. 21 tanggal 14 September 2020 dari Eny Sapratila, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, EI dan PT Portco Infranasantara (Portco) melakukan pengalihan kepemilikan saham EPN kepada PT Auriga Energi, entitas anak tidak langsung, sebesar Rp99,900,000 untuk 999 saham, setara dengan 99,9% kepemilikan saham, sehingga kepemilikan PT Auriga Energi menjadi 99,9% dan EI menjadi 0,1%. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0387399 tanggal 17 September 2020.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

Based on the notary deed No. 24 dated June 30, 2020 by Citra Buana Tungga, SH, M.Kn, notary in Jakarta, RPSL, an indirect subsidiary, increased the authorized capital to Rp105,595,000,000 or equivalent to 105,595 shares, respectively. For such additional issued capital, EI took part in amount of Rp476,000,000 or 476,000 shares, meanwhile PT Tridarma Energi Barata Nusantara took part in amount of Rp119,000,000 or 119,000. After this transaction, the ownership composition of EI and PT Tridarma Energi Barata Nusantara in the RPSL is not change, EI and PT Tridarma Energi Barata Nusantara owned 80% and 20% ownership interest, respectively. The deed was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-AH.01.03-0401948 dated October 26, 2020.

PT Energi Parindu Nusantara (EPN)

Based on notarial deed No. 21 dated September 14, 2020 from Eny Sapratila, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, EI and Portco Infranasantara transferred the ownership interest in EPN to PT Auriga Energi, an indirect subsidiary, in amount of Rp99,900,000 for 999 shares, representing 99.9% share ownership, so PT Auriga Energi's share ownership become 99.99% and EI become 0.1%. The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0387399 dated September 17, 2020.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT Centera Energi (CE)

Berdasarkan akta notaris No. 5 tanggal 18 November 2019 dari Eny Sapratila, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, EI dan Portco melakukan pengalihan kepemilikan saham di PT Centera Energi kepada PT Auriga Energi, entitas anak tidak langsung, sebesar Rp99,900,000 untuk 999 saham, setara dengan 99,9% kepemilikan saham, sehingga kepemilikan PT Auriga Energi menjadi 99,9% dan EI menjadi 0,1%. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0367297 tanggal 2 Desember 2019.

PT Eris Serra Energi

Berdasarkan akta notaris No. 5 tanggal 14 September 2020 dari Eny Sapratila, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, EI dan Portco melakukan pengalihan kepemilikan saham di PT Eris Serra Energi kepada PT Auriga Energi, entitas anak tidak langsung, sebesar Rp99,900,000 untuk 999 saham, setara dengan 99,9% kepemilikan saham, sehingga kepemilikan PT Auriga Energi menjadi 99,9% dan EI menjadi 0,1%. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0387398 tanggal 17 September 2020.

PT Eridanusa Energi Nusantara

Berdasarkan akta notaris No. 1 tanggal 4 Agustus 2020, oleh Karin Christiana Basoeki, S.H, M.KN, notaris di Tangerang, Perusahaan melalui PT Energi Infranusantara (EI) dan PT Portco Infranusantara (Portco) membentuk PT Eridanusa Energi Nusantara yang bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik, aktivitas penunjang kelistrikan, dan aktivitas konsultasi manajemen. Jumlah kepemilikan saham Perusahaan pada PT Eridanusa Energi Nusantara adalah sebanyak 400 saham atau setara dengan 100% kepemilikan. Akta Pendirian PT Eridanusa Energi Nusantara telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0129591.AH.01.11. tanggal 7 Agustus 2020.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Centera Energi (CE)

Based on notarial deed No. 5 dated November 18, 2019 from Eny Sapratila, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, EI and Portco transferred the ownership interest in PT Auriga Energi to PT Auriga Energi, an indirect subsidiary, in amount of Rp99,900,000 for 999 shares, representing 99.9% share ownership, so PT Auriga Energi's share ownership become 99.99% and EI become 0.1%. The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0367297 dated 2 December 2019.

PT Eris Serra Energi

Based on notarial deed No. 5 dated September 14, 2020 from Eny Sapratila, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, EI and Portco transferred the ownership interest in of PT Eris Serra Energi to PT Auriga Energi, an indirect subsidiary, in amount of Rp99,900,000 for 999 shares, representing 99.9% share ownership, so PT Auriga Energi's share ownership become 99.99% and EI become 0.1%. The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0387398 dated 17 September 2020

PT Eridanusa Energi Nusantara

Based on the notary deed No. 1 dated August 4, 2020, by Karin Christiana Basoeki, S.H, M.KN, notary in Tangerang, the Company through PT Energi Infranusantara (EI) with PT Portco Infranusantara (Portco) established PT Eridanusa Energi Nusantara, which is engaged in power plants, electricity support activities, and management consulting activities. The amount of the Company's share ownership in PT Eridanusa Energi Nusantara is 400 shares or equal to 100% ownership. The deed has been received and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-0129591.AH.01.11. dated 7 Agustus 2020.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT Metro Jakarta Ekspresway (MJE)

Berdasarkan akta notaris No. 19 tanggal 20 Agustus 2019, oleh Citra Buana Tungga, S.H, M.KN, notaris di Tangerang, JTSE, entitas anak tidak langsung, membentuk MJE yang bergerak dalam bidang jasa, pembangunan, dan jasa konsultasi manajemen bisnis. Jumlah kepemilikan saham JTSE pada MJE adalah sebanyak 4.335 saham atau setara dengan 85% kepemilikan. Akta Pendirian MJE telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041741.AH.01.01. tanggal 22 Agustus 2019.

PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)

Berdasarkan akta notaris No. 18 tanggal 28 Juni 2019 dari Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta, Potum melakukan pembelian saham DCC milik Nyonya Indianty Suyanto dengan nilai nominal Rp2.400.000.000 untuk 24.000 saham dengan harga perolehan Rp3.750.000.000. Saham yang dibeli setara dengan 23,52% kepemilikan saham, sehingga kepemilikan Potum menjadi 74,52%. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH-01.03-0292486 tanggal 1 Juli 2019. Dari transaksi tersebut, DCC mencatat jumlah selisih transaksi dengan pihak nonpengendali sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 26.

PT Marga Metro Nusantara (Marga)

Berdasarkan akta notaris No. 4 tanggal 9 Agustus 2018, oleh Jessy Darmawan, S.H, M.KN, notaris di Tangerang, Perusahaan, bersama dengan PT Marga Bangun Semesta, pihak ketiga, menyetujui untuk membentuk Marga yang bergerak dalam bidang jasa, pembangunan, dan jasa konsultasi manajemen bisnis. Jumlah kepemilikan saham Perusahaan pada Marga adalah sebanyak 17.500 saham atau setara dengan 70% kepemilikan. Akta Pendirian Marga telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038026.AH.01.01. tanggal 13 Agustus 2018.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Metro Jakarta Ekspresway (MJE)

Based on the notary deed No. 19 dated August 20, 2019, by Citra Buana Tungga, S.H, M.KN, notary in Tangerang, JTSE, an indirect subsidiary, agreed to establish MJE, which engages in trade, development, and business management consulting services. JTSE's share ownership in MJE is 4,335 shares or equal to 85% ownership. The deed of establishment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-0041741.AH.01.01. dated August 22, 2019.

PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)

Based on notarial deed No. 18 dated June 28, 2019 by Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn. notary in Jakarta, Potum purchased the share investment of DCC owned by Indianty Suyanto with a nominal value of Rp2,400,000,000 for 24,000 shares with an acquisition cost of Rp3,750,000,000. The shares represent 23.52% share ownership, so Potum's share ownership become 74.52%. The deed has been receipt and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH-01.03-0292486 dated July 1, 2019. From the transaction, DCC recognized amount of difference transactions with non-controlling interest as disclosed in Note 26.

PT Marga Metro Nusantara (Marga)

Based on the notary deed No. 4 dated August 9, 2018, by Jessy Darmawan, S.H, M.KN, notary in Tangerang, the Company, together with PT Marga Bangun Semesta, a third party, agreed to form Marga, which is engaged in trade, development, and business management consulting services. The amount of the Company's share ownership in Marga is 17,500 shares or equal to 70% ownership. The deed has been received and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-0038026.AH.01.01. dated August 13, 2018.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Marga Metro Nusantara (Marga) (lanjutan)

Berdasarkan akta notaris No. 19 tanggal 24 Juli 2020 oleh Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Marga melakukan penambahan modal dasar menjadi sebesar Rp248.520.000.000 atau setara dengan 248.520 lembar saham. Atas penambahan modal dasar tersebut, Perusahaan telah melakukan penyetoran sebesar Rp43.491.000.000 untuk 43.491 saham, dan PT Marga Bangun Semesta atau MBS melakukan penyetoran sebesar Rp18.639.000.000 atau setara dengan 18.639 saham. Sehingga kepemilikan Perusahaan dan MBS pada Marga masing-masing menjadi 70% dan 30%. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0342113 tanggal 11 Agustus 2020. Dari transaksi tersebut, Marga mencatat jumlah selisih transaksi dengan pihak nonpengendali sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 26.

PT Telekom Infranasantara

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Telekom Infranasantara yang diaktakan dengan Akta No.5 tanggal 11 Desember 2019 oleh Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notaris di Tangerang, menyetujui penurunan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp138.100.000.000, atau setara dengan 138.100 saham, menjadi sebesar Rp58.100.000.000, atau setara dengan 58.100 saham. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0012351.AH.01.02 tanggal 12 Februari 2020.

e. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan disahkan untuk diterbitkan oleh Manajemen Perusahaan pada tanggal 28 Mei 2021.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Marga Metro Nusantara (Marga) (continued)

Based on the notary deed No. 19 dated July 24, 2020 by Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, IME increase the authorized capital to Rp248,520,000,000 or equivalent to 248,520 shares. For such additional authorized capital, the Company made deposits of Rp43,491,000,000 or equivalent to 43,491 shares, and PT Marga Bangun Semesta or MBS made deposits of Rp18,639,000,000 or equivalent to 18,639 shares. Thus, the ownership of the Company and MBS on the Marga became 70% and 30%, respectively. The deed was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-AH.01.03-0342113 dated August 11, 2020. From such transaction, Marga records the amount of difference in transactions with non-controlling parties as disclosed in Note 26.

PT Telekom Infranasantara

Based on the Decision of the Shareholders of PT Telekom Infranasantara which was notarized by Deed No.5 dated December 11, 2019 by Citra Buana Tungga, SH, M.Kn., a notary in Tangerang, approved the reduction of issued and paid-up capital from Rp138,100,000,000, or equivalent to 138,100 shares into Rp58,100,000,000, or equivalent to 58,100 shares. The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0012351.AH.01.02 dated February 12, 2020.

e. Completion of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements were completed and authorized for issuance by the Company's Management on May 28, 2021.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua OJK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi di bawah ini yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Board of the Indonesian Institute of Accountants and Rule No. VIII.G.7 Attachment of Chairman of OJK's decision No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 on the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by OJK. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with PSAK 1: Presentation of Financial Statements. The consolidated financial statements, except consolidated statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing, and financing activities.

b. Changes in accounting principles

On January 1, 2020, the Group adopted new and revised statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards below that are mandatory for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya, kecuali PSAK 73:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan", yang diadopsi dari IFRS 9;
- PSAK 72: "Pendapatan dari kontrak dengan Pelanggan", yang diadopsi dari IFRS 15;
- PSAK 73: "Sewa", yang diadopsi dari IFRS 16;
- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: "Definisi Material";
- Amandemen PSAK 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".

PSAK 73

Pada 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan retrospektif modifikasi dengan memilih pendekatan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman transisi dalam PSAK 73.

Dengan demikian laporan keuangan tahun 2019 tidak disajikan kembali dan disajikan sesuai standar sebelumnya dan interpretasi terkait. Grup melanjutkan penilaian sewa historis dengan tidak menilai kembali kontrak sewa sebelum PSAK 73 berlaku. Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang ditetapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak sewa yang dibuat atau dimodifikasi pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pendekatan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman transisi dalam PSAK 73, yang antara lain:

- Penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa;
- Sewa operasi dengan sisa masa sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai sewa jangka pendek;
- Pengecualian biaya langsung awal untuk pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal;
- Penggunaan tinjauan ke belakang dalam menentukan masa sewa dimana kontrak berisi opsi untuk perpanjangan atau pemutusan masa sewa;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Changes in accounting principles

The adoption of the following new and revised standard and interpretation did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years, except for PSAK 73:

- PSAK 71: "Financial Instruments", adopted from IFRS 9;
- PSAK 72: "Revenue from Contracts with Customers", adopted from IFRS 15;
- PSAK 73: "Leases", adopted from IFRS 16;
- Amendment PSAK 1 and PSAK 25 "Definition of Materials";
- Amendment PSAK 15 "Investments in Associates and Joint Ventures".

PSAK 73

On January 1, 2020, the Group has applied PSAK 73 using the modified retrospective method by applying available practical expedients under the transition guidance within PSAK 73.

Accordingly, the comparative information presented for 2019 has not been restated and it is presented, as previously reported, under the related interpretations. The Group continued to carry forward the historical lease assessments and not to reassess the lease contract before PSAK 73 applied. The Group applies the definition of a lease and related guidance set out in PSAK 73 to all lease contracts entered into or modified on or after January 1, 2020.

The available practical expedients under the transition guidance within PSAK 73, which among other things:

- The use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;
- The accounting for operating leases with a remaining lease term of less than 1 months as at January 1, 2020 as short-term leases;
- The exclusion of initial direct costs for the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application;
- The use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease;

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

PSAK 73 (lanjutan)

Pendekatan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman transisi dalam PSAK 73, yang antara lain: (lanjutan)

- Menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya diidentifikasi berdasarkan PSAK 30, dan tidak menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya tidak diidentifikasi berdasarkan standar ini;
- Tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan sebagai konsekuensinya Grup menganggap seluruh kontrak sebagai sewa; dan
- Tidak mengakui liabilitas sewa dan aset hak guna untuk aset pendasar yang bernilai rendah.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang tersisa, didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman penyewa pada tanggal 1 Januari 2020. Suku bunga pinjaman penyewa yang diterapkan pada kewajiban sewa pada tanggal 1 Januari 2020 berkisar antara 8,20% - 8,75%.

Dampak perubahan terhadap laporan keuangan periode berjalan adalah sebagai berikut:

	Standar baru/ New standards	Standar sebelumnya/ Previous standards	Penyesuaian/ Adjustments	
Laporan posisi keuangan				Statement of financial position
Aset				Asset
Uang muka dan beban dibayar di muka- jangka pendek	10.632.493.458	11.325.663.960	(693.170.502)	Advances and prepaid expenses - current
Aset hak guna - neto	3.360.524.535	-	3.360.524.535	Right of use assets - net
Jumlah aset	13.993.017.993	11.325.663.960	2.667.354.033	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas sewa jangka pendek	2.777.692.120	-	2.777.692.120	Lease liabilities - current
Liabilitas sewa jangka panjang	17.080.715	-	17.080.715	Lease liabilities - non-current
Jumlah liabilitas	2.794.772.835	-	2.794.772.835	Total liabilities
Ekuitas				Equity
Saldo laba	497.639.008.535	497.766.427.337	(127.418.802)	Retained earnings

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes in accounting principles
(continued)**

PSAK 73 (continued)

The available practical expedients under the transition guidance within PSAK 73, which among other things: (continued)

- Apply PSAK 73 to leases that were previously identified under PSAK 30, and not to apply PSAK 73 to those that were not previously identified under these two standards;
- Not to separate non-lease components from lease components, and instead, account for both as a single lease component; and
- Not to recognize a lease liability and a Right-of-Use ("ROU") asset for leases where the underlying assets are low-value assets.

Lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the lessee's incremental borrowing rate as of January 1, 2020. The lessee's incremental borrowing rates applied to the lease liabilities on January 1, 2020 were ranging from 8.20% - 8.75%.

The impact on the financial statements were as follows:

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

PSAK 73 (lanjutan)

Dampak perubahan terhadap laporan keuangan periode berjalan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Standar baru/ New standards	Standar sebelumnya/ Previous standards	Penyesuaian/ Adjustments	
Laporan laba rugi				Statement of profit or loss
Umum dan administrasi	172.697.679.322	173.169.482.477	(471.803.155)	General and administrative
Beban keuangan	61.632.049.506	61.032.827.549	599.221.957	Financial cost
Jumlah	234.329.728.828	234.202.310.026	127.418.802	Total

Standar akuntansi yang telah disahkan dan sudah berlaku efektif

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup dan akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021:

- Amandemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis", tentang referensi ke kerangka konseptual, berlaku efektif 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan;
- Amandemen PSAK 57: "Biaya untuk memenuhi suatu kontrak", berlaku efektif 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan;
- Amandemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan", berlaku efektif 1 Januari 2023.

Grup sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

PSAK 73 (continued)

The impact on the financial statements were as follows: (lanjutan)

New accounting standards yet effective

The following are several issued accounting standards by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Group and will be effective for reporting periods beginning on or after:

Effective on or after the date of January 1, 2021:

- Amendment PSAK 22: "Business Combinations", regarding reference to conceptual frameworks, effective on January 1, 2022 with earlier application is permitted;
- Amendment PSAK 57: "Contract Fulfillment Costs", effective on January 1, 2022 with earlier application is permitted;
- Amendment PSAK 1: "Presentations of Financial Statement", effective on January 1, 2023.

The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on the Group's consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

**Standar akuntansi yang telah diterbitkan
namun belum berlaku efektif**

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup. Kecuali disebutkan lain, Grup tidak mengharapkan bahwa adopsi pernyataan tersebut di masa depan memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangannya.

**Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari
2021**

- Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Umumnya, ada dugaan bahwa mayoritas hak suara menghasilkan kontrol. Untuk mendukung anggapan ini dan bila Grup memiliki kurang dari mayoritas hak suara atau hak serupa dari *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah ia memiliki kuasa atas *investee*, termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Changes in accounting principles (continued)

**Accounting standards issued but not yet
effective**

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group. Unless otherwise indicated, the Group does not expect that the future adoption of the said pronouncements to have a significant impact on its financial statements.

**Effective beginning on or after January 1,
2021**

- Amendment to PSAK 22: Definition of Business, effective from January 1, 2021.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the *investee* and has the ability to affect those returns through its power over the *investee*.

The Group controls an *investee* if and only if the Group has all of the following:

- i) Power over the *investee*, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the *investee*,
- ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the *investee*, and
- iii) The ability to use its power over the *investee* to affect its returns.

Generally, there is a presumption that majority of voting rights results in control. To support this presumption and when the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an *investee*, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an *investee*, including:

- i) The contractual arrangement with the other vote holders of the *investee*,
- ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
- iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Grup menilai ulang apakah pengendaliannya melibatkan *investee* jika fakta dan keadaan menunjukkan bahwa ada perubahan pada satu atau lebih dari tiga elemen kontrol. Konsolidasi entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh kendali atas entitas anak dan berhenti pada saat Grup kehilangan kendali atas entitas anak tersebut. Aset, liabilitas, penghasilan, dan beban entitas anak yang diakuisisi selama periode berjalan termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai dengan tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

Setelah terjadi hilangnya pengendalian, Grup menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, semua kepentingan nonpengendali dan komponen ekuitas lainnya terkait dengan entitas anak. Segala *surplus* atau defisit yang timbul dari hilangnya pengendalian, diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Apabila Perusahaan masih memiliki bagian di dalam entitas anak sebelumnya, maka bagian tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal saat pengendalian dihentikan. Selanjutnya, bagian tersebut dicatat sebagai *investee* dengan ekuitas yang dihitung atau sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual bergantung pada besarnya pengaruh.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Basis of Consolidation (continued)

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income, and expenses of a subsidiary acquired during the period are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, and other components of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

Upon the loss of control, the Group derecognises the assets and liabilities of the subsidiaries, any non-controlling interests and the other components of equity related to the subsidiaries. Any surplus or deficit arising on the loss of control is recognized in profit or loss and other comprehensive income.

If the Company retains any interest in the previous subsidiaries, then such interest is measured at fair value at the date that control is lost. Subsequently, it is accounted for as an equity-accounted investee or as an available-for-sale financial asset depending on the level of influence retained.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Laba yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi, dieliminasi terhadap investasi dari bagian Grup di dalam *investee*. Kerugian yang belum terealisasi, dieliminasi dengan cara yang sama dengan keuntungan yang belum terealisasi, hanya apabila tidak terdapat bukti penurunan nilai.

Apabila Perusahaan menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan yang dikonsolidasikan kepada laporan keuangan konsolidasian, maka investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama, disajikan di dalam laporan posisi keuangan Entitas senilai nilai tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Terhadap pelepasan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi, perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari investasi diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7: "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 35.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Basis of Consolidation (continued)

Unrealized gains arising from transactions with associates are eliminated against the investment to the extent of the Group's interest in the investee. Unrealized losses are eliminated in the same way as unrealized gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.

If the Company presents separate financial statements as additional information to the consolidated financial statements, investments in subsidiaries, associates and joint ventures are stated in the Company's separate statement of financial position at cost less accumulated impairment losses. On disposal of investments in subsidiaries and associates, the difference between disposal proceeds and the carrying amounts of the investments are recognized in the consolidated statement profit or loss and other comprehensive income.

d. Transactions with Related Party

The Group has transactions with related parties as defined in PSAK 7: "Related party disclosures"

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties. Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 35.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

A related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- (a) *A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - (i) *has control or joint control over the reporting entity;*

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor: (lanjutan)

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: (lanjutan)
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan pasca kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Transactions with Related Party (continued)

A related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity: (continued)

- (a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person: (continued)
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party;
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - (vii) a person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah Rp14.105 dan Rp13.901 per 1 Dolar Amerika Serikat (USD).

f. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas penuh dengan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas yang ditempatkan pada rekening penampungan (*escrow account*) selama periode tertentu, sesuai dengan persyaratan restrukturisasi pinjaman bank, disajikan sebagai "Kas di bank yang Dibatasi Penggunaannya".

g. Piutang Usaha dan Non-usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang usaha diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang usaha disajikan sebagai aset tidak lancar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**e. Foreign Currency Transactions and
Translations**

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the consolidated statement of financial position date.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the current year consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The exchange rates used to translate the monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of December 31, 2020 and 2019 were Rp14,105 and Rp13,901 per 1 United States Dollar (USD), respectively.

f. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and cash in banks. Cash equivalents are liquid short term investments which can be converted immediately into cash with an original maturity of 3 (three) months or less from the date of placement, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings nor restricted to use.

Cash and cash equivalents which are placed in an escrow account for a certain period, in accordance with the requirements of the bank debt restructuring, is presented as the "Restricted Cash in Banks".

g. Trade and Non-trade Receivables

Trade receivables represents amounts due from customers for the sale of goods or services in the business' normal activities. If the receivables are estimated to be collectible within one year or less (or in the normal operating cycle if longer), trade receivables are classified as current assets. If not, trade receivables are presented as non-current assets.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Piutang Usaha dan Non-usaha (lanjutan)

Piutang usaha dan non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi provisi untuk penurunan nilai piutang.

Kolektabilitas piutang usaha dan piutang non-usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh nilai piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

h. Beban Dibayar di Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

i. Persediaan

Nilai awal persediaan diakui sebesar biaya perolehan, dan selanjutnya ditentukan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan terdiri dari biaya pembelian, dan biaya-biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Cadangan kerugian penurunan nilai untuk persediaan usang dan yang perputarannya lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau harga jual masing-masing persediaan dimaksud di masa yang akan datang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**g. Trade and Non-trade Receivables
(continued)**

Trade and non-trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, except where the effect of discounting would be immaterial, less provision for receivable impairment.

Collectability of trade and non-trade receivables is reviewed on a regular basis. Receivables which are known to be uncollectible are written-off directly to its carrying amount. Allowance account is used when there is objective evidence that the Company is unable to collect the entire amount of the receivables in accordance with the initial receivables. Impairment is equal to the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows at the initial effective interest rate. Cash flows related to short-term receivables are not discounted if the effect of the discount is not material.

h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited, and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.

i. Inventories

Inventories are initially recognized at cost, and subsequently at the lower of cost and net realizable value. Cost comprises all costs of purchase, and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Net realizable value is the estimated sales price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Allowance for impairment losses of obsolete and slow moving inventory is determined on the basis of estimated future usage or sale of individual inventory items.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Pemilikan Langsung

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan untuk operasi, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut dengan jelas menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan aset tetap, kecuali tanah, dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa manfaat (tahun)/Useful lives
Bangunan	20
Mesin dan peralatan	5
Peralatan kantor	4 - 5
Kendaraan	5

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Property, Plant, and Equipment

Property, plant, and equipment, except land, are stated at cost, excluding day-to-day servicing, less accumulated depreciation and any impairment value, if any. Land is stated at cost and is not depreciated.

The initial cost of property, plant, and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property, plant, and equipment to its working condition and location for its intended use.

Direct Acquisition

Expenditures incurred after the property, plant, and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to the operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property, plant, and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property, plant, and equipment.

Depreciation of property, plant, and equipment, except land, is computed on a straight-line basis over the property, plant, and equipment's useful lives as follows:

Persentase Depresiasi/ Percentage of Depreciation	Type of property, plant, and equipment
5%	Buildings
20%	Machinery and equipment
25% - 20%	Office equipment
20%	Vehicles

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Aset Tetap (lanjutan)

Pemilikan Langsung (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai tercatat aset tetap, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian dinyatakan berdasarkan biaya perolehan termasuk biaya perolehan tanah dan akumulasi biaya pembangunan. Pada saat pembangunan tersebut selesai dan siap untuk digunakan, jumlah biaya yang terjadi diklasifikasikan ke akun "Aset Tetap" atau "Aset Takberwujud" sesuai peruntukannya.

k. Sewa

Sebelum 1 Januari 2020

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Property, Plant, and Equipment (continued)

Direct Acquisition (continued)

An item of property, plant, and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts. Any gains or loss arising from derecognition of property, plant, and equipment (calculated as the difference between the net disposal proceed, if any, with the carrying amount of the item) is included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

The carrying value of property, plant, and equipment, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if not appropriate, at each financial year end.

Construction in Progress

Construction in progress is stated at cost. Costs include acquisition cost of land and accumulated construction costs. When the construction is completed and ready for its intended use, the total cost incurred is reclassified to the related "Property, Plant, and Equipment" or "Intangible Assets" account.

k. Leases

Before January 1, 2020

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lease. All other leases are classified as operating leases.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Sewa (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai Lessor

Grup mencatat transaksi sewa guna usaha sesuai dengan PSAK No. 30 (Revisi 2011), "Sewa" dan ISAK No. 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" dimana penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung sewa didasarkan pada substansi dari perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Menurut PSAK revisi ini, sewa yang mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Dalam sewa pembiayaan, Grup sebagai penyewa akan mengakui aset (piutang sewa pembiayaan) dalam laporan posisi keuangannya sebesar nilai wajar aset sewaan atau, apabila lebih rendah, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum, masing-masing ditetapkan pada awal sewa. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan bunga dan bagian yang mengurangi saldo piutang sewa pembiayaan.

Pendapatan bunga akan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan terhadap saldo piutang sewa pembiayaan. Pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika aset tetap dijual kepada penyewa sebelum akhir masa sewa, perbedaan antara harga jual dengan nilai wajar dari piutang sewa pembiayaan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Pendapatan sewa dari operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Leases (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

As Lessor

The Group accounts for its lease transactions in accordance with SFAS No. 30 (Revised 2011), "Leases" and IFAS No. 8, "Determining whether an Arrangement Contains a Lease" whereas the determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Under this revised SFAS, leases that transfer substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased items are classified as finance leases.

Under a finance lease, the Group as a lessor shall recognize assets (finance lease receivable) in its statement of financial position at amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. Minimum lease payments shall be apportioned between the interest income and the reduction of the outstanding finance lease receivable.

The interest income shall be allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the finance lease receivable. Interest income is reflected as revenue in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

If the lease assets are sold to the lessee before the end of the lease period, the difference between the sales price and the fair value of finance lease receivable is recorded as gain or loss at the time of sale.

Rental income from operating leases is recognized on the straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiation and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Sewa (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai Lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Grup yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontingen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Setelah 1 Januari 2020

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamandemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Leases (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

As Lessee

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Group at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the consolidated statement of financial position as a finance lease obligations.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where other systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

After January 1, 2020

From 1 January 2020, the Group has adopted PSAK 73, which sets the requirement for recognition of lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as 'operating leases'. This policy is applied to contracts entered into or amended, on or, after January 1, 2020.

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Sewa (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya; dan:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Leases (continued)

After January 1, 2020 (continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used; and:
 1. The Group has the right to operate the asset; or
 2. The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Sewa (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

l. Aset dan Liabilitas Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual.

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka pendek.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Leases (continued)

After January 1, 2020 (continued)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding.

l. Financial Assets and Liabilities

Before January 1, 2020

Financial Assets

Financial assets are classified in categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity financial assets, and (iv) available-for-sale financial assets.

The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets measured at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. Financial assets classified as held-for-trading if it is acquired principally for selling or repurchasing purposes in the near term and if there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

1. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah nilai transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Grup memiliki pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan non-usaha, uang muka dan piutang investasi, dan piutang atas perjanjian konsesi jasa.

(iii) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

1. Financial Assets and Liabilities (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

Financial Assets (continued)

(i) Financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

The Group has no financial assets measured at fair value through profit or loss.

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.

Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

The Group's loans and receivables include cash and cash equivalents, trade and non-trade receivables, advances and receivables on investment and service concession arrangement receivable.

(iii) Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the management has positive intention and ability to hold to maturity, other than:

- those that upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;
- those that designated as available for sale; and
- those that meet the definition of loans and receivables.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(iii) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)

Grup tidak memiliki aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo.

(iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Grup memiliki aset keuangan tersedia untuk dijual (Catatan 5).

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Financial Assets and Liabilities (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

Financial Assets (continued)

(iii) Held-to-maturity financial assets (continued)

The Group has no held-to-maturity financial assets.

(iv) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets designated as available-for-sale or not classified in the three previous categories.

After initial measurement, available-for-sale financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity will be reclassified to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as a reclassification adjustment.

The Group possesses available-for-sale financial assets (Note 5).

Impairment of financial assets

Financial assets are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

1. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020, bukti objektif penurunan nilai aset keuangan termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Financial Assets and Liabilities (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Before January 1, 2020, objective evidence of impairment of financial assets could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or
- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Grup tidak mengalihkan serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka pendek. Utang derivatif dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Financial Assets and Liabilities (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or the Group transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognize a collateralised borrowing for the proceeds received.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified in the following categories of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

(i) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss are financial liabilities that held for trading.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Grup memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi utang usaha, utang non-usaha, utang pembiayaan konsumen, beban akrual, pinjaman bank, dan pinjaman jangka panjang.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Setelah 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain. Grup mengadopsi PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Financial Assets and Liabilities (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

Financial Liabilities (continued)

(i) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss (continued)

The Group has no financial liabilities at fair value through profit or loss.

(ii) Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities not classified as financial liabilities at fair value through comprehensive profit or loss are classified in this category and are measured at amortized cost. The Group has financial liabilities measured at amortized cost include trade payable, non-trade payables, consumer financing liabilities, accruals, bank loans, and long-term loans.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the assets and settle the liability simultaneously.

After January 1, 2020

The Group classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. The Group adopted PSAK 71 as at January 1, 2020.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

1. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *Solely Payment of Principal and Interest* (SPPI) testing dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

1. Financial Assets and Liabilities (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Financial assets

Initial recognition and measurement financial assets

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through OCI ("FVTOCI"), and fair value through profit or loss ("FVTPL").

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component of for which the Group has applied the practical expedient, the Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transactions costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVTOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the solely payments of principal and interest (SPPI) testing and it is performed at instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to buy or sell the asset.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan kedalam empat kategori:

- i. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, dan aset tidak lancar lainnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Financial Assets and Liabilities (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent measurement of financial assets

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- i. Financial assets at amortized cost (debt instruments)

This category is the most relevant to the Group. The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired. The Group's financial assets at amortized cost consist of cash and cash equivalents, other current financial assets, trade and other receivables, and other non-current assets.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

**Pengukuran setelah pengakuan awal aset
keuangan (lanjutan)**

- ii. Aset keuangan diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Grup mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi.

Grup tidak memiliki instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif per 31 Desember 2020.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Financial Assets and Liabilities (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Financial Assets (continued)

**Subsequent measurement of financial
assets (continued)**

- ii. Financial assets at FVTOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)

The Group measures debt instruments at FVTOCI if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

For debt instruments at FVTOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

The Group has no debt instruments classified at FVTOCI with recycling of cumulative gains and losses as of December 31, 2020.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

1. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan (lanjutan)

- iii. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas).

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi. Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai. Tidak ada investasi ekuitas yang diklasifikasikan dalam kategori ini per tanggal 31 Desember 2020.

- iv. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang dikelola untuk diperdagangkan, aset keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi SPPI testing diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas apapun model bisnisnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Financial Assets and Liabilities (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent measurement of financial assets (continued)

- iii. Financial assets designated at FVTOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at FVTOCI when they meet the definition of equity under PSAK 71 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis. Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established, except when the Group benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in OCI. Equity instruments designated at FVTOCI are not subject to impairment assessment. There were no equity investments elected under this category as of December 31, 2020.

- iv. Financial assets at FVTPL

Financial assets at FVTPL include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at FVTPL, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not fulfilled with solely payments of principal and interest (SPPI) testing are classified and measured at FVTPL, irrespective of the business model.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan (lanjutan)

- iv. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan. Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Aset keuangan Grup diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari investasi pada ekuitas, penyertaan jangka panjang lainnya, dan obligasi konversi.

Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL")

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Financial Assets and Liabilities (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent measurement of financial assets (continued)

- iv. Financial assets at FVTPL (continued)

Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortized cost or at FVTOCI, as described above, debt instruments may be designated at FVTPL on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch. Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss. The Group's financial assets at FVTPL consists of equity investments, other long-term investments, and convertible bonds.

Expected credit losses ("ECL")

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL. ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

**Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL")
(lanjutan)**

Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian 24 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang umurnya.

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah menggunakan semua informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Grup menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Financial Assets and Liabilities (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Financial Assets (continued)

Expected credit losses ("ECL") (continued)

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 24-months (a 24-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade receivables and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVTOCI, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the external credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 30 days past due.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

**Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL")
(lanjutan)**

Instrumen utang Grup yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari obligasi dalam kategori investasi teratas (Sangat Baik dan Baik) oleh Lembaga Pemeringkat Kredit dan, oleh karena itu, dianggap sebagai investasi risiko kredit yang rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian pada instrumen tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 24 bulan. Namun, ketika ada peningkatan signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihannya akan sepanjang umurnya. Grup menggunakan peringkat dari Lembaga Pemeringkat Kredit untuk menentukan apakah instrumen utang telah meningkat secara signifikan dalam risiko kredit dan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi default ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Financial Assets and Liabilities (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Financial Assets (continued)

Expected credit losses ("ECL") (continued)

The Group's debt instruments at FVTOCI comprise solely of quoted bonds that are graded in the top investment category (Very Good and Good) by the Good Credit Rating Agency and, therefore, are considered to be low credit risk investments. It is the Group's policy to measure ECL on such instruments on a 24-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL. The Group uses the ratings from the Good Credit Rating Agency both to determine whether the debt instrument has significantly increased in credit risk and to estimate ECL.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. Trade receivables is written off when there is low possibility of recovering the contractual cash flow, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan hutang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Financial Assets and Liabilities (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Financial liabilities

Initial recognition and measurement of financial liabilities

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, payables or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loan and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group classifies its financial liabilities as: (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

The Group's financial liabilities include trade and other payables, accrued expenses, interest-bearing loans, other borrowings and other liabilities. Interest-bearing loans consist of short-term bank loans, long-term bank loans, and obligations under finance leases.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

**Pengukuran setelah pengakuan awal
liabilitas keuangan**

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

i. Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 71 terpenuhi. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

ii. Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Financial Assets and Liabilities (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Financial liabilities (continued)

**Subsequent measurement of financial
liabilities**

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as below:

i. Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL. Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss. Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

ii. Financial liabilities measured at amortized cost

This is the category most relevant to the Group. After initial recognition, interest-bearing loans and other borrowings are subsequently measured at amortized cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the statement of profit or loss.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

**Pengukuran setelah pengakuan awal
liabilitas keuangan (lanjutan)**

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Kategori ini secara umum berlaku untuk pinjaman. Informasi lebih lanjut dapat mengacu ke Catatan 22 Pinjaman Jangka Panjang.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- i. situasi bisnis yang normal;
- ii. peristiwa default; dan
- iii. peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Financial Assets and Liabilities (continued)

After January 1, 2020 (continued)

Financial liabilities (continued)

**Subsequent measurement of financial
liabilities (continued)**

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below: (continued)

ii. Financial liabilities measured at amortized cost (continued)

This category generally applies to interest-bearing loans and other borrowings. For more information, refer to Note 22 Long Term Loans.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle them on a net basis, or realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The right of set-off must not be contingent on a future event and must be legally enforceable in all of the following circumstances:

- i. the normal course of business;
- ii. the event of default; and
- iii. the event of insolvency or bankruptcy of the Group and all of the counterparties.

Derecognition of financial instruments

The Group derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset.

The Group derecognizes a financial liability when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or has expired.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Investasi pada entitas asosiasi

Jika Perusahaan memiliki pengaruh signifikan (namun bukan mengendalikan) terhadap kebijakan keuangan dan kebijakan operasi suatu entitas, entitas tersebut diklasifikasikan sebagai entitas asosiasi. *Investee* dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity-accounted investees*) dan diakui sebesar harga perolehan pada saat awal perolehan. Perusahaan anaknya mengakui bagian dari laba dan rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali jika kerugian melebihi investasi pada entitas asosiasi kecuali jika terdapat jaminan tertentu. Pengaruh signifikan diasumsikan terjadi ketika Grup memiliki antara 20% sampai dengan 50% hak suara entitas lain. Biaya investasi termasuk biaya transaksi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi antara Grup dengan perusahaan asosiasi diakui hanya sebatas kepentingan investor terkait dalam asosiasi. Bagian keuntungan dan kerugian penanam modal yang timbul dari transaksi asosiasi itu dihilangkan terhadap nilai tercatat asosiasi.

Laporan keuangan konsolidasian mencakup bagian laba rugi Grup dan penghasilan komprehensif lain dari *investee* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, setelah dilakukan penyesuaian untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi *investee* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dengan kebijakan Grup, sejak tanggal dimulainya pengaruh signifikan sampai dengan pengaruh signifikan berakhir.

Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Grup menentukan apakah perlu untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi.

Apabila terdapat bukti obyektif penurunan nilai, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya, dan mengakui penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Investments in associates

Where the Company has the power to participate in (but not control) the financial and operating policy decisions of another entity, it is classified as an associate. Associates are recorded by equity-accounted investees method and initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost. The Company's share of post-acquisition profits and losses is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, except that losses in excess of the Group's investment in the associate are not recognized unless there is an obligation to make good those losses. The Group has the power to participate when it owned the entity's voting rights between 20% to 50%. Cost of investment include transaction cost.

Profits and losses arising on transactions between the Group and its associates are recognized only to the extent of unrelated investors' interests in the associate. The investor's share in the associate's profits and losses resulting from these transactions is eliminated against the carrying value of the associate.

The consolidated financial statements include equity in profit or loss of the Group and other comprehensive income from investee under equity method, therefore adjustment shall be made to adjust accounting policies on investee which has been record using the equity method with the Group's policies started from the date of significant control until its ended.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that its investments in the associates are impaired. The Group determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on the Group's investments in its associates.

If there is objective evidence of impairment, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of investments in associates and their carrying value, and recognizes the impairment in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Perjanjian Jasa Konsesi

Pendapatan

Pendapatan yang berasal dari jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan berdasarkan perjanjian jasa konsesi diakui berdasarkan persentase penyelesaian dari pekerjaan yang dilakukan, konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup dalam mengakui pendapatan atas jasa konstruksi. Pendapatan operasi atau jasa diakui pada periode dimana jasa telah diberikan oleh Grup.

Pendapatan dari penyerahan tenaga listrik kepada pelanggan berdasarkan perjanjian konsesi jasa sejauh komponen investasi dari transaksi pendapatan diperhitungkan sebagai transaksi jasa konsesi menggunakan model aset keuangan. Pendapatan yang berkaitan dengan komponen lain dari harga tenaga listrik yang dikirimkan diakui sebagai pendapatan penjualan pada saat penyerahan tenaga listrik ke pelanggan.

Aset keuangan non-derivatif

Grup mengakui aset keuangan yang terjadi akibat adanya perjanjian konsesi jasa ketika memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari atau atas diskresi pemberi konsesi untuk jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan.

Pada pengakuan awalnya, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajarnya dan diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang. Pengakuan setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diakui pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset takberwujud

Grup mengakui aset takberwujud yang berasal dari perjanjian jasa konsesi sejauh menerima hak untuk membebaskan pengguna sarana konsesi. Aset takberwujud yang diperoleh dari penyediaan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan dalam perjanjian jasa konsesi diukur pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal.

Pengakuan setelah pengakuan awal, aset takberwujud diukur pada nilai perolehannya, termasuk kapitalisasi biaya pinjaman, dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Service Concession Arrangements

Revenue

Revenue related to construction or upgrade services under a service concession arrangement is recognized based on the percentage of completion of the project, consistent with the Group's accounting policy on revenue recognition on construction services. Operation or services revenue is recognized in the period in which the services are provided by the Group.

Revenue from delivery of electric power to the customer to the extent of the investment component of the revenue transaction is accounted for as service concession transaction using financial assets model. Revenue related to the other components of the price of electric power delivered is recognized as sales revenue upon delivery of electric power to customer.

Non-derivative financial assets

The Group recognizes a financial asset arising from a service concession arrangement when it has an unconditional contractual right to receive cash or other financial assets from or at the direction of the grantor for the construction or upgrade services provided.

Such financial assets are measured at fair value on initial recognition and classified as loan and receivables. Subsequent to initial recognition, the financial assets are measured at amortized cost.

Intangible assets

The Group recognized an intangible assets arising from a service concession arrangement when it has a right to charge for usage of the concession infrastructure. An intangible asset received as consideration for providing construction or upgrade services in a service concession arrangement is measured at fair value on initial recognition.

Subsequent to initial recognition, the intangible asset is measured at cost, which includes capitalized borrowing costs, less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Perjanjian Jasa Konsesi (lanjutan)

Aset takberwujud (lanjutan)

Estimasi umur manfaat dari aset takberwujud pada perjanjian jasa konsesi adalah periode ketika Grup mampu membebankan kepada pengguna jasa publik atas pemanfaatan sarannya hingga berakhirnya masa konsesi.

Jenis	Tahun/Years	
	2020	2019
Hak Pengusahaan Jalan Tol		
Ruas Tallo - Bandara Hasanuddin ("JTSE")	35 *)	35 *)
Ruas Pelabuhan Soekarno Hatta-Pettarani ("MMN")	45 *)	45 *)
Ruas Pondok Aren - Serpong ("BSD")	28	28
Hak Pengusahaan Pengolahan Air Bersih	30	30

*) maksimum

Beban pemeliharaan dan perbaikan

Beban pemeliharaan dan perbaikan sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya, kecuali jika besar kemungkinan akan meningkatkan manfaat ekonomi di masa depan dan dapat diukur secara handal.

o. Aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa

Aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa merupakan jumlah piutang dari pemberi jasa untuk jasa yang diberikan oleh Grup sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa dimana Grup memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima uang tunai dari pemberi jasa. Aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa diukur pada nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, yaitu jumlah awal yang diakui ditambah dengan bunga kumulatif atas jumlah yang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif dikurangi pembayaran. Aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan; jika tidak, mereka diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Service Concession Arrangements (continued)

Intangible assets (continued)

The estimated useful life of an intangible asset in a service concession arrangement is the period from when the Group is able to charge the public for the use of the infrastructure to the end of the concession period.

Types	Tahun/Years	
	2020	2019
Toll Road Concession Rights		
Section Tallo-Hasanuddin Airport ("JTSE")	35 *)	35 *)
Section Soekarno Hatta Harbor - Pettarani ("MMN")	45 *)	45 *)
Section Pondok Aren - Serpong ("BSD")	28	28
Water-Treatment Concession Rights.	30	30

*) maximum

Maintenance and repair expense

The cost of maintenance and repair services in connection with the concession agreement is charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred, except when it is likely to increase in the future economic benefits and can be measured reliably.

o. Financial assets arising from service concession arrangement

Financial assets arising from service concession arrangements represent the amounts due from the grantor for services provided by the Company in connection with service concession arrangements where the Group has an unconditional contractual right to receive cash from the grantor. Financial assets arising from service concession arrangements are measured initially at fair value and subsequently measured at amortized cost, i.e. the amount initially recognised plus the cumulative interest on that amount calculated using the effective interest method minus repayments. Financial assets arising from service concession arrangements are classified as current assets if they are expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada tanggal pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai. Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Goodwill diuji penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap Unit Penghasil Kas (UPK) terkait dengan *goodwill* tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan pada tanggal laporan keuangan.

q. Pinjaman

Pinjaman merupakan dana yang diterima dari bank atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima. Lihat Catatan 21 untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Impairment of Non-financial Assets

At the reporting date, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If such indication exists, the recoverable value of the asset is estimated to determine the level of impairment loss. If it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable value of the cash generating unit to an asset.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each Cash Generating Unit (CGU) to which goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future period.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of non financial assets at financial statement date.

q. Loans

Loans are funds received from banks or other parties with the obligation to repay the loan in accordance with the terms of the agreement.

Loans are classified as financial liabilities measured by amortized cost. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of loan are deducted from the loan amount received. See Note 21 for the accounting policy for financial liabilities measured at amortized cost.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

r. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas.

Kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan, ketika pendiskontoan digunakan.

Provisi pemeliharaan jalan tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Grup mempunyai kewajiban untuk menjaga standar kualitas jalan tol sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala akan diprovisi berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas ini pada tanggal pelaporan.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pada 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Provision

Provisions are recognized when the Group has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability.

When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

Provision for toll road maintenance

In operating toll roads, the Group is obliged to maintain the quality in accordance with the Minimum Service Standards that have been established by the Ministry of Public Works that is by performing overlay regularly. The cost of this overlay will periodically be recognized based on estimation with the utilization of toll road by customers. This provision is measured using the present value of management's estimate of expenditures required to settle present obligation at the reporting date.

s. Revenue and Expenses Recognition

On January 1, 2020, the Group has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessments as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**s. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

Pada 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut: (lanjutan)

3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Harga transaksi merupakan angka yang ditagihkan kepada pelanggan setelah mengeluarkan pajak pertambahan nilai.

Kriteria spesifik berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan konstruksi

Grup mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Grup mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**s. Revenue and Expenses Recognition
(continued)**

On January 1, 2020, the Group has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessments as follows: (continued)

3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promises in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

The transaction price is based on the amount billed to customer excluding value added taxes

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized.

Construction revenues

The Group recognizes intangible assets of construction services and increased capacity in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Group recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**s. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

Pendapatan konstruksi (lanjutan)

Pendapatan konstruksi dicatat bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

Pendapatan tol

Pendapatan tol dari hasil pengoperasian jalan tol diakui pada saat penjualan karcis tol dan/atau jasa telah diberikan. Pendapatan tol dari hasil kerjasama pengoperasian jalan tol dengan investor dengan kuasa penyelenggaraan diakui pada saat penjualan karcis tol setelah dikurangi bagian investor tersebut. Pembayaran kepada investor tanpa hak operasi dicatat sebagai angsuran wajib kerja sama operasi. Selisih total pembayaran atas angsuran wajib kerjasama operasi dicatat sebagai gabungan beban usaha atau pendapatan.

Pendapatan bunga dari sewa pembiayaan

Pendapatan dari penyerahan tenaga listrik kepada pelanggan sejauh komponen investasi dari transaksi pendapatan diperhitungkan sebagai transaksi sewa pembiayaan dimana Perusahaan adalah lessor.

Penjualan tenaga listrik

Pendapatan yang berkaitan dengan komponen lain dari harga tenaga listrik yang dikirimkan (biaya tenaga listrik *non-take or pay*) diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan risiko dan manfaat ekonomik dari tenaga listrik diterima oleh pelanggan. Pendapatan dari operasi dan pemeliharaan diakui pada saat jasa diberikan.

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan pada saat diperoleh. Uang muka sewa yang diterima di muka disajikan sebagai "Pendapatan Diterima di Muka" dan diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus sesuai masa sewanya. Pendapatan sewa yang belum ditagih disajikan sebagai piutang yang belum difakturkan dan dicatat di akun Piutang Usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**s. Revenue and Expenses Recognition
(continued)**

Construction revenues (continued)

Construction revenues are recorded simultaneously with the recognition of an intangible asset during the construction phase.

Toll revenues

Revenue from toll road operations is recognized when toll tickets are sold and/or services are rendered. Revenue from profit sharing arrangement is recognized when toll tickets are sold, net of investor's share. Payments to investors without operating rights are recorded as a mandatory installment under joint operation. The excess of total payment over mandatory installment under joint operation is recorded as joint operation expenses or revenue.

Interest income of finance lease

Revenue from delivery of electric power to the customer to the extent of the investment component of the revenue transaction is accounted for as finance lease transaction whereby the Company are the lessors.

Sale of power electricity

Revenue related to the other components of the price of electric power delivered (cost of non-take or pay electricity power) is recognized as revenue upon delivery the risk and benefit economic of electric power is received by the customer. Revenue from operations and maintenance is recognized when services are rendered.

Rent revenues

Rental income from operating lease is recognized as revenue when earned. Rental received in advance are presented as "Deferred Income" and recognized as income on straight-line basis over the lease term. Rental revenue that has not been billed yet are presented as accrued income and recorded in Trade Receivables.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**s. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

Penjualan air bersih

Pendapatan dari penjualan penyediaan air bersih diakui berdasarkan volume yang diserahkan kepada pelanggan, baik yang secara khusus dibaca dan ditagih maupun yang diestimasi berdasarkan *output* dari jaringan penyediaan air bersih dan kemungkinan besar Grup akan menerima pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.

Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan sewa iklan, lahan dan tempat peristirahatan serta pendapatan jasa pengoperasian diakui sesuai periode yang sudah berjalan dalam tahun yang bersangkutan. Pendapatan diterima di muka untuk periode yang belum berjalan diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas. Pendapatan dividen dari aset keuangan lainnya diakui pada saat pembagian dividen diumumkan. Pendapatan lainnya diakui atas dasar akrual.

Beban konstruksi

Beban konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol dan pembangunan sarana pengelolaan air bersih. Konstruksi pembangunan jalan tol termasuk peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Beban konstruksi dicatat bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**s. Revenue and Expenses Recognition
(continued)**

Sales of water

Revenue from sales of water is recognized based on the provision of clean water volume delivered to the customers, either specifically read and billed or estimated based on the output of the network of water supply and most likely the Group will receive payments previously agreed.

Other operating revenues

Revenues from advertisement, space and rest area rental and income from toll road operating service are recognized when earned. Advances received not yet earned are recognized as unearned revenue and are presented in the consolidated statement of financial position as a liability. Dividend income from other financial asset is recognized when the dividend distribution has been declared. Other income is recognized based on accrual basis.

Construction costs

Construction cost represents the entire cost of construction of toll road and construction of water management facilities. Construction of toll road includes the increasing of capacity toll roads which includes land acquisition, feasibility studies and other costs directly related to the construction of toll roads, including the cost of construction of access roads to toll roads, alternative roads and public roads required plus other borrowing costs which are directly used to fund the construction of the asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

Construction costs are recorded simultaneously with the recognition of an intangible asset during the construction phase.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

t. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dan undang-undang pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar nilai yang diharapkan dapat terpulihkan atau dibayar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Taxation

Income tax expenses comprises current and deferred income tax. Tax are recognized in the statement of profit or loss, except to the extent that it relates to item recognized in other comprehensive income or directly in equity.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year, using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted at the reporting tax. Current tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered or paid.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a future period tax consequences resulting from differences of carrying value between assets and liabilities based on the consolidated financial statements with tax base of assets and liabilities. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible differences, when it is probable to be used against future taxable income.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantially enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited to the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, except deferred tax which is charged or credited directly to equity.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final

Peraturan pajak di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK 46, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46. Oleh karena itu, Grup menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak final sebagai bagian dari beban usaha.

u. Imbalan Pasca-kerja

Grup mengakui imbalan pasca kerja jangka pendek berdasarkan metode akrual sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Liabilitas imbalan pasca-kerja dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, efek dari plafon aset, tidak termasuk jumlah yang termasuk dalam bunga bersih atas liabilitas manfaat pasti bersih dan pengembalian aset program (tidak termasuk jumlah yang termasuk dalam bunga bersih atas liabilitas imbalan pasti bersih) segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Taxation (continued)

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to PSAK 46, final tax is no longer governed by PSAK 46. Therefore, The Group has decided to present all of the final tax arising from revenues subject to final tax as part of operating expenses.

u. Post-employment Benefits

The Group recognizes an unfunded post-employment benefit liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003.

The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the *Projected Unit Credit* method.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, the effect of the asset ceiling, excluding the amounts included in the net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding the amounts, included in net interest on the net defined benefit liability) are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and
- ii) the date the Group recognizes related restructuring costs.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

u. Imbalan Pasca-kerja (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja. Grup mengakui perubahan berikut pada kewajiban manfaat pasti pasti neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laba rugi konsolidasian :

i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan

ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

v. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan.

Grup tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilusi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan oleh karenanya, laba per saham dilusi tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

w. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian khusus Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha) maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis) yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta item-item yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai dengan segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Post-employment Benefits (continued)

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Goods Sold" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the consolidated profit or loss:

i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and

ii) Net interest expense or income.

v. Basic Earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing net income for the year attributable to owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

The Group has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2020 and 2019, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

w. Segment Information

A segment is a special part of the Group that is engaged in providing products and services (business segment) or in providing products and services within a particular economic environment (geographical segment) which is subject to risks and returns that are different from those of other segments.

Revenues, expenses, results, assets and liabilities of segments include items directly attributable to a segment as well as items that can be allocated on a reasonable basis to the segment. Segment is determined before inter-company balances and transactions are eliminated as part of the consolidation process.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 21.

Penyisihan atas penurunan nilai piutang

Grup mengevaluasi akun tertentu yang mana diketahui bahwa pelanggan tersebut tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak-pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang, guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgement

Classification of financial assets and liabilities

The following judgments are made by management in the process of applying the Group accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 21.

Allowance for impairment of accounts receivable

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgement, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific allowances for customers against amounts due, to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific allowances are reevaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of receivable.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan mata uang fungsional

Berdasarkan substansi ekonomi dari keadaan mendasar yang relevan terhadap Grup, mata uang fungsional ditetapkan adalah Rupiah. Mata uang tersebut adalah terutama mempengaruhi sebagian besar penjualan, harga pokok penjualan dan biaya operasi Grup.

Mengevaluasi dampak periode opsi pada masa sewa - Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, dan juga periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika opsi cukup pasti untuk dieksekusi, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika opsi cukup pasti untuk tidak dieksekusi.

Untuk kontrak sewa apapun yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian, Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan atau penghentian sewa. Dengan kata lain, Perusahaan mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk mengeksekusi perpanjangan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Perusahaan menilai ulang masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam kondisi yang berada dalam pengendalian Perusahaan dan mempengaruhi kemampuan untuk mengeksekusi atau untuk tidak mengeksekusi opsi perpanjangan atau penghentian.

Sewa pembiayaan

Perusahaan menetapkan bahwa kesepakatan mengenai komponen A ("Capital Cost Recovery") penjualan listrik sesuai dengan *Power Purchase Agreement* (Catatan 37d) memenuhi kriteria untuk mengakui Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro ("PLTMH") sebagai aset sewa. Dengan demikian, setelah dimulainya produksi listrik berdasarkan *Commercial Date*, Perusahaan mengakui piutang sewa pembiayaan atas nilai investasi bersih untuk membangun PLTMH tersebut.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgement (continued)

Determination of functional currency

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Rupiah. It is the currency that mainly influences majority of the Group sales, cost of sales and operating expense.

Evaluating the impact of option periods on lease terms - Company as a lessee

The Company determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

For any contracts with include extension and termination options, the Company applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. That is, it considers all relevant factors that create an economic incentive for it to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Company reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Finance lease

The Company determined that the arrangement concerning component A ("Capital Cost Recovery") the electricity sales in accordance with the *Power Purchase Agreement* (Note 37d) fulfilled the criteria to recognize the Mini-Hydro Electric Power Plant ("MHEPP") as leased assets. Accordingly, upon commencing of the electricity production based on the *Commercial Date*, the Company recognized a finance lease receivable over the net investment to construct the MHEPP.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 30 tahun.

Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas aset tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diungkapkan dalam Catatan 11.

Aset takberwujud

Nilai wajar dari perolehan aset takberwujud atas penyediaan jasa konstruksi pada perjanjian jasa konsesi diestimasi berdasarkan referensi nilai wajar dari pengadaan jasa konstruksi tersebut. Nilai tercatat aset takberwujud diungkapkan pada Catatan 15 atas laporan keuangan konsolidasian.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS**

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Depreciation of property, plant, and equipment

The costs of property, plant, and equipment are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property, plant, and equipment to be within 4 to 30 years.

These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. The net carrying amount of the Group's property, plant, and equipment as of December 31, 2020 and 2019 are disclosed in Note 11.

Intangible assets

The fair value of intangible assets received as consideration for providing construction services in a service concession arrangement is estimated by reference to the fair value of the construction service provided. The carrying value of the Group's intangible assets is disclosed in Note 15 to the consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Grup menggunakan penilaian mereka untuk memilih berbagai metode dan membuat asumsi yang terutama didasarkan pada kondisi pasar yang ada pada setiap tanggal laporan posisi keuangan tanggal. Grup telah menggunakan analisis *discounted cash flow* untuk berbagai aset keuangan dan liabilitas yang tidak diperdagangkan di pasar aktif. Perbandingan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 39.

Estimasi volume lalu lintas dan amortisasi hak perusahaan jalan tol

Dalam menentukan amortisasi hak perusahaan jalan tol, manajemen memproyeksikan volume lalu lintas setelah tahun berjalan selama sisa periode perjanjian konsesi. Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tarif dan volume kendaraan.

Manajemen melakukan penilaian secara berkala terhadap total proyeksi volume lalu lintas. Perusahaan akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

Perusahaan menunjuk konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen pada jalan tol pada tahun 2019.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Fair value of financial assets and liabilities

The fair value of financial assets and liabilities that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. The Group use their judgment to select a variety of methods and make assumptions that are mainly based on market conditions existing at each statement of financial position date. The Group has used discounted cash flow analysis for various financial assets and liabilities that were not traded in active markets. The comparison between the fair value and carrying amount of the Group's financial assets and liabilities as at consolidated statement of financial position date is disclosed in Note 39.

Estimation of traffic volume and amortization of toll road concession rights

In determining amortization of toll road concession rights, the management has to project traffic volume after current year for the remaining years of the concession agreement. Traffic volume is projected based on the number of vehicles and adjusted by comparison to actual vehicle volume. However, the actual vehicle volume in the future could differ from the estimate depending upon changes in external factor that may affect toll rates and vehicle volume.

The management performs periodic assessment on the total projected traffic volume. The Company will appoint an independent professional traffic consultant to perform independent professional traffic studies and make an appropriate adjustment if there is a material difference between projected and actual volume.

The Company appoints an independent professional traffic consultant to perform independent professional traffic studies on its toll roads in 2019.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja

Biaya program pensiun imbalan pasti dan imbalan pasca kerja lainnya dan nilai kini liabilitas pensiun ditentukan dengan menggunakan penilaian aktuaria. Penilaian aktual melibatkan pembuatan berbagai asumsi yang mungkin berbeda dari perkembangan aktual di masa depan. Ini termasuk penentuan tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian, dan kenaikan pensiun di masa depan. Karena kompleksitas yang terlibat dalam penilaian dan sifat jangka panjangnya, liabilitas imbalan pasti sangat peka terhadap perubahan asumsi ini. Semua asumsi ditelaah setiap tanggal pelaporan.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja neto.

Nilai tercatat neto liabilitas imbalan pasca kerja Grup pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp60.547.539.716 (2019: Rp48.203.142.503). Penjelasan lebih rinci atas imbalan pasca kerja diungkapkan dalam Catatan 36.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Piutang sewa pembiayaan

Penentuan nilai wajar dari piutang sewa pembiayaan tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang antara lain meliputi, tingkat suku bunga diskonto dan periode sewa. Walaupun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan yang signifikan dalam hasil aktual Perusahaan atau perubahan signifikan dalam asumsi Perusahaan mungkin dapat mempengaruhi nilai wajar secara material dari piutang sewa pembiayaan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 12.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Post-employment benefit

The cost of the defined benefit pension plan and other post-employment benefits and the present value of the pension obligation are determined using actuarial valuations. An actual valuation involves in making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate, future salary increases, mortality rates, and future pension increases. Due to the complexities involved in the valuation and its long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and post-employment benefit and net post-employment benefit expense.

The net carrying amount of the Group's post-employment benefit liability as of December 31, 2020 was Rp60,547,539,716 (2019: Rp48,203,142,503). Further details on post-employment benefit are disclosed in Note 36.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Finance lease receivable

The determination of the fair value of finance lease receivable is dependent on its selection of certain assumptions which include among others, discount rates and lease periods. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual result or significant changes in the Company's assumptions may materially affect the fair value of the finance lease receivable. Further details are disclosed in Note 12.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Menentukan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan sebagai tingkat diskonto

Dalam menentukan liabilitas sewa Perusahaan, suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan sebagai tingkat diskonto dalam mendiskontokan pembayaran sewa telah ditetapkan berdasarkan pendekatan konsisten yang mencerminkan tingkat pinjaman yang relevan dengan bisnis perusahaan atau jenis aset sewa, mata uang liabilitas, panjang masa sewa, dan spread kredit untuk badan hukum yang bersepakat dalam kontrak sewa.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATION AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Determining the incremental borrowing rate to be used as discount factor

In determining the Company's lease liabilities, the incremental borrowing rates used as discount factors in discounting lease payments have been established based on a consistent approach reflecting the borrowing rate that relevant to the Company's business or the type of lease asset, the currency of the liabilities, the duration of the lease term, and the credit spread for the legal entity entering into the lease contract.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Kas - Rupiah	378.928.020	293.059.046	Cash on hand - Rupiah
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	171.147.763.527	66.955.798.839	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.124.146.640	26.604.158.800	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	1.720.290.242	886.959.210	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.297.727.506	616.258.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Sulselbar	1.091.437.574	543.248.188	PT Bank Sulselbar
PT Bank BTPN Tbk	343.582.348	61.965.562.544	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Commonwealth	334.623.137	332.349.476	PT Bank Commonwealth
PT Bank Pan Indonesia Tbk	226.758.422	217.058.664	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	145.521.751	631.454.961	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	90.967.810	760.316.247	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	47.153.650	47.560.804	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank KEB Hana Indonesia	17.743.308	17.790.308	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	12.397.182	12.459.641	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank DKI	3.948.000	2.023.000	PT Bank DKI
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.950.341	3.754.340	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	1.000.000	-	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank Mega Tbk	-	17.032.398	PT Bank Mega Tbk
Sub-jumlah	178.608.011.438	159.613.785.420	Sub-total
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Central Asia Tbk	219.997.153	390.829.633	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	17.614.837	22.724.982	PT Bank ICBC Indonesia
Sub-jumlah	237.611.990	413.554.615	Sub-total
Jumlah Bank	178.845.623.428	160.027.340.035	Total Cash in Banks

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Deposito berjangka - Rupiah		
PT Bank BTPN Tbk	90.100.000.000	267.500.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	80.000.000.000	7.572.500.000
PT Bank Victoria International Tbk	13.000.000.000	13.000.000.000
PT Bank BTPN Syariah Tbk	4.000.000.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	100.000.000.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	-	42.000.000.000
Jumlah Deposito berjangka	187.100.000.000	430.072.500.000
Jumlah	366.324.551.448	590.392.899.081

Tingkat bunga deposito berjangka pada tahun 2020 dan 2019 berkisar antara 3,25% - 6,00% dan 4,50% - 8,00% per tahun. Deposito berjangka termasuk kelompok "Kas dan setara kas" dengan jangka waktu penempatan tiga bulan atau kurang.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Time deposits - Rupiah	
PT Bank BTPN Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Victoria International Tbk	
PT Bank BTPN Syariah Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank KEB Hana Indonesia	
Total Time Deposits	Total

Annual interest rates of time deposits for the year 2020 and 2019 ranged between 3.25% - 6.00% and 4.50% - 8.0% per annum, respectively. The time deposits included as part of "Cash and cash equivalents" with original maturities of three months or less.

5. ASET KEUANGAN YANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Efek tersedia untuk dijual	
Biaya perolehan	60.000.000.000
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar	(16.149.248.872)
Jumlah	43.850.751.128

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, efek tersedia untuk dijual merupakan investasi BSD, entitas anak tidak langsung, dalam bentuk saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.

Seluruh investasi digolongkan sebagai investasi tersedia untuk dijual dengan nilai efek ekuitas ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan.

5. AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS

This account consists of:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	Marketable securities available-for-sale
	60.000.000.000	Acquisition cost
	(166.264.816)	Unrealized loss on changes in fair value
Jumlah	59.833.735.184	Total

As of December 31, 2020 and 2019, available-for-sale securities represents an indirect subsidiary, BSD's investments in shares of PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.

All investments are classified as investment available-for-sale with the fair value determined based on market value issued by the Indonesia Stock Exchange at the date of statement of financial position.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG

a. Piutang usaha

Berdasarkan pelanggan

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Pihak ketiga		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	12.807.850.207	11.224.267.944
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	9.138.185.795	8.181.185.795
PT Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Albantani	2.260.667.588	1.669.975.375
Kartu tol elektronik	1.010.135.817	1.969.148.908
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	449.711.400	588.732.000
PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	339.291.000	399.251.000
PT Nikomas Gemilang	62.751.000	317.651.000
PT Berkah Manis Makmur	10.141.000	616.371.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp300.000.000)	2.590.756.051	2.807.071.000
Sub-jumlah	28.669.489.858	27.773.654.022
Pihak berelasi (Catatan 35)	72.000.000	72.000.000
Jumlah	28.741.489.858	27.845.654.022

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Belum jatuh tempo	12.807.850.207	16.493.929.944
1 - 30 hari	5.483.242.334	1.425.871.110
31 - 60 hari	1.184.215.668	1.637.171.712
Lebih dari 60 hari	9.266.181.649	8.288.681.256
Bersih	28.741.489.858	27.845.654.022

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah, tidak dijaminkan dan tidak dikenakan bunga.

Kartu tol elektronik terdiri dari tagihan atas pendapatan tol BSD, MMN dan JTSE, entitas anak tidak langsung, dari kartu tol elektronik Flazz BCA, kartu tol elektronik Mandiri, kartu tol elektronik Brizzi BRI, kartu tol elektronik BNI TapCash dan kartu tol elektronik Mega Card pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Berdasarkan telaah atas status dari masing-masing akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

6. RECEIVABLES

a. Trade receivables

By customers

	Third parties
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	
PT Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Albantani	
E-toll cards	
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	
PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	
PT Nikomas Gemilang	
PT Berkah Manis Makmur	
Others (each below Rp300,000,000)	
Sub-total	
Related parties (Note 35)	
Total	

The aging analysis of trade receivables are as follows:

Not yet due	
1 - 30 days	
31 - 60 days	
More than 60 days	
Net	

All trade receivables are denominated in Rupiah, unsecured and non-interest bearing.

E-Toll cards receivables represents revenue billings of BSD, MMN and JTSE, indirect Subsidiaries, from e-toll Flazz BCA, e-toll Mandiri, e-toll Brizzi BRI, e-toll BNI TapCash and e-toll Mega Card, as of December 31, 2020 and 2019.

Based on the review of the status of each of the accounts receivable at the end of the year, the Group management believes that the allowance for impairment losses for trade receivables is not considered necessary to cover possible losses from uncollectible accounts.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG (lanjutan)

a. Piutang usaha (lanjutan)

Berdasarkan pelanggan (lanjutan)

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha tersebut.

b. Piutang non-usaha

6. RECEIVABLES (continued)

a. Trade receivables (continued)

By customers (continued)

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk on the trade receivables.

b. Non-trade receivables

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Pihak ketiga			Third parties
PT Jaka Tingkir Ekspres (Catatan 37)	32.008.961.275	32.008.961.275	PT Jaka Tingkir Ekspres (Note 37)
Piutang iklan dan sewa lahan	17.710.803.655	14.173.456.085	Advertisement income and land rent receivables
Piutang bunga	5.789.679.002	5.300.907.449	Interest receivables
PT Dahan Karya Bertunas	5.000.000.000	-	PT Dahan Karya Bertunas
PT Langgeng Sukses Mandiri	3.411.680.292	3.411.680.292	PT Langgeng Sukses Mandiri
PT Tagora Green Energy	2.610.540.948	8.797.012.753	PT Tagora Green Energy
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000.000)	13.633.268.395	10.491.977.164	Others (each below Rp1,000,000,000)
	80.164.933.567	74.183.995.018	
Dikurangi penyisihan penurunan nilai	(7.028.342.703)	-	Less allowance for impairment
Piutang non-usaha, neto	73.136.590.864	74.183.995.018	Non-trade receivables, net
Dikurangi: Bagian lancar	(69.041.624.556)	(42.175.033.743)	Less: Current portion
Bagian tidak lancar lainnya	4.094.966.308	32.008.961.275	Other non-current portion

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

7. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Uang muka			Advances
Proyek	108.275.495.241	290.205.570.818	Projects
Jaminan	1.440.520.734	1.441.995.354	Deposits
Pembelian suku cadang	-	2.241.145.579	Purchase of spare parts
Lain-lain	7.866.577.829	6.348.423.561	Others
Beban dibayar di muka			Prepaid expenses
Asuransi	647.229.716	433.016.244	Insurances
Pemeliharaan dan keamanan	627.943.885	892.773.358	Maintenance and security
Sewa	50.221.294	1.094.219.136	Rent
Jumlah	118.907.988.699	302.657.144.050	Total
Bagian jangka panjang			Long-term portion
Uang muka proyek	(108.275.495.241)	(290.205.570.818)	Advances for projects
Bagian jangka pendek	10.632.493.458	12.451.573.232	Current portion

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, uang muka proyek sebagian besar merupakan uang muka yang dibayarkan MMN, entitas anak tidak langsung, atas pembangunan jalan tol Pettarani, Makassar.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sewa dibayar di muka sebagian besar merupakan sewa lahan yang dibayarkan oleh BSD, entitas anak tidak langsung, atas penyediaan jasa pemeliharaan dan keamanan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang digunakan BSD sebagai area pendukung jalan tol dengan jangka waktu sesuai dengan masa kontrak sewa selama 5 tahun.

Uang muka proyek dan pembelian aset tetap merupakan uang muka pekerjaan dalam pelaksanaan terdiri dari sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Pembangunan jalan tol	108.275.495.241
Pembangunan pembangkit listrik tenaga mini-hidro	-
Jumlah	108.275.495.241

**7. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES
(continued)**

As of December 31, 2020 and 2019, advances on projects represents advances paid by MMN, an indirect subsidiary, for the toll road construction in Pettarani, Makassar.

As of December 31, 2020 and 2019, prepaid rent represents land rent paid by BSD, an indirect subsidiary, for providing maintenance and security services of land owned by PT Kereta Api Indonesia (KAI) which are used by BSD as a supporting area for the toll road with a lease period contract for 5 years.

Advance for projects and purchase of property, plant, and equipment represents advance for construction in progress include as follow:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	287.313.931.178	Toll road construction
	2.891.639.640	Mini-hydro power plant construction
Total	290.205.570.818	

8. PERSEDIAAN

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, akun ini merupakan persediaan atas bahan-bahan untuk perbaikan, pemeliharaan dan penggantian pengelolaan air bersih milik SCTK dan DCC, serta pembangkit listrik tenaga biomass yang dimiliki oleh RPSL, masing-masing merupakan entitas anak tidak langsung (Catatan 1d).

8. INVENTORIES

As of December 31, 2020 and 2019, this account represents supplies of materials for repair, maintenance and replacement of the water treatment plant owned by SCTK and DCC, and biomass power plant owned by RPSL, an indirect subsidiary, each (Note 1d).

**9. KAS DI BANK YANG DIBATASI
PENGUNAANNYA**

	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Bank Central Asia Tbk	24.260.769.638
PT Bank ICBC Indonesia	4.913.162.362
Jumlah	29.173.932.000

9. RESTRICTED CASH IN BANKS

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	20.090.984.319	PT Bank Central Asia Tbk
	4.498.860.000	PT Bank ICBC Indonesia
Total	24.589.844.319	

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**9. KAS DI BANK YANG DIBATASI
PENGUNAANNYA (lanjutan)**

Saldo pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) merupakan rekening escrow milik BSD, MMN, JTSE dan DCC, entitas anak tidak langsung, dan MUN dan EI, entitas anak langsung, yang ditempatkan pada BCA sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh. Rekening ini ditujukan untuk menampung pendapatan jalan tol harian serta penerimaan penjualan air bersih dan digunakan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian restrukturisasi pinjaman antara entitas-entitas anak langsung dan tidak langsung dan BCA (Catatan 22).

SCTK, entitas anak tidak langsung, memiliki rekening escrow yang ditempatkan pada PT Bank ICBC Indonesia sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh SCTK.

9. RESTRICTED CASH IN BANKS (continued)

Balance in PT Bank Central Asia Tbk (BCA) represents escrow accounts of BSD, MMN, JTSE and DCC, indirect subsidiaries, and MUN and EI, direct subsidiaries that are placed pertinent with acquired loans. These escrow accounts are escrow the daily toll road revenue and receipt of water sales and shall be used under the terms of loan agreements between those direct and indirect subsidiaries and BCA (Note 22).

SCTK, an indirect subsidiary, has escrow accounts that are placed with PT Bank ICBC Indonesia pertinent with loans acquired by SCTK.

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Penyertaan saham pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES

Investment in associates entities as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

31 Desember 2020/ December 31, 2020	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Dividen/ Dividend	Bagian atas labal/ Equity in net profit	Pengakuan atas Bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi/ Recognition of share in other comprehensive income of an associates company	Saldo akhir/ Ending balance
Metode ekuitas/ Equity method								
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Pengelola jalan tol/ Toll road operator	35.00%	721.812.021.165	-	(21.000.000.000)	43.189.949.528	13.495.102	744.015.465.795
PT Intisentosa Alam Bahtera	Pengusahaan jasa pelabuhan/ Port services	39.00%	86.460.446.920	-	-	(3.324.937.316)	-	83.135.509.604
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Instalasi air bersih/ Water installation	28.00%	23.041.956.447	-	-	1.249.545.592	-	24.291.502.039
Jumlah/Total			831.314.424.532	-	(21.000.000.000)	41.114.557.804	13.495.102	851.442.477.438

31 Desember 2019/ December 31, 2019	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Dividen/ Dividend	Bagian atas labal/ Equity in net profit	Pengakuan atas Bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi/ Recognition of share in other comprehensive income of an associates company	Saldo akhir/ Ending balance
Metode ekuitas/ Equity method								
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Pengelola jalan tol/ Toll road operator	35.00%	691.830.318.981	-	(35.000.000.000)	64.948.742.628	32.959.556	721.812.021.165
PT Intisentosa Alam Bahtera	Pengusahaan jasa pelabuhan/ Port services	39.00%	80.598.597.288	-	-	5.861.849.632	-	86.460.446.920
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Instalasi air bersih/ Water installation	28.00%	18.314.138.847	-	-	4.727.817.600	-	23.041.956.447
Jumlah/Total			790.743.055.116	-	(35.000.000.000)	75.538.409.860	32.959.556	831.314.424.532

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Juni 2020, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 21 dari Karin Christiana Basoeki, S.H., pada tanggal yang sama antara lain pemegang saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2019 sebesar Rp60.000.000.000. Pada 31 Desember 2020, MUN mencatat piutang dividen sebesar Rp21.000.000.000.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 22 Mei 2019, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 42 dari Aliya S. Azhar, S.H. M.H., M.Kn., pada tanggal yang sama antara lain pemegang saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2018 sebesar Rp100.000.000.000. Pada tanggal 27 September 2019, MUN telah menerima dividen tunai sebesar Rp35.000.000.000.

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES (continued)

In the Shareholders' Annual General Meeting held on June 24, 2020, which was notarized in Notarial Deed No. 21 of Karin Christiana Basoeki, S.H., of the same date, the shareholders of PT Jakarta Lingkar Baratsatu approved the distribution of cash dividends for 2019 of Rp60,000,000,000. As of December 31, 2020, MUN recorded dividend receivable amounting to Rp21,000,000,000.

In the Shareholders' Annual General Meeting held on May 22, 2019, which was notarized in Notarial Deed No. 42 of Aliya S. Azhar, S.H. M.H., M.Kn., of the same date the shareholders of PT Jakarta Lingkar Baratsatu approved the distribution of cash dividends for 2018 of Rp100,000,000,000. On September 27, 2019, MUN has received cash dividend amounting to Rp35,000,000,000.

11. ASET TETAP

11. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT

31 Desember 2020	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi*/ reclassification*)	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2020
Biaya perolehan						Cost
Pemilik langsung						Direct acquisition
Tanah dan hak atas tanah	14.943.673.093	-	-	-	14.943.673.093	Land and landrights
Bangunan dan prasarana	108.407.968.675	24.000.000	-	196.960.666	108.628.929.341	Buildings and infrastructures
Mesin dan peralatan	39.705.617.237	174.972.800	-	-	39.880.590.037	Machinery and equipment
Peralatan kantor	51.380.669.581	996.225.600	-	80.750.000	52.457.645.181	Office equipment
Kendaraan	24.920.800.076	1.455.369.000	-	-	26.376.169.076	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	310.813.307.599	94.604.569.743	-	(402.716.600.244)	2.701.277.098	Construction in progress
	550.172.036.261	97.255.137.143	-	(402.438.889.578)	244.988.283.826	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilik langsung						Direct acquisition
Bangunan dan prasarana	27.101.290.276	5.797.929.015	-	-	32.899.219.291	Buildings and infrastructures
Mesin dan peralatan	17.032.058.138	8.111.547.929	-	-	25.143.606.067	Machinery and equipment
Peralatan kantor	42.822.549.016	2.735.752.975	-	-	45.558.301.991	Office equipment
Kendaraan	11.757.830.433	3.147.991.606	-	-	14.905.822.039	Vehicles
	98.713.727.863	19.793.221.525	-	-	118.506.949.388	
Nilai tercatat	451.458.308.398				126.481.334.438	Carrying amount

*Reklasifikasi aset dalam penyelesaian sebesar Rp402.438.889.578 merupakan penyelesaian atas Proyek Lau Gunung pada 17 Desember 2020 yang diklasifikasikan sebagai Piutang Sewa Pembiayaan (Catatan 12)/Reclassification of Construction in Progress amounting to Rp402.438.889.578 was due to the completion of Lau Gunung project on December 17, 2020 which classified as Finance Lease Receivable (Note 12)

31 Desember 2019	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2019
Biaya perolehan						Cost
Pemilik langsung						Direct acquisition
Tanah dan hak atas tanah	10.925.430.735	4.018.242.358	-	-	14.943.673.093	Land and landrights
Bangunan dan prasarana	108.407.968.675	-	-	-	108.407.968.675	Buildings and infrastructures
Mesin dan peralatan	38.065.880.364	1.639.736.873	-	-	39.705.617.237	Machinery and equipment
Peralatan kantor	46.902.336.846	4.478.332.735	-	-	51.380.669.581	Office equipment
Kendaraan	17.750.211.143	7.435.671.962	(265.083.029)	-	24.920.800.076	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	131.161.835.480	179.651.472.119	-	-	310.813.307.599	Construction in progress
	353.213.663.243	197.223.456.047	(265.083.029)	-	550.172.036.261	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilik langsung						Direct acquisition
Bangunan dan prasarana	21.207.396.636	5.893.893.640	-	-	27.101.290.276	Buildings and infrastructures
Mesin dan peralatan	11.556.898.818	5.475.159.320	-	-	17.032.058.138	Machinery and equipment
Peralatan kantor	36.873.207.658	5.949.341.358	-	-	42.822.549.016	Office equipment
Kendaraan	8.818.734.449	3.204.179.013	(265.083.029)	-	11.757.830.433	Vehicles
	78.456.237.561	20.522.573.331	(265.083.029)	-	98.713.727.863	
Nilai tercatat	274.757.425.682				451.458.308.398	Carrying amount

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

11. ASET TETAP (lanjutan)

Laba pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Hasil penjualan	-	30.000.000
Nilai perolehan	-	265.083.029
Akumulasi penyusutan	-	(265.083.029)
Nilai buku neto	-	-
Laba penjualan aset tetap	-	30.000.000

**11. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT
(continued)**

Gain on disposal of property, plant, and equipment are as follows:

Proceeds from sale
Cost
Accumulated depreciation
Net book value
Gain on sale of property, plant, and equipment

Aset dalam penyelesaian merupakan aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Pembangunan papan reklame	1.567.434.862	657.216.735
Pembangunan gudang dan dermaga	1.133.842.236	181.156.666
Proyek pembangkit listrik tenaga mini-hidro	-	309.974.934.198
Jumlah	2.701.277.098	310.813.307.599

Construction in progress represents property, plant, and equipment in construction progress at the consolidated statement of financial position date with details as follows:

Billboard construction
Warehouse and jetty construction
Mini-hydro power plant project
Total

Manajemen tidak melihat adanya peristiwa yang akan menghambat penyelesaian aset dalam penyelesaian tersebut.

Management has no reason to believe that any events may occur that would prevent completion of the construction in progress.

Rincian aset tetap dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The details of construction in progress as of December 31, 2020 are as follows:

Proyek	Akumulasi biaya/ Accumulated cost	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	Project
Pembangunan papan reklame di Serpong	1.567.434.862	Mei/May 2021	Construction of Billboard in Serpong
Pembangunan gudang dan dermaga di Pontianak	1.133.842.236	Agustus/August 2021	Construction of warehouses and jetty in Pontianak
Total	2.701.277.098		Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

11. ASET TETAP (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan potensial atas nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada 31 Desember 2020, aset tetap berupa kendaraan dan peralatan (alat berat) sejumlah masing-masing Rp10.846.519.568 dan Rp3.338.000.000 dijaminkan untuk utang pembiayaan konsumen (Catatan 21) dan pinjaman bank (Catatan 22).

Selama 2020 dan 2019, terdapat kapitalisasi atas bunga pinjaman ke aset dalam penyelesaian masing-masing sebesar Rp16.765.970.332 dan Rp7.431.578.078.

Nilai penyusutan aset tetap yang dibebankan pada operasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Beban umum dan administrasi (Catatan 31)	10.797.705.989	11.146.568.498
Pengumpul pendapatan tol (Catatan 30a)	5.165.448.992	5.230.625.255
Pelayanan pemakai jalan tol (Catatan 30c)	3.830.066.544	4.145.379.578
Jumlah	19.793.221.525	20.522.573.331

**11. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT
(continued)**

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of fixed assets as of December 31, 2020 and 2019.

As of December 31, 2020, fixed assets in the form of vehicles and equipment (heavy equipment) amounting to Rp10,846,519,568 and Rp3,338,000,000, respectively, were pledged as collateral for consumer financing liabilities (Note 21) and bank loans (Note 22).

During 2020 and 2019, there was a capitalization of loan interest to construction in progress amounting to Rp16,765,970,332 and Rp7,431,578,078, respectively.

Depreciation of fixed assets was charged to operations as follows:

General and administrative expenses (Note 31)
Toll revenue collector (Note 30a)
Toll user services (Note 30c)
Total

12. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Piutang sewa pembiayaan merupakan nilai wajar piutang dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), Badan Usaha Milik Negara, sebagai pembeli tunggal penjualan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air IME, entitas anak tidak langsung (Catatan 37d).

Penerimaan sewa minimum masa depan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Berdasarkan tanggal jatuh tempo:		
Kurang dari 1 tahun	45.950.580.000	-
Antara 1-2 tahun	45.950.580.000	-
Lebih dari 2 tahun	683.482.137.000	-
Jumlah penerimaan sewa pembiayaan masa depan	775.383.297.000	-
Dikurangi: pembayaran bunga masa depan	(374.274.721.558)	-
Nilai kini piutang sewa pembiayaan	401.108.575.442	-
Dikurangi: Bagian lancar	(14.405.217.420)	-
Bagian jangka panjang	386.703.358.022	-

12. FINANCE LEASE RECEIVABLE

Finance lease receivable represents the fair value of receivables from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), a state-owned company, as the single off-taker of the electricity sales generated by the IME's, an indirect subsidiary, hydro electric power plant (Note 37d).

The future minimum lease payments are as follows:

Based on due date:
Less than 1 year
Between 1-2 years
More than 2 years
Total future financial lease payments
Less: future interest payments
Present value of finance lease receivable
Less: Current portion
Non-current portion

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

12. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan status akun piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang sewa pembiayaan dapat direalisasikan dan tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian yang dibutuhkan.

Piutang sewa pembiayaan dikenakan tingkat diskonto 8,04% per tahun. Jangka waktu sewa adalah selama 20 tahun sampai dengan tahun 2040.

12. FINANCE LEASE RECEIVABLE (continued)

Based on the review of finance lease receivables as of December 31, 2020, management is of the opinion that all finance lease receivables are realizable and no provision for expected credit losses is necessary to be provided.

The finance lease receivable is subject to a discount rate of 8.04% per annum. The lease term is for 20 years until 2040.

13. KONSESI JASA

a. Piutang atas Perjanjian Konsesi Jasa

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	207.011.848.808	210.340.546.667
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	104.211.554.530	95.422.815.895
Jumlah	311.223.403.338	305.763.362.562
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	4.622.595.229	4.645.486.360
Piutang konsesi jangka panjang	306.600.808.109	301.117.876.202

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Piutang dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") terkait Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL"), entitas anak tidak langsung, yang dicatat sebagai jasa konsesi. Pergerakan dari aset konsesi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal	210.340.546.667	213.289.017.498
Penambahan:		
Pendapatan bunga dari jasa konsesi (Catatan 28)	25.460.613.793	25.840.840.821
Penerimaan dari PLN	(28.789.311.652)	(28.789.311.652)
Saldo akhir	207.011.848.808	210.340.546.667
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	3.757.957.965	3.328.697.860
Piutang konsesi jangka panjang	203.253.890.843	207.011.848.807

13. SERVICE CONCESSIONS

a. Service Concession Arrangement Receivables

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Kawasan Industri Medan (Persero)

Total

Current maturities

Long-term portion of concession receivables

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Receivable from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") related to the Power Purchase Agreement with PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL"), an indirect subsidiary, that is accounted for as service concession arrangement. The movements in the concession financial assets are as follows:

Beginning balance
Additions:
Finance income from service concession (Note 28)
Received from PLN
Ending balance
Current maturities
Long-term portion of concession receivables

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

13. KONSESI JASA (lanjutan)

a. Piutang atas Perjanjian Konsesi Jasa (lanjutan)

Aset keuangan konsesi digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh RPSL untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Pontianak (Catatan 2o).

PT Kawasan Industri Medan (Persero)

	2020	2019
Saldo awal	95.422.815.893	88.680.858.892
Penambahan:		
Pendapatan bunga dari jasa konsesi	14.370.263.458	15.835.275.786
Pendapatan jasa konsesi	3.013.765.212	2.592.288.392
Pendapatan konstruksi	2.888.709.967	9.440.217.123
Ditagihkan ke KIM (pindah ke piutang usaha)	(11.484.000.000)	(21.125.824.300)
Saldo akhir	104.211.554.530	95.422.815.893
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	864.637.264	1.316.788.500
Piutang konsesi jangka panjang	103.346.917.266	94.106.027.393

DCC mengakui piutang konsesi, yang diukur pada nilai wajar sebesar Rp104.211.554.530 dan Rp95.422.815.895 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang mencerminkan nilai kini dari jaminan pembayaran minimum yang akan diperoleh DCC dari PT Kawasan Industri Medan (Persero).

Saat ini DCC telah mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Tahap I dengan kapasitas 100 liter/detik. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, DCC telah mengakui penjualan air berdasarkan perjanjian jasa konsesi masing-masing sebesar Rp17.384.028.670 dan Rp18.427.564.178.

b. Aset Takberwujud atas Perjanjian Konsesi

31 Desember 2020	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Hak pengusahaan jalan tol (Catatan 37)					
Biaya perolehan	2.909.083.806.823	1.100.449.639.553	-	-	4.009.533.446.376
Akumulasi amortisasi	811.000.586.252	40.569.501.178	-	-	851.570.087.430
Bersih	2.098.083.220.571				3.157.963.358.946
Hak pengelolaan air bersih (Catatan 37)					
Biaya perolehan	225.079.769.191	4.736.063.477	-	-	229.815.832.668
Akumulasi amortisasi	32.684.953.055	11.676.707.411	-	-	44.361.660.466
Bersih	192.394.816.136				185.454.172.202
Jumlah	2.290.478.036.707				3.343.417.531.148

13. SERVICE CONCESSIONS (continued)

a. Service Concession Arrangement Receivables (continued)

Concession financial assets are used as collateral to the loan obtained by RPSL for construction of Biomass Powerplant in Pontianak (Note 2o).

PT Kawasan Industri Medan (Persero)

	2020	2019	
Saldo awal	95.422.815.893	88.680.858.892	Beginning balance
Penambahan:			Additions:
Pendapatan bunga dari jasa konsesi	14.370.263.458	15.835.275.786	Finance income from service concession
Pendapatan jasa konsesi	3.013.765.212	2.592.288.392	Concession service revenue
Pendapatan konstruksi	2.888.709.967	9.440.217.123	Construction revenue
Ditagihkan ke KIM (pindah ke piutang usaha)	(11.484.000.000)	(21.125.824.300)	Billed to KIM (transfer to Trade receivables)
Saldo akhir	104.211.554.530	95.422.815.893	Ending balance
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	864.637.264	1.316.788.500	Current maturities
Piutang konsesi jangka panjang	103.346.917.266	94.106.027.393	Long-term portion of concession receivables

DCC recognizes the concession receivables, which are measured at fair value amounting to Rp104,211,554,530 and Rp95,422,815,895 on December 31, 2020 and 2019, respectively, which reflects the present value of the minimum payment that will be received by DCC from PT Kawasan Industri Medan (Persero).

Currently, DCC operates a Phase I Water Treatment Plant with a capacity of 100 liters/sec. For the year ended December 31, 2020 and 2019, DCC has recognized sale of treated water under service concession arrangement amounting to Rp17,384,028,670 and Rp18,427,564,178, respectively.

b. Intangible Assets of Service Concession Arrangement

	December 31, 2020
Toll road concession rights (Note 37)	
Cost	4,009,533,446,376
Accumulated amortization	(851,570,087,430)
Net	3,157,963,358,946
Water treatment concession rights (Note 37)	
Cost	229,815,832,668
Accumulated amortization	(44,361,660,466)
Net	185,454,172,202
Total	3,343,417,531,148

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

13. KONSESI JASA (lanjutan)

b. Aset Takberwujud atas Perjanjian Konsesi (lanjutan)

31 Desember 2019	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Hak pengusahaan jalan tol (Catatan 37)					
Biaya perolehan	1.945.386.266.753	963.697.540.070	-	-	2.909.083.806.823
Akumulasi amortisasi	757.218.762.630	53.781.823.622	-	-	811.000.586.252
Bersih	1.188.167.504.123				2.098.083.220.571
Hak pengelolaan air bersih (Catatan 37)					
Biaya perolehan	217.946.842.530	7.132.926.661	-	-	225.079.769.191
Akumulasi amortisasi	21.679.601.149	11.005.351.906	-	-	32.684.953.055
Bersih	196.267.241.381				192.394.816.136
Jumlah	1.384.434.745.504				2.290.478.036.707

Beban amortisasi hak pengusahaan jalan tol dan hak pengusahaan pengolahan air yang dibebankan kepada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp52.246.208.589 dan Rp64.787.175.528.

Penjabaran lebih lanjut dari nilai buku bersih aset takberwujud setiap perjanjian konsesi jalan tol dan perjanjian konsesi pengolahan air adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Hak pengusahaan jalan tol		
Pelabuhan Soekarno-Hatta		
- Pettarani	2.192.006.025.100	1.097.407.497.039
Tallo - Bandara Hasanuddin	626.504.422.718	637.958.142.761
Pondok Aren - Serpong	339.452.911.128	362.717.580.771
	3.157.963.358.946	2.098.083.220.571
Hak pengelolaan air bersih		
Serang, Banten	185.454.172.202	192.394.816.136
Jumlah	3.343.417.531.148	2.290.478.036.707

Aset-aset hak pengusahaan jalan tol, pada tanggal 31 Desember 2020 and 2019 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp545.537.125.584 dan Rp619.483.422.649. Manajemen entitas anak berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas risiko tersebut.

13. SERVICE CONCESSIONS (continued)

b. Intangible Assets of Service Concession Arrangement (continued)

December 31, 2019
Toll road concession rights (Note 37)
Cost
Accumulated amortization
Net
Water treatment concession rights (Note 37)
Cost
Accumulated amortization
Net
Total

Amortization expenses of toll road concession rights and water treatment concession rights that were charged to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year then ended December 31, 2020 and 2019 amounted Rp52,246,208,589 and Rp64,787,175,528 respectively.

Further breakdown of intangible assets' net book value per toll road concession rights' toll area and water treatment concession rights are as follows:

Toll road concession rights
Soekarno-Hatta Harbor - Pettarani
Tallo - Airport Hasanuddin
Pondok Aren - Serpong
Water treatment concession rights
Serang, Banten
Total

Toll road concession rights assets as of December 31, 2020 and 2019 were insured against fire, theft, and other possible risks under insurance policies amounting to Rp545,537,125,584 and Rp619,483,422,649, respectively. The subsidiaries' managements believe that insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risks.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

13. KONSESI JASA (lanjutan)

b. Aset Takberwujud atas Perjanjian Konsesi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset hak perusahaan jalan tol digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank oleh entitas anak.

Berdasarkan penelaahan manajemen entitas anak, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

13. SERVICE CONCESSIONS (continued)

b. Intangible Assets of Service Concession Arrangement (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, toll road concession rights were pledged as collateral for the subsidiaries' loans.

Based on review of the subsidiaries' management, there were no events or changes in circumstances which indicate an impairment of intangible assets as of December 31, 2020 and 2019.

14. ASET HAK GUNA - NETO

Akun ini terdiri dari:

14. RIGHT OF USE ASSETS - NET

This account consists of:

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ For the Year Ended December 31, 2020					
Saldo 1 Jan 2020/ Balance Jan 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Tanah	1.465.034.920	-	-	1.465.034.920	Land
Ruang kantor	8.119.537.615	784.660.796	-	8.904.198.411	Office spaces
Kendaraan	-	481.739.497	-	481.739.497	Vehicles
Total biaya perolehan	9.584.572.535	1.266.400.293	-	10.850.972.828	Total acquisition cost
Akumulasi amortisasi					Accumulated amortization
Lahan	-	799.109.956	-	799.109.956	Land
Ruang kantor	-	6.450.468.589	-	6.450.468.589	Office spaces
Kendaraan	-	240.869.748	-	240.869.748	Vehicles
Total akumulasi amortisasi	-	7.490.448.293	-	7.490.448.293	Total accumulated amortization
Nilai buku neto	9.584.572.535			3.360.524.535	Net book value

Depresiasi

Beban depresiasi yang dibebankan ke operasi sebagai bagian dari berikut ini:

Depreciation

Depreciation expenses were charged to operations as part of the following:

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
2020	2019		
Beban umum dan administrasi (Catatan 31)	7.490.448.293	-	General and administrative expenses (Note 31)

Aset Hak Guna

Mutasi liabilitas sewa sehubungan dengan aset hak guna adalah sebagai berikut:

Right of Use Assets

The movement of lease liabilities in relation to the right of use assets are as follows:

	1 Januari 2020 January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Beban bunga/ Interest expenses	Pembayaran/ Payments	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Kelas aset pendasar						Underlying assets
Tanah	1.465.034.920	-	91.349.582	(1.556.384.502)	-	Land
Ruang kantor	8.119.537.615	784.660.796	491.483.515	(6.847.037.448)	2.548.644.478	Office spaces
Kendaraan	-	481.739.497	16.388.860	(252.000.000)	246.128.357	Vehicles
Total	9.584.572.535	1.266.400.293	599.221.957	(8.655.421.950)	2.794.772.835	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

14. ASET HAK GUNA - NETO (lanjutan)

Utang sewa berdasarkan jangka waktu:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Jangka pendek	2.777.692.120
Jangka panjang	17.080.715
Total	2.794.772.835

14. RIGHT OF USE ASSETS - NET (continued)

Lease payables based on time basis:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	-	Current portion
	-	Non-current portion
Total	-	Total

15. ASET TAKBERWUJUD LAINNYA

Goodwill dialokasikan ke masing-masing entitas anak tidak langsung berikut pada tanggal akuisisi:

	2020	2019
Goodwill		
dari akuisisi :		
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ('RPSL') (Catatan 1d)	44.733.719.718	44.733.719.718
PT Sarana Catur Tirta Kelola ('SCTK')	6.217.234.883	6.217.234.883
PT Jasa Sarana Nusa Makmur ('JSNM')	6.032.065.491	6.032.065.491
PT Dain Celicani Cemerlang ('DCC')	1.419.338.247	1.419.338.247
PT Inpol Meka Energi ('IME')	593.012.594	593.012.594
Saldo akhir	58.995.370.933	58.995.370.933

15. OTHER INTANGIBLE ASSETS

Goodwill was allocated to the following individual indirect subsidiaries as at the acquisition dates:

	Goodwill
	from acquisition :
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ('RPSL') (Note 1d)	
PT Sarana Catur Tirta Kelola ('SCTK')	
PT Jasa Sarana Nusa Makmur ('JSNM')	
PT Dain Celicani Cemerlang ('DCC')	
PT Inpol Meka Energi ('IME')	
Ending balance	

Goodwill di atas diuji untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2020. Tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui pada tanggal 31 Desember 2020 (2019: nihil), karena jumlah terpulihkan dari masing-masing entitas lebih tinggi dari masing-masing nilai tercatat entitas beserta goodwill terkait.

The above-mentioned goodwill was tested for impairment on December 31, 2020. There was no impairment loss recognized on December 31, 2020 (2019: nil) as the recoverable amounts of each entity were in excess of the carrying values of the respective entities and the related goodwill.

Nilai *recoverable amount* yang digunakan dalam pengujian mencerminkan nilai pakai. Asumsi signifikan yang digunakan adalah tingkat diskonto dengan nilai dari 8,6%-11,99% dan *growth rate* dengan nilai dari 0,82%-7,84%.

The recoverable amount used in the testing represents the value in use. Significant assumptions used were the discount rates ranging from 8.6%-11.99% and growth rates ranging from 0.82%-7.84%.

Perubahan terhadap asumsi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah terpulihkan, khususnya tingkat diskonto, harga dan tingkat pertumbuhan, dapat berdampak signifikan pada hasil pengujian.

The changes to the assumptions used by the management to determine the recoverable value, in particular the discount rate, prices and terminal growth rates, can have significant impact on the results of the assessment.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kemungkinan yang beralasan bahwa asumsi utama tersebut di atas dapat berubah sehingga nilai tercatat goodwill masing-masing entitas menjadi lebih tinggi dari nilai terpulihkannya secara signifikan.

Management believes that there was no reasonably possible change in any of the key assumptions stated above that would cause the carrying amount of the goodwill allocated to each of the entity to significantly exceed their respective recoverable value.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Berdasarkan pemasok

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	81.970.752.920	-
PT Multi Bhakti Makmur Jaya	3.192.336.241	1.954.208.788
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2.723.625.175	4.151.117.958
CV Anugrah Mitra Perkasa	1.416.055.035	-
CV Mitra Kita	1.097.631.127	-
PT Indokoei International	1.057.804.330	815.584.770
PT Perkasa Adiguna Sembada	844.391.809	844.391.809
PT Cipta Usaha Sejati	632.940.000	-
Nippon Koei Co. Ltd	332.048.144	991.048.914
PT DCT Total Solutions	105.036.955	2.847.275.705
PT Sarma Raya Cipta	68.225.000	934.665.000
CV Banjar Jaya	-	1.123.380.040
PT Mitra Andalan Sejahtera	-	563.374.568
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	8.858.729.893	8.618.890.159
Jumlah	102.299.576.629	22.843.937.711

Berdasarkan umur

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
1 - 30 hari	13.283.149.226	15.342.220.576
31 - 60 hari	4.195.919.390	26.950.000
Lebih dari 60 hari	84.820.508.013	7.474.767.135
Jumlah	102.299.576.629	22.843.937.711

16. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

By suppliers

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
PT Multi Bhakti Makmur Jaya
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
CV Anugrah Mitra Perkasa
CV Mitra Kita
PT Indokoei International
PT Perkasa Adiguna Sembada
PT Cipta Usaha Sejati
Nippon Koei Co. Ltd
PT DCT Total Solutions
PT Sarma Raya Cipta
CV Banjar Jaya
PT Mitra Andalan Sejahtera
Others (each below Rp500,000,000)

Total

By ages

1 - 30 days
31 - 60 days
Over 60 days

Total

17. UTANG NON-USAHA - PIHAK KETIGA

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
PT Pembangunan Perumahan Energi	26.960.000.000	12.000.000.000
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	7.309.381.769	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	5.929.038.624	14.180.880.183
PT Acset Indonusa Tbk	3.654.700.828	-
PT Sullindo Putra Timur	1.505.739.158	2.196.464.277
PT Gapura Fajar Langgeng	838.165.049	2.151.077.197
PT Global Hydro Indonesia	612.302.353	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	2.708.334.208	1.649.044.940
Jumlah	49.517.661.989	32.177.466.597
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(38.553.579.392)	(32.177.466.597)
Bagian jangka panjang	10.964.082.597	-

17. NON-TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

PT Pembangunan Perumahan Energi
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Acset Indonusa Tbk
PT Sullindo Putra Timur
PT Gapura Fajar Langgeng
PT Global Hydro Indonesia
Others (each below Rp500,000,000)

Total

Current maturities

Long-term portion

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

17. UTANG NON-USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Pada tanggal 10 November 2017, IME menandatangani perjanjian hutang piutang dengan PT Ilyas Pratama Abadi ("Ilyas") yang mana IME menerima dana pinjaman sebesar Rp18.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 1% di atas bunga kredit dari PT Bank Central Asia Tbk per tahun dan jatuh tempo pada 9 November 2018. Perjanjian tersebut diamandemen pada tanggal 9 November 2018 dengan jatuh tempo diperpanjang hingga 10 November 2019. Pada tanggal 12 Maret 2019, sesuai dengan Perjanjian Novasi atas Perjanjian Hutang Piutang, Ilyas mengalihkan hutang IME kepada PT Pembangunan Perumahan Energi ("PPE") (Catatan 26).

Utang kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PP") dan PT Gapura Fajar Langgeng merupakan utang konstruksi masing-masing untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Lau Gunung di Sumatera Utara oleh IME dan instalasi pengolahan air (IPA) bersih di Serang oleh SCTK.

**17. NON-TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES
(continued)**

On November 10, 2017, IME signed a loan agreement with PT Ilyas Pratama Abadi ("Ilyas") whereas IME obtained loan amounting to Rp18,000,000,000 with interest rate 1% above the credit interest rate from PT Bank Central Asia Tbk per annum and will be due on November 9, 2018. The agreement was amended on November 9, 2018 with the due date has been extended to November 10, 2019. On March 12, 2019, in accordance with a Novation Agreement on the Loan Agreement, Ilyas transferred IME's loan to PT Pembangunan Perumahan Energi ("PPE") (Note 26).

Loan to PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PP") and PT Gapura Fajar Langgeng represents construction loan, each pertaining to the construction of the Minihidro Power Plant (PLTM) in Lau Gunung, North Sumatra by IME and clean water treatment plants (WTP) in Serang by SCTK.

18. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Proyek	137.316.004.468	246.819.852.896
Beban bunga	4.750.816.520	4.018.363.292
Retensi	3.652.549.527	30.950.186.656
Jasa professional	460.518.145	14.764.627.450
Gaji dan tunjangan	99.870.324	5.723.608.445
Lain-lain	14.739.949.443	6.068.770.192
Jumlah	161.019.708.427	308.345.408.931

18. ACCRUED EXPENSES

Project
Interest expenses
Retention
Professional fees
Salaries and allowances
Others
Total

19. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Entitas anak: Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	10.920.713.900	9.451.653.168
<u>Aset tidak lancar</u> Entitas anak: Klaim pengembalian pajak penghasilan	7.734.851.128	-

19. TAXATION

a. Prepaid Tax

Subsidiaries: Value Added Tax - In
<u>Non-current assets</u> Subsidiaries:

Refundable corporate income taxes

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

b. Utang Pajak

b. Taxes Payables

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	3.783.551.944	549.537.559	Value Added Tax - Out
Pajak Penghasilan			Income Taxes
Pasal 21	1.171.351.091	1.010.262.440	Article 21
Pasal 4 (2)	51.560.610	39.455.612	Article 4 (2)
Pasal 23	4.790.280	907.935.190	Article 23
Sub jumlah	5.011.253.925	2.507.190.801	Sub total
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	6.249.149.428	4.616.837.433	Value Added Tax - Out
Pajak Penghasilan			Income Taxes
Pasal 4 (2)	4.466.430.185	4.838.329.986	Article 4 (2)
Pasal 23	2.464.721.840	2.720.871.993	Article 23
Pasal 29	2.976.355.512	5.872.539.773	Article 29
Pasal 21	842.211.925	1.111.546.099	Article 21
Pasal 25	532.772.675	1.918.854.159	Article 25
Pajak lainnya	94.122.615	111.442.508	Other taxes
Sub jumlah	17.625.764.180	21.190.421.951	Sub total
Jumlah	22.637.018.105	23.697.612.752	Total

c. (Penghasilan)/Beban Pajak

c. Taxes (Income)/Expenses

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Beban pajak kini			Current tax
Entitas anak			Subsidiaries
Tahun berjalan	25.789.021.172	48.560.645.120	- Current year
- Kekurangan pajak penghasilan tahun sebelumnya	-	3.537.779.923	- Under provision for prior year corporate income tax
	25.789.021.172	52.098.425.043	
Beban/(manfaat) pajak tangguhan			Deferred tax expense/(benefit)
Perusahaan	-	30.323.475.153	Company
Entitas anak	(2.766.621.630)	12.048.307.734	Subsidiaries
	(2.766.621.630)	42.371.782.887	
Jumlah	23.022.399.542	94.470.207.930	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perhitungan Fiskal

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan estimasi rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2020	2019
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	135.644.285.146	299.836.941.461
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(151.749.953.833)	(276.864.042.087)
(Rugi)/laba sebelum pajak Perusahaan	(16.105.668.687)	22.972.899.374
Beda temporer:		
Beban imbalan pasca kerja	2.787.570.628	1.879.731.972
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	3.227.768.666	-
Penyusutan aset tetap	(282.678.417)	190.892.192
Penyusutan aset hak guna	4.375.116.123	-
Beban sewa	(4.673.833.248)	-
Beban bunga atas liabilitas sewa	363.866.456	-
Beda tetap:		
Pegawai	13.249.723.623	(12.312.747.004)
Denda pajak	1.660.738.509	114.017.449
Jamuan dan sumbangan	306.129.546	426.785.600
Provisi atas biaya yang ditangguhkan	4.735.716.107	-
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(6.474.880.010)	(12.863.532.714)
Lain-lain	589.490.150	891.392.073
Taksiran laba fiskal periode berjalan	3.759.059.446	1.299.438.942
Kompensasi kerugian fiskal	(3.759.059.446)	(1.299.438.942)
Taksiran rugi fiskal setelah kompensasi kerugian fiskal	-	-
Akumulasi kerugian fiskal terdiri atas:		
2017 *)	(85.190.857.587)	(85.190.857.587)
2016 *)	(61.883.854.601)	(61.883.854.601)
2015 *)	-	(55.192.557.381)
Akumulasi rugi fiskal	(147.074.712.188)	(202.267.269.569)

19. TAXATION (continued)

d. Fiscal Computation

A reconciliation between income before tax as shown in the consolidated statement profit or loss and other comprehensive income, and estimated fiscal loss of the Company is as follows:

Income before tax as stated in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Profit before tax of subsidiaries
(Loss)/profit before tax of the Company
Temporary differences:
Post-employment benefits expenses
Provision for impairment loss of receivables
Depreciation of property, plant, and equipments
Depreciation of right of use asset
Rent expenses
Interest expenses of lease liabilities
Permanent differences:
Employees
Tax penalty
Entertainments and donations
Provision for deferred charges
Income already subjected to final tax
Others
Estimated fiscal profit - current period
Compensation of fiscal loss
Estimated fiscal loss after compensated current period
Accumulated fiscal loss carried forward consists of:
2017 *)
2016 *)
2015 *)
Accumulated fiscal losses

*) Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan badan Perusahaan

*) As stated in the Company's Corporate Income Tax return

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perhitungan Fiskal (lanjutan)

Taksiran penghasilan kena pajak dan beban pajak selama tahun berjalan, sebagaimana disebutkan di atas, akan menjadi bagian penghasilan kena pajak dan beban pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan ("SPT PPh Badan") tahun 2020 yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Perusahaan telah melaporkan penghasilan kena pajak dan beban penghasilan tahun berjalan untuk tahun 2019, sebagaimana disebutkan di atas, dalam SPT PPh Badan tahun 2019.

e. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan sebesar Rp32.356.436.681 yang berasal dari rugi fiskal karena tidak memenuhi syarat pengakuan.

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

19. TAXATION (continued)

d. Fiscal Computation (continued)

Estimated taxable income and tax expense during the year, as mentioned above, will be part of taxable income and tax expense in Corporate Income Tax Returns ("SPT PPh Badan") reported to the tax office in 2020. The Company has reported taxable income and income expenses for 2019, as mentioned above, in 2019 SPT PPh Badan.

e. Deferred Taxes

As of December 31, 2020, the Company did not recognize deferred tax assets amounting to Rp32,356,436,681 which came from fiscal losses that do not fulfill recognition criteria.

The deferred tax arising from the significant temporary differences between commercial and tax purpose for the year ended December 31, 2020 and 2019, are as follows:

31 Desember 2020/December 31, 2020						
31 Desember 2020	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi dan pendapatan Perusahaan/ Credited (charged) to profit or loss and revenue of the Company	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	Penyesuaian*/ Adjustments*	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2020
Aset pajak tangguhan						Deferred tax assets
<u>Entitas Anak</u>						<u>The Subsidiaries</u>
Rugi fiskal	2.575.136.640	1.024.084.580	-	(605.939.129)	2.993.282.091	Fiscal losses
Imbalan pasca-kerja	3.606.957.281	(744.221.727)	1.508.592	(370.632.723)	2.493.611.423	Post-employment benefits
Aset tetap dan aset takberwujud	174.231.520	149.377.203	-	(48.739.624)	274.869.099	Property, plant, and equipment and intangible assets
Jumlah	6.356.325.441	429.240.056	1.508.592	(1.025.311.476)	5.761.762.613	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
<u>Entitas Anak</u>						<u>The Subsidiaries</u>
Provisi pemeliharaan jalan tol	1.227.851.281	966.067.128	-	(425.374.410)	1.768.543.999	Toll road maintenance provision
Beban akrual	348.284.621	(205.751.321)	-	(28.506.660)	114.026.640	Accrued expenses
Beban keuangan	65.310.360	(471.410.455)	-	86.953.851	(319.146.244)	Finance cost
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	147.806.908	-	(13.436.992)	134.369.916	Allowance for impairment of receivables
Imbalan pasca kerja	4.854.523.975	1.068.343.214	(34.189.200)	(941.918.986)	4.946.759.003	Post-employment benefits
Aset tetap dan aset takberwujud	(77.176.562.147)	(13.474.645.610)	-	16.654.566.383	(73.996.641.374)	Property, plant, and equipment and intangible assets
Jumlah	(70.680.591.910)	(11.969.590.136)	(34.189.200)	15.332.283.186	(67.352.088.060)	Total

*Penyesuaian akibat penambahan tarif pajak/Adjustment due to change of tax rate

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut: (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

e. Deferred Taxes (continued)

The deferred tax arising from the significant temporary differences between commercial and tax purpose for the year ended December 31, 2020 and 2019, are as follows: (continued)

31 Desember 2019/December 31, 2019						
31 Desember 2019	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi dan pendapatan Perusahaan/ Credited to profit or loss and revenue of the Company	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustments	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 20219
Aset pajak tangguhan						Deferred tax assets
<i>Perusahaan</i>						<i>The Company</i>
Rugi fiskal	25.943.938.417	(25.943.938.417)	-	-	-	Fiscal losses
Imbalan pasca-kerja	2.813.579.739	(2.813.579.739)	-	-	-	Post-employment benefits
Aset tetap	1.565.956.997	(1.565.956.997)	-	-	-	Property, plant, and equipment
	30.323.475.153	(30.323.475.153)	-	-	-	
<i>Entitas Anak</i>						
Rugi fiskal	4.246.606.045	(1.671.469.405)	-	-	2.575.136.640	Fiscal losses
Imbalan pasca-kerja	2.800.406.149	464.339.192	342.211.940	-	3.606.957.281	Post-employment benefits
Aset tetap dan aset takberwujud	174.231.520	-	-	-	174.231.520	Property, plant, and equipment and intangible assets
	7.221.243.714	(1.207.130.213)	342.211.940	-	6.356.325.441	
Jumlah	37.544.718.867	(31.530.605.366)	342.211.940	-	6.356.325.441	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
<i>Entitas Anak</i>						<i>The Company</i>
Beban akrual	348.284.621	-	-	-	348.284.621	Accrued expenses
Beban keuangan	382.903.095	(317.592.735)	-	-	65.310.360	Finance cost
Provisi pemeliharaan jalan tol	1.282.505.045	(54.653.764)	-	-	1.227.851.281	Toll road maintenance provision
Imbalan pasca kerja	3.766.655.611	534.259.780	553.608.584	-	4.854.523.975	Post-employment benefits
Aset tetap dan aset takberwujud	(66.173.371.345)	(11.003.190.802)	-	-	(77.176.562.147)	Property, plant, and equipment and intangible assets
Jumlah	(60.393.022.973)	(10.841.177.521)	553.608.584	-	(70.680.591.910)	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Rekonsiliasi Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum pajak penghasilan badan dengan beban pajak penghasilan badan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2020	2019
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	135.644.285.146	299.836.941.461
Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku	29.841.742.732	74.959.235.365
Pengaruh pajak atas beda tetap: Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(2.227.228.409)	(10.836.610.284)
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	36.368.859	(14.678.455.609)
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya	-	3.537.780.823
Penyesuaian atas tarif pajak	(14.311.762.887)	-
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan penyesuaian	9.683.279.247	41.488.257.635
Beban pajak penghasilan	23.022.399.542	94.470.207.930

19. TAXATION (continued)

f. Reconciliation of Corporate Income Tax

The reconciliation between corporate income tax expense as computed with the applicable tax rates from profit before corporate income tax and corporate income tax expense as shown in the consolidated financial statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Income tax expense at the applicable tax rate
Tax effects of permanent differences: Income already subjected to final tax
Non-deductible expenses
Adjustments in respect of corporate income tax of the previous years
Adjustments on tax rate
Unrecognized deferred tax assets and adjustments
Income tax expense

g. Lain-lain

PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")

Kurang Bayar PPN Juni 2012

Pada tanggal 26 April 2017, JTSE menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PPN periode Juni 2012 dan denda terkait sebesar Rp20.036.035.966. JTSE mengajukan surat keberatan atas ketetapan pajak tersebut kepada kantor pajak pada tanggal 19 Juli 2017. Pada tanggal 14 Desember 2017, Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan dari JTSE. Atas keputusan tersebut, JTSE tidak melakukan pembayaran atas jumlah kurang bayar tersebut.

g. Others

PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")

June 2012 VAT Underpayments

On April 26, 2017, JTSE received a tax assessment of VAT for period June 2012 reflecting underpayment and penalty of Rp20,036,035,966. JTSE filed an objection letter to the tax office on July 19, 2017. On December 14, 2017, Director General of Taxation rejected the objection from JTSE. Upon the decisions, JTSE did not make any payment of the assessed underpayment.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") (lanjutan)

Kurang Bayar PPN Juni 2012 (lanjutan)

Pada tanggal 26 Januari 2018, JTSE mengajukan surat banding atas keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada 19 September 2019, Pengadilan Pajak menerima banding JTSE tersebut. Atas keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung pada 26 Desember 2019. Untuk menanggapi peninjauan kembali tersebut, JTSE mengajukan surat kontra memori kepada Mahkamah Agung pada 5 Februari 2020. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, belum ada hasil atas peninjauan kembali tersebut.

Kurang Bayar PPN Januari-November 2016

Pada tanggal 21 Desember 2018, JTSE menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PPN periode Januari-November 2016 dan denda terkait sebesar Rp19.122.737.388. JTSE tidak melakukan pembayaran atas pokok ataupun denda. JTSE mengajukan surat keberatan atas ketetapan pajak tersebut kepada kantor pajak pada tanggal 8 Maret 2019. Pada tanggal 24 Juli 2019 Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan JTSE. JTSE tidak melakukan pembayaran atas jumlah kurang bayar. Pada tanggal 8 Agustus 2019, JTSE mengajukan surat banding atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut ke Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 21 Desember 2020, Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan menerima banding tersebut. Atas keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung pada 18 Maret 2021. Untuk menanggapi peninjauan kembali tersebut, JTSE mengajukan surat kontra memori kepada Mahkamah Agung pada 20 April 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, belum ada hasil atas peninjauan kembali tersebut.

Lebih bayar PPN Desember 2016

Pada tanggal 21 Desember 2018, JTSE menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Barang dan Jasa, untuk pajak pertambahan nilai barang dan jasa bulan Desember 2016 sebesar Rp9.474.647.786. JTSE telah menerima pengembalian pada tanggal 17 Januari 2019.

19. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

**PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")
(continued)**

June 2012 VAT Underpayments (continued)

On January 26, 2018, JTSE filed an appeal letter on Director General of Taxation's decision to the Tax Court. On September 19, 2019, the Tax Court accepted the JTSE's appeals. Upon the decision, the Director General of Taxation submitted a judicial review to the Supreme Court on December 26, 2019. To counter the judicial review, JTSE filed a contra memory letter to the Supreme Court on February 5, 2020. No results of such judicial review has been communicated to JTSE until the completion date of the consolidated financial statements.

January-November 2016 VAT Underpayments

On December 21, 2018, JTSE, received a tax assessment of VAT for period January-November 2016 reflecting underpayment and penalty of Rp19,122,737,388. JTSE did not make any payment of principal or penalty. JTSE filed an objection letter against the tax assessment to the tax office on March 8, 2019. On July 24, 2019, Director General of Taxation rejected JTSE's objection. JTSE did not make any payment of principal or penalty. On August 8, 2019, JTSE filed appeal letters on the Director General of Taxation's decisions to the Tax Court.

On December 21, 2020, the Tax Court accepted JTSE's appeals. Upon the decision, the Director General of Taxation submitted a judicial review to the Supreme Court on March 18, 2021. To counter the judicial review, JTSE filed a contra memory letter to the Supreme Court on April 20, 2021. No result of such judicial review has been communicated to the Company until the completion date of the consolidated financial statements.

December 2016 VAT Overpayments

On December 21, 2018, JTSE received an overpayment tax assessment letter for VAT for goods and services for fiscal period of December 2016 amounting to Rp9,474,647,786. JTSE has received the refund on January 17, 2019.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

**PT Makassar Metro Network ("MMN")
sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara
("BMN")**

Pada tanggal 29 Oktober 2019, MMN menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Badan untuk tahun 2018 sebesar Rp485.528.556. MMN telah menerima pengembalian pajak tersebut pada tanggal 13 November 2019. Selisih atas jumlah yang dikembalikan dan jumlah klaim sebesar Rp4.023.309.378 dicatat sebagai beban pajak penghasilan tahun 2019.

Pada tanggal 29 Oktober 2019, MMN menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk periode pajak Januari - Desember 2018 sebesar Rp937.748. MMN telah menyetujui dan membayar jumlah tersebut pada tanggal 20 Januari 2020.

19. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

**PT Makassar Metro Network ("MMN")
formerly PT Bosowa Marga Nusantara
("BMN")**

On October 29, 2019, MMN received an overpayment tax assessment letter for Corporate Income Tax for 2018 tax year amounting to Rp485,528,556. MMN has received the refund on November 13, 2019. The difference between the amount refunded and the claim of refundable corporate income tax amounting to Rp4,023,309,378 was recorded as corporate income tax expense for 2019.

On October 29, 2019, MMN received an underpayment tax assessment letter for Corporate Income Tax for fiscal period of January - December 2018 amounting to Rp937,748. MMN accepted and paid the underpayment amount on January 20, 2020.

20. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Iklan	4.426.406.916	6.597.632.894
Dikurangi:		
Bagian jangka pendek	(3.583.830.237)	(5.946.204.795)
Bagian jangka panjang	842.576.679	651.428.099

Pendapatan iklan diterima di muka merupakan penyewaan papan iklan di ruas jalan tol milik BSD, MMN, dan JTSE.

20. UNEARNED REVENUES

Advertising
Less:
Short-term portion

Long-term portion

Unearned advertising revenue represents billboard rentals on toll roads owned by BSD, MMN, and JTSE.

21. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
PT BCA Finance	1.970.693.362	2.827.144.484
PT Candra Sakti Utama Leasing	1.684.535.822	2.690.158.528
PT Clipan Finance	242.793.818	661.222.768
PT Mandiri Tunas Finance	104.235.768	228.040.186
PT Astra Sedaya Finance	5.645.548	53.002.190
PT Orix Indonesia Finance	-	416.474.480
PT BRI Multifinance Indonesia	-	330.720.000
PT CIMB Niaga Auto Finance	-	34.596.816
Jumlah	4.007.904.318	7.241.359.452
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.680.932.702)	(4.318.085.232)
Bagian jangka panjang	1.326.971.616	2.923.274.220

PT BCA Finance
PT Candra Sakti Utama Leasing
PT Clipan Finance
PT Mandiri Tunas Finance
PT Astra Sedaya Finance
PT Orix Indonesia Finance
PT BRI Multifinance Indonesia
PT CIMB Niaga Auto Finance

Total

Current maturities

Long-term portion

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

21. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Perusahaan dan entitas anaknya mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance, PT Candra Sakti Utama Leasing, PT Cilipan Finance, PT Orix Indonesia Finance, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Astra Sedaya Finance, dan PT CIMB Niaga Auto Finance dan untuk membiayai pembelian kendaraan.

Utang pembiayaan konsumen dikenakan suku bunga tetap untuk masing-masing perjanjian dengan kisaran tingkat suku bunga mulai 4,90%-23,00% (2019: 3,99%-15,15%) dengan jangka waktu pembayaran selama 3-4 tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang dibeli.

**21. CONSUMER FINANCING LIABILITIES
(continued)**

The Company and its subsidiaries entered into consumer financing agreements with PT BCA Finance, PT Candra Sakti Utama Leasing, PT Cilipan Finance, PT Orix Indonesia Finance, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Astra Sedaya Finance, and PT CIMB Niaga Auto Finance to finance purchase of vehicle.

Consumer financing liabilities are subject to fixed interest rate for each agreement with interest rates ranging from 4.90%-23.00% (2019: 3.99%-15.15%) with a payment term of 3-4 years.

This facility is guaranteed with the vehicles purchased.

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG

22. LONG-TERM LOANS

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Pinjaman bank			Bank loans
PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")			PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")
<i>Time Loan Revolving</i>			<i>Time Loan Revolving</i>
PT Margautama Nusantara ("MUN")			PT Margautama Nusantara ("MUN")
- Fasilitas 1 (TLR)	239.370.874.240	239.370.874.240	Facility 1 (TLR)
Kredit Investasi			Investment Credit
PT Makassar Metro Nusantara ("MMN")			PT Makassar Metro Network ("MMN")
- Fasilitas 2 (KI 2)	42.012.235.359	46.247.470.961	Facility 2 (KI 2)
PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")			PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")
- Fasilitas 2 (KI 2)	-	500.459.154	Facility 2 (KI 2)
- Fasilitas 3 (KI 3)	66.485.003.489	84.293.486.566	Facility 3 (KI 3)
PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")			PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")
- Fasilitas 2 (KI 2)	-	2.950.000.000	Facility 2 (KI 2)
- Fasilitas 3 (KI 3)	5.735.138.206	6.944.589.125	Facility 3 (KI 3)
PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC")			PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC")
- Fasilitas (KI)	-	2.940.798.833	Facility (KI)
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL")			PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL")
- Fasilitas (KI)	73.400.183.697	98.937.748.967	Facility (KI)
PT Inpolo Meka Energi ("IME")			PT Inpolo Meka Energi ("IME")
- Fasilitas (KI)	227.544.215.935	129.918.103.454	Facility (KI)
Total BCA	654.547.650.926	612.103.531.300	BCA Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

22. LONG-TERM LOANS (continued)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")			PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")
Kredit Investasi			Investment Credit
PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK")			PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK")
- Fasilitas (KI)	59.002.848.433	74.067.405.478	Facility (KI)
PT Bank Pan Indonesia Tbk			PT Bank Pan Indonesia Tbk
Kredit Investasi			Investment Credit
PT Nusantara Infrastructure Tbk ("NI")			PT Nusantara Infrastructure Tbk ("NI")
- Fasilitas (KI)	29.423.375.629	35.916.518.317	Facility (KI)
Pinjaman bank, neto	742.973.874.988	722.087.455.095	Bank loans, net
Pinjaman sindikasi (Catatan 22b)	1.276.059.789.462	615.123.425.701	Syndicated loan (Note 22b)
Lembaga keuangan (Catatan 22c)	-	33.671.376.000	Financial institution (Note 22c)
	2.019.033.664.450	1.370.882.256.796	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(14.169.541.033)	(18.207.299.808)	Unamortized transaction costs
Jumlah	2.004.864.123.417	1.352.674.956.988	Total
Dikurangi: Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(166.445.524.606)	(84.310.069.981)	Less: Current maturities
Pinjaman bank jangka panjang	1.838.418.598.811	1.268.364.887.007	Long-term portion of bank loans

Bank/ Bank	Peminjam/ Debtor	Fasilitas/ Facilities	Jatuh tempo pinjaman/ Maturity date	Tingkat suku bunga efektif/ Effective rate		Jumlah fasilitas/ Total facilities
				2020	2019	
BCA	MUN	TLR	Oct 2022/ Okt 2022	8,85%	10,25%	650.000.000.000
BCA	MMN	KI 2	Jul 2024/ Jul 2024	8,75%	10,00%	69.640.000.000
BCA dan Sulselbar	MMN	KI Sindikasi	Agu 2030/ Aug 2030	8,52%	9,74%	1.547.487.000.000
BCA	JTSE	KI 2	Feb 2020/ Feb 2020	8,75%	10,00%	25.474.000.000
BCA	JTSE	KI 3	Nov 2023/ Nov 2023	8,75%	10,00%	120.558.000.000
BCA	BSD	KI 2	Agu 2020/ Aug 2020	8,75%	10,00%	22.125.000.000
BCA	BSD	KI 3	Mei 2024/ May 2024	8,75%	10,00%	9.384.000.000
BCA	DCC	KI	Jun 2020/ Jun 2020	-	10,25%	48.685.000.000

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Bank/ Bank	Peminjam/ Debtor	Fasilitas/ Facilities	Jatuh tempo pinjaman/ Maturity date
BCA	RPSL	KI	Nov 2023/ Nov 2023
BCA	IME	KI	Des 2028/ Dec 2028
ICBC	SCTK	KI	Apr 2023/ Apr 2023
Panin	NI	KI	Jun 2024/ Jun 2024

a. Pinjaman Bank

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

i. PT Margautama Nusantara (MUN) dan entitas anaknya

Sejak tanggal 20 Oktober 2017, MUN, entitas anak langsung, memperoleh fasilitas kredit *Time Loan Revolving* dari BCA sebesar Rp500.000.000.000 untuk pembelian saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB), pembiayaan proyek jalan tol milik PT Bintaro Serpong Damai (BSD) dan pembiayaan proyek jalan tol Pettarani. Pada 1 Agustus 2018, fasilitas tersebut ditambahkan sebesar Rp150.000.000.000 sehingga total fasilitas menjadi Rp650.000.000.000.

Pinjaman ini dijamin oleh seluruh saham JLB, *unlimited corporate guarantee* dari PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), dan PT Makassar Metro Network Marga Nusantara (MMN), dan *escrow account*, *Operating Account*, *Debt Service Account*, Rekening Penampungan Dividen, dan Rekening Penampungan Pendapatan Sementara JTSE dan MMN.

Sejak tanggal 28 Juli 2011, MMN, JTSE, dan BSD, entitas anak dari MUN, memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BCA sebesar Rp739.638.944.183 untuk pembiayaan pelunasan pinjaman dari PT Bank Mega Tbk. Pinjaman ini telah dilunasi oleh MMN dan JTSE pada bulan Agustus 2019 dan BSD pada bulan Oktober 2019.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

Tingkat suku bunga efektif/ <i>Effective rate</i>		Jumlah fasilitas/ <i>Total facilities</i>
2020	2019	
8,75%	10,00%	138.600.000.000
8,75%	10.25%	297.000.000.000
12.5%	12,50%	102.000.000.000
11%	11,00%	61.000.000.000

a. Bank Loans

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

i. Margautama Nusantara (MUN) and its subsidiaries

On October 20, 2017, MUN, a direct subsidiary, obtained Time Loan Revolving credit facility from BCA amounting to Rp500,000,000,000 to purchase of shares of PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB), the financing of the toll road project owned by PT Bintaro Serpong Damai (BSD) and the financing of the Pettarani toll road project. On August 1, 2018, the facility was increased by Rp150,000,000,000 so the total facility became Rp650,000,000,000.

The loan is secured by all JLB shares, unlimited corporate guarantees from PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), and PT Makassar Metro Network (MMN), and escrow accounts, Operating Accounts, Debt Service Accounts, Dividend Settlement Accounts, and Temporary JTSE and MMN Revenue Shelter Account.

On July 28, 2011, MMN, JTSE, and BSD, MUN's Subsidiaries, obtained Investment Credit Facility from BCA amounting to Rp739,638,944,183 to refinance loan from PT Bank Mega Tbk. The loans have been fully repaid by MMN and JTSE in August, 2019 and BSD in October, 2019.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

i. PT Margautama Nusantara (MUN) dan entitas anaknya (lanjutan)

Pada tanggal 17 April 2017, MMN memperoleh fasilitas Kredit Investasi 1 dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dengan plafon maksimal sebesar Rp69.640.000.000 untuk membiayai pelapisan jalan tol dan pengadaan *Traffic Information System* (TIS).

Berdasarkan perubahan pertama Perjanjian Kredit dalam Akta No. 10 tanggal 10 Februari 2012, JTSE memperoleh fasilitas Kredit Investasi 2 dari BCA sebesar Rp25.474.000.000 yang digunakan untuk membiayai perbaikan jalan tol berupa pelapisan, *construction change order* dan rekonstruksi *slab* beton. Pada tanggal 21 Desember 2015, JTSE memperoleh fasilitas Kredit Investasi 3 dari BCA dengan plafon maksimal sebesar Rp120.558.000.000 untuk membiayai pembangunan Jembatan Tallo, perbaikan *frontage* dan investasi lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan perubahan kedua Perjanjian Kredit yang dinyatakan dalam Akta No. 11 tanggal 17 September 2012, BSD memperoleh Kredit Investasi dari BCA sebesar Rp22.125.000.000. Pada tanggal 17 April 2017, BSD memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BCA dengan plafon maksimal sebesar Rp9.384.000.000 untuk membiayai pembelian ruang kantor di Associate Tower Intermark, Serpong.

Keseluruhan pinjaman entitas anak dari MUN dijamin oleh hak pengusahaan jalan tol, seluruh hasil tagihan jalan tol, saham entitas anak yang dimiliki oleh MMN, JTSE penerimaan dari ganti rugi asuransi dari Pemerintah atau Badan Usaha Jalan Tol yang baru sesuai ketentuan PPJT, Rekening *Escrow*, Rekening Operasi dan *Debt Service Account*, dan *Letter of Undertaking* (LoU) entitas anak.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

i. Margautama Nusantara (MUN) and its subsidiaries (continued)

On April 17, 2017, MMN obtained an Investment Credit Facility 1 from PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") with a maximum amount of Rp69,640,000,000 to refinance the overlay of toll road and the construction of Traffic Information System (TIS).

Based on the first Amendment of Credit Agreement in Notarial Deed No. 10 dated February 10, 2012, JTSE obtained an Investment Credit Facility 2 from BCA amounting to Rp25,474,000,000 for financing the refinement of toll road consisting of overlay, construction change order and reconstruction of concrete slab. On December 21, 2015, JTSE obtained an Additional Investment Credit Facility 3 from BCA with a maximum amount of Rp120,558,000,000 to refinance the construction of Tallo Bridge, frontage repairment and other investments.

Furthermore, based on the second Amendment of Credit Agreement in Notarial Deed No. 11 dated September 17, 2012, BSD obtained Investment Credit from BCA amounting to Rp22,125,000,000. On April 17, 2017, BSD obtained Investment Credit facility from BCA with a maximum amount Rp9,384,000,000 to finance purchase of office room at Associate Tower Intermark, Serpong.

All of the MUN's subsidiaries' loans are secured by the concession rights, all revenues from toll road, the subsidiary shares owned by MMN, JTSE receipt of indemnity insurance from Government or new Toll Road in accordance with PPJT, Escrow Account, the Operating Account, Debt Service Account and a Letter of Undertaking (LoU) of the subsidiaries.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

i. PT Margautama Nusantara (MUN) dan entitas anaknya (lanjutan)

Perjanjian hutang antara Grup MUN dan BCA memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan Grup MUN memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, terutama untuk:

- a. Mendapatkan pinjaman baru;
- b. Melakukan divestasi atau merger dan memberikan jaminan;
- c. Pembayaran dividen secara kas; dan
- d. Menjaminkan hutang, harta kekayaan atau *Corporate Guarantee* ke pihak lain.

Selama masa berlaku perjanjian tersebut, Grup harus mempertahankan rasio utang terhadap modal maksimum sebesar 2 kali untuk MUN, JTSE dan BSD, 4 kali untuk MMN, dan *debt service coverage ratio* sebesar minimum 1 kali. Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup telah mematuhi persyaratan dalam perjanjian-perjanjian fasilitas kredit tersebut.

Jumlah beban bunga pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp35.584.860.502 dan Rp40.821.468.220.

ii. PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)

Pada tanggal 19 Juni 2013, DCC, entitas anak tidak langsung, memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Bank Garansi dari BCA dengan jumlah pokok masing-masing tidak lebih dari Rp45.000.000.000 dan Rp3.685.000.000.

Fasilitas pinjaman ini dipergunakan oleh DCC untuk membiayai instalasi pengolahan air (IPA) bersih, membeli peralatan IPA dan jaminan pelaksanaan serta jaminan penyediaan air bersih ke PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM), Medan, Sumatera Utara.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

i. Margautama Nusantara (MUN) and its subsidiaries (continued)

The loan agreement between MUN Group and BCA contains several restrictive covenants which require the MUN Group to obtain prior written consent from BCA, mainly to:

- a. Obtain new loan;
- b. Divest or merge and give guarantees;
- c. Payment of cash dividends; and
- d. Secure debt, property or Corporate Guarantee to other parties.

During the effective period of the agreement, the subsidiaries shall maintain debt to equity ratio at a maximum of 2 times for MUN, JTSE, and BSD, and 4 times for MMN, and a minimum debt service coverage ratio of 1 time. As of December 31, 2020 the Group has complied with covenants as stated in the credit facilities agreements.

Total interest expenses in December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp35,584,860,502 and Rp40,821,468,220.

ii. PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)

On June 19, 2013, DCC, an indirect subsidiary, obtained Credit Investment and Bank Guarantee facilities from BCA with principal amount not exceeding of Rp45,000,000,000 and Rp3,685,000,000, respectively.

DCC used this loan facility to finance their water treatment plant (WTP), purchase WTP equipments and guarantee operational and water supplies to PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM), Medan, North Sumatera.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

ii. PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) (lanjutan)

Pinjaman ini dijamin dengan perjanjian konsesi dari KIM, piutang DCC kepada KIM, seluruh saham DCC, seluruh aset atas proyek yang dibiayai oleh BCA, rekening escrow, rekening *operating* dan *debt service*, LoU dari DCC.

Perjanjian pinjaman antara DCC dan BCA memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan DCC memperoleh persetujuan dari BCA, di antaranya untuk:

1. Merubah pemegang saham kecuali pengalihan saham ke TBN, entitas anak tidak langsung, sebesar 20%;
2. Penggantian DCC sebagai operator IPA di KIM kecuali ke TBN;
3. Penggantian TBN sebagai supervisi DCC;
4. Mendapatkan pinjaman baru;
5. Melakukan divestasi atau merger dan memberikan jaminan;
6. Perubahan bisnis utama;
7. Pembayaran dividen; dan
8. Menjamin utang, harta kekayaan atau memberikan *Corporate Guarantee* ke pihak lain.

Beban bunga selama tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp78.846.763 dan Rp609.398.869. Pada tanggal 19 Juni 2020, DCC telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman.

iii. PT Inpolo Meka Energi (IME)

Pada tanggal 12 Desember 2017, IME, entitas anak tidak langsung, mendapat Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp27.000.000.000 yang digunakan untuk penjaminan atas proyek PLTMH Lau Gunung dan modal kerja perseroan. Fasilitas ini jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Agunan pinjaman berupa deposito dari Bank BCA dengan jaminan deposito dari PT Energi Infranasantara. Perjanjian diamandemen pada tanggal 10 Desember 2018 dengan jangka waktu pembayaran diperpanjang sampai 13 Maret 2019. Pada tanggal 13 Maret 2019, IME telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

ii. PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) (continued)

The loan is secured by concession agreement of KIM, DCC receivable to KIM, all the DCC shares owned by shareholder, all assets of project financed by BCA, escrow account, operating and debt service account, and LoU from the Company.

The loan agreement between DCC and BCA contains several restrictive covenants which require DCC to obtain approval from BCA, mainly to:

1. Shareholders change except for TBN of 20%, an indirect subsidiary;
2. Replace DCC role as WTP operator in KIM except to TBN;
3. Replace TBN role as supervisor of DCC;
4. Obtain new loan;
5. Divest or merge and provide guarantees;
6. Major business changes;
7. Dividend payment; and
8. Secure debt, property or provide *Corporate Guarantee* to other parties.

Interest expenses for 2020 and 2019 amounted to Rp78,846,763 and Rp609,398,869, respectively. On June 19, 2020, DCC has settled all of loan facilities.

iii. PT Inpolo Meka Energi (IME)

On December 12, 2017, IME, an indirect subsidiaries obtained Working Capital Loan Facility from PT Bank Central Asia Tbk amounting to Rp27,000,000,000 for guarantee of PLTMH Lau Gunung project and working capital. This loan facility was be due in 1 year. Collateral of this loan is the IME's time deposit in Bank BCA with deposit guarantee from PT Energi Infranasantara. The agreement was amended on December 10, 2018 with the term of payment extended until March 13, 2019. On March 13, 2019, IME has settled all of loan facilities.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

iii. PT Inpolo Meka Energi (IME) (lanjutan)

Pada tanggal 21 Desember 2018, IME, entitas anak tidak langsung, mendapat Fasilitas Kredit dari PT Bank Central Asia yang digunakan untuk membiayai pembangunan proyek PLTA dan PLTMH Lau Gunung, melunasi pinjaman debitor kepada Landesbank Baden Wutternberg "LBBW" dan pemegang saham, serta menjamin keikutsertaan tender atas pengajuan PPA PLTMH/PLTA ke PLN, dengan plafon sebesar Rp297.000.000.000. Selama 2019, Fasilitas Kredit yang telah dicairkan sebesar Rp129.918.103.453, yang akan mulai dibayarkan pada tanggal 27 Januari 2021. Jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut adalah aset tetap yang dibiayai oleh pinjaman, segala bentuk piutang yang menjadi hak IME, kas dan setara kas serta escrow account milik IME, serta saham IME milik EI dan PT Pembangunan Perumahan Energi.

Beban bunga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp773.892.890 dan Rp578.113.967.

iv. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 28 November 2016, RPSL, entitas anak, mendapat Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp138.600.000.000 yang digunakan untuk proyek PLTBm Pontianak dan modal kerja.

Pada tanggal 3 Juli 2020, RPSL mendapat perpanjangan jatuh tempo pembayaran hingga 27 Maret 2028 dan suku bunga berubah menjadi 8,75%.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

iii. PT Inpolo Meka Energi (IME) (continued)

On December 21, 2018, IME, an indirect subsidiary obtained Loan Facility from PT Bank Central Asia to build PLTA & PLTMH Lau Gunung Project, settle loan to Landesbank Baden Wutternberg "LBBW" and shareholder, and guaranteeing tender participation for the submission of PLTMH/PLTA PPAs to PLN, with a maximum amount of Rp297,000,000,000. During 2019, outstanding balance of the credit facility is amounted to Rp129,918,103,453, which will be repaid starting January 27, 2021. The loan is secured by the fixed assets financed by the loan, all forms of receivables entitled by IME, cash and cash equivalents and escrow accounts of IME, and IME's shares owned by EI and PT Pembangunan Perumahan Energi.

Interest expenses in December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp773,892,890 and Rp578,113,967, respectively.

iv. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

Long-Term Bank Loan

On November 28, 2016, RPSL, a subsidiary, received an Investment Credit Facility from PT Bank Central Asia Tbk amounting to Rp138,600,000,000 which was used to PLTBm Pontianak's project and working capital.

On July 3, 2020, RPSL received extension of the maturity date to March 27, 2028 and interest rate has changed to 8.75%.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

iv. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) (lanjutan)

Pinjaman Bank Jangka Panjang (lanjutan)

Agunan pinjaman berupa tanah dan bangunan PLTBM x 15 MW, termasuk mesin dan peralatan, seluruh saham debitur, piutang dan persediaan.

Total beban bunga RPSL pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp8.438.280.639 dan Rp12.036.384.994.

PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

Berdasarkan Akta No. 66 tanggal 15 April 2015, SCTK memperoleh fasilitas pinjaman investasi dari ICBC dengan plafon sebesar Rp102.000.000.000 yang akan digunakan untuk membiayai investasi SCTK.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia atas penjualan air bersih dan piutang usaha terkait, aset terkait, *Corporate Guarantee* dari Potum dan *Letter of Undertaking* dari SCTK.

Perjanjian pinjaman antara SCTK dan ICBC memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan SCTK memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ICBC, di antaranya untuk:

- (i) Mendapatkan pinjaman baru dari pihak ketiga lainnya;
- (ii) Menjamin utang, harta kekayaan atau memberikan *Corporate Guarantee* ke pihak lain;
- (iii) Melakukan investasi, merger, akuisisi atau penempatan kepemilikan pada perusahaan lainnya;
- (iv) Menjual aset terkait;
- (v) Membagikan dividen;
- (vi) Mengubah bisnis utama; dan
- (vii) Melakukan perubahan atas Anggaran Dasar, perubahan Dewan Direksi atau Komisaris.

Beban bunga selama tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp8.261.662.867 dan Rp9.856.143.371.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

iv. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) (continued)

Long-Term Bank Loan (continued)

Loan collateral represents of PLTBM x 15 MW land and building, including machinery and equipment, all RPSL's shares, receivables and inventories.

Interest expenses in December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp8,438,280,639 and Rp12,036,384,994, respectively.

PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

Based on Deed No. 66 dated April 15, 2015, SCTK obtained investment loan facility from ICBC with a maximum amount of Rp102,000,000,000 which is used to finance SCTK investment.

The facility is secured by the fiduciary of sale of fresh water and its accounts receivable, related assets, Corporate Guarantee from Potum and Letter of Undertaking from the SCTK.

The facility agreement between SCTK and ICBC imposes several restrictions, which requires SCTK to obtain prior written approval from ICBC, including for:

- (i) *Obtaining a new loan from other third parties;*
- (ii) *Ensuring debt, property or provide Corporate Guarantee to the other party;*
- (iii) *Investment, merger, acquisition or placement of ownership in other companies;*
- (iv) *Selling related assets;*
- (v) *Distribution of dividends;*
- (vi) *Major business changes; and*
- (vii) *Changes to the Articles of Association, changes in the Board of Directors or Commissioners.*

Interest expenses for 2020 and 2019 amounted to Rp8,261,662,867 and Rp9,856,143,371, respectively.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin)

Pada tanggal 13 Juni 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Jangka Panjang dari Panin dengan maksimum pinjaman sebesar Rp61.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan pembelian 3 (tiga) unit ruang kantor dengan total luas 674,6 m² yang terletak di Equity Tower Lantai 38, Jakarta. Pinjaman ini dijamin dengan ruang kantor yang dibeli melalui pinjaman ini.

Perjanjian utang antara Perusahaan dan Panin memuat beberapa pembatasan yang mengharuskan Perusahaan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panin untuk:

- a) Menggunakan fasilitas kredit selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya;
- b) Melakukan perluasan atau penyempitan usaha.

Beban bunga selama tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp3.698.854.847 dan Rp4.356.325.296.

b. Pinjaman Sindikasi

PT Makassar Metro Network (MMN) sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)

Pinjaman Bank Sindikasi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar)

Pada tanggal 30 Juli 2018, MMN, entitas anak tidak langsung, memperoleh Fasilitas Kredit Investasi dari sindikasi BCA dan Sulselbar dengan jumlah plafon sebesar Rp1.547.487.000.000 dengan komponen KI pokok sebesar maksimum Rp1.451.378.000.000 dan KI-Interest During Construction sebesar maksimum Rp96.109.000.000.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin)

On June 13, 2014, the Company obtained a long-term loan facility from Panin with a maximum loan of Rp61,000,000,000. The loan was used to finance the purchase of 3 (three) units of office space with a total area of 674.6 m² located in Equity Tower 38th floor, Jakarta. The loan is secured by office space purchased through this loan.

Loan agreement between the Company and Panin imposes several restrictions that require the Company to obtain prior written approval from Panin for:

- a) Using the credit facility not in accordance with the agreed loan purpose;
- b) Make a business expansion or reduction.

Interest expense for 2020 and 2019 amounted to Rp3,698,854,847 and Rp4,356,325,296, respectively.

b. Syndicated Loan

PT Makassar Metro Network (MMN) formerly PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)

Syndicated Bank Loan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) with PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar)

On July 30, 2018, MMN, an indirect subsidiary, obtained Credit Investment from syndication BCA and Sulselbar with a maximum amount of Rp1,547,487,000,000 with component of principal Investment Credit with a maximum amount of Rp1,451,378,000,000 and Investment Credit-Interest During Construction with a maximum of Rp96,109,000,000.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

**PT Makassar Metro Network (MMN)
sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara
(BMN) (lanjutan)**

Pinjaman Bank Sindikasi PT Bank Central Asia
Tbk (BCA) dengan PT Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
(Sulselbar) (lanjutan)

Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembangunan proyek jalan tol layang Pettarani yang merupakan perpanjangan jalan tol MMN yang sudah ada. Fasilitas ini berjangka waktu maksimal 12 (dua belas) tahun, dengan suku bunga pinjaman yang dihitung berdasarkan suku bunga deposito tertimbang periode 1 bulanan ditambah margin per tahun sebesar masing-masing 5,051% selama masa konstruksi dan 4,901% ketika sudah beroperasi. Pembayaran Fasilitas Kredit dilakukan secara bulanan setelah masa tenggang sampai dengan 3 tahun, dengan persentase pembayaran pokok Fasilitas Kredit sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati.

Pinjaman ini dijamin oleh hak pengusahaan jalan tol, seluruh hasil tagihan jalan tol seksi I, II, dan III saham entitas anak yang dimiliki oleh MMN, penerimaan dari ganti rugi asuransi dari Pemerintah atau Badan Usaha Jalan Tol yang baru sesuai ketentuan PPJT, Rekening Escrow, Rekening Operasi dan Debt Service Account dan Letter of Undertaking (LoU) MMN.

Perjanjian pinjaman antara MMN dan BCA memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan entitas anak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, terutama untuk:

1. Mendapatkan pinjaman baru;
2. Melakukan divestasi atau merger dan memberikan jaminan;
3. Pembayaran dividen kas; dan
4. Menjaminkan utang, harta kekayaan atau Corporate Guarantee.

Selama masa berlakunya perjanjian tersebut, MMN harus mempertahankan *debts to equity ratio* maksimum sebesar 2 kali dan *debt service coverage ratio* sebesar minimum 1 kali.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

b. Syndicated Loan (continued)

**PT Makassar Metro Network (MMN) formerly
PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)
(continued)**

Syndicated Bank Loan PT Bank Central Asia
Tbk (BCA) with PT Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
(Sulselbar) (continued)

This facility aims to finance the construction of elevated toll road Pettarani which is an extension of existing MMN toll road. This facility has a maximum period of 12 (twelve) years, with loan interest rates calculated based on the one-month weighted average of time deposit added with margin rate per year of 5.051% during construction and 4.901% when already in operation. Payment of Credit Facilities is carried out every month after a grace period of up to 3 years, with the percentage of payment of the Credit Facility principal in accordance with the agreed installment schedule.

The loan is secured by the toll road concession rights, all revenues from toll road section I and II, subsidiary shares owned by MMN, receipt of indemnity insurance from Government or new Toll Road in accordance with PPJT, Escrow Account, the Operating Account and Debt Service Account and a Letter of Undertaking (LoU) of MMN.

The loan agreement between MMN and BCA contains several restrictive covenants which require subsidiary to obtain prior written consent from BCA, mainly to:

1. Obtain new loan;
2. Divest or merge and give guarantees;
3. Cash dividend payment; and
4. Secure debt, property or Corporate Guarantee to other parties.

During the effective period of the agreement, MMN shall maintain *debts to equity ratio* at a maximum of 2 times and a minimum *debt service coverage ratio* of 1 time.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Lembaga Keuangan

PT Inpolo Meka Energi (IME)

Pada 13 Februari 2018, IME, entitas anak, memperoleh fasilitas pembiayaan kontrak ekspor dari Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) untuk pembelian turbin kepada Global Hydro Energy GmbH (GHE) dengan jumlah maksimum pembiayaan sebesar 85% dari kontrak ekspor atau sebesar EUR2.058.200 dan 100% dari biaya-biaya Export Credit Agency sebesar EUR101,98. Pembayaran pinjaman pertama akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2020. Pada bulan Juli 2018, IME telah melakukan pencairan pertama sebesar EUR363.180. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar EUROBOR ditambah margin 2,5% per tahun. Pembayaran bunga pertama adalah 6 bulan setelah tanggal pencairan pertama.

IME telah melakukan pelunasan atas fasilitas kredit dari LBBW pada tanggal 27 Oktober 2020.

Kepatuhan atas Syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka panjang tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

c. Financial Institution

PT Inpolo Meka Energi (IME)

On February 13, 2018, IME, a subsidiary, obtained export contract financing facilities from Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) for the purchase of turbines to Global Hydro Energy GmbH (GHE) with a maximum amount of 85% of the export contract or EUR2,058,200 and 100% of the Export Credit Agency costs of EUR101.98. In July 2018, IME made the first disbursement of EUR363,180. The first loan payment will due on April 30, 2020. This loan bears interest at EUROBOR plus a margin of 2.5% per year. The first interest payment is 6 months after the first disbursement date.

IME has made full repayment of the credit facility from LBBW on October 27, 2020.

Compliance with Loan Covenants

As of December 31, 2020 and 2019, the Group has complied with all of the required covenants of the above-mentioned long-term loans as stipulated in the respective loan agreements.

23. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Adimitra Transferindo (Biro Administrasi Efek) adalah sebagai berikut:

23. SHARE CAPITAL

The composition of Company's shareholders as of December 31, 2020 and 2019 based on the Shareholders List provided by PT Adimitra Transferindo (Securities Administration Agency) is as follows:

31 Desember 2020/December 31, 2020

Pemegang saham	Seri/ Series	Saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Bosowa Utama	A	1	0,00%	35	PT Bosowa Utama
	B	2.727.291	0,01%	190.910.370	
		2.727.292	0,01%	190.910.405	
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	B	13.220.263.850	74,65%	925.418.469.500	PT Metro Pacific Tollways Indonesia
PT Indonesia Infrastructure Finance	B	1.771.071.131	10,00%	123.974.979.170	PT Indonesia Infrastructure Finance
Lain-lain (masing-masing kurang dari 5%, termasuk masyarakat)	B	2.716.645.921	15,34%	190.165.214.470	Others (each below 5%, including public)
Jumlah		17.710.708.194	100,00%	1.239.749.573.545	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

23. SHARE CAPITAL (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2019

Pemegang saham	Seri/ Series	Saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Bosowa Utama	A	1	0,00%	35	PT Bosowa Utama
	B	2.727.291	0,01%	190.910.370	
		2.727.292	0,01%	190.910.405	
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	B	13.080.701.946	73,86%	915.649.136.220	PT Metro Pacific Tollways Indonesia
PT Indonesia Infrastructure Finance	B	1.771.071.131	10,00%	123.974.979.170	PT Indonesia Infrastructure Finance
Lain-lain (masing-masing kurang dari 5%, termasuk masyarakat)	B	2.856.207.825	16,13%	199.934.547.750	Others (each below 5%, including public)
Jumlah		17.710.708.194	100,00%	1.239.749.573.545	Total

Berdasarkan akta No 118 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn, Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar berjumlah Rp5.670.000.000.000 yang terdiri atas 2 lembar saham seri A senilai Rp70 dan 80.999.999.999 saham seri B senilai Rp5.669.999.999.930. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018524.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 7 September 2018.

Based on the Deed No 118 dated August 31, 2018 of Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn, Notary in Jakarta, the Company's shareholders approved the increase in the Company's share capital amounting to Rp5,670,000,000,000 which consists of 2 shares of Series A share with total amount of Rp70 and 80,999,999,999 shares of Series B share with total amount of Rp5,669,999,999,930. This change has been approved by Ministry of Law and Human Rights No AHU-0018524.AH.01.02.TAHUN 2018 dated September 7, 2018.

Pada tahun 2013, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham biasa sebanyak 385.454.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia senilai Rp84.522.927.500. Pembelian kembali saham ini ditujukan untuk menstabilkan harga saham Perusahaan akibat kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1-2/SEOJK.04/ 2013. Perusahaan memiliki hak untuk menerbitkan kembali saham-saham tersebut di masa mendatang. Seluruh saham yang diterbitkan Perusahaan telah disetor penuh. Pembelian ini dicatat pada akun "Saham yang diperoleh kembali".

In 2013, the Company repurchased its common shares totaling to 385,454,000 shares through Indonesia Stock Exchange amounting to Rp84,522,927,500. The transaction has a purpose to stabilize the Company's shares price which was caused by a significant fluctuation of market condition according to the Command Letter of Financial Service Authority (OJK) No. 1-2/SEOJK.04/2013. The Company has rights to reissue the treasury stock in the future. All shares are issued and fully paid by the Company. This transaction has recorded in account "Treasury stock".

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Agio saham	1.958.166.045	1.958.166.045
Agio saham dari penawaran umum perdana pada tahun 2001	6.000.000.000	6.000.000.000
Biaya emisi efek dari penawaran umum perdana tahun 2001	(1.298.793.524)	(1.298.793.524)
Agio saham dengan HMETD sebesar 8.476.500.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham dan harga pelaksanaan Rp88 per saham pada tahun 2010	183.084.950.970	183.084.950.970
Biaya emisi efek dari penawaran umum terbatas tahun 2010	(1.306.306.218)	(1.306.306.218)
Agio saham dengan HMETD sebesar 2.475.036.314 saham Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham dan harga pelaksanaan Rp200 per saham pada tahun 2018	321.754.720.820	321.754.720.820
Biaya emisi efek dari penawaran umum terbatas tahun 2018	(8.237.236.338)	(8.237.236.338)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(32.799.735.420)	(32.799.735.420)
Jumlah	469.155.766.335	469.155.766.335

24. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL - NET

<i>Additional paid-in capital</i>
<i>Additional paid-in capital from the initial public offering in 2001</i>
<i>Shares issuance costs on initial public offering in 2001</i>
<i>Additional paid-in capital 8,476,500,000 series B shares through issue shares with pre-emptive rights with par value of Rp70 per share at offering price of Rp88 per share in 2010</i>
<i>Shares issuance costs on initial public offering in 2010</i>
<i>Additional paid-in capital 2,475,036,314 series B shares through issue shares with pre-emptive rights with par value of Rp70 per share at offering price of Rp200 per share in 2018</i>
<i>Shares issuance costs on the limited public offering in 2018</i>
<i>Difference in transaction value with entities under common control</i>
Total

25. DIVIDEN, PENCADANGAN SALDO LABA, DAN KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Dividen dan pencadangan saldo laba

Berdasarkan keputusan Direksi tanggal 14 Desember 2020, Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen interim kepada para pemegang saham sebesar Rp2 per saham atau senilai Rp35.421.416.388. Dividen interim telah dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2020.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 yang telah disahkan dalam Akta Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., No. 122 tanggal 19 Agustus 2020, para pemegang saham menyetujui penyisihan saldo laba sebesar Rp1.438.136.556 sebagai dana cadangan wajib dan tidak adanya pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan.

25. DIVIDEND, OTHER EQUITY COMPONENT, AND APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

Dividend and appropriation of retained earnings

Based on the decision of the Board of Directors dated December 14, 2020, the Company agreed to distribute interim dividends to shareholders amounting to Rp2 per share or equivalent to Rp35,421,416,388. The interim dividend has been paid on December 30, 2020.

Based on Shareholders' Annual General Meeting for the financial year 2019 which has been legalized by Notarial Deed No.122 of Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., dated August 19, 2020, the shareholders approved the appropriation of retained earnings to general reserve amounting to Rp1,438,136,556 and no distribution of dividends to the Company's shareholders.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

25. DIVIDEN, PENCADANGAN SALDO LABA, DAN KOMPONEN EKUITAS LAINNYA (lanjutan)

Dividen dan pencadangan saldo laba (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018 yang telah disahkan dalam Akta Notaris Humbert Lie, S.H., M.Kn., No. 100 tanggal 26 April 2019, para pemegang saham menyetujui penyisihan saldo laba sebesar Rp1.796.514.599 sebagai dana cadangan umum dan tidak adanya pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan.

Komponen ekuitas lainnya

Komponen ekuitas lainnya merupakan selisih atas nilai transaksi dengan entitas nonpengendali sebesar Rp469.420.386.634 dan Rp497.379.919.488 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

25. DIVIDEND, OTHER EQUITY COMPONENT, AND APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS (continued)

Dividend and appropriation of retained earnings (continued)

Based on Shareholders' Annual General Meeting for the financial year 2018 which has been legalized by Notarial Deed No.100 of Humbert Lie, S.H., M.Kn., dated April 26, 2019, the shareholders approved the appropriation of retained earnings to general reserve amounting to Rp1,769,514,599 and no distribution of dividends to the Company's shareholders.

Other equity components

Other equity component represents difference in value transactions with non-controlling interests amounting to Rp469,420,386,634 and Rp497,379,919,488 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

26. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

26. NON-CONTROLLING INTERESTS

31 Desember 2020/December 31, 2020

	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan modal disetor dari kepentingan pengendali/ Additional paid in capital from controlling interest	Akuisisi, divestasi, dan/penyesuaian/ Acquisition, divestment and adjustment	Bagian laba (rugi) entitas anak/ Equity in net income (loss) of subsidiaries	Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
<i>Penyertaan langsung</i>							<i>Direct ownership</i>
PT Margautama Nusantara	473.290.756.313	97.000.000.000	33.626.588.699	38.607.934.947	(5.711.509.931)	636.813.770.028	PT Margautama Nusantara
PT Potum Mundi Infranasantara	36.853.624.266	-	-	2.426.415.341	(157.996.998)	39.122.042.609	PT Potum Mundi Infranasantara
PT Energi Infranasantara	73.410.146.942	119.000.000	(12.700.785.938)	2.183.662.999	218.496.002	63.230.520.005	PT Energi Infranasantara
PT Marga Metro Nusantara	7.510.086.933	11.139.000.000	-	11.727.797	-	18.660.814.730	PT Marga Metro Nusantara
Jumlah	591.064.614.454	108.258.000.000	20.925.802.761	43.229.741.084	(5.651.010.927)	757.827.147.372	Total

31 Desember 2019/December 31, 2019

	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan modal disetor dari kepentingan pengendali/ Additional paid in capital from controlling interest	Akuisisi, divestasi, dan/penyesuaian*)/ Acquisition, divestment and adjustment*)	Bagian laba (rugi) entitas anak/ Equity in net income (loss) of subsidiaries	Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
<i>Penyertaan langsung</i>							<i>Direct ownership</i>
PT Margautama Nusantara	431.714.693.009	-	(13.013.640.977)	54.127.786.834	461.917.447	473.290.756.313	PT Margautama Nusantara
PT Potum Mundi Infranasantara	40.415.916.949	-	(7.545.467.296)	3.983.174.613	-	36.853.624.266	PT Potum Mundi Infranasantara
PT Energi Infranasantara	54.977.324.133	15.200.000.000	(156.056.619)	3.432.029.603	(43.150.175)	73.410.146.942	PT Energi Infranasantara
PT Marga Metro Nusantara	-	7.500.000.000	-	10.086.933	-	7.510.086.933	PT Marga Metro Nusantara
Jumlah	527.107.934.091	22.700.000.000	(20.715.164.892)	61.553.077.983	418.767.272	591.064.614.454	Total

*) Termasuk penambahan akibat selisih transaksi dengan pihak nonpengendali (Catatan 1d)/Includes addition from differences from transactions with non-controlling interests (Note 1d)

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

27. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Rincian perhitungan laba tahun berjalan per saham adalah sebagai berikut:

	Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ <i>Profit for the year attributable to the owner of the parent</i>	Jumlah rata-rata tertimbang saham/ <i>Weighted average number of shares</i>	Laba per saham/ <i>Earning per share</i>	
Tahun yang berakhir				<i>For the year ended</i>
31 Desember 2020	69.392.144.520	17.710.708.194	3,92	December 31, 2020
31 Desember 2019	143.813.655.546	17.710.708.194	8,12	December 31, 2019

27. NET EARNING PER SHARE

Details of profit for the year per share computation are as follows:

28. PENDAPATAN USAHA, PENJUALAN, DAN LAINNYA

28. REVENUES, SALES, AND OTHER OPERATING REVENUE

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ <i>For the Year Ended December 31,</i>		
	2020	2019	
<u>Pendapatan usaha dan penjualan</u>			<u>Revenues and sales</u>
Pendapatan jalan tol			Toll road revenues
Ruas Pondok Aren - Serpong	179.599.949.500	216.283.124.800	Section Pondok Aren - Serpong
Ruas Tallo - Bandara Hasanuddin	87.309.325.000	122.678.476.300	Section Tallo - Hasanuddin Airport
Ruas Pelabuhan Soekarno Hatta - Pettarani	61.355.513.500	76.941.563.475	Section Soekarno Hatta Port-Pettarani
Penjualan listrik	122.659.689.751	141.208.674.250	Electricity sales
Penjualan air bersih	63.579.302.646	70.389.579.360	Treated water sales
Pendapatan jasa manajemen	2.699.954.265	2.671.279.761	Management fee income
Jumlah	517.203.734.662	630.172.697.946	Total
<u>Pendapatan usaha lainnya:</u>			<u>Other operating revenue:</u>
Pendapatan iklan dan sewa lahan	21.200.516.115	18.905.252.329	Advertisement and land rent income

Pendapatan jalan tol dihitung dari jumlah kendaraan yang lewat dikalikan dengan tarif menurut golongan kendaraan. Tarif tol yang ditetapkan didasarkan pada:

- Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005 sebagai pengganti PP No. 8 Tahun 1990 dan PP No. 40 Tahun 2001.

Undang-undang dan PP tersebut merupakan landasan hukum perhitungan/penyesuaian tarif tol yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Toll road revenue is calculated from total passing vehicles multiply with the vehicles group tariff. Toll tariff is set based on:

- Law No. 38 Year 2004 which superseded Law No. 13 Year 1980 concerning on Roads.
- The Government Regulation (PP) No. 15 Year 2005 which superseded PP No. 8 Year 1990 and PP No. 40 Year 2001.

The above Law and PP are the legal basis for calculation/adjustment of the toll tariff which then issued by the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

28. PENDAPATAN USAHA, PENJUALAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2005, Pasal 66 Ayat (1) dinyatakan: "Tarif dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi unsur-unsur kelayakan investasi" dan Pasal 66 Ayat (2): "Besar keuntungan biaya operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan pada selisih biaya operasi kendaraan dan nilai waktu pada jalan tol dengan lintas alternatif jalan umum yang ada".

Rincian tarif tol terjauh pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

28. REVENUES, SALES, AND OTHER OPERATING REVENUE (continued)

Under PP No. 15 year 2005, Article 66 Paragraph (1) stated: "The tariff is calculated based on the ability to pay by the toll road users, gains in vehicle operating costs, and feasibility of investment elements of the feasibility of investment" and Article 66 Paragraph (2): "Gain in vehicles operating costs referred to in Paragraph (1) shall be calculated based on the difference in vehicle operating costs and the value of time on the toll road with an alternative cross existing public road".

The details of the farthest toll tariffs as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

**31 Desember/December 31, 2020
Golongan/Class**

Ruas Jalan Tol/Toll Road Section	I	II	III	IV	V
Biringkanaya (Makassar)	10.000	16.500	16.500	24.500	24.500
Ujung Pandang Seksi I dan II	4.000	5.500	5.500	9.000	9.000
Pondok Ranji dan Pondok Aren	7.000	13.500	13.500	16.000	16.000

**31 Desember/December 31, 2019
Golongan/Class**

Ruas Jalan Tol/Toll Road Section	I	II	III	IV	V
Biringkanaya (Makassar)	10.000	16.500	16.500	24.500	24.500
Ujung Pandang Seksi I dan II	3.500	5.000	6.000	7.500	9.000
Pondok Ranji dan Pondok Aren	6.500	11.500	14.000	17.500	21.000

Pada 31 Januari 2020, Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 1233/KPTS/M/2019 tentang "Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Pondok Aren dan Pondok Ranji", menetapkan penyesuaian tarif tol pada ruas tol BSD, entitas anak tidak langsung.

On January 31, 2020, the Minister of Public Works through his Decision Letter No. 1233/KPTS/M/2019, on "Adjustment Rate Toll Road Pondok Aren and Pondok Ranji", set the adjustment of toll rates on toll roads of BSD, an indirect subsidiary.

Pada 14 November 2019, Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 1076/KPTS/M/2019 tentang "Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Makassar Seksi IV", menetapkan penyesuaian tarif tol pada ruas tol JTSE, entitas anak tidak langsung.

On November 14, 2019, the Minister of Public Works through his Decision Letter No. 1076/KPTS/M/2019, on "Adjustment Rate Toll Road Makassar in Section IV", set the adjustment of toll rates on toll roads of JTSE, an indirect subsidiary.

Pada 31 Januari 2020, Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 1232/KPTS/M/2019 tentang "Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Makassar Ujung Pandang", menetapkan penyesuaian tarif tol pada ruas tol MMN, entitas anak langsung.

On January 31, 2020, the Minister of Public Works through his Decision Letter No. 1232/KPTS/M/2019, on "Adjustment Rates Toll Road Makassar in Ujung Pandang", set the adjustment of toll rates on toll roads of MMN, a direct subsidiary.

Pada tanggal 8 Desember 2017, Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 970/KPTS/M/2017 tentang "Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Makassar Ujung Pandang", menetapkan penyesuaian tarif tol pada ruas tol MMN, entitas anak tidak langsung.

On December 8, 2017, the Minister of Public Works through his Decision Letter No.970/KPTS/M/2017 on "Adjustment Rates Toll Road Makassar in Ujung Pandang", set the adjustment of toll rates on toll roads of MMN, an indirect subsidiary.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

28. PENDAPATAN USAHA, PENJUALAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

Pada tanggal 21 Desember 2019, Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 1233/KPTS/M/2019 tentang "Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Pondok Ranji dan Pondok Aren", menetapkan penyesuaian tarif tol pada ruas tol BSD, entitas anak tidak langsung.

Penjualan air bersih merupakan penjualan air bersih dari SCTK dan DCC, entitas-entitas anak tidak langsung.

Penjualan listrik merupakan penjualan listrik dari RPSL dan IME.

Pendapatan jasa manajemen merupakan pendapatan atas jasa manajemen yang diberikan oleh TBN, entitas anak tidak langsung, kepada TKCM, entitas asosiasi.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, rincian penjualan dari pelanggan dengan total penjualan kumulatif individual melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2020		2019	
	Total/ Total	Persentase terhadap Total Penjualan Konsolidasian/ Percentage to Total Consolidated Sales	Total/ Total	Persentase terhadap Total Penjualan Konsolidasian/ Percentage to Total Consolidated Sales
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	122.659.689.751	23,72%	141.208.674.249	22,41%

PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero)

Penjualan di atas dilakukan oleh RPSL dan IME.

On December 21, 2019, the Minister of Public Works through his Decision Letter No.1233/KPTS/M/2019 on "Adjustment Rates Toll Road Pondok Ranji and Pondok Aren", set the adjustment of toll rates on toll roads of BSD, an indirect subsidiary.

Treated water sales represent the sale of treated water from SCTK and DCC, indirect subsidiaries.

Electricity sales represent the sale of electricity from RPSL and IME.

Revenue from management fee represents fee for management services provided by TBN, an indirect subsidiary, to TKCM, an associated entity.

During the year ended December 31, 2020, the details of sales from customers with individual cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated sales are as follows:

The sales above were made by RPSL and IME.

29. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh entitas anak dalam pembangunan jalan tol baru dan peningkatan kapasitas jalan tol serta untuk peningkatan kapasitas produksi air bersih. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya, yang mana seluruh biaya yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tambahan.

29. CONSTRUCTION REVENUES AND COSTS

Construction revenues are the compensation of the service recognized by the subsidiaries for building new toll roads and to upgrade toll roads capacity and upgrade production capacity of clean water. Construction revenues measured using cost method, which added up to all costs directly attributable to the acquiring costs of the assets.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**29. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI
(lanjutan)**

**29. CONSTRUCTION REVENUES AND COSTS
(continued)**

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Pendapatan konstruksi			Construction revenues
Penyelenggara jalan tol	1.024.090.281.740	926.943.670.409	Toll road operator
Hak penyediaan air bersih	7.624.773.444	16.573.143.784	Water supply concession rights
Sub-jumlah	1.031.715.055.184	943.516.814.193	Sub-total
Beban konstruksi			Construction costs
Penyelenggara jalan tol	(1.024.090.281.740)	(926.943.670.409)	Toll road operator
Hak penyediaan air bersih	(7.624.773.444)	(16.573.143.784)	Water supply concession rights
Sub-jumlah	(1.031.715.055.184)	(943.516.814.193)	Sub-total
Jumlah	-	-	Total

30. BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN

30. DIRECT COSTS AND COST OF SALES

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Beban langsung jalan tol			Direct costs of toll road
Beban pengumpul pendapatan jalan tol	32.073.184.000	34.638.829.949	Toll road revenue collector cost
Beban pemeliharaan jalan tol	14.893.604.781	18.054.756.022	Toll road maintenance cost
Beban pelayanan pemakai jalan tol	12.742.644.638	12.707.612.036	Toll road user services cost
Sub-jumlah	59.709.433.419	65.401.198.007	Sub-total
Beban pokok pengolahan listrik	73.694.642.133	70.400.484.295	Cost of electricity
Amortisasi aset takberwujud	52.246.208.589	64.787.175.528	Amortization of intangible assets
Beban pokok pengolahan air	15.335.703.338	14.001.893.851	Cost of water treatment
Jumlah	200.985.987.479	214.590.751.681	Total

Rincian beban langsung dan beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

Detail of direct costs and cost of sales are as follow:

a. Beban pengumpul pendapatan tol

a. Toll road revenue collector expenses

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Gaji dan tunjangan	10.037.129.923	10.170.808.324	Salaries and allowance
Upah pengupah tol	9.339.944.104	11.011.406.918	Toll collector fee
Penyusutan (Catatan 11)	5.165.448.992	5.230.625.255	Depreciation (Note 11)
Bahan bakar, listrik dan air	2.656.675.629	2.839.789.181	Fuel, electricity and water
Pengamanan	1.678.084.867	1.526.057.119	Security
Perbaikan dan pemeliharaan	687.170.756	1.199.144.723	Repair and maintenance
Imbalan pasca-kerja	508.877.664	508.877.664	Post-employment benefit
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	1.999.852.065	2.152.120.765	Others (each below Rp500,000,000)
Jumlah	32.073.184.000	34.638.829.949	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**30. BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK
PENJUALAN (lanjutan)**

**30. DIRECT COSTS AND COST OF SALES
(continued)**

b. Beban pemeliharaan jalan tol

b. Toll road maintenance expenses

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Perbaikan dan pemeliharaan	8.132.440.107	9.721.589.448	Repair and maintenance
Pajak bumi dan bangunan	5.512.007.983	5.970.982.227	Land and property tax
Gaji dan tunjangan	558.500.347	663.342.396	Salaries and allowance
Asuransi	549.750.329	656.975.211	Insurance
Sewa	-	909.090.924	Rent
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	140.906.015	132.775.816	Others (each below Rp500,000,000)
Jumlah	14.893.604.781	18.054.756.022	Total

c. Beban pelayanan pemakai jalan tol

c. Toll road user services cost

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Gaji dan tunjangan	4.712.035.834	4.309.601.474	Salaries and allowances
Penyusutan (Catatan 11)	3.830.066.544	4.145.379.578	Depreciation (Note 11)
Beban pengoperasian gerbang tol Pondok Ranji (Catatan 37c ii)	2.210.467.584	2.024.749.687	Operating expenses of Pondok Ranji toll gate (Note 37c ii)
Perbaikan dan pemeliharaan	1.192.611.586	1.284.898.692	Repair and maintenance
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	797.463.090	942.982.605	Others (each below Rp500,000,000)
Jumlah	12.742.644.638	12.707.612.036	Total

d. Beban pokok penjualan tenaga listrik

d. Cost of sales of electricity

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Material energi biomassa	65.474.725.996	66.252.268.217	Material biomass energy
Gaji dan tunjangan	4.950.436.984	2.699.780.736	Salaries and allowances
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	3.269.479.153	1.448.435.342	Others (each below Rp500,000,000)
Jumlah	73.694.642.133	70.400.484.295	Total

e. Beban pokok pengolahan air

e. Cost of water treatment

Akun ini merupakan beban untuk pengolahan air yang berasal dari PT SCKT dan PT DCC.

This account represents direct costs of water treatment from PT SCKT and PT DCC.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Gaji dan tunjangan	101.379.681.214	84.556.413.789	Salaries and allowances
Jasa profesional	16.209.242.539	8.725.665.164	Professional fees
Imbalan pasca kerja	11.940.268.797	5.417.789.055	Post-employment benefit
Penyusutan (Catatan 11)	10.797.705.989	11.146.568.498	Depreciation (Note 11)
Depresiasi aset hak guna (Catatan 14)	7.490.448.293	-	Depreciation of right of use assets (Note 14)
Rumah tangga	4.067.067.701	4.977.802.409	Household
Perbaikan dan pemeliharaan	2.230.405.206	3.016.489.691	Repair and maintenance
Promosi dan iklan	2.321.204.532	1.859.942.749	Promotions and advertising
Transportasi dan perjalanan dinas	1.557.330.868	4.399.441.911	Transportation and travelling
Listrik, air dan telekomunikasi	1.548.175.318	2.217.828.394	Electricity, water and telecommunication
Jamuan dan sumbangan	1.494.138.590	3.620.839.144	Entertainments and donations
Akomodasi, rapat dan keanggotaan	805.152.746	2.532.762.155	Accommodation, meeting and membership
Sewa	593.127.521	10.977.861.709	Rent
Alat tulis kantor	409.814.792	536.374.052	Stationeries
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	9.853.915.216	13.278.904.246	Others (each below Rp500,000,000)
Jumlah	172.697.679.322	157.264.682.966	Total

**32. PENDAPATAN/(BEBAN) OPERASIONAL
LAINNYA**

32. OTHER OPERATING INCOME/(EXPENSES)

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Penghasilan usaha lainnya			Other operating income
Jasa konsultasi	379.901.217	3.535.461.623	Consultation fees
Laba dari selisih perubahan mata uang asing, neto	571.416.103	-	Profit from foreign exchange, net
	951.317.320	3.535.461.623	
Beban usaha lainnya			Other operating expenses
Iklan dan sewa lahan	(3.980.033.656)	(3.846.420.275)	Advertisement and land rent
Provisi atas biaya yang ditangguhkan	(4.735.716.107)	-	Provision for deferred charges
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	(7.028.342.703)	-	Provision for impairment loss of receivables
Denda pajak	(8.771.621.484)	(6.973.403.449)	Tax penalties
Rugi dari selisih perubahan mata uang asing	-	(1.328.996.651)	Loss from foreign exchange
Lain-lain	(8.392.172.650)	(7.460.378.761)	Others
	(32.907.886.600)	(19.609.199.136)	
Jumlah	(31.956.569.280)	(16.073.737.513)	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

33. PENGHASILAN KEUANGAN

33. FINANCIAL INCOME

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Bunga deposito dan jasa giro	16.232.984.078	30.443.282.835	Interest on time deposits and current account service
Bunga piutang non-usaha dan investasi	7.164.778.074	2.788.537.935	Interest on non-trade receivables and investments
Jumlah	23.397.762.152	33.231.820.770	Total

34. BEBAN KEUANGAN

34. FINANCIAL COST

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Bunga pinjaman bank dan lembaga keuangan	59.499.588.580	68.501.967.223	Interest on bank loans and financial institution
Bunga utang pembiayaan konsumen	667.980.409	691.878.321	Interest on consumer financing liabilities
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 14)	599.221.957	-	Interest expenses on lease liabilities (Note 14)
Beban administrasi bank	498.848.877	555.824.112	Bank charges
Provisi pinjaman	366.409.683	332.397.628	Loan provision
Jumlah	61.632.049.506	70.082.067.284	Total

35. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

35. RELATED PARTIES INFORMATION

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Nature of transactions with related parties

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi tertentu. Sifat dari hubungan Grup dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

In the normal course of business, the Group made business and financial transactions with certain related parties. The nature of the relationships of the Group with its related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transactions
PT Intisentosa Alambahtera	Entitas asosiasi tidak langsung/ Indirect associate entity	Piutang non-usaha (modal kerja)/ Non-trade receivables (working capital)
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Entitas asosiasi tidak langsung/ Indirect associate entity	Piutang usaha dan piutang non-usaha/ Trade receivables and non-trade receivables

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

35. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	Persentase terhadap total aset/ Percentage from total assets			
	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Piutang usaha				
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	0,001%	0,001%	72.000.000	72.000.000
Piutang non-usaha				
PT Intisentosa Alambahtera	0,521%	0,656%	30.481.356.360	33.302.623.777
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	0,360%	0,000%	21.000.000.000	-
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	0,101%	0,117%	5.933.562.040	5.933.562.040
Direktur Perusahaan	0,005%	0,010%	300.000.000	509.090.639
Sub-jumlah	0,987%	0,783%	57.714.918.400	39.745.276.456
Jumlah	0,988%	0,784%	57.786.918.400	39.817.276.456

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Penjualan			Sales
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	2.699.954.265	2.671.279.761	PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri

Piutang kepada PT Intisentosa Alambahtera merupakan piutang modal kerja berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 3 April 2012 yang dikenakan bunga sesuai dengan USD LIBOR ditambah 3,5% per tahun dan memiliki tanggal jatuh tempo sampai 10 Januari 2020. Pada tanggal penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit ini, Portco masih dalam proses perpanjangan tanggal jatuh tempo perjanjian pinjaman ini sampai 10 Januari 2021.

Piutang kepada PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri merupakan piutang investasi antara TKCM dan TBN yang digunakan untuk keperluan pembiayaan terkait proyek peningkatan kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA). Piutang ini tidak dikenakan bunga dan dapat ditagih sewaktu-waktu sehingga disajikan sebagai piutang jangka pendek pada tanggal pelaporan.

Manajemen tidak melakukan pembentukan penyisihan penurunan nilai atas piutang tersebut karena manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut akan tertagih.

Nature of transactions with related parties (continued)

The details of the balance of transactions with related parties are as follows:

Due from PT Intisentosa Alambahtera represents working capital receivable based on Shareholder Loan Agreement dated April 3, 2012, bears interest at USD LIBOR plus 3.5% per annum and have maturity date until January 10, 2020. As of the issuance date of these audited financial statements, Portco is still in the process of extending the maturity date of these loan agreements until January 10, 2021.

Due from PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri represents investment receivables between TKCM and TBN used in financing the project of uprating production capacity of Water Treatment Plant (WTP). This receivable is not subject to interest and repayable on demand so that it was presented as current receivable as at the reporting dates.

Management does not provide any allowance for impairment of this receivable due to the management believes that such receivable is collectible.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

35. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Kompensasi jangka pendek manajemen kunci

Grup memberikan kompensasi jangka pendek kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp29.783.058.340 dan Rp20.011.369.531 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

35. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Key management's short-term compensation

The Group provided compensation short-term benefits for the Boards of Commissioners and Directors amounting to Rp29,783,058,340 and Rp20,011,369,531 for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

36. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Grup menghitung dan mengakui cadangan imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 270 dan 251 karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

36. POST- EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

The Group calculated and recognized post-employment benefit liabilities in accordance with the Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to the benefits were 270 and 251 employees as of December 31, 2020 and 2019.

Cadangan imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Post-employment benefit liabilities recognized in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	60.547.539.716	48.203.142.503	Present value of defined benefit obligation
Beban imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai beban langsung dan beban umum dan administrasi adalah:			Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of the post-employment benefit expenses as direct cost and general and administrative expense are as follows:
	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Biaya jasa kini	7.077.293.278	5.526.780.001	Current service costs
Biaya bunga	3.452.652.587	2.904.174.416	Interest costs
Kelebihan pembayaran	21.538.929	288.337.698	Excess payment
Penyesuaian kewajiban akibat pengakuan masa kerja lalu	2.324.488.996	(244.070.705)	Adjustment due to past service
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang diakui	242.790.454	(318.521.818)	Actuarial loss/(gain) recognized
Jumlah	13.118.764.244	8.156.699.592	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

36. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Saldo awal	48.203.142.503	38.177.096.358
Beban tahun berjalan dicatat ke laba rugi	13.118.764.244	8.156.699.592
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain	1.101.504.038	3.583.282.096
Pembayaran tahun berjalan	(1.854.332.139)	(1.425.597.845)
Kelebihan pembayaran	(21.538.930)	(288.337.698)
Saldo akhir	60.547.539.716	48.203.142.503

Dampak akibat dari setiap satu persen perubahan dari asumsi tingkat diskonto dan kenaikan gaji terhadap nilai kini kewajiban pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Kenaikan 1%/ Increase 1%	Penurunan 1%/ Decrease 1%
Tingkat diskonto	(2.997.157.502)	3.377.295.132
Kenaikan gaji	3.443.440.084	(3.108.845.115)

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan dari nilai kini dari liabilitas program imbalan pasti di tahun-tahun mendatang:

	2020
Dalam waktu 12 bulan mendatang	13.013.364.741
Antara 2 hingga 5 tahun	15.306.220.005
Antara 5 hingga 10 tahun	28.972.364.902
Lebih dari 10 tahun	57.440.449.108

Pada 31 Desember 2020, rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan adalah 13,21 tahun.

Imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen. Asumsi kunci yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Tingkat diskonto per tahun	6,55%	7,65%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6,00%	10,00%
Tingkat kematian	TMI IV - 2019	TMI - 2011
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun
Pensiun dini/pengunduran diri	5% pada usia 40 tahun ke bawah dan berkurang secara proporsional menjadi 0% pada usia 55 tahun/ 5% below 40 years and will linearly decrease until 0% at 55 years of age	10% pada usia 40 tahun ke bawah dan berkurang secara proporsional menjadi 0% pada usia 55 tahun/ 10% below 40 years of age and will linearly decrease until 0% at 55 years of age
Tingkat cacat	5% dari tingkat kematian	5% of mortality rate

36. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)

Movements in the liability for post-employment benefits recognized in the consolidated statement of financial position are as follows:

Beginning balance
Expenses during the year to profit or loss
Other comprehensive income/(loss)
Payment during the year
Excess payment
Ending balance

A one percentage change in the assumption of discount rate and wages and salary increase to the present value of benefit obligation at December 31, 2020 would have the following effects:

Discount rate
Wages and salary increase

The following payments are expected contributions to the present value of defined benefit plan in future years:

Within the next 12 months
Between 2 and 5 years
Between 5 and 10 years
Beyond 10 years

As of December 31, 2020 the weighted average duration of the post-employment benefit liabilities is 13.21 years.

The post-employment benefit for the year ended December 31, 2020 and 2019 were calculated by an independent actuary, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

Discount rate per annum
Salary increment rate per annum
Mortality rate
Normal retirement age
Early retirement/resignation

Disability rate

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI

Perusahaan

- (i) Pada tanggal 20 September 2017, Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Jaka Tingkir Express dengan total jumlah pinjaman sebesar Rp33.000.000.000, tingkat bunga 11,5% per tahun, dengan jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut.
- (ii) Pada tanggal 15 April 2020, Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Dahan Karya Bertunas dengan total pinjaman sebesar Rp5.000.000.000, tanpa bunga, dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut.

Entitas anak

a. PT Makassar Metro Network ("MMN") sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara ("BMN")

- (i) Dalam keputusannya No. 276/KPTS/1994 tanggal 26 Agustus 1994, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah memberikan izin kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) untuk menyelenggarakan tol Ujung Pandang dalam ikatan usaha patungan dengan MMN.

Berdasarkan Akta No. 322 tanggal 29 Agustus 1994 dari Notaris Mestariy Habie, S.H., MMN mengoperasikan jalan tol selama 30 (tiga puluh) tahun untuk tahap pertama sedangkan tahap kedua akan diatur kemudian dengan ketentuan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sejak dioperasikannya jalan tol baik sebagian atau seluruhnya.

MMN setuju bahwa setelah berakhirnya masa penyelenggaraan jalan tol, maka jalan tol dan fasilitas yang berada dalam daerah milik jalan langsung dengan serta merta kembali kepada Jasa Marga. Jasa Marga berhak untuk mengoperasikan dan memelihara jalan tol tanpa wajib menyerahkannya atau membayarkannya kepada MMN.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY

The Company

- (i) On September 20, 2017, the Company provided loan to PT Jaka Tingkir Express with a total loan amounting to Rp33,000,000,000, an interest rate of 11.5% per annum, with a period of 4 (four) years from the signing of the agreement.
- (ii) On April 15, 2020, the Company provided loan to PT Dahan Karya Bertunas amounting to Rp5,000,000,000, bears no interest, with a period of 3 (three) years from the signing of the agreement.

Subsidiaries

a. PT Makassar Metro Network ("MMN") formerly PT Bosowa Marga Nusantara ("BMN")

- (i) In its decision No. 276/KPTS/1994 dated August 26, 1994, the Minister of Public Working of the Republic of Indonesia has given permission to PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) to have a joint operation with MMN pertinent to the operational of Ujung Pandang toll road.

Based on Deed No. 322 dated August 29, 1994 of Mestariy Habie, S.H., MMN has the rights to operate toll road for 30 (thirty) years for the first phase and the second phase will be rearranged later on that it will be less than 30 (thirty) years since one or the whole part of the toll road operation.

MMN agreed that after the end period of toll operation, then all the toll road and its facilities in the area will be handed over to Jasa Marga. Jasa Marga has the right to operate and to maintain the toll road without any obligation to hand over or pay to the MMN.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

**a. PT Makassar Metro Network ("MMN")
sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara
("BMN") (lanjutan)**

Perjanjian kontrak kerjasama tersebut berlaku untuk tol seksi I, II dan III. Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 402/KPTS/M/2010 tanggal 12 Juli 2010 menetapkan dan menyetujui untuk mengeluarkan tol seksi III dari ruang lingkup kewajiban MMN tanpa merubah tarif awal dan masa konsesi.

Berdasarkan surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor JL. 01.03-Mn/518 tanggal 21 September 2005, dan pengumuman pemenang tender investasi jalan tol dari Departemen Pekerjaan Umum nomor JL.01.03-PB/69 tanggal 27 September 2005, ditetapkan bahwa pemenang tender investasi jalan tol ruas Makassar seksi IV adalah MMN.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang jalan tol, Pemerintah telah menyerahkan sebagian wewenang jalan tol kepada Departemen Pekerjaan Umum diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan yang sebelumnya dikelola oleh JM. Atas hal tersebut, MMN diwajibkan untuk mengganti Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Pada tanggal 31 Agustus 2010, MMN mengadakan PPJT dengan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Perjanjian No. 02/PPJT/VIII/KE/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang dinyatakan dalam Akta No. 23 dari Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2010. Dalam perjanjian ini, BPJT menunjuk dan memberikan kepada MMN hak melaksanakan jalan tol ruas Ujung Pandang Seksi I dan II dengan masa konsesi hingga tanggal 12 April 2028.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

**a. PT Makassar Metro Network ("MMN")
formerly PT Bosowa Marga Nusantara
("BMN") (continued)**

The joint contract agreement applied for the toll sections I, II, and III, respectively. According to the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. 402/KPTS/M/2010 dated July 12, 2010 determined and agreed to take out the toll road section III from the scope of MMN liability without changes the initial tariff and concession.

Based on the letter from the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. JL. 01.03-Mn/518 dated September 21, 2005, and the tender bid winner announcement from Public Works Department No. JL. 01.03-PB/69 dated September 27, 2005, MMN was appointed as the winner for Makassar toll road section IV investment tender.

Under Law No. 38 year 2004 concerning roads and Government Regulation No. 25 concerning toll roads, the Government has transferred part of the toll road authority to the Department of Public Works which is represented by the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) relating to the regulation, concessionaire and control that previously conducted by JM. Above this matter, MMN is required to replace Operational Authority Agreement (PKP) to Toll Road Concessionaire Agreement (PPJT).

On August 31, 2010, MMN entered into PPJT with BPJT of the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia with Agreement Letter No. 02/PPJT/VIII/KE/2010 dated August 31, 2010 with notary Deed No. 23 of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta, dated August 31, 2010. In this agreement, BPJT appointed and granted MMN to operate Ujung Pandang Section I and II toll road with concession period until April 12, 2028.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

**a. PT Makassar Metro Network ("MMN")
sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara
("BMN") (lanjutan)**

- (ii) Pada 1 Juni 2012, MMN dan PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) melakukan perjanjian kerjasama penggunaan uang elektronik berbentuk kartu untuk pembayaran tol. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.
- (iii) Pada tanggal 9 Mei 2016, MMN dan PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) melakukan perjanjian kerjasama penggunaan uang elektronik berbentuk kartu untuk pembayaran tol. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini.
- (iv) Pada tanggal 21 Agustus 2017, MMN dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Mandiri) melakukan perjanjian kerjasama penggunaan uang elektronik berbentuk kartu untuk pembayaran tol. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini.
- (v) Pada tanggal 23 Oktober 2017, MMN mendapatkan Keputusan Menteri dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. JL.03.04-Mn/1132 tanggal 23 Oktober 2017. Dalam Surat Keputusan ini, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia menetapkan perubahan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol ruas Ujung Pandang Seksi I dan II dengan masa konsesi hingga tanggal 12 April 2043. Bersamaan dengan ini, MMN dan BPJT segera melakukan amandemen terhadap Akta Perjanjian Jalan Tol Ujung Pandang Seksi I dan II, nomor 23, tanggal 31 Agustus 2010.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

**a. PT Makassar Metro Network ("MMN")
formerly PT Bosowa Marga Nusantara
("BMN") (continued)**

- (ii) On June 1, 2012, MMN and PT Bank Central Asia Tbk (BCA) entered into agreement in the electronic form of money card for toll payment. This agreement is valid for a period of 10 years from the signing date until May 31, 2022.
- (iii) On May 9, 2016, MMN and PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) entered into an agreement in the electronic form of money card for toll payment. This agreement is valid for a period of 10 years from the signing of this agreement.
- (iv) On August 21, 2017, MMN and PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Mandiri) entered into an agreement in the electronic form of money card for toll payment. This agreement is valid for a period of 3 years from the signing of this agreement.
- (v) On October 23, 2017, MMN obtained Minister Decree from Ministry of Public Works Republic Indonesia with Minister Decree No. JL.03.04-Mn/1132 dated October 23, 2017. In that Minister Decree, Ministry of Public Works Republic Indonesia granted an amendment of Toll Road Concession Plans for Ujung Pandang Section I and II with concession period until April 12, 2043. Along with this agreement, MMN and BPJT will revise the previous Deed of Agreement for Ujung Pandang Section I and II Toll Roads, number 23, dated August 31, 2010.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

a. PT Makassar Metro Network ("MMN") sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara ("BMN") (lanjutan)

(vi) Pada tanggal 2 April 2018, MMN mengadakan perjanjian dengan PT Wijaya Karya Beton Tbk yang merupakan kontraktor utama untuk struktur pembangunan Jalan Tol Pettarani di Makassar dengan nilai kontrak sebesar Rp1.623.814.821.677.

(vii) Pada tanggal 26 Mei 2020, MMN melakukan perubahan perjanjian dengan PT Wijaya Karya Beton Tbk yang merupakan kontraktor utama untuk struktur pembangunan Jalan Tol Pettarani di Makassar dengan nilai awal kontrak sebesar Rp1.623.814.821.677 menjadi Rp1.667.679.750.239. Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah pembayaran yang sudah dilakukan kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebesar Rp1.526.991.761.210.

b. PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")

(i) JTSE mengadakan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (DPU), sebagai pemegang hak Jalan Tol Ruas Makassar Seksi IV, dengan Surat Perjanjian bernomor 190/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006. Dalam perjanjian ini, DPU menunjuk dan memberikan kepada JTSE, hak untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol atas nama pemerintah dan menyelenggarakan manajemen jalan tol dengan risiko dan biaya yang ditanggung sendiri oleh JTSE dengan masa konsesi selama 35 tahun, termasuk masa pembangunannya. Selama masa operasi, JTSE wajib melaksanakan pemeliharaan dan menyediakan asuransi sebagai perlindungan aset jalan tol. Selain hal tersebut, JTSE selama masa konsesi dapat memanfaatkan ruang milik jalan tol untuk penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas. Pada akhir masa pengusahaan jalan tol, JTSE akan menyerahkan jalan tol tersebut kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

a. PT Makassar Metro Network ("MMN") formerly PT Bosowa Marga Nusantara ("BMN") (continued)

(vi) On April 2, 2018, MMN entered into an agreement with PT Wijaya Karya Beton Tbk as the primary contractor for the structure of the construction of Pettarani Toll Road in Makassar with contract value of Rp1,623,814,821,677.

(vii) On May 26 2020, MMN changed the agreement with PT Wijaya Karya Beton Tbk as the primary contractor for the structure of the construction of Pettarani Toll Road in Makassar with initial contract value of Rp1,623,814,821,677 to Rp1,667,679,750,239. As of December 31, 2020, total payment to PT Wijaya Karya Beton Tbk was amounting to Rp1,526,991,761,210.

b. PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")

(i) JTSE entered into a Toll Road Concessionaire Agreement with the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia (DPU) as the right holder of Makassar Section IV Toll Road through Agreement Letter No. 190/PPJT/V/Mn/2006 dated May 29, 2006. In this agreement, DPU appointed and assigned JTSE to develop and to operate the toll road on behalf of the government and to conduct toll road management at its own risk and cost for a concession period of 35 years including construction period. During the operation period, JTSE has to maintain and to provide insurance coverage to the toll road. Moreover, during the concession period, the subsidiary was entitled to place an advertisement, utilities and/or utilities building in the toll road area. At the expiry of the concession period, JTSE should hand-over the toll road to The Toll Road Authority (BPJT).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

b. PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") (lanjutan)

- (ii) Pada 1 Juni 2012, JTSE dan PT Bank Central Asia, Tbk (BCA), melakukan perjanjian kerjasama penggunaan uang elektronik berbentuk kartu untuk pembayaran tol. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")

- (i) BSD mengadakan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Jalan Tol dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Jasa Marga"), sebagai pemegang hak Jalan tol ruas Pondok Aren-Serpong, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 183 tanggal 19 Desember 1996 dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam perjanjian ini, Jasa Marga menunjuk dan memberi wewenang kepada BSD sebagai pengembang tunggal untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol atas nama Jasa Marga serta menyelenggarakan manajemen jalan tol dengan risiko dan biaya yang ditanggung sendiri oleh BSD selama 28 tahun, termasuk masa pembangunannya.

Selama masa operasi, BSD wajib membayar kepada Jasa Marga sejumlah persentase tertentu dari hasil jalan tol setiap bulannya. Jasa Marga telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. S543/MK.16/1996 tanggal 25 Oktober 1996 untuk mengadakan Perjanjian tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang jalan tol, Pemerintah telah menyerahkan sebagian wewenang jalan tol kepada Kementerian Pekerjaan Umum diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berkaitan dengan pengaturan, perusahaan dan pengawasan yang sebelumnya dikelola oleh Jasa Marga. Atas hal tersebut, BSD diwajibkan untuk mengganti PKP menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

b. PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") (continued)

- (ii) On June 1, 2012, JTSE and PT Bank Central Asia Tbk (BCA), entered into an agreement in the electronic form of money card for toll payment. This agreement is valid for a period of 10 years from the signing date until May 31, 2022.

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")

- (i) BSD entered into a Toll Road Operational Authority Agreement with PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Jasa Marga") as the right holder of the Pondok Aren - Serpong toll road section, which was notarized by Deed No. 183 dated December 19, 1996 of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta. Based on the agreement, Jasa Marga appointed and authorized BSD to develop and operate the toll road on behalf of Jasa Marga and to manage the toll road operation for 28 years, including the construction period, at BSD's own risk and cost.

During the operation of the toll road, BSD has to pay to Jasa Marga a certain percentage from the monthly toll road revenues. Jasa Marga has received approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. S543/MK.16/1996 dated October 25, 1996 to arrange that agreement.

Based on Law No. 38 year 2004 concerning the roads and Government Regulation No. 25 on the toll roads, the Government has submitted part of the toll road authority to the Ministry of Public Works, which is represented by the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) relating to the regulation, concessionaire and control that were previously managed by Jasa Marga. On this matter, BSD is required to replace the PKP into Toll Road Concession Agreement (PPJT).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2010, BSD mengadakan PPJT (Perjanjian Pengusaha Jalan Tol) dengan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Perjanjian bernomor 01/PPJT/VIII/KE/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang dinyatakan dalam Akta No. 22 tanggal 31 Agustus 2010 dari Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam perjanjian ini, BPJT menunjuk dan memberikan kepada BSD hak melaksanakan jalan tol ruas Pondok Aren - Serpong dengan masa konsesi hingga tanggal 1 Oktober 2028.

Selama masa operasi, BSD wajib melakukan:

- 1) Pemeliharaan sesuai dengan standar pelayanan minimum ditetapkan oleh BPJT;
- 2) Pelebaran jalan dan pembangunan simpang susun sesuai dengan rencana bisnis BSD atau permintaan BPJT (dengan syarat dan kondisi tertentu);
- 3) Jalan akses sesuai dengan permintaan BPJT (dengan kondisi tertentu); dan
- 4) Menyediakan asuransi sebagai perlindungan aset jalan tol.

Selain hal tersebut, BSD, selama masa konsesi, dapat memanfaatkan ruang milik jalan tol untuk penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas. Pada akhir masa pengusahaan jalan tol, BSD akan menyerahkan jalan tol tersebut kepada BPJT.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (continued)

On August 31, 2010, BSD entered into a PPJT (Perjanjian Pengusaha Jalan Tol) with the BPJT of the Ministry of Public Works of Republic of Indonesia with Agreement Letter No. 01/PPJT/VIII/KE/2010 dated August 31, 2010 with Notarial Deed No. 22 dated August 31, 2010 from Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta. In this agreement, BPJT appoints and grants BSD rights to operates Pondok Aren - Serpong toll road with concession period until October 1, 2028.

During the operation, BSD has obligations to conduct:

- 1) Maintenance in accordance with minimum service standards set by BPJT;
- 2) Road widening and construction of interchanges in accordance with BSD business plan or request from BPJT (with certain terms and conditions);
- 3) Construction of access roads in accordance with the request from BPJT (with certain conditions); and
- 4) Provides insurance as a toll road asset protection.

In addition, BSD, during the concession period, is able to use toll road's space for advertisement, utility and/or utility building. At the end of the concession period, BSD will hand over the toll road to BPJT.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (lanjutan)

(ii) Berdasarkan "Berita Acara Kesepakatan Atas Perubahan Lingkup Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Pondok Aren - Serpong" No 73/BA-DIRR/2008 tanggal 15 Mei 2008, BSD dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sepakat untuk menunjuk penilai independen untuk menentukan besaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol Pondok Aren - Serpong yang harus dibayarkan oleh BSD kepada Jasa Marga. Berdasarkan notulen rapat tanggal 6 April 2010 yang dihadiri perwakilan dari BSD dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, disepakati terhitung mulai Maret 2010, BSD akan melakukan pembayaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol kepada Jasa Marga sesuai tingkat persentase bagi hasil sebesar 5,98% dari pendapatan tol untuk ruas jalan tol Pondok Aren - Serpong. Tingkat persentase bagi hasil tersebut ditetapkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Hutama Penilai, berdasarkan laporannya tanggal 2 November 2009.

(iii) Pada tanggal 17 April 1997, BSD dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") mengadakan perjanjian sewa tanah milik KAI seluas 43.088,41 m² selama 5 tahun dari tanggal 17 April 1997 sampai dengan tanggal 17 April 2002. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan *addendum* perpanjangan perjanjian sewa tanah tanggal 23 Maret 2007, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (continued)

(ii) Based on the "Berita Acara Kesepakatan Atas Perubahan Lingkup Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Pondok Aren - Serpong" No. 73/BA-DIRR/2008 dated May 15, 2008, BSD and PT Jasa Marga (Persero) Tbk. agreed to assign an independent appraiser to determine fees of operation and maintenance of toll road section Pondok Aren - Serpong which should be pay by the BSD to Jasa Marga. Based on the minutes of meeting dated April 6 2010, which was attended by representatives of BSD and PT Jasa Marga (Persero) Tbk., it is agreed that, starting March 2010, BSD will pay to Jasa Marga for toll road operation and toll road maintenance fees based on profit sharing percentage at rate of 5.98% of toll road revenue for section Pondok Aren - Serpong. Such profit sharing percentage was determined based on the calculation from PT Hutama Penilai, on its report dated November 2, 2009.

(iii) On April 17, 1997, BSD and PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") has entered into land rental agreement for an area of 43,088.41 m² land for 5 years commencing on April 17, 1997 until April 17, 2002. The agreement can be extended according to both parties' agreement. Based on the addendum of rent agreement dated March 23, 2007, both parties agreed to extend the maturity of rental until October 16, 2011.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (lanjutan)

Berdasarkan "Perjanjian Sewa Lahan di Jalur Kereta Api" No. 22/BSDT/PKS/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, BSD dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") menyepakati harga dari sewa lahan milik KAI sebesar Rp3.530.931.250 dan berdasarkan perjanjian "Pengawasan Keamanan Operasional Jalur Kereta Api" No. 023/BSDT/PKS/VI/2016, BSD dikenakan biaya pengawasan operasional pada lahan milik KAI sebesar Rp564.506.250. Harga sewa tersebut untuk masa pemanfaatan tanggal 17 Oktober 2011 sampai tanggal 31 Maret 2016 dan masa perjanjian ini berakhir pada tanggal 16 Oktober 2016.

Berdasarkan kontrak nomor KL01/IV/15/KA-2017 dan nomor KL701/IV/13/KA-2017 tanggal 11 April 2017, BSD dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") menyepakati untuk memperpanjang masa sewa lahan milik KAI sebesar Rp4.316.070.001 dan BSD dikenakan biaya pengawasan operasional pada lahan milik KAI sebesar Rp683.930.000. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2021.

- (iv) Pada 31 Oktober 2008, BSD dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, melakukan perjanjian kerjasama penggunaan uang elektronik berbentuk kartu untuk pembayaran tol. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2008 sampai dengan 31 Oktober 2018.

- (v) Berdasarkan Notulen Rapat Kerjasama Integrasi Sistem Pembayaran Transaksi Non Tunai di Jalan Tol bersama antara manajemen BSD dengan 5 bank yang mengikuti program transaksi pembayaran tol secara elektronik, seluruh pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian terkait pembayaran biaya bersama untuk investasi gerbang tol otomatis. Perjanjian kerjasama ini efektif untuk menggantikan perjanjian sebelumnya antara BSD dengan masing-masing bank yang telah berakhir pada 30 Oktober 2018.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (continued)

Based on agreement "Perjanjian Sewa Lahan di Jalur Kereta Api" No. 22/BSDT/PKS/VI/2016 dated June 27, 2016, BSD and PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") agreed the cost of rental land amounting to Rp3,530,931,250 and based on agreement "Pengawasan Keamanan Operasional Jalur Kereta Api" No. 023/BSDT/PKS/VI/2016, BSD was charged for supervision operational cost on PT KAI rented land amounting Rp564,506,250. Cost of rental for the period started on October 17, 2011 until March 31, 2016 and this agreement period ended on October 16, 2016.

Based on contract number KL01/IV/15/KA-2017 and KL701/IV/13/KA-2017 dated April 11, 2017, BSD and PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") agreed to extend rent land period of KAI amounting to Rp4,316,070,001 and BSD is charged for supervision operational cost on PT KAI rented land amounting Rp683,930,000. This agreement will be ended on October 16, 2021.

- (iv) On October 31, 2008, BSD and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, make an agreement in the electronic form of money card for toll payment. This agreement lasts for a period of 10 years from the date of October 31, 2008 until October 31, 2018.

- (v) Based on the Minutes of the Joint Meeting on the Integration of the Non-Cash Transaction Payment System on the Joint Toll Road between BSD's management and the 5 banks that participated in the electronic toll payment transaction, all parties agreed to enter into an agreement regarding the payment of joint fees for automatic toll gate investment. This collaboration agreement is effective to replace the previous agreement between BSD and each bank which ended on October 30, 2018.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (lanjutan)

- (vi) Pada bulan Januari 2019, Perusahaan dan PT Marga Trans Nusantara, PT Adhi-Acset, PT Mitra Pacific Consulindo International, PT Cinere Serpong Jaya, PT Waskita Karya, dan PT Virama Karya, menandatangani Berita Acara Kesepakatan Operasional Bersama pada Jalan Tol Jakarta - Serpong KM 08+200 sampai dengan 10+00 Arah (A) dan (B) dan membatalkan Berita Acara Kesepakatan Operasional Bersama pada Jalan Tol Jakarta - Serpong KM 09+100-09+300 Arah B antara Perusahaan dengan PT Marga Trans Nusantara dengan nomor 002/BA-BSDT/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017. Perusahaan mengadakan kesepakatan untuk keperluan jalan keluar/masuk proyek pembangunan jalan tol JORR II Ruas Kunciran - Serpong dan ruas Serpong Cinere. Pada tanggal 8 Desember 2019 jalan tol ruas Kunciran - Serpong sudah selesai dan mulai beroperasi.

d. PT Inpolo Meka Energi ("IME")

- (i) Pada tanggal 28 Desember 2009, IME melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Lau Gunung, Sumatera Utara.

Dalam perjanjian tersebut, IME akan membangun PLTM Lau Gunung dengan kapasitas terpasang sebesar 2x5 MW, yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya untuk pembangunan, pengujian dan *commissioning* serta pengoprasian dan pemeliharaan.

Selanjutnya IME setuju untuk menjual seluruh tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTM Lau Gunung kepada PLN sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati. Kerjasama ini akan berlangsung sampai dengan 20 tahun, terhitung dari pertama kali energi listrik disalurkan dari PLTM Lau Gunung kepada PLN yang telah dimulai pada tanggal 16 Desember 2020.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (continued)

- (vi) In January 2019, the Company and PT Marga Trans Nusantara, PT Adhi-Acset, PT Mitra Pacific Consulindo International, PT Cinere Serpong Jaya, PT Waskita Karya, and PT Virama Karya, signed the Minutes of Joint Operational Agreement on the Jakarta - Serpong KM Toll Road 08+200 to 10+00 Directions (A) and (B) and cancel the Minutes of Joint Operational Agreement on the Jakarta-Serpong Toll Road 09+100 to t09+300 Direction B between the Company and PT Marga Trans Nusantara with number 002/BA-BSDT/VII/2017 dated July 19, 2017. The company entered into an agreement for the purpose of the exit / entry for the JORR II toll road construction project for the Kunciran - Serpong and Serpong Cinere sections. On December 8, 2019 the Kunciran - Serpong toll road had been completed and began operations.

d. PT Inpolo Meka Energi ("IME")

- (i) On December 28, 2009, IME entered into Electrical Power Sales Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) for Minihydro Power Plant (PLTM) at Lau Gunung, North Sumatera.

In the agreement, IME shall build PLTM Lau Gunung with installed capacity of 2x5 MW which includes design, engineering, cost of construction, testing and commissioning as well as operation and maintenance.

Furthermore, IME agrees to sell the entire power which is generated by PLTM Lau Gunung to PLN in accordance with the agreed terms and conditions. This co-operation will take place until 20 years, valid from the first time the power is channeled from PLTM Lau Gunung to PLN which has started on December 16, 2020 .

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

d. PT Inpola Meka Energi ("IME") (lanjutan)

Sampai dengan tanggal posisi laporan keuangan konsolidasian, telah dilakukan tujuh kali adendum yang mengubah kesepakatan terkait jangka waktu pelaksanaan pembangunan yang disepakati dalam perjanjian induk.

- (ii) Pada tanggal 5 Mei 2014, IME menandatangani Perjanjian Penyediaan Jasa Pemborongan dengan PT PP (Persero) Tbk, pihak ketiga, terkait pembangunan PLTM Lau Gunung. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 540 hari kalender, terhitung sejak pelunasan uang muka proyek dan pengurusan perizinan yang diperlukan.

Sampai dengan tanggal posisi laporan keuangan konsolidasian, telah dilakukan enam kali adendum yang mengubah kesepakatan terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian induk menjadi 1684 hari kalender, terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua syarat dimulainya pekerjaan.

- (iii) Pada tanggal 8 Desember 2017, IME menandatangani surat perjanjian penyediaan jasa dengan PT Sullindo Putra Timur untuk pekerjaan *Tunnel* Dalam rangka Paket pekerjaan Sipil Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Lau Gunung.

Sampai dengan tanggal posisi laporan keuangan konsolidasian, telah dilakukan tiga kali adendum yang mengubah kesepakatan terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian induk menjadi menjadi selambat-lambatnya pada 31 Juli 2020.

- (iv) Pada tanggal 19 April 2013, IME menandatangani surat perjanjian kerja dengan PT Wahana Adya Engineering Consultant (Wahana) untuk pekerjaan *Soil & Rock Investigation* untuk Detail Engineering Design PLTM Lau Gunung yang telah diubah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 014/PT.WAHANA/SPK/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

d. PT Inpola Meka Energi ("IME") (continued)

As of completion date of consolidated Financial Statements, the agreement has been amended over seven times which have changed approved construction timeline as stated in the master agreement.

- (ii) On May 5, 2014, IME entered into Provision of Chartering Services agreement with PT PP (Persero) Tbk, third party, regarding to construction of PLTM Lau Gunung. Period of services is for 540 calendar days valid from the settlement of project advance and license required.

As of completion date of consolidated Financial Statements, the agreement has been amended over six times which have changed approved construction timeline in the master agreement to 1684 calendar days, starting from the date all conditions for the commencement of work are fulfilled.

- (iii) On 8 December 2017, IME entered into a service agreement with PT Sullindo Putra Timur for Tunnel work in order for civil work Package of the project of Hydroelectric power plant of Lau Gunung.

As of completion date of consolidated Financial Statements, the agreement has been amended over three times which have changed approved construction timeline in the master agreement to the latest July 31, 2020.

- (iv) On April 19, 2013, IME entered into a work agreement with PT Wahana Adya Engineering Consultant (Wahana) for Soil & Rock Investigation to Detail Engineering Design of PLTM Lau Gunung project which has been amended with work agreement No. 014/PT. WAHANA/SPK/VII/2013 dated July 25, 2013.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Entitas anak (lanjutan)

Subsidiaries (continued)

d. PT Inpolo Meka Energi ("IME") (lanjutan)

d. PT Inpolo Meka Energi ("IME") (continued)

- (v) Pada tanggal 11 Oktober 2013, IME menandatangani surat perjanjian kerja No. 016/TGP/SPK/X/2013 dengan PT Tata Guna Patria (TGP) untuk pekerjaan pengawasan proyek PLTM Lau Gunung.
- (vi) Pada tanggal 1 Juli 2014, IME menandatangani surat perjanjian kerja No. 001/IME-PER/DIR/VII/2014 dengan PT Bangun Nusantara Engineering (BNE) untuk pekerjaan penyiapan peralatan elektrik dan mekanikal proyek PLTM Lau Gunung.
- (vii) Pada tanggal 8 Desember 2017, IME menandatangani surat perjanjian penyediaan jasa dengan PT Sullindo Putra Timur untuk pekerjaan Tunnel Dalam rangka Paket pekerjaan Sipil Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Lau Gunung dengan No kontrak 001/IME-SPT/XII/2017.
- (ix) Pada tanggal 21 Juli 2016, IME menandatangani surat perjanjian *Hydro Power Plant Supply Contract On Shore* Lau Gunung dengan PT Global Hydro Indonesia untuk pekerjaan penyerahan peralatan listrik Dalam rangka pembelian turbin Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung.
- (x) Pada tanggal 21 Juli 2016, IME menandatangani surat perjanjian *Hydro Power Service Contract* dengan PT Global Hydro Indonesia untuk pekerjaan jasa instalasi, pekerjaan komisioning, dan penanganan transport lokal Dalam rangka pembelian turbin Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung.
- (xi) Pada tanggal 8 Mei 2019, IME menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan PT Bintang Teknik Bersaudara untuk pekerjaan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 6 Km untuk titik transaksi dan titik interkoneksi dengan PT PLN (Persero) dengan nomor kontrak 003.SPK/BTB-IME/IV/2019.

- (v) On October 11, 2013, IME entered into a work agreement No. 016/TGP/SPK/X/2013 with PT Tata Guna Patria (TGP) for Control of PLTM Lau Gunung project.
- (vi) On July 1, 2014, IME entered into a work agreement No. 001/IME-PER/DIR/VII/2014 with PT Bangun Nusantara Engineering (BNE) for providing electrical and mechanical of PLTM Lau Gunung project.
- (viii) On December 8, 2017, IME entered into a service agreement with PT Sullindo Putra Timur for Tunnel work in order for civil work Package of the project of Hydro electric power plant of Lau Gunung with work agreement No. 001/IME-SPT/XII/2017.
- (ix) On July 21, 2016, IME signed a contract agreement on *Hydro Power Plant Supply Contract On Shore* Lau Gunung with PT Global Hydro Indonesia for the work of delivering electrical equipment in order for turbine devices procurement of the project of Hydro electric power plant of Lau Gunung.
- (x) On July 21, 2016, IME signed a contract agreement on *Hydro Power Service Contract* with PT Global Hydro Indonesia for work on installation services, commissioning work, and local transport handling in order for turbine devices procurement of the project of Hydro electric power plant of Lau Gunung.
- (xi) On May 8, 2019, IME entered into a work agreement with PT Bintang Teknik Bersaudara for a 6 Km Voltage Intermediate Air Channel Development (SUTM) jobs for transaction points and interconnection points with PT PLN (Persero) with work agreement No. 003.SPK/BTB-IME/IV/2019.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

e. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL")

Pada tanggal 5 September 2016, RPSL melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat dengan perjanjian No.0085.PJ/HKM.00.01/WKB/2016 atau No.006/RPSL/PNK/IX/2016.

RPSL akan membangun PLTBm 10 MW Siantan dengan kapasitas terpasang sebesar 1x10 MW, yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian, pelaksanaan, fasilitas interkoneksi, titik transaksi, fasilitas khusus, sistem pengukuran, dan pengamanan.

Selanjutnya, RPSL setuju untuk menjual 10 MW tenaga listrik yang diproduksi atau dihasilkan dari PLTBm PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari kepada PLN sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati. Kerjasama ini akan berlangsung sampai dengan 20 tahun sejak tanggal operasi komersial.

f. PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC")

Pada tanggal 24 April 2012, DCC menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Air Bersih dengan PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM) dengan jangka waktu 20 tahun (belum termasuk waktu pembangunan). Dalam perjanjian tersebut, DCC akan membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) di atas tanah KIM seluas 8.873,68 m² dengan bentuk kerjasama *Build Operate Transfer* (BOT) dengan kesepakatan volume air bersih yang disalurkan di titik penyerahan minimum sebesar 250.000 m³/bulan dengan harga Rp5.800 per m³ (tidak termasuk PPN).

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

e. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL")

On September 5, 2016, RPSL made an Electrical Power Purchase Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) for Biomass Power Plant (PLTBm) at Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Pontianak, West Kalimantan, No.0085.PJ/HKM.00.01/WKB/2016 or No.006/RPSL/PNK/IX/2016.

RPSL will build PLTBm 10 MW Siantan with 1x10 MW of installed capacity, which includes the design, engineering, supply costs, construction, testing, commissioning, interconnection facility, transaction point, special facility, measurement system, and secure.

Furthermore, RPSL agrees to sell 10 MW power which produced or generated from PLTBm PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari to PLN accordance with the terms and conditions agreed. This cooperation will take up to 20 years since generating Commercial Operation Date.

f. PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC")

On April 24, 2012, DCC entered into Cooperation Agreement regarding Treated Water Supply to PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM) for period of 20 years (excluding construction phase). The agreement states that DCC shall build a Water Treatment Plant (WTP) on the land owned by KIM of 8,873.68 m² under Build Operate Transfer (BOT) scheme. Both parties agree the minimum supply of treated water volume at transfer point is 250,000 m³/month at price of Rp5,800 per m³ (excluding VAT).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

f. PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC") (lanjutan)

Selanjutnya, DCC wajib membangun IPA jika kebutuhan air KIM telah melebihi 250.000 m³/bulan dengan harga yang akan dievaluasi dan disesuaikan sebesar 10% setiap 3 tahun atau setiap terjadinya kenaikan tarif listrik, BBM dan lainnya yang mempengaruhi langsung biaya produksi. DCC dan KIM sepakat untuk hanya menggunakan air permukaan sungai Deli dan sumber air permukaan lainnya di area KIM dengan kapasitas maksimum sebesar 1.000 liter/detik.

Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang namun jika tidak diperpanjang, DCC harus secara otomatis menyerahkan seluruh sarana dan prasarana serta IPA kepada KIM.

Perjanjian ini tidak memasukkan adanya opsi pembaharuan perjanjian kecuali terjadinya keadaan kahar sesuai yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut. Pengakhiran perjanjian dapat dilakukan jika KIM tidak melaksanakan pembayaran, DCC tidak menyalurkan air bersih atau salah satu pihak mengalami kepailitan sesuai yang dijelaskan dalam perjanjian.

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK")

- (i) Perjanjian Pertahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pendistribusian Air Bersih.

Berdasarkan perjanjian tanggal 29 November 1995 perihal Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) II Serang dan SCTK yang diwakili oleh STR, yang telah diubah pada tanggal 24 Desember 2013, tentang Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi meliputi pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan, dan Pendistribusian Air Bersih, SCTK dan PDAM sepakat untuk/bahwa:

- 1) Memanfaatkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 100 liter/detik yang akan diserap hingga tahun 2015.
- 2) Membangun IPA berkapasitas 175 liter/detik pada tahun 2014 yang akan terserap habis hingga tahun 2018.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

f. PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC") (continued)

Furthermore, DCC is obliged to build WTP when KIM water demand has exceeded 250,000 m³/month. The price will be evaluated and adjusted at 10% in every 3 years or at the time of the increase in electricity, fuel and other tariffs which affect production costs directly. DCC and KIM agreed to use surface water from Deli river and other surface sources around KIM area with a maximum capacity of 1,000 liters/seconds.

The term of this agreement can be prolonged, but if it is not, DCC will transfer all of its assets to KIM, automatically.

The agreement is excluded of any agreement renewal option unless the corresponding force majeure described in the agreement. The agreement shall terminated if KIM does not made payment, DCC does not deliver treated water or one of the parties is insolvent as described in the agreement.

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK")

- (i) Agreement on work phasing out of the Development, Operation, Management System for Water Supply and Distribution.

Based on the agreement dated November 29, 1995 regarding to Cooperation Agreement between the Regional Water Company (PDAM) II Serang and SCTK, which represented by STR, which has been amended on December 24, 2013, concerning on implementation stage on concession development such as Construction, Operation, Management System, and distribution of Water Supply, SCTK and PDAM agreed to/that:

- 1) Utilize Water Treatment Plant (WTP) capacity of 100 litres/second and absorb the capacity until 2015.
- 2) Build WTP with capacity of 175 litres/second in 2014 and fully absorb the capacity until 2018.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK") (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian tanggal 29 November 1995 perihal Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) II Serang dan SCTK yang diwakili oleh STR, yang telah diubah pada tanggal 24 Desember 2013, tentang Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi meliputi pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan, dan Pendistribusian Air Bersih, SCTK dan PDAM sepakat untuk/bahwa: (lanjutan)

- 3) Membangun IPA berkapasitas 100 liter/detik pada tahun 2018 yang akan terserap habis hingga tahun 2021.
- 4) Jangka waktu Perjanjian Konsesi untuk pembangunan IPA yang ada dengan kapasitas 100 liter/detik adalah 30 tahun, dimulai tanggal 1 Juni 1996 dan berakhir pada tanggal 30 Mei 2026.
- 5) Jangka waktu Amandemen Perjanjian Konsesi adalah selama 25 tahun sejak selesainya pembangunan IPA tahap I pada tahun 2014 dan akan berakhir pada tahun 2039.
- 6) SCTK wajib membayar pajak air baku kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp100,98 per m³.
- 7) SCTK memberikan bagian air yang terjual setiap bulannya kepada PDAM sebesar 2% dari setiap kubik air yang terjual.
- 8) PDAM berhak menerima royalti air berupa curah secara cuma-cuma sebesar 7,5% dari volume penjualan ke industri.
- 9) Menyerahkan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan seluruh fasilitas sistem penyediaan air minum SCTK kepada PDAM saat perjanjian kerjasama ini berakhir.
- 10) Mengelola sumber air baku untuk diproduksi dan didistribusikan untuk memenuhi kapasitas produksi sebesar 375 liter/detik, dan dapat ditingkatkan atas persetujuan para pihak apabila kapasitas dan ketersediaan air baku memungkinkan.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK") (continued)

Based on the agreement dated November 29, 1995 regarding to Cooperation Agreement between the Regional Water Company (PDAM) II Serang and SCTK, which represented by STR, which has been amended on December 24, 2013, concerning on implementation stage on concession development such as Construction, Operation, Management System, and distribution of Water Supply, SCTK and PDAM agreed to/that: (continued)

- 3) Build a WTP with capacity of 100 litres/second in 2018 and fully absorb the capacity until 2021.
- 4) The Concession Agreement period for the existing WTP with capacity of 100 litres/second is for 30 years, began on June 1, 1996 and will expires on May 30, 2026.
- 5) The Amendment of Concession Agreement period is for 25 years valid from the completion of first phase WTP in 2014 and will expire in 2039.
- 6) SCTK shall pay raw water tax to Regency Government amounting to Rp100.98 per m³.
- 7) SCTK shall provide grants to PDAM on monthly basis, 2% from each cubic meter of water sold.
- 8) PDAM entitled to receive royalty in bulk water for free, 7.5% from sales volume to industrial customers.
- 9) Hand over in good condition and fully operating the entire of SCTK's water treatment system facility to PDAM when the agreement expires.
- 10) Manages the source of raw water to be produced and distributed to meet production capacity of 375 liters/second and can be increased based on all parties approval if the capacity and availability of raw water are possible.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK") (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian tanggal 29 November 1995 perihal Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) II Serang dan SCTK yang diwakili oleh STR, yang telah diubah pada tanggal 24 Desember 2013, tentang Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi meliputi pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan, dan Pendistribusian Air Bersih, SCTK dan PDAM sepakat untuk/bahwa: (lanjutan)

- 11) Tarif air minum ditetapkan Bupati Serang berdasarkan usulan SCTK dan rekomendasi dari PDAM.
- 12) Pengalihan saham SCTK pada perusahaan baru, ke afiliasi SCTK atau ke pihak lain yang menyebabkan kepemilikan saham SCTK secara keseluruhan berkurang dari 51%, harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PDAM.

(ii) Perjanjian Pengembangan Penyediaan Air Bersih Serang Timur

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Januari 1999 antara STR dan JSNM tentang Pengembangan Penyediaan Air Bersih di Serang Timur dengan kapasitas sampai dengan 100 liter per detik, STR dan JSNM menyepakati kerjasama dalam pengolahan dan pendistribusian air bersih di Serang Timur sesuai dengan ketentuan-ketentuan di perjanjian kerjasama.

Pada tanggal 2 Desember 2013, SCTK dan STR sepakat untuk mengakhiri perjanjian pelimpahan wewenang atas pengolahan air di Serang tertanggal 20 November 1995. Dengan berakhirnya perjanjian pelimpahan wewenang tersebut, maka Perjanjian Kerjasama antara STR dan JSNM juga berakhir. Selanjutnya, pengolahan dan pendistribusian air bersih di Serang Timur menjadi wewenang SCTK.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK") (continued)

Based on the agreement dated November 29, 1995 regarding to Cooperation Agreement between the Regional Water Company (PDAM) II Serang and SCTK, which represented by STR, which has been amended on December 24, 2013, concerning on implementation stage on concession development such as Construction, Operation, Management System, and distribution of Water Supply, SCTK and PDAM agreed to/that: (continued)

- 11) Drinking water tariff is determined by Serang Regent based on SCTK proposal and PDAM recommendation.
- 12) Transfer of SCTK's shares to new entity, to SCTK affiliated or other parties which will cause SCTK ownership to be less than 51%, must obtain written approval first from PDAM.

(ii) Water Supply Development Agreement East Serang

Based on the Cooperation Agreement dated January 14, 1999 between STR and JSNM regarding to Development of Water Supply in East Serang with capacity up to 100 litres per second, STR and JSNM agreed to cooperate in management and distribution of treated water in East Serang Timur with terms as stated in cooperation agreement.

As of December 2, 2013, SCTK and STR agreed to terminate the right transfer agreement of water management in Serang dated November 20, 1995. After the termination, Cooperation Agreement between STR and JSNM was terminated. Then, right of management and distribution of treated water in East Serang was transferred to SCTK.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas asosiasi

h. PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM)

TKCM menandatangani Perjanjian Kerjasama ("PKS") dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang ("PDAM") pada tanggal 11 Juni 2004 dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan air minum, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun kontinuitas dengan melakukan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Instalasi Pengelolaan Air ("IPA") Cikokol. PKS ini efektif dan berlaku selama 15 tahun sejak tanggal ditandatanganinya PKS.

PKS TKCM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 21 Juni 2017, TKCM dan PDAM menandatangani amandemen keempat dan pernyataan kembali atas PKS dengan perubahan sebagai berikut:

1. Perpanjangan jangka waktu PKS dari sebelumnya 15 tahun sejak tanggal awal PKS menjadi 20 tahun sejak tanggal perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 21 Juni 2037.
2. Perubahan ruang lingkup pekerjaan terkait peningkatan kapasitas produksi instalasi dari 1.275 Liter/detik menjadi 1.575 Liter/detik.
3. Menetapkan besaran investasi atas peningkatan kapasitas produksi sebagaimana diatur dalam PKS.
4. Menyesuaikan tarif tetap dan variabel atas air curah olahan hingga akhir masa PKS yang akan disesuaikan setiap tiga tahun untuk menjaga tingkat pengembalian modal internal sebagaimana ditentukan dalam PKS.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Associated entity

h. PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM)

TKCM entered into a Cooperation Agreement ("CA") with Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang ("PDAM") on 11 June 2004 with the objectives to improve the supply of potable water, in terms of quality, quantity and continuity by managing the Cikokol Water Treatment Plant ("WTP"). This CA was effective and valid for 15 years since the signing date of the CA.

CA TKCM has been amended several times, most recently on 21 June 2017, TKCM and PDAM signed the fourth amendment and restatement to the CA with the following changes:

1. The extension of CA's period which previously 15 years from the date of original CA to become 20 years from this agreement date and will be expired on 21 June 2037.
2. The changes of scope of work related to uprating of the plant's production capacity from the existing 1,275 Litre/second to 1,575 Litre/second.
3. To determine the amount of investment related to uprating of the plant's production capacity as stipulated in the CA.
4. To adjust the fixed and variable tariffs of bulk treated water until the end of CA's period which will be rebased every three years to maintain an internal return rate as stipulated in the CA.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. INFORMASI SEGMENT

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, Grup menggunakan segmen usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki enam segmen operasi yang dilaporkan berupa jasa pengelola jalan tol, investasi, pelabuhan, air bersih, energi dan menara telekomunikasi.

Informasi konsolidasian berdasarkan segmen usaha dan segmen geografis adalah sebagai berikut:

38. SEGMENT INFORMATION

Based on the financial information used by management in evaluating segment performance and determining the allocation of its resources, the Group uses business segments based on products and services and has six operating segments are reported in the form of toll road management services, investment, ports, water, energy and telecommunications towers.

Consolidated information based on business segments and geographical segments are as follows:

31 Desember 2020/December 31, 2020									
Segmen Usaha	Jasa pengelola jalan tol/ Toll road operator services	Investasi/ Investment	Pelabuhan/ Port	Penyediaan air/ Water supply	Energi/ Energy	Telekomunikasi/ Telecommunication	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation	Business Segment
Pendapatan dan penjualan	1.373.555.585.855	-	-	73.904.030.355	122.659.689.751	-	-	1.570.119.305.961	Revenues and sales
Beban segmen	(1.124.369.216.338)	-	-	(34.637.184.191)	(73.694.642.134)	-	-	(1.232.701.042.663)	Segment cost and expenses
Hasil segmen (Bruto)	249.186.369.517	-	-	39.266.846.164	48.965.047.617	-	-	337.418.263.298	Segment results (Gross)
Beban umum dan administrasi	(84.907.218.798)	(15.682.139.891)	(5.275.890.937)	(31.886.497.237)	(26.999.117.174)	(2.385.507.181)	(5.561.308.104)	(172.697.679.322)	General and administrative expenses
Penghasilan keuangan	5.557.343.102	105.410.659.555	2.317.504.285	2.818.075.385	615.261.094	2.087.952.848	(95.409.034.117)	23.397.762.152	Financial income
Beban keuangan	(44.060.413.049)	(4.341.291.946)	(14.873.868)	(8.645.986.865)	(11.157.405.611)	(158.088.313)	6.746.010.146	(61.632.049.506)	Financial cost
Bagian atas laba entitas asosiasi	43.189.949.528	-	(3.324.937.316)	1.249.545.592	-	-	-	41.114.557.804	Equity in net income of associates
Pendapatan (beban) lain-lain	(16.983.139.663)	(5.628.386.784)	186.379.157	(534.660.515)	187.085.923	(599.290.507)	(8.584.556.891)	(31.956.569.280)	Other operating income (expense)
Laba sebelum pajak	151.982.890.637	79.758.840.934	(6.111.818.679)	2.267.322.524	11.610.871.849	(1.054.933.153)	(102.808.888.966)	135.644.285.146	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	(19.010.314.890)	(455.475.505)	-	(563.794.180)	(2.992.814.967)	-	-	(23.022.399.542)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	132.972.575.747	79.303.365.429	(6.111.818.679)	1.703.528.344	8.618.056.882	(1.054.933.153)	(102.808.888.966)	112.621.885.604	Profit for the year
Informasi lainnya:									Other information:
Aset segmen	4.476.152.407.571	2.642.399.664.033	161.163.968.205	413.797.149.318	721.577.099.791	86.317.956.674	(2.654.724.852.843)	5.846.683.392.749	Segment assets
Liabilitas segmen	1.973.499.809.962	210.966.541.761	-	89.848.157.051	397.957.900.712	1.379.506.827	(182.076.412.335)	(2.491.575.503.978)	Segment liabilities
Perolehan/(pelepasan) aset tetap	3.038.789.527	195.600.000	-	278.872.783	93.741.874.833	-	-	97.255.137.143	Acquisition/(disposal) of property, plant, and equipment

31 Desember 2020/December 31, 2020							
Segmen Geografis	Jabodetabek	Makassar	Medan	Serang	Pontianak	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan	192.389.116.933	1.184.680.389.756	20.272.738.637	50.931.337.453	122.572.119.544	(726.396.362)	1.570.119.305.961
Aset segmen	4.969.036.748.726	2.976.406.441.205	540.062.179.732	213.428.582.658	237.102.091.183	(3.089.352.650.755)	5.846.683.392.749
Aset pajak tangguhan	1.111.523.443	-	3.192.636.604	1.457.602.566	-	-	5.761.782.613
Liabilitas segmen	485.753.619.433	1.946.039.521.038	390.258.445.621	130.913.639.941	104.409.881.939	(565.799.603.994)	2.491.575.503.978
Liabilitas pajak tangguhan	10.899.175.818	52.605.935.370	-	-	3.846.976.872	-	67.352.088.060

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi konsolidasian berdasarkan segmen usaha dan segmen geografis adalah sebagai berikut: (lanjutan)

38. SEGMENT INFORMATION (continued)

Consolidated information based on business segments and geographical segments are as follows: (continued)

31 Desember 2019/December 31, 2019									
Segmen Usaha	Jasa pengelola jalan tol/ Toll road operator services	Investasi/ Investment	Pelabuhan/ Port	Penyediaan air/ Water supply	Energi/ Energy	Telekomunikasi/ Telecommunication	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation	Business Segment
Pendapatan dan penjualan	1.361.752.087.314	-	-	89.634.002.905	141.208.674.249	-	-	1.592.594.764.468	Revenues and sales
Beban segmen	(1.046.126.695.231)	-	-	(41.580.386.349)	(70.400.484.294)	-	-	(1.158.107.565.874)	Segment cost and expenses
Hasil segment (Bruto)	315.625.392.083	-	-	48.053.616.556	70.808.189.955	-	-	434.487.198.594	Segment results (Gross)
Beban umum dan administrasi	(52.202.673.758)	(46.982.193.407)	(3.599.415.399)	(23.018.735.735)	(26.838.705.271)	(2.852.959.396)	(1.770.000.000)	(157.264.682.966)	General and administrative expenses
Penghasilan keuangan	17.956.467.055	12.863.532.714	2.458.820.234	4.328.209.481	952.600.060	8.934.683.884	(14.262.492.558)	33.231.820.770	Financial income
Beban keuangan	(58.662.090.064)	(4.463.064.349)	(12.908.176)	(11.325.636.202)	(15.030.074.813)	(169.549.029)	19.581.255.349	(70.082.067.284)	Financial cost
Bagian atas laba entitas asosiasi	64.948.742.629	153.628.097.360	5.861.849.630	4.727.817.602	-	-	(153.628.097.361)	75.538.409.860	Equity in net income of associates
Pendapatan (beban) lain-lain	(12.003.423.980)	5.264.730.783	(2.528.334.388)	(1.414.901.856)	1.347.861.269	(1.322.446.639)	(5.417.222.702)	(16.073.737.513)	Other operating income (expense)
Laba sebelum pajak	275.662.413.965	120.311.103.101	2.180.011.901	21.350.369.846	31.239.871.200	4.589.728.820	(155.496.557.372)	299.836.941.461	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	(56.352.801.774)	(30.323.475.152)	-	(2.199.088.805)	(5.594.842.199)	-	-	(94.470.207.930)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	219.309.612.191	89.987.627.949	2.180.011.901	19.151.281.041	25.645.029.001	4.589.728.820	(155.496.557.372)	205.366.733.531	Profit for the year
Informasi lainnya:									Other information:
Aset segmen	3.537.337.649.391	2.481.185.632.300	167.327.345.097	422.129.439.991	634.472.206.508	88.491.854.414	(2.253.544.348.392)	5.077.399.779.309	Segment assets
Liabilitas segmen	1.554.971.213.243	81.896.908.545	141.797.667	98.416.798.769	335.996.839.979	2.535.030.856	(190.345.632.998)	1.883.612.956.061	Segment liabilities
Perolehan/(pelepasan) aset tetap	6.085.574.136	842.783.046	-	4.745.573.765	184.419.855.700	1.129.669.400	-	197.223.456.047	Acquisition/(disposal) of property, plant, and equipment
31 Desember 2019/December 31, 2019									
Segmen Geografis	Jabodetabek	Makassar	Medan	Serang	Pontianak	Eliminasi	Konsolidasian		Geographic Segment
Pendapatan	230.722.066.894	1.134.493.999.156	27.867.781.301	59.094.941.843	141.208.674.249	(792.698.975)	1.592.594.764.468		Revenues
Aset segmen	4.324.244.248.236	2.108.060.963.517	439.053.815.467	221.747.108.444	238.637.972.037	(2.253.544.348.392)	5.077.399.779.309		Segment assets
Aset pajak tangguhan	2.005.443.520	-	2.809.748.567	1.541.133.354	-	-	6.356.325.441		Deferred tax assets
Liabilitas segmen	405.334.146.858	1.119.600.469.424	286.158.334.681	140.532.323.012	122.333.315.084	(190.345.632.998)	1.883.612.956.061		Segment liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	10.387.237.099	57.686.642.703	-	-	2.606.712.108	-	70.680.591.910		Deferred tax liabilities

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja Grup, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi Grup dalam menjalankan usahanya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko di Grup adalah untuk menjaga dan melindungi Grup melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh manajemen Grup.

Grup memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti: risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas.

a. Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar dan Arus Kas

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar dan arus kas masa datang dari instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Considering that good risk management practice implementation could better support the performance of the Group, hence, risk management would always be an important supporting element for the Group in operating its business. The target and main purpose of the implementation of risk management practices in the Group is to maintain and protect the Group through managing the risk of losses, which might arise from its various activities as well as maintaining risk level in order to match with the direction already established by the management of the Group.

The Group has exposure to the following risk from financial instruments, such as: credit risk, interest risk, and liquidity risk.

a. Interest Rate Risk on Fair Value and Cash Flow

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar dan Arus Kas (lanjutan)

Eksposur Grup terhadap suku bunga timbul dari pinjaman bank. Pinjaman bank pada suku bunga variabel tersebut mempengaruhi arus kas Grup atas risiko suku bunga yang sebagian saling hapus dengan kas yang ditempatkan pada suku bunga variabel. Untuk meminimalisir risiko suku bunga, Grup mengatur biaya bunga dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen melakukan penilaian terhadap suku bunga yang ditawarkan bank untuk memperoleh suku bunga yang paling menguntungkan sebelum mengambil keputusan sehubungan dengan penempatan dan mengadakan perjanjian pinjaman baru.

b. Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Selain itu, pendapatan dan pengeluaran Grup hampir seluruhnya diterima dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah.

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif terutama *cross currency swaps* untuk mengelola liabilitas Grup sesuai dengan kebijakan keuangan Grup.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit dihadapi Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan tertentu. Grup memberikan pembayaran secara kredit hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel.

Selain itu, saldo piutang dimonitor secara berkelanjutan dengan tujuan bahwa eksposur Grup terhadap piutang yang tidak tertagih tidak signifikan.

Kas dan setara kas ditempatkan pada lembaga keuangan yang teratur dan bereputasi. Eksposur maksimal atas risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat dari setiap jenis aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Interest Rate Risk on Fair Value and Cash Flow (continued)

The Group exposure to the interest rate risk arises from bank loans. Bank loans at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk which is partially offset by cash held at variable rates. To minimize interest rate risk, the Group manages interest cost by evaluating market rate trends. Management conducts assessments among interest rates offered by banks to obtain the most favorable interest rate before taking any decision in relation to its placements and to enter a new loan agreement.

b. Currency Risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates. Revenues and expenditures of the Group almost entirely received and paid in Rupiah.

The Group uses derivative financial instruments, principally cross currency swaps to manage Group's liabilities in accordance with the Group's treasury policies.

c. Credit Risk

Credit risk is the risk where one of the parties on a financial instrument will fail to meet its obligations, leading to a financial loss. Credit risk faced by the Group was derived from credits granted to certain customers. The Group only provides credit terms with recognized and credible third parties.

In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group's exposure to bad debts is not significant.

Cash and cash equivalents are placed in financial institutions which are regulated and reputable. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statement of financial position.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Kredit (lanjutan)

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020/December 31, 2020		31 Desember 2019/December 31, 2019		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Maksimum eksposur/ Maximum exposure	Nilai tercatat/ Carrying value	Maksimum eksposur/ Maximum exposure	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	366.324.551.448	366.324.551.448	590.392.899.081	590.392.899.081	Cash and cash equivalents
Aset keuangan tersedia untuk dijual	43.850.751.128	43.850.751.128	59.833.735.184	59.833.735.184	Available for sale financial asset
Piutang usaha - Pihak ketiga	28.669.489.858	28.669.489.858	27.773.654.022	27.773.654.022	Trade receivables - Third parties
Piutang non-usaha - Pihak ketiga	69.041.624.556	69.045.405.378	42.175.033.743	42.175.033.743	Non-trade receivables - Third parties
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	29.173.932.000	29.173.932.000	24.589.844.319	24.589.844.319	Restricted cash in banks
Jumlah	537.060.348.990	537.064.129.812	744.765.166.349	744.765.166.349	Total

d. Risiko Likuiditas

Manajemen telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk pengelolaan dana jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan cadangan yang memadai dan dengan terus memantau rencana dan realisasi arus kas dengan cara pencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2020:

	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total	
Utang usaha	102.299.576.629	-	102.299.576.629	Trade payables
Utang non-usaha	38.553.579.392	-	38.553.579.392	Non-trade payables
Beban akrual	161.019.708.427	-	161.019.708.427	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	2.680.932.702	1.326.971.616	4.007.904.318	Consumer financing liabilities
Pinjaman jangka panjang	166.445.524.606	1.838.418.598.811	2.004.864.123.417	Long-term loans
Jumlah	470.999.321.756	1.839.745.570.427	2.310.744.892.183	Total

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Credit Risk (continued)

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

d. Liquidity Risk

The management has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves and by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The table below represents the maturity schedule of the Group financial liabilities based on undiscounted contractual payments as of December 31, 2020:

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Risiko Permodalan (lanjutan)

Tujuan utama Grup dalam mengelola permodalan adalah melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Dengan demikian, Grup dapat memberikan imbal hasil yang memadai kepada para pemegang saham serta juga sekaligus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Dalam mengelola permodalan tersebut, manajemen senantiasa memperhatikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas. Penyesuaian terhadap struktur keuangan dilakukan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Di samping itu, kebijakan diarahkan untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat guna mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Dalam memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menerbitkan saham baru, mengusahakan pendanaan melalui pinjaman, melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada ataupun menjual aset untuk mengurangi pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses terhadap manajemen permodalan selama periode penyajian.

Berikut adalah *gearing ratio* yang merupakan perbandingan antara jumlah liabilitas (dikurangi kas dan setara kas) terhadap jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (lanjutan)

e. Capital Risk (continued)

The primary objective of the Group in managing capital is to protect the Group's ability to maintain business continuity. Accordingly, the Group can provide adequate returns to shareholders as well as providing benefits to other stakeholders.

In managing capital, management always pay attention to maintain a healthy capital ratio between the total liabilities and equity. Adjustments to the financial structure are based on changing economic conditions and risk characteristics of the underlying asset. In addition, a policy geared to maintain a healthy capital structure for securing access to funds at reasonable cost.

In maintaining and adjusting its capital structure, the Group may issue new shares, seek financing through loans, restructuring of existing debt or sell assets to reduce borrowing. There was no change in the objectives, policies and processes to capital management during the presentation.

The following is a *gearing ratio* which is the ratio between the total debt (net of cash and cash equivalents) to total equity as of December 31, 2020 and 2019.

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Pinjaman	2.008.872.027.735	1.359.916.316.440	Debts
Kas dan setara kas	(366.324.551.448)	(590.392.899.081)	Cash and cash equivalents
Pinjaman - bersih	1.642.547.476.287	769.523.417.359	Net debt
Ekuitas	3.355.107.888.771	3.193.786.823.248	Equity
Rasio pinjaman - bersih terhadap modal	0,49	0,24	Net debt to equity

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 68, "Pengakuan Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Pengukuran nilai wajar Tingkat 1 yang diperoleh dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik;

Pengukuran nilai wajar Tingkat 2 yang diperoleh dari input selain dari harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

Pengukuran nilai wajar Tingkat 3 yang diperoleh dari teknik penilaian yang memasukkan input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
ASET		
Kas dan setara kas	366.324.551.448	590.392.899.081
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual	43.850.751.128	59.833.735.184
Piutang usaha	28.741.489.858	27.845.654.022
Piutang non-usaha	126.756.542.956	81.920.310.199
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	29.173.932.000	24.589.844.319
Jumlah	594.847.267.390	784.582.442.805

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
LIABILITAS		
Utang usaha	102.299.576.629	22.843.937.711
Utang non-usaha	38.553.579.392	32.177.466.597
Beban akrual	161.019.708.427	308.345.408.931
Utang pembiayaan konsumen	4.007.904.318	7.241.359.452
Pinjaman jangka panjang	2.004.864.123.417	1.352.674.956.988
Jumlah	2.310.744.892.183	1.723.283.129.679

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Fair Value of Financial Instruments Estimation

The fair value of financial assets and liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purpose.

PSAK 68, "Fair Value Measurement" requires disclosures of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and

Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The fair value of financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant, are as follows:

ASSETS
Cash and cash equivalent
Financial assets available for sale
Trade receivables
Non-trade receivables
Restricted cash in banks
Total

LIABILITIES
Trade payables
Non-trade payables
Accrued expenses
Consumer financing liabilities
Long-term loans
Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**40. PENGKLASIFIKASIAN KEMBALI INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN SEBELUMNYA**

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Rincian akun-akun signifikan yang direklasifikasi adalah sebagai berikut:

**40. CLASSIFICATION OF PREVIOUS FINANCIAL
REPORT INFORMATION**

Certain accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2019 have been reclassified to conform with the presentation of financial statements for the year ended December 31, 2020. The details of the significant accounts reclassified are as follows:

**31 Desember 2019 / 31 Desember 2019
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut/
and For The Year Ended**

	Dilaporkan sebelumnya Previously Reported	Penyesuaian penyajian kembali Restated	Diklasifikasikan kembali Reclassification	
PENDAPATAN				REVENUE
Pendapatan usaha				Other operating
lainnya	-	18.905.252.329	18.905.252.329	revenue
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Pendapatan/(beban)				Other operating
usaha lain-lain	2.831.514.816	(18.905.252.329)	(16.073.737.513)	income/(expenses)

Reklasifikasi dilakukan mempertimbangkan bahwa kontribusi pendapatan sewa lahan dan iklan yang merupakan bagian dari operasional jalan tol semakin meningkat, manajemen memutuskan untuk mencatat pendapatan tersebut sebagai bagian dari pendapatan usaha. Pendapatan iklan dan sewa lahan telah sesuai dengan lingkup kegiatan utama pada Anggaran Dasar Grup.

Reclassification is carried out considering that the contribution of land lease and advertising revenue which is part of toll road operations is increasing, management decided to record this income as part of operating revenues. Advertisement and land rent income is in accordance with the main scope of activities in the Group's Articles of Association.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa reklasifikasi akun-akun diatas tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan tahun sebelumnya.

The Company's management believes that the reclassification of the accounts above has no significant effect on the presentation of the previous year's financial statements.

41. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

**41. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH
FLOWS**

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated cash flow statement are as follows:

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payments	Non Kas/ Non-cash	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pinjaman bank jangka panjang	1.352.674.956.988	762.989.031.609	(115.721.540.269)	4.921.675.089	2.004.864.123.417	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	7.241.359.452	-	(3.233.455.134)	-	4.007.904.318	Consumer financing liabilities
	1.359.916.316.440	762.989.031.609	(118.954.995.403)	4.921.675.089	2.008.872.027.735	
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payments	Non Kas/ Non-cash	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Pinjaman bank jangka panjang	1.051.943.975.805	487.995.238.193	(213.232.699.700)	25.968.442.690	1.352.674.956.988	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	4.829.988.176	-	(2.766.160.528)	5.177.531.804	7.241.359.452	Consumer financing liabilities
Beban akrual - biaya emisi saham	5.075.272.628	-	(5.075.272.628)	-	-	Accrued others - share issuance cost
	1.061.849.236.609	487.995.238.193	(221.074.132.856)	31.145.974.494	1.359.916.316.440	

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**41. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS
(lanjutan)**

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:		
Penambahan aset tak berwujud melalui beban akrual, utang usaha, dan kapitalisasi bunga	296.698.918.674	361.586.480.103
Reklasifikasi piutang sewa pembiayaan dari aset tetap	402.241.928.912	-
Penambahan aset tetap melalui uang muka dan utang	11.237.348.152	23.129.999.285
Penambahan aset dalam penyelesaian melalui pinjaman lembaga keuangan (Catatan 22c)	-	25.968.442.690
Konversi utang menjadi saham pada entitas anak melalui novasi (Catatan 1d)	-	15.200.000.000
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen (Catatan 21)	-	5.177.531.804

41. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS (continued)

Significant activities not affecting cash flows:
Addition of asset under construction through accrual, trade payable, and interest capitalization
Reclassification of financial lease receivables from fixed assets
Addition of fixed assets through advance and payables
Addition of asset under construction through loan from financial institution (Note 22c)
Debt conversion to share capital in a subsidiary through novation (Note 1d)
Addition of fixed assets through consumer financing liabilities (Note 21)

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 - Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diotorisasi, Grup masih mengevaluasi dampak potensial penerapan peraturan pelaksana PP 35/2021, termasuk dampaknya pada laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode pelaporan berikutnya.

Pembiayaan kembali pinjaman kepada lembaga pembiayaan

Pada tanggal 29 Desember 2020, Potum, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melalui PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penjamin dengan jumlah pokok tidak lebih dari Rp95.000.000.000.

42. SUBSEQUENT EVENTS

Government Regulation Number 35 Year 2021 - Job Creation Law

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities.

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees.

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impacts of PP 35/2021, including the impacts on the Group's consolidated financial statements for the next reporting period.

Refinancing of loan to financial institution

On December 29, 2020, Potum, a subsidiary, obtained a loan facility from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) through PT Bank Central Asia Tbk as the Guarantor Agent with a principal amount of no more than Rp95,000,000,000.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)**

**Pembiayaan kembali pinjaman kepada lembaga
pembiayaan (lanjutan)**

Fasilitas tersebut terdiri dari :

- Tranche A Rp67.500.000.000 untuk melunasi sisa fasilitas kredit ICBC termasuk pembayaran bunga, penalti, dan biaya lain terkait pelunasan Fasilitas Kredit ICBC
- Tranche B Rp22.750.000.000 untuk melunasi sebagian pinjaman pemegang saham SCTK kepada Potum.
- Tranche C Rp3.000.000.000 untuk mendanai sebagian jumlah minimal *debt service reserve account*.
- Tranche D Rp1.750.000.000 untuk membayar seluruh biaya dan pengeluaran terkait pemberian Fasilitas.

Perjanjian pinjaman antara Potum dan IIF memiliki JIBOR 3 bulan dan margin sebesar 5,1%, dan dengan jaminan sebagai berikut:

- Gadai saham
- Surat Kesanggupan
- Jaminan perusahaan
- Jaminan gadai rekening atas rekening transaksi
- Hak Tanggungan
- Dokumen Jaminan Fidusia
- Perjanjian Pengalihan

Pada tanggal 6 Januari 2021, sesuai dengan Perjanjian Novasi atas Pinjaman, Potum mengalihkan pinjaman tersebut kepada SCTK, entitas anak tidak langsung. Maka segala hak dan kewajiban beralih secara hukum kepada SCTK sejak tanggal efektif sampai dengan 10 tahun ke depan. Tanggal efektif tersebut diartikan saat setelah syarat-syarat perjanjian novasi terpenuhi dan tidak boleh lebih dari 12 bulan setelah tanggal perjanjian ini.

42. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

**Refinancing of loan to financial institution
(continued)**

The facility consists of:

- Tranche A Rp67,500,000,000 to repay the remaining ICBC credit facilities including interest payments, penalties, and other costs related to the repayment of ICBC Credit Facility
- Tranche B Rp22,750,000,000 to repay a portion of SCTK shareholders' loans to Potum
- Tranche C Rp3,000,000,000 to fund a portion of the minimum amount of debt service reserve account.
- Tranche D Rp1,750,000,000 to pay all costs and expenses related to the provision of facilities

The loan agreement between Potum and IIF has a 3-month JIBOR and a margin of 5.1%, and with the following guarantees:

- Mortgage shares
- Letter of Ability
- Company guarantee
- Mortgage guarantee of account on transaction account
- Dependent Rights
- Fiduciary Guarantee Document
- Transfer Agreement

On January 6, 2021, in accordance with the Novation Loan Agreement, Potum transferred the loan to SCTK, an indirect subsidiary. Therefore, all rights and obligations are legally transferred to SCTK from the effective date up to the next 10 years. The effective date shall be defined as after the terms of the novation agreement are fulfilled and must not be more than 12 months after the date of this agreement.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)**

**Pembiayaan kembali pinjaman kepada lembaga
pembiayaan (lanjutan)**

Perjanjian ini berlaku efektif dalam hal syarat-syarat di bawah ini telah terpenuhi :

- i. Penyerahan semua persetujuan korporasi SCTK,
- ii. Penyerahan SIPA (Izin Pengusahaan SDA berdasarkan keputusan menteri Pekerjaan umum dan perumahan rakyat no 364/KPTS/M/2019) yang telah diperbarui mengambil air baku minimal 350 liter/sec dari sungai Ciujung
- iii. Penyerahan semua persetujuan korporasi dari Pemilik Kewajiban
- iv. Pemberi Pinjaman telah menerima pendapat hukum
- v. Pembukaan rekening-rekening BCA oleh SCTK yang akan menggantikan rekening pembayaran kewajiban dan rekening cadangan pembayaran kewajiban setelah terjadinya novasi pinjaman

Sampai dengan penyelesaian tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, syarat-syarat tersebut belum terpenuhi. Pinjaman ini masih dalam tanggung jawab Potum terhitung 12 bulan semenjak perjanjian Potum dengan IIF.

42. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

**Refinancing of loan to financial institution
(continued)**

The agreement is effective in the event that the following conditions have been fulfilled:

- i. Submission of all SCTK corporate approvals,
- ii. Submission of SIPA (SDA Business License based on the decree of the Minister of Public Works and Public Housing no. 364/KPTS/M/2019) which has been updated to take raw water at least 350 litre/sec from Ciujung river
- iii. Submission of all corporate approvals from the Liability Owner
- iv. The Lender has received a legal opinion
- v. Opening of BCA accounts by SCTK that will replace the payment account obligations and reserve account payment obligations after the occurrence of loan novation

Until the completion date of the consolidated financial statements, these required conditions have not been fulfilled. This loan is still in the responsibility of Potum commencing 12 months after Potum's agreement with IIF.

LAPORAN TAHUNAN

2020

ANNUAL REPORT



STRENGTHENING PERFORMANCE CONNECTIVITY to SUPPORT SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2020



Nusantara Infrastructure

PT Nusantara Infrastructure Tbk

Equity Tower 38th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 9
Jakarta 12190 - Indonesia

P. + 62 21 515 0100
F. + 62 21 515 1221

www.nusantarainfrastructure.com